PEMBARUAN PENDIDIKAN ISLAM MENUJU MASYARAKAT MADANI INDONESIA
[Tinjauan Sosio-kultural Historis]

Oleh
Hujair AH. Sanaky
NIM : 980015

T E S I S

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2002

PEMBARUAN PENDIDIKAN ISLAM MENUJU MASYARAKAT MADANI INDONESIA
[Tinjauan Sosio-kultural Historis]

Oleh

Hujair AH. Sanaky
NIM : 980015

Pembimbing :
Prof. H. Imam Barnadib, MA, Ph.D

T E S I S

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2002

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
MAGISTER STUDI ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Laintai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PERSETUJUAN

Tesis berjudul : Pembaruan Pendidikan Islam Menuju Masyarakat Madani Indonesia [Tinjauan Sosio-kultural Historis] yang ditulis oleh : Drs. Hujair AH. Sanaky., telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan tim Penguji Tesis Magister Studi Islam.

Yogyakarta, 18 Desember 2002

Pembimbing,

Prof. H. Imam Barnadib, MA, Ph.D.

JIVERSITAS ISLAM INDONESIA
MAGISTER STUDI ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No : 002/PS-MSI/ND/I/2003

TESIS berjudul : PEMBAHARUAN PENDIDIKAN ISLAM MENUJU MASYARAKAT MADANI INDONESIA (Tinjauan Sosial-kultural Historis)

Ditulis oleh : Drs. Hujair AH Sanaky

NIM : 980015

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Magister Studi Islam (S-2) Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yogyakarta, 4 Januari 2003
Ketua Program,

Drs. H. Amir Mu'allim, MIS

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
MAGISTER STUDI ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Laintai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

TESIS berjudul : **PEMBARUAN PENDIDIKAN ISLAM MENUJU MASYARAKAT MADANI INDONESIA [Tinjauan Sosio-kultural Historis]**

Ditulis oleh : Drs. Hujair AH. Sanaky

N I M : 980015

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Pendidikan Islam.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yogyakarta, 30 Januari 2003

Ketua Program

Drs. H. Amir Mu'allim,MIS.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
MAGISTER STUDI ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Laintai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Nama : Drs. Hujair AH. Sanaky
Tempat/tgl.lahir : Siri Sori Islam, Saparua, 13-08-1954
NIM : 980015

Judul Tesis : PEMBARUAN PENDIDIKAN ISLAM MENUJU MASYARAKAT MADANI INDONESIA (Tinjauan Sosio-kultural Historis)

Ketua : **Drs. H. Amir Mu'allim,MIS.** ( )

Sekretaris : **Drs. H.Asmuni, MA.** ( )

Pembimbing : **Prof.H.Imam Barnadib,MA.,Ph.D.** ( )

Penguji : 1. **Prof.Dr.H.Usman Abu Bakar,MA.** ( )

2. **Drs.H.M.Sarbiran,M.Ed.,Ph.D.** ( )

Diujikan di Yogyakarta pada tanggal, 8 Januari 2003

Pukul 09.00 s/d 10.00 WIB

Hasil/Nilai : 87 / A

Predikat : Lulus dengan Pujian

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ABSTRAK

Konsep masyarakat madani merupakan konsep yang baru dan bukan berakar dari budaya masyarakat Indonesia. Memang diakui, bahwa konsep masyarakat madani [*civil society*] memiliki nilai-nilai universal, sehingga perlu adaptasi dan sosialisasi apabila konsep tersebut akan diwujudkan di Indonesia. Untuk merwujudkan nilai-nilai universal tersebut tergantung dan berakar pada kondisi budaya dan sosial-politik serta perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Tetapi, masyarakat madani tidak dapat tercipta dengan sendirinya, harus diperjuangkan dan dalam perjuangan pembentukan masyarakat madani di Indonesia tidak dapat dilihat berdiri sendiri, tetapi harus ditempatkan dalam komfigurasi global. Maka dalam konteks ini, semua potensi bangsa Indonesia mulai dipersiapkan dan diberdayakan untuk menuju masyarakat madani, dengan harapan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia akan mengalami perubahan secara fundamental yang berbeda dengan kehidupan selama ini yaitu masyarakat yang demokratis.

Masyarakat Indonesia sekarang ini, sedang dalam tahap belajar untuk hidup berdemokrasi dalam arti yang sebenarnya, sehingga memerlukan proses belajar dengan perioritas nilai-nilai tertentu seperti demokrasi, taat hukum, toleransi, akhlak dan moral yang anggun dan tanggungjawab sosial. Pembentukan masyarakat madani Indonesia selain menuntut usaha dari dalam, sekaligus pula menghadapi tantangan-tantangan eksternal dalam era globalisasi dan era informasi. Dengan demikian, pendidikan yang memiliki peran sentral dalam upaya membangun dan mewujudkan masyarakat tersebut haruslah didasarkan pada paradigma-paradigma baru. Demikian pula, pengembangan pendidikan Islam haruslah didasarkan pada paradigma-paradigma baru yang bertolak dari pengembangan manusia yang merdeka dan demokratis, yaitu manusia yang bertaqwa, berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak dan bermoral tinggi, sehingga dapat berkarya dalam kehidupan masyarakat madani secara kompetetif.

Pembaruan pendidikan yang berorientasi pada paradigma masyarakat madani Indonesia perlu dan urgen untuk dikaji, karenanya tesis ini membahas ***Pembaruan Pendidikan Islam Menuju Masyarakat Indonesia (Tinjauan Sosio-kultural Historis).*** Inti masalah dari tesis ini adalah bagaimana konsep dan strategi pembaruan pendidikan Islam untuk masyarakat madani Indonesia. Kemudian penelitian ini merupakan studi literatur atau bersifat *library research*, sehingga data yang diperoleh berasal dari bahan-bahan tulisan dan pemikiran dari para pemerhati, pengamat, ahli pendidikan dan para sosiologi yang terkait dengan permasalahan penelitian ini. Karena penelitian bersifat kualitatif, maka digunakan *content analysis* untuk mendiskripsikan persoalan secara kritis pemikiran dan pandangan dari para ahli pendidikan tentang pembaruan pendidikan Islam dengan menggunakan pendekatan sosio-kultural historis yang dilakukan secara obyektivitas, sistimatis dan digeneralisasi. Penelitian ini lebih ditekankan pada objektivitas dengan analisis tertuju pada bentuk infrastruktur pada "teks" dengan banyak data atau volume dan menggunakan sample *multistage,* karena dokumen yang diteliti cukup banyak. Dengan metode ini diharapkan dapat menemukan konsep pembaruan pendidikan Islam untuk masyarakat madani Indonesia.

Hasil kajian tentang pembaruan pendidikan Islam menuju masyarakat madani Indonesia dapat dikembangkan dari aspek dasar filosofis, visi dan misi, tujuan, kurikulum, metodologi, manajemen pendidikan dan paradigma pendidikan Islam. Kemudian konsep dan strategi pendidikan untuk masyarakat madani Indonesia adalah pendidikan yang memberdayakan manusia dan masyarakat yang unggul.

Filosofis dan teori pendidikan Islam, dikembangkan berdasarkan asumsi-asumsi dasar yang kokoh dan jelas tentang manusia menurut ajaran Islam, karena kerangka dasar utama pendidikan Islam adalah pendidikan yang relevan dengan ajaran Islam, kepentingan umat, konteks dengan supra sistem dalam penerapan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dasar filsafat dan teori pendidikan dan konteks dengan kepentingan manusia dalam kehidupan masyarakat madani Indonesia. Dari makna ini juga tercermin misi, visi dan tujuan pendidikan Islam. Misi dan visi pendidikan Islam tidak terpisahkan dari tugas *kekhalifahan* manusia dalam rangka membangun kehidupan dunia yang makmur, demokrasi, adil, dinamis, harmonis, lestasi, taat hukum, yang didasarkan pada nilai-nilai *ilahiyah.* Maka misi dan visi pendidikan Islam menunjang transformasi menuju masyarakat madani Indonesia yang memiliki identitas berdasarkan nilai-nilai Islam dan budaya Indonesia [misi dan visi makro] dan dapat menghasilkan individu yang religius, memiliki pengetahuan, keterampilan, teknologi, integritas pribadi yang merdeka, demokratis, toleransi kemanusia yang tinggi, taat hokum, hak sasi manusia serta memiliki orientasi global dan berpikir lokal dalam kehidupan masyarakat madani Indonesia [misi dan visi mikro]. Sedangkan, tujuan pendidikan Islam berdasarkan prinsip menyeluruh, serasi, efisien dan efektivitas, dinamis, dan orientasinya harus jelas serta bersifat problematik, strategis, antipatif, menyentuh aspek aplikasi, menyentuh kebutuhan masyarakat dan pengguna lulusan. Intinya pendidikan Islam bertujuan membangun manusia dan masyarakat secara utuh dan menyeluruh dalam semua aspek kehidupan yang dapat membawa perubahan pada kehidupan berbudaya dan perdaban dalam memperoleh kebahagian, kesejahteraan dan keselamatan di dunia dan akhirat.

Kurikulum pendidikan Islam, lebih bersifat problematik, strategis, antipatif dan aplikatif untuk memecahkan problem-problem yang dihadapi umat manusia. Kurikulum pendidikan Islam diorientasikan dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik masa kini, masa akan datang yang berkorelasi dengan pembangunan social, kesejahteraan masyarakat, budaya dengan konteks global, teknologi informasi. Program kurikulum pendidikan Islam, perlu diorientasikan pada *learning competency* (*competency knowledge*, *skill*, *ability* dan sosial-kultural), relevan dengan kebutuhan otonomi daerah dan bersifat lentur serta adaptif terhadap perubahan. Metodologi pendidikan Islam dalam proses belajar mengajar harus menggunakan *learning based, student learning* dan bukan *teaching learning* dan diorientasi pada cara mengaktifan peserta didik, cara untuk menemukan, cara memecahkan masalah dengan menggunakan paradigma holistik, rasional, partisipatori dengan pendekatan emperik deduktif yang akan menjadi kunci pengembangan perserta didik untuk dapat menghasilkan perserta didik yang berkualitas, kreatif, inovatif yang mampu menterjemahkan agama dalam perilaku sosial ditengah kehidupan masyarakat global menuju masyarakat madani. Manajemen pendidikan Islam diorientasikan pada menjamen berbasis sekolah [*school-based management*], desentralisasi dan otonomi sekolah dengan melibatkan orang tua peserta didik, masyarakat dan pengguna lulusan secara aktif dalam pengelolaan pendidikan. Dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan menuntut perencanaan dan langkah-langkah yang sistematis, operasional, pengawasan dan pengendalian secara professional, dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dalam sistem pengelolaan kegiatan manajemen pendidikan Islam.

Perubahan paradigma pendidikan Islam dari paradigma lama yang berorientasi kemasa lalu [abad pertengahan] ke paradigma yang berorientasi ke masa depan, paradigma yang hanya mengawetkan kemajuan keparadigma yang merintis kemajuan, paradigma peodal keparadigma yang berjiwa demokratis, paradigma sentralistik keparadigma desentralistik, proses pendidikan yang berorientasi *teacher centered* ke *student centered*. Perubahan paradigma diharapkan dapat memberikan rekonstruksi terhadap asas-asas mendasar atau arah pendidikan di dalam usaha meletakan dasar yang paling rasional untuk mengubah praksis pendidikan di dalam rangka membangun masyarakat yang demokratis, relegius dan tangguh menghadapi tantangan internal maupun global menuju masyarakat madani Indonesia. Dalam kerangka ini, maka pendidikan Islam dalam masyarakat madani

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Akhirulkalam, dengan penuh rasa rendah hati penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna baik dari segi esensi persoalan, substansi materi, metodologi, maupun kemampuna penulis dalam merekonstruksi pemikiran yang tepat dalam rangka menggambarkan makna dan maksud sesungguhnya. Namun penulis berharap tesis ini bermanfaat bagi penulis dan bagi dunia pendidikan Islam serta seluruh masyarakat.

Yogyakarta, 18 Desember 2002

Penulis

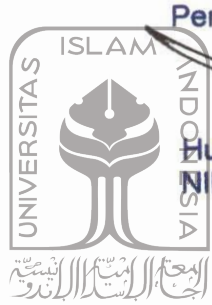

Hujair AH. Sanaky
NIM : 980015

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRACT

The concept of civil society is a new one, which is not basically derived from Indonesian cultural roots. Since the concept is considered having universal values, it is necessary to adapt and socialize into Indonesian society's life. In other words, those universal values should be based on and in line with social, political and cultural conditions, the development of Indonesian society as well. To attain the civil society, it requires an effort, which must be put it on the context of global configuration. The effort, then, has to involve all Indonesian potentiality in such a way as it fundamentally changes into democratic society, different from that of former one.

In fact, Indonesian people currently are in the process of going into a democratic society in such a real sense that, during the process of learning, it needs priority toward certain values, such as democracy, law obedience, tolerance, high morality and character standards, and social responsibility. The establishment of the civil society not only demands an internal attempt, but merely encounters external challenges in respect of globalization and information era. Thus, education in general, which has an important role in the establishment of the civil society, should be designed on the basis of new paradigms. The development of Islamic education in particular should be, then, based on the new paradigms, which develop free and democratic human beings, who are righteous, knowledgeable, skillful, high moral and character standards, in order that they are able to take a position in the civil society competitively.

The education reform, which goes to the new paradigms for civil society in Indonesia, is necessary and urgent to study. Therefore, this thesis describes *The Islamic Education Reform toward Civil Society in Indonesia; A Socio-Cultural-Historical Perspective*. The main problem of the thesis is on how the concept and strategy of Islamic education reform toward the civil society of Indonesia are. Therefore, the study is a qualitative study, which applies *library research.* The data are obtained from opinions of educational experts, observers, and sociologists in relation to the problem of the study. The opinions, then, are critically analyzed by *content analysis* technique objectively and systematically executed through socio-cultural-historical approach. Since the data are relatively large, the study more emphasizes on objectivity, which means that the analysis focuses on the infrastructure form of the texts with *multistage* sample method. By utilizing this method, it is expected that it will find out a concept of Islamic education reform for civil society of Indonesia.

The study of the Islamic education reform towards civil society of Indonesia is developed from basic philosophy, vision and mission, curriculum objectives, methodology, educational management and Islamic education paradigms. The concept and strategy of education for civil society of Indonesia are enforcing excellent human resources.

Philosophy and theory of Islamic education are developed on the basis of strong and vivid assumptions, that is, human beings in accordance with Islamic teaching. In other words, the Islamic education framework must be relevant with Islamic teaching, Muslim's interest, context of supra-system in the application of

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

education philosophy and theory, and context of human's interest in the civil society of Indonesia. These points, thus, reflect vision, mission and objectives of Islamic education. Vision and mission of Islamic education are not separated from the main duty of human beings as vice of Allah in the world (read: *Khalifah*), i.e. to develop world life, which is prosperous, democratic, just, dynamic, harmonious, on the basis of Allah-based values (read: Ilahiyah). Therefore, vision and mission of Islamic education encourage a transformation towards civil society of Indonesia, whose identities are based on, in macro terms, Islamic values and Indonesian culture. In micro level, the vision and mission enable to provide individual, who is religious, knowledgeable, skillful, technology literate, free personal integrity, democratic, tolerant and obedient under law, global-oriented, local thought toward civil society of Indonesia as well. The aim of Islamic education, therefore, is based on the integrated, balance, effective, efficient, dynamic principles, with its vivid orientation. In addition, it should also be problematic, strategic, anticipative, matched with application, society and users' demand. In short, Islamic education aims to develop integrated and entire individual and society' in all aspects of life to bring with change toward culture and civilization in order to obtain happiness, prosperity and safety both in the world and thereafter.

The curriculum of Islamic education should be more problematic, strategic, anticipative and applicable to overcome problems faced by human beings. The curriculum, furthermore, is familiarized and apt with learners' needs present and future, correlated with social development, society's prosperity, and culture with global context and information technology. The curriculum should be oriented to the learning competency, covering competency knowledge, skills, ability, and socio-cultural, relevant with the needs of local autonomy and flexible and adaptive toward change. In methodology of teaching and learning, the Islamic education should utilize *learning based* and *student learning*, and is not teaching based. It is a method to activate learners, discover and solve problems with holistic, rational, and participatory paradigms. The paradigms, then, use the deductive-empirical approach, which will be the key to provide innovative, creative, and qualified learners capable of transforming Islam in their social interaction within global community toward the civil society. In the management, Islamic education is directed to 'school based management', in which it is decentralization and school autonomy actively involving parents, learners, society and school users in the management. Furthermore, it is effectively and efficiently implemented with systematic planning and procedures, professional operation, surveillance and management, which is completely executed within the Islamic education management.

Islamic education should reform its paradigms. The adjustment is expected to provide a reconstruction toward fundamental principles of education. It is, then, in an attempt to establish rational bases in education in order to develop democratic, religious, and distinguished society capable of challenging both national and global world toward civil society. Such paradigms are future-oriented, progressive-oriented, democratic, decentralizing and students centered paradigms from respectively old-oriented, qou-status, feudalistic, centralizing and teachers centered ones. Thus, the Islamic education in civil society of Indonesia is aimed at enforcing democratic and

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

excellent individuals and society through positioning them into subjects within the process of establishment and development of potential talents to produce an excellent generation based on Islamic principles. The characteristics of excellent people are knowledgeable, free, critical, highly hard work, future-oriented, cooperative, innovative, law obedient, tolerant, responsible and rational in their action with *Allah-based devotion.* Obviously, the teaching and learning orientation of Islamic education should be open, interactive and responsible, in which the teaching and learning take place within egalitarian and bottom-up situation. In the teaching and learning situation, then, there will be no force toward learners, but there is more on mutual interaction and dialogue in particular to set up goals, course, teaching and learning and evaluation.

Islamic education should develop an education concept, which attempts to develop qualified human resources with Allah-based values (read: Ilahiyah), humanity (read: Insaniah), society, environment and culture. Accordingly, the Islamic education has to acquire an integral, humanistic, pragmatic and culture-rooted education. The first characteristic of education -the integral concept- is directed to Allah values (read: Rabbaniyah-ilahiah), human values (read: Insaniah) and nature (read: Alamiyah). The second -humanistic one- is a concept, which humanizes the human with appreciating their rights, suffrage, freedom of thought, willing and acting on the basis of human values. The third concept -pragmatic- views human beings as functional ones, who are necessary to survive and develop their life both material and spiritual, and who are aware of their surroundings. And the last concept, i.e. culture-rooted education, is capable of providing excellent, self-confident human beings and of developing culture on the basis of self-culture in line with Allah-based values. In sum, in Islamic education, the developed competency should be based on Allah-based value, knowledge, skill, ability and socio-cultural competencies. And operationally, in the process of education, learners can be integrated with their society, socio-cultural environment, and are actively involving as an agent of change.

At the end, the Islamic education reformation is not due to the temporary needs, but it is more on strategic, well-planned and integrated attempts to improve belief's quality, which is applicable and professional. Education, then, constitutes a process of bringing with, enlightening and declaring learners who are integrated insights. It is also a process of enforcing individual potentiality, providing democratic human beings and producing human beings, who have a commitment toward world peace and environment. Finally, Islamic education should be an attempt to develop relevant and qualified education based on the needs of civil society of Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Pendidikan dan Menteri
Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987
Tanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	–	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	–
ت	tā'	t	–
ث	sā'	s	*s* dengan titik di atasnya
ج	jīm	j	–
ح	hā'	h	*h* dengan titik di bawahnya
خ	khā'	kh	–
د	dāl	d	–
ذ	zāl	z	*z* dengan titik di atasnya
ر	rā'	r	–
ز	zā'	z	–
س	sīn	s	–
ش	syīn	sy	–
ص	sād	s	*s* dengan titik di bawahnya
ض	dād	d	*d* dengan titik di bawahnya
ط	tā'	t	*t* dengan titik di bawahnya
ظ	zā'	z	*z* dengan titik di bawahnya
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	–

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ف	fā'	f	–
ق	qāf	q	–
ك	kāf	k	–
ل	lām	l	–
م	mīm	m	–
ن	nun	n	–
و	wawu	w	–
هـ	hā'	h	–
ء	hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā'	y	–

B. **Konsonan Rangkap**
Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap
أحمديّة ditulis *Ahmadiyyah*

C. **Tā' Marbutah di Akhir Kata**
1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.
جماعة ditulis *jamā'ah*
2. Bila dihidupkan ditulis *t*
كرامة الأولياء ditulis *karāmatul-auliyā'*

D. **Vokal Pendek**
Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. **Vokal Panjang**
A panjang ditulis *ā*, *i* panjang ditulis *ī*, dan *u* panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (–) di atasnya.
Fathah + yā' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*, dan fathah + wāwu mati ditulis *au*.

F. **Vokal-vokal Pendek yang Berurutan** dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (').
أأنتم ditulis *a'antum*
مؤنث ditulis *mu'annas*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanisrrahim

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt, karena atas taufiq dan hidayat-Nya serta 'inayah-Nya, akhirnya tesis ini dapat diselesaikan, walaupun memerlukan waktu yang cukup lama. Selanjutnya shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw beserta sahabat-sahabatnya dan keluarga beliau.

Penulisan tesis yang berjudul **"Pembaruan Pendidikan Islam Menuju Masyarakat Madani Indonesia [*Tinjauan Sosio-kultural Historis*]"**, diawali oleh rasa keprihatian tentang kesiapan pendidikan Islam dalam menghadapi perubahan yang terjadi baik era globalisasi, era informasi dan terutama dalam era reformasi menuju "masyarakat madani" yang dicita-citakan bangsa Indonesia, karena konsep ini merupakan konsep baru dan belum baku untuk masyarakat Indonesia.

Maka untuk meredam rasa keprihatinan ini, penulis bermaksud menelusuri konsep pemikiran dan pandangan tentang pembaruan (modernisasi) pendidikan Islam yang akan diformulasikan dalam suatu konsep pendidikan Islam untuk menuju masyarakat madani Indonesia, dengan harapan hasil penelitian ini sebagai penggugah untuk mengkaji dan meneliti secara mendalam dan komprehensif konsep pembaruan pendidikan Islam dalam menghadapi perubahan menuju masyarakat madani Indonesia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini dapat diselesaikan semata-mata di samping karena pertolongan dari Allah Swt, adalah karena dorongan dan bantuan beberapa pihak. Untuk itu penulis hanya dapat menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesai penulisan tesis ini.

Ucapan terima kasih, pertama-tama penulis sampaikan kepada Bapak Prof. H.Imam Barnadib, MA, Ph.D, yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan

penulis di dalam proses penyelesaian tesis ini. Lebih-lebih mengingat kesibukan dan keterbatasan waktu beliau, tetapi beliau senantiasa memperhatikan, memberi dorongan, bimbingan dan koreksi-koreksi demi penyempurnaan tesis ini.

Selanjutnya terima kasih kepada Bapak Rektor, Pembantu-pembantu Rektor, dan BPSDM Universitas Islam Indonesia yang telah banyak membantu penulis baik dari segi pendanaan maupun dorongan sehingga tugas karyasiswa untuk program S-2 ini dapat terselesaikan. Tak lupa pula, penulis sampaikan terima kasih kepada Dekan dan Pembantu-pembantu Dekan serta seluruh staf Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada penulis hingga berakhirnya tugas studi ini. Terima kasih penulis sampaikan kepada Ketua Program dan semua staf Pascasarjana [S-2] Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia yang banyak membantu dan memberi dorongan kepada penulis. Juga terima kasih penulis sampaikan kepada Kabag Perpustakaan Fakultas Ilmu Agama dan pengelola perpustakaan Program Pascasarja [S-2] Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia yang telah membantu penulis dalam pencarian bahan untuk penulisan tesis ini.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Demikian juga terima kasih kepada para Guru Besar dan para Dosen Program Pascasarjana [S-2] Magister Studi Islam (MSI) Universitas Islam Indonesia, terutama konsentrasi pendidikan Islam yang telah banyak memberikan pemikiran dan wawasan keilmuan selama mengikuti perkuliahan yang sekaligus menjadi bahan pemikiran dalam penyusunan tesis ini. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada isteri penulis *Mariani Sanaky* dan anak-anak penulis yang telah memberikan dorongan dan penuh kesabaran telah banyak membantu terselesaikannya penulisan tesis ini. Terakhir, kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu di sini, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan seraya berdoa semoga semua amal baik yang telah diberikan, dibalas oleh Allah swt dengan balasan yang lebih baik.

DAFTAR ISI

Hal

Halaman Judul i
Persetujuan Pembimbing ii
Nota Dinas iii
Pengesahan Ketua Program iv
Pengesahan Tim Penguji v
Abstrak dalam bahasa Indonesia dan Inggris vi
Pedoman Transliterasi xii
Kata Pengantar xiv
Daftar Isi xvii

BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
D. Kajian Pustaka 6
E. Kerangka Teori 9
F. Metode Penelitian 24
G. Sistimatika Pembahasan 30

BAB II. PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA
A. Pendidikan Islam di Indonesia Sebelum Kemerdekaan 32
1. Pendidikan Islam pada Masa Awal 32
2. Pendidikan Islam pada Masa Penjajahan 47
3. Gagasan Pembaruan Pendidikan Islam 58
B. Pendidikan Islam pada Masa Kemerdekaan 115
C. Pendidikan Islam pada Era Orde Baru 130
1. Upaya Pembaruan Pendidikan Islam 135
2. Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional 145
3. Pendidikan Islam pada Era Reformasi 152

BAB III. KONSEP PENDIDIKAN ISLAM
A. Konsep Pendidikan dalam Islam 163
1. Pendidikan Islam 164
2. Konsep Pendidikan Islam 177
B. Konsep Manusia dalam Pendidikan Islam 204
1. Siapakah Manusia Itu 206
2. Kemampuan Dasar [*fitrah*] Manusia 210
3. Manusia Sebagai Makhluk Paedagogik 230
C. Orientasi dan Tujuan Pendidikan Islam 235
1. Orientasi Pendidikan Islam 236
2. Tujuan Pendidikan Islam 241
D. Pendidikan Islam dan Kebudayaan 262
1. Pendidikan Islam dalam Kebudayaan 264
2. Budaya Pendidikan Islam 268
3. Kebudayaan dan Problematika Pendidikn Islam 272

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB IV. KONSEP MASYARAKAT MADANI
A. Sejarah Perkembangan Masyarakat Madani 279
1. Akar Sejarah Masyarakat Sipil atau *Civil Society*..... 280
2. Masyarakat Madani dalam Prespektif Islam..... 292
3. Pemaknaan Masyarakat Madani 306
B. Karakteristik atau Ciri Masyarakat Madani 315
C. Istilah Masyarakat Madani Indonesia 322
D. Perubahan Menuju Masyarakat Madani di Indonesia..... 335
1. Persyaratan Menuju Masyarakat Madani..... 336
2. Tantangan Menuju Masyarakat Madani..... 338
3. Peluang Perubahan Menuju Masyarakat Madani..... 348

BAB V. PEMBARUAN PENDIDIKAN ISLAM UNTUK MASYARAKAT MADANI INDONESIA
A. Pembaruan Paradigma Pendidikan Islam 357
1. Paradigma Dualisme Pendidikan Islam 359
2. Paradigma Baru Pendidikan Islam untuk Masyarakat Madani Indonesia 381
B. Strategi Pembaruan Pendidikan Islam Menuju Masyarakat Madani Indonesia 391
1. Reorientasi Kerangka dasar Filosofis dan Teoritis 393
2. Misi dan Visi pendidikan Islam 405
3. Strategi Pendidikan Islam 413
4. Reorientasi Tujuan Pendidikan Islam 422
5. Reorientasi Kurikulum Pendidikan Islam 427
6. Reorientasi Metodologi Pendidikan Islam 464
7. Reorientasi Manajemen dan Sumber Daya Pendidikan Islam 473
a. Desentralisasi Pengelolaan Pendidikan Islam 481
b. Manajemen Berbasis Sekolah 488
c. Manajemen Pendidikan Tinggi Islam 496
d. Sumber Daya Pendidikan Islam 501
C. Aktualisasi Pendidikan Islam dalam Masyarakat Madani Indonesia 504
1. Pendidikan Islama Bagi Pemberdayaan Manusia [Proses Humanisasi] dan Masyarakat Unggul menuju Masyarakat Madani Indonesia 506
2. Demokratisasi Pendidikan Islam Menuju Terbentuknya Masyarakat Madani Indonesia 514
3. Model-model Pendidikan Islam alternatif dalam masyarakat madani Indonesia 537
4. Kontribusi dan Peran Pendidikan Islam dalam Masyarakat Madani Indonesia 551

BAB VI. PENUTUP
A. Kesimpulan 563
B. Penutup 569

DAFTAR KEPUSTAKAAN 571
LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB I
PENDAHULUN

A. Latar Belakang

Pada era reformasi[1] ini, masyarakat Indonesia ingin mewujudkan perubahan dalam semua aspek kehidupan. H.A.R.Tilaar, mengatakan bahwa masyarakat Indonesia kini sedang berada dalam masa transformasi, era reformasi telah lahir dan masyarakat Indonesia ingin mewujudkan perubahan dalam semua aspek kehidupannya. Euforia domokrasi juga sedang marak dalam masyarakat Indonesia. Di tengah euforia demokrasi ini lahirlah berbagai pendapat, pandangan, konsep, mengenai bentuk masyarakat dan bangsa Indonesia yang dicita-citakan di masa depan, yang kadang-kadang satu sama lain bertentangan[2]. Inilah salah satu ciri dari masyarakat demokrasi, yaitu lahirnya berbagai jenis pendapat dan pandangan sebagai pernyataan harkat manausia untuk memenuhi hak-hak asasinya untuk bereksperesi.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Akhir-akhir ini sering muncul ungkapan dari sebahagian pejabat pemerintah, politikus, cendekiawan, dan tokoh-tokoh masyarakat tentang masyarakat madani. "Wacana masyarakat madani dewasa ini sudah semakin meluas, berbagai seminar dan tulisan, baik buku maupun artikel di majalah dan koran yang mengacu kepada konsep dan gagasan masyarakat madani"[3]. Begitu juga dalam berbagai program-program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan, konsep masyarakat madani selalu disosialisasikan. Tampaknya semua potensi bangsa dipersiapkan dan

---

[1]Reformasi, dewasa ini muncul berbagai penafsiran mengenai arti reformasi seperti antara lain yang dikemukakan oleh Emil Salim dan Din Syamsuddin di dalam polemik perumusannya. Emil Salim, menekankan kepada arti reformasi untuk perubahan dengan melihat keperluan masa depan, maka Din Syamsuddin menekankan kepada kembali dalam bentuk asal. Tilaar, mengatakan bahwa, kedua penafsiran reformasi tersebut sah-sah saja, karena keduanya menginginkan perubahan. Tilaar, menggunakan definisi kerja mengenai reformasi sebagai berikut: Reformai mengandung arti *"to make batter by putting a stop to abuses or malpractices or by introducing batter procedures"*. Di dalam definisi kerja ini ditunjukkan perlu adanya penyetopan terhadap salah-urus dan penyelewengan penggunaan kekuasaan. Dengan demikian perlu diadakan suatu perombakan menyeluruh dari suatu sistem kehidupan dalam aspek-aspek politik, ekonomi, hukum, juga termasuk pendidikan. H.A.R. Tilaar, 1998, *Beberapa Agenda Reformai Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Abad 21*, (Magelang:Tera Indonesia, 1998), hlm. 25.

[2]H.A.R. Tilaar,, *Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia, Strategi Reformasi Pendidikan Nsional*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Yayasan Adikarya IKAPI dan Ford Foundation, 1999), hlm. 3.

[3]M. Dawam Rahardjo, 1999, *"Masyarakat Madani di Indonesia, Sebuah Penjajakan Awal"*, Jurnal Pemikiran Ilam, PARAMADANI, Vol. I, Nomor 2, ISSN 1410-8410, Jakarta, hlm. 7.

diberdayakan menuju masyarakat madani, maka dapat diprediksi bahwa kehidupan masyarakat Indonesia nanti akan mengalami perubahan fundamental yang berbeda dengan kehidupan masyarakat Indonesia pada era Orde Baru. "Masyarakat madani" yang dicita-citakan, diharapkan akan "terwujudnya kemandirian masyarakat, nilai-nilai tertentu dalam kehidupan masyarakat, terutama keadilan, persamaan, kebebasan dan kemajemukan (pluralisme)"[4], taqwa, jujur, dan taat hukum.

Istilah masyarakat madani sering diartikan sebagai terjemahan dari *civil society*, tetapi jika dilacak secara emperik istilah *civil society* adalah terjemahan dari istilah Latin, *civilis societas*, yang mula-mula dipakai oleh Cocero [106-43 S.M, seorang orator dan pujangga Roma], pengertiannya mengacu kepada gejala budaya perorangan dan masyarakat. Masyarakat sipil disebutnya sebagai sebuah masyarakat politik [*political society*] yang memiliki kode hukum[5] sebagai dasar pengaturan hidup[6]. Istilah ini juga dibawa dan dipopulerkan oleh Dato Seri Anwar Ibrahim, ke Indonesia dengan istilah "masyarakat madani" sebagai terjemahan *"civil society"*[7], namun istilah masyarakat madani, tidak identik dengan *civil society*. Maka dalam memperkenalkan pengertian tentang masyarakat madani di Indoneia, Nurcholis Madjid mengacu pada konsep "negara kota Madinah" yang dibangun Nabi Muhammad saw pada 622 M. Masyarakat madani juga mengacu pada konsep *tamaddun* [masyarakat

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[4]Masykur Abdillah, "*Islam dan Masyarakat Madani*", KOMPAS, (17 Februari 1999).

[5]Masyarakat politik [*political society*], suatu masyarakat yang memiliki kode hukum sebagai dasar pengaturan hidup. Maksudnya, adanya hukum yang mengatur antara individu menandai keberadaan suatu jenis masyarakat tersendiri dan masyarakat seperti ini, di zaman dahulu adalah masyarakat yang tinggal di kota. Dalam kehidupan kota penghuninya telah menundukkan hidupnya di bawah satu dan lain bentuk hukum sipil [*civil law*] sebagai dasar dan mengatur kehidupan bersama. Di zaman modern, istilah itu diambil lagi dan dihidupkan John Locke [1632-1704] dan Roesseau [1712-1778] untuk mengungkapkan pemikirannya mengenai masyarakat dan politik. Locke, mendefinisikan masyarakat sipil sebagai "masyarakat politik" [*political society*]. Roesseau, menyatakan masyarakat politik itu sendiri, merupakan hasil dari suatu perjanjian kemasyarakatan [*social constract*] dan anggota masyarakat telah menerima suatu pola perhubungan dan pergaulan bersama. Dalam konsep Locke dan Roesseau belum dikenal perbedaan antara masyarakat sipil dan negara dan perbedaan antara masyarakat sipil dan negara timbul dari pandangan Hegel [1770-1831] pemikir Jerman yang banyak menarik perhatian, yang ditentang dan sekaligus diikuti oleh Marx. Sama halnya dengan Locke dan Roesseau, Hegel melihat masyarakat sipil sebagai wilayah kehidupan orang-orang yang telah meninggalkan kesatuan keluarga dan masuk ke dalam kehidupan ekonomi yang kompotitif. Ini adalah arena, di mana kebutuhan-kebutuhan tertentu atau khusus dan berbagai kepentingan perorangan bersaing, yang menyebabkan perpecahan-perpecahan, sehingga masyarakat sipil itu mengandung potensi besar untuk menghancurkan dirinya. Oleh Hegel, masyarakat sipil dihadapkan dengan negara. Dari teori Hegel inilah dikenal dikotomi antara negara dan masyarakat (*state and society*). M. Dawam Rahardjo, "*Demokrasi, Agama dan Masyarakat Madani*", Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, UNISIA, (No. 39/XXII/III/1999, ISSN: 0215-1412), hlm. 27-28.

[6]Ibid, hlm. 26-27.

[7]M. Dawam Rahardjo, "*Masyarakat Madani di Indonesia, Sebuah Penjajakan Awal*", Jurnal Pemikiran Islam PARAMADINA, (Vol.I,Nomor 2, ISSN; 1410-8410, 1999), hlm. 8.

berperadaban] yang diperkenalkan Ibn Khaldun dan konsep *al-madinah al-fadhilah* [negara utama] yang dikemukakan filsof Al-Farabi pada abad pertengahan[8].

Konsep masyarakat madani merupakan konsep yang bersifat universal, sehingga perlu adaptasi dan disosialisasikan apabila konsep ini akan diwujudkan di Indonesia, karena konsep masyarakat madani lahir dari masyarakat yang memiliki latar belakang sosial-budaya yang berbeda dengan masyarakat Indonesia. Maka, apabila konsep ini akan diaktualisasikan dalam wacana masyarakat Indonesia, diperlukan suatu perubahan kehidupan, perlu ada langkah-langkah yang kontinyu sistimatis yang dapat merubah paradigma, kebiasaan, dan pola hidup masyarakat Indonesia. Selain itu, konsep masyarakat madani merupakan suatu konsep yang relatif baru bagi masyarakat Indonesia, sehingga upaya untuk membangun masyarakat madani bukan perkerjaan yang mudah, karena sangat terkaiat dengan persoalan budaya dan sikap hidup masyarakat. Maka untuk membangun masyarakat madani, diperlukan berbagai terobosan dalam penyusunan konsep, serta tindakan-tindakan, "dengan kata lain diperlukan suatu paradigma-paradigma[9] baru di dalam menghadapi tuntutan-tuntutan yang baru, demikian kata filsuf Kuhn. Menurut Kuhn, apabila tantangan-tantangan baru tersebut dihadapi dengan menggunakan paradigma lama, tentu segala usaha yang dijalankan akan memenuhi kegagalan"[10].

Sektor pendidikan memiliki peran yang strategis dan fungsional dalam upaya membangun masyarakat madani di Indonesia. Pendidikan senantiasa berusaha untuk menjawab kebutuhan dan tantangan yang muncul di kalangan masyarakat sebagai konsekuensi dari suatu perubahan. Pendidikan sebagai "sarana terbaik yang didisain untuk menciptakan suatu generasi baru pemuda-pemudi yang tidak akan kehilangan ikatan dengan tradisi mereka sendiri tapi juga sekaligus tidak menjadi bodoh secara

---

[8]Hidayat Syarief, *Paradigma Baru Pendidikan Membangun Masyarakat Madani*, REPUBLIKA, (30 Oktober 1999).

[9]"*Paradigma*", yang dikemukakan L.Wilardjo, yang dikutip Tilaar, "suatu konsistensi capaian besar (*constellation of great achievemens*) berupa konsep, nilai-nilai,teknis, prosedur yang diterima masyarakat keilmuan dan dipakai sebagai contoh menentukan masalah keilmuan yang sah dan bagaimana cara memecahkannya. H.A.R. Tilaar, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan*..., hlm.28.

[10]Ibid, hlm. 245.

intelektual atau terbelakang dalam pendidikan mereka atau tidak menyadari adanya perkembangan-perkembangan disetiap cabang pengetahuan manusia"[11]. Tetapi timbul pertanyaan apakah pendidikan produk Orde Baru dapat diharapkan membangun fungsi tersebut, karena pendidikan yang berjalan sekarang ini sebatas pada sosialisasi nilai dengan pola hafalan dan kreativitas dipasung.

Menurut Tilaar, sistem pendidikan nasional sangat erat kaitannya dengan kehidupan politik bangsa. Selama Orde Baru telah tercipta suatu kehidupan bangsa yang tidak sesuai dengan cita-cita UUD 1945, karena ternyata pemerintah yang represif telah menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang tertekan, tidak kritis, bertindak dan berpikir dalam acuan suatu struktur kekuasaan, yang hanya mengabdi kepada kepentingan sekelompok kecil rakyat Indonesia[12]. Kehidupan politik bangsa Indonesia sekarang ini telah mengalami perubahan memasuki era reformasi. Pada "era reformasi ini, masyarakat Indonesia menuntut kembali kedaulatan rakyat yang telah hilang itu, maka dengan sendirinya pendidikan nasional haruslah dikembalikan fungsinya kepada memberdayakan masyarakat dengan mengembalikan kedaulatan rakyat untuk membangun dirinya sendiri". Dengan demikian, "pendidikan nasional perlu direformasi untuk mewujudkan visi baru masyarakat Indonesia, yaitu suatu masyarakat madani Indonesia"[13].

Pendidikan Islam, juga mengalami nasib yang sama, kerana pendidikan Islam memiliki kedudukan yang sama dan diatur dalam Sistem Pendidikan Nasional, yang tertuang dalam undang-undang No. 2 Tahun 1989. Dengan demikian, dapat dikatakan "posisi pendidikan Islam sebagai sub-sistem pendidikan nasional keudukannya menjadi semakin mantap, sehingga pendidikan Islam baik pada sekolah-sekolah dan perguruan tinggi umum, maupun sekolah-sekolah keagamaan [madrasah] dan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[11] Comference Book, London, (1987), hlm. 15-17.
[12] H.A.R. Tilaar, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan*..., hlm. 4.
[13] Ibid, hlm. 4.

perguruan tinggi sebagai bagian integral dari pendidikan nasional. Secara implisit juga menunjukkan pengakuan bangsa terhadap sumbangan besar pendidikan Islam dalam upaya mendidik dan mencerdaskan bangsa"[14] dan hal ini merupakan keuntungan besar bagi umat Islam dalam mengelola pendidikan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendidikan Islam juga tidak terlepas dari kehidupan politik bangsa, baik pada era Orde Baru maupun pada era reformasi. Pendidikan Islam akan mengikuti kehidupan politik bangsa yang sedang mengalami perubahan.

Untuk mengantisipasi perubahan tersebut, diperlukan terobosan pemikiran kembali suatu konsep pendidikan Islam dan harus dikembalikan kepada fungsinya untuk memberdayakan manusia dan masyarakat. Pendidikan Islam perlu melakukan pembaruan untuk mewujudkan visi baru yang sesuai dengan tuntutan perubahan. Maka, apabila ingin melakukan perubahan pendidikan Islam menuju masyarakat madani, harus mempunyai visi yang jelas, "yaitu visi yang sesuai dengan konstitusi untuk mewujudkan hak-hak asasi manusia dan mengembangkan tanggung jawab anggota masyarakat menuju masyarakat yang dicita-citakan"[15]. Sistem pendidiakn Islam "haruslah senantiasa mengorientasikan diri kepada menjawab kebutuhan dan tantangan yang muncul dalam masyarakat, sebagai konsekuensi logis dari suatu perubahan"[16].

Sesuai dengan jalan pikiran di atas, maka ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini, lebih ditekankan pada perkembangan pendidikan Islam, konsep pendidikan Islam, konsep masyarakat madani, dan pembaruan pendidikan Islam di Indonesia menuju masyarakat madani Indonesia.

---

[14]Azyumardi Azra ,*Pendidikan Islam, Tradisi dan Modern Menuju Milinium Baru*,(Jakarta:Logo Wacana Ilmu,1999),hlm.57.
[15]H.A.R. Tilaar, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan...*, hlm. 4.
[16]Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam, Tradisi...*, hlm. 57.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah konsep pendidikan Islam untuk masyarakat madani Indonesia.
2. Bagaimanakah strategi pendidikan Islam untuk masyarakat madani Indonesia.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Tujuan penelitian ini setidak-tidaknya ingin :

   a. Menemukan konsep pendidikan Islam untuk masyarakat madani.
   b. Menemukan strategi pendidikan Islam untuk masyarakat madani Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

   Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat :

   a. Dijadikan dasar pemikiran dalam pembaruan pendidikan Islam di Indonesia.
   b. Sumbangan pemikiran dalam mencari paradigma baru pendidikan Islam.

D. Kajian Kepustakaan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kajian tentang pembaruan pendidikan Islam menuju masyarakat madani Indonesia, berdasarkan pengamatan peneliti belum secara luas menjadi bahan kajian secara serius, spesifik, dan konprehensif. Tetapi di sisi lain, peneliti mengakui memang banyak cendekiawan yang berkomentar, ulasan, artikel, dan buku-buku yang diterbitkan dan hasil seminar yang mengulas konsep masyarakat madani, tetapi belum ada secara khusus mengkaji dan membahas pembaruan pendidikan Islam menuju masyarakat madani. Sumber informasi dan literatur yang dianggap layak untuk dapat dijadikan bahan perbandingan dan bahan kajian untuk menggali konsep lebih lanjut diantaranya ialah :

Pertama, adalah buku Membangun Masyarakat Madani, Menuju Indonesia Baru Milenium ke-3, Editor : Taufik Abdullah. dkk., Tim Pascasarjana UMM, terbitan Aditia Media tahun 1999, merupakan kumpulan makalah-makalah hasil seminar

tanggal, 25-26 September 1998 yang diselenggarakan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam buku tersebut, ada lima topik pembahasan, yaitu : (1) membangun masyarakat madani: perspektif politik, (2) membangun masyarakat madani: perspektif kebudayaan, (3) membangun masyarakat madani : perspektif hukum, (4) membangun masyarakat madani : perspektif ekonomi, dan (5) membangun masyarakat madani: perspektif agama[17]. Dalam buku tersebut, belum ada pembahasan atau diskursus khusus yang membahas membangun masyarakat madani dalam perspektif pendidikan Islam, tetapi kajian-kajian tersebut lebih difokuskan pada membangun masyarakat madani dilihat dari lima aspek tersebut.

Kedua, adalah H.A.R.Tilaar, 1999, dalam bukunya: Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia, Strategi Reformasi Pendidikan Nasional, Bandung, terbitan PT Remaja Rosdakarya dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan *The Ford Foundation*. Dalam buku Tilaar tersebut, secara khusus membahasa tantang pendidikan untuk masyarakat madani Indonesia, pada bab ke-IX. Tilaar, secara khusus mengemukakan bahwa pendidikan dalam masyarakat madani Indonesia tidak lain ialah proses pendidikan yang mengakui akan hak-hak serta kewajiban perorangan di dalam masyarakat. Tilaar mengemukakan tigal hal : (1) Paradigma baru pendidikan dalam membangun masyarakat madani Indonesia yaitu proses pendidikan yang berakar dari kebudayaan, berbeda dengan praksis pendidikan yang terjadi dewasa ini yang cenderung mengaliansikan proses pendidikan dari kebudayaan. (2) Strategi reformasi pendidikan nasional, menurut Tilaar, untuk mewujudkan masyarakat madani Indonesia menuntut pergeseran paradigma masyarakat Indonesia dewasa ini, tentunya meminta reposisi dan reinvensi pendidikan nasional. Tilaar, menyatakan bahwa pendidikan kita dewasa ini belum menunjang jiwa reformasi yaitu

[17]Taufik Abdullah, dkk, [tim editor], 1999, *Membangun Masyarakat Madani Menuju Indonesia Baru Milenium Ketiga,* (Yogyakarta: Aditiya Media, 1999), hlm. 9-359.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

menginginkan masyarakat demokratis, masyarakat terbuka, dan pemerintahan yang bersih [*clean government*], dan (3) Tilaar, menyatakan perlu ada hasil yang diharapkan dari pendidikan nasional untuk membangun masyarakat madani Indonesia. Pendidikan nasional berakar dari dan untuk pembangunan kebudayaan nasional harus mampu menumbuh kembangkan berbagai sikap manusia Indonesia yang memungkinkan lahirnya masyarakat madani Indonesia yang dicita-citakan[18].

Ketiga, adalah artikel Hidayat Syarief, pada Harian Republika, Sabtu Tanggal 30 Oktober 1999, Hidayat, menulis tentang Paradigma Baru Pendidikan Membangun Masyarakat Madani. Hidayat mengatakan bahwa, jika kita hendak membangun masyarakat madani di Indonesia harus ada perubahan mendasar atas kerangka paradigma dan pola-pola pendidikan dari yang idealistik kepraktis; dari kognitif ke afektif dan psikomotor. Pendidikan harus dijadikan *gymnasium* untuk mempersiapkan anak didik menghadapi kehidupan nyata, bukan sekedar dunia gagasan yang dihafal dan dimengerti[19]. Dengan demikian diperlukan pola keteladanan dalam mengajarkan setiap nilai kepada peserta didik.

Keempat, adalah buku Pendidikan Islam, Demokrasi dan Masyarakat Madani, Editor : Ismail SM dan Abdul Mukti, merupakan kumpulan tulisan dari beberapa penulis yang membahas (1) Politik, demokrasi dan pendidikan Islam, pada bagian ini membahas tentang : Kebijakan dasar pendidikan politik pada lembaga pendidikan Islam era Orde Baru, Sosialisasi politik dan pendidikan Islam, Tradisi pendidikan politik di Pesantren [tinjauan historis], Wawasan demokrasi dan kebangsaan dalam perspektif siyasah Islamiyah, Pendidikan dan demokrasi dalam arus reformasi, Demokrasi dalam pendidikan Islam, dan (2) Pendidikan Islam, Reformasi dan masyarakat madani, pada bagian ini membahas : Masyarakat madani antara cita dan fakta [kajian historis-normatif], Islam dan civil society [masyarakat madani]: Tinjauan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[18]H.A.R. Tilaar,, *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia, Strategi Reforasi Pendidikan Nasional*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 167 – 179.

[19]Hidayat Syarief, "*Paradigma Baru Pendidikan Membangun Masyarakat*", Republika, (30 Oktober 1999).

tentang prinsip agama menuju masyarakat "madani", Reformasi pendidikan agama menuju masyarakat "madani", Revitalisasi peran pendidikan agama Islam dalam pengembangan masyarakat madani, Reformasi sistem pendidikan Islam dalam era reformasi, Signifikansi peran Pesantren dalam pengembangan masyarakat madani, dan Masyarakat egalitarian: Profil dan perwujudannya melalui pendidikan Islam[20].

Dari kajian-kajian yang dikemukakan di atas, peneliti dapat menyatakan bahwa kajian-kajian tersebut belum secara khusus membahas tentang "Pembaruan Pendidikan Islam Menuju Masyarakat Madani Indonesia, Tinjauan Sosio-kultural Historis", artinya dalam tulisan Taufik Abdullah, dkk., [tim editor], H.A.R.Tilaar, Hidayat Syarief, dan Ismail SM dan Abdul Mukti [editor], belum secara khusus berbicara tentang pembaruan pendidikan Islam menuju masyarakat madani Indonesia. Kajian-kajian mereka, penekanan dan pembahasan utamanya pada masalah politik, demokrasi, reformasi, paradigma baru pendidikan dan pendidikan Islam dalam membangun masyarakat madani Indonesia. Akan tetapi tetapi, poin-poin bahasan yang dikemukakan oleh Tilaar, Hidayat, dan Ismail SM dan Abdul Mukti [editor] dalam kajiannya, ada beberapa bahasan atau pemikiran yang sejalan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

E. Kerangka Teori

1. Pendidikan Islam

Pendidikan merupakan sistem dan cara meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupan manusia. Dalam sejarah umat manusia[21], hampir tidak ada kelompok manusia yang tidak menggunakan pendidikan sebagai alat pembudayaan dan peningkatan kualitasnya, sekalipun dalam masyarakat yang masih terbelakang (primitif). Pendidikan sebagai usaha sadar yang dibutuhkan untuk

---

[20]Ismail SM–Abdul Mukti,[Edi.], *Pendidikan Islam, Demokratisasi dan Masyarakat Madani,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2000), hlm.1–205.

[21]Ahmad Syafii Maarif, menyatakan apabila dilihat dari segi sejarah, pendidikan merupakan suatu gerakan yang telah berumur sangat tua. Dalam bentuk sederhana dapat dipahami, pendidikan telah dijalankan sejak dimulainya manusia di muka bumi ini. Penguasaan alam semesta, memberi contoh pendidikan kepada manusia dan dilanjutkan dengan mendidik keluarga. Ahmad Syafii Maarif, "*Pendidikan Islam dan Proses Pemberdayaan Umat*", Jurnal Pendidikan Islam (JPI), (No.2 Th. Fakultas Tarbiyah UII, 1 Oktober 1996), hlm. 6.

menyiapkan anak manusia demi menunjang perannya di masa datang. Dengan demikian, upaya pendidikan yang dilakukan oleh suatu bangsa tentu memiliki hubungan yang sangat signifikan dengan rekayasa bangsa di masa mendatang. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan asasi manusia, bahkan M. Natsir menegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan maju mundurnya kehidupan masyarakat tersebut[22]. Pernyataan M. Natsir di atas merupakan indikasi tentang urgensi pendidikan bagi kehidupan manusia, karena pendidikan itu sendiri mempunyai peranan senteral dalam mendorong individu dan masyarakat untuk meningkatkan kualitasnya dalam segala aspek kehidupan demi mencapai kemajuan, dan untuk menunjang perannya di masa datang. Hal ini terbukti dalam kehidupan sekarang, pendidikan tampil dengan daya pengaruh yang sangat besar dan menjadi variabel pokok masa depan manusia.

Pendidikan, "merupakan bagian terpenting dari kehidupan manusia yang sekaligus membedakan manusia dengan hewan. Hewan juga "belajar", tetapi lebih ditentukan oleh instink, sedangkan bagi manusia, belajar berarti rangkaian kegiatan menuju "pendewasaan" guna menuju kehidupan yang lebih berarti"[23]. Oleh karena itu berbagai pandangan yang mengatakan bahwa pendidikan itu merupakan proses budaya untuk mengangkat "harkat" dan "martabat" manusia dan berlangsung sepanjang hayat. Apabila demikian, maka pendidikan memegang peranan yang menentukan eksistensi dan perkembangan manusia, "karena pendidikan merupakan usaha melestarikan, dan mengalihkan serta mentransformasikan nilai-nilai

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[22]M. Natsir, *Kapita Selecta*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 77.
[23]M. Rusli Karim, "*Pendidikan Islam Sebagai Upaya Pembebasan Manusia*", dalam Muslih Usa (Editor), Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta, cet. I, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hlm. 27.

kebudayaan dalam segala aspeknya dan jenisnya kepada generasi penerus"[24], untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Apabila kita sepakat bahwa pendidikan merupakan kebutuhan penting bagi setiap manusia, negara, dan maupun pemerintah, maka "pendidikan harus selalu ditumbuhkembangkan secara sistimatis oleh para pengambil kebijakan yang berwenang di Republik ini"[25].

Upaya pendidikan yang dilakukan suatu bangsa selalu memiliki hubungan yang signifikan dengan rekayasa bangsa tersebut di masa mendatang. Karena itu pendidikan selalu dihadapkan pada perubahan, baik perubahan zaman maupun perubahan masyarakat, oleh karena itu, mau tidak mau pendidikan harus didisain mengikuti irama perubahan tersebut, kalau tidak pendidikan akan ketinggalan. Tuntutan pembaruan pendidikan menjadi suatu keharusan, karena itu "pembaruan" pendidikan selalu mengikuti dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, baik pada konsep, kurikulum, proses, fungsi, tujuan, manajemen lembaga-lembaga pendidikan, dan sumber daya pengelola pendidikan.

Pembaruan atau "reform"[26], "merupakan suatu proses perbuatan, cara membaharui, proses mengembangkan, memperbaiki supaya menjadi baru, mengganti dengan baru - memodernkan"[27]. Mukti Ali, menyatakan pembaruan merupakan suatu usaha untuk mengganti yang jelek dengan yang baik, dan mengusahakan yang sudah baik menjadi lebih baik[28]. Pembaruan pendidikan merupakan suatu usaha untuk membaharui, memperbaiki, mengembangkan agar relevan dengan perkembangan kemajuan dunia modern atau relevan dengan perubahan masyarakat. Perkataan "modern" merupakan suatu pengertian yang kurang menentu, sehingga dapat dipergunakan untuk menyifati segala macam ide, cita-cita atau keinginan-keinginan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[24]Ibid, hlm. 11.

[25]Suyanto dan Djihad Hasyim, 2000, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Melenium III*, (Yogyakarta, Adicipta Karya Nusa, 2000), hlm. 17.

[26]M.Amin Rais, Kata Pengantar, dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, terj. Machnun Huscin, *Islam dan Pembaharuan Ensiklopedi Maslah-masalah*, Cet.V, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. v.

[27]*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Penyusun Kamus, (Jakarta: Pusat Bimbingan dan Pengembangan Bahasa, departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1988), hlm. 82.

[28]A. Mukti Ali, *Beberapa Masalah Pendidikan di Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Nida, 1971), hlm.17.

Istilah "modernisasi" lebih sering dipergunakan untuk menunjukkan pertumbuhan pemikiran atau pemenuan-penemuan yang serba rasional[29]. Harun Nasution, menyatakan bahwa, dalam bahasa Indonesia telah dan selalu dipakai kata modern, modernisasi dan modernisme, menurutnya modernisasi dalam masyarakat Barat mengandung arti fikiran, aliran, gerakan dan usaha untuk merobah faham-faham, adat istiadat, institusi-institusi lama, dan sebagainya, untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern[30], sedangkan "pembaruan" atau "reformasi", menurut Emil Salim, lebih menekankan arti reformasi untuk perubahan dengan melihat keperluan masa depan, Din Syamsuddin menekankan kepada kembali dalam bentuk asal, maka kedua penafsiran tersebut, menurut Tilaar sah-sah saja karena keduanya menginginkan pembaruan[31], menginginkan perbaikan, dalam hal ini adalah reformasi atau perbaikan pendidikan Islam.

Apabila berbicara tentang modernisasi pendidikan Islam, tanpaknya tidak terlepas dari akar gagasan tentang "modernisme" pemikiran dan institusi Islam secara keseluruhan. Dengan kata lain, "modernisme" pendidikan Islam tidak bisa dipisahkan dengan kebangkitan gagasan dan program modernisme Islam, karena kerangka dasar yang berada di balik "modernisme" Islam secara keseluruhan adalah "modernisasi" pemikiran dan kelembagaan Islam merupakan prasyarat bagi kebangkitan kaum Muslimin di masa modern. Oleh karenanya, pemikiran dan kelembagaan Islam termasuk pendidikan haruslah dimodernisasi, diperbaharui sesuai dengan kerangka "modernitas"[32]. Di Indonesia, modernisasi lebih dikenal dengan istilah "pembangunan" (development) adalah proses multi demensional yang kompleks, karena pada satu segi pendidikan juga dipandang sebagai suatu variabel modernisasi. Dalam konteks

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[29]Shamad Hamid, 1984, *Islam dan Pembaruan Sebuah Kajian Tentang Aliran Modern dalam Islam dan Permasalahannya*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), hlm. 11.

[30]Harun Nasution,*Pembaruan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*,cet.pertama,(Jakarta:Bulan Bintang,1975),hl. 9.

[31]H.A.R. Tilaar, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan...*, hlm. 25.

[32]Azyumardi Azra, *Pendidika Islam, Tradisi...*, hlm. 31.

ini, pendidikan dianggap merupakan prasyarat dan kondisi yang mutlak bagi masyarakat untuk menjalankan program dan mencapai tujuan-tujuan modernisasi atau pembangunan. ...Banyak ahli pendidikan yang berpendapat bahwa "pendidikan merupakan kunci yang membuka pintu ke arah modernisasi" (Harbison & Myers, 1964:181). Tetapi di sisi lain, pendidikan itu sendiri sering dianggap sebagai obyek modernisasi, dan untuk itulah, ...pendidikan harus diperbaharui atau dimodernisasi, sehingga dapat memenuhi harapan dan fungsi yang dipikulkan kepadanya[33].

Gagasan pembaruan atau modernisasi pendidikan Islam di Indonesia, seperti apa yang dikemukakan di atas, sangat "berkaitan erat dengan pertumbuhan gagasan modernisme Islam di kawasan ini". Apabila mengamati gagasan modernisasi Islam pada awal abad 20 pada lapangan pendidikan, direalisasikan dengan pembentukan lembaga-lembaga pendidikan modern yang diadopsi dari sistem pendidikan kolonial Belanda dan kehadiran organisasi-organisasi "modernis Islam seperti Jami'at Khair, al-Irsyad, Muhammadiyah dan lain-lain, sebagai pelopor modernis, walaupun pada awal perkembangan organisasi-organisasi ini, melakukan adopsi untuk memodernisasikan pendidikan Islam dengan mengadopsi sistem dan lembaga pendidikan moderen secara hampir menyeluruh. Maka titik tolak modernisme pendidikan Islam di sini adalah sistem dan kelembagaan pendidikan moderen (Belanda), bukan sistem dan lembaga pendidikan Islam tradisonal[34].

Mencermati konsep pembaharuan pendidikan di atas, maka "pembaruan pendidikan merupakan suatu usaha atau proses multi demensonal yang kompleks, dan tidak hanya bertujuan untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang dirasakan, tetapi terutama merupakan suatu usaha penelaahan kembali atas aspek-aspek sistem pendidikan yang berorientasi pada rumusan tujuan yang baru"[35], dan selalu berorientasi pada perubahan masyarakat. Oleh karenanya, upaya pembaruan

---

[33]Ibid, hlm. 31-32.
[34]Ibid, hlm. 36-37.
[35]Jusuf Amir Faisal, *Reorientasi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 65.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pendidikan tidak akan memiliki ujung akhir sampai kapanpun. Mengapa demikian, karena persoalan pendidikan selalu saja ada selama peradaban dan kehidupan manusia itu sendiri masih ada, pembaruan pendidikan tidak akan pernah dapat diakhiri, apalagi dalam abad informasi seperti saat ini, tingkat *obselescence* dari program pendidikan menjadi sangat tinggi[36]. Tetapi, yang lebih penting lagi dalam upaya pembaruan ialah keikutsertaan secara mental dan didukung dengan kemampuan profesional pengelola pendidikan, dan para pengelola pendidikan perlu memiliki semacam *a common mission* [Louise Stall dan Dean Fink, 1992] pada setiap upaya pembaruan pendidikan dan agar upaya pembaruan menjadi lebih efektif, perlu menyadari terhadap adanya misi umum yang ingin dicapai oleh pembaruan itu dan indikator adanya kesadaran terhadap *common mission* suatu pembaruan, menurut Louise Stall dan Dean Fink adalah *shared values and beliefs, clear goals*, dan *instructional leadership*[37].

Pembaruan pendidikan terjadi karena adanya tantangan kebutuhan masyarakat pada saat itu dan pendidikan itu sendiri diharapkan dapat menyiapkan produk manusia yang mampu mengatasi kebutuhan masyarakat[38] tersebut, sehingga dapat dikatan bahwa pendidikan lebih bersifat konservatif. Misalnya, pada masyarakat agraris pendidikan didisain agar relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat pada era tersebut, begitu juga apabila perubahan masyarakat menjadi masyarakat industrial dan informasi, pendidikan juga didisain mengikuti irama perkembangan masyarakat industri dan informasi, dan seterusnya. Demikian siklus perkembangan perubahan pendidikan, kalau tidak pendidikan akan ketinggalan dari perubahan zaman yang begitu cepat. Sebagai ilustrasi, pada saat Amerika mengejar kemajuan teknologi ruang angkasa Rusia, maka pada saat itu pendidikannya

---

[36]Suyanto dan Djihad Hisyam, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III*, (Yogyakarta: Adicipta Karya Nusa, 2000), hlm. 17.

[37]Ibid, hlm. 19.

[38]Anas Syahrul dan M. Fadhilah Zaidie, *Reformasi dan Masa Depan Pendidikan di Indonesia Sebuah Rekonstruksi Pemikiran Prof. Dr. Djohar Ms*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1999), hlm.29.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ditekankan pada Iptek. Demikian juga pada saat Amerika mengejar kemajuan ekonomi Jepang dan Jerman, maka pada saat itu pendidikannya ditekankan pada ekonomi. Dan akhir-akhir ini, ketika dirasakan lemahanya integrasi bangsa Amerika, maka pendidikan ditekankan untuk membangun integrasi bangsa [Sizer, 1992]. Dengan indikator tersebut, akan menjadi lebih mudah mengdentifikasikan krisis pendidikan yang terjadi dengan didasarkan pada indikator yang diukur dari tidak tercapainya tujuan tekanan pendidikan itu[39]. Ketika dunia menghadapi gerakan globalisasi, Amerika Serikat, dalam dokumen America 2000 : *An Education Strategy*, terdapat enam tujuan pendidikan nasional Amerika Serikat, salah satunya bahwa Amerika Serikat menginginkan memiliki pengaruh secara global. Maka untuk mencapai cita-cita itu, pendidikan nasional diformulasikan sebagai: *US students will be first in the world in science and mathematics achievement*[40], dengan demikian, Amerika Serikat dalam salah satu strategi pendidikannya menginginkan mahasiswa dan para pelajarnya memiliki prestasi yang unggul di dunia dalam hal menguasai "ilmu pengetahuan" dan "matematika".

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Apabila mencermati keadaan pendidikan di Indonesia, sebenarnya telah banyak dilakukan pembaruan dan tujuan pembaruan itu pada akhirnya ialah "untuk menjaga agar produk pendidikan kita tetap relevan dengan kebutuhan dunia kerja atau persyaratan bagi pendidikan lanjut pada jenjang pendidikan berikutnya"[41]. Tetapi sampai kini, "pendidikan nasional terperangkap di dalam sistem kehidupan yang operatif sehingga telah terkungkung di dalam paradigma-paradigma yang tunduk kepada kekuasaan otoriter dan memperbodoh rakyat banyak"[42], karena sistem pendidikan pada era Orde Baru yang otoriter telah melahirkan sistem pendidikan yang tidak mampu melakukan pemberdayaan masyarakat secara efektif, meskipun secara

---

[39]Ibid, hlm. 29.
[40]Suyanto dan Djihad Hisyam, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan* ..., hlm.22.
[41]Ibid, hlm. 18.
[42]H.A.R. Tilaar, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan*..., hlm. 26.

kuantitatif rezim ini memang telah mampu menunjukkan prestasinya yang cukup baik di bidang pendidikan, karena kemajuan-kemajuan pendidikan secara kuantitatif nampak kita rasakan selama Orde Baru berkuasa[43].

Patut diakui bahwa perkembangan pendidikan di Indonesia secara kuantitatif mengalami kemajuan, tetapi pemberdayaan masyarakat secara luas sebagai cermin dari keberhasilan itu, tidak pernah terjadi. Mengapa demikian, karena Orde Baru setelah lima tahun pertama berkuasa, secara sistematik telah mempersiapkan skenario pemerintahan yang memiliki visi dan misi utama yaitu melestarikan kekuasaan dengan berbagai cara dan metode. Akibatnya sistem pendidikan, kemudian dijadikan salah satu instrumen untuk menciptakan *safety net* bagi pelestarian kekuasaan, sedangkan visi dan misi pelestarian kekuasaan itu melahirkan kebijakan pendidikan yang bersifat *straight jacket*[44] dan inilah penyebab kesenjangan terhadap pendidikan. Oleh karena itu, apabila dicermati sistem pendidikan pada era Orde Baru, ada empat ciri utama di dalam pendidikan nasional kita yang berjalan sampai sekarang ini, yaitu : *Pertama*, sistem yang kaku dan sentralistik, yaitu suatu sistem pendidikan yang terperangkap di dalam kekuasaan otoritas pasti akan kaku sifatnya, karena ciri-ciri sentralisme yaitu birokrasi yang ketat yang telah mewarnai penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. *Kedua*, sistem pendidikan nasional di dalam pelaksanaanya telah diracuni oleh unsur-unsur korupsi, kolusi, nepotisme dan konceisme (*cronyism*). *Ketiga,* sistem pendidikan tidak berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, sehingga tujuan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan rakyat telah sirna dan diganti dengan praktek-praktek "memberatkan" rakyat untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas[45]. *Keempat*, pada kenyataanya "sistem pendidikan kita sekarang ini belum mengantisipasi masa

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[43]Suyanto, "*Paradigma Baru Sistem Pendidikan Nasional Abad 21*", makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Mencari Paradigma Baru Pendidikan nasional Memasuki Milenium III, ISPI dan PRIMAGAMA,Yogyakarta,, 9 November 1999, hlm.3.
[44]Ibid, hlm. 4.
[45]H.A.R. Tilaar, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan...*, hlm. 26-28.

depan dan masyarakat madani"[46], artinya belum mampu menyiapkan *output* yang sesuai dengan permintaan pasar, kurang memiliki kemampuan bersaing secara kompetetif dan *output*nya hanya sekedar mengandalkan ijazah resmi dari bidang studi tertentu dari suatu lembaga pendidikan dengan kemampuan yang sangat terbatas atau pas-pasan.

Kondisi pendidikan Islam di Indonesia, sebenarnya menghadapi nasib yang sama, dan secara khusus pendidikan Islam menghadapi berbagai persoalan dan kesenjangan dalam berbagai aspek yang lebih kompleks, yaitu: berupa persoalan dikotomi pendidikan, kurikulum, tujuan, sumber daya, serta namajemen pendidikan Islam. Upaya perbaikannya belum dilakukan secara mendasar, sehingga terkesan seadanya saja. Usaha pembaruan dan peningkatan pendidikan Islam sering bersifat sepotong-sepotong atau tidak komprehensif serta menyeluruh serta sebagain besar sistem dan lembaga pendidikan Islam belum dikelolah secara profesional[47]. Usaha pembaruan pendidikan Islam secara mendasar selalu dihambat oleh berbagai masalah, mulai dari persoalan dana sampai tenaga ahli, sehingga "pendidikan Islam dewasa ini terlihat orientasi yang semakin kurang jelas"[48]. Dengan kenyataan ini, maka sebenarnya "sistem pendidikan Islam haruslah senantiasa mengorientasi diri untuk menjawab kebutuhan dan tantangan yang muncul dalam masyarakat kita sebagai konsekuensi logis dari perubahan"[49].

Pada era reformasi ini, pendidikan nasional ditekankan untuk membangun manusia dan masyarakat madani Indonesia yang mempunyai identitas, berdasarkan budaya Indonesia. Untuk mencapai cita-cita tersebut, pendidikan hendaknya didasarkan pada paradigma-paradigma baru yang bertujuan untuk terbentuknya suatu

---

[46]Ahmad Tafsir, *Pendidikan untuk Masa Depan*...,hlm. 7.
[47]Azyumardi Azra, *Pendidika Islam, Tradisi*..., hlm. 59.
[48]Muslih Usa[edit],1991,*Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta*,Cet.I,(Yogyakarta:Tiara Wacana, 1991), hl.11.
[49]Azyumardi Azra, *Pendidika Islam, Tradisi*..., hlm. 57.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

"masyarakat madani" yang demokratis. Pendidikan harus bertolak dari pengembangan manusia Indonesia yang berbudaya dan berperadan, merdeka, bertaqwa, bermoral dan berakhlak, berpengatahuan dan berketerampilan, inovatif dan kompetitif, sehingga dapat berkarya secara profesional dalam kehidupan global menuju masyarakat madani Indonesia. Saat ini, pemerintah telah memiliki 7 poin arah kebijakan program pendidikan nasional yaitu (1) Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi, (2) meningkat kemampuan akademik dan profesional, (3) melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk kurikulum, (4) memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah, (5) melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan, dan manajemen, (6) meningkatan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik masyarakat maupun pemerintah, dan (7) mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah[50]. Dengan ketujuh strategi ini, sebenarnya dapat meyakinkan bahwa pendidikan nasional dan pendidikan Islam kita secara makro cukup menjanjikan bagi penyediaan sumber daya manusia yang benar-benar memiliki unggulan konpetitif. Tetapi apabila melihat kenyataan kondisi pendidikan sekrang, ada dua alasan pokok perlu dilakukan pembaruan pendidikan Islam di Indonesia, yaitu; *Pertama*, konsepsi dan praktek pendidikan Islam sebagaimana tercermin pada kelembagaannya dan isi programnya didasarkan pada konsep atau pengertian pendidikan Islam yang sempit yang terlalu menekankan pada kepentingan akhirat. *Kedua*, lembaga-lembaga dan isi pendidikan Islam yang dikenal sekarang ini, seperti madrasah dan pesantren, tidak atau kurang mampu memenuhi kebutuhan umat Islam dalam menghadapi tantangan dunia modern dan terutama masyarakat dan bangsa Indonesia bagi pembangunan di segala bidang, di masa sekarang dan di masa yang akan datang[51].

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[50] *Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), Tahun 1999-2004*, Ketetapan MPR RI, Nomor : IV/MPR/1999, (Surabaya: Arkola,1999), hlm. 23-24.

[51] Anwar Jasin,1985, "*Kerangka Dasar Pembaharuan Pendidikan Islam: Tinjauan Filosofis*", makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Jakarta, 30 Oktober 1985, hlm.7-8.

Untuk menghadapi dan memabangun masyarakat madani di Indonesia, diperlukan usaha pembaruan pendidikan Islam secara mendasar yaitu : (a) perlu pemikiran kembali konsep pendidikan Islam yang betul-betul didasarkan pada asumsi dasar tentang manusia, terutama pada fitrah atau potensi[52], (b) pendidikan Islam harus menuju pada integritas antara ilmu agama dan ilmu umum untuk tidak melahirkan jurang pemisah antara ilmu agama dan ilmu bukan agama, karena dalam pandangan Islam, bahwa ilmu pengetahuan adalah satu yaitu yang berasal dari Allah SWT, (c) pendidikan didisain menuju tercapainya sikap dan perilaku "toleransi", lapang dada dalam berbagai hal dan bidang, terutama toleran dalam perbedaan pendapat dan penafsiran ajaran Islam, tanpa melepaskan pendapat atau prinsipnya yang diyakini, (d) pendidikan yang mampu menumbuhkan kemampuan untuk berswadaya dan mandiri dalam kehidupan, (e) pendidikan yang menumbuhkan ethos kerja, mempunyai aspirasi pada kerja, disiplin dan jujur[53], (f) pendidikan Islam perlu didisain untuk mampu menjawab tantangan masyarakat untuk menuju masyarakat madani serta lentur terhadap perubahan zaman dan masyarakat.

Dari pembahasan di atas, ada beberapa indikator sebagai usaha pembaruan pendidikan Islam, yaitu: seting pendidikan, lingkungan pendidikan, karakteristik pembaruan, dan kurikulum yang disajikan sesuai dengan karakteristik tujuan. Perlu diketahui bahwa suatu usaha pembaruan pendidikan dapat terarah dengan baik apabila didasarkan pada kerangka dasar filsafat dan teori pendidikan yang mantap. Filsafat pendidikan hanya dapat dikembangkan berdasarkan asumsi-asumsi dasar yang kokoh dan jelas tentang manusia, baik sebagi individu maupun sebagai anggota masyarakat, hubungannya dengan lingkungan, alam semesta, akhiratnya, dan hubungannya dengan Maha Pencipta, sedangkan teori pendidikan dapat dikembangkan atas dasar pertemuan antara pendekatan filosofis dan pendekatan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[52]Ibid, hlm. 8.

[53]Suroyo, *Antisipasi Pendidikan Islam dan Perubahan Sosial Menjelang Tahun 2000*, dalam Muslih Usa (editor), Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta, , Cet..I, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hlm.45-48.

emperis"[54]. Dengan demikian, kerangka dasar pertama pembaruan pendidikan Islam adalah "konsepsi filosofis" dan "teoritis pendidikan" yang didasarkan pada asumsi-asumsi dasar tentang manusia yang hubungannya dengan masyarakat, lingkungan dan ajaran Islam.

Langkah awal yang harus dilakukan dalam mengadakan perubahan pendidikan adalah merumuskan "kerangka dasar filosofis pendidikan" yang sesuai dengan ajaran Islam, kemudian mengembangkan secara "empris prinsip-prinsip" yang mendasari keterlaksanaannya dalam konteks lingkungan [sosial dan kultural]. Tanpa kerangka dasar "filosofis" dan "teoritis" yang kuat maka pembaruan pendidikan Islam tidak punya pondasi yang kuat dan juga tidak mempunyai arah yang pasti[55]. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengembangkan kerangka dasar sistimik[56], yaitu kerangka dasar filosofis dan teoritis pendidikan Islam harus ditempatkan dalam konteks supra sistem masyarakat, bangsa dan negara serta kepentingan umat di mana pendidikan itu diterapkan. Apabila terlepas dari konteks ini, pendidikan akan menjadi tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam menghadapi tuntutan perubahan menuju "masyarakat madani" Indonesia.

Kebutuhan umat Islam Indonesia pada era reformasi ini amat mendesak, yaitu bagaimana meningkatkan kualitas untuk menghadapi perubahan menuju masyarakat madani. Jawabanlah, adalah kualitas pendidikan pendidikan haruslah dipersiapakan dan diupayakan, perlu dirumuskan misi dan visi pendidikan yang baru untuk membangun serta meningkatkan mutu dan kualitas manusia dan masyarakat muslim. Apabila tidak melakukan perubahan, pendidikan Islam akan tetap "terbelakang" dan tidak mampu bersaing dalam kehidupan "masyarakat madani" Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[54]Anwar Jasin, *Kerangka Dasar Pembaharuan*...,hlm.8.
[55]Ibid, hlm. 9.
[56]Ibid, hlm. 10.

2. Masyarakat Madani

Istilah masyarakat Madani sebenarnya telah lama hadir di bumi, walaupun dalam wacana akademi di Indonesia belakangan mulai tersosialisasi secara luas[57]. Munculnya wacana masyarakat madani, sebenarnya sebagai tuntutan perubahan kehidupan masyarakat Indonesia yang selama 32 tahun berada pada masa Orde Baru. Selama masa ini "nilai-nilai moral yang merupakan inti dari kebudayaan dan pendidikan telah diredusir menjadi nilai-nilai indoktrinasi yang tanpa arti dan sekedar menjadi semboyan untuk melindungi kebobrokan para pemimpin"[58].

Kata madani, sepintas orang mendengar asosiasinya dengan kota Madinah, memang demikian, karena kata madani berasal dari dan terjalin erat secara etimologi dan terminologi dengan Madinah yang kemudian menjadi ibukota pertama pemerintahan Muslim, kemudian dari pandangan ini, "kalangan pemikir muslim mengartikan *civil society* dengan cara memberi atribut keislaman madani [*attributive* dari kata *al-Madani*]. Karena itu, *civil society* dipandang sama dengan "masyarakat madani" pada masyarakat idial di [kota] Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, karena dalam masyarakat tersebut Nabi berhasil memberlakukan nilai-nilai keadilan, prinsip kesetaraan hukum, jaminan kesejahteraan bagi semua warga, serta perlindungan terhadap kelompok minoritas, sehingga kalangan pemikir Muslim menganggap masyarakat [kota] Madinah sebagai prototype masyarakat ideal produk Islam yang bisa dipersandingkan dengan masyarakat ideal dalam konsep *civil society*"[59].

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[57]Wacana tentang "masyarakat madani" dewasa ini sudah sudah semakin meluas, hal ini nampak dari seminar dan tulisan, baik buku maupun artikel di majalah dan koran yang mengacu kepada konsep dan gagasan masyarakat madani. Istilah itu sendiri berasal dari kata "civil society" yang karena sulit dicari terjemahannya, sering kali disebut dalam bahasa aslinya, Inggris. Tetapi, kemudian muncul terjemahannya dengan istilah "masyarakat sipil" yang sebenarnya kurang tepat, bahkan sering menimbulkan salah pengertian, misalnya dilawankan dengan "masyarakat militer" . M. Dawam Rahardjo, 1999, *Masyarakat Madani di Indonesia...*, hlm. 7.

[58]H.A.R. Tilaar, *Pendidikan, Kebudayaan,...*, hlm. 10.

[59]Thoha Hamim,"*Islam dan Masyarakat Madani (I), Ham, Pluralisme, dan Toleransi Beragama*",Jawa Pos,11 Maret 1999, hlm. 4.

Dalam wacana keislaman di Indonesia, Nurcholish Madjid yang menggelindingkan istilah "masyarakat madani" ini, yang spirit serta visinya terbakukan dalam nama yayasan Paramadinah [terdiri dari kata "para" dan *"madinah"*, dan atau "parama" dan *"dina"*]. Secara "semantik" artinya kira-kira ialah, sebuah agama [dina] yang *excellent* [*paramonut*] yang misinya untuk membangun sebuah peradaban [madani][60], sedangkan kalangan intelektual Muslim, kedua istilah [masyarakat agama dan masyarakat madani] memiliki akar normatif dan kesejarahan yang sama, yaitu sebuah masyarakat yang dilandasi norma-norma keagamaan sebagaimana yang diwujudkan Muhammad SAW di Madinah, yang berarti "kota peradaban", yang semula kota itu bernama Yathrib ke Madinah difahami oleh umat Islam sebagai sebuah manifesto konseptual mengenai upaya Rasulullah Muhammad untuk mewujudkan sebuah masyarakat Madani, yang diperhadapkan dengan masyarakat Badawi dan Nomad[61].

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk masyarakat madani adalah suatu komunitas masyarakat yang memiliki "kemandirian aktivitas warga masyarakatnya" yang berkembang sesuai dengan potensi budaya, adat istiadat, dan agama, dengan mewujudkan dan memberlakukan nilai-nilai keadilan, prinsip kesetaraan [persamaan], penegakan hukum, jaminan kesejahteraan, kebebasan, kemajemukan [pluralisme, dan perlindungan terhadap kaum minoritas. Masyarakat madani [*civil society*] adalah "masyarakat yang mandiri dan bertanggung jawab, masyarakat yang berkembang dari rakyat dan untuk rakyat itu sendiri"[62]. Ahmad Tafsir, menyatakan bahwa masyarakat madani adalah masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya, karena mengetahui hak dan kewajibannya maka penduduk

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[60]Kamaruddin Hidayat, *Masyarakat Agama dan Agenda Penekanan Masyarakat Madani*, dalam Taufik Abdullah, dkk., (Tim Editor Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang) *Membangun Masyarakat Madani Menuju Indonesia Baru Milenium ke-3*, (Yogyakarta: Aditiya Media, 1999), hlm. 267-268.

[61]Ibid, hlm. 268.

[62]H.A.R. Tilaar, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan...*, hlm. 117.

masyarakat madani itu adalah penduduk yang hidup dalam demokrasi[63]. Tanpaknya protetype masyarakat ini, akan diupayakan untuk diwujudkan Indonesia, sehingga dapat dibayangkan kehidupan masyarakat Indonesia akan mengalami perubahan yang mendasar dari semua aspek kehidupan manusia Indonesia, berupa kebiasaan, nilai-nilai yang dianut, agama, budaya, politik, hukum, teknologi, dan pendidikan, yang akan berbeda dengan kehidupan pada era Orde Baru.

Tuntutan perubahan menuju masyarakat madani Indonesia, memerlukan berbagai perubahan pada semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia, serta "sangat membutuhkan individual dan masyarakat dengan kemampuan yang tinggi"[64]. Maka pendidikan sebagai sarana terbaik untuk membentuk suatu generasi, dituntut peran sertanya dalam membangun masyarakat tersebut. Oleh karena itu, "peran pendidikan sangat diperlukan untuk mempersiapkan individu dan masyarakat sehingga memiliki kemampuan dan motivasi serta berpartisivasi secara aktif dalam aktualisasi dan institusionalisasi masyarakat madani"[65] Indonesia, yang mempunyai identitas berdasarkan budaya Indonesia. H.A.R. Tilaar, mengatakan bahwa dalam era reformasi pendidikan nasional tentunya tidak sesuai lagi dengan proses budaya yang terjadi pada masa Orde Baru, karena "pendidikan nasional di dalam era reformasi perlu merumuskan suatu visi pendidikan yang baru yaitu membangun manusia dan masyarakat madani Indonesia yang mempunyai identitas, berdasarkan budaya Indonesia"[66]. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendidikan Islam di Indonesia yang posisinya sama dalam "sistem pendidikan nasional", dan merupakan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[63]Ahmad Tafsir, 1999, "*Pendidikan untuk Masa Depan*", Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Luar Biasa Ilmu Pendidikan Islam pada Institusi Agama Islam Lathifah Mubarokiyah Pondok Pesantren Suryalaya, 5 September 1999, hlm. 5.

[64]*Pengkajian dan Perumusan Filosofi Kebijakan dan Strategi Pendidikan Nasional 1999*, Kelompok Kerja Depdikbud, Konferensi Pendidikan Inonesia Mengatasi Krisis Perubahan-Menuju Pembaruan, Jakarta, 23-24 Februari 1999, hlm. 11

[65]Ibid, hlm. 11.

[66]Tilaar, menyatakan bahwa dalam era reformasi, pendidikan nasional tidak sesuai lagi dengan proses budaya yang terjadi pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru manusia Indonesia tidak hidup lagi dalam dunianya yang orisinil , dunia yang berbudaya dan pendidikan nasional telah dipisahkan dari budaya bangsa. Pendidikan nasional tidak lagi diarahkan untuk melahirkan manusia-manusia yang berbudaya, yang mempunyai identitas atau jati diri, bukan lagi menghasilkan manusia yang berbudaya, tetapi manusia beringas, mudah tersinggung, toleransi tipis dan menganut budaya kekerasan .H.A.R. Tilaar, *Pendidikan, Kebudayaan,...*, hlm. 10.

produk budaya Orde Baru, maka pada era reformasi ini tentunya juga tidak sesuai lagi. Untuk itu pendidikan Islam dituntut perannya dalam era ini, yaitu perlu merumuskan kembali visi pendidikan yang baru untuk membangun manusia dan masyarakat madani Indonesia yang mempunyai identitas berdasarkan budaya Islam Indonesia.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi literatur atau bersifat *Library Research*, dimana sumber data berasal dari bahan-bahan [tulisan] dari para pemerhati, pengamat, ahli pendidikan Islam dan para sosiologi yang terkait dengan permasalahan penelitian ini. Untuk itu, penelitian ini bertujuan menelusuri dan mencermati pemikiran-pemikiran yang mendalam tentang pembaruan pendidikan di Indonesia yang implikasinya terhadap wacana pemikiran pendidikan di Indonesia khususnya pendidikan Islam untuk masyarakat madani Indonesia. Maka untuk lebih memahami arah pembahasan penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode :

1. Sumber Data

Subyek penelitian ini adalah pemikiran para ahli pendidikan Islam tentang pendidikan Islam dan para sosiologi tentang masyarakat madani, baik melalui sumber-sumber primer maupun sekunder. Sumber-sumber data primer berupa karangan yang ditulis para ahli pendidikan tentang pembaruan pendidikan Islam dan para sosiolog tentang masyarakat madani.

Referensi yang digunakan sebagai sumber data primer adalah : Konsep Pendidikan dalam Islam Suatu Rangka Pikir Pembinaan Fisafat Pendidikan Islam [Syed Muhammad al-Naquib al-Attas,1984]. Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia Strategi Reformasi Pendidikan Nasional, H.A.R.Tilaar, [1999]. Konsep Pendidikan dalam Islam, Naquib al-Attas, [1994]. Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III, Suyanto dan Djihad Hisyam, [2000]. Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam, Hasan Langgulung, [1980]. Sejarah Pendidikan Islam, Ahmad Salabi,[1973]. Islam dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual, Fazlur Rahman, [1985], Islam, Fazlur Rahman,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[1997]. Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Melenium Baru, Azyumardi Azra, [1999]. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Mahmud Yunus, [1992]. Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, Ahmad D. Marimba, [1980]. Pembaharuan Pendidikan Islam dan Pengajaran Islam, Amir Hamzah, [989]. Pendidikan Islam, Demokratisasi dan Masyarakat Madani, Ismail SH - Abdul Mukti (Editor), [2000]. Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Filosofi dan Kerangka Dasar Operasionalnya, Abd Mujib Muhaimin, [1993]. Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, Ahmad Tafsir,[1994]. Paradigma Pendidikan Masa Depan, Zamroni,[2000]. dan buku-buku pendidikan yang lainnya. Sedangkan referensi yang membahas masalah masyarakat madani diantaranya adalah : *Civil Society* versus Masyarakat Madani Arkeologi Pemikiran "Civil Society" dalam Islam Indonesia, Ahmad Baso, [1999], Refleksi Agenda Reformasi Membangun Masyarakat, St. Sularto [Penyunting], [1999]. Masyarakat Madani Pemikiran, Teori dan Relevansinya dengan Cita-cita Reformasi, Adi Suryadi Culla, [1999]. Menuju Masyarakat Madani, Gagasan, Fakta, dan Tantangan, Azyumardi Azra,[1999]. Konsep Masyarakat Islam, Muhammad Amin, [1993], dan buku-buku lainnya yang membahasan masyarakat madani.

Sumber data sekunder dilakukan dengan cara mencermati pemikiran-pemikiran pembaruan pendidikan Islam yang ditulis oleh pemerhati pendidikan, pengamat pendidikan Islam dan sosiolog baik melalui surat kabar, jurnal, majalah, makalah-makalah seminar, dan karya-karya ilmiah yang relevan. Maka untuk mencermati pemikiran melalui surat kabar, jurnal, majalah, dan makalah-makalah seminar, "menurut peosedur, popolasi digolongkan ke dalam strata berdasarkan suatu kriteria jumlah pembaca, jaringan pelanggan, pandangan politik, asal daerah dan sebagainya"[67]. Untuk itu, penentuan sampel surat kabar, jurnal, majalah, dan makalah-makalah seminar, ditentukan berdasarkan strata tingkat nasional dan daerah, yang sesuai dengan materi permasalahan penelitian sebagai berikut : *Pertama,* Jurnal yang digunakan sebagai sumber data adalah : *Paramadina*, Jurnal Pemikiran Islam, Volume I, Nomor 2, 1999, artikel: Masyarakat madani di Indonesia, sebuah penjejakan awal, M.Dawam Raharjo, 1999 [hlm.7-32], Wacana intelektual tentang Civil Society di Indonesia, Muhammad AS.Hikam,1999 [hlm.33-47], Dilema Islam kontemporer: antara masyarakat madani dan negara Islam, Olaf Schumann,1999 [hlm.48-75], Wawasan al-Qur'an tentang masyarakat madani: menuju terbentuknya

[67]Darmiyai Zuchdi, *Seri Metodologi Penelitian, Panduan Penelitian Analisis Konten*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP, 1993), hlm. 41.

negara bangsa yang modern, Bahtiar Efendi,1999 [hlm.76-87]. *Ulumul Qur'an*, Jurnal Kebudayaan dan Perdaban, No.2/VII/1996, artikel: Menuju Masyarakat Madani, Nurcholish Madjid,1996 [hlm.51-67], Jurnal *Pendidikan dan Kebudayaan*, No.017, tahun ke-5, Juni 1999, artikel: Desentralisasi Pendidikan, Miftah Thoha, 1999 [hlm. 1-7], Desentralisasi Pendidikan: Pelaksanaan dan Permasalahannya, H.Nuril Huda, 1999 [hlm.8-29] *UNISIA,* Jurnal ilmu-ilmu sosial, No. 39/ XXII/ III/1999 dan No: 41/XXII/IV/ 2000, artikel : Agama, demokrasi dan masyarakat madani, Dawam Rahardjo, 1999 [hlm. 25-33], dan Supermasi hukum dalam masyarakat madani, perspektif sejarah hukum Islam, Akh. Minhaji, 2000 [hlm.239-253] *"Afkar"*, Jurnal Refleksi Pemikiran Kegamaan dan Kebudayaan Islam [Edisi No.7 Tahun 1999], artikel : Islam dan "Civil Society" di Indonesia dari konservatisme menuju kritik. *"Profetika",* Jurnal Studi Islam, Vol.I No.2 Juli 1999 Program Studi Magister Studi Islam UMS, artikel : Universalisme nilai-niiai politik Islam menuju masyarakat madani, Ahmad Syafii Maarif,1999 [hlm.165-175]. *Kedua*, Surat Kabar yang digunakan sebagai sumber data adalah : Surat Kabar Republika dengan isi : Paradigma baru pendidikan membangun masyarakat madani, Hidayat Syarief, [Sabtu, tanggal, 30 Oktober 1999]. Pendidikan berbasis masyarakat, Winarno Surachmad, [Jum'at, tanggal, 23 Juni 2000]. Pendidikan Islam vs Pendidikan Barat [Jum'at, tanggal, 23 Juni 2000]. Surat Kabar Kompas, dengan artikel : Islam dan prasyarat budaya masyarakat madani, Abdul Munir Mulkan, [Senin, tanggal, 25 Januari 1999]. Islam dan masyarakat madani, Masykuri Abdullah, [Sabtu, 27 Februari 1999]. Prasyarat budaya "Civil Society", Zuli Qodir, [Jum'at, tanggal, 9 April 1999], Peranan masyarakat akademis sebagai bagian masyarakat madani, Moeslim Abdurrahman, [Jum'at, tanggal, 20 April 1999]. Membangun pendidikan yang bermutu, Amin Al-Humami, [tanggal, 25-8-2000]. Jawa Pos, dengan artikel : Islam dan masyarakat madani Ham, Pluralisme, dan Toleransi Beragama,Thoha Hamim, [Kamis, tanggal, 11 Maret 1999], Islam dan masyarakat madani Berdampingan dalam semangat pluralisme, Thoha Hamim, [Jum'at, tanggal, 12 Maret 1999], Ambivalensi masyarakat madani, Maulidi, [Rabu, tanggal, 17 Maret 1999]. Surat Kabar Kedaulatan Rakyat : artikel terdiri dari : Renungan pendidikan nasional 2 Mei 1999, "Mereformasi pendidikan nasional kita", Ki Supriyoko, [Sabtu, tanggal, 1 Mei 1999], Soal reformasi pendidikan, "Omong kosong tanpa mengubah UU No.2/89, Prof. Djohar, [Selasa, 4 Mei 1999], dan Lima kebijakan dasar pendidikan, Ki. Supriyoko, [tanggal, 7 Oktober 2000]. Dan *Ketiga*, sumber data yang berasal dari makalah-makalah seminar yang berkaitan dengan masalah

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

penelitian, baik berskala nasional maupun daerah, dan sumber data yang berasal dari sumber eloktronik komputer internet.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi yaitu memanfaatkan informasi yang terdapat di perpustakaan dan jasa informasi lain yang tersedia. Pemanfaatan perpustakaan diperlukan untuk mengumpulkan data, dengan penelusuran data yang terkait dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini semata-mata dilakukan dengan membaca dan menelaah sumber-sumber data primer maupun sekunder. Manfaat yang diperoleh dari penelusuran adalah berusaha menemukan pemikiran yang dikemukakan oleh para ahli pendidikan dalam rangka mendiskripsi konsep pembaruan pendidikan Islam untuk menyarakat madani Indonesia.

3. Teknik Analisis Data

Data yang dikehendaki dalam penelitian ini adalah data kualitatif, maka teknik analisis data yang dilakukan dengan menggunakan metode "*content analisis*"[68] yang merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi[69]. Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan isi pemikiran para ahli pendidikan tentang pembaruan pendidikan Islam untuk masyarakat madani Indonesia, yang didapatkan melalui pendekatan sosio-kultural historis, sehingga tidak dihindari jika harus digunakan analisis historis dan sosio-kultural, karena ada kemungkinan konsep-kosen pendidikan yang dituangkan para ahli pendidikan berkaitan kondisi sosial budaya dan berlaku pada masa tertentu.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[68]Diskripsi yang diberikan para ahli sejak Janis (1952) sampai Lindzey & Aronson (1968) yang dikutip Albert Widjaja dalam disertasinya (1982) tentang content analysis menampilkan tiga syarat analisis, yaitu : (1) objektivitas, (2) pendekatan sistimatis, dan (3) generalisasi. Analisis harus berlandaskan aturan yang dirumuskan secara eksplisit, selain itu menurut Barcos, yang dikutip Noeng Muhadjir, menyatakan bahwa menggunakan secara teknis "conten analisis" mencakup upaya atau langkah-langkah : (a) klasifikasi tanda-tanda yang dipakai dalam komunikasi, (b) menggunakan kriteria sebagai dalil komunikasi, dan (c) menggunakan analisis tertentu sumber prediksi (Noeng Muhadjir, 1990, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1990), hlm. 76-77). Dengan menggunakan metode "conten analisis" ini, peneliti akan melakukan "analisis isi pemikiran dan pandangan" dari para ahli pendidikan tentang pembaruan pendidikan Islam untuk masyarakat madani Indonesia dari berbagai sumber buku-buku, artikel, koran, makalah-makalah seminar, jurnal, internet, dan sumber-sumber lain yang membahas pendidikan Islam dan masyarakat madani.

[69]Noeng Muhadjir, 1990, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1990), hlm. 76.

Dengan demikian, "Analisis konten/isi [*Content Analysis*] dapat berfungsi sebagai alat ekstraksi [penyaringan] data lewat dokumen dan perangkat analisis membuat inferensi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan riset dan pengkajian". Proses "*Content analysis*" menampilkan tiga syarat, yaitu : obyektivitas, penelitian sesuai dengan kejadian emprik yang teramati terukur, pendekatan sistimatis, yaitu data mana yang termasuk dalam suatu kategori, dan mana yang tidak termasuk kategori, dan generalisasi; artinya temuannya haruslah mempunyai sumbangan teoritik[70]. Maka, hasil temuan dalam penelitian ini akan digeneralisasi, sehingga menemukan konsep pembaruan pendidikan Islam untuk masyarakat madani.

Berdasarkan penjelasan conten analisis di atas, maka cecara umum, langkah-langkah analisis yang ditempuh dalam penelitian ini sebagai berikut : Pertama, pengadaan data, yang terdiri atas penentuan satuan [unit], penentuan sampel, perekaman atau pencatatan[71] data yang diperlukan, baik dari data sumber primer mapun data sumber sekunder, kedua, pengurangan [reduksi] data, ketiga, Inferensi, dan keempat, adalah analisis[72], menganalisis data yang telah terhimpun, dan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[70]Suyata, 2000, "*Menggunakan Secara Tepat dan Benar Analisis Konten dan Menghindari Kekeliruan*", makalah disampaikan pada Pelatihan dan Pendidikan Teknik Analisis Penelitian Soail Keagamaan, Magister Studi Islam (MSI) UII,Yogyakarta, 4 Nopember 2000, hlm. 1., dan Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian* ..., hlm. 77-78.

[71]Darmiyati Zuchdi, *Seri Metodologi Penelitian*... ., hlm 28.

[72]Ibid, hlm. 28., Penjelasan [1] Pengadaan data, adalah unit informasi yang direkam dalam suatu media, yang dapat dibedakan dengan data yang lain, dapat dianalisis, dan relevan dengan masalah yang diteliti. Data harus merupakan informasi yang tepat, dalam arti bahwa data tersebut mengandung hubungan antara sumber informasi dan bentuk-bentuk simbolik yang asli pada satu sisi, dan teori-teori, model, dan pengetahuan mengenai konteks data pada sisi lain, dengan demikian, data harus mewakili gejala yang sebenarnya. Pengadaan data dilakukan dengan tiga tahapan : *Pertama*, penentuan satuan (unit), adalah merupakan kegiatan memisah-misahkan data menjadi bagian-bagian yang selanjutnya dapat dianalisis. Ada lima cara untuk memberikan batasan dan mengidentifikasikan unit, yaitu : (a) Unti menurut fisik, membagi media menurut: waktu, panjang, besar atau tebalnya, tidak menurut informasi yang terkandung. (b) Unit sintaksis, adalah bersifat alami, bergantung pada kaidah bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pesan komunikasi. Unit terkecil adalah kata, unit yang lebih besar berupa frasa, kalimat, paragraf, dan wacana. (c) Unit referensial, dapat diberi batasan menurut objek, kejadian, pribadi, tindakan, negara, atau ide yang diacu oleh suatu ekspresi (ungkapan). (d) Unit proposisional, penggunaan unit referensial tidak menggunakan data bahasa sebagai sesuatu yang kompleks. Suatu cara untuk menggambarkan unit-unit yang agak kompleks ialah dengan memperhatikan strukturnya. (e) Unit tematik, diidentifikasikan menurut hubungannya dengan definisi struktural konten suatu tulisan naratif, atau tafsir. Unit tematik dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya berdasarkan landasan konseptual. *Kedua*, penentuan sampel, dalam analisis konten, ada tiga macam unit, yaitu : (a) Unit penentuan sampel, (b) Unit pencatatan, dan (c) Unit konteks (Krippendorff, 1980 : 57-60). Unit penentu sampel, adalah bagian-bagian realitas yang diamati atau bagian-bagian eksprensi bahasa yang tidak terkait satu dengan yang lain, hal ini tergantung pada minat dan keahlian peneliti. Unit pencatatan, adalah bagian-bagian unit pencatatan sampel yang dapat dianalisis secara terpisah. Perbedaan antara unit-unit pencatatan merupakan hasil dari upaya pendeskripsian. Unit konteks, memberikan batas-batas pada informasi kontektual yang dapat dimasukkan dalam deskripsi unit pencatatan. *Ketiga*, pencatatan, oleh karena data dalam analisis konten berupa data simbolik yang tak terstruktur, pencatatan merupakan masalah pokok dalam penelitian ilmu-ilmu sosial dan humanis. [2] Pengurangan (reduksi) data, reduksi data tidak merupakan masalah dan dapat dilakukan selama tahap analisis data. Pengurangan data dengan menghilangkan hal-hal yang tidak relevan dengan masalah penelitian. [3] Inferensi, dalam melakukan analisis konten inferensial, peneliti harus sensitif terhadap konteks data yang diteliti, hal ini ditujukan dengan : (a) dalam menganalisis data berusaha agar tidak mengurangi makna simboliknya, (b) menggunakan konstrak analisis yang menggambarkan konteks data. [4] Analisis, berhubungan dengan proses identifikasi dan penampilan pola-

kemudian dituangkan atau disajikan dalam bentuk tulisan. Model analisis pada penelitian ini, dapat digambarkan sebagai berikut :

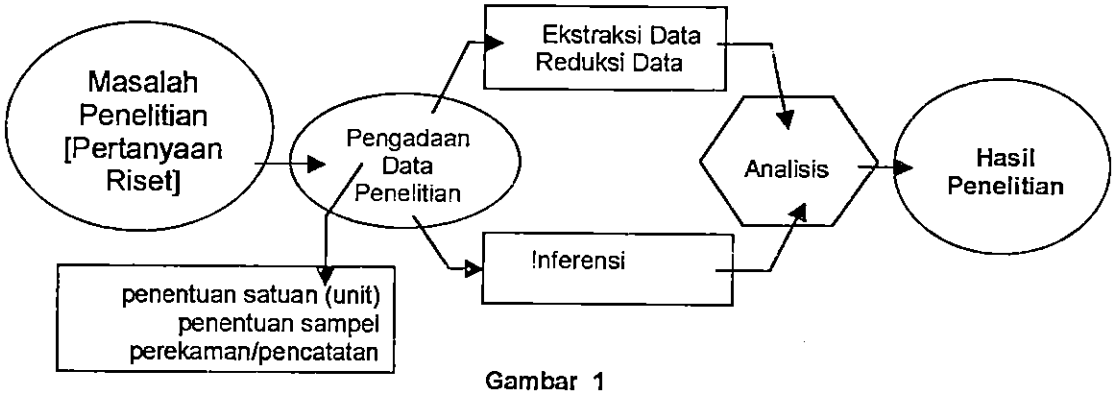

Gambar 1
Diagram Langkah-Langkah Analisis

Hasil penelitian ini lebih ditekankan atau mementingkan obyektivitas, maka pilihan analisis tertuju pada bentuk "klasik" dengan infrastruktur pada "teks" dengan tipe "content analisisnya" pada banyak data atau volume[73], dengan menggunakan "sampel multistage [bertahap], karena dokumen yang diteliti cukup banyak dan komplek dalam arti sejumlah masalah penentuan sampel diatasi satu persatu [pada

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pola yang penting dan memberi keterangan yang memuaskan, atau merupakan deskripsi hasil-hasil analisis konten (Darmiyati Zuchdi, Op.cit., hlm. 20-36 & 51). Noeng Muhadjir, menyatakan untuk mendeskripsikan "contens analysis" yang positivistik kualitatif, Noeng, mengutip Holsti yang mengetengahkan lima ciri "content analysis" , yaitu : (a) teks perlu diproses dengan aturan dan prosedur yang telah dirancangkan., (b) teks diproses secara sistimatis, mana yang termasuk dalam suatu kategori, dan mana yang tidak termasuk ditetapkan berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan, (c) proses menganalisis teks tersebut haruslah mengarah kepemberian sumbangan pada teori, yaitu ada relevansi teoritiknya, (d) proses analisis tersebut mendasarkan pada deskripsi yang dimanifestasikan, (e) bagaimanapun "content analysis" haruslah menggunakan teknik-teknik kuantitatif. (Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian* ..., hlm.79).

[73]Carney [1872], yang dikutip Noeng Mhuadjir, mengetengahkan komponen analisis isi dalam tata susunan sebagai berikut, ada problem yang perlu dikonsultasikan kepada kerangka acuan teoritik, perlu diuji validitas metode yang digunakan serta perlu ditetapkan sampelnya dengan hasil akhir berupa kategori-kategori dan unit-unit rekaman dan konteks, serta menyusun dalam unit-unit perlu format terbakukan. Unit rekaman merupakan berbagai sesuatu yang perlu dihitung, mungkin berupa kata, tema, atau interaksi. Unit konteks merupakan suatu karangan yang di dalamnya terdapat unit rekaman, sedangkan unit konteks memberikan makna dari karangan itu. "Menghitung", dalam arti kuantitatif memang didasarkan pada frekuensi, sedangkan dalam arti kualitatif menyangkut pemaknaan dan mencari arti, diangkat dari intensitas kejadiannya (Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian* .., hlm. 77-78). Carney (1970:44-48), yang dikutip Suyata, menyatakan ada dua tipe analisis kontent, yaitu tipe pertama, analisis konten klasik dan tipe kedua berorientasi teoritik. Analisis konten klasik biasanya penelitiannya pada usaha deskriptif, sedangkan analisis dengan berorientasi teori menekankan pengambilan inferensi. Carney, menyebutkan bahwa dalam praktek dua kutub ini sebenarnya telah bertemu dan berpadu. Untuk itu, prosedur kerja menggunakan analisis ini ada baiknya dibeberkan kedua bentuk analisis konten tersebut. Rincian prasarana, terdiri dari; unit pencatatan, unit konteks, perhitungan, teks, sampel, tujuan, bentuk komprasi untuk menilai data, kriteria. Ciri dua kutub analisis konten tersebut sebagai berikut : Tipe "content analysis" klasik, lebih menekankan, unit pencatatan pada kata, unit konteks pada kalimat, perhitungan dengan frekuensi-komputer, teks pada banyak, sampel pada multistage, tujuan pada diskripsi isi tampil, bentuk komparasi untuk menilai data langsung, dan kriteria pada induktif dengan data luar, sedangkan tipe "content analysis" yang berorientasi teori, lebih menekankan: unit pencatatan pada tema, unit konteks pada bab, perhitungan pada non frekwensi manual, teks pada sedikit, sampel pada purposif, tujuan pada inferensi dan isi tersembunyi, bentuk komparasi untuk menilai data pada tak langsung, dan kriteria pada teoritik (Suyata, *Menggunakan Secara Tepat* ..., hlm. 5-6).

setiap tahap] sebelum peneliti merumuskan kombinasi tahap yang mana yang akan digunakan"[74].

4. Pendekatan Yang Digunakan

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian adalah pendekatan sosio-kultural historis. Pendekatan sosio-kultural dimaksudkan untuk memahami konteks sosial dan kebudayaan yang melatar belakangi pembaruan pendidikan Islam di Indonesia. Sedangkan pendekatan historis, digunakan untuk menelusuri aspek-aspek pemikiran pendidikan yang dibangun atau produk pendidikan pada masa sebelum kemerdekaan, pasca kemerdekaan dan masa orde baru baik kelebihan dan kekurangan, serta upaya pembaruan pada masa itu. Imam Barnadib[75], menyatakan bahwa sistem pendidikan sekarang merupakan proyeksi dari pendidikan pada masa-masa silam. Oleh karena itu pendekatan historis membantu memahami kenyataan kelebihan, kelemahan, dan upaya pembaruan yang telah dilakukan pada masa itu.

G. Sistimatika Pembahasan

Bab I : Merupakan, bab pendahuluan,yang membahas atau menguraikan karangka dasar penelitian ini yang berisikan : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian kepustakaan [yaitu mengkaji hasil karya-karya ilmiah yang sebelumnya]. Selanjutnya membahas kerangka teori, metode penelitian, dan sistimatika pembahasan. Bab II : Pada bab ini, mengkaji perkembangan pendidikan Islam di Indonesia mulai dari masa pra kemerdekaan, pasca kemerdekan, masa Orde Baru, dan masa pasca Orde Baru atau Era Reformasi. Pembahasan pada bab ini lebih dipokuskan pada produk atau hasil pendidikan dari masa para kemerdekaan, pasca kemerdekaan, masa Orde Baru, dan produk atau hasil pendidikan dari Era Reformasi yang diinginkan.

---

[74]Darmiyati Zuchdi, *Seri Metodologi Penelitian* ..., hlm. 40.

[75]Imam Barnadib, *Arti dan Metode Sejarah Pendidikan*, (Yogyakarta : Penerbit IKIP, 1982), hlm. 14.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bab III : Pada bab ini dipokoskan untuk mengkaji konsep pendidikan Islam dengan membahas konsep pendidikan dalam Islam, konsep manusia dalam pendidikan Islam. Kemudian mencermati orientasi pendidikan Islam dan budaya pendidikan Islam di masyarakat Indonesia, sebagai dasar untuk usaha pemberdayaan masyarakat madani Indonesia. Bab IV : Pada bab ini mengkaji masyarakat madani sebagai supra sistem di mana pendidikan akan diterapkan, dengan mencermati konsep masyarakat madani, dan karakteristik masyarakat madani. Kemudian selanjutnya mengkaji konsep masyarakat madani Indonesia dengan mencermati perubahan menuju masyarakat madani Indonesia dengan melihat tantangan, peluang, dan terobosan.

Bab V : Pada bab ini, mengkaji pendidikan Islam untuk masyarakat madani Indonesia. Pembahasan pada bab ini, dipokuskan pada pembahasan strategi pembaruan pendidikan Islam dan model-model pendidikan Islam alternatif sebagai paradigma baru pendidikan Islam dalam usaha membangun masyarakat madani. Kemudian mengkaji dan berusaha menemukan kontribusi atau sumbangan pendidikan Islam bagi pemberdayaan masyarakat madani baik dari dataran strategi micro maupun macro. Kemudian selanjutnya adalah membas aplikasi pendidikan Islam pada masyarakat madani Indonesia sebagai paradigma baru pendidikan Islam. Kemudian pada Bab VI, merupakan bab penutup, yaitu peneliti berusaha menyimpulkan hasil penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB II
PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

A. Pendidikan Islam di Indonesia Sebelum kemerdekaan

Perkembangan pendidikan Islam Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan sangat terkait dengan sejarah perkembangan Islam. Harun Nasution, menyatakan "perkembangan Islam secara garis besar dibagi ke dalam tiga periode, yaitu : periode klasik, pertengahan, dan modern"[1]. Berdasarkan pembagian tersebut, pembahasan sejarah perkembangan pendidikan Islam di Indonesia dalam tesisi ini dibagi dalam tiga periode yaitu perkembangan pendidikan Islam sebelum kemerdekaan, paska kemerdekaan, masa Orde Baru dan era reformasi.

1. Pendidikan Islam pada Masa Awal

Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia sangat erat hubungannya dengan kedatangan agama Islam di Indonesia dan pendidikan Islam dimulai sejak agama Islam masuk ke Indonesia kira-kira[2] pada abad keduabelas masehi. Dengan demikian pendidikan Islam di Indonesia "sama tuanya dengan masuknya agama Islam ke Indonesia"[3]. Menurut beberapa sejarawan, bahwa sebenarnya pendidikan di Indonesia sudah ada sebelum negara Indonesia berdiri yang mulai dari "zaman kuno, kemudian diteruskan dengan zaman pengaruh Hindu Budha, zaman pengaruh agama Islam, zaman penjajahan dan sampai dengan pendidikan pada zaman kemerdekaan"[4] sampai sekarang.

---

[1]Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm.11.

[2]Sejarah pendidikan Islam dimulai sejak agama Islam masuk ke Indonesia, kira-kira pada abad keduabelas Maschi. Ahi sejarah umumnya sependapat, bahwa agama Islam masuk mula-mula ke pulau Sumatera bagian Utara di daerah Aceh. Sejarah masuknya Islam itu, tahun berapa, siapakah yang mula-mula memasukkan, tidaklah dapat dijawab secara pasti dalam sejarah. Sebagian ahli sejarah mengatakan, agama Islam masuk ke daerah Aceh pada pertengah abad XII masehi. Sebagian lagi berpendapat, Islam telah masuk ke Aceh sebelum abad XII Maschi. Alasannya, pada abad XII itu, banyak ahli-ahli agama yang termasygir di Aceh. Hal itu menunjukkan, bahwa Islam telah masuk ke daerah Aceh sebelum abad keduabelas, karena tidak mungkin Islam baru masuk, lalu lahir orang-orang ahli dalam Islam itu. Pendapat ini dikuatkan dengan keterangan sebagian ahli sejarah, bahwa orang Arab/Islam telah mengenal pulau Sumatera padabad kesembilan. Maka banyak diantara mereka itu datang ke Sumatera dan ke pulau-pulau Indonesia yang lain untuk berniaga (H.Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Cet. Kedua, (Jakarta: Mutiara,1979), hlm. 10).

[3]Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam*, Cet.Keempat,(Jakarta: Hidakarya Agung,1986), hlm.6.

[4]Made Pidarta, *Landasan Kependidikan Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorah Indonesia*,(Jakarta: Rineke Cipta, 1997), hlm.123.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pada awalnya, pendidikan Islam lebih berkaitan dengan upaya dakwah Islam atau penyebaran ajaran Islam dan kemudian terjadilah interaksi belajar, walaupun interaksi tersebut masih dalam bentuk sederhana, bersifat non-formal dan diselenggarakan di rumah-rumah guru, langgar, surau-surau[5], dan mesjid, kemudian berkembang menjadi pondok pesantren"[6] dan madrasah karena interaksi dengan model pendidikan kolonial Belanda dan Timur Tengah. Disain sistem pembelajaran menggunakan non-klasikal dengan materi pelajaran lebih diorientasikan pada pengetahuan agama, seperti "tafsir, hadits, fiqh, ushul fiqh, tauhid, akhlaq, tasawuf, dan bahasa Arab dengan metode pengajarannya *wetonan, khalaqah, sorogan*, dan hafalan. Suatu hal yang menarik adalah tinggi rendahnya kelas atau ilmu yang dikuasai dapat diukur dari jenis kitab yang dibaca dan dipelajarinya[7] murid. Sebagian sejarawan pendidikan Islam, menyatakan sebenarnya belum secara pasti dapat diketahui bagaimana sistem pendidikannya, kurikulumnya, buku-buku yang dipakai, serta sistem pengelolaannya. Alasan ini didasarkan pada kenyataannya bahwa proses pendidikan hanya berlangsung di rumah, surau-surau, langgar atau di mesjid.

Hasil penelitian Karel A. Steenbrink [selanjutnya ditulis Steenbrink], menyatakan proses pendidikan yang terjadi pada saat itu paling sederhana yaitu berupa pelajaran membaca beberapa bagian dari al-Qur'an dan untuk permulaan diajarkan surat al-Fatihah dan surat-surat pendek dalam *juz Amma* yang terdiri dari

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[5]Pendidikan di Sumatera, mempunyai dua tingkatan yaitu pelajaran Qur'an dan kitab. Pelajaran Qur'an diberikan pelajaran huruf Hijaiyah, Juz' amma dan Qur'an. Setelah murid menyelesaikan pelajaran Qur'an, ia dapat melanjutkan pengkajian kitab dan diajarkan ilmu sharf, nahwu, tafsir dan ilmu-ilmu lain. Pendidikan Islam masa ini bercirikan hal-hal sebagai berikut: pelajaran diberikan satu demi satu, pelajaran ilmu sharf didahulukan dari ilmu nahu, buku pelajaran pada mulanya dikarang ulama Indonesia dan diterjemahkan ke dalam bahasa daerah setempat, Kitab yang digunakan umumnya ditulis tangan, Pelajaran suatu ilmu hanya diajarkan dalam suatu macam buku saja [Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, hlm. 62].

[6]A.Timur Djaelani, *Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pembangunan Perguruan Agama*, (Jakarta: Darmaga,1980), hlm.16.

[7]Haidir Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Menghadapi Abad XXI: Tinjauan dari Sudut Inovasi Kurikulum Pendidikan, dan Lembaga Pendidikan*, (Medan: tp.1996), hlm.2., dan dalam: Muhaimin, dkk., *Kontraversi Pemikiran Fazlur Rahman, Studi Krisis Pembaruan Pendidikan Islam*, Cet.Pertama, (Circbon: Dinamika ,1999), hlm.89.

surat 78 sampai dengan surat 114, yang penting untuk melaksanakan ibadah shalat[8]. Pengajaran permualaan "dimulai dari mempelajari abjad Arab [*hijaiyah*] dan dilanjutkan dengan mengejah ayat-ayat Qur'an dengan irama tertentu"[9]. Mengenai sistem pengelolaan pengajaran "dikelolah seorang petugas yang disebut *'amil, modin* atau *lebai* [di Sumatera] yang berfungsi sebagai guru"[10]. Materi pelajaran yang adalah pelajaran keimanan, akhlak dan tata cara ibadah shalat dan untuk materi pelajaran keimanan lebih dikhususkan pada sifat-sifat Allah dua puluh, serta hukum akal yang tiga yaitui *wajib, mustahil*, dan *jaiz*. Pelajaran akhlak disampaikan dengan metode kisah-kisah para Nabi-Nabi serta orang-orang shaleh yang disertai dengan contoh atau suri teladan dari guru agama kepada murid-muridnya[11]. Sedangkan materi ibadah lebih diutamakan pada latihan atau keterampilan [aplikasi] mengerjakan ibadah salat, karena hal ini didasrkan pada pandangan bahwa dengan latihan berulang-ulang dapat mempengaruhi jiwa murid-murid dan tidak mudah dilupakan selama hidupnya.

Sistem pendidikan saat itu lebih bercorak individual, artinya para murid belajar pada guru satu persatu sambil duduk bersilah didepan guru. Hal ini berpengaruh pada lama belajar, artinya ada murid yang cepat dan juga ada murid yang lambat[12] dan biasanya berlangsung kurang lebih setahun dan kadang-kadang hanya diikuti beberapa bulan saja. Seorang murid dapat dikatakan telah menamatkan pelajarannya apabila sudah dapat membaca Qur'an dengan baik dan benar sampai tamat dan kemudian diadakan selamatan, *khataman* namanya"[13]. Dengan demikian, pelaksanaan pendidikan pada saat itu dibedakan kepada dua macam, yaitu : *Pertama*, pendidikan tingkat rendah, merupakan tingkat pemula yang dimulai dengan pengajaran mengenal huruf al-Qur'an sampai dapat membacanya, dan *kedua,*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[8]Karel A.Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah,Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm.10.

[9]I.Djumhur dan Danasaputra, *Sejarah Pendidikan*, Cet.ke 10, (Bandung CV. Ilmu, 1976), hlm.112.

[10]Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, Cetakan Kedua, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 22.

[11]Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* , hlm. 34.

[12]Ibid, hlm. 12.

[13]I.Djumhur dan Danasaputra, *Sejarah Pendidikan*, hlm. 112.

pendidikan tingkatan atas, yaitu pelajaran yang diberikan selain mengenal huruf-huruf Qur'an ditambah dengan pelajaran melagukan Qur'an, kasidah, berzanji, tajwid serta mengaji kitab perukunan[14].

Pendidikan dan pengajarannya lebih difokuskan pada membaca Qur'an, maka siswa dilatih dapat membaca Qur'an dengan baik, benar dan lancar. Untuk memahami isi Qur'an belum menjadi penekanan karena pengajaran lebih ditekankan pada upaya membaca Qur'an tanpa memperhatikan pemahaman akan isi dan makna Qur'an tersebut"[15]. Meteri pelajaran disampaikan secara berulang-ulang dengan lagu dan bahkan kadang-kadang pelajaran tersebut dijadikan sebagai sajak dan cara ini menjadi daya tarik bagi siswa meskipun mereka tidak mengerti apa yang dilagukannya, tetapi sistem ini menjadi andalan bagi proses pendidikan dan pengajaran dengan metode *sorogan* dan *khalaqah*[16]. Hal yang menarik dalam sistem pendidikan tersebut adalah "tidak dipungut biaya", hanya tergantung pada kerelaan [*keikhlasan*] orang tua murid, sehinga sesuatu yang dapat diberikan berupa "benda" sebagai tanda mata atau uang sesuai kemampuan dan kerelaan masing-masing orang tua. Hubungan kyai dngan murid dan orang tua sangat kental, karena diikat oleh rasa hormat pada kyai dan seorang kyai atau guru dipandang sebagai seorang yang memiliki *kharisma*, maka siswa tidak boleh mengecam kyai atau guru karena dianggap berdosa. Model belajar seperti ini dapat terbangun hubungan sosial antara murid dengan guru yang sangat kental dan hubungannya dapat berlangsung terus walaupun murid-murid telah melanjutkan pelajarannya ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[14]Ibid, hlm. 35.

[15]Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, hlm. 23.

[16]Sistem sorogan, murid-murid belajar secara perorangan dengan guru atau kyai [Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam*,hlm.23]. Sistem *khalaqah*, seorang guru atau kyai dalam memberikan pengajaran sambil duduk bersila dengan dikelilingi oleh murid-muridnya, guru dan semua murid harus sama-sama memegang kitab kemudian guru atau kyai membaca dan disimak oleh murid-muridnya [Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, hlm. 57].

Surau dan masjid, sebagai tempat belajar dalam struktur masyarakat Minangkabau merupakan suatu fenomena yang menarik. Sidi Gazalba, menyatakan sebanrnya surau merupakan bangunan peninggalan kebudayaan setempat [Minangkabau] sebelum datangnya Islam, sebab surau dalam sistem adat Minangkabau adalah kepunyaan kaum, suku atau *indu*[17]. Maka surau didirikan oleh suatu kaum tertentu sebagai bangunan pelengkap *rumah gadang,* di mana beberapa keluarga yang *saparuik* [berasal dari satu keturunan] di bawah pimpinan seorang datuk [penghulu kepala suku]. Maka surau dimaksudkan berfungsi sebagai tempat bertemu, berkumpul, berapat dan tempat tidur bagi anak-anak laki-laki yang telah akil baligh dan orang tua yang telah uzur. Oleh karenanya, fungsi surau berkaitan dengan ketentuan adat, bahwa anak laki-laki tidak mempunyai kamar di *rumahgadang* di rumah orang tuanya sendiri Dengan masuknya Islam surau turut mengalami proses perubahan fungsinya, yaitu diperluas menjadi tempat pengajian dan pengembangan ajaran-ajaran Islam, seperti menjadi tempat shalat [mushalla], tempat belajar membaca al-Qur'an dan lain-lain, serta fungsi awalnya sebagai tempat penginapan anak-anak bujang masih tetap dan tidak berubah[18].

Masjid sebagai tempat belajar menduduki tempat penting dalam struktur social dan keagamaan masyarakat Minangkabau. Maka surau yang merupakan semacam "masjid" dalam ukuran lebih kecil juga mempunyai kedudukan penting, meskipun fungsinya kemudian relatif berbeda satu sama lain. Dalam kaitan dengan fungsinya tersebut, kemudian dapat dilihat perbedaan surau di Minangkabau dengan Langgar di pulau jawa[19]. Masjid mengalami pengembangan fungsi, artinya masjid sebagai tempat shalat dan juga sebagai tempat belajar membaca Qur'an dan lain-lain dan kemudian perkembangan selanjutnya "terjadi pemisahan yang cukup jelas antara fungsi masjid

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[17]Sidi Gazalba, *Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1983), hlm.314-316

[18]Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*,(Jakarta:Logo Macana Ilmu,1999),hlm.130.

[19]Ibid., hlm. 130.

dan surau. Masjid lebih difokuskan untuk kepentingan ibadah dalam pengertian sempit yaitu hanya untuk shalat saja, sedangkan surau semakin luas fungsinya yaitu selain menjadi semacam asrama anak-anak mudah, tempat belajar mengaji, belajar agama, upacara-upacara keagamaan dan tempat *suluk*[20], tempat berkumpul dan berapat, serta tempat penginapan musafir dan lain-lain[21]. Maka Sidi Gazalba, menyatakan fungsi masjid mulai tidak diujudkan secara lengkap, sehingga fungsi majid yang dipersempit menjadi krisis bagi kehidupan Islam atau masyarakat muslim[22].

Perkembangan selanjutnya, pendidikan yang diselenggarakan di surau dan mesjid dirasakan kurang cukup untuk membekali para peserta didik dengan ilmu-ilmu agama, sebab materi dan waktu belajar relatif cukup pendek, sehingga bekal yang dimiliki dianggap belum memadai untuk menghadapi tantangan perubahan zaman yang selalu berubah. Atas dasar ini, kemudian muncul sistem pendidikan "pondok pesantren" yang merupakan suatu lembaga pendidikan Islam "tradisional", yang di dalamnya terdapat seorang kyai yang mumpuni dalam bidang agama. Kyai bertugas mengajar dan mendidik para santri di mesjid sebagai sarana belajar dan didukung dengan adanya pondok sebagai tempat tinggal para santri"[23]. Jika "surau", dikategori sebagai suatu lembaga pendidikan Islam semacam pesantren, itu tidak lain disebabkan terdapatnya beberapa karakteristiknya yang sama atau mirip dengan pesantren.

Meskipun demikian, ada sedikit perbedaan antara "surau" dengan "pesantren" terutama dalam hubungannya dengan kedudukan *"syekh"* ["kiyai"-nya surau] dengan kiyai dalam pesantren di pulau Jawa. Lingkungan sosio-kultural dan keagamaan di Minangkabau serta proses-proses dan dinamika yang terjadi dalam masyarakat ini

---

[20]*Suluk* adalah ibadah yang dilakukan para penganut "tariqat" dengan mengurung diri dalam kelambu atau kamar kecil, bertekum melakukan ibadah guna mendekatkan diri kepada Tuhan sepanjang waktu (Ibid, hlm. 131).

[21]Ibid, hlm. 131.

[22]Sidi Gazalba, *Masjid Pusat Ibadah*, hlm. .314.

[23]A.Mukti Ali, *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini*, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 323.

mempengaruhi pula kedudukan *"syekh"* [24] sebagai figur utama pada sutau surau dan selanjutnya mempengaruhi eksistensi surau itu sendiri. Maka kehadiran surau sebagai lembaga pendidikan Islam semacam pesantren jelas berkaitan erat dengan perluasan fungsi surau dalam masyarakat Minangkabau.

Istilah "pesantren" sebagai lembaga pendidikan Islam yang khas, setidak-tidaknya baru memasyarakat pada saat itu dan digunakan oleh sejumlah lembaga pendidikan Islam di Sumatera Barat dalam beberapa dasawarsa terakhir. Kelihatannya di masa lalu fenomena pesantren yang demikian berkembang di pulau Jawa, tidak banyak mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan lembaga pendidikan Islam semacam ini di Minangkabau, setidaknya sampai terjadi modernisasi dalam pesantren belakangan ini[25]. Mastuhu, menyatakan para peneliti terdahulu sepakat bahwa pesantren merupakan hasil rekayasa umat Islam Indonesia yang mengembangkannya dari sistem pendidikan Agama Jawa. Di bawah pengaruh Islam, sistem pendidikan tersebut diambil alih dengan menggantikan nilai ajarannya menjadi nilai ajaran Islam"[26]. Zamachsyari Dhofier, menyatakan bahwa sejak akhir abad ke-15, Islam telah menggantikan Hinduisme dan pada abad ke 16 dengan munculnya kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam, penduduk Jawa telah dapat di-Islam-kan dan model pendidikan agama Jawa diambil oleh Islam. Pendidikan agama Jawa itu disebut *pawiyatan,* berbetuk asrama dengan rumah ki ajar [guru] di tengah-tengahnya. Ki ajar dan cantrik [murid] hidup bersama dalam satu kampus. Hubungan mereka sangat erat bagaikan keluarga dalam rumah tangga, siang malam selama 24 jam. Pengajaran meliputi ilmu-ilmu filsafat, alam, seni, sastra, dan diberikan secara terpadu dengan pendidikan agama dan moral. Model pendidikan *pawiyatan* ternyata juga dikembangkan oleh Taman Siswa dengan menekankan pentingnya hidup berasrama

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[24]Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi...*, hlm. 130.
[25]Ibid, hlm. 130.
[26]Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: Seri INIS XX, 1994), hlm. 3.

antara guru dan siswa. Dalam konsep pendidikan Taman Siswa terkenal dengan filsafat pendidikannya *Hing arso asung tulodo, hing tengah mbangun karso, tut wuri handayani*, dan kemudian filsafat ini menjadi motto pendidikan nasional[27]. Dengan demikian, "pesantren" dan "Taman Siswa" menunjukkan orientasi yang sama, yaitu pentingnya murid dalam suatu lembaga pendidikan.

Sistem pendidikan Pondok Pesantren[28] mengharuskan para santri berdiam disuatu tempat untuk belajar, artinya para santri tidak lagi berangkat dari rumah setiap pagi dan sore, melainkan para santri harus berdiam atau "mondok" sebagai "santri" di pondok pesantren untuk belajar. Lingkungan pondok pesantren merupakan lingkungan khusus dan terpisah dari pemukiman lainnya. Pada umumnya "lingkungan pondok pesantren biasanya terletak di pinggiran kota atau di desa yang agak jauh dari keramaian kota, memilik "rumah kyai", sebuah tempat "peribadatan" yang juga berfungsi sebagai tempat belajar [disebut mesjid kalau digunakan untuk shalat jum'at, kalau tidak : disebut dengan langgar atau surau], memiliki sebuah atau lebih "rumah pondokan" yang dibuat sendiri oleh para santri dari bambu atau kayu, sebuah atau lebih "ruangan untuk memasak" dan "kolam" atau "ruangan" untuk mandi atau berwudlu"[29].

Pondok Pesantren tidak dapat dilepaskan dari lima elemen dasar atau ciri-ciri tersebut. A. Mukti Ali, menyatakan bahwa ciri-ciri utama pondok pesantren adalah memiliki kyai yang mengajar dan mendidik, santri yang belajar dari kyai, memiliki mesjid sebagai tempat untuk menyelenggarakan shalat berjamaah dan pondok tempat untuk tinggal para santri. Itulah rata-rata ciri pondok pesantren, tetapi ada yang lebih dari sekedar yang tersebut di atas, yaitu adanya tempat-tempat khusus untuk

---

[27]Ibid, hlm. 3-4.

[28]Steenbrink, mengutip Amir Hamza Wirjosukarto, secara terminologi pendidikan pesantren dilihat dari segi bentuk dan sistemnya, berasal dari India. Sebelum penyiaran Islam di Indonesia, sistem tersebut telah dipergunakan secara umum untuk pendidikan dan pengajaran agama Hindu di Jawa. Setelah Islam masuk dan terbesar di Jawa, sistem tersebut kemudian diambil Islam. Istilah pesantren sendiri seperti halnya mengaji, menurut Steenbrink, bukanlah berasal dari istilah Arab, melainkan dari India. Demikian juga istilah pondok, langgar di Jawa, surau di Minangkabau dan rangkang di Aceh bukanlah merupakan istilah Arab, tetapi dari istilah yang terdapat di India [Karel A. Steenbrik, *Pesaantren Madrasah*...,hlm. 20-21].

[29]Ibid, hlm. 15-16

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

belajar. Namun ada juga yang lebih sederhana lagi, yaitu dengan menggunakan mesjid, selain sebagai tempat belajar, juga sebagai tempat tidur[30]. Zamakhsyari Dhofier, menyatakan hal yang samam yaitu pesantren memiliki pondok, mesjid, santri, pengajaran kitab-kitab Islam kalsik, dan kyai merupakan lima elemen dasar dari tradisi pesantren. Maka la melanjutkan teorinya, apabila suatu lembaga pengajian yang telah berkembang hingga memiliki kelima elemen tersebut, akan berubah statusnya menjadi pesantren[31]. Maka dengan ciri-ciri tersebut dapat dikatakan bahwa pondok pesantren merupakan salah satu jenis pendidikan Islam Indonesia yang bersifat *tradisional* untuk mendalami ilmu agama Islam dan mengamalkannya sebagai pedoman hidup keseharian atau disebut *tafaqqahu fiddin* dengan menekankan pentingnya moral dalam hidup bermasyarakat.

Munculnya sistem pendidikan pesantren sebagai alternatif jawaban terhadap pendidikan Islam dasar yang berkembang pada saat itu. Alasan ini didukung dengan realitas para murid setelah menyelesaikan pendidikan di Langgar, surau, mesjid, di antara mereka melanjutkan ke pesantren untuk mendalami pelajaran-pelajaran agama Islam. Kemampuan dasar yang diperoleh dari pendidikan "dasar" berupa hafalan Qur'an dan hadits merupakan syarat mutlak untuk mengikuti pendidikan di pondok pesantren. Sebab di pesantren "para santri dihadapkan dengan berbagai cabang ilmu agama yang bersumber dari kitab-kitab klasik atau kitab-kitab kuning[32]. Steenbrink, menyatakan bahwa "pesantren tidak hanya dihormati sebagai tempat belajar, tetapi lebih ditekankan sebagai tempat tinggal yang seluruhnya dipenuhi dan diresapi dengan nilai-nilai agama[33]. Maka dapat ditegaskan bahwa pesantren selain

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[30]A.Mukti Ali, 1994, "*Universitas Islam Indonesia Harapan dan Pengembangannya*", dalam: Supardi, dkk., [Penyunting], *Setengah Abad UII, Sejarah Perkembangan Universitas Islam Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press,1994), hlm. 287.

[31]Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Cet.Keenam, (Jakarta:LP3ES,1994),hl.44.

[32]Imam al-Fatta, *Modernisasi Pesantren dan Krisis Ulama*, Panjimas No.677. Maret 1991., dan Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*...,hlm.25.

[33]Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah*..., hlm. 16.

memiliki basis pendidikan dan pengajaran agama dan ia juga dipenuhi dengan nilai-nilai agama dan pelaksanaan kewajiban ajaran Islam secara aplikatif.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pesantren "mempunyai basis pada pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu tradisonal Islam, seperti al-Qur'an, hadits, fiqh, bahasa Arab dan lain-lain, dan juga didukung dengan pelajaran mantiq, aljabar, ilmu falak[34], ilmu nahwu, ilmu tajwid, tauhid dan sebagainya. Lama belajar di pesantren tidak memiliki standas waktu tertentu. Steenbrink, manyatakan bahwa "lamanya belajar untuk ilmu nahwu saja dapat berbeda yaitu dari enam bulan sampai dengan enam tahun lebih, tergantung dari kyai masing-masing dan bakat muridnya". Seorang santri biasanya "dapat menyelesaikan beberapa cabang tata bahasa Arab, kemudian mulai mempelajari pelajaran agama yang lainnya dan pelajaran-pelajaran terpenting untuk dipelajari adalah ilmu fiqh, tauhid atau ushuluddin, dan tafsir al-Qur'an. Setelah santri menyelesaikan ketiga macam pelajaran pokok tersebut, baru dapat mengambil mata pelajaran tambahan seperti tasawuf, hadits, hisab atau falak, dan tergantung pada keahlian atau perhatian kyai di pesantren tersebut"[35]. Selain itu pelajaran tersebut, juga diberikan pelajaran seni bela diri tradisional sebagai pelajaran olah raga.

Materi pelajaran berasal dari kitab-kitab klasik yang berbahasa Arab, dan kadang-kadang kitab-kitab klasik yang diajarkan berbeda antara satu pesantren dengan pesantren yang lain, walaupun ada juga yang sama. Maka dengan keanekaragaman kitab-kitab klasik yang dipelajari antara lain mendorong para santri untuk berpindah-pindah dari satu pesantren ke pesantren lainnya dalam rangka melengkapi dan mendalami pelajaran agama Islam"[36]. Steenbrink, menyatakan biasanya "pesantren kecil hanya memberikan pendidikan pendahuluan, sedangkan

---

[34]Azyumardi Azra, "*Pembaruan Pendidikan Islam, Sebuah Pengantar*", dalam: Marwan Sarijo, Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: CV.Amissco, 1996), hlm. 12.

[35]Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah...*, hlm. 24.

[36]Machnun Husein, *Pendidikan Islam dalam Lintasan Sejarah*, Cet.Pertama,, (Yogyakarta: Nur Cahaya,1983),hlm.2-3.

pesantren yang lebih besar dengan seorang kyai yang masyhur, santri dapat dibina untuk membaca kitab-kitab yang sulit"[37]. Cara ini mendorong sebagian santri berusaha untuk belajar pada kyai tersebut atau para santri mencari kyai yang memeliki keahlian khusus dalam bidang-bidang ilmu-ilmu tertentu, seperti ilmu falak, fiqh, nahwu, dan sebagainya.

Demikian upaya menampilkan potret karakteristik pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional, yang belum dapat secara komprehensif ditampilkan dalam pembahasan ini. Tetapi dari potret sederhana ini, dapat diambil beberapa karakteristik sistem pendidikan pesantren sebagai berikut:

Pertama, pesentren sebagai sistem, artinya sebagai sumbu utama dari dinamika sosial, budaya dan kegamaan masyarakat Islam tradisional dan pesantren telah membentuk suatu subkultur[38], yang secara sosio-antropologi dapat dikatakan sebagai masyarakat pesantren. Apabila hal ini dielaborasi lebih jauh, maka pesantren bukan semata-mata wujud fisik tempat belajar agama, tempat tinggal, kitab kuning, santri dan kyainya saja. Tetapi masyarakat dalam pengertian luas yang tinggal disekelilingnya dengan membentuk pola interaksi, pola hubungan kebudayaan, interaksi sosial dan keagamaan. Pola-polanya kurang lebih sama dengan yang berkembang atau dikembangkan di pesantren atau lembega pendidikan Islam yang berorientasi pesantren. Selain itu, kebudayaan masyarakat setempat tak dapat dibantah memang dipengaruhi oleh pesantren dan *diderivasi* darinya[39], dalam arti masyarakat sekeliling atau sekitar tersebut adalah termasuk bagian dari masyarakat pesantren, karena mereka selalu interaksi dengan pesantren.

Kedua, pesantren bertujuan untuk "membimbing anak didik untuk menjadi manusia yang berilmu dan berkepribadian Islam. Dengan ilmu agamanya tersebut

---

[37]Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah...*,hlm. 17-18.

[38]Dawam Rahardjo,[Penyun] *Pesantren dan Pembaruan*, (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 42.

[39]Ismail SM, *"Signifikansi Peran Pesantren dalam Pengembangan Masyarakat Madani"*, dalam : Ismail SM dan Abdul Mukti [edi], Pendidikan Islam, Demokratisasi dan Masyarakat Madani, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2000), hlm.175.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

santri sanggup menjadi *mubaliq* Islam dalam masyarakat sekitar melalui ilmu dan amalnya". Dengan demikian, pesantren berupaya "mempersiapkan para santri untuk menjadi orang alim dalam ilmu agama yang diajarkan oleh kyai yang bersangkutan serta mengamalkannya dalam masyarakat"[40]. Satu hal yang penting yang perlu dicatat karakteristik pesantren yang sangat menonjol adalah terkait dengan tujuan dari pesantren. Zamakhsyari Dhofier, menyatakan pendidikan di pesantren tidak semata-mata untuk memperkaya pikiran santri dengan penjelasan-penjelasan, tetapi untuk meninggikan moral, melatih dan mempertinggi semangat, menghargai nilai-nilai spritual dan kemanusiaan, mengajarkan sikap dan tingkah laku yang jujur dan bermoral. Menyiapkan para santri untuk hidup sederhana dan bersih hati. Setiap santri diajar agar menerima etik agama di atas etik-etik yang lain. Maka tujuan pendidikan pesantren bukanlah untuk mengejar kepentingan kekuasaan, uang dan keagungan duniawi, tetapi ditanamkan kepada mereka bahwa belajar adalah semata-mata kewajiban dan pengabdian [ibadah] kepada Tuhan[41].

Ketiga, model pengajaran di pesantren "bersifat klasikal, dengan metode pengajaran *wetonan* dan *sorogan.* Di Jawa Barat, metode tersebut diistilahkan dengan *bandungan*, sedangkan di Sumatera digunakan istilah *halaqah*"[42]. Metode pembelajaran yang umum dikenal di pesantren-pesantren adalah metode *Wetonan*, di mana seorang kyai mambaca suatu kitab dalam waktu tertentu dan santri mendengarkan serta menyimak bacaan kyai, sehingga metode ini dapat dikatakan sebagai proses belajar kolektif[43], karena para santri duduk mengelilingi (*halaqah*) kyai sambil menyimak kitab yang bacaan. "Kyai membacakan teks baris demi baris, kemudian menerjemahkan dan dipandang perlu memberikan penjelasan. Dengan cara ini, seorang santri dituntut mempelajari satu kitab tertentu selama beberapa tahun

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[40]HM. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 248.
[41]Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, hlm. 21.
[42]Tim Depag. RI, *Pedoman Pembinaan Pondok Pesantren*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 1983), hlm. 8.
[43]Aziz Masyhur A, *Pokok Pikiran Pengembangan Pengkajian Kitab*, Majalah Tebuireng, No.5 September 1989.

sebelum dapat mengerti seluruhnya. Maka lamanya waktu belajar, juga disebabkan kyai membaca beberapa macam buku yang dikuasainya sekaligus[44], sehingga sistem *halaqah* dikatakan kurang efektif dalam pembelajaran.

Mahmud Yunus, salah seorang kritikus pesantren Indonesia yang dikutip Steenbrink, menyatakan bahwa "sistem *halaqah* tersebut hanya dapat mengahsilkan 1 [satu] persen murid yang pandai, sedang 99 persen lainnya hanya belajar bagaimana dapat bersama-sama membeli minyak dengan harga yang lebih murah. Kata Mahmud Yunus, menurut gurunya sistem *halaqah* hanya dapat mengeluarkan alim besar kurang lebih 1 [satu] orang dalam 100 orang, sedangkan 99 orang hanya untuk menolong-nolong beli minyak"[45]. Penggunaan metode *Sorongan* dalam proses belajar mengajar, menuntut santri cukup pandai men-"*sorong*"- kan [mengajukan] sebuah kitab kepada kyai untuk dibaca dan kesalahan dalam membaca langsung dibenarkan oleh kyai dan metode ini lebih tepat dikatakan sebagai proses belajar mengajar individual. Namun demikian, bukan berarti metode *sorongan* dan *bandungan* semakin tidak efektif dalam proses belajar mengajar, sebaliknya secara didaktik-metodik dalam konteks pencapaian hasil belajar metode ini terbukti memiliki efektivitas dan signifikansi yang tinggi. Karena sistem ini memungkinkan seorang kyai mengawasi, menilai dan membimbing secara langsung kemampuan santri dalam menguasai materi. Dengan demikian, efektivitas sistem *bandongan* terletak pada keperluan praktis pencapaian kuantitas dan percepatan kajian kitab[46].

Keempat, karakteristik khusus yang terdapat pada pesantren adalah "kurikulum pesantren" yang "terfokus pada ilmu agama, misalnya ilmu *sintaksis* Arab, *morfologi* Arab, hukum Islam, sistem *yurisprudensi* Islam, Hadits, Tafsir, al-Qur'an, theologi Islam, tasawuf, tarikh dan retorika"[47] dan ditambah dengan beberpa ilmu pengetahuan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[44]Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah...*, hlm. 24.
[45]Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, hlm. 58.
[46]Ismail SM, *Signifikansi Peran Pesantren...*, hlm. 178.
[47]Amir Hamzah, *Pembaruan Pendidikan dan Pengajaran Islam*, (Jakarta: Mulia Ofset, 1989), hlm.26 dan 236.

lain seperti seni bela diri tradisional. Steenbrink[48], mengkritisi kurikulum pendidikan yang diterapkan di pesantren sebenarnya tidak sesuai dengan santri biasa, yang hanya mempunyai waktu beberapa tahun untuk belajar mengaji antara umur 12 hingga 15 tahun. Bagi santri yang hanya mempunyai kecerdasan dan kerajinan yang biasa atau pas-pas, waktu tersebut belum cukup untuk mempelajari tata bahasa Arab. Sebab materi pelajaran yang diajarkan dengan cara yang begitu sulit, sehingga para santri belum mampu berdiri sendiri membaca satu kitab Arab. Apabila dipandang dari sudut pengembangan intelektual, sistem ini hanya bermanfaat bagi santri yang cerdas, rajin dan mampu, serta bersedia mengorbankan waktu yang cukup panjang untuk belajar.

Kelima, pendidikan di pondok pesantren sebagai model pendidikan Islam yang lebih mengkhsuskan pada pendidikan agama Islam, meningkatkan moral, melatih dan mempertinggi semangat, menghargai nilai spritual dan kemanusiaan, mengajarkan sikap dan tingkah laku jujur, bermoral, hidup sederhana dan berhati bersih serta setiap santri diajar agar menerima etika *ilahiyah* diatas etika-etika yang lainnya.

Itulah gambaran dan kondisi lembaga pendidikan pesantren dengan segala kelebihan dan kekurangannya, tetapi diakui bahwa pesantren telah tumbuh dan berkembang di mana-mana. Berdasarkan data statestik pada Departemen Agama samapi dengan tahun 1997, jumlah pesantren di seluruh Indonesia sebanyak 9415[49] buah, sehingga lembaga pendidikan pondok pesantren mempunyai peranan yang sangat penting dalam usaha "mempertahankan eksistensi" umat Islam dari serangan dan penindasan fisik serta mental kaum penjajah beberapa abad lamanya. Maka patut

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[48]Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah...*, hlm. 16.
[49]Data Statistik pada Ditbinbaga Departemen Agama Repulik Indonesia, 1997.

diakui, bahwa kehadiran pendidikan Islam baik pendidikan di langgar, surau-surau, masjid serta pondok pesantren pada mulanya berlangsung secara sederhanya, tetapi cukup berperan dan "menjadi model" pendidikan dalam mewarnai perjalan sejarah pendidikan Islam di Indonesia dan telah banyak melahirkan tokoh-tokoh terkenal.

Lembaga-lembaga pendidikan pondok pesantren yang barangkali dapat disebut sebagai lembaga "pendidikan Islam klasik" masih terdapat di mana-mana, bahkan Departemen Agama berusaha mengidupkan dan mengembangkannya secara terus menerus lembaga tersebut. Banyak orang berpendapat bahwa lembaga-lembaga pendidikan Islam klasik itu masih diperlukan hingga sekarang, karena ternyata pelajaran agama yang diberikan di sekolah-sekolah selama ini masih belum memuaskan[50]. Hal ini terbukti dengan kebanyakan peserta didik di SD, SMP dan SMU sampai menyelesaikan sekolahnya belum dapat membaca al-Qur'an dengan baik. Maka Sudirman Tebba[51], seorang peneliti pesantren menyatakan, bahwa Pondok pesantren, sebagai lembaga pendidikan, da'wah dan sosial dirasakan memiliki potensi besar untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang pendidikan dan pengembangan masyarakat. Pondok pesantren yang potensial terbukti telah melaksanakan usaha kreatif yang bersifat rintisan, maka usaha ini perlu dikembangkan dengan terus melakukan pembenahan terhadap masalah utama yang dihadapi pesantren, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[50]Machnun Husein, *Pendidikan Islam dalam Lintasan Sejarah*, hlm. 3.

[51]Sudirman Tebba, *Dilema Pesantren, Belenggu Politik dan Pembaharuan Sosial, dalam Pergaulan Dunia Pesantren*, (Jakarta: P3M, 1985), hlm.284.

Demikian potret umum model dan karakteristik pendidikan Islam "tradisional" yang barangkali belum dapat meliput secara komprehensif disampaikan dalam pembahasan ini. Model pendidikan ini dapat terlaksana dengan baik bahkan ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama perannya di zaman kolonial. Maka dapat ditegaskan, bahwa walaupun sistem pendidikan Islam pada saat itu baru pada taraf mencari "model dan sistem pembelajarnnya", tetapi memiliki peran penting dalam kehidupan bangsa, karena didukung dengan para guru dan kyai yang memiliki kemampuan, semangat menyiarkan dan mengajarkan ilmu agama dan yang penting bagi mereka adalah dapat memberikan ilmunya kepada siapa saja, terutama pada anak-anak. Selain itu didukung dan semangat dari para santri untuk menuntut ilmu, sehingga model pendidikan tersebut tetap bekrkembang sampai sekarang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tumbuhnya model pendidikan pada masa awal, seperti di langgar, surau, mesjid, dan bahkan di serambi rumah guru, dengan sistem belajar individual dengan metode *wetonan, sorogan, bandungan, khalaqah* dan hafalan sebagai upaya untuk "mencari model" sistem pendidikan Islam yang kemudian dilanjutkan dengan sistem pendidikan pesantren yang merupakan "embrio" sistem pendidikan Islam yang akhimya berkembang dengan sistem kelas seperti sekarang ini.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Pendidikan Islam pada Masa Penjajahan

Masuknya kolonial Belanda di Indonesia telah membawa pola pendidikan tertentu, setidaknya telah memberikan pengalaman baru tentang berbagai kehidupan pendidikan. Memang diakui bahwa karakteristik-karakteristik pendidikan yang dikembangkan kolonial Belanda lebih menguntungkan mereka sendiri yang terkait kepentingan politik dan ekonomi. Maka tujuan utama pendidikan bagi rakyat jajahan adalah membentuk orang-orang yang terampil dan mampu melaksanakan seluruh keinginan mereka sebagai kekuatan pembangunan kerajaan Belanda, sehingga sistem pendidikan yang dilakukan cenderung bersifat diskriminasi rasial. Hal ini juga

tergambar pada kurikulum dan materi pelajaran dan sasaran pengajaran disesuaikan pada kebutuhan kolonial Belanda yaitu struktur industri dan bisnis kaum modal, sehingga ilmu-ilmu yang dipelajari hanya terbatas pada fungsi untuk menata perilaku manusia [*social enginering*] yang menunjang kepentingan dunia industri dan bisnis.

Pada masa penjajahan kolonialisme Belanda, pendidikan terdiri dari dua jenis sistem, yaitu [1] Pendidikan atau sekolah-sekolah umum, pelajaran dan sasaran pengajaran disesuaikan dengan kebutuhan kolonial Belanda. Pelajarannya lebih ditekankan pada pengetahuan umum dan tidak ada mata pelajaran yang berhubungan dengan agama. [2] Lembaga pendidikan pondok-pesantren, pelajarannya lebih ditekankan pada pelajaran agama dan tanpa pengetahuan umum. Pondok pesantren merupakan pendidikan "klasik" telah ada dan berkembang dengan pesat sebelum datangnya penjajah Belanda di Indonesia. Maka ketika kolonial Belanda berasil menguasai bumi nusantara dengan misi ganda yaitu "*imprialisme* dan *kristinisasi* justru sangat merusak dan menjungkirbalikan tatanan yang sudah ada"[52] terutama pendidikan Islam.

Kehadiran pemerintahan kolonial Belanda, memperkenalkan sistem dan metodologi pendidikan yang baru dan lebih efektif, tetapi semua itu dilakukan untuk kepentingan mereka sendiri. Di sisi lain langkah-langkah yang dilakukan pemerintahan kolonial Belanda justru melakukan semacam "pembodohan" terhadap penduduk pribumi, sehingga "apa yang mereka sebut dengan pembaruan pendidikan itu sebenarnya upaya *westernisasi* dan *kristinisasi* untuk kepentingan Barat dan Nasrani. Dua motif inilah yang selalu mewarnai kebijaksanaan penjajah kolonial Belanda di Indonesia yang berlangsung selama 3.5 abad"[53]. Politik penjajah Belanda telah membawa arus kebudayaan Barat berupa westernisasi dan kristinisasi dan hal ini mendorong para ulama untuk menempuh cara hidup yang berat sebelah dengan

[52]Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, hlm. 47-48.

[53]Zuhairini,dkk, *Sejarah Pendidikan Islam*, Cet. Ketiga, (Jakarta Bumi Aksara,1992), hlm.,146.

"membulatkan tekad untuk menjadikan pendidikan agama [dalam arti sempit] sebagai benteng satu-satunya dalam pembinaan mental dan mereka lupa akan perlunya keseimbangan dalam hidup, sehingga tak begitu menghiraukan unsur-unsur dunia dan akhirnya banyak ketinggalan dalam urusan dunia"[54]. Kondisi ini mengakibatkan timbulnya kesan di kalangan masyarakat luas, bahwa kelompok santri adalah kolot, terbelakang dalam urusan dunia, sekalipun mereka sebenarnya unggul dan maju serta disegani dalam urusan-urusan keagamaan yang sifatnya ritual.

Situasi ini berlangsung cukup lama di Indonesia, apalagi didukung dengan upaya pemerintahan kolonial Belanda "melakukan pengekangan terhadap perkembangan pesantren di Indonesia dengan mengeluarkan aturan umum [Stbl. 1818 No.4], bahwa siapapun tidak diperbolehkan memberikan pelajaran, termasuk pelajaran agama Islam, sebelum mendapat ijin dari Gubernur Jenderal"[55] di Jakarta. Tahun 1819, Gubernur Jenderal Van den Capellen, "mengambil inisiatif merencanakan berdirinya sekolah dasar bagi penduduk pribumi agar dapat membantu pemerintah Belanda. Pemerintahan Belanda mengeluarkan surat edarannya untuk mengadakan peraturan pemerintah yang menjamin meratanya kemampuan membaca dan menulis bagi penduduk pribumi agar mereka dapat mentaati undang-undang dan hukum negara"[56]. Ruh surat edaran tersebut menggambarkan bahwa tujuan didirikan sekolah dasar untuk kepentingan pemerintahan kolonial Belanda. Danpak negatif dari surat edaran tersebut, yaitu pendidikan Islam yang dilaksanakan di suaru-suaru, langgar atau mesjid dan pondok pesantren dianggap tidak membantu pemerintah Belanda. Para santri yang belajar di lembaga-lembaga tersebut tetap dianggap buta huruf latin dan dianggap tidak berguna. Maka sekolah-sekolah pribumi yang didirikan pemerintahan kolonial Belanda merupakan sekolah rendah yang disebut sekolah desa

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[54]Dahlan Thaib dan Moh. Mahfud MD, [penyunting], *5 Windu UII, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 1945-1984*, (Yogyakarta: Liberty Offsit, 1984), hlm.5.

[55]Machnun Husein, *Pendidikan Islam dalam Lintasan* ...,hlm. 4.

[56]Zuhairini,dkk, *Sejarah Pendidikan Islam*, hlm. 148.

dan dimaksudkan menandingi madrasah, pesantren atau pengajian yang ada di desa"[57].

Steenbrink, menyatakan semenjak abad ke delapan belas pemerintah kolonial Belanda telah menyadari akan pentingnya peranan dan keberadaan sekolah-sekolah agama [Islam] sebagai tempat pendidikan bagi anak-anak pribumi. Tahun 1918, Gubernur Jenderal Van der Capellen, memerintahkan untuk mengadakan penelitian terhadap pendidikan masyarakat Jawa, dengan tujuan mengangkat kemampuan membaca dan menulis. Dari penelitian tersebut dilaporkan bahwa adanya pendidikan agama Islam dengan memakai bahasa Arab, yang merupakan lembaga pendidikan paling penting di antara orang-orang Jawa[58]. Hasil penelitian tersebut dibicarakan pemerintah kolonial Belanda sekitar satu abad kemudian dan disimpulkan bahwa "Gubernur Jenderal Van den Capellen hendak melaksanakan satu jenis pendidikan yang berdasarkan pribumi murni, secara teratur dan disesuaikan dengan masyarakat desa serta dihubungkan dengan pendidikan Islam yang sudah ada sebelumnya"[59]. Steenbrink menyatakan, pada akhir abad ke delapan belas, beberapa kali diusulkan agar lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada dimanfaatkan pada kebijaksanaan untuk mengembangkan sistem pendidikan umum, tetapi pada kenyataannya pemerintah Belanda selalu memilih jalan lain daripada penyesuaian dengan pendidikan Islam. Inspektur Pendidikan Kolonial pertama, A.J. van der Chijs, juga menolak penyesuaian pendidikan Islam degan pendidikan yang ada dan penolakan ini sebenarnya hanya didasarkan pada alasan teknis pendidikan. A.J. van der Chijs menyatakan bahwa "walaupun saya sangat setuju kalau sekolah pribumi diselingi dengan kebiasaan pribumi, namun saya tidak menerimanya karena kebiasaan tersebut terlalu jelek[60], sehingga model pembelajaran tersebut tidak dapat dipakai

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[57]Ibid, hlm. 149.

[58]Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah...*, hlm. 1-2.

[59]Ibid, hlm. 2.

[60]Menurut Steenbrink, dimaksud dengan "kebiasaan jelek" oleh pihak penjejah Belanda adalah menyangkut dengan metode membeca teks Arab hanya ditekankan pada hafalan tanpa pengertian (Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah...*, hlm. 3).

dalam sekolah pribumi"[61]. Sikap inipun didukung dengan pandangan negatif dari para sarjana yang membantunya yang menilai bahwa tradisi didaktik pendidikan pribumi begitu jelek, sehingga tidak dapat dimanfaatkan sebagai titik tolak untuk mengembangkan suatu sistem pendidikan umum[62].

Dari pandangan di atas, dapat dikatakan bahwa pendidikan Islam mendapatkan tekanan dan penilaian negatif dari pemerintahan kolonial Belanda. Sikap ini diujudkan dalam beberapa kebijaksanaan politik pemerintahan Belanda dengan tujuan menghambat, mengekang, dan bahkan pada tingkat mematikan. Apabila dicermati, beberapa kebijaksanaan politik pemerintahan Belanda terhadap rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, terutama pada bidang pendidikan, sebenarnya didasari pada rasa ketakutan, rasa panggilan agamanya, dan rasa kolonialismenya. Maka berbagai tekanan dilakukan untuk mengekang laju perkembangan pendidikan Islam, dengan upaya mempertahankan eksistensinya sebagai penjajah di Indonesia. Usaha lain, yaitu pemerintahan Belanda dilakukan dengan berbagai cara ditempuh, yaitu menunjuk Prof. Christian Snouck Hurgronje[63], secara khusus mempelajari dan mengkaji sifat-sifat umat Islam dan keadaan umat Islam di Indonesia. Hasil kajiannya disarankan kepada pemerintah Belanda dan saran-sarannya justru menjadi kebijaksanaan pemerintah kolonial Belanda terhadap umat Islam di Indonesia. Pemerintahan kolonial Belanda akhirnya menyakini bahwa

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[61] *Pendidikan Pribumi*, adalah pendidikan yang dilaksanakan oleh umat Islam melalui surau-surau, langgar atau mesjid, dan pesantren dengan menggunakan sistem sorogan, wetonan dan hafalan dalam proses pembelajaran, dan dinilai oleh kolonial Belanda sebagai tradisi didaktik pendidikan Islam yang terlalu jelek (Ibid, hlm. 3).

[62] Ibid, hlm. 3.

[63] Christian Snouck Hurgronje, nama semarannya Abdul Gaffar, seorang sarjana sastra Semit [Arab]. Telah lama belajar dan berpengalaman di tanah Arab dan berperan besar dalam menyelesaikan perang Aceh.. Ia mempelajari Islam di Indonesia secara mendalam dengan mencari cela-cela kelemahannya untuk selanjutnya dilaporkan hasil studinya kepada pemerintah Belanda, disertai saran-saran bagaimana seharusnya berbuat dan menghadapi umat Islam Indonesia dengan tujuan penjajahan Belanda atas Indonesia bisa berjalan sebagai mana yang diharapkan [hasbullah, Op.cit., hlm.53]. Christian Snouck Hurgronje, posisinya dalam pemerintahan penjejahan Belanda sebagai penasihat Menteri Penjajahan Belanda [Machnun Husein, Op.cit., hlm. 5]. Christian Snouck Hurgronje, menyarankan kepada pemerintah Hindia Belanda agar netral terhadap agama yakni tidak campur tangan dan tidak memihak kepada salah satu agama yang ada [tetapi tampaknya hal itu hanya bersifat teori belaka, sebab faktanya tidaklah demikian]. Menurut Christian Snouck Hurgronje, fanatisme Islam itu akan luntur sedikit demi sedikit melalui proses pendidikan secara evolusi. Pemerintah Belanda diharapkan dapat membendung masuknya Pan Islamisme yang sedang berkembang di Timur Tengah, dengan jalan menghalangi masuknya buku-buku atau brosur lain dari luar ke wilayah Indonesia, mengawasi kontak langsung dan tidak langsung tokoh-tokoh Islam Indonesia dengan tokoh-tokoh luar, serta membatasi dan mengawasi orang-orang yang pergi ke Mekkah, dan bahkan kalau memungkinkan melarangnya sama sekali. Karena dikhawatirkan pengalaman yang ia dapat di luar akan dibawa pulang ke Indonesia dan mempengaruhi kekuasaan kolonial [E. Gobee dan C.Adriaanse, *Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda*, (Jakarta: Seri Khusus INIS VII, 1993).

"penjajahan di negeri ini akan dapat berlangsung terus jika Belanda mampu menghancurkan umat Islam, melakukan pengekangan terhadap perkembangan pesantren"[64] atau perkembangan pendidikan Islam.

Kebijaksanaan politik pemerintahan kolonial Belanda, tidak membuat umat Islam menyerah begitu saja tetapi semakin gigih melakukan aktivitas pendidikan Islam dan hal ini yang menyebabkan pemerintahan kolonial Belanda semakin ketat dalam usaha pengekangannya. Sebagai contohnya, pada "tahun 1882 M pemerintah Belanda membuat suatu badan khusus yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam disebut *priesterraden*. Tahun 1905 M, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan bagi orang yang akan memberikan pengajaran [pengajian] harus minta izin lebih dahulu"[65]. Ruang gerak dan aktivitas pendidikan Islam semakin dibatasi dengan berbagai peraturan-peraturan, karena pada "tahun 1925 pemerintahan kolonial Belanda mengeluarkan peraturan yang lebih ketat terhadap pendidikan agama Islam yaitu tidak semua kyai boleh memberikan pelajaran mengaji. Ruh peraturan ini lebih pada upaya untuk mengantisipasi gerakan organisasi-organisasi pendidikan Islam, seperti Muhammadiyah, Partai Syarikat Islam, al-Irsyad, Nahdatul Watan dan lain-lain. Maka pada tahun 1932 M, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan yang lebih keras lagi yaitu membatasi dan bahkan menutup madrasah dan sekolah-sekolah yang tidak ada izin atau memberikan pelajaran yang tidak disukai oleh pemerintah Belanda yang disebut Ordonansi Sekolah Liar (*Wilde School Ordonantie*)"[66].

Jika dilihat dari "peraturan-peraturan pemerintah Belanda yang sedemikian ketat dan keras mengenai pengawasan, tekanan dan pemberantasan"[67] terhadap aktivitas pendidikan Islam di Indonesia, seakan-akan dalam tempo yang tidak lama

---

[64]Machnun Husein, *Pendidikan Islam dalam Lintasan Sejarah*, hlm. 5.
[65]Zuhairini, dkk., *Sejarah Pendiddikan Islam*, hlm. 149.
[66]Ibid, hlm. 149-150., dan Machnun Husein, *Pendidikan Islam dalam Lintasan* ..., hlm. 5-6.
[67]Zuhairini, dkk., *Sejarah Pendiddikan Islam*, hlm.150.

pendidikan Islam akan menjadi lumpuh, tidak berdaya dan porak poranda, tetapi kenyataanya lain. Umat Islam di Indonesia pada zaman itu, justru banyak melakukan aktivitas pendidikan Islam dan lembaga-lembaga pendidikan Islam tumbuh dan berkembang sebagaimana adanya dan sulit dibendung pemerintahan kolonial Belanda. Kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintahan Belanda tersebut dengan tujuan untuk mengekang dan bahkan mematikan aktivitas pendidikan Islam berlangsung sampai Jepang berhasil mengusir pemerintah Hindia Belanda dari bumi Indonesia dan "menguasai Indonesia pada tahun 1942 dengan membawa semboyan: Asia Timur Raya untuk Asia dan semboyan Asia Baru"[68].

Ketika Jepang menguasai Indonesia, awalnya pemerintah Jepang "menampakan diri seakan-akan membela kepentingan Islam. Hal ini hanya merupakan siasat kepentingan mereka"[69]. Pemerintah penjajahan Jepang menunjukkan "sikap yang lebih lunak terhadap akvitas pendidikan Islam sehingga ruang gerak pendidikan Islam lebih bebas"[70] bila dibadingkan dengan sikap penjajah Belanda. Jepang "tidak begitu menghiraukan kepentingan agama yang penting bagi mereka adalah memenangkan perang, sehingga pemuka agama diberikan keleluasaan dalam mengembangkan aktivitas pendidikan. Dengan demikian, sikap Jepang sangat berbeda dengan kolonial Belanda, karena di samping sebagai penjajah juga misi lain yang tidak kalah penting yaitu misi Kristenisasi[71], sehingga agama Islam yang menjadi mayoritas penduduk pribumi, harus ditekan dengan berbagai cara dan kalau perlu dilenyapkan sama sekali"[72].

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[68]Ibid, hlm. 151.

[69]Ibid, hlm. 151.

[70]Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia,...*, hlm. 64.

[71]Gerakan Kristenisasi di Indonesia, berpangkal dari pidato Ratu Belanda pada tahun 1901, antara lain menyatakan: Sebagai negara Kristen, pemerintah Belanda berkewajiban mengatur kedudukan hukum rakyat Kristen yang berada di Kepulauan Hindia Belanda [Indonesia], memperkuat zending Kristen, meneruskan kebijaksanaan tentang keinsafan bahwa Pemerintah Belanda harus mengisi penggalian moral terhadap negeri jajahan ini (Machnun Husein, *Pendidikan Islam dalam Lintasan* ..., hlm.7).

[72]Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia,* hlm. 65.

Pemerintahan penjajah Jepang pada babak pertama pemerintahannya ada beberapa kebijaksanaan yang berkaitan dengan bidang pendidikan, yaitu pondok pesantren yang besar-besar, sering mendapat kunjungan dan bantuan dari pembesar-pembesar Jepang dan sekolah-sekolah negeri diberi pelajaran budi pekerti yang isinya identik dengan ajaran agama. Pemerintah Jepang, juga mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam [sekarang UII] di Jakarta yang dipimpin oleh K.H. Wahid Hasyim, Kahar Muzakir, dan Bung Hatta dan umat Islam diizinkan meneruskan organisasi persatuan yang disebut Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) yang bersifat kemasyarakatan"[73]. Usaha pemerintah Jepang tersebut, sebagai upaya menghimpun kekuatan umat Islam dan nasionalis untuk dibina dan Jepang berusaha mempergunakan kekuatan agama dan nasionalis untuk mencapai tujuannya, karena Jepang sadar bahwa sebelum penudukannya atas Indonesia, keadaan umat Islam sudah kuat dengan "gerakan nasionalisme-Islamisme pada tahun 1928 M, berupa Sumpah Pemuda"[74].

Kebijakan Jepang sangat lunak terhadap aktivitas pendidikan di Indonesia, tetapi ada hal yang menonjol yaitu pendidikan pada zaman Jepang lebih diutamakan untuk kepentingan perang. Para murid hanya mendapatkan pengetahuan sedikit sekali, dan hampir sepanjang hari diisi dengan kegiatan latihan perang atau bekerja. Semua peserta didik diharuskan mengikuti latihan fisik, latihan kemiliteran, indoktrinasi secara ketat, sehingga mulai nampak pada akhir pendudukan Jepang terdapat tanda-tanda adanya tujuan pendidikan untuk men-Jepang-kan Indonesia"[75], karena Jepang menyiapkan "barisan propagandanya (*Sendenbu*) yang diberi tugas untuk menanamkan ideologi baru dan ideologi itu diharapkan dapat menghancurkan ideologi Indonesia raya"[76]. Maka kondisi pendidikan pada zaman Jepang "secara

[73]Zuhairini, dkk., *Sejarah Pendiddikan Islam*, hlm. 151..
[74]Ibid, hlm. 150-151.
[75]Ary H. Gunawan, *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan* (Edisi Revisi), Cet.II, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996),hlm. 25.
[76]I. Djumhur dan H. Danasaputra, *Sejarah Pendidikan*, hlm. 195

umum terbengkalai, artinya murid-murid tiap hari hanya disuruh gerak badan, baris berbaris, bekerja bakti [*romusha*], bernyanyi dan lain sebagainya, sehingga proses belajar terbengkalai. Tetapi madrasah-madrasah yang berada dalam lingkungan pondok pesantren bebas dari pengawasan langsung pemerintah Jepang dan dapat berjalan dengan agak wajar"[77] sehingga madrasah-madrasah tersebut berkembang secara pesat, seperti di Sumatera yang terkenal dengan madrasah Awaliyahnya yang berkembang hampir di seluruh polosok pedesaan.

Dari uraian di atas, ada beberapa hal yang perlu dicatat sebagai "sumbangan" Jepang kepada bangsa Indonesia yang mempunyai arti penting bagi bangsa Indonesia, karena terjadi perubahan yang cukup mendasar dibidang pendidikan, yaitu: *Pertama,* "pemakaian Bahasa Indonesia, sebagai bahasa pengantar resmi, baik di kantor-kantor maupun di sekolah-sekolah dan bahasa Jepang menjadi bahasa kedua. Bahasa Indonesia berkembang dan dipermodern sehingga menjadi bahasa pergaulan dan bahasa ilmiah[78]. *Kedua,* dihapusnya dualisme pengajaran, berbagai macam jenis sekolah rendah yang diselenggarakan pada zaman Belanda dihapuskan sama sekali oleh Jepang. "Susunan sistem pengajaran Belanda dualistis yang membedakan dua jenis pengajaran, yakni: pengajaran Barat dan pengajaran Bumi Putra"[79], dihapuskan oleh pemerintahan pendudukan Jepang. *Ketiga,* terjadi perubahan dalam sistem persekolahan dengan dihapusnya sistem penggolongan, baik menurut golongan bangsa maupun menurut status sosial dan diintegrasikan sekolah-sekolah sejenis. *Keempat,* untuk jenjang-jenjang sekolah terdapat perubahan dalam penggunaan istilah dan nama[80] mulai dari sekolah Dasar samapi sekolah tinggi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[77]Zuhairini, dkk., *Sejarah Pendiddikan Islam,* hlm. 152.

[78]Ary H. Gunawan, *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan* , Op.cit., hlm. 25.

[79]L Djumhur dan H. Danasaputra, *Sejarah Pendidikan,* hlm. 196.

[80]Sekolah Dasar menggunakan istilah Sekolah Rakyat atau *"Kokumin Gakko"*, dengan lama belajar 6 tahun. Untuk sekolah lanjutan pertama umum atau SMP disebut *"Shoto Chu Gakko"*. Sekolah Kejuruan Menengah berupa Sekolah Pertukangan atau *"Kogyo Gakko"*, Sekolah Pertanian atau *"Nogyo Gakko"*, dan Sekolah Pelayaran, dengan lama belajar 3 tahun. Sekolah Menengah Tinggi (SMA) disebut *"Koto Chu Gakko"*, Sekolah Teknik Menengah atau *"Kagyo Semmon Gakko"*, dan sekolah Pelayaran Tinggi. Untuk perguruan tinggi hampir semuanya ditutup, sedangkan yang masih adalah Sekolah Tinggi Kedokteran *("Ika Dai Gakko")* di Jakarta, Sekolah Teknik Tinggi *("Kagyo Dai Gakko")* di Bandung, Sekolah Tinggi Pengrehpraja *("Kenkoku Gakuin")* sebagai pengganti MOSVIA di Jakarta, dan Sekolah Tinggi Kedokteran Hewan di Bogor. Sedngkan khusus untuk pendidikan guru terdapat

serta sekolah-sekolah kejuruan dan sekolah-sekolah tersebut terbuka bagi semua golongan penduduk dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Dengan penataan "sistem pendidikan dan persekolahan, kesempatan belajar terbuka lebar bagi semua golongan penduduk di Indonesia dan semua mendapat kesempatan yang sama, sehingga jalur-jalur sekolah dan pendidikan menurut penggolongan keturunan bangsa, strata ataupun status sosial telah dihapuskan"[81]. Banyak sekolah-sekolah yang telah diseragamkan dan dinegrikan dan bagi sekolah-sekolah swasta seperti sekolah Muhammadiyah, Taman Siswa, madrasah-madrasah, dan lain-lainnya tetap dizinkan untuk terus berkembang, walaupun dengan pengaturan yang diselenggarakan oleh pemerintahan pendudukan Jepang.

Perkembangan selanjutnya, ketika bangsa Indonesia berjuang merintis kemerdekaan, ada tiga tokoh pendidikan sekaligus pejuang kemerdekaan, yang berjuang melalui pendidikan. Mereka membina anak-anak dan para pemuda melalui lembaganya masing-masing untuk mengembalikan harga diri dan martabatnya yang hilang akibat penjajahan Belanda. Mohamad Syafie, mendirikan sekolah INS atau *Indonesisch Nederlandse Scholl* di Sumatra Barat pada tahun 1926, dan sekolah ini kemudian lebih dikenal dengan nama Sekolah Kayutanam. Sekolah ini dimaksudkan untuk dapat mendidik anak-anak agar dapat berdiri sendiri atas usaha sendiri dengan jiwa yang merdeka. Ki Hajar Dewantara, dengan mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta, dengan sifat, sistem, dan metode pendidikannya diringkas ke dalam empat kemasan, yaitu : [1] Asas Taman Siswa, [2] Panca Darma, [3] Adat Istiadat, dan [4] Semboyan atau perlambang[82].

Pendidikan yang diselenggarakan Mohamad Syafei, sebagai usaha untuk menamkan rasa percaya diri, kemerdekaan, hidup mandiri, mengembangkan anak

---

tiga jenis, yaitu : Sekolah Guru 2 tahun sesudah SR (*Shoto Sihan Gakko*), Sekolah Guru 4 tahun sesudah SR (*Guto Sihan Gakko*), dan Sekolah Guru 6 tahun sesudah SR disebut "*Koto Sihan Gakko*". [Ary H. Gunawan,*Kebijakan-Kebijakan Pendidikan* ,hlm. 27].

[81]Ibid, hlm. 28.

[82]Made Pidarta, *Landasan Kependidikan, Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*, Cek.I,(Jakarta:Rineka Cipta,1997),hlm.123.

secara harmonis [mencakup aspek perasaan, kecerdasan, dan keterampilan], mengembangkan sikap sosial, menyesuaikan pendidikan dengan bakat anak, dan bekerja menurut kebutuhan lingkungan. Konsep pendidikan Mohamad Syafei, sebagai usaha untuk menyaingi dan sekaligus menentang sistem sekolah-sekolah Hindia Belanda yang hanya sekedar menyiapkan putra-putri bangsa untuk menjadi pegawai-pegawai mereka semata-mata[83]. Sedangkan konsep pendidikan Taman Siswa, sebagai usaha untuk membangun kemerdekaan individu, kemerdekaan dalam berpikir, kebudayaan sendiri, kerakyatan, hidup mandiri, sederhana, dan memperhatikan perkembangan anak dan selain itu pendidikan Ki Hajar Dewantara, juga sebagian asas perjuangan untuk menentang penjajah Belanda[84]. Maka apabila dicermati konsep pendidikan Mohamad Syafei dan Ki Hajar Dewantara, sebagai usaha untuk mencerdaskan anak bangsa, membangun kemerdekaan individu, kemerdekaan berpikir, kebisaan hidup mandiri, sederhana dengan selalu mengakses potensi peserta didik dan disatu sisi sebagai kepentingan perjuangan untuk membebaskan diri dari penjajahan dan penindasan.

Dari penjelasan di atas, apabila "dilihat dari segi pendidikan terbukti bahwa tumbuhnya lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia yang didirikan oleh berbagai organisasi pada saat itu, secara implisit merupakan jawaban terhadap pelaksanaan pendidikan Belanda yang bermata dua yaitu *westernisasi* dan *kristenisasi*. Kelahiran

---

[83]Ibid, hlm. 123-124.

[84]Konsep pendidikan yang dibangun oleh Muhamad Syafie dan Ki Hajar Dewantoro sebagai berikut : Mohamad Syafie, mendirikan sekolah INS ini untuk mengimbangi sekolah-sekolah Hindia Belanda yang hanya menyiapkan anak-anak untuk menjadi pegawai-pegawai mereka saja. Tujuan pendidikan yang dilaksanakan di INS adalah: (1) mendidik anak-anak ke arah hidup yang merdeka, melalui pendidikan hidup mandiri, (2) menanamkan kepercayaan kepada diri sendiri, membina kemauan keras, dan membiasakan benari bertanggung jawab, (3) membiayai diri sendiri dengan semboyan cara sendiri dan kerjakan sendiri, (4) mengembangkan anak secara harmonis, yang mencakup aspek perasaan, kecerdasan, dan keterampilan, (5) mengembangkan sikap sosial, agar dapat bermasyarakat dengan baik, (6) menyesuaikan pendidikan dengan masing-masing bakat anak, (7) membiasakan bekerja menurut kebutuhan lingkungan. Ki Hajar Dewantara, merumuskan konsep pendidikan pada tahun 1922, sebagian besar merupakan asas perjuangan menentang penjajah Belanda: (1) Kemerdekaan individu untuk mengatur diri sendiri. Kebebasan ini dibatasi oleh kepentingan umum, yaitu jangan sampai mengganggu ketertiban dan kedamaian umum, (2) Kemerdekaan berpikir, mengembangkan perasaan, kemauan melakukan sesuatu, (3) Kebudayaan sendiri, sebagai dasar kehidupan bukan intelektual, (4) Kerakyatan, yaitu pendidikan harus diberikan kepada seluruh rakyat, hidup mandiri, ialah berusaha menghidupi diri sendiri, serta tidak menerima bantuan yang mengikat, (6) Hidup sederhana, agar mampu membiayai diri sendiri, dan (7) Mengabdi kepada anak, semua kegiatan yang dilakukan adalah untuk kepentingan perkembangan anak-anak (Made Pidarta, *Landasan Kependidikan*,..., hlm. 124-125).

Perguruan Taman Siswa yang dipinpin oleh Ki Hajar Dewantara, menekankan perlu pemupukan dan pengembangan kebudayaan nasional yang menunjukkan bahwa bangsa ini tidak mau westernisasi. Di lain pihak tumbuhnya perguruan-perguruan Islam yang didirikan oleh Muhammadiyah, al-Irsyad, at-Tawalib, Persatuan Umat Islam dan sebagainya juga meruapakan jawaban yang nyata dan bukti bahwa umat Islam Indonesia tidak mau dimurtadkan dan dikristenkan[85]. Para pemimpin pergerakan nasioal dengan kesadaran penuh berusaha mengubah keterbelakangan rakyat Indonesia pada saat itu. Mereka menyadari bahwa penyelenggaraan pendidikan yang bersifat nasional atau ke Indonesiaan harus segara dimasukan ke dalam agenda perjuangannya, maka "lahirlah sekolah-sekolah partikuler [swasta] atau usaha para perintis kemerdekaan. Sekolah-sekolah itu semula memiliki dua corak, yaitu : *Pertama,* sesuai dengan haluan politik, seperti : Taman Siswa di Yogyakarta, Sekolah Sarikat Rakyat di Semarang, yang berhaluan komunis, Ksatrian Institut, yang didirikan oleh Dr. Douwes Dekker [Dr. Setiabudi] di Bandung"[86]. *Kedua,* yaitu "sesuai dengan tuntutan ajaran agama [Islam], seperti: Sekolah-sekolah Sarikat Islam, Sekolah-sekolah Muhammadiyah, Sumatera Tawalib di Padang Panjang, Sekolah-sekolah Nahdlatul Ulama, Sekolah-sekolah Persatuan Umat Islam [PUI], sekolah-sekolah al-Jami'atul Wasliyah, Sekolah-sekolah al-Irsyad, Sekolah-sekolah Normal Islam, dan masih banyak sekolah-sekolah lain yang didirikan oleh organisasi Islam maupun oleh perorangan diberbagai kawasan kepulawan Indonesia baik dalam bentuk pondok pesantren maupun madrasah[87].

3. Gagasan Pembaruan Pendidikan Islam

Politik Belanda yang berusaha mengekang, bahkan sampai pada tingkat memusnakan pendidikan Islam, bukanlah merupakan satu-satunya sebab yang

---

[85]Machnun Husein, *Pendidikan Islam dalam Lintasan Sejarah*, hlm. 10.
[86]LDjumhur dan H. Danasaputra, *Sejarah Pendidikan...*, hlm. 121.
[87]Zuhairini, dkk., *Sejarah Pendidikan Islam*, hlm. 158-159.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

mendorong timbulnya perubahan, tetapi ada peristiwa-peristiwa lain yang terjadi di belahan dunia lain, yaitu timbulnya gerakan pembaruan Islam di negara-negara Timur Tengah dan anak-benua India yang terutama dipelopori oleh Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh yang ikut mewarnai dan mempengaruhi peristiwa sejarah pembaruan pendidikan Islam termasuk di Indonesia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sejarah pembaruan pendidikan Islam di Indonesia diinspirasi oleh Gerakan Salaf[88] yang membangkitkan kesadaran untuk lepas dari cengkeraman penjajah.

Gerakan pembaruan Islam yang disebut dengan gerakan Salaf di dunia Islam sebenarnya telah dimulai sejak zaman Ibnu Taimiyah [1263-1328] dan kemudian dikembangkan oleh murid-muridnya Ibnul Qoyyim [1292-1350] dan Muhammad bin Abdul Wahab [1703-1787] yang menyebarluaskan ide-ide pembaruan tersebut. Perkembangan selanjutnya, "Said Jamaluddin al-Afghany [1838-1897] lebih mengintensifkan gerakan kebangkitan ini dalam gerakan yang disebut dengan *Pan Islamisme* yang secara terang-terang dan lantang meneriakan gerakan pembebasan dunia Islam dari penjajahan dan kembali ke dalam kejayaan seperti abad-abad pertengahan. Kemudian gerakan *Pan Islamisme* diteruskan oleh murid al-Afghany, yaitu Rasyid Ridha [1856-1935] dengan menitik baratkan pada reformasi ajaran-ajaran agama secara murni dan konsekuen serta menghormonisasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan politik"[89].

Gerakan *Pan Islamisme* di Timur Tengah, sebenarnya telah menjadi kajian analisis Snouck Horgronje, sehingga ada kehawatiran gerakan ini akan masuk ke

---

[88]Gerakan Salaf adalah gerakan untuk membangkitkan kembali ajaran-ajaran lama, yakni ajaran-ajaran Nabi, para sahabat dan tabi'in yang menonjolkan ajaran Imam Ahmad bin Hambal yang senantiasa mempraktekkan ijtihad yang secara konsekuen senantiasa berpegang pada al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Gerakan Salaf ini sekaligus merupakan gerekan anti khurafat dan bid'ah; berusaha untuk membuka fikiran umat Islam untuk berjihad. Gerakan ini sekaligus membuka jawaban, kenapa sampai beberapa abad terakhir dunia Islam dalam kenistaan yang paling dalam di berbagai bidang terutama dalam bidang politik dan pendidikan. Jawaban yang terlihat adalah karena terjadinya kemacetan berijtihad (penutupan pintu ijtihad) dan meranatanya kebiasaan taqlid. Taqlid inilah yang melemparkan umat Islam ke jurang kebekuan dan kebodohan (Dahlan Thaib & Moh..Mahfud, MD, *5 Windu UII*,...,hln. 6).

[89]Ibid, hlm.7.

Indonesia dan hal tersebut disampaikan kepada pemerintah Hinda Belanda agar membendung pengaruh *Pan Islamisme* tidak masuk ke Indonesia. Analisis Snouck Horgronje menjadi kenyataan, artinya pengaruh *Pan Islamisme* akhirnya masuk ke Indonesia dan pemerintahan kolonial Belanda tidak dapat mebendung arus informasi yang datang dari luar, yaitu: *Pertama,* pada pertengahan abad ke-19 terbuka kesempatan bagi mahasiswa-masiswa Indonesia untuk memperdalam Islam di beberapa pusat pendidikan Islam, khususnya di Kairo, Madinah, dan Makkah. Kesempatan belajar ini bukan saja menimbulkan kontak intelektual di antara mahasiswa Indonesia di Timur Tengah, tetapi mereka mengalami langsung suasana pembaruan yang disosialisasikan oleh tokoh-tokoh seperti Afghany, Abduh, Rashid Ridha, Sayyid Qutb, dan lain-lain[90]. *Kedua*, banyak tokoh-tokoh Islam Indonesia yang memperoleh informasi melalui brosur-brosur dan majalah-majalah dari Timur Tengah serta negara-negara Islam lainnya. Selain itu, para mahasiswa yang belajar di Timur Tengah mengadakan koresponden dengan teman-teman di Indonesia dengan memperkenalkan ide-ide pembaruan dengan mengirimkan tulisan-tulisan pembaharu Timur Tengah, salah satunya adalah ide pembaruan di bidang pendidikan. Publikasi lewat majalah *al-Manar* yang banyak memperkenal gagasan pembaruan pendidikan. *Ketiga,* kontak langsung umat Islam Indonesia dengan umat Islam lain melalui sarana ibadah haji yang tidak dapat dibendung, walaupun pemerintahan kolonial Belanda berusaha membatasi dan mengawasi jumlah jemaah haji, sehingga peluang umat Islam Indonesia untuk membawa pengalaman-pengalaman mereka dari luar terutama dari negara-negara Islam ke Indonesia sangat terbuka.

Dengan demikian, gerekan-gerakan kebangkitan Islam menginspirasi umat Islam Indonesia untuk segera melakukan perubahan pada bidang pendidikan Islam

[90]Mastuki HS, *Sejarah Asal-Usul Madrasah*, From: http://www.bagais.go.id/index.htm.diprint, 19 Oktober 2002.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

yang saat itu terlanjur mendapat cap "kolot" dan ketinggalan zaman. Faham baru yang menekankan akan pentingnya keseimbangan antara dunia dan ukhrawi dalam dunia Islam semakin kuat dan diikuti dengan gerekan-gerakan untuk mengadakan perubahan dalam dunia pendidikan Islam. Maka dengan dimotivasi oleh ruh gerakan ini, di Indonesia "mulai bermunculan madrasah-madrasah (sekolah) yang memberikan pelajaran umum (keahlian) selain pelajaran-pelajaran agama. Ide-ide perubahan meramba sampai ke pesantren, sehingga sebagian pesantren mulai memakai metode modern dalam melaksanakan pendidikan tanpa menghilangkan jiwa dari sistem lama"[91]. Oganisasi-organisasi Islam mulai menseting kondisi agar umat Islam tidak melupakan masalah duniawi dan siap untuk memimpin masyarakat semakin meluas gemanya, sehingga keinginan untuk merubah dan memajukan pendidikan bagi umat Islam semakin kuat. Kemudian muncul pula keinginan agar pendidikan Islam dapat memberikan keseimbangn dalam masalah *duniawi* dan *ukhrawi*, ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu keahlian dan hal ini menggambarkan keinginan untuk tidak ada pemisahan atau dikotomi dalam pelaksanaan pendidikan. Organisasi-organisasi Islam mulai menyuarakan bahwa bangsa Indonesia "menginginkan perguruan-perguruan yang memberikan pelajaran-pelajaran agama dan pelajaran keahlian (keterampilan) sekaligus. Hal ini menunjukkan bahwa sejak saat itu umat Islam mulai menyadari ketinggalan dalam ilmu-ilmu umum [sebenarnya termasuk ilmu agama dalam artinya yang luas] sehingga pengetahuan-pengetahuan praktis yang dibutuhkan dalam masyarakat itu, hanya dikembangkan oleh penjajah dan dipergunakan untuk kepentingan penjajah"[92].

Uraian di atas, menegaskan bahwa gerakan pembaruan di dunia Islam masuk di Indonesia sekitar tahun 1802 dan muncul Minangkabau sejak dasawarsa terakhir abad 18 dan kemudian mengalami radikalisme, ketika pulangnya Haji Miskin dan

---

[91] Dahlan Thaib & Moh..Mahfud, MD, *5 Windu UII*,...,hlm. 6.

[92] Ibid, hlm. 6.

kawan-kawannya dari Mekkah ke Minangkabau pada tahun 1803. "Kedatangan Haji Miskin dan kawan-kawannya serta Tuanku Imam Bonjol dan kawan-kawannya yang dinamai kaum Padri memperbaharui pendidikan dan pengajaran Islam sesuai dengan model pengajaran yang dikembangkan di Mekkah"[93]. Kelompok ini dikenal dengan julukan "*Harimau nan Salapan*" dan kaum Padri yang berjuang mengadakan perombakan-perombakan terhadap masyarakat secara radikal dan dalam banyak hal menggunakan kekerasan. Dengan radikalismenya, gerakan ini "menolak perumusan tawaran dari kaum adat bahwa *"adat bersendi syara', syara bersendi adat"*. Gerakan ini sangat menekankan manifestasi sikap keagamaan yang diejawantahkan dalam tingkah laku lahiriah, sehingga mereka menuntut agar syara' ditempatkan di atas "hukum adat" dan segala hukum lainnya. Gerakan ini sangat militan, karena bukan hanya mengutuk praktek-praktek *bid'ah* dan *khurafat* tetapi langsung secara fisik membasminya dan akhirnya menimbulkan Perang Padri pada tahun 1821 yang kemudian dibonceng Belanda. Apabila dikaji lebih jauh, perang tersebut bukan hanya pertarungan antara pengikut agama yang militan dengan pembela kaum adat, tetapi juga sebenarnya merupakan konflik antara pandangan *totalistik metafisis* dengan pandangan *keduniawian* yang relatif"[94].

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Sekalipun kaum Padri mengalami kekalahan dalam melawan kaum adat yang didukung Belanda, namun semangat salaf yang dicanangkan tidaklah musnah, terus berkembang dan meluas keluar dari Sumatera Barat menembus daerah-daerah lain di kepulawan nusantara ini. Pelopor-pelopor pembaharu yang meneruskan perjuangan kaum Padri ini antara lain Syekh Ahmad Khatib [1855-1916][95], yang menyebarkan

---

[93]Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*,hlm. 31-32.

[94]Taufik Abdullah, *School and Politics The Kaum Muda Movement in West Sumatra*, (Ithaca, NY.Cornell University, 1971),hlm.5.

[95]Ahmad Khatib, lahir di Bukittinggi tahun 1855 di kalangan keluarga yang mempunyai latar belakang agama dan adat yang kuat. Ahmad Khatib adalah turunan dari seorang hakim golongan Paderi. Ia memperoleh pendidikannya pada sekolah rendah dan sekolah guru di kota kelahirannya. Sekolah rendah dan sekolah guru ini didirikan oleh pemerintah Belanda. Ia pergi ke Mekkah pada tahun 1876 di mana ia mencapai kedudukan tertinggi dalam mengajarkan agama, yaitu sebagai imam dari mazhab Syafi'i di Mesjid al-Haram. Ia tidak pernah kembali ke daerah asalnya, tetapi tetap mempunyai hubungan dengan daerah asalnya melalui bekas-bekas muridnya yang belajar padanya (Delian Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 - 1942*, Cet. Ketujuh, (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm. 38-39).

pemikiran-pemikiranya dari Makkah melalui mereka yang naik haji dan belajar padanya. Pemikiran-pemikiran Ahmad Khatib mulai tersebar luas melalui proses pengajaran yang dilakukan murid-muridnya dan melalui publikasi tulisan-tulisannya sendiri tentang persoalan-persoalan yang sering dikemukakan kepadanya oleh bekas murid-muridnya dari Indonesia. Pemikiran-pemikiran Syekh Ahmad Khatib terkenal sangat menolak dua macam kebiasaan yang berkembang di Minangkabau yaitu *Thariqat Naqsyabandiyah* dan peraturan-peraturan adat tentang hal waris[96]. Kedua hal tersebut merupakan masalah yang selalu ditentang termasuk pembaharu-pembaharu lain di daerah Minangkabau.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa gerakan Padri selanjutnya menurut Schrieke[97], di samping merupakan gerakan "pemurnian agama" juga merupakan gerakan yang menentang lembaga-lembaga social yang dilindungi adat yaitu lembaga-lembaga yang cenderung bersifat *aristokratis* dan *feodalistik.* Walaupun secara teoritis lembaga-lembaga social tersebut dilaksanakan pada prinsip musyawarah, namun pada prakteknya prinsip itu tidak jarang dilanggar. Manurut Schrieke, yang dikutip Azyumardi, bahwa sampai pada tingkat tertentu, dapat dianggap sebagai revolusi "golongan kedua", yaitu kaum ulama [dan juga dalam pengertian tertentu kaum cerdik pandai] yang tidak mendapat tempat dalam adat[98]. Jelas, gerakan Padri secara subsatnsial tidak berhasil merubah struktur sosial, cultural dan politik di Minangkabau. Tetapi ada hal yang penting dicatat, yaitu kaum Padri memperkuat dan memperbesar pengaruh agama dalam sistem kemasyarakatan Minangkabau. Hal ini, dapat dilihat dengan formulasi sistem adat baru yang diperkenalkan dengan menekankan perbedaan antara *adat jahiliyah* yang *sinkretis* dengan *adat Islamiyah*, yaitu adat yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[96]Ibid, hlm. 38.
[97]BJO Schricke, *Pergolakan Agama di Sumatera Barat,* terj. Soegarda Perbakawatja, (Jakarta, Bharatara, 1973),hlm. 13-14.
[98]Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi...*, hlm. 128-129.

demikian, secara ideal, adat kemudian dianggap sebagai manifestasi yang benar dari hukum-hukum agama dan sebagai konsekuensi lebih lanjut, kedudukan ulama dan guru-guru agama semakin kuat dan sekolah-sekolah agama semakin banyak didirikan[99].

Pembaharu lain yang terlibat secara langsung di dalam merealisir perubahan di daerah Minangkabau adalah : *Pertama,* Syekh Taher Djalaluddin [1869-1956][100], belajar di Makkah dan merupakan seorang tokoh pembaharu Islam yang mempunyai hubungan langsung dengan al-Azhar di Kairo, sehingga ia mempunyai pengalaman yang luas tentang perkembangan pembaruan di dunia Islam[101]. Pemikiran-pemikiran Syekh Taher disosialisasikan kepada kawan-kawan dan murid-muridnya di Minangkabau melalui majalah *al-Imam* serta melalui sekolah *al-Iqbal al-Islamiyah* yang didirikan di Singapura bersama Raja Haji Ali bin Ahmad pada tahun 1908 yang kemudian dipindahkan ke Riau dengan aslasan kekurangan biaya. Model sekolah Syeh Taher di Singapura juga ditiru oleh Haji Abdullah Ahmad dalam mendirikan sekolah *Adabiyah* di Padang. Syeh Taher, juga aktif dalam bidang jurnalistik dengan menerbitkan majalah bulanan *al-Imam* pada tahun 1906. Majalah *al-Imam* memuat artikel tentang pengetahuan populer, komentar tentang kejadian-kejadian yang penting di dunia luar, terutama di dunia Islam dan artikel tentang masalah-masalah agama. Pemikiran-pemikiran pada majalah ini sebagai propagandakan perlunya umat Islam mencapai kemajuan serta mendorong dan mendesak umat Islam agar tidak ketinggalan di dalam kompetisi dengan dunia Barat. Tulisan-tulisan pada majalah *al-Imam* sering kali mengutip dan mensosialisasikan pendapat dan ide-ide dari

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[99]Taufik Abdullah, *School and Politics The Kaum Muda*..,hlm. 5., dan Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam*..., hlm. 129.

[100]Syekh Taher Djamaluddin, masa mudanya dipanggil Muhammad Taher bin Syekh Muhammad, lahir di Ampek Angkek, Bukittinggi. tahun 1869. Menetap di Malaya setelah ia kembali dari Mekkah kira-kira tahun 1900. Ia mengunjungi Minangkabau kembali tahun 1923 dan tahun 1927, ia ditahan oleh pemerintah Belanda selama enam bulan; kemudian ia tidak pernah kembali lagi ke daerahnya. Tetapi gerakan pembaruan melalui majalah al-Imam dan sekolah yang didirikannya yaitu al-Iqbal al-Islamiyah di Singapura. Ia sendiri mengakui bahwa pengaruh Azhar di Kairo telah "membuka matanya" dan adalah disebabkan oleh rasa "cintanya" pada lembaga pendidikan Azhar ini yang menyebabkan ia mempergunakan nama al-Azhar dibelakang namanya (Delian Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 - 1942*, hlm. 40-41).

[101]Ibid, hlm. 41.

Mohammad Abduh serta pendapat dan ide-ide pembaruan yang dikemukakan majalah *al-Manar* di Mesir.

Kedua, Syekh Muhammad Djamil Djambek[102], lulusan Makkah. Djambek, aktif dalam memberikan pelajaran dengan mempergunakan cara-cara tradisional. Murid-muridnya kebanyakan terdiri dari guru-guru dan *kulipah tarekat*, walaupun tidak disukainya, tetapi Djambek tetap menghromati mereka sebagai seorang ahli [anggota] tarekat. Kemudian, Djambek meninggalkan pekerjaan mengajar atau sebagai seorang guru dan kembali menjalani hidup sebagai *perewa,* yang membawanya hijrah ke Kamang, sebuah negeri yang merupakan salah satu pusat kegiatan kaum Paderi pada abad yang lalu. Di sini Djambek tertarik kembali untuk menyebarkan pengetahuan, walaupun tidak melalui suatu lembaga yang terorganisir, melainkan melalui tablig-tablig dan ceramah-ceramah[103].

Pusat perhatian Syekh Djambek, terutama pada usaha untuk meningkatkan iman sehingga ia sangat mengecam kelompok tarekat. Djambek membangun hubungan dengan pelajar-pelajar sekolah guru [*Kweekschool*] dan tokoh-tokoh penting setempat termasuk tokoh-tokoh non-Islam. Pada tahun 1918, Djambek, mendirikan suatu lembaga yang sampai sekarang masih terkenal dengan nama *Inyik* Djambek. Lembaga tersebut merupakan pusat kegiatan untuk memberikan pelajaran agama dan juga merupakan tempat pertemuan organisasi-organisasi Islam"[104]. Djambek, aktif dalam penerbitan dan pada tahun 1913 mendirikan suatu organisasi

---

[102]Syekh Muhammad Djamil Djambek [disingkat Djambek], lahir di Bukittinggi, tahun 1860, anak dari Muhammad Salch Datuk Malcka, kepala nagari Kurai. Ia memperoleh pendidikan di sekolah rendah yang mempersiapkan pelajar-pelajar untuk sekolah guru [*Kweekschool*]. Ia lebih tertarik pada kehidupan parewa dan baru pada umur 22 tahun ia mulai memberikan perhatian pada pelajaran [tentang agama dan bahasa Arab]. Tahun 1896 ayahnya membawa ia ke Mekkah, dan ia bermukin 9 tahun lamanya untuk mempelajari ssoal-soal agama. Ia kembali ke Bukittinggi pada tahun 1903 [Delian Noer, hlm. 43]. Kehidupan *Parewa*, Hamka seorang yang mengenal benar daerah Minangkabau, yang dikutip Delian Noer pada catatan kaki, menceritakan: Di minangkabau memang ada satu golongan orang muda-muda yang bergelar "padewa". Mereka tak mau mengganggu kehidupan kaum keluarga, hidup mereka ialah dari berjudi, menyabung dan lain-lain. Mereka juga ahli dalam pencak dan silat. Pergaulan mereka sangat luas, di antara parewa di kampung anu dengan kampung yang lain harga menghargai dan besar membesarkan. Mereka sangat kuat mempertahankan kehormatan nama suku dan kampung. Kalau mereka bersahabat, sampai mati mereka akan mempertahankan sahabatnya, saudara sahabatnya jadi saudaranya, scakan-akan seibu, sesaudara, sekemenakan. Kata-kata "muda" perempuan tidak boleh sekali-kali. ...Kepada orang-orang alim mereka hormat, dan kadang-kadang mereka dermawan. Mereka setia dan sudi menolong (Delian Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 - 1942*, hlm. 42-43].

[103]Ibid, hlm. 43.

[104]Ibid, hlm. 44.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

yang bersifat sosial yaitu *Tsamaratul Ikhwan*, di Bukittinggi, yang aktif dalam berbagai penerbitan kitab-kitab kecil dan brosur-brosur tentang pelajaran agama dan penyebaran ide-idenya.

Ketiga, Haji Abdul Karim Amrullah [Haji Rasul][105], mulai aktif mengajar pada tahun 1906. Dalam mensosialisasi pemikirannya dilakukan dengan "pendekatan yang bersifat keras, tanpa maaf dan tanpa kompromi. Kegiatan tablig-tablignya ditandai dengan kecaman dan serangan terhadap segala perbuatan yang tidak disetujuinya, sampai-sampai persoalan kecil tidak lepas dari perhatiannya dan sangat keras terhadap keluarganya dalam melaksanakan pendapatnya, bahkan Abdul Karim, selalu menampakan sikap tidak setuju dan bahkan bermusuhan terhadap adat, *ninik mamak*"[106] Abdul Karim, juga mengadakan hubungan dengan organiasi-organisasi Islam di Jawa seperti Sarekat Islam dan Muhammadiyah dan dialah yang memperkenalkan organisasi Muhammadiyah di Minangkabau pada tahun 1925 yang segera berkembang dan meluas dengan cepat. Abdul Karim, sangat aktif dalam gerakan pendidikan di Minangkabau dengan mendirikan "Suraunya di Padang Panjang yang tumbuh dan berkembang dengan baik dan kemudian menjadi Sumatera Thawalib serta melahirkan suatu partai politik "Persatuan Muslimin Indonesia" pada permulaan tahun 1930-an. Tahun 1920 Abdul Karim, menjadi penasihat Persatuan Guru-guru Agama Islam dan pada tahun 1931 ikut membantu usaha mendirikan sekolah *Normal* Islam di Padang Panjang. Beliau juga tercatat dalam sejarah

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[105]Haji Abdul Karim Amrullah, dikenal dengan Haji Rasul, lahir di Mininjau pada tahun 1879. Ia seorang anak ulama bernama Syekh Muhammad Amrullah gelar Tuanku Kisai. Merupakan gelar [*gala*] penamaan yang diturunkan menurut garis keibuan [*matriliniah*] di daerah Minangkabau. Ia memperoleh pendidikan elementer secara tradisional pada berbagai tempat di daerah Minangkabau dan tahun 1894 Ia pergi ke Mekkah untuk belajar selama 7 tahun. Sekembalinya ke kampung halamannya ia telah disebut Tuanku Syekh Nan Mudo, sebagai pengakuan atas kepandaiannya. Kemudian ia mengunjungi Mekkah kembali untuk beberapa tahun dan kembali pada tahun 1906. Selama bermukim yang kedua di Mekkah, ia telah mulai memberikan pelajaran. Murid-muridnya antara lain Ibrahim Musa dari Parabek Bukittinggi yang kemudian menjadi salah seorang pendukung yang penting dari pembaruan di Minangkabau (Ibid, hlm. 45).

[106]Ibid, hlm. 45.

termasuk seorang yang sangat gigih menentang Komunis dan menyerang *ordinansi* guru pada tahun 1928 serta ordinansi "sekolah liar" pada tahun 1932"[107].

Keempat, Haji Abdullah Ahmad[108], lulusan Makkah. Sekembalinya dari Mekkah pada tahun 1899, "segera aktif mengajar di kota Padang Panjang dan berusaha memberantas bid'ah dan tarekat. Abdullah Ahmad pun tertarik dengan penyebaran pemikiran pembaruan melalui publikasi dengan jalan menjadi agen dari berbagai majalah pembaruan. Pada tahun 1906 Haji Abdullah Ahmad pindah ke Padang Panjang untuk mengadakan tablig-tablig, mengadakan pertemuan-pertemuan tentang masalah-masalah agama dan mendirikan perkumpulan Jamaah Adabiyah beberapa tahun kemudian"[109]. Beliau memberikan pelajaran agama dalam bentuk pengajian yang diselenggarakan dua kali seminggu secara bergantian dan berpindah dari satu rumah ke rumah yang lain. Dari kegiatan pengajian-pengajian tersebut timbul keinginan untuk melaksanakan suatu pendidikan yang dikelolah secara sistimatis. Keinginan ini didasarkan pada realitas bahwa tidak semua anak-anak dari para pedagang di Padang dapat masuk sekolah pemerintah, maka pada tahun 1909 Abdullah membuka sekolah dengan bantuan para pedagang dan sekolah tersebut diberi nama Sekolah *Adabiyah.* Model sekolah Adabiyah ini diinspirasi oleh model Sekolah Iqbal di Singapura yang dikunjunginya, sehingga sekolah Adabiyah ini dikelolah secara sistematis. Haji Abdullah juga aktif menulis dan pada tahun 1914 menjadi ketua persatuan wartawan di Padang dan pendiri majalah *al-Munir* yang diterbitkan di Padang tahun 1911 sampai tahun 1916, majalah *al-Akhbar* tahun 1913, dan menjadi redaktur dalam bidang agama dari majalah al-Islam tahun 1916 yang diterbitkan oleh Sarekat Islam. Haji Abdullah, juga menjalin hubungan yang sangat

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[107]Ibid, hlm. 46.

[108]Haji Abdullah Ahmad, lahir di Padang Panjang tahun 1878 sebagai seorang anak dari Haji Ahmad yang dikenal sebagai seorang ulama dan juga sebagai seorang pedagang kecil. Setelah ia menyelesaikan pendidikan dasarnya pada sebuah sekolah pemerintah dan pendidikan agamanya di rumah, ia pergi ke Mekkah pada tahun 1895 dan kembali ke Indonesia pada tahun 1899 (Ibid, hlm.46).

[109]Ibid, hlm. 46.

erat dengan siswa-siswa sekolah menengah pemerintah di Padang dan sekolah dokter di Jakarta, serta ikut membantu kegiatan *Jong Sumatranen Bond*[110].

Pembaharu-pembaharu lain yang muncul kemudian di Minangkabau yang merupakan aktifitas dari murid atau bekas murid dari ulama-ulama tersebut di atas, diantaranya Syekh Ibrahim Musa dan Zainuddin Labai al-Junusi, telah memainkan peranan yang besar dalam mendirikan lembaga-lembaga pendidikan modern di daerah Minangkabau. Syekh Ibrahim Musa[111], ikut dan aktif membantu gerakan pembaruan di Minangkabau dan beliau dapat diterima dikalangan golongan tradisi. Hal ini terlihat dari keikutsertaannya sebagai anggota pada dua organisasi tersebut yaitu organisasi Persatuan Guru Agama Islam [Organisasi Kaum Muda] dan *Ittihadul Ulama* [Organisasi Kaum Tua]. Maka Syekh Ibrahim, termasuk seorang tokoh yang mampu merangkul, terlibat dan bergaul dengan dua kelompok tersebut. Beliau juga mendirikan surau yang terkenal dengan nama Thawalib [Parabek] yang mempunyai hubungan dengan lembaga yang sama di Padang Panjang. Zainuddin Labai al-Junusi[112], adalah seorang yang *auto-didact*. Pengetahuannya diperoleh dengan membaca sendiri dan memiliki kemampuan dalam bahasa Inggris, Belanda, dan Arab yang sangat membantunya dalam mempelajari dan mengembangkan pemikiran-pemikirannya, dan kemudian pada tahun 1913, Labai memilih Padang Panjang sebagai tempat untuk mengembangkan kariernya yang dimulai dengan mengajar di surau Jembatan Besi. Zainuddin Labai, sendiri banyak aktif menulis artikel untuk mensosialisasikan ide-idenya melalui majalah *al-Munir* dan kemudian menerbitkan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[110]Ibid, hlm. 47.

[111]Syekh Ibrahim Musa, lahir di Parabek, Bukittinggi, tahun 1882. Ia belajar dibeberapa tempat di daerahnya dan pada usia 18 tahun belajar di Mekkah selama 8 tahun. Tahun 1909 ia kembali ke Minangkabau dan mengajar sampai tahun 1912, kemudian ia berangkat lagi ke Mekkah tahun berikutnya, dan kembali pada tahun 1915. Ia disebut Syekh Ibrahim Musa atau Inyik Parabek sebagai pengakuan terhadap penetahuan agamanya [Ibid, hlm. 48].

[112]Zainuddin Labai al-Junusi, lahir di Bukit Surungan, Padang Panjang tahun 1890. Labai seorang *auto-didact*, karena tidak pernah memperoleh pendidikan secara sistematis. Umapanya dengan memasuki suatu lembaga atau surau selama beberapa tahun. Ia hanya, belajar dua tahun di sekolah negeri dan dua tahun belajar agama pada Syekh Muhammad Junus. Pengetahuannya diperoleh dengan membaca sendiri. Kemampuannya dalam bahasa Inggris, Belanda dan Arab sangat membantunya. Koleksi buku-bukunya meliputi kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa asing, meliputi berbagai macam bidang seperti aljabar, ilmu bumi, kimia dan agama, walaupun dalam aljabar dan kimia masih merupa kitab elementer. Labai, lebih tertarik pada kehidupan dan kegiatan kalangan kebangsaan, seperti Mustafa Kamil di Mesir, dari pada Abduh atau Rashid Ridha yang lebih banyak memperhatikan soal-soal agama [Ibid, hlm. 48].

majalah dengan nama yang sama di Padang Panjang setelah majalah *al-Munir* berhenti terbit.

Zainuddin Labai, berbeda dengan pembaharu-pembaharu lain pada zamannya, karena ia lebih tertarik pada kehidupan dan kegiatan kebangsaan, serta ia termasuk seorang yang mula-mula mengintrodusir sistem sekolah yang baru. Tahun 1915, ia membuka sekolah guru *Diniyah* dengan menggunakan sistem kelas, kurikulum yang lebih teratur yang mencakup pengetahuan umum, seperti bahasa, matematika, sejarah, ilmu bumi dan pelajaran agama dan mengorganisir sebuah klub musik untuk murid-muridnya. Labai, termasuk seorang yang produktif dalam menulis, antara lain buku teks tentang figh dan tatabahasa Arab untuk sekolahnya. Ia juga menjadi seorang anggota pengurus *Thawalib* dan mendirikan perkumpulan pelajar *Diniyah* pada tahun 1922, dengan maksud bersama-sama membina kemajuan sekolah tersebut[113]. Labai termasuk seorang termuda di antara tokoh-tokoh pemabaharu yang lain, sehingga banyak orang yang menaruh harapan padanya akan tetapi umurnya terlalu singkat [meninggal tahun 1924], sehingga tidak memberikan kesempatan kepadanya untuk lebih banyak menyumbangkan pikiran dan tenaga bagi perkembangan gerekan pembaruan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Uraian di atas, menegaskan bahwa secara umum gerakan-gerakan pembaruan pendidikan Islam dilakukan dengan kegiatan ceramah-ceramah, tablig-tablig, mendirikan organisasi sosial, mendirikan sekolah-sekolah, pesantren-pesantren, penerbitan buku-buku teks, brosur dan majalah-majalah Islam. Dalam bidang jurnalistik, muncul berbagai penerbitan, seperti majalah *al-Imam, al-Munir, al-Akhbar, al-Islam, al-Bayan, al-Basyir, al-Istiqan* dan lain-lain. Hal ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa "siapa menguasai pers, dialah yang akan menguasai dunia". Maka dari gerakan-gerakan tersebut, apabila dicermati aktivitas pendidikan menjadi

[113]Ibid, hlm. 49.

fokus utama dalam gerakan tersebut, karena semua tokoh-tokoh pembaharu bergerak melalui bidang pendidikan yaitu "mereka semua menjadi guru yang merupakan suatu lapangan aktivitas yang secara tradisional merupakan profesi para ulama di masa sebelumnya. Oleh karenya, pembaharu-pembaharu tersebut mengakui betapa pentingnya pendidikan untuk membina dan membangun generasi yang lebih baik, karena perubahan dalam pemikiran dan ide-ide tentulah akan mempunyai arti yang besar dan akan lama bertahan apabila perubahan-perubahan ini mendapat tempat dalam kalangan genarasi muda"[114].

Dari paparan di atas, dapat dikatakan bahwa tahun 1909 merupakan *starting-point* pembaruan pendidikan Islam, dan kemudian mengantarkan sejarah pendidikan Islam ke dalam babak baru, yaitu berdirinya sekolah-sekolah yang dikelolah dengan metode pengajaran yang lebih maju. Azyumardi, menyatakan bahwa "gagasan modernisasi Islam yang menemukan momentumnya sejak awal abad 20, pada lapangan pendidikan direalisasikan dengan pembentukan lembaga-lembaga pendidikan modern yang diadopsi dari sistem pendidikan kolonial Belanda[115]. Maka tahun 1909 merupakan masa lahirnya madrasah-madrasah yang berkelas di Sumatera Barat, dengan didirikanya Sekolah Ambiya (*Ambiya School*) Padang Panjang, dengan nafas reformasi Islam di Indonesia. Walaupun sebagian sejarawan menyatakan bahwa sampai saat ini belum diketahui secara persis sejak kapan "madrasah" sebagai istilah untuk satu jenis pendidikan Islam digunakan di Indonesia. Namum, jika yang dimaksud adalah madrasah sebagai satu sistem pendidikan Islam yang ber-kelas dan mengajarkan sekaligus ilmu-ilmu keagamaan dan non-keagamaan [meskipun istilah ini kurang tepat, karena Islam tidak mengenal dikotomi ilmu] [116], istilah madrasah sudah tampak sejak awal abad ke-20, meskipun ada sebagian

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[114]Ibid, hlm. 51.
[115]Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi*..., hlm. 10.
[116]Mastuki HS, *Sejarah Asal-Usul Madrasah*, From:http://www.bagais.go.id/index.htm,print,19 Oktober 2002.

lembaga-lembaga pendidikan Islam menggunakan istilah *school* (sekolah), tetapi apabila dilihat dari sistem pendidikannya yang terpadu, lembaga pendidikan seperti itu dapat dikategorikan dalam bentuk madrasah.

Telah dijelaskan diawal, bahwa pendidikan Islam telah diadakan di surau-suarau dan masjid dengan tidak berkelas-kelas dan tidak menggunakan peralatan sekolah karena peserta didik hanya duduk bersila. Kemudian perkembangan selanjutnya, lembaga-lembaga pendidikan tersebut mulailah melakukan perubahan sedikit demi sedikit sampai sekarang. Pendidikan Islam [madrasah] mulai menggunakan sistem kelas dan peralatan sekolah adalah sekolah Adabiah [*Adabiyah School*] yang didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad[117] pada tahun 1909 di Padang Panjang dan madrasah ini merupakan madrasah yang pertama didirikan di Minangkabau, "bahkan di seluruh Indonesia"[118], karena pada saat itu belum ada madrasah yang lebih dahulu didirikan. Sekolah ini pada mulanya bernama *Ambiya School* dan kemudian diubah namanya menjadi Sekolah *Adabiyah* yang tetap eksis sampai tahun 1914.

Sekolah *Adabiyah* merupakan "sekolah dasar yang sama dengan *Hollands Inlandse School* (HIS), kecuali perbedaannya terletak pada pelajaran agama dan Qur'an yang diajarkan secara wajib. Perkembangan selanjutnya, pada tahun 1915, sekolah *Adabiyah* menerima subsidi dari pemerintah dan mengganti namanya menjadi *Hollandsch Maleische School Adabiyah* (HIS–Adabiyah) serta kepala sekolahnya adalah seorang berkebangsaan Belanda, sehingga harapan agar sekolah ini menjadi tumpuan bagi golongan pembaharu Islam menjadi hilang"[119]. Walaupun demikian, "*Hollands Inlandse School* (HIS) merupakan sekolah pertama di Minangkabau yang

---

[117]Pada tahun 1925 Haji Abdullah Ahmad, dikirim ke Kairo bersama Haji Abdul Karim Amrullah sebagai wakil umat Islam Minangkabau untuk menghadiri kongres internasional yang diselenggarakan Universitas al-Azhar, untuk membicarakan penghapusan khalifah di Turki. Keduanya kemudian mendapat gelar doktor kehormatan dari al-Azhar. Penugasan ini membuktikan bahwa Abdullah Ahmad dipandang sebagai ulama terkemuka, sekurang-kurangnya oleh kelompok kaum muda (Karel A. Steenbrink, Pesantren Madrasah...,hlm. 40-41].

[118]Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, hlm. 63.

[119]Delian Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 - 1942*, hlm 52.

memasukkan pelajaran agama dalam rencana kurikulum dan pelajarannya dan kemudian *Hollands Inlandse School Adabiyah* (HIS Adabiyah) berkembang menjadi Sekolah Rakyat dan SMP"[120]. Model sekolah *Adabiyah* ini, "berbeda dengan pendidikan di surau. Pada sekolah *Adabiyah* telah menggunakan sistem klasikal dengan materi pelajaran yang diajarkan, di samping pelajaran agama, juga pelajaran membaca, menulis huruf latin, dan ilmu hitung". Akan tetapi rencana ini gagal, karena sekolah ini ditutup dan kemudian dipindahkan ke Padang. Ketika berada di Padang, "sekolah *Adabiyah* jauh lebih maju bila dibandingkan ketika masih di Padang Panjang, kurikulum dan materi pendidikan lebih ditekankan pada pendidikan umum dari pada pendidikan agama, karena ternyata pendidikan umum sangat diminati di Padang". Sedangkan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan umumnya, Abdullah Ahmad, "memasukkan empat orang guru berbangsa Belanda di samping dua orang Indonesia yang mempunyai ijazah untuk mengajar di tingkat HIS dan kemudian pada tahun 1916 sekolah Adabiyah ini diakui oleh pemerintah Belanda sebagai HIS pertama[121] yang didirikan oleh organisasi Islam dan setahun kemudian sekolah ini mendapat subsidi penuh dari gubernemen.

Uraian di atas, menegaskan bahwa model Sekolah *Adabiyah,* "merupakan bentuk adaptasi dari sistem pendidikan surau dengan penyesuaian total kepada sistem Barat (Belanda), sehingga perhatian terhadap pendidikan agama di sekolah ini sangat kecil serta unsur-unsur tradisional telah ditinggalkan sama sekali. Dengan upaya perubahan ini, sebagian besar dari kalangan ulama tradisional Minangkabau tidak dapat menerima perubahan yang begitu cepat dengan mengadopsi dan penyesuaian total pada sistem pendidikan Barat (Belanda). Menurut para ulama tradisional langkah ini yang membuat Abdullah Ahmad, kehilangan kesempatan untuk mengadakan perubahan pendidikan agama. Labih-lebih lagi ketika dia berpihak pada

[120]Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, hlm. 108.
[121]Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah...*, hlm. 39-40.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Belanda dalam perlawanan terhadap guru *ordinansi* di Sumatera Barat (Belanda)"[122]. Sejak itu, sekolah *Adabiyah* seakan-akan terpisah dari kegiatan dan cita-cita kaum muda Islam, tetapi patut diakui bahwa gagasan Abdullah Ahmad[123], sebagai langkah yang berani dan dapat dipandang sebagai pendiri dan pelopor perkembangan mutakhir dalam dunia pendidikan Islam. Walaupun disatu pihak, dinilai negatif oleh banyak orang, karena orientasinya terlalu ke Barat (Belanda), sehingga maksud utama sekolah *Adabiyah* sebagai "pilar gerakan modernis Islam" [124] menjadi gagal, tetapi ada rasa kebanggaan bahwa sekolah ini merupakan sekolah pertama yang didirikan dan diasuh oleh masyarakat dan organisasi dari lingkungan Islam dengan merombak sistem pendidikan tradisional ke sistem modern di daerah Minangkabau.

Selain Sekolah *Adabiyah,* juga berkembang Surau Jembatan Besi yang merupakan "lembaga pendidikan Islam yang mungkin paling berpengaruh di daerah Minangkabau yang terkenal dengan sekolah *Thawalibnya* dan Sekolah ini tumbuh dan berkembang dari surau-surau dan terkenal dengan Surau Jembatan Besi. Untuk itu, Sekolah ini pada mulanya hanya memberikan materi pelajaran agama dengan cara-cara tradisonal" dan pelajaran utama yang diberikan adalah fiqh dan tafsir Qur'an dan kemudian pada tahun 1904, setelah masuknya Haji Abdullah Ahmad dan Haji Rasul alumnus dari Mekkah, melakukan perubahan pada materi pelajaran dengan "tekanan utamanya pada pelajaran "ilmu alat" berupa kemampuan untuk menguasai bahasa Arab dan cabang-cabangnya"[125], sehingga memungkinkan siswa-siswa dapat mempelajari sendiri kitab-kitab yang diperlukan dan lambat laun mereka dapat mengenal Islam dari kedua sumber utamanya yaitu Qur'an dan Hadits.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[122]Ibid, hlm. 41.

[123]Steenbrink, menyatakan murid Abdullah Ahmad, termasuk Kyai Haji Zarkasji, pendiri Pondok Gontor Ponorogo,pernah belajar di sekolah itu menyatakan:Abdullah Ahmad, bukanlah seorang modernisator,melainkan seorang Hollandisator(Ibid,hl.42).

[124]Delian Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 - 1942,* hlm. 52.

[125]Ibid, hlm. 52-53.

Pengembangan ini, sebenarnya merupakan penyimpangan dari sistem tradisional yang lebih mengutamakan penguasaan materi "fiqh" dan "fatwa-fatwa" dari berbagai mazhab-mazhab dan bukan pada kemampuan untuk memahami dan mengaanalisis bagaimana "fatwa-fatwa" itu ditetapkan. Maka, tekanan utama proses pembelajaran di Surau Jembatan Besi difokuskan pada "ilmu alat", yaitu kemampuan untuk menguasai bahas Arab dengan segala cabang-cabangnya yang dikembangkan. Sebenarnya, upaya ini merupakan solusi untuk menjawan persoalan di atas, artinya, "untuk memahami "fiqh" dan "fatwa-fatwa" dari berbagai mazhab diperlukan kemampuan bahasa Arab dengan baik. Pada tahun 1916, Surau Jembatan Besi mulai memperkenalkan dan mengembangkan "sistem klasikal, tetapi para siswanya masih duduk di lantai dan pada awalnya terdapat tiga kelas, yaitu kelas rendah, menengah, dan tinggi. Kemudian dari tahun ke tahun, perkembangan siswanya semakin bertamba, maka kelas rendah dipecah menjadi empat kelas, dan masing-masing setahun, sedangkan kelas menengah dan tinggi dipecah menjadi kelas 5, 6 dan 7"[126]. Tetapi sesuatu yang kurang wajar dalam sistem ini adalah pembagian kelas yang masih bercampur aduk, karena penataan dan pembagian kelas belum mempertimbangkan kemampuan dan umur anak. Misalnya saja, "murid sekolah Gubernemen, sekolah Diniyah dan buta huruf menjadi satu dalam satu kelas. Sedangkan dari sisi umur, ada siswa yang berumur 10 tahun dan berumur 30 tahun, berada dalam satu kelas"[127]. Tetapi diakui bahwa model pendidikan yang dilakukan H.Abdul Karim Amrullah ini telah menjadikan lembaga pendidikan Islam tradisional Surau Jembatan Besi Minangkabau sebagai basis untuk pengembangan pendidikan madrasah modern yang kemudian lebih dikenal dengan Sumatera Thawalib.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[126]Hamka, 1951, *Kenang-kenangan Hidup I*, (Jakarta: Gapura, 1951) hlm. 41., dan Delian Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 – 1942*, hlm. 53.

[127]Delian Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 - 1942*, hlm. 53.

Sumatera Thawalib, "didirikan pada tahun 1914 di Padang Panjang, yang dipimpin oleh Syekh Abdul Karim Amrullah yang termasyhur dengan Haji Rasul. Semula Sumatera Thawalib, sebagai perkumpulan khusus untuk pelajar-pelajar[128] madrasah[129], kemudian pada tahun 1921 "perkumpulan itu diubah menjadi Sumatera Thawalib dan kegiatanpun diperluas pada bidang-bidang pelajaran agama yaitu mempelajari Islam dan meluaskan ajarannya[130]. Dalam pelaksanakan pendidikan dan pengajaran, tidak menggunakan "sistem berhalaqah dari Surau Jembatan Besi tetapi mengubahnya menjadi sistem berkelas-kelas[131]. Gagasan Syekh Abdul Karim Amrullah ini, "tidak beberapa lamanya diikuti oleh Sumatera Thawalib Parabek Bukittinngi yang dipimpin oleh Syekh Ibrahim Musa pada tahun 1921 dan kemudian diikuti oleh Sumatera Thawalin Padang Japang [didirikan tahun 1906], Sumatera Thawalib Batusangkar, dan Maninjau, sedangkan surau Sungayang telah diubah menjadi Madrasah School.

Pada tahun 1919, Haji Jalaluddin Thaib, mencoba mengintrodusir cara-cara mengajar modern ke dalam Thawalib, sistem berkelas lebih sempurnakan dengan pemakaian peralatan sekolah, kurikulum lebih diperbaiki dan kewajiban pelajar untuk membayar uang sekolah. Kemudian, pada tahun berikutnya, Thalib menjadi ketua dari Sumatera Thawalib dan organisasi ini berkembang dan aktivitasnya diperluas melebihi kegiatan yang dilakukan sebelumnya, yaitu menjadi suatu badan yang mengawasi dan membina sekolah[132]. Perubahan dan perluasan lapangan kegiatan organisasi ini dapat terlaksana, karena kerjasama dengan sekolah Parabek, sebab

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[128]Haji Habib [Seorang siswa Sumatera Thawalib], mengambil inisiatif untuk membicarakan masalah "perkumpulan" dengan teman-temannya. Maka berdirilah suatu perkumpulan persekutuan (persaiyoan), yang dikenal dengan nama perkumpulan "sabun". Oleh karena perkumpulan ini menenuhi atapun berusaha memenuhi keperluan sehari-hari para pelajar seperti penyediaan sabun, pensil, tinta, dan sebagainya. Pada tahun 1917 aktivitas organisasi koperasi ini semakin bertambah berkembang, karena usaha-usaha yang lebih giat dilakukan oleh seorang siswa yang berasal dari Tapak Tuan, Aceh, bernama Hasjim. Lambat laun koperasi itu tampaknya dapat memenuhi segala macam keperluan sampai-sampai kepada menggunting rambut, menjahit pakaian. Masing-masing usaha ini dikerjakan oleh seorang atau lebih petugas yang dibayar oleh koperasi. Mulai tahun 1918 bagian dari keuntungan perkumpulan ini disisihkan untuk membayar guru-guru (Ibid, hlm. 55).

[129]I. Djumhur dan Danasaputra, *Sejarah Pendidikan...*, hlm. 161.

[130]Delian Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 - 1942*, hlm. 55.

[131]I. Djumhur dan H. Danasaputra, *Sejarah Pendidikan...*,hlm.161.

[132]Delian Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 - 1942*, hlm. 55.

sebelumnya pelajar-pelajar di Parabek pada tanggal 14 Agustus 1919 telah mengorganisir diri mereka dalam *Muzakaratul Ikhwan.* Gagasan pendirian *Muzakaratul Ikhwan* ini timbul dari pertemuan-pertemuan secara rutin para pelajar dari sekolah tersebut serta organisasi ini juga aktif dalam bidang jurnalistik dengan menerbitkan majalah *al-Bayan*[133] tetapi kemudian berhenti setelah beberapa kali terbit.

Kedua organisasi itu, merasa perlu membuat satu ikatan persatuan dan kemudian diadakanlah konferensi di Surau Inyik Djmabek Bukittinggi pada tanggal 15 Februari 1920. Tetapi setelah konferensi kedua organisasi tersebut tetap melakukakn aktivitas sendiri-sendiri tanpa suatu koordinasi dari pengurus pusat yang diketuai oleh Haji Jamaluddin Thaib. Kemudian tahun 1928, kegiatan-kegiatan bersama kedua orgaisasi tersebut diaktifkan kembali, sehigga beberapa sekolah menggabungkan diri ke dalam organisasi tersebut dan perkembangan pendidikan semakin semarak dengan berbagai macam kegiatan di luar Padang Panjang. Haji Rasul, mengembangkan semacam "kelas seminar" untuk mengkaji persoalan yang muncul dan menarik perhatian masyarakat Islam pada umumnya, termasuk persoalan adat. Kemdian, perkembangan selanjutnya, kegiatan politik mulai memasuki sekolah-sekolah Thawalib di Padang Panjang terutama dalam hubungannya dengan faham komunisme.

Faham komunisme masuk ke sekolah Thawalib pada tahun 1923 yang diperkenalkan oleh Datuk Batuah [seorang guru Thawalib] setelah ia kembali dari Jawa dan dibantu oleh guru lain yaitu Zainuddin"[134]. Pada awalnya, faham komunis hanya merupakan "sikap radikal" terhadap Belanda dan bukan merupakan suatu ideologi yang berdasar pada historis matealisme, tetapi akhirnya faham ini tumbuh dan berkembangan dengan memperoleh pengikut-pengikut dari sekolah Thawalib

[133]Ibid, hlm. 56.
[134]Ibid, hlm. 126.

sehingga memecah belah para siswa di sekolah tersebut. Steenbrink, menyatakan bahwa pada tahun 1924, "sebagian besar anggota Sumatera Thawalib menjadi pro-komunis, sedangkan kelompok Persatuan Guru-guru Agama Islam (PGAI), tetap merupakan organisasi yang anti komunis dan mereka lebih banyak terlibat dalam masalah agama, terutama dalam pendirian sekolah pendidikan agama modern"[135], sedangkan di Sumatera Thawalib, faham komunis makin lama makin tumbuh subur, karena para anggota Sumatera Thawalib selalu aktif terlibat dalam gerakan-gerakan politik dan nasionalis. Maka peralihan perhatian kegiatan dari bidang pendidikan ke bidang politik di kalangan guru-guru dan pelajar-pelajar Thawalib Pandang Panjang, menurut Delian Noer, "tidaklah tumbuh secara tiba-tiba, melainkan telah tersosialisasi dan terinternalisasi melalui bacaan koran-koran dan majalah yang bersifat politik[136], sehingga faham komunis menjdi subuh di Thawalib. Kemudian, pada tahun 1926 pemerintahan kolonial Belanda mulai mengambil tindakan keras terhadap sekolah Thawalib Pandang Panjang dengan munutup kafetaria pelajar bernama *Buffet* Merah, dengan tuduhan bahwa kafetaria tersebut merupakan pusat aktivitas terselubung dari kegiatan-kegiatan Komunis dan pada tahun 1927 banyak guru-guru Thawalib Padang Panjang dilarang untuk mengajar"[137] oleh pemerintahan kolonial Belanda.

Uraian di atas, menegaskan bahwaThawalib Padang Panjang telah berubah sifat kegiatanya dari kegiatan pendidikan Islam menjadi kegiatan politik. Kegiatan yang dipelopori Datuk Batuah, menyebabkan mundurnya pengaruh pembaruan-pembaruan Islam, karena perhatian sebagian pelajar dan guru sekolah berpindah dari usaha mempelajari persoalan Islam beralih kepada partisipasi mereka dalam kegiatan politik. Sedangkan kalangan ulama-ulama pembaharu Islam sangat anti komunisme, karena fahamnya bertentangan dengan ajaran Islam dan dianggap sebagai musuh agama,

---

[135]Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah...*, hlm. 48.
[136]Delian Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 - 1942*, hlm. 57.
[137]Ibid, hlm. 57.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

sebab idiologinya tidak mempercayai adanya Tuhan. Oleh karenanya, faham komunisme dianggap merusak dan menurut para ulama merupakan faham yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian, Persatuan Guru-guru Agama Islam, pada tahun 1924 mengambil keputusan untuk menolak komunisme dan menyatakan faham komunisme bertentangan dengan ajaran Islam"[138] dan sikap ulama pembaharu ini, mendapat dukungan dari kalangan ulama tradisi, seperti Syekh Sulaiman ar-Rasuli yang memperlihatkan sikap anti Komunis. Akhirnya aktivitas komunis di sekolah Thawalib Padang Panjang mulai terhenti ketika pemerintah kolonial Belanda menangkap aktivis komunis, setelah terjadi pemberontakan di Silungkang.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada masa itu [tahun 1923], merupakan perjuangan antara ulama pembaharu Islam dengan pemimpin-peminpin komunis dalam merebut dan mempengaruhi massa, sehingga urusan pendidikan hampir terbengkalai. Maka dengan berakhirnya kegitan politik, aktifitas pendidikan di lembaga pendidikan Thawalib di Padang Panjang mulai ditata dan menjadi normal kembali dan mulai muncul "usaha-usaha yang dilakukan untuk memperbarui dan menyempurnakan sistem pendidikannya. Maka pada tanggal 21 Januari 1928 diadakan suatu pertemuan di Parabek dengan maksud untuk mengaktifkan kembali kegiatan pendidikan. Dari hasil pertemuan tersebut, dibentuklah suatu panitia untuk mempelajari masalah kurikulum dan membentuk suatu badan penasehat yang terdiri dari ulama dan cerdik cendekia yang dipimpin Ali Imran Djamil"[139].

Perkembangan selanjutnya, banyak pimpinan Sumatera Thawalib tetap lebih tertarik pada cita-cita nasionalisme dari pada cita-cita dan usaha pembaruan pendidikan Islam. Pada akhirnya tahun 1930, organisasi ini berubah menjadi "Persatuan Muslimin Indonesia" [PMI atau PERMI] tanpa mengubah sifatnya[140].

---

[138]Ibid, hlm. 58-59.
[139]Ibid, hlm. 59.
[140]Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah...*, hlm. 49.

Kemudian pada tahun 1932 ia menjadi gerakan yang bersifat politik atas dasar Islam yang namanya disingkat menjadi PERMI, tetapi "pemerintah kolonial Belanda menganggap organisasi ini sebagai partai politik yang dianggap berbahaya, tidak mendapat hak untuk hidup dan pemimpin-pemimpinnya harus mengalami nasib di pembuangan dan akhirnya dibubarkan, sehingga putuslah ikatan koordinasi dengan madrasah-madrasah Thawalib. Beberapa di antara madrasah tersebut mengganti nama Thawalib dengan "Perguruan Muslim" atau "Perguruan Islam" dan lain sebagainya"[141]. Maka Thawalib Padang Panjang sejak tahun 1930, merubah namanya menjadi *Darul Funun Abbasiyah* dan sebagiannya tetap menggunakan nama Thawalib. Steenbrink, menyatakan bahwa "sistem pendidikan memang diperbaharui dan juga namanya, tetapi di beberapa surau yang secara langsung dipengaruhi organisasi PERMI tetap mempertahankan nama tersebut. Tetapi pada kenyataannya jumlah surau yang mengikuti sistem Sumatera Thawalib sudah mulai berkurang dan hubungan antara surau sudah mundur, seperti halnya hubungan antara sekolah-sekolah Diniyah"[142]. Maka tahun 1940, Thawalib Padang membuka "bagian baru" yang diberi nama *Kulliyatul Ulum*, yang dapat menampung pelajar-pelajar yang telah menamatkan kelas tujuh Thawalib. Perkembangan lain yang "sangat unik dan memberikan gambaran khas tentang hasil-hasil yang dicapai oleh pembaharu pada umumnya adalah menyangkut pendidikan putri-putri yang terdapat pada pesantren tradisional umumnya karena keperluan untuk mendirikan sekolah khusus untuk putri dirasakan sangat mendesak"[143]. Maka pada tahun 1915, di Padang Panjang didirikan sebuah Madrasah yang semula diberi nama *Diniyah Shcool* dan kemudian diubah namanya menjadi Madrasah Diniyah yang dirintis oleh Zainuddin Labai al-Junusi"[144]. Madrasah ini, "merupakan pengembangan dari Surau Jembatan Besi, dengan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[141]Delian Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 - 1942*, hlm. 59.
[142]I. Djumhur dan H. Danasaputra, *Sejarah Pendidikan...*, hlm. 161.
[143]Delian Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 - 1942*, hlm. 61.
[144]I. Djumhur dan H. Danasaputra, *Sejarah Pendidikan...*, hlm. 160.

menggunakan sistem *edukasi* dari sistem dan kebiasaan yang dilakukan di sekolah-sekolah pemerintah kolonial Belanda sehingga mendapatkan sambutan masyarakat"[145].

Sejak itu perkembangan madrasah di Sumatera Barat mengalami kemajuan pesat, sehingga kebanyak madrasah yang menggunakan nama Madrasah Diniyah. Zainuddin Labai al-Junusi, mendirikan Madrasah Diniyah untuk memberikan pelajaran agama kepada murid-murid sekolah "gubernemen" dan kegiatan belajar dilaksanakan pada sore hari. Madrasah ini mulai "diorganisasikan berdasarkan sistem kalsikal dan tidak mengikuti sistem tradisional individual, susunan pelajarannya berbeda dengan yang lainnya, yaitu dimulai dengan pengetahuan dasar bahasa Arab sebelum mulai membaca al-Qur'an"[146]. Komposisi kurikulumnya, yaitu di samping pendidikan agama, juga diberikan materi pelajaran umum, terutama pelajaran sejarah dan ilmu bumi. Umumnya madrasah Diniyah ini terdiri dari 7 kelas [seperti HIS Belanda] dan hanya di desa-desa karena kurang guru-gurunya biasanya mempunyai 4 atau 5 kelas saja. Ilmu-ilmu yang diajarkan di madrasah ini masih dominasi ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab [pasif], seperti di surau-surau juga, dan ditambah dengan tarikh Islam, akhlak, dan sedikit ilmu bumi"[147].

Madrasah tingkat Ibtidaiyah pelajaran diberikan dalam bahasa Indonesia dan tingkat *Tsanawiyah* dipakai kitab-kitab terbitan Mesir atau Beirut, di samping itu juga digunakan kitab-kitab dalam bahasa Arab karangannya Zainuddun Labai sendiri"[148]. Disain kurikulum pada madrasah tersebut, selain pendidikan agama dan bahasa Arab, juga diberikan pendidikan umum, terutama sejarah dan ilmu bumi. "Pada kelas tertinggi, mata pelajaran umum menggunakan buku-buku berbahasa Arab, sehingga mata pelajaran ini lebih bersifat ekstra bahasa Arab dari pada ilmu bumi atau

[145]Delian Noer, Op.cit., *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 - 1942*, hlm. 62.
[146]Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* hlm. 59.
[147]Ibid, hlm. 68.
[148]I. Djumhur dan H. Danasaputra, *Sejarah Pendidikan*...,hlm. 160.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

sejarah"[149] dan dalam proses belajar mengajar - bahasa Arab. Labai, tidak menggunakan buku atau kitab nahwu dan sharaf yang begitu rumit, tetapi memakai buku yang sederhana seperti juga dipakai di sekolah dasar Mesir. Sedangkan untuk mata pelajaran fiqh dan sejarah Islam, Labai sendiri yang menyusun i buku-bukunya tersebut. Untuk buku-buku kelas rendah, Labai menyusun dalam bahasa Melayu dan untuk kelas yang lebih tinggi disusun dalam bahasa Arab yang sederhana dan untuk kelas tertinggi selalu menggunakan buku-buku yang diterbitkan di Kairo maupun Beirut"[150]. Sistem pendidikan yang diterapkan di madrasah Diniyah, menurut Hamka yang dikutip Steenbrink "lebih banyak mengambil metode Mesir dalam penyelenggaraan pendidikannya"[151]. Walaupun menggunakan metode pengajaran dari Mesir, secara garis besar "pengajaran di madrasah ini masih menggunakan unsur pendidikan dari gubernemen yang sudah diikuti dan diterapkannya, karena sejumlah besar muridnya juga masih mengikuti pendidikan pada pagi hari di sekolah gubernemen"[152]. Maka, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pendidikan di madrasah Diniyah mengadopsi dua sistem sekaligus, yaitu sistem pendidikan dari Mesir dan sistem pendidikan dari kolonial Belanda.

Mencermati perkembangan pendidikan Islam di Minangkabau, Karel A. Steenbrink, menyatakan bahwa "periode antara tahun 1910-1930 merupakan periode yang agak revolusioner di Minangkabau. Pertentangan antara kaum muda dan kaum tua, serta pemberontakan komunis tahun 1926 cukup banyak mempercepat proses perkembangan masyarakat. Inisiatif Abdullah Ahmad mendirikan sekolah Adabiyah ternyata bukan merupakan pilihan yang tepat, karena itu inisitif ini menjadi terisolir untuk sementara waktu, dan tidak mendapatkan pengikut dari lingkungannya sendiri. Dorongan pertama untuk pembaruan sistem pendidikan berasal dari para murid tertua

[149]Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah* ..., hlm 44.
[150]Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*..,hlm. 58.
[151]Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah*...,hlm. 44.
[152]Ibid, hlm. 44-45.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

surau Jembatan Besi di Padang Panjang, karena berdasarkan tradisi lama, para murid tertua mendapatkan tugas-tugas penting dalam kehidupan sehari-hari di surau, dan juga membantu mengajar murid-murid muda"[153]. Sedangkan dua tokoh penting yang melatarbeakangi perkembangan ini adalah Abdullah Ahmad dan Abdul Karim Amrullah. Tokoh pertama adalah pemilik surau Jembatan Besi, seorang politikus, pragmatis, dan pengurus sekolah yang tidak diterima di lingkungan agama yang tradisional. Tokoh kedua adalah ketua surau tersebut, guru agama yang fanatik memperjuangkan pemurnian agama"[154], tetapi kurang memperhatikan metode pengajaran dan selalu hidup di luar lingkungan Barat. Hal itu mungkin disebabkan dia berasal dari desa kecil di Maninjau yang agak jauh dari keramaian kota dan oleh karena selalu hidup di desa. Kedua tokoh besar tersebut memang memberikan bimbingan kepada murid-murid, namun inisiatif yang cocok bagi zamannya berasal dari murid-murid mereka. Persoalan lain adalah keterlibatan organisasi-organisasi lembaga pendidikan dalam bidang politik, sehingga mempunyai dampak pada perkembangan pendidikan itu sendiri. Sistem pendidikan menggunakan sistem tradisional, mengadopsi sistem pendidikan dari Mesir dan sistem pendidikan dari kolonial Belanda.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pembahasan pendidikan Islam di Sumatera tidak bermaksud mengabaikan perkembangan pendidikan di daerah lain, seperti: Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sumbawa dan lain-lain. Tetapi hal ini didasarkan pada fenomena awal abad ke-20, ketika dibeberapa wilayah terutama Sumatera dan Jawa berdiri madrasah-madrasah sebagai sistem pendidikan Islam. Mengenai perkembangan pendidikan Islam di Jawa, tercatat bahwa "pemrakarsa pertama pembaruan pendidikan dalam hal ini adalah organisas-organisasi "modernis" Islam seperti Jami'at Khair, al-Irsyad,

---

[153]Ibid, hlm. 49.
[154]Ibid, hlm. 50.

Muhammadiyah, dan lain-lain"[155]. P.A. Hoesein Djajadiningrat, yang dikutip Machnun Husein, menyatakan pemrakarsa pembaruan pendidikan Islam di negeri ini, "dimulai di Jakarta pada tahun 1905 melalui organisasi Jami'at Khair. Organisasi ini bertujuan mendirikan perguruan agama Islam dengan menggunakan metode pengajaran mutakhir dan memberikan pelajaran umum di samping pelajaran agama. Berbeda dengan lembaga-lembaga pendidikan klasik selama itu yang hanya memberikan pelajaran agama kepada para santri atau anak didiknya"[156]. Apabila dicermati perkembangan pendidikan sebenarnya pada tahun 1901 masyarakat Arab di Jakarta telah "mengusahakan sekolah dan madrasah dengan tujuan menyelenggarakan pendidikan umum dan agama yang baik, tetapi usaha pertama ini gagal dan kemudian pada tahun 1905 organisasi Jami'at Khair berhasil mendirikan sekolah pertama bagai masayarakat Arab di Jakarta"[157]. Maka untuk lebih jelasnya, perlu mencermati "gagasan pembaruan" pendidikan Islam yang dilakukan beberapa organisasi Islam, di antaranya :

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1. Al-Jami'at al-Khair

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Organisasi Al-Jam'iat al-Khair ini, lebih dikenal dengan Jami'at Khair yang didirikan pada tanggal 17 Juli 1905. Organisasi ini terbuka untuk setiap muslim tanpa diskriminasi asal usul, tatepi mayoritas anggota-anggotanya adalah orang-orang Arab"[158]. Jami'at Khair termasuk organisasi sosial keagamaan yang banyak melakukan aktivitas pendidikan. Terdapat dua bidang kegiatan yang sangat diperhatikan oleh organisasi ini, yaitu: *Pertama*, pendirian dan pembinaan satu sekolah pada tingkat dasar, dan *Kedua*, pengiriman anak-anak muda ke Turki untuk melanjutkan pelajaran. Pada bidang kedua sering terhambat karena kekurangan biaya

---

[155] Azyumardi Azra, "*Pembaruan Pendidikan Islam, Sebuah Pengantar*", dalam: Marwan Saridjo, Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Amissco, Lista Fariska Putra, 1996), hlm. 10.

[156] Machnun Husein, *Pendidikan Islam dalam...*, hlm. 10.

[157] Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah...*, hlm. 59.

[158] Delian Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 - 1942*, hlm. 68.

dan sebab lain, yaitu kerana pada saat terjadi kemunduran *khilafah*, sehingga tidak seorangpun dari mereka yang dikirim oleh organisasi ke Timur Tengah yang diharapkan akan memainkan peranan penting setelah mereka kembali ke Indonesia"[159].

Sekolah dasar Jam'ait Khair yang didirikan pada tahun 1905 ini, kurikulumnya "bukan semata-mata mempelajari pengetahuan agama saja, tetapi juga mempelajari pengetahuan umum lainnya seperti lazimnya sekolah dasar biasa, misalnya berhitung, sejarah [umumnya sejarah Islam], ilmu bumi dan sebagainya. Kurikulum sekolah disusun, menggunakan sistem kelas yang terorganisir dengan bahasa pengantar adalah bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Murid-muridnya di samping anak-anak keturunan Arab dan juga anak-anak Indonesia asli yang terdaftar di sekolah tersebut. Bahasa Belanda tidak diajarkan di sekolah ini dan sebagai penggantinya digunakan bahasa Inggris yang merupakan pelajaran wajib"[160], sehingga pelajaran bahasa Inggris diwajibkan kepada para pelajarannya, tetapi kedudukannya sebagai bahasa kedua, sedangkan bahasa Arab dan bahasa Melayu merupakan bahasa pengantar.

Sistem pendidikan yang dikelolah Jami'at Khair, sudah termasuk maju bila dibandingkan dengan sekolah-sekolah rakyat yang dikelola secara tradisional. Pada sekolah-sekolah dasar Jami'at Khair ada perimbangan antara pelajaran agama dan pelajaran umum, artinya porsi pelajaran umumpun diperhatikan, sehingga mampu mengimbangi sekolah-sekolah yang dilaksanakan pemerintah kolonial Belanda. Jami'at Khair berusaha menampilkan tenaga pengajar [guru] berkualitas, sehingga "mengundang para guru dari daerah-daerah lain, bahkan ada yang didatangkan dari luar negeri untuk mengajar di sekolah tersebut. Tahun 1907, Haji Muhammad Mansur seorang guru dari Padang diminta untuk mengajar di sekolah tersebut karena kemampuannya di dalam bahasa Melayu dan pengetahuannya dalam bidang

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[159]Ibid, hlm. 68..

[160]Zuhairini, dkk., *Sejarah Pendidikan Islam*, hlm. 159., dan Delian Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, hlm. 69

agama"[161]. Sekitar tahun 1911 Jami'at Khair mendatangkan guru dari luar negeri seperti "Al-Hasyimi dari Tunis, di samping mengajar juga memperkenalkan gerekan kepanduan dan olah raga di lingkungan sekolah dan beliau terkenal sebagai orang yang pertama kali mendirikan gerakan kepanduan di kalangan orang-orang Islam di Indonesia. Pada "Oktober 1911, tiga orang guru dari negeri-negeri Arab untuk bergabung ke Jami'at Khair, yaitu Syekh Ahmad Surkati dari Sudan, Syekh Muhammad Thaib dari Maroko, dan Syekh Muhammad Abdul Hamid dari Mekkah. Di antara guru-guru tersebut, Surkati yang banyak memainkan peranan dalam penyebaran pemikiran-pemikiran baru dalam lingkungan masyarakat Islam Indonesia". Kemudian pada gelombang ketiga Oktober 1913, "guru-guru yang datang dari luar negeri seperti Muhammad Abdul Fadal Ansari, Muhammad Noor (Abdul Anwar) al-Ansari, Hasan Hamid al-Antasari, dan seorang lagi yang kemudian diperuntukan bagi Jami'at Khair yang didirikan di Surabaya, yaitu Ahmad al Awif"[162]. Para guru tersebut adalah sahabat-sahabat Surkati, dan salah seorang di antaranya mereka adalah saudara kandung Surkati sendiri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendidikan yang dikembangkan oleh Jami'at Khair menggunakan guru-guru dari kalangan mereka sendiri, dari daerah Sumatera, dan juga menggunakan guru-guru tamu dari luar negeri, dan akhirnya mereka menetap.

Guru-guru yang didatangkan dari luar negeri semuanya mengakui sebagai pengikut-pengikut Muhammad Abduh seorang reformis Mesir, walaupun di antara guru-guru tersebut hanya Syekh Muhammad Noor yang pernah belajar di Universitas al-Azhar di Kairo pada tahun 1899-1906 dan pernah belajar langsung dari Syekh Muhammad Abduh. Hal ini terlihat jelas dari pelajaran yang mereka pentingkan adalah bahasa Arab sebagai ilmu alat, sebab Abduh memang mementingkan pelajaran

---

[161]Zuhairini, dkk., *Sejarah Pendidikan Islam*, hlm. 160.

[162]Delian Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 - 1942*, hlm. 69-70.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

bahasa Arab sebagai alat untuk memahami sumber-sumber Islam. Sedangkan dalam usaha pengembangan jalan pikiran murid-murid dengan cara menekankan pengertian dan daya kritik, bukan hafalan, juga dalam mata pelajaran lain seperti sejarah, ilmu bumi, di samping mata pelajaran agama; pemakaian buku-buku yang bergambar di dalamnya, terutama gambar-gambar manusia yang oleh sementara golongan [golongan tradisi] menolak"[163].

Jami'at Khair di samping membawa pemabaruan dalam sistem pengajaran, juga berusaha menyebarkan ide-ide reformasi yang didapatkan dari bacaan-bacaan yang didatangkan dari luar negeri. Mereka juga "memperjuangkan persamaan hak sesama muslim dan pemikiran kembali kepada Qur'an dan Hadis. Ide persamaan tersebut menyebabkan persaingan mereka dari kalangan Sayid dari Jami'at Khair yang melihat bahwa ide-ide tentang persamaan ini sebagai ancaman terhadap keududukan mereka yang lebih tinggi dibandingkan dengan golongan lain dalam masayarakat Islam di Jawa"[164], dan hal inilah yang menyebabkan pecahnya Jami'at Khair dan melahirkan organisasi al-Irsyad.

Uraian ini, menggambarkan bahwa Jami'at Khair, "merupakan organisasi pertama yang didirikan oleh orang bukan Belanda dengan keseluruhan kegiatannya diselenggarakan berdasarkan sistem organisasi yang memiliki anggaran dasar, anggaran rumah tangga, memiliki struktur organisasi yang jelas, yaitu ketua, sekretaris, bendahara dan sebagainya. Organisasi ini memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pengakuan resmi pemerintah kolonial Belanda"[165]. Maka dapat dikatakan bahwa Jami'at Khair merupakan organisasi modern pertama dalam masyarakat Islam karena memiliki anggaran dasar, daftar anggota yang tercatat, rapat-rapat secara berkala. Usaha yang dilakukan dengan mendirikan lembaga

[163]Ibid, hlm. 70., dan Zuhairini, dkk., *Sejarah Pendidikan Islam*,, hlm. 161.
[164]Delian Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 - 1942*,hlm.70.
[165]Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah...*, hlm 59-60.

pendidikan dan melakukan pembaruan dalam sistem pengajaran yang dikelola secara modern, yaitu memiliki kurikulum dengan memasukkan pengetahuan umum dan bahasa asing ke dalam daftar pengajaran, memiliki kelas-kelas, pemakaian peralatan sekolah dan sebagainya. Perlu dicatat adalah untuk memenuhi tenaga pengajar yang berkualitas Jami'at Khair mendatangkan guru-guru dari luar negeri dan guru-guru bangsa Indonesia dengan kriteria tertentu. Maka Jami'at Khair adalah organisasi pelopor pendidikan Islam modern di Indonesia yang berhasil memulai dan melahirkan cikal-bakal timbulnya organisasi-organisasi pergerakan Islam di Indonesia"[166]. Maka setelah Jami'at Khair, bermunculan dan berdirinya organisasi-organisasi modernis lainnya di Jawa, seperti: al-Islah wal Irsyad, Persyerikatan Ulama dan Persatuan Oemat Islam, Muhammadiyah, Persatuan Islam, Syarikat Dagang Islam, Nahdlatul Ulama, dan lain-lain, juga bergerak dalam bidang pendidikan Islam.

2. Al-Islah wal Irsyad

Al-Islah wal Irsyad, didirikan pada tahun 1914, merupakan salah satu organisasi Islam yang juga bergerak dalam bidang pendidikan. Pendiri-pendiri organisasi ini kebanyakan adalah para pedagang dan guru sebagai tempat meminta fatwa adalah Syeikh Ahmad Surkati[167]. Al-Islah wal Irsyad, kemudian dikenal dengan al-Irsyad, dengan tujuan utamanya adalah mengadakan pembaruan dalam Islam [*reformisme*]. Organisasi ini terdiri dari kalangan orang-orang Indonesia keturan Arab yang "bergerak di bidang pendidikan agama Islam dengan mendirikan berbagai macam sekolah di mana pelajaran agama Islam diberikan bersama-sama dengan

---

[166]Moh. Rafa'i, *Sejarah Islam*, (Semarang,: Wicaksana, 1985), hlm. 178.

[167]Pendiri organisasi ini, termasuk Syaikh Umar Manggue (orang Arab yang tinggal di Jakarta, Saleh bin Ubeid Abdad, Said bin Salim Masjhabi, Salim bin Umar Balfas, Abdullah Harharah, dan Umar bin Nahdi)(Delian Noer,*Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 – 1942*,hlm.73). Syekh Ahmad Surkati, berkebangsaan Sudan, lahir di Dunggala, Sudan, tahun 1872, berasal dari keluarga yang taat beragama dan ia banyak mengetahui ayat-ayat Qur'an ketika masih kecil. Ia tidak dapat memenuhi keinginannya belajar di Mesir, karena setelah ayahnya meninggal nasib membawa ia ke Madinah selama 4 tahun dan di Mekkah selama 11 tahun. Ia belajar antara lain pada Syekh Muhammad bin Yusuf Khayyat tahun 1906 dan menerima sertifikat tertinggi guru agama dari pemerintah Istambul. Tahun 1911 Ia diminta organisasi Jami'at Khair untuk mengajar di Jakarta dan tahun 1913 Ia meninggalkan Jami'at Khair dan membuka sekolahnya di rumahnya, kemudian bergabung dengan al-Irsyad dan semenjak itu mengajar di al-Irsyad sampai ia meninggal 1943 (Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam*, hlm. 162-163).

pelajaran umum"[168]. Dengan demikian, fokus perhatian Al-Irsyad pada bidang pendidikan[169] dan pada permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat Arab dan orang-orang Islam Indonesia, walaupun mereka bukan Arab tetapi ada yang menjadi anggotanya"[170]. Organisasi ini, bekerjasama dengan oragnisasi Islam lain, seperti Muhammadiyah, Persatuan Islam dan bergabung dengan *Majelis Islam A'la* Indonesia ketika federasi itu didirikan pada tahun 1937"[171].

Pada "tahun 1915 berdirilah madrasah[172] [sekolah] al-Irsyad pertama di Jakarta, yang kemudian disusul oleh beberapa sekolah dan pengajian lain yang sehaluan dengan itu"[173]. Sekolah al-Irsyad di Jakarta, "banyak jenisnya yaitu mulai dari sekolah-sekolah tingkat dasar, sekolah guru dan ada pula bagian yang disebutkan *takhassus* [dengan pelajaran dua tahun] di mana pelajarnya dapat mengambil spesialisasi dalam bidang agama, pendidikan dan bahasa. Pada awalnya, tiap peminat yang masuk di sekolah-sekolah al-Irsyad, umur berapaun dapat diterima sebagai murid, sehingga tidaklah merupakan suatu hal yang luar biasa untuk menemui di dalam sekolah tingkat dasar seorang anak muda 18 atau 19 tahun duduk berdampingan dengan anak berumur 8 atau 9 tahun dalam satu kelas"[174]. Hal ini sama dengan Surau Jembatan Besi di Minangkabau yang pada awalnya kurang memperhatikan umur murid. Kemudian pada tahun 1924, al-Irsyad mulai "melakukan perbaikan dan pembenahan organisasi sekolah yang didasarkan pada peraturan pemerintahan kolonial Belanda, di mana anak-anak di bawah umur 10 tahun yang

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[168]Machnun Husein, *Pendidikan Islam dalam...*, hlm. 11.

[169]Organisasi ini bertujuan mengumpulkan dana agar dapat membiayai keperluan-keperluan: (1) menyelenggarakan kebiasaan adat istiadat Arab menurut ajaran-ajaran Islam dan menyebarkan dalam kalangan keluarga orang-orang Arab pengetahuan agama, bahasa Arab, bchasa Belanda dan bahasalain. (2) membangun dan memelihara apapun juga untuk mencapai apa yang tersebut pada (a) rumah dan sebagainya untuk keperluan rapat..., dan sekolah-sekolah dan lain-lain yang berguna untuk umum.(b) untuk mendirikan sebuah perpustakaan (Delian Noer, *Gerakan Modern Islam...*,hlm.74).

[170]Ibid, hlm. 75.

[171]Ibid, hlm. 75.

[172]Madrasah-madrasah yang didirikan al-Irsyad adalah:*Awaliyah*,lama belajar 3 tahun dan mempunyai 3 kelas, *Ibtidaiyah*,lama belajar 4 tahun dan mempunyai 4 kelas, *Tajhiziah*,lama belajar 2 tahun dan mempunyai 2 kelas, *Mua'alimin*, lama belajar 4 tahun dan mempunyai 4 kelas, dan *Tahkassus*, lama belajar 2 tahun (Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, hlm. 307).

[173]Aboebakar, *Sejarah Hidup KH. Wahid Hasyim dan Karangan Tafsir*, (Jakarta, 1957), hlm. 231.

[174]Delian Noer, *Gerakan Modern Islam...*, hlm. 75.

dapat diterima pada kelas satu sekolah dasar dengan lama belajam lima tahun. Bagi anak-anak yang berumur lebih dari 10 tahun dapat masuk ke kelas-kelas yang lebih tinggi dan tergantung pada kemampuan yang diperlihatkan pada ujian masuk" yang dilaksanakan atau semacam *placement test.* Bagi "pelajar-pelajar dari sekolah guru mempunyai kesempatan untuk praktik atau latihan mengajar"[175].

Perkembangan selanjutanya, "pimpinan-pimpinan al-Irsyad banyak mengenal tulisan-tulisan Muhammad Abduh tentang pendidikan, dalam brosur yang dikeluarkan pada tahun 1938. Al-Irsyad, mulai menerapkan saran-saran Abduh, yaitu untuk mendidik seorang anak hendaknya tekanan utama diberikan pada bidang tauhid, fiqh dan sejarah. Hal ini didasarkan pada pandangan Abduh, bahwa tauhid akan memungkinkan seseorang untuk mengembangkan jiwa dan harta "...zonder (tanpa) ragu-ragu". Fiqh akan "memperbaiki budi pekerti dan batin manusia dari segala noda, serta memberi pelajaran dalam halal dan haram yang bersandar pada dalil-dalil al-Qur'an dan Hadits Nabi". Sejarah Islam "harus menghidupkan kebenaran Islam dan kegagahan umat Islam" masa lalu. Maka "secara umum pendidikan merupakan "pembentukan watak", "pembentukan kemauan" dan "latihan untuk melaksanakan kewajiban"[176] sebagai seorang muslim.

Mengenai produk atau lulusan sekolah al-Irsyad di Jakarta dan Surabaya, pada umumnya menjadi guru ataupun pedagang. Beberapa di antara mereka menjadi pegawai pemerintah seperti yang bekerja di kantor masalah-masalah pribumi [*Kantoor oor Inlandse Zaken*][177]. Dapat dikatakan bahwa lulusan al-Irsyad memiliki kemampuan untuk masuk lapangan kerja dan dapat diterima pada sektor pemerintah, guru agama dan berdagang. Hal ini berbeda dengan gagasan KHA. Halim yang menginginkan lulusan pendidikannya tidak tergantung kepada lapangan kerja yang

---

[175]Ibid, hlm. 75-76.
[176]Zuhairini, dkk., *Sejarah Pendidikan Islam*, hlm. 165.
[177]Delian Noer, *Gerakan Modern Islam...*, hlm. 76.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

disediakan dalam lingkungan pemerintah atau hanya menjadi guru agama, atau hanya kembali kepada pekerjaan orang yaitu berdagang dan bertani. Menurut KHA. Halim, lulusan yang baik adalah berkemampuan untuk memasuki bidang kehidupan tertentu, dengan persiapan-persiapan latihan yang diperlukan dan pembentukan watak"[178]. Pada tahun 1930-an, al-Irsyad mengeluarkan beasiswa untuk beberapa lulusannya belajar di luar negeri terutama di Mesir, akan tetapi apa yang diusahakan al-Irsyad ini kurang memenuhi harapan karena sekembali dari studinya, para siswa tersebut tidak begitu banyak berperan, justru yang lebih berhasil adalah para lulusan yang melanjutkan studinya dengan biaya sendiri ataupun dengan bantuan dari keluarga"[179]. Mereka-mereka inilah yang dapat memainkan peranan yang lebih penting dalam usaha perkembangan pemikiran pembaruan Islam di Indonesia.

Al-Irsyad. dalam melaksanakan aktivitasnya "mempergunakan sarana tablig, pertemuan-pertemuan, menerbitkan beberapa buku-buku dan panflet-panflet sebagai cara untuk menyebarkan fahamnya"[180]. Dengan melalui publikasi mass media, al-Irsyad dapat menyebarluaskan pemikiran dan gagasan-gagasan pembaruan dan pemurnian ajaran Islam dengan berpedoman pada al-Qur'an dan Hadits Nabi. Tetapi gagasan-gagasan "masalah-masalah agama yang berasal dari gerakan al-Irsyad sangat menggembaparkan masyarakat Islam, karena bertentangan dengan keyakinan yang ada pada waktu itu, terutama majalah *az-Zakhirah* yang diterbitkan pada bulan Muharram 1342, yang memprokasi dan penggerak mengenai pembaruan masyarakat Islam Indonesia"[181]. Majalah yang dipimpin oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Surkati, [terbit setiap bulan di Jakarta] memuat kupasan dan penjelasan serta menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai persoalan *usul* dan *furu'* agama. Tulisan-tulisannya juga berisi pembongkaran dan koreksi terhadap hadits-hadits palsu dan

[178]Zuhairini, dkk, *Sejarah Pendidikan Islam*, hlm. 170.
[179]Delian Noer, *Gerakan Modern Islam...*, hlm. 76.
[180]Ibid, hlm. 77.
[181]Zuhairini, dkk., *Sejarah Pendidikan Islam*, hlm. 166.

dha'if yang dipergunakan dalam mempertahankan hukum ibadah dan muamalah di Indonesia yang menurut pandangan Surkati bertentangan dengan Qur'an dan Hadits Nabi. Majalah tersebut juga mambahas masalah *tawassul*, tarekat-tarekat, perkara kenduri, talkin mayat, fidya untuk orang mati, dan berbagai masalah yang dipertanyakan kepada al-Irsyad. Surkati berusaha untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut melalui majalah al-Irsyad, bahkan beberapa kali Surkati diajak berdebat dan berhujjah mengenai bermacam-macam masalah, yang jawaban-jawabannya senantiasa menggegerkan masyarakat dan para alim ulama pada waktu itu[182], sehingga mengharuskan mereka untuk kembali memeriksa dan menelaah kitab-kitab agama untuk mencari alasan atau argumentasi dalam rangka mempertahankan diri dan keyakinannya.

Nuansa dialog yang dikembangkan al-Irsyad ini cukup berpengaruh, sehingga "membawa kesadaran dan keinsafan dalam kalangan alim ulama khususnya dan golongan Islam umumnya, bahwa apa yang selama ini mereka yakini dan lakukan ternyata kurang tepat, sehingga berdirilah perkumpulan-perkumpulan, baik yang menyetujui maupun yang kontra paham-paham dan fatwa Ahmad Surkati tersebut"[183]. Gagasan-gagasan dan pemikiran Ahmad Surkati, "mengajak umat Islam untuk kembali kepada al-Qur'an dan Hadis Nabi dengan menentang pendapat yang menyatakan bahwa "pintu ijtihad" telah tertutup dan hanya mencukupi dengan empat mazhab saja. Menurut Ahmad Surkati, kenyataanya "pintu ijtihad" tetap terbuka terus, karena hukum-hukum Islam itu terus hidup, berkembang sepanjang zaman dan menentang taklid yang pada prinsipnya dapat membekukan hukum Islam. Maka dalam praktek hukumnya, Ahmad Surkati tidak memilih salah satu dari empat mazhab, tetapi memakai pemikiran-pemikiran ulama sebagai jembatan untuk mencari hukum Islam dalam kedua sumber tersebut, sehingga golongan ini lebih menamakan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[182]Ibid, hlm. 166.

[183]Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, hlm. 116., dan Zuhairini, dkk., *Sejarah Pendidikan Islam*, hlm. 166.

dirinya sebagai *"mazhab Salaf Saleh"* dan mengecam hidup bermazhab yang katanya hanya memecah belahkan umat Islam saja"[184].

Ahmad Surkati telah bekerja keras untuk menawarkan pemikiran dan gagasan-gagasan yang sangat besar pengaruhnya dalam pembaruan pemikiran Islam di Indonesia. Namun pada sisi lain lembaga-lembaga pendidikan al-Irsyad mengalami nasib yang kurang beruntung, karena pada "tahun 1940, seluruh madrasah al-Irsyad ditutup dengan alasan yang tidak jelas dari pemerintahan kolonial Belanda. Upaya penutupan ini dapat diterka karena faktor situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan serta persoalan-persoalan politik yang kemungkinan besar banyak meletarbelakanginya. Sebab pada masa itu adalah masa menghebatnya perjuangan bangsa Indonesia lewat pergerakan-pergerakan untuk mencapai kemerdekaan"[185]. Walaupun demikian al-Irsyad telah memainkan peranan dalam merealisasikan gagasan pembaruan pendidikan Islam dan telah melahirkan guru-guru agama yang tidak sedikit jumlahnya. Dewasa ini al-Irsyad terus berkembang dan bidang garapannyapun semakin meluas, baik bidang pendidikan, kesehatan, da'wah dan sebagainya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Apabila dicermati, model pengembangan pendidikannya al-Irsyad, hampir sama dengan Jami'at Khair, walaupun ada perbedaannya. Steenbrink, menyatakan bahwa organisasi Jami'at Khair dan al-Irsyad dalam mengembangkan pendidikannya menggunakan model yang hampir sama yaitu "guru dan alat-alat sekolah yang dipergunakan oleh kedua organisasi ini yang berasal dari Timur Tengah dan sistem pendidikannya pun menurut model Timur Tengah, terutama Mesir dan Tunisia". Pada dasarnya sekolah yang dikelolah kedua organisasi [Jami'at Khair dan al-Irsyad] sebenarnya tidak berbeda dengan sistem pendidikan Gubernemen, walaupun

---

[184]Aboebakar, *Sejarah Hidup KH. Wahid Hasyim...*, hlm. 232., dan Zuhairini, dkk., *Sejarah Pendidikan Islam*, hlm. 167.
[185]Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, hlm. 117.

keduanya memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada pendidikan agama[186]. Dengan cara ini, dapat dikatakan bahwa kelompok masyakat Arab Indonesia telah memberikan sumbangan kepada penerimaan pembaruan menurut sistem Barat, karena pengaruh mereka juga cukup besar di Indonesia dengan tokoh utamanya adalah Ahmad Surkati yang sangat berpengaruh terhadap gerakan reformasi Islam dan pendidikan di Indonesia.

3. Persyerikatan Ulama

Persyerikatan Ulama, merupakan perwujudan dari gerakan pembaruan di daerah Majalengka, Jawa Barat yang dimulai pada tahun 1911 atas inisiatif Kyai Haji Abdul Halim[187]. Organisasi "Persyerikatan Ulama ini pada tahun 1952 difusikan dengan organisasi al-Ittihadiyatul Islamiyah [AII], di bawah pimpinan KHA. Sanusi Sukabumi, menjadi Persatuan Oemat Islam Indonesia [POII]. ...Setelah kedua perkumpulan Islam tersebut digabungkan menjadi satu, maka hampir 400 madrasah di Jawa Barat langsung berada di bawah asuhan PBPUI bagian pendidikan"[188].

Pemikiran pembaruan KHA. Halim lebih banyak dipengaruhi oleh Abduh dan Jamal al-Din al-Afgan, walaupun KHA. Halim sendiri tidak merasa bahwa pemikiran-pemikiranya dipengaruhi oleh kedua tokoh tersebut. Dalam bidang pendidikan KHA. Halim, mulanya menyelenggarakan pelajaran agama sekali seminggu untuk orang-orang dewasa dan materi pelajaran yang diberikan ialah Fiqh dan Hadits. KHA. Halim sangat menaruh perhatian pada pembaruan dalam bidang pendidikan. "Pada tahun 1932, dalam kongres Persyerikatan Ulama di Majalengka, KHA. Halim mengusulkan agar sebuah lembaga didirikan untuk melengkapi pelajar-pelajarnya bukan saja

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[186]Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah...*, hlm. 62.

[187]Kyai Haji Abdul Halim, lahir pada tahun 1887 di Ciberelang Majalengka. Kedua orang tuanya berasal dari keluarga yang taat beragama (ayahnya seorang penghulu di Jatiwangi). Ia memperoleh pelajaran agama pada masa kanak-kanak sampai umur 22 tahun diberbagai pesantren di daerah Majalengka. Kemudian ia pergi ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji dan melanjutkan pelajarannya. Selama tiga tahun berada di Mekkah, ia mengenal tulisan-tulisan Abduh dan Jamal al-Din al-Afgani, yang merupakan pokok pembicaraan bersama teman-temannya yang banyak berasal dari Sumatera. Di Mekkah inilah ia pertama kali mengenal Kyai Haji Mas Mansur yang kemudiaan menjadi ketua umum Muhammadiyah. Ia meninggal pada tahun 1962, dan tetap berpegang pada mazhab Syafi'i (Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam*, hlm. 167).

[188]I. Djumbur dan Danasaputra, *Sejarah Pendidikan...*, hlm. 167.

dengan berbagai cabang ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum, tetapi juga dengan kelengkapan-kelengkapan [keterampilan dan kemahiran] berupa pekerjaan tangan, perdagangan dan pertanian dan atau tergantung pada bakat masing-masing"[189]. KHA. Halim, memiliki gagasan yang besar untuk melakukan perubahan di bidang pendidikan dengan mendisain lembaga pendidikan yang lulusannya tidak tergantung kepada lapangan kerja yang disediakan dalam lingkungan pemerintah, tetapi lulusan yang memiliki kemampuan terlatih untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tanpaknya, KHA. Halim, "telah sampai pada pemikiran ini setelah melihat kenyataan bahwa kebanyakan dari lulusan sekolah 'yang dirikan oleh pemerintah mengantungkan diri kepada lapangan kerja yang disediakan dalam lingkungan pemerintah atau bidang usaha, tanpa bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini didasarkan pada pengamatan KHA. Halim, bahwa lulusan madrasah ataupun pesantren hanya menjadi guru agama atau kembali pada lingkungan pekerjaan orang tuanya sendiri [bertani atau berdagang].

Oleh karena itu, KHA. Halim berpendapat bahwa seorang lulusan yang baik adalah berkemampuan untuk memasuki suatu bidang kehidupan tentantu, dengan persiapan-persiapan latihan yang diperlukan dan perlu menitik beratkan pada pembentukan watak". Pemikiran tersebut diusulkan dalam kongres dan akhirnya peserta kongres dapat menerima usulan KHA. Halim dan kemudian didirikan suatu "lembaga yang dinamakan Santi Asrama yang dibagai 3 bagian, yaitu: Tingkat permulaan, dasar, dan lanjutan. Kurikulum yang digunakan selain kurikulum biasa sebagaimana yang terdapat pada sekolah-sekolah lain dari persyerikatan Ulama, yaitu pelajaran agama dan umum, juga pelajar-pelajar Santi Asrama dilatih pertanian, pekerjaan tangan [besi dan kayu], menenun, dan mengolah berbagai-bagai bahan, seperti membuat sabun, dan lain-lain. Semua pelajar harus tinggal di suatu asrama di

[189]Zuhairini, dkk., *Sejarah Pendidikan Islam*, hlm. 168 dan 170.

bawah pengawasan serta disiplin yang ketat, terutama tentang pembagian waktu belajar dan sikap pergaulan hidup mereka"[190]. Maka dapat dikatakan, bahwa konsep pendidikan KHA. Halim, lebih diorientasikan kepada upaya untuk mempersiapkan outputnya dengan kamampuan pengetahuan agama, pengetahuan dan keterampilan untuk siap masuk dunia kerja dengan menciptakan lapangan kerja sendiri dan tanpa tergantung pada lapangan kerja yang sudah ada.

4. Muhammadiyah

Salah satu organisasi sosial Islam yang terpenting di Indonesia sebelum perang dunia II dan mungkin sampai saat sekarang ini adalah Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1330 H, oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan[191]. Organisasi ini merupakan "perkumpulan yang dapat dianggap sebagai pelopor pembaharu yang mengajarkan agama di Indonesia"[192]. Fazlur Rahman, seorang ilmuan dari Pakistan, menyatakan bahwa "organisasi Muhammadiyah adalah organisasi yang modernis dan progresif"[193]. Hal ini dibuktikan dengan kegiatan KHA. Dahlan, selalu "mengajarkan pendidikan Islam secara modern dan senantiasa ia berusaha untuk mengubah konservatisme (paham kolot)"[194]. Organisasi Muhammadiyah[195], "berusaha mengembalikan ajaran Islam kepada sumber aslinya yaitu Qur'an dan Sunnah, seperti yang diamanatkan oleh Rasulullah SAW. Itulah sebabnya tujuan perkumpulan ini, ialah : meluaskan dan mempertinggi pendidikan agama Islam secara modern,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[190]Ibid, hlm. 170.

[191]Ibid, hlm. 171.

[192]Kyai Haji Ahmad Dahlan, lahir di Yogyakarta pada tahun 1869 dengan nama Muhammad Darwis, anak dari Kyai Haji Abubakar bin Kyai Sulaiman, khatib di mesjid Sultan. Ibunya adalah anak dari Haji Ibrahim, seorang penghulu. Setelah ia menyelesaikan pendidikan dasarnya dalam ilmu nahu, figh dan tafsir di Yogyakarta dan sekitarnya, ia pergi ke Mekkah pada tahun 1890 di mana ia belajar selama setahun. Salah seorang gurunya ialah Syekh Ahmad Khatib. Sekitar tahun 1903 ia mengunjungi kembali Tanah Suci di mana ia menetap selama dua tahun lamanya (Delian Noer, *Gerakan Modern Islam...*, hlm. 85).

[193]I. Djumhur dan H. Danasaputra, *Sejarah Pendidikan...*, hlm. 162.

[194]Ibid, hlm. 162.

[195]Organisasai Muhammadiyah, kegiatan-kegiatannya tidaklah tumbuh dari pikiran pemimpinnya saja, tetapi pengaruh luar seperti pendirian PKU dan Aisyiah. Diantara pengaruh luar yaitu kegiatan missionaris Kristen yang telah memasuki jantung pulau Jawa semenjak abad yang lalu, bukan saja dianggap sebagai suatu tantangan, tetapi juga merupakan suatu contoh bagi pemimpin-pemimpin Muslim. Sekurang-kurangnya cara-cara yang dipergunakan dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para missionaris Kristen itu banyak sedikitnya dijadikan contoh (Delian Noer, *Gerakan Modern Islam...*, hlm. 91).

serta memperteguh keyakinan tentang agama Islam, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya"[196]. Untuk mewujudkan maksud dan tujuan tersebut, Muhammadiyah mengadakan usaha-usaha dalam bidang "da'wah Islam, memajukan pendidikan dan pengajaran, menghidupsuburkan masyarakat dengan sikap tolong menolong, mendirikan dan memelihara tempat ibadah dan wakaf, mendidik dan mengasuh anak-anak dan pemuda-pemuda supaya kelak menjadi orang Islam yang berarti, berusaha kearah perbaikan penghidupan dan kehidupan sesuai dengan ajaran Islam, dan berusaha dengan segala kebijaksanaan, supaya kehendak dan peraturan Islam berlaku dalam masyarakat"[197]. Oleh karena itu, tujuan dan usaha organisasi Muhammadiyah tidak memilih politik sebagai jalur aktivitasnya, tetapi tujuan yang mendasari aktivitasnya adalah menyebarluaskan ajaran agama Islam dan kemudian berkembang menjadi meluaskan pendidikan Islam sebagai sarana untuk memupuk perasaan agama bagi para anggotanya dan generasi muda.

Untuk merealisasikan tujuan tersebut, Muhammadiyah bergerak pada jalur pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah, yang hampir tersebar diseluruh nusantara dari Sabang sampai Merauke. "Muhammadiyah sangat mementingkan pendidikan dan pengajaran yang bedasarkan Islam, baik pendidikan di sekolah/madrasah ataupun pendidikan dalam masyarakat"[198]. Sekolah-sekolah yang dikelolah Muhammadiyah di samping mengutamakan pendidikan agama Islam, juga memberikan pelajaran umum sebagaimana halnya sekolah-sekolah yang dikelolah pemerintah. Maka sejak berdirinya, Muhammadiyah berusaha untuk memperluas pengajian-pengajian, da'wah, menyebarkan bacaan berdasarkan Islam dengan "menerbitkan buku-buku, brosur-brosur, surat-surat kabar dan majalah-majalah"[199].

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[196]L Djumhur dan H. Danasaputra, *Sejarah Pendidikan* ..., hlm. 164.
[197]Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia,* hlm. 268-269.
[198]Ibid, hlm. 269.
[199]Delian Noer, *Gerakan Modern Islam*..., hlm. 86.

serta mendirikan mesjid-mesjid, madrasah-madrasah, sekolah-sekolah, pesantren-pesantren, dan lain sebagainya.

Organisasi Muhammadiyah juga bergerak dalam lapangan-lapangan lain terutama menyangkut sosial umat Islam, seperti mendirikan rumah sakit dan polikklinik, panti asuhan, organisasi kewanitaan Aisyiah, organisasi pemuda Muhammadiyah, kepanduannya *Hizbul Wathon* (HW), serta organisasi putri Nasyiatul Aisyiah [NA]. Berbagai aktivitas yang dilakukan baik bidang agama, pendidikan, dan sosial, hal ini sesuai dengan "semboyan Muhammadiyah adalah sedikit bicara banyak bekerja"[200]. Maka dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah, mendirikan berbagai jenis dan tingkat sekolah, dan pelaksanaan pengajaran tidak memisahkan antara "pelajaran agama" dan "pelajaran umum". Pandangan organisasi Muhammadiyah, bahwa dengan pendidikan diharapkan bangsa Indonesia dapat didik menjadi bangsa yang utuh kepribadiannya yaitu pribadi yang berilmu pengetahuan luas dan mempunyai pengetahuan agama yang mendalam.

Aktivitas pendidikan Muhammadiyah tidak bertentangan dengan pemerintah kolonial Belanda, artinya sekolah-sekolah Muhammadiyah sesuai dengan *stelsel* pengajaran pemerintah hindia Belanda, sehingga banyak sekolah-sekolahnya mendapatkan subsidi dari pemerintah kolonial Belanda[201]. Subsidi pemerintah kolonial Belanda terhadap sekolah-sekolah Muhammadiyah merupakan hal yang sangat mengejutkan, karena politik pemerintah kolonial Belanda sangat ketat dalam mengawasi dan memberi izin kepada lembaga-lembaga pendidikan yang dilaksanakan oleh pribumi, apalagi pendidikan yang bercorakan agama Islam. Melihat kenyataan ini, maka dapat dikatakan bahwa organisasi Muhammadiyah berhasil dalam menjalankan strategi pendidikannya. Pada zaman pemerintah kolonial Belanda dan pendudukan Jepang, sekolah-sekolah yang dilaksanakan Muhammadiyah adalah

[200] I. Djumhur dan H. Danasaputra, *Sejarah Pendidikan...*, hlm. 164.
[201] Ibid, hlm. 164.

sekolah umum dan sekolah agama, mulai dari tingkat pra sekolah sampai perguruan tinggi[202] dan sekolah-sekolah tersebut mampu berjalan sebagai mana mestinya. Jika diperhatikan pendidikan yang diselenggarakan Muhammadiyah mempunyai andil yang sangat besar bagi bangsa dan negara dan menghasilkan keuntungan-keuntungan di antaranya : menambah kesadaran nasional bangsa Indonesia melalui ajaran Islam, ide-ide reformasi Islam secara luas disebarkan, dan mempromosikan kegunaan ilmu pengetahuan modern[203].

Pada masa Indonesia merdeka, sekolah Muhammadiyah perkembangannya semakin pesat. Ada empat jenis lembaga pendidikan yang dikembangkan Muhammadiyah, yaitu : *Pertama*, Sekolah-sekolah Umum yang bernaung di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kedua*, Madrasah-madrasah yang bernaung di bawah Departemen Agama. *Ketiga*, Jenis sekolah atau madrasah Khusus Muhammadiyah, dan *Keempat*, Perguruan Tinggi, Muhammadiyah sampai sekarang cukup banyak mengelolah lembaga pendidikan tinggi Muhammadiyah Umum di bawah pembinaan Kopertis [Depdikbud], dan perguruan tinggi Muhammadiyah agama di bawah pembinaan Kopertais [Departemen Agama]"[204]. Apa yang dikemukakan di atas, hanya sebagian kecil dari aktivitas Muhammadiyah di bidang pendidikan, karena lembaga-lembaga pendidikan yang dikelolah Muhammadiyah dari waktu ke waktu makin bertambah dan berkembang.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[202]Sekolah umum Muhammadiyah terdiri dari: Taman Kanak-kanak (Bustanul Atfal), Vervolg School 2 tahun, Schakel School 4 tahun, HIS 7 tahun, Mulo 3 tahun, AMS 3 tahun, dan HIK 3 tahun. Pada sekolah-sekolah tersebut diajarkan pendidikan agama Islam sebanyak 4 jam pelajaran seminggu. Sekolah agama terdiri dari: Madrasah Ibtidaiyah 3 tahun, Tsanawiyah 3 tahun, Mu'allimin dan Mu'allimat (SGB Islam) 5 tahun, Kulliatul Muballigin dan Muballigat (SPG Islam) 5 tahun. Pada madrasah-madrasah ini diberikan mata pelajaran pengetahuan umum.Amir Hamzah, *Pendidikan dan Pengajaran Muhammadiyah dalam Masa Pembangunan Semesta*, (Malang: Ken Mutia, 1965), hlm. 74.

[203]Ibid, hlm.74.

[204]Sekolah-sekolah Umum, di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu SD, SMTP, SMTA, SPG, SMEA, SMKK dan sebagainya. Sekolah-sekolah ini diberikan pelajaran agama sebanyak 6 jam seminggu. Madrasah-madrasah, di bawah Departemen Agama, yaitu : Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (Mts), dan Madrasah Aliyah (MA). Madrasah-madrasah ini setelah adanya SKB 3 Menteri tahun 1976 dan SKB 2 Menteri tahun 1984, mutu pengetahuan umumnya sederajat dengan pengetahuan dari sekolah-sekolah umum yang sederajat. Jenis sekolah [madrasah] Khusus Muhammadiyah, yaitu: Muallimin, Muallimat, Sekolah Tabligh, pondok pesantren. Muhammadiyah, cukup banyak mengelolah lembaga pendidikan tinggi Muhammadiyah Umum di bawah pembinaan Kopertis [Depdikbud], dan perguruan tinggi Muhammadiyah agama di bawah pembinaan Kopertais [Departemen Agama] (Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, hlm. 102).

Gagasan pengembangan pendidikan Muhammadiyah, tidak dapat dilepaskan dari kondisi dan situasi sosial pada saat itu, di antaranya penjajahan, keterbelakangan ummat, masalah kemiskinan, masalah pendidikan dan sebagainya. Situasi pendidikan Islam yang memprihatinkan dan terbelakang dengan sistem pendidikan yang dikembangkan oleh penjajah Belanda, mendasari gerakan KH. Ahmad Dahlan dalam usaha memperkenalkan metode baru sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan yang diperkenalkan oleh Muhammadiyah adalah memadukan "sistem pendidikan Islam "tradisional" yang berbasis di pesantren, dengan sistem pendidikan modern, kolonial Belanda, sedangkan visi pendidikan yang ditawarkan ialah mencoba memadukan aspek-aspek keagamaan semata yang dikembangkan dalam pendidikan Islam, dengan yang bersifat duniawi [*profene*] dari sistem pendidikan kolonial. Sedangkan tujuan akhir atau [*the ultimate goal*] yang hendak dicapai ialah untuk menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan umum yang memadai, atau istilah yang trend sekarang "ulama intelek"[205].

Dengan demikian, Muhammadiyah dalam mengembangkan pendidikannya dengan memadukan sistem pendidikan tradisional dan sistem pendidikan modern. Langkah ini merupakan sikap jalan tengah dalam mengembangkan sistem pendidikannya. Kontowijoyo, menyatakan bahwa sikap ini "pada satu sisi menimbulkan kesulitan, namun pada sisi lain sikap itu masih menguntungkan, karena sikap tersebut membawa pengaruh atau efek yang cukup luas pada perkembangan kehidupan keagamaan di Indonesia, yakni menepis budaya *"patemalistik* Kyai-Santri", dan melahirkan paham persamaan manusia atau *egaliter* serta membawa nuansa baru perkembangan pemikiran Islam di Indonesia"[206]. Maka perkembangan pendidikan Muhammadiyah, yang bersifat memadukan dua sistem tersebut, merupakan langkah yang menarik, karena "peranannya untuk meraih perpaduan, atau rekonsiliasi antara

[205]Ibid, hlm. 102-103.

[206]Kontowijoyo, *Paradigma Islam*, (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 96.

pemikiran Islam dan pemikiran Barat[207], sehingga lulusan yang diharapkan dari sistem ini dapat menjembatani kesenjangan antara "kaum santri tradisional" dan "intelektual lulusan pendidikan Barat". Sikap ini menunjukkan bahwa Organisasi Muhammadiyah sejak awal dalam mengembangkan pendidikannya, memang sengaja memperhatikan sistem pendidikan pesantren, hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa catatan historis bahwa Muhammadiyah pernah merintis dan berhasil membangun sebuah pesantren.

Dari paparan yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa, apabila melakukan studi-studi tentang pembaruan Islam di Indonesia dapat dianggap kurang valid, jika tanpa melibatkan Muhammadiyah sebagai obyek kajian, karena Organisasi Muhammadiyah bukan hanya bergerak dibidang pendidikan dan pengajaran saja, tetapi juga bergerak di lapangan lain, terutama menyangkut dengan persoalan sosial umat Islam. Oleh karena itu, Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan mempunyai ciri khas, yaitu : [a] Sebagai gerekan Islam dan da'wah, karena dalam melaksanakan dan memperjuangkan organisasinya berdasarkan Islam. Segala yang dilakukan baik dalam bidang pendidikan, kemasyarakatan, perekonomian, dan sebagainya tak dapat dilepaskan dari usaha untuk melaksanakan ajaran Islam. Untuk mewujudkan cita-cita Muhammadiyah yang berdasarkan Islam, yaitu melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kegiatan da'wah, dilakukan dengan cara yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, artinya da'wah Islam dilakukan dengan hikmah, bijaksana, nasihat, ajakan, dan bila perlu dilakukan dengan berdialog. [b] Sebagai gerakan sosial umat Islam, Muhammadiyah bergerakan dalam bidang sosial seperti mendirikan pantiasuhan, rumah sakit, polikklinik, dan bergerak dalam bidang ekonomi. [c] Sebagai organisasi gerakan modernis, Muhammadiyah selalu berusaha untuk memperbaharui dan meningkatkan pemahaman Islam secara

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[207]Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia...*, hlm. 103.

rasional, sehingga ajaran Islam lebih mudah diterima dan dapat dihayati oleh masyarakat.

5. Persatuan Islam (Persis)

Persatuan Islam (Persis), didirikan di Bandung pada 17 September 1920, dan pendiri organisasi ini adalah KH. Zamzam. Organisasi ini "bertujuan mempersiapkan calon-calon ulama yang tidak kaku menghadapi masyarakat, menghasilkan mubalig-mubalig yang memiliki kemampuan serta kesanggupan menyebarkan, membela, serta mempertahankan agama Islam[208]. Gagasan pendirian organisasi ini "berasal dari pertemuan yang bersifat kenduri yang diadakan secara berkala dirumah salah seorang anggota kelompok yang berasal dari Sumatera yang telah lama tinggal di Bandung"[209]. Biasanya setelah selesai kenduri, dilanjutkan dengan berbincang-bincang tentang persoalan-persoalan agama dan gerakan-gerakan keagamaan yang terjadi di Indonesia maupun di negara-negara lain.

Perhatian Persis "terutama ialah bagaimana menyebarkan cita-cita dan pemikirannya", dan sarana yang digunakan untuk mensosialisasikan cita-cita dan pemikiran organisasi ini, yaitu "dengan mengadakan pertemuan umum, tabligh, khotbah-khotbah, kelompok-kelompok studi, medirikan sekolah-sekolah, dan menyebarkan atau menerbitkan pamflet-pamflet, majalah-majalah, dan kitab-kitab. Kegiatan penerbitan inilah, digunakan sebagai sarana utama penyebaran pemikiran"[210] organisasi Persatuan Islam [Persis], sehingga tidak jarang pemikiran-pemikiran Islam dari penerbitan Persis ini dijadikan bahan atau refrensi oleh guru-guru dan propagandis-propagandis organisasi lain seperti al-Irsyad dan Muhammadiyah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[208] I. Djumhur dan H. Danasaputra, *Sejarah Pendidikan*..., hlm. 182.
[209] Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam*..., hlm. 95-96.
[210] Zuhairini, dkk., *Sejarah Pendidikan Islam*, hlm. 188.

Dalam melaksanakan kegiatannya, Persis memperoleh dukungan dan partisipasi dari dua orang tokoh penting yaitu Ahmad Hassan[211] dan Mohammad Nasir. Persis, sama dengan organisasi Islam lainnya, yaitu ikut memberikan perhatian dibidang pendidikan. Hal ini terlihat, "pada masa penjajah Belanda Persis telah memiliki sekolah Guru *Kweekschool* Pendidikan Islam [Pendis]"[212]. Persis mendirikan sebuah madrasah yang pada awalnya dimaksudkan untuk anak-anak anggota Persis dan kemudian madrasah ini diluaskan untuk dapat menerima anak-anak lain"[213] dari luar Persis. Selain itu, Persis juga mengadakan kursus-kursus dalam masalah agama untuk orang-orang dewasa dan pada mulanya hanya dibatasi pada anggota-anggotanya saja, tetapi kemudian juga berlaku untuk umum. Sekitar tahun 1927, Persis menyelenggarakan "kelompok diskusi yang diorganisir untuk anak-anak muda yang telah menjalani masa studinya di sekolah-sekolah pemerintah dan ingin mempalajari Islam secara sungguh-sungguh" dan lebih mendalam. "Dalam kelompok tersebut, Hassan bertindak sebagai guru dan beliau mengakui bahwa ia banyak belajar dari pembicaraan yang dilakukan dalam kelompok diskusi ini yang dorongannya untuk memperdalam pengetahuan"[214], dengan cara lebih banyak menggali dan mendalami sumber-sumber ajaran Islam dari al-Qur'an dan Hadits.

Hal yang penting dalam rangka kegiatan pendidikan Persis adalah mendirikan "lembaga pendidikan Islam, sebuah proyek yang dilancarkan oleh Muhammad Natsir[215], yang terdiri dari beberapa buah sekolah: Taman Kanak-kanak, HIS

---

[211]Ahmad Hassan, lahir di Singapura pada tahun 1887, beliau berasal dari keluarga campuran Indonesia-India. Ayah Ahmad bernama Sinna Vappu Marican, seorang penulis, ahli agama Islam dan kesusastraan Tamil. Ia pernah menjadi redaktur Nur al-Islam, majalah agama dan sastra Tamil, menulis beberapa buah kitab dalam bahasa Tamil dan juga beberapa terjemahan dari bahasa Arab. Ibnu Hassan dari keluarga sederhana di Surabaya dan sangat taat beragama. Hasan sendiri tidak pernah menyelesaikan sekolah dasarnya di Singapura. Ia mulai bekerja mencari nafkah pada umur 12 tahun, tetapi mengambil pelajaran secara privat dan berusaha menguasai bahasa Arab dengan maksud dapat memperdalam pengetahuannya tentang Islam atas usaha sendiri [Zuhairini,dkk., *Sejarah Pendidikan Islam*, hlm. 189].

[212]I. Djumhur dan H. Danasaputra, *Sejarah Pendidikan...*, hlm. 182.

[213]Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam*, hlm. 190.

[214]Delian Noer, *Gerakan Modern Islam...*, hlm. 101.

[215]Muhammad Natsir, lahir pada tanggal 17 Juli 1908 di Alahan Panjang, Sumatera Barat. Ayahnya adalah seorang pegawai pemerintah. Pada tahun 1927 ia pergi ke Bandung untuk melanjutkan studi pada Algeme Middelbare Scchool (AMS, setingkat SMU sekarang). Pendidikan yang ditempuhnya adalah HIS dan Mulo (Tingkat Dasar dan Menengah Pertama) di Minangkabau. Selain itu ia pernah belajar pada sekolah agama di Solok yang dipimpin oleh Tuanku Mudo Amin, dan aktif mengikuti pelajaran agama yang diberikan oleh Haji Abdullah Ahmad di Padang (Zuhairini, dkk., *Sejarah Pendidikan Islam*, hlm. 189).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[keduanya tahun 1930], sekolah Mulo [1931] dan sekolah Guru [1932]. Inisiatif Natsir ini mulanya merupakan jawaban terhadap tuntutan dari berbagai pihak, termasuk beberapa orang yang mengambil pelajaran privat dalam pelajaran bahasa Inggris dan berbagai pelajaran lain kepadanya. Tuntutan ini dikemukakan setelah melihat berdirinya beberapa sekolah swasta di Bandung pada waktu itu, di mana tidak diajarkan pelajaran agama"[216]. "Persis juga mendirikan subuah pesantren [disebut Pesantren Persisi] di Bandung pada bulan Maret 1936 untuk membentuk kader-kader yang mempunyai keinginan untuk menyebarkan agama. Usaha ini merupakan inisiatif Hasan dan hanya bersifat eksperimen, kemudian pesantren ini dipindahkan ke Bangil, Jawa Timur dan Hasan ikut pindah ke Bangil, dengan membawa 25 dari 40 siswa dari Bandung"[217]. Tujuan mendirikan pesantren ini, yaitu: *Pertama*, "mengeluarkan mubalig-mubalig yang sanggup menyiarkan, mengajar, membela dan mempertahankan agama Islam"[218]. *Kedua*, terbentuknya kader-kader Persis yang tangguh dan mempunyai kemauan keras untuk melakukan da'wah Islamiyah.

Persis dalam mensosialisasikan ide-ide pemikirannya "berlaianan dengan Muhammadiyah yang mengutamakan penyebaran pemikiran-pemikiran baru secara tenang dan damai, sedangkan Persis seakan gembira dengan perdebatan-perdebatan dan polemik. Dikatakan bahwa organisasi ini menentang orang-orang yang tidak menyetujui pendapat dan pemikirannya untuk berdebat". Persisi pernah beberapa kali melakukan perdebatan dengan beberapa organisasi seperti: "perdebatan dengan Ahmadiyah Qadian yang diadakan tiga kali pada tahun 1930-an mengenai pendapat dari Ahmadiyah Qadian: bahwa pendirinya diakui pengikutnya sebagai seorang nabi, bahwa Nabi Isa meninggal di Kasmir, serta berbagai masalah teologi lain. Perdebatan dengan kalangan organisasi-organisasi tradisim, seperti *al-Ittihadul* Islamiyah

---

[216]Ibid, hlm. 101.
[217]Delian Noer, *Gerakan Modern Islam...*, hlm. 102.
[218]Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, hlm. 297.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Sukabumi, Majlih Ahli Sunnah di Bandung dan dengan Nahdlatul Ulama di Ciledug, Cirebon tahun 1932 serta di Gebang tahun 1936"[219]. Perdebatan yang dilakukan Persis bukan hanya pada persoalan agama saja, tetapi juga perdebatan tentang persoalan nasionalisme dengan Haji Muchtar Luthfi dari Persatuan Muslimin Indonesia [Permi] Minangkabau, dan beberapa perdebatan umum yang dilakukan dengan pimimpin-pemimpin Seventh Day Adventist. Nampaknya Persis membangun suatu wacana perdebatan dalam proses, hal ini tanpak pada beberapa lulusan pesantrennya senang melakukan perdebatan terbuka dengan orang lain yang tidak menyetujui pendapat dan pemikirannya. Sikap menentang dari Persis ini, juga tercermin dalam publikasinya lewat majalah Persis. "Majalah Pembela Islam, terbit di Bandung dari tahun 1929 sampai tahun 1933 di bawah pimpinan Panitia Pembela Islam. Tujuan Majalah ini, dimaksudkan untuk menegakkan ajaran-ajaran Islam yang dikecam oleh pihak-pihak lain, dan untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran Persis sendiri[220], tetapi akhirnya publikasi majalah ini terhenti karena persoalan kesulitan keuangan.

Usaha Persis dalam masalah publikasi pemikiran-pemikirannya tidak terhenti begitu saja, pada "bulan November 1931 Persis juga menerbitkan *al-Fatwa*, sebuah majalah berbahasa Indonesia dan dicetak dengan huruf Jawi. Majalah ini membicarakan masalah-masalah agama semata-mata tanpa menantang pihak-pihak bukan Islam, tetapi publikasi *al-Fatwa* ini juga terhenti setelah menerbitkan 20 nomor, kemdian pada bulan Desember 1935, terbit sebuah majalah *al-Lisaan* yang diharapkan untuk menggantikan majalah Pembela Islam, tetapi majalah ini juga mengalami nasib yang sama yaitu berhenti ketika Jepang masuk Indonesia"[221]. Berbagai-bagai pamflet, brosur dan buku, terutama membicarakan masalah-masalah

---

[219]Delian Noer, *Gerakan Modern Islam...*, hlm. 103.

[220]Ibid, hlm. 103., Delian Noer, menyatakan majalah Pembela Islam, mulanya merupakan majalah bulanan, kemudian terbit sekali dua minggu dan kadang-kadang tidak terbit berbulan-bulan lamanya karena kesukaran keuangan. Panitia pembela Islam, didirikan oleh pemimpin-pemimpin Persis, diketuai Zamzam. Tetapi lambat laun publikasi majalah ini merupakan usaha Hasan semata-mata. Sirkulasinya mencapai 2.000 eks., boleh dikatakan dibaca di seluruh Indonesia terutama oleh anggota-anggota Muhammadiyah dan al-Irsyad, sampai ke Sulawesi, Kalimantan, Minangkabau, Jawa Barat. Majalah ini tersebar sampai di Malaya dan Mungthai"[Delian Noer, *Gerakan Modern Islam...*, hlm. 103].

[221]Ibid, hlm. 103-104.

agama, ataupun yang mengemukakan laporan tentang perdebatan yang diadakan oleh Persatuan Islam dengan pihak lain diterbitkan, termasuk majalah Soal Jawab yang diterbitkan pada tahun 1930-an, memuat artikel-artikel dalam bentuk jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para pembaca, dan pada umumnya berkenaan dengan masalah agaama. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa usaha Hassan dalam bidang penerbitan sangat gencar sekali, dengan tujuan untuk mempublikasi pemikiran-pemikiran Persis, dan sekaligus sebagai usaha untuk mencerdaskan umat Islam di Indonesia.

6. Nahdlatul Ulama (NU)

Nahdlatul Ulama [kebangkitan ulama], didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926 M bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1344 H oleh kalangan ulama[222] penganut mazhab yang seringkali menyebut dirinya sebagai golongan *Ahlussunnah Waljma'ah* yang dipelopori oleh KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Abdul Wahab Hasbullah. Organisasi ini "didirikan sebagai perluasan dari suatu *Komite Hijaz* yang dibangun dengan dua maksud: *Pertam*, untuk mengimbangi *Komite Khilafah* yang secara berangsur-angsur jatuh ke tangan golongan pembaharu. *Kedua*, untuk berseru kepada Ibnu Sa'ud[223], penguasa baru di tanah Arab, agar kebiasaan beragama secara

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[222]Kalangan Ulama yang tergolong Ahlussunnah Waljama'ah diantaranya: KH. Hasyim Asy'ari dari Tebuireng, KH. Abdul Wahab Hasbullah, KH. Bisri dari Jombang, KH. Ridwan dari Semarang, KH. Nawawi dari Pasuruan, KHR. Asnawai dari Kudus, KHR. Hambali dari Kudus, K. Nakhrawi dari Malang, KH. Doromuntaha dari Bangkalan, KH. Alwi Abdul Aziz, dan lain-lain [Muhammad Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia,* hlm. 290-240].

[223]Ketika Perang Dunia I berakhir, Daulat Usamaniyah goncang, kekuasaan Sultan Turki diperebutkan oleh kelompok nasionalis Turki di bawah pimpinan Mustofa Kamal. Pada tahun 1922, Majelis Rakyat Turki menghapuskan kekuasaan Sultan dan menjadikan negeri itu suatu republik. Pada tahun yang sama, Majelis tersebut menjadikan Abdul Majid sebagai khalifah tanpa kekuasaan duniawi, dan dua tahun kemudian Majelis itu menghapuskan khalifah sama sekali. Perkembangan ini menimbulkan kebingunan dunia Islam pada umumnya. Umat Islam mulai berpikir tentang pembentukan suatu khilafah baru. Masyarakat Islam Indonesia merasa berkewajiban memperbincangkan dan mencari penyelesaiannya. Kebetulan Mesir bermkasud mengadakan kongres tentang khalifah pada bulan Maret 1924. Untuk memenuhi maksud tersebut suatu Komite Khilafah didirikan di Surabaya pada 4 Oktober 1924, dengan ketua Wondosudirdjo [Sarekat Islam] dan wakil ketua K.H.A. Wahab Hasbullah. Kongres al-Islam ketiga di Surabaya Desember 1924 antara lain memutuskan untuk mengirimkan delegasi ke kongres Kairo yang terdiri dari Surjopranoto [Sarekat Islam], Haji Fachroddin [Muhammadiyah] dan K.H.A. Wahab dari kalangan tradisi. Tetapi kongres di Kairo ditunda, kemudian orang-orang Islam di Jawa tertarik lagi pada perkembangan di Hijaz di mana Ibnu Sa'ud berhasil mengusir Syarif Husein dari Mekkah tahun 1924. Setelah kemenangan ini pemimpin Wahabi mulai melakukan pembersihan dalam kebiasaan praktek beragama sesuai dengan ajarannya, walaupun ia tidak melarang pelajaran mazhab di Mesjid al-Haram. Tidakannya ini sebagian mendapat sambutan baik di Indonesia, tetapi sebagian juga ditolak. Kemudian Ibnu Sa'ud mengundang kaum Islam Indonesia untuk menghadiri kongres di Mekkah dibicarakan di kongres al-Islam keempat di Yogyakarta [21-27 Agustus 1925] dan di kongres al-Islam kelima di Bandung [6 Februari 1926]. Kedua kongres ini kelihatannya didominasi oleh golongan pembaharu Islam. Sebelum kongres di Bandung, diadakan suatu rapat antara oraganisasi-organisasi pembaharu di Cianjur, Jawa Barat [8-10 Januari 1926] memutuskan untuk mengirim Tjokroaminoto [Sarekat Islam] dan Kiyai Hadji Mas Mansur [Muhammadiyah] ke Mekkah untuk mengiktuit kongres. Pada kongres di Bandung yang memperkuat keputusan rapat di Cianjur, KHA. Abdul Wahab atas nama kelangan tradisi mengajukan usul-usul agar kebiasan-kebiasaan agama seperti membangun kuburan, membaca doa

tradisi dapat diteruskan[224]. Pandangan lain, maksud berdirinya gerakan Nahdlatul Ulama "sebagai reaksi terhadap gerakan reformasi dalam kalangan umat Islam Indonesia yang berusaha mempertahankan salah satu dari empat mazhab dalam masalah yang berhubungan dengan fiqh, yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hambali, sedangkan dalam hal *i'tiqad* Nahdlatul Ulama berpegang pada aliran *Ahlussunah Waljama'ah*. Dalam konteks ini NU memahami hakikat *Ahlussunah Waljama'ah* sebagai ajaran Islam yang murni, sebagaimana diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah bersama para sehabatnya"[225].

Pada mulanya Nahdlatul Ulama merupakan organisai keagamaan, akan tetapi dikarenakan oragnisasi ini lahir dan tubuh pada masa pergerakan nasional, tentu Nahdlatul Ulama tidak dapat terlepas dari langkah-langkah yang berisi dan berjiwa pergerakan untuk membebaskan diri dari penjajahan, atau terlibat dalam kanca politik di antaranya, menolak subsidi yang ditawarkan pemerintah untuk madrasah NU dan menolak kerja rodi yang dibebankan kepada bangsa Indonesia, menolak rencana ordinansi perkawinan tercatat, menolak diadakan milisi, mendukung tuntutan berparlemen, mengadakan usaha-usaha sosial dalam masyarakat, dan mendidik mental beragama di antaranya mendirikan pondok pesantren[226]. Selain alasan-alasan ini, "motivasi utama berdirinya Nahdlatul Ulama adalah untuk mengorganisasikan potensi dan peran ulama pesantren yang sudah ada, untuk lebih ditingkatkan dan dikembangkan secara luas. Bagi Nahdlatul Ulama, digunakan sebagai wadah untuk mempersatukan dan menyatukan langkah para ulama pesantren di dalam tugas pengabdian, yang tidak terbatas kepada masalah kepesantrenan dan kegiatan ritual

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

seperti dalail al-akhirat, ajaran mazhab, dihormati oleh kepada negeri Arab yang baru dalam negaranya, termasuk di Mekkah dan Madinah. Kongres di Bandung tidak menyambut baik usul-usul itu, sehingga Wahab dan tiga orang penyokongnya keluar dari Komite Khilafah. Wahab selanjutnya mengambil inisiatif untuk mengadakan rapat-ralat kalangan ulama Kaum Tua, mulanya ulama dari Surabaya, Semarang, Pasuruan, Lasem dan Pati. Mereka bersepakat untuk mendirikan suatu panitia yang disebut Komiter Merebut Hijaz. Komite inilah yang diubah menjadi Nahdlatul Ulama pada suatu rapat di Surabaya 31 Januari 1926 [Delian Noer, *Gerakan Modern Islam...*, hlm. 243].

[224]Ibid, hlm. 242.

[225]Chairul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, (Solo: Penerbit Jatayu,1985), hlm. 135.

[226]Moh. Rafa'i, *Sejarah Islam*, (Semarang: Wicaksana,1985), hlm. 181.

Islam saja, tetapi lebih diringkaskan lagi agar para ulama lebih peka terhadap masalah-masalah sosial, ekonomi dan masalah-masalah kemasyarakatan pada umumnya"[227].

Nahdlatul Ulama, sebagai organisasi Islam "bertujuan memegang teguh pada salah satu mazhab dari keempat mazhab, yaitu : Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali dan mengerjakan apa-apa yang menjadikan kemaslahan untuk Agama Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut, langkah-langkah yang dilakukan adalah : [1] Mengadakan hubungan di antara ulama-ulama yang bermazhab tersebut di atas. [2] Memeriksa kitab-kitab sebelum dipakai untuk mengajar, supaya diketahui apakah kitab itu termasuk kitab-kitab *Ahlussunah Waljama'ah* atau kitab-kitab *ahli bid'ah*. [3] Menyiarkan agama Islam berdasarkan pada mazhab-mazhab tersebut di atas dengan jalan apa saja yang baik. [4] Berikhtiar memperbanyak madrasah-madrasah yang berdasarkan agama Islam. [5] Memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan mesjid-mesjid, surau-surau dan pndok-pondok, dan anak-anak yatim dan orang-orang fakir miskin. [6] Mendirikan badan-badan untuk memajukan urusan pertanian, perniagaan dan perusahan yang tidak dilarang oleh syara' agama Islam"[228]. Demikian maksud dan tujuan konsep pengembangan Nahdlatul Ulama yang tertuang dalam Anggaran Dasar 1926, sebelum menjadi partai politik.

Apabila mencermati maksud dan tujuan Nahdlatul Ulama tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa "Nahdlatul Ulama merupakan organisasi sosial yang juga menentingkat pendidikan dan pengajaran. Nahdlatul Ulama mendirikan beberapa madrasah ditiap-tiap cabang dan ranting untuk mempertinggi kecerdasan masyarakat Islam, dan mempertinggi budi perketi mereka"[229]. Kebijakan Nahdlatul Ulama ini, dilaksanakan "sejak masa pemerintah Belanda dan penjajah Jepang, untuk tetap

---

[227]Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia...*, hlm. 106.
[228]Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, hlm. 240-241.
[229]Ibid, hlm. 241.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

memajukan pesantren-pesantren, madrasah-madrasah, mengadakan tablig-tablig, dan pengajian-pengajian di samping urusan sisioal yang lain, bahkan juga urusan politik yang dapat dilaksanakan pada masa itu"[230]. Pada akhir tahun 1938, "komisi Perguruan Nahdlatul Ulama menetapkan susunan madrasah-madrasah Nahdlatul Ulama yang harus dilaksanakan mulai tanggal 2 Muharram 1357 H. Susunan madrasah-madarasah umum Nahdlatul Ulama itu sebagai berikut: Madrasah Awaliyah [2 Tahun], Madrasah Ibtidaiyah [3 Tahun], Madrasah Tsanawiyah [3 tahun], Madarasah Mu'allimin Wustha [2 tahun], dan Madrasah Mu'allimin 'Ulya [3 tahun][231]. Kurikulum yang menjadi acuan pengajaran di madrasah-madrasah tersebut harus menurut ketentuan PB NU adalah bagian pendidikan [PP al-Ma'arif].

Perkembangan selanjutnya, setelah organisasi Nahdlatul Ulama menjadi Partai Politik pada Mei 1952, yang dituangkan ke dalam Anggaran Dasarnya yang baru, di mana Nahdlatul Ulama bertujuan: *Pertama,* menegakkan syari'at Islam dengan berhaluan salah satu daripada empat mazhab : Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. *Kedua,* melaksanakan berlakunya hukum-hukum Islam dalam masyarakat"[232]. Untuk mencapai tujuan tersebut, Nahdlatul Ulama "mengadakan usaha-usaha, antara lain menyiarkan agama Islam melalui tablig-tablig, kursus-kursus, penerbitan-penerbitan, dan mempertinggi mutu pendidikan dan pengajaran Islam"[233]. Nahdlatul Ulama masih mempertahankan ciri khasnya yaitu memegang teguh kepada mazhab-mazhab fiqh dalam rangkan menegakan syariat Islam, tetapi apabila dicermati isi dari tujuan pertama yang tertuang dalam anggaran dasar, sebenarnya belum tampak secara jelas mazhab mana dari empat mazhab tersebut yang menjadi haluan dari organisasi Nahdlatul Ulama yang menyebut dirinya sebagai golongan *Ahlussunah Waljama'ah,* lebih bersifat fleksibelitas, artinya memberikan peluang pada anggotanya untuk tidak

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[230]Ibid, hlm. 241.
[231]I. Djumhur dan H. Danasaputra, *Sejarah Pendidikan*..., hlm. 186.
[232]Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, hlm. 243.
[233]I. Djumhur dan H. Danasaputra, Sejarah Pendidikan.., hlmL186.

terfokus pada salah satu mazhab, sedangkan pada tujuan kedua tampaknya lebih bersifat politik.

Pada Muktanmar XXX Nahdlatul Ulama tahun 1999, menetapkan tujuan Nahdlatul Ulama adalah berlakunya ajaran Islam menurut faham *Ahlussunnah wal Jam'aah* dan menganut salah satu dari mazhab empat, di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia"[234]. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, usaha-usaha yang dilakukan sebagai berikut: *Pertama,* dibidang agama, mengusahakan terlaksananya ajaran Islam menurut faham *Ahlussunnah wal Jama'ah* dalam masyarakat dengan melaksanakan da'wah Islamiyah, amar ma'ruf nahi munkar serta meningkatkan ukhuwah Islamiyah. *Kedua,* dibidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan mengusahakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam, untuk membina manusia muslim yang taqwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara"[235].

Dewasa ini Nahdlatul Ulama, bergerak di bidang sosial dan pendidikan agama dengan mendirikan pondok pesantren dan madrasah yang tersebar diseluruh pelosok tanah air, terutama di daerah-daerah pedesaan yang pada umumnya mempunyai tradisi keagamaan yang sangat kuat. Langkah-langkah Nahdlatul Ulama, dalam mengembangankan pendidikan dan pengajaran lebih memilih jalur pendidikan pesantren, sebagai basis pendidikan dan juga mempunyai sekolah-sekolah umum dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi. Maka untuk mengelola pendidikan dan pengajaran tersebut, Nahdlatul Ulama membentuk suatu bagian khusus yaitu Ma'arif, yang bertugas membuat perundangan dan program pendidikan

---

[234]Hasil-hasil Muktamar XXX Nahdlatul Ulama, Tanggal, 13-18 Sya'ban 1420 H - 21 - 26 Nopember 1999, Di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Lirboyo Kediri Jawa Timur, Sekretariat Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Jl. H. Agus Salim No.112, Jakarta, 1999, hlm. 108.

[235]Ibid, hlm. 108.

di lembaga-lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama.

Dari semua uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tahun 1909 merupakan starting-point pembaruan pendidikan Islam dan kemudian mengantarkan sejarah pendidikan Islam ke dalam babak baru, yaitu berdirinya sekolah-sekolah yang dikelolah dengan metode pengajaran yang lebih maju, seperti sekolah yang berdiri dengan nafas reformasi Islam di Indonesia adalah Ambiya *Achool* di bawah pimpinan Abdullah Ahmad yang kemudian diubah menjadi sekolah Ambiyah. Setelah itu, bermunculan sekolah-sekolah dari tingkat dasar (*ibtida'iyah*), menengah tingkat pertama (*tsanawiyah*), sekolah menengah tingkat atas (*aliyah*) sampai tingkat pendidikan tinggi (*aljami'ah*). Gagasan mendirikan sekolah tinggi seperti yang dikumandangkan dalam mu'tamar-mu'tamar organisasi Islam setelah selesai Perang Dunia I, "tampak dimulai oleh Syarikat Islam [SI], yang merupakan perubahan dari SDI, kemudian pada mu'tamar seperempat abad Muhammadiyah di Jakarta tahun 1936, dipustkan untuk mendirikan Sekolah Islam Tinggi dengan membuka Fakultas Dagang dan Industri. Nahdlatul Ulama [NU] juga mempunyai cita-cita yang sama, begitu juga organisasi-organisasi Islam yang lain. Tetapi sebelum itu, di Majalengka, Kyai Halim, dengan organisasi Persatuan Oemat Islam, sejak tahun 1917 telah giat mendirikan sekolah-sekolah dari tingkat ibtidaiyah sampai al-Jami'ah [perguruan tinggi], berlokasi di atas gunung dan diberi nama "Santri Asrama"[236].

Ide-ide dan gagasan mendirikan perguruan tinggi mulai bermunculan, "pada tahun 1938 Dr. Sukiman Wirjosandjojo, di Jawa Tengah pernah menyelenggarakan musyawarah antara beberapa ulama dan kaum cendekiawan, untuk membicarakan usaha mendirikan perguruan tinggi Islam. Dr. Sukiman, melakukan follow-up dari musyawarah tahun 1938 itu dengan menyampaikan ide mendirikan lembaga

[236]Supardi, dkk., *Setengah Abad UII Sejarah Perkembangan Universitas Islam Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press1994), hlm.19.

pendidikan tinggi Islam ke dalam forum Mu'tamar Majlis Islam A'la Indonesia [MIAI] tahun 1939. Dari hasil mu'tamar ini kemudian didirikanlah Perguruan Tinggi Islam di Solo, dimulai dari tingkat menengah atas dan diberi nama IMS [*Islamische Midelbare School*]"[237]. Perguruan tinggi tersebut, hanya dapat bertahan sampai pada tahun 1941, dan kemudian berhenti dan ditutup karena terjadi Perang Dunia II pada tahun itupula. Jadi terlihat jelas bahwa pada "empat puluh tahun pertama abad XX [1901-1941], di Indonesia sebenarnya telah banyak berdiri lembaga-lembaga pendidikan Islam, mulai dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi.

Dari catatan sejarah bahwa pendidikan tinggi Islam yang pernah ada [sampai tahun 1941], lebih bersifat percobaan-percobaan atau sementara, tak bertahan lama, belum berjiwa persatuan". Perguruan tinggi Islam [PTI] yang berkembang umumnya didirikan oleh organisasi Islam dan kegiatannya terpisah dari organisasi Islam ainnya, seperti PTI Muhammadiyah, PTI Santi Asrama, dan lain sebagainya. Sedangkan Perguruan tinggi yang sudah bercorak persatuan dari ummat Islam adalah perguruan yang didirikan berdasarkan hasil mu'tamar MIAI di Solo, namun pada tahun 1941 terpaksa berhenti karena pecahnya Perang Dunia II"[238]. Gagasan mendirikan perguruan tinggi Islam semakin kuat dan tidak surut di kalangan organisasi-organisasi Islam. Masyumi [Majelis Syuro Muslimin Indonesia], merupakan perubahan nama dari MIAI, dan sebagai federasi dari empat organisasi-organisasi Islam[239] dan organisasi-organisasi yang terhimpun dalam Masyumi "pada awal tahun 1945 melahirkan beberapa keputusan penting, salah satu keputusan menyangkut bidang pendidikan adalah "mendirikan perguruan tinggi Islam dengan nama Sekolah Tinggi Islam [STI]. Keputusan mendirikan Sekolah Tinggi Islam [STI] dilatarbelakangi oleh beberapa hal yaitu : *Pertama,* kemerdekaan negera Indonesia kelak pasti meminta pengisian

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[237]Dahlan dan Moh. Mahfud, MD., *5 Windu UII*..., hlm. 9.

[238]Supardi, dkk., *Setengah Abad UII* ..., hlm. 19.

[239]Organisasi-organisasi Islam yang terhimpun dalam Masyumi, terdiri dari Nahdlatul Ulama [NU], Muhammadiyah, Persatuan Oemat Islam [POI], dan Persatuan Umat Islam Indonesia (PUII), oleh Jepang dizinkan hidup terus sebagai organisasi sosial dan da'wah.

intelektual Islam, calon-calon pemimpin yang sanggup memimpin negara, menggantikan pemerintah kolonial penerus generasi yang akan datang. *Kedua,* diperlukan satu perguruan tinggi yang dapat menghimpun keserasian antara ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum. *Ketiga,* diperlukan satu perguruan tinggi yang dimiliki oleh seluruh umat Islam yang berlandaskan ajaran-ajaran Islam dan merupakan wadah persatuan seluruh umat Islam dalam usaha menanggulangi pengaruh kehidupan barat yang dibawa oleh penjajah"[240].

Pada tanggal 27 Rajab 1364 H, bertepatan dengan tanggal 8 Juli 1945 "Sekolah Tinggi Islam" resmi didirikan. Tujuan mendirikan STI adalah "untuk mengeluarkan alim ulama yang intelek, yaitu mereka yang mempelajari ilmu pengetahuan agama Islam secara luas dan mendalam, serta mempunyai pengetahuan umum yang perlu dalam masyarakat modern sekarang"[241]. Maka dalam kurun waktu empat puluh hari setelah STI dibuka secara resmi, baru terjadi proklamai kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945 dan kemudian beberapa bulan sesudah itu, "Jakarta dikuasi tentara Belanda [Sekutu] maka STI dipindahkan ke Yogyakarta pada tahun 1946. Kemudian perkembangan selanjutnya, STI diubah menjadi Universitas Islam Indonesia, tepatnya pada tanggal 22 Maret 1948, dengan mempunyai beberapa fakultas yaitu fakultas agama, fakultas hukum, fakultas ekonomi, dan fakultas pendidikan [*paedagogik*]. Pada tahun 1950, fakultas agama diserahkan kepada Kementerian Agama RI, dan dijadikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) dengan peraturan Pemerintah No.34 tahun 1950[242], dan berkembang perguruan tinggi Islam lain sampai saat ini.

Bersamaan dengan gagasan dan gerakan modernisasi pendidikan Islam, para modernis berusaha keras untuk mewujudkan sistem pendidikan Islam modern, untuk

---

[240]Supardi, dkk., *Setengah Abad UII ...*, hlm., 20-21.
[241]Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, hlm. 288.
[242]Ibid, hlm. 288.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

meninggalkan kekolotan tanpa menghilangkan ruh Islam. Azyumardi, menyatakan bahwa "pada awal perkembangan adopsi gagasan modernisme pendidikan Islam ini setidak-tidaknya terdapat kecenderungan pokok dalam eksperimentasi organisasi-organisasi di atas, yaitu : *Pertama,* adalah adopsi sistem dan lembaga pendidikan modern secara hampir menyeluruh. Titik tolak modernisme pendidikan Islam di sini adalah sistem dan kelembagaan pendidikan modern [Belanda], bukan sistem dan lembaga pendidikan Islam tradisonal. Eksperimen ini terlihat jelas dilakukan oleh para pembaru modernis di Sumatra Barat. *Kedua,* eksperimen yang bertitiktolak justru dari sistem dan kelembagaan pendidikan Islam itu sendiri, artinya pendidikan Islam sebenarnya telah ada sejak waktu lama dimodernisasi, seperti surau, pondok pesantren, dengan mengadopsi aspek-aspek tertentu dari sistem pendidikan modern"[243]. *Ketiga*, sistem pengajaran mengadopsi sistem pendidikan dari Timur Tengah terutama Mesir dan sistem pendidikan Belanda dan sistem pendidikan Mesir yang berpengaruh sampai sekarang ini. Dengan demikian, pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia dipengaruhi oleh kondisi madrasah di Timur Tengah masa modern yang sudah mengajarkan ilmu-ilmu agama dan umum.

Jika mencermati kedua eksperimentasi pada poin satu dan dua tersebut di atas, menggambarkan bahwa modernisasi pendidikan islam yang merupakan adopsi dari sistem dan kelembagaan pendidikan modern Belanda. Misalnya saja, sekolah yang didirikan di Padang pada tahun 1915 oleh Abdullah Ahmad, dengan nafas reformasi Islam di Indonesia adalah Ambiya School dan kemudian diubah menjadi Sekolah Adabiyah. Sekolah ini, sebenarnya mengadopsi seluruh kurikulum HIS Belanda, dengan menambah pelajaran agama 2 jam sepekan. Kemudian, sekolah-sekolah yang didirikan Muhammadiyah, sebenarnya mengadopsi sistem dan kelembagaan pendidikan Belanda secara cukup konsisten, dan menyeluruh misalnya

[243] Azyumardi Azra, *Pembaruan Pendidikan Islam Sebuah Pengantar,* hlm. 11-13.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dengan mendirikan sekolah-sekolah ala Belanda, seperti MULO, HIS, dan lain-lain". Tetapi di sisi lain, "sekolah-sekolah Muhammadiyah membedakan diri dengan sekolah-sekolah Belanda, yaitu dengan memasukkan "pendidikan agama" [dalam istilah Muhammadiyah sendiri, "met de Qur'an]"[244] ke dalam kurikulumnya, karena itu, sekolah-sekolah Muhammadiyah tidaklah menjadikan sistem dan kelembagaan pendidikan Islam tradisional apakah surau-surau ataupun pesantren sebagai basisnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendidikan Islam dalam batas-batas tertentu merupakan lembaga pendidikan ala Belanda yang diberi muatan keagamaan dan hal ini, sekaligus menunjukkan bahwa pengaruh Timur Tengah hanyalah salah satu faktor selain perkembangan sosial-politik di tanah air pasa masa Hindia Belanda.

Modernisasi pendidikan Islam yang bertitiktolak dari sistem dan kelembagaan pendidikan Islam itu sendiri, yaitu sistem pendidikan madrasah atau surau, pesantren, yang memang secara tradisional merupakan kelembagaan pendidikan Islam *indigenous*, dimodernisasi dengan mengadopsi aspek-aspek tertentu dari sistem pendidikan modern, khususnya dalam kandungan kurikulum, teknik dan metode pengajaran, dan sebagainya. Modernisasi yang "pertama kali dilakukan pesantren Manba'ul Ulum Surakarta pada tahun 1906 dan pesantren ini mempunyai basis pada pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu tradisional Islam, seperti al-Qur'an, hadits, fiqh, bahasa Arab, dan lain-lain. Selain pengajaran ilmu-ilmu yang dianggap tradisional Islam tersebut, juga terdapat mata pelajaran mantiq, aljabar, dan ilmu falak dan juga memasukkan beberapa mata pelajaran yang dianggap modern ke dalam kurikulumnya, seperti membaca (huruf Latin), dan berhitung. Modernisasi yang dilakukan oleh H.Abdul Karim Amrullah, pada 1916 yang menjadikan Surau Jembatan Besi yang menjadikan lembaga pendidikan tradisional Islam Minangkabau sebagai

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[244]Ibid, hlm. 11.

basis untuk pengembangan madrasah modern, dan kemudian lebih dikenal sebagai Sumatera Thawalib[245].

Upaya untuk menjadikan sistem dan lemabaga pendidikan Islam, dalam hal ini pesantren-pesantren sebagai basis dalam mengembangkan sistem dan kelembagaan pendidikan Islam pada masa lebih belakangan [1926] kembali dilakukan di Pulau Jawa dengan pembentukan Pondok Modern Gontor Ponorogo. Gagasan yang mendasari pembetukan pondok modern adalah kesadaran bahwa perlunya memodernisasi sistem dan kelembagaan pendidikan Islam, dengan tidak mengadopsi sistem dan kelembagaan pendidikan modern Belanda, melainkan dengan memodernisasi sistem dan kelembagaan pendidikan Islam. Azyumardi, menyatakan "kedua bentuk eksperimen ini pada dasarnya berlanjut hingga dewasa ini, dengan demikian kita melihat bahwa, sistem dan kelembagaan "pendidikan Islam", sebenarnya merupakan pendidikan umum dengan penekanan seadanya pada aspek-aspek pengajaran Islam"[246], termasuk ke dalam ketegori ini adalah madrasah pasca-UUSPN 1989, yang secara eksplisit menyatakan bahwa madrasah-madrasah adalah "sekolah umum" yang bercirikan agama.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Pendidikan Islam pada Masa Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, terjadi perubahan di berbagai aspek, tidak hanya terjadi dalam bidang pemerintahan saja, tetapi juga dalam bidang pendidikan. Perubahan dalam bidang pendidikan merupakan perubahan yang bersifat mendasar, yaitu perubahan yang menyangkut kebijakan pendidikan dengan dasar dan cita-cita bangsa Indonesia yang baru merdeka. Pendidikan mengalami perubahan mendasar terutama dalam landasan idiilnya yaitu tujuan pendidikan, sistem pendidikan dan kesempatan belajar yang diberikan kepada rakyat

---

[245]Ibid, hlm. 12.
[246]Ibid, hlm. 13.

Indonesia. Pada masa awalnya pendidikan lebih dititik beratkan pada fungsinya untuk mempersiapkan infrastruktur perjuangan dan pembangunan bangsa, mengolah sumber daya alam, dan memanfaatkan sumber daya manusia untuk membangun sebuah negara yang berdaulat.

Upaya perubahan dibidang pendidikan dan pengajaran mulai dilakukan bangsa Indonesia, dan langkah awal yang dilakukan dalam bidang pendidikan yaitu menyesuaikan pendidikan dengan tuntutan dan aspirasi rakyat, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 31 yang berbunyi: [1] Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, [2] Pemerintah mengusahakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang"[247]. Dengan dasar yuridis ini, pembatasan pendidikan yang merupakan warisan penjajah Belanda, yang didasari pada "perbedaan agama, sosial, ekonomi dan golongan yang ada di masyarakat tidak dikenal lagi atau ditiadakan. Setiap anak Indonesia dapat memilih kemana dia akan belajar, sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya"[248].

Pada awal kemerdekaan, sebenarnya bangsa Indonesia telah mempunyai lembaga-lembaga pendidikan seperti "pendidikan pondok pesantren, madrasah, sekolah umum yang berdasarkan keagamaan dan sekolah-sekolah swasta berdasarkan kebangsaan"[249] yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Lembaga-lembaga pendidikan tersebut menjadi modal dasar bagi pengembangan pendidikan di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa "lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada sebelum kemerdekaan merupakan modal dasar dalam menyusun sistem pendidikan nasional Indonesia. Pendidikan yang dilaksanakan umat Islam di Indonesia berarti pula menjadi milik bangsa Indonesia"[250]. Pendidikan Islam mendapatkan tempat dan perhatian yang serius dari pemerintah republik ini baik di sekolah negeri maupun

---

[247]Endang Sudardja,*UUD RI '45 dalam Hubungan dengan Pendidikan Moral Pancasila*,(Bandung:Ghalia Indonesia,1984), hlm.89.

[248]Zahra Idris, *Dasar-dasar Kependidikan*, (Bandung: Angkasa, 1981), hlm. 30.

[249]Zuhairini, dkk., *Sejarah Pendidikan Islam*, hlm. 234.

[250]Ibid, hlm. 234.

swasta, karena "merupakan kosekuensi logis dari adanya pengakuan terhadap pentingnya agama di negeri ini, sebagaimana tertuang dalam pasal 29 UUD 1945 [lihat Pendahuluan]"[251], ini berarti lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada sebelum kemerdekaan diakui eksistensinya, bahkan dilindungi dan dikembangkan, sikap ini didukung dengan "pengumuman Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat [BP KNIP] tanggal 22 Desember 1945 No. 15 [Berita RI tahun II, no.4 dan 5, hal 20] antara lain menyatakan bahwa dalam rangka memajukan pendidikan dan pengajaran di negeri ini, pendidikan di langgar-langgar dan madrasah-madrasah dianjurkan agar berjalan terus dan dipercepat"[252].

Keputusan BP KNIP tanggal 27 Desember 1945, bahwa : madrasah dan pesantren, pada hakekatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia umumnya, hendaknya pula mendapat perhatian dan bantuan yang nyata berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah"[253]. Panitia Penyelidik Pengajaran RI yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantoro, juga memperkuat keputusan BP KNIP ini, dalam laporan tanggal 2 Juni 1946 antara lain dijelaska bahwa pengajaran yang bersifat "pondok pesantren" dan "madrasah" dipandang perlu untuk dipertinggi, dimodernisasikan dan diberi bantuan berupa biaya dan lain-lainnya, sesuai dengan keputusan BP KNIP di atas"[254], dan lembaga-lembaga pendidikan islam tersebut menjadi kewenangan dari Departemen Agama. Perhatian pemerintah untuk mengembangkan dan memodernisasi pendidikan Islam sangat serius, sehingga tidak ada perlakuan berbeda dalam pengelolaan pendidikan. Tetapi pada kenyataannya sering dijumpai perlakuan dan perhatian yang berbeda terhadap pendidikan Islam.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[251]Machnun Husein, *Pendidikan Islam dalam Lintasan Sejarah...*, hlm. 13.
[252]Ibid, hlm. 13.
[253]A.Timur Djaelani,*Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pembangunan Perguruan Agama*,(Jakarta:.Dermaga,1980),hlm.135.
[254]Machnun Husein, *Pendidikan Islam dalam Lintasan Sejarah*, hlm. 14.

Pembinaan pendidikan agama [Islam] secara formal institusional dipercayakan kepada Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan. Kedua departemen tersebut, mengeluarkan peraturan-peraturan bersama untuk mengelolah dan melakukan pembinaan terhadap pendidikan agama [Islam] di sekolah-sekolah umum baik negeri maupun swasta. Untuk merealisasikan pembinaan, Departemen Agama yang terbentuk pada 3 Januari 1946, mengeluarkan sejumlah peraturan Menteri Agama antara lain "mengatur pelaksanaan pemberian bantuan kepada perguruan-perguruan agama dan beberapa peraturan tentang "dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah"[255]. Secara jujur dapat dikatakan bahwa, sebenarnya Departemen Agama mengembangkan kegiatan baru yang berbeda dari yang sudah dilaksanakan sebelumnya dan dalam waktu singkat tugas baru ini menjadi tugas inti dari bagian pemerintah. Keikut sertaan pemerintah dalam masalah pembinaan agama, pada permulaannya hanya bersifat administratif serta pengawasan keamanan, kemudian dikembangkan dengan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk memberikan dorongan posetif terhadap penghayatan agama, terutama dibidang pendidikan[256]. Sedangkan khusus untuk mengelolah pendidikan agama [Islam], yang diberikan di sekolah-sekolah umum secara lebih baik. Pada "Desember 1946, dikeluarkanlah Surat Keputusan Bersama [SKB] antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri Agama, untuk mengatur pelaksanaan pendidikan agama pada sekolah-sekolah umum [negeri dan swasta], yang berada di bawah kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan"[257].

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa pendidikan pondok pesantern, pendidikan di langgar-langgar, madrasah dan pendidikan umum atau yang dikategori

---

[255]Sejumlah peraturan Menteri Agama juga dikeluarkan sejak berdirinya Departemen Agama pada tahun 1946, antara lain : Per. Menag No. 1/1946; No. 2/1948, dan No. 7/1952, yang mengatur pelaksanaan pemberian bantuan kepada perguruan-perguruan agama itu. Selain itu masalah pendidikan agama ini juga diatur dalam beberapa peraturan pemerintah, a.l. P.P. No. 33/1949, No. 8/1950 dan terakhir dalam UU No. 4/1950 [UU tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah] pasal 2 dan 10 [Machnun Husein, *Pendidikan Islam dalam Lintasan Sejarah*, hlm. 14].

[256]Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah...*, hlm. 86.

[257]Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia....*, hlm. 76.

pendidikan Islam di bawah pembinaan departemen Agama dan sedangkan pendidikan umum di bawah pembinaan Departemen Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan. Sebenarnya dari sini terjadi dualisme dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia yang berpengaruh sampai sekarang, yaitu pendidikan agama [Islam] disatu pihak dan pendidikan umum dipihak lain. Pendidikan agama [Islam] dikelolah oleh Departemen Agama dengan semua jenis pendidikannya baik di sekolah-sekolah agama maupun di sekolah-sekolah Umum, sedangkan Departemen Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan mengelolah pendidikan umum dan mendapatkan kepercayaan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional"[258]. Dari sini terlihat dualisme pengelolaan pendidikan, tetapi masyarakat sering mengatakan bahwa dualisme pengelolaan pendidikan, merupakan peninggalan atau "warisan pemerintah kolonial Belanda yang tetap mengakar dalam dunia pendidikan kita"[259] dan berpengaruh pada pengelolaan pendidikan di Indonesia sampai searang.

Penyebab lain, adalah pandangan yang kurang menghargai pendidikan Islam, sehingga mendorong pengelolaan pendidikan berpegang pada sikap yaitu berdiri di kutub yang berbeda dengan pendidikan "umum", dan kesan ini seakan-akan pendidikan Islam terpisah dari pendidikan nasional. Kondisi ini didukung dengan kebijakan "Presiden Soekarno menetapkan berdirinya Universitas Gajah Mada, diperuntukan bagi golongan Nasional dan dalam waktu bersamaan pula menetapkan Perguruan Tinggi Agama Islam [PTAIN] Yogyakarta, diperuntukan bagi umat Islam. Pertimbangan pemerintah [Presiden Soekarno] waktu itu, memang tidak terlepas dari situasi politik yang terjadi di masa itu"[260]. Tetapi apapun pertimbangan dan kebijakan yang diambil, langkah ini merupakan usaha pengkotakan antara golongan Islam dan golongan Nasional ke dalam kutub "pendidikan Agama" dan "pendidikan umum", dan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[258]Ibid, hlm. 77.
[259]Marwan Sarijo, *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Amissco, 1996), hlm. 24.
[260]Ibid, hlm. 25.

dapat dikatakan merupakan kelanjutan dari tradisi dualisme yang dibangun pada zaman kolonial Belanda.

Selain itu, bahwa kehadiran Universitas Gajah Mada dan PTAIN telah membentuk suatu polarisasi yang lebih membedakan "universitas umum" milik kaum Nasionalis atau kelompok lain, dan PTAIN merupakan milik kelompok umat Islam. Implikasi lebih jauh dari polarisasi Universitas Gajah Mada sebagai "universitas umum" dan PTAIN [IAIN] sebagi "universitas agama", seakan-akan menggambarkan "Universitas Umum" bukan milik golongan Islam, sedangkan lembaga pendidikan tinggi bagi orang Islam hanya IAIN. Hal ini dapat diakui, karena "universitas umum" menyediakan program-program studi umum, sedangkan "universitas agama" menyediakan program-program studi agama. Polarisasi ini, juga berakibat pada pengelolaan dan pembinaan pendidikan, yaitu sekolah dan perguruan tinggi umum menjadi binaan Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, dan sekolah-sekolah agama dan perguruan tinggi Islam berada di bawah pengelolaan dan pembinaan Departemen Agama". Secara administratif-birokraktis, semua lembaga pendidikan Islam baik milik pemerintah, swasta, baik dari tingkat rendah sampai dengan tingkat tinggi berada di bawah kewenangan Departemen Agama bukan Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Mochtar Naim, menyatakan bahwa "kehadiran dan keikut sertaan Departemen Agama dalam pembinaan pendidikan, disebutkan bagaimanpun telah melestarikan adanya dualisme yang sudah ada sebelumnya"[261]. Steenbrink, menyatakan ada anggapan bahwa "sistem pendidikan yang dualistis seperti tercermin dalam Departemen Agama dan Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, sesungguhnya dianggap berasal dari zaman kolonial dan merupakan usaha anti Islam dari Belanda. Maka kalangan Islam berusaha untuk meniadakan warisan kolonial ini dengan jalan

[261] Ibid, hlm. 25-26.

memasukan seluruh sistem pendidikan di bawah pengurusan Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan"[262], tetapi pada kenyataannya "pendidikan Islam" secara administratif-birokraktis tetap berada di bawah kewenangan Departemen Agama, sedangkan "pendidikan umum" tetap berada di bawah kewenangan Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, dan sistem ini merupakan hasil pemikiran dari pengelola pendidikan di Indonesia.

Kehadiran pendidikan Islam sebagai komponen pendidikan nasional, terdapat kesan bahwa sebenarnya pengelolaan pendidikannya berada di luar sistem pendidikan nasional, karena kesan tersebut terakomodasi pada isi Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran No. 4 Tahun 1950. Pada Undang-Undang tersebut memuat "tiga macam pendidikan, yakni pendidikan dan pengajaran di sekolah, pendidikan dan pengajaran di sekolah agama, dan pendidikan masyarakat. Ruh Undang-Undang tersebut, hanya mengatur pendidikan dan pengajaran di sekolah, sedangkan pendidikan dan pengajaran di sekolah agama, dan pendidikan masyarakat ditetapkan dalam Undang-Undang lain[263] atau dalam peraturan tersendiri. Undang-Undang tersebut, juga mengisyaratkan bahwa Menteri Agama dapat mengatur dan memberikan pengakuan terhadap sekolah-sekolah agama (Islam) yang ada. Pada pasal 10 (2), yang berbunyi : "Bahwa belajar di sekolah-sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Manteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar"[264], dan "kewajiban belajar ini dinyatakan dalam pasal 10 (3) UU itu, diatur dalam UU tersendiri pula. Mukti Ali menyatakan bahwa UU dimaksud belum ada atau belum pernah dikeluarkan hingga sekarang. Karenanya tidak dapat dijelaskan secara formal apakah kewajiban belajar itu pada tingkat Dasar ataukah pada tingkat Lanjutan"[265]. Pendidikan Islam dapat diatur sendiri oleh Menteri Agama, sehingga

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[262]Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah...*, hlm. 95.
[263]Machnun Husein, *Pendidikan Islam dalam Lintasan Sejarah*, hlm. 15.
[264]Zuhairin, dkk, *Sejarah Pendidikan Islam*, hlm. 236.
[265]Machnun Husein, *Pendidikan Islam dalam Lintasan Sejarah*, hlm. 16.

terkesan bahwa pendidikan Islam berada di luar Sistem Pendidikan Nasional bangsa Indonesia, karena pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 1954, bab I aturan umum berisi: [1] Undang-Undang ini tidak berlaku untuk pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah agama dan pendidikan masyarakat, [2] Pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah agama dan pendidikan masyarakat masing-masing ditetapkan dalam Undang-Undang lain[266], maka semakin jelas posisi pendidikan Islam pada saat itu.

Uraian di atas, menggambarkan bahwa eksistensi pendidikan Islam pada upaya "mempertahankan identitasnya", dengan berusaha melakukan modernisasi untuk menyamakan dengan sistem pendidikan umum. Sementara "Departemen Agama berusaha untuk menghapuskan perbedaan antara sistem sekolah dan madrasah"[267] yang bersifat formal, sedangkan mengenai sistem pendidikan yang bersifat non-formal, seperti pesantren dan beberapa pengajian Qur'an. "Departemen Agama tidak begitu campur tangan dalam pengelolaan lembaga-lembaga tersebut, tetapi hanya menganjurkan untuk mengadakan modernisasi dengan mengambil alih sistem madrasah"[268]. Departemen Agama, berusaha untuk menghapuskan perbedaan sistem sekolah dan madrasah yang diujudkan dengan melakukan pembenahan pada madrasah-madrasah dengan penataan kurikulum madrasah yang tidak hanya mengkhususkan pada pendidikan agama, tetapi dimasukkan ilmu pengetahuan umum yang lebih luas dan disejajarkan dengan pengetahuan umum pada sekolah umum yang sederajat.

Pemerintah "sangat memperhatikan tumbuhnya pendidikan agama [Islam], sehingga pendidikan agama dijadikan salah satu bidang studi yang diintegrasikan dalam kruikulum sekolah-sekolah umum dan semua lembaga-lembaga pendidikan agama, baik formal, informal dan non formal berjalan dan berkembang terus"[269],

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[266]B. Suryosubroto, *Beberapa Aspek Dasar-dasar Kependidikan*, (Jakarta : PT. Bina Aksara, 1983), hlm. 48.
[267]Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah...*, hlm. 88.
[268]Ibid, hlm. 88.
[269]Zuhairini, dkk., *Sejarah Pendidikan Islam*, hlm. 218.

sehingga terjadilah apa yang disebut dengan integrasi pendidikan agama [Islam] di sekolah umum dan pendidikan umum di madrasah. Artinya disatu pihak Departemen Agama memberikan kebijaksanaan memasukan sebanyak mungkin pengajaran agama (Islam) dalam sistem sekolah-sekolah umum, sedang dipihak lain berarti juga memberikan perhatian kepada pelajaran umum dalam sistem madrasah. Kebijaksanaan yang dilakukan Departemen Agama ini telah mengembangkan apa yang disebut Steenbrink, dengan "konsep konvergensi"[270], yaitu disatu pihak memasukkan pelajaran agama pada kurikulum sekolah-sekolah umum dan dilain pihak memasukkan pelajaran umum dalam kurikulum madrasah-madrasah.

Peraturan resmi pertama tentantang pendidikan agama di sekolah, ditemukan dalam Undang-Undang Pendidikan tahun 1950 nomor 4, dan Undang-Undang Pendidikan tahun 1954 No. 20, [tahun 1950 hanya berlaku untuk Republik Indonesia Serikat di Yogyakarta]. Undang-Undang Pendidikan tahun 1954 No.20 antara lain berbunyi : [1] Dalam sekolah-sekolah negeri diselenggarakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya mengikuti pelajaran tersebut. [2] Cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur melalui ketetapan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan bersama-sama dengan Menteri Agama"[271]. Penjelasan pasal ini antara lain menetapkan bahwa [a] pengajaran agama tidak boleh mempengaruhi kenaikan kelas para muid[272], [b] apakah suatu jenis sekolah memberi pelajaran agama adalah tergantung pada umur dan kecerdasan muridnya, [c] murid-murid yang sudah dewasa boleh menetapkan ikut dan tidaknya pelajaran agama, [d] sifat pengajaran agama dan jumlah jam pelajaran ditetapkan dalam undang-undang tentang jenis sekolahnya"[273]. Undang-Undang ini, juga mengatur seseorang mengikuti pelajaran agama, "orang tua murid menetapkan apakah

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[270]Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah...*, hlm. 88.
[271]Ibid, hlm. 91.
[272]Ibid, hlm. 92.
[273]Machnun Husein, *Pendidikan Islam dalam Lintasan Sejarah*, hlm. 19.

anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut"[274] atau tidak. Dari ketentuan peraturan tersebut, terkesan bahwa pendidikan agama [Islam] tidak merupakan pelajaran wajib melainkan hanya sebagai pelajaran pilihan [elektif] saja, dan apabila kita dicermati dari penjelasan pasal-pasal tersebut, ternyata peraturan-peraturan tersebut telah membatasi pelaksanaan pendidikan Islam sedemikian rupa sehingga "memperkecil" peranan pendidikan agama [Islam] dalam sistem pendidikan nasional. Pembatasan-pembatasan terhadap pelaksanaan pendidikan Islam, tentu saja menimbulkan ketidakpuasan dikalangn umat Islam, dan ketidak puasan ini tidak hanya ditujukan pada Undang-Undang No. 4 tahun 1950, tetapi juga ditujukan kepada peraturan bersama Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan Menteri Agama pada tahun 1946, karena dalam peraturan tersebut tidak dicantumkan mengenai pendidikan dan pengajaran agama di SLTP maupun SLTA[275].

Untuk memenuhi keinginan umat Islam, "peraturan Bersama Tahun 1946 itu diperbaharui dengan Peraturan Bersama yang baru, Noo. 1432/Kab.[Pendidikan] dan No. K.I/651 [Agama]. Pada peraturan ini ditetapkan bahwa, "pendidikan agama selain diberikan di Sekolah Rakyat juga diberikan di Sekolah Lanjutan Umum, maupun Kejuruan. Di Sekolah Rakyat pendidikan agama diberikan mulai dari kelas IV sebanyak dua jam per minggu. Sedangkan bagi murid-murid yang berada di lingkungan khusus di mana Islam kuat atau lingkungan istimewa[276], pelajaran agama mulai diberikan dari kelas I dan jam pelajaran ditambah menjadi 4 jam per minggu, sedangkan di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Tingkat Atas baik umum maupun kejuruan, pelajaran agama diberikan 2 jam per minggu[277]. Dalam peraturan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[274]Ibid, hlm. 22.

[275]Ibid, hlm. 19.

[276]Dalam Penjelasan Umum Persatuan Bersama itu, yang ditandatangani oleh Sekjen Kementerian Agama, R. Moh. Kafrawi, a.n. Menteri Agama KH. Wahid Hasyim, dicantumkan juga rumusan mengenai lingkungan istimewa. Menurut penjelasan itu "lingkungan istimewa" adalah lingkungan yang mempunyai penduduk yang sangat tebal agamanya. Lingkungan lebih kecil daripada atau wilayah, bahkan bisa merupakan desa kecil saja. Lingkungan istimewa itu harus dinyatakan dalam Surat Keputusan Bupati atau Walikota yang mewilayahinya atas permintaan penduduk setempat dan atas persetujuan Gubernur (Machnun Husein, *Pendidikan Islam dalam Lintasan Sejarah*, hlm. 21).

[277]Ibid, hlm. 19-20.

bersama ini antara lain ditambahkan ketentuan-ketentuan baru sebagai berikut : bahwa "agama yang diajarkan kepada murid adalah agama yang mereka peluk dengan jumlah murid minimal 10 orang pada tiap kelas yang bersangktan. Selama berlangsungnya pelajaran agama murid yang beragama lain atau yang tidak mendapatkan ijin dari orang tuanya boleh meninggalkan ruang belajar. Rencana pelajaran agama, kurikulum dan bahan pelajaran dan cara-cara mengajarkannya ditetapkan oleh Kementerian Agama dengan persetujuan dari Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan"[278].

Posis pendidikan Islam pada peraturan bersama tersebut, masih tetap bersifat elektif baik pada Sekolah-sekolah Rakyat dan Sekolah Lanjutan serta penyelenggaraan pendidikan agama [Islam] dilakukan atas persetujuan kedua menteri. Steenbrink, menyatakan bahwa peraturan bersama kedua Menteri "dengan tujuan memperbaiki peraturan pertama pada poin khusus tanpa memberikan perubahan yang esensial, akan tetapi penjelasan resmi untuk peraturan ini terlihat adanya suatu perbedaan yang sedikit diskriminatif terhadap umat Islam"[279]. Selanjutnya, Steenbrink juga menyatakan, bahwa "penetapan pelajaran pada peraturan baru ini menyebutkan gereja Kristen sudah mempunyai hirarki tersendiri dan mempunyai ahli agama yang berpendidikan akademis, sehingga fihak Kristen boleh menentukan pelajarannya sendiri. Bagi fihak Islam, karena belum mempunyai tenaga akademis yang cukup, mereka harus mendapat pedoman didaktik dan metodis dari Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan"[280]. Dengan demikian ada anggapan dari pengambil kebijaksanaan dibidang pendidikan, bahwa pendidikan Islam belum siap secara manajemen, kurikulum, dan metodologi mengajar dalam mengelola pendidikan, sehingga perlu mendapatkan pedoman didaktik metodis dari Menteri

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[278]Ibid, hlm. 20., dan Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah...*, hlm. 92.
[279]Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah...*, hlm. 92.
[280]Ibid, hlm. 93.

Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Hal ini, terkesan bahwa pengambil kebijaksanaan dalam bidang pendidikan pada saat itu tidak mempunyai penghargaan yang tinggi terhadap "upaya" dan "sumbangan" para guru agama (Islam) kepada pendidikan, yang merupakan modal dasar pengembangan pendidikan nasional bangsa ini. Perlakuan tersebut, cukup mempengaruhi pelakasanaan pendidikan sampai sekarang, dan pendidikan Islam dalam posisi pendidikan nasional selalu dianggap berada pada "posisi kelas dua" di negeri ini dengan berbagai predikat yang disandangnya.

Dalam Sidang MPRS tahun 1960, ditetapkan bahwa "pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari sekolah rakyat sampai dengan universitas-universitas negeri dengan pengertian bahwa murid-murid berhak tidak ikut-serta, apabila wali murid atau murid dewasa menyatakan keberatannya"[281]. Pada universitas umum dimasukkan pendidikan agama dengan memberikan kebebasan bagi para mahasiswa untuk mengikuti atau tidak mengikuti pengajaran agama ini, sehingga pendidikan agama di "universitas umum" pada saat itu masih bersifat pilihan. Pada tahun 1967, MPRS "mengubah ketetapan tahun 1960 dengan mewajibkan kepada mahasiswa untuk mengikuti pengajaran/kuliah agama, serta tidak mengijinkan mereka tidak mengikutinya. Para mahasiswa hanya dibebaskan memilih agama apa yang akan dipelajari, maka sejak saat itu, pengajaran agama juga memainkan peranan penting dalam penilaian para murid dan mahasiswa"[282]. Kuliah agama [Islam] menjadi wajib bagi mahasiswa di perguruan tinggi, tetapi ada fenomena yang menarik dari "kebebasan memilih agama yang akan dipelajari" yaitu bagi mahasiswa yang merasa sulit lulus pada kuliah agama Islam atau kuliah agama tertentu dan mahasiswa akan memilih agama lain yang menurutnya mudah untuk lulus. Fenomena

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[281]Machnun Husein, *Pendidikan Islam dalam Lintasan Sejarah*, hlm. 23.
[282]Karel A.Steenbrink, *Pesantren Madrasah...*, hlm..93.

ini terjadi sekitar tahun 1970 sampai dengan tahun 1980-an di kalangan mahasiswa dibeberapa perguruan tinggi.

Lembaga pendidikan Islam mulai melakukan perubahan dan penataan manajamen pendidikan, dengan memasukkan pelajaran umum ke dalam kurikulum madrasah dengan harapan menyamakan madrasah dengan sistem sekolah umum. Maka "dalam rangka konvergensi, Departemen Agama menganjurkan supaya pesantren yang tradisional dikembangkan menjadi sebuah madrasah, dan disusun secara klasikal, memakai kurikulum tetap, dan memasukkan mata pelajaran umum di samping pelajaran agama, sehingga murid di madrasah mendapatkan pendidikan umum yang sama dengan murid di sekolah umum. Departemen Agama hanya memberikan bantuan kepada madrasah yang memperhatikan pendidikan umum, dan bantuan pemerintah ini hampir semuanya merupakan bantuan untuk mata pelajaran umum"[283] dan penataan pendidikan Islam, mulai dari madrasah Ibtidaiyah, Tsana-wiyah dan Aliyah. Organisasi kurikulum di madrasah diberikan perimbangan mata pelajaran "umum", artinya komposisi kurikulum terdiri dari sepertiga pelajaran agama, sedangkan sisanya merupakan mata pelajaran umum.

Dalam usaha mendapatkan pengakuan sosial terhadap pendidikan Islam, Departmen Agama juga membuat suatu rumusan yang mengarah pada : "*Pertama*, berusaha sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi pendapat umum bahwa madrasah tidaklah cukup hanya memberikan pengajaran agama. *Kedua,* berusaha sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi pendapat umum bahwa mata "pelajaran umum" di madrasah tidak akan mencapai tingkat yang sama dibandingkan dengan sekolah yang dikelolah Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Namun secara formal, Departemen Agama, telah mendapatkan keuntungan berkat Undang-Undang 1950 pasal 10 yang menyebutkan bahwa belajar

[283] Ibid, hlm. 97.

di sekolah agama yang telah mendapatkan pengakuan Departemen Agama, sudah dianggap memenuhi kewajiban belajar"[284]

Mencermati perkembangan pendidikan Islam, timbul pertanyaan seberapa jauh peran dan sumbangan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Jawabannya sangat berbeda, di kalangan umat Islam dan Departemen Agama menyatakan bahwa pendidikan Islam dianggap telah memberikan sumbangan kepada bangsa, baik menurut tuntutan zaman modern maupun menurut Islam, meskipun ada kesan bahwa pelajaran umum belum diajarkan secara optimal di madrasah. Namun lain halnya di kalangan Departemen Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, sistem pendidikan Islam sering tidak dihargai sebagai sumbangan besar terhadap sistem pendidikan. Pengakuan formal hanya dipandang sebagai konsesi kepada umat Islam saja"[285] dan dalam rencana pembangunan 8 Tahun [1961-1969], yang diserahkan pemerintah kepada MPRS dinyatakan, bahwa madrasah [yang juga memuat mata pelajaran umum] akan berkembangan mengikuti tipe sekolah umum dan akhirnya masuk wewenang Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan"[286]. Dengan demikian, tugas-tugas Departemen Agama, akhirnya akan dibatasi dan bahkan hilang perannya dalam pembinaan pendidikan, termasuk pendidikan agama [Islam]. Maka konsep integrasi pendidikan yang diusulkan Prof. Prijono, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pada tahun 1960, pada pokonya dimaksudkan untuk menghilanngkan peranan Departemen Agama dibidang pendidikan termasuk pendidikan agama, dan konsep ini oleh kalangan umat Islam dianggap mendapatkan dukungan PKI. Oleh karena itu "konsep ini ditolak oleh MPRS pada tahun 1960 dan kemudian tahun 1963, menetapkan bahwa madrasah akan tetap berada di bawah Departemen Agama"[287]. Pendidikan Islam tetap berada di bawah

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[284]Ibid. hlm. 98.
[285]Ibid, hlm.99.
[286]Ibid.hm. 99.
[287]Ibid, hlm. 99.

pembinaan dan pengelolaan Departemen Agama, tetapi akibat dari pengaruh politik di masa jayanya PKI, hubungan kerjasama antara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Departemen Agama dalam memantapkan konsep konvergensi pendidikan tidak selalu berjalan mulus"[288].

Dari paparan di atas, dapat simpulkan bahwa eksistensi pendidikan Islam pada masa itu, lebih pada upaya "mempertahankan identitasnya", sedangkan perubahan yang dilakukan hanya pada usaha menyamakan madrasah dengan sistem sekolah-sekolah umum yaitu memasukkan "pelajaran umum" ke dalam kurikulum madrasah dan memasukkan "pelajaran agama" ke dalam kurikulum sekolah umum. Sedangkan untuk lembaga pendidikan "pesantren tradisional" diupayakan untuk dikembangkan menjadi madrasah dan disusun secara klasikal dengan memakai kurikulum yang tetap, dan memasukkan mata "pelajaran umum" di samping mata "pelajaran agama". Sistem dan kelembagaan pesantren diperbarui dan disesuaikan dengan tuntutan perubahan. Sedangkan mengenai pengelolaan dan pembinaan pendidikan Islam, tetap menjadi kewenangan Menteri Departemen Agama, tetapi semua kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Departemen Agama atas persetujuan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, sehingga terkesan bahwa kewenangan Departemean Agama terbatas dan terkesan pula adanya dualisme pengelolaan manajemen pendidikan.

Maka dari uraian ini, menegaskan bahwa kehadiran Departemen Agama dalam pengelolaan dan pembinaan pendidikan, bagaimpun telah dianggap "melestarikan dualisme" pengelolaan pendidikan, dan juga terkesan pendidikan Islam berada pada "posisi kelas dua" dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Maka dalam usaha pembaruan pendidikan Islam, ada hal yang perlu dicermati, yaitu: *Petama*, "modernisasi sistem dan kelembagaan pendidikan Islam berlangsung sejak

[288]Marwan Saridjo, *Bunga Rampai Pendidikan Agama...*, hlm. 26.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

awal hingga sekarang ini tanpa melibatkan wacana epistimologis. *Kedua*, modernisasi sistem dan kelembagaan pendidikan Islam cenderung diadopsi dan diimplementasikan begitu saja, dan sedikit sekali perhatian yang diberikan pada wacana epistimologis. Kalaupun ada perhatian, pembahasan dan perumusan yang dihasilkan jauh daripada tuntas. *Ketiga*, sebagai implemantasi modernisasi sistem dan kelembagaan pendidikan Islam di Indonesia berlangsung secara adhoc [sementara] dan parsial. Modernisasi yang dilakukan kemudian cenderung bersifat involutif[289], yakni sekedar perubahan-perubahan yang hanya memunculkan kerumitan-kerumitan baru daripada terobosan-terobosan yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi konsep maupun viabilitas, kelestarian dan kontinuitasnya.

C. Pendidikan Islam pada Era "Orde Baru"

Orde Baru, lahir sebagaimana pendapat umum adalah sebagai koreksi terhadap kebijaksanaan politik pemerintahan Orde Lama. Koreksi ini bukan saja pada bidang politik tetapi "terhadap semua tatanan yang berlaku selama itu dan menyesuai-kannya dengan ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945"[290]. Bahasa Fachry Ali, "orientasi pemikiran sosial politik elit pemimpin Orde Lama terlalu bersifat ideologi dan politis"[291]. Pancasila sebagai disain budaya humanisme menjadi kabur oleh perilaku politik pimpinan Orde Lama. Pada era Orde Lama, "sejak tahun 1959 bangsa Indonesia berada di bawah gelora Manipol [Manifesto Politik] - USDEK [UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia]. Manipol - USDEK telah menjadi "Dewa" dalam kehidupan politik Indonesia dan juga "dewa" dalam bidang kehidupan lainnya, termasuk bidang Pendidikan".

Pemikiran dan kebijaksanaan politik Orde Lama berpengaruh pada bidang pendidikan. Hal ini terlihat pada "keputusan Presiden Nomor 145 tahun 1965 yang

---

[289]Azyumardi Azra, *Pembaruan Pendidikan Islam...*, hlm. 15-16.

[290]Machnun Husein, *Pendidikan Islam dalam Lintasan Sejarah*, hlm. 25.

[291]Fachry Ali dan Bahtiar Effendi, *Merambah Jalan Baru Islam*, (Bandung:Mizan), hlm. 94.

merumuskan Tujuan Pendidikan Nasional Indonesia sesuai dengan Manipol-Usdek. Manusia Sosialis Indonesia adalah cita-cita utama setiap usaha pendidikan di Indonesia, kepentingan kehidupan pribadi agar dinomorduakan"[292]. Tujuan Pendidikan Nasional, baik diselenggarakan oleh pihak Pemerintah maupun oleh pihak Swasta, mulai dari pendidikan Persekolahan sampai pendidikan Tinggi supaya melahirkan warga negara Sosialis Indonesia yang susila, yang bertanggung jawab atas terse-lenggaranya Masyarakat Sosial Indonesia yang adil dan makmur spritual maupun material dan berjiwa Pancasila, yaitu: Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusian yang adil dan beradab, Kebangsaan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial"[293].

Dasar dan tujuan pendidikan nasional tersebut berpengaruh pada kebijaksanaan pendidikan. Kebijaksanaan Pendidikan yang "terkenal pada waktu itu, adalah "Sapta Usaha Tama dan Pancawardhana" yang tertuang dalam Instruksi Menteri PP dan K Nomor 1 tahun 1959. "Sapta Usaha Tama" yaitu menyangkut dengan kebijaksanaan mengenai : penertiban aparatur dan usaha-usaha Kementerian PP dan K, menggiatkan kesenian dan olah Raga, mengharuskan "usaha halaman", mengharuskan penabungan, mewajibakan usaha-usaha koperasi, mengadakan kelas masyarakat, dan membentuk regu kerja di kalangan SLTA dan Universitas. Kebijaksanaan "Panca Wardhana" atau Lima [pokok] Perkembangan yang oleh Kepala Misi UNESCO untuk Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan "*The Five Principles of Education*", berisikan kebijakan pendidikan sebagai berikut : Perkembangan cinta bangsa dan tanah air, moral nasional/internasional/ keagamaan, perkembangan intelegensi, perkembangan emosional-artistik atau rasa keharuan dan keindahan lahir-batin, perkembangan keprigelan [kerajinan] tangan, dan Perkembangan jasmani"[294]. Kebijaksanaan pendidikan tersebut tidak bertahan lama

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[292]Ary H. Gunawan, *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan* ..., hlm. 48-49.
[293]Ibid, hlm. 49.
[294]Ibid, hlm. 50.

dan kemudian ditinggalkan karena meletusnya peristiwa G-30-S/PKI pada tahun 1965 dan muncul suarana politik baru yang dikenal dengan masa "Orde Baru".

Istilah Orde Baru lebih pada nuansa "politik" yang membuat "sekat" kurun waktu suatu masa politik antara masa kemerdekaaan 1945 sampai tahun 1965 yang disebut Orde Lama dengan kurun waktu 1 Oktober 1965 sampai dengan tahun 1998 yang disebut dengan era Orde Baru. Munculnya Orde Baru pada tahun 1965 ditandai dengan peristiwa ditumpasnya Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1965 dan bangsa Indonesia mulai memasuki era baru yang dinamakan dengan era Orde Baru[295], yang muncul sebagai perubahan "sikap mental yang posetif untuk menghentikan dan mengoreksi segala penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945 dengan memperjuangkan adanya suatu masyarakat yang adil dan makmur, baik material dan spritual melalui pembangunan serta sikap mental mengabdi kepada kepentingan rakyat dan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen"[296].

Koreksi dan perubahan total pada semua tatanan kehidupan bangsa Indonesia, dari bidang politik, hukum, sosial budaya, keamanan, dan pendidikan, disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945. Kebijaksanaan tentang pendidikan mulai diatur dengan ketetapan-ketetapan MPRS. Keterapan MPRS Nomor XXVII/ MRPS/1966, disebutkan Tujuan Pendidikan Nasional Indonesia untuk membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh Pembukaan UUD 1945. Pembentukan manusia Pancasila sejati adalah sesuatu yang sangat diperlukan untuk mengubah mental masyarakat yang sudah banyak mendapat indoktrinasi "Manipol Usdek" pada masa pemerintahan Orde

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[295]Orde Baru, bukanlah merupakan golongan tertentu, sebab Orde Baru bukan berupa pengelompokan fisik (Ari H. Gunawan, *Kebijakan-kebijakan Pendidikan*, hlm. 51). Perubahan Orde Lama [sebelum 30 September 1965] ke Orde Baru berlangsung melalui suatu gerakan "politik" untuk kembali kepada tatanan kehidupan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Gerakan ini berlangsung "melalui kerjasama yang erat antara pihak ABRI dan Gerakan-gerakan Pemuda, disebut Angkatan 1966" atau populer dikenal "Angkatan '66. Para pemuda yang bergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia [KAMI] dan Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia [KAPPI].

[296]Ary H. Gunawan, *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan* ..., hlm. 51.

Lama. Maka pemumian semangat Pancasila dianggap sebagai jaminan untuk tegaknya Orde Baru[297]. Dalam ketetapan MPRS/1966 pasal 4 disebutkan bahwa untuk mencapai dasar dan tujuan pendidikan, isi pendidikan dirumuskan sebagai upaya "mempertinggi mental, moral, budipekerti, memperkuat keyakinan beragama, mempertinggi kecerdasan, keterampilan serta membina dan mengembangkan fisik yang kuat dan sehat"[298]. Maka Apabila dibandingkan, tujuan pendidikan pada era Orde Lama lebih ditekankan pada "Manipol Usdek", yakni upaya untuk membangun manusia sosialis Indonesia adil dan makmur spritual maupun material dan berjiwa Pancasila. Sedangkan tujuan pendidikan pada era Orde Baru, pendidikan berdasarkan Pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi mental, moral, budipekerti, memperkat keyakinan beragama serta membangun semangat kebangsaan dan mengembangkan fisik yang kuat dan sehat agar dapat menumbuhkan menusia-manusia pembangunan.

Tujuan pendidikan nasional pada era Orde Baru, senantiasa dituangkan dalam Garia-Garis Besar Haluan Negara [GBHN] dan berdasarkan ketetapan MPR. Maka ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 yang tertuang dalam GBHN, memuat tujuan pendidikan nasional sebagai berikut :

> "Pendidikan pada hakekatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup"[299]. Agar pendidikan dapat dimiliki oleh seluruh Rakyat sesuai dengan kemampuan masing-masing individu, maka pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah. Pembangunan di bidang pendidikan diarahkan atas Falsafah Negara Pancasila dan diarahkan untuk membentuk manusia-manusia pembangunan yang ber-Pancasila dan untuk membantuk Manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohaninya, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, dapat mengembangkan kreativitas dan tanggung

---

[297]Ibid, hlm. 51.

[298]Ibid, hlm. 52.

[299]Pendidikan seumur hidup, suatu konsep atau suatu ide. Gagasan pokoknya ialah pendidikan tidak hanya berlangsung selama seorang belajar di lembaga pendidikan formal saja dan masih dapat memperoleh pendidikan "kalau ia mau" setelah ia selesai menjalani pendidikan formal. Konsep ini, pendidikan dalam arti kata yang sebenarnya, adalah sesuatu yang berlangsung terus sepanjang kehidupan [*From the cradle to the grave*]. Konsep pendidikan seumur hidup [*life long education*] sering pula disebut "pendidikan berke sinam bungan"[*continuing education*]. Kegiatan-kegiatan pendidikan jenis ini lazimnya diselenggarakan di luar pendidikan formal dan kegiatan inipun sering pula disebut pendidikan non-formal (Muchtar Buchari, *Pendidikan dalam Pembangunan*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1994, hlm. 22).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

jawab, dapat menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945"[300]

Kemudian, rumusan-rumusan tujuan pendidikan nasional selanjutnya senantiasa termuat dan ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara [GBHN] melalui keputusan MPR tahun 1978, 1983, 1988, dan 1989.

Rumusan tersebut semakin kuat dengan lahirnya UU RI Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan dilengkapi beberapa peraturan. UU Nomor 2 tahun 1989 tersebut, "Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan"[301]. Maka dengan berlakunya undang-undang serta peraturan-peraturan pelaksanaannya, penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dari tingkat Prasekolah sampai dengan Pendidikan Tinggi harus mengacu dan berpedoman pada aturan tersebut.

Pada masa awal Orde Baru, posisi pendidikan agama di sekolah-sekolah dan universitas-universitas masih merupakan mata pelajaran pilihan, kemudian pada tahun 1966 MPRS dalam keputusannya nomor XXVII/MPRS/1966 tentang agama, pendidikan dan kebudayaan, menetapkan "pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas-universitas negeri. Selain keputusan tersebut, MPRS juga mengeluarkan resolusi No.III/Res./MPRS/1966, tentang pembinaan kesatuan bangsa bahwa intensifikasi pendidikan agama di semua sekolah dan lembaga pendidikan perlu ditekankan

---

[300]Ary H. Gunawan, *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan*, hlm. 52.

[301]Depag.RI,*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Dirjend. Bimbaga Islam,1991/1992), hlm.4.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dengan diberikannya kesempatan yang seimbang. Resolusi ini jelas memberi isyarat bahwa pelaksanaan pendidikan agama selama ini selain belum intensif juga belum mendapatkan kesempatan yang memadai dalam kurikulum persekolahan kita. Untuk itu, perlu penataan kembali kedudukan dan fungsi pendidikan agama dalam kaitannya dengan kurikulum di sekolah atau universitas"[302]. Diakui bahwa pendidikan keagamaan di sekolah-sekolah dan universitas secara sporadis sudah dijalankan, tetapi belum optimal. Oleh karena itu, pendidikan agama [Islam] perlu digiatkan, dikembangkan serta diatur secara seksama oleh pemerintah, sehingga pendidikan dan pengajaran agama [Islam] dapat "dinilai" secara wajar, sebagaimana pelajaran-pelajaran lainnya.

Berbicara tentang pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan dari pendidikan nasional Indonesia. Maka untuk menata pelaksanaan pendidikan, pada tahun 1974 "Presiden mengeluarkan petunjuk-petunjuk pelaksanaannya, dalam bentuk instruksi Nomor 15/1974, bahwa pembinaan pendidikan umum adalah tanggungjawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan pendidikan agama merupakan tanggungjawan Menteri Agama, dan dalam pelaksanaan perlu adanya kerjasama antara departemen-departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Dalam Negeri, dan Departemen Agama[303], yang dikenal dengan SKB tiga menteri dan ruh dari instruksi ini tetap mengandung dualisme pengelolaan pendidikan. Untuk itu, perlu mencermati upaya pembaruan pendidikan Islam di Indonesia, sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1. Upaya Pembaruan Pendidikan Islam

Pada awal Orde Baru, ada dua masalah pokok yang dihadapi umat Islam berupa krisis pemikiran Islam dan orientasi pembangunan yang merupakan ide posetif para pendukung Orde Baru. Ide ini disebut dengan *modernisasi* yang dianggap oleh umat Islam sebagai suatu permasalahan, sebab mengandung unsur proses

---

[302]Machnun Husein, *Pendidikan Islam dalam Lintasan Sejarah*, hlm. 25-26.
[303]Ibid, hlm. 27.

westernisasi"[304]. Maka persoalan *pertama,* berupa "krisis pemikiran yang disebabkan pengaruh dikotomi pemahaman terhadap Islam. Islam dipahami sebagai suatu sistem kepercayaan yang bersifat doktrinal, dan oleh karena itu Islam cenderung *ortodok* dan sakral. Dipihak lain, Islam dipakai sebagai suatu sistem nilai yang harus memberikan dasar dalam proses sosiologis, dan karena itu Islam bersifat *otopraktis* dan *profan*"[305]. Persoalan *kedua,* pada awalnya terjadi counter ide para pendukung Orde Baru, yaitu terjadi de-ideologisasi dan de-parpolisasi sebagai suatu sikap membungkan perilaku politik Orde Lama, dengan orientasi pembangunan sebagai pola kebijaksanaan dan modernisasi sebagai tema senteral pendekatannya, telah menambah agenda persoalan bagi umat Islam"[306]. Kemudian persoalan yang muncul adalah sekitar term "modernisasi" yang implikasinya pada umat Islam, sebab orientasi pembangunan dengan pendekatan modernisasi yang dilakukan pemerintah Orde Baru menyangkut bidang ekonomi, sosial-politik, dan pendidikan. Kebijakan itu menimbulkan sikap reaktif kalangan umat Islam, karena ada kehawatiran jika kemudian pendekatan tersebut dapat menimbulkan proses sekularisasi umat dalam pemahaman keagamaan. Muncul reaksi umat Islam selain terhadap modernisasi dan juga terhadap kebijaksanaan pemerintah yang menempatkan umat Islam pada posisi marginal dan hal ini juga berpengaruh pada bidang pendidikan, sehingga pendidikan Islam berada pada posisi "marginal" atau posisi "kelas dua" dalam sistem pendidikan di Indonesia.

Pemikiran reaktif terjadi pada upaya modernisasi pendidikan Islam dan hal ini merupakan pemikiran-pemikran yang kontrakproduk, karena upaya tersebut sebenarnya telah lama berlangsung sejak awal abad 20 dan masih berlangsung terus sampai sekarang. Modernisasi sistem dan kelembagaan pendidikan Islam telah

---

[304]Fachry Ali dan Bachtiar Effendi, *Merambah Jalan Baru Islam..*, hlm. 98.

[305]Agus Khumaedy, *"Orientasi Pemikiran Islam Indonesia Era Orde Baru"*, MUKADDIMAH, Jurnal Studi Islam dan Informasi PTAIS, No. 3 Th.III Juli 1997, ISSN: 0853-6759, Kopertais Wil.III dan PTAIS DIY, Yogyakarta, hlm. 65.

[306]Ibid, hlm. 65-66.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dilakukan sekitar tahun 1926 dengan pembentukan Pondok Modern Gontor Ponorogo. Gagasan yang berada dibelakang pembentukan Pondok tersebut adalah adanya kesadaran perlunya memodernisasi sistem dan kelembagaan pendidikan Islam yang tidak hanya mengadopsi sistem dan kelembagaan pendidikan modern Belanda, melainkan dengan memodernisasi sistem dan kelembagaan pendidikan Islam"[307] dan kenapa persoalan modernisasi menjadi persoalan bagi umat Islam. Jawabannya, berada pada pemahaman tentang "term modernisasi" yang selalu diidentikan dengan pemikiran Barat atau ke Barat-Baratan, sehingga selalu menimbulkan sikap reaktif umat Islam dalam upaya modernisasi pendidikan Islam.

Sebagai contoh, ketika pemerintahan mengeluarkan Kepres nomor 34 tahun 1972 dan inpres nomor 15 tahun 1974 yang mengatur kebijaksanaan umum dibidang tanggung jawab fungsional pendidikan dan latihan. Maka ada rasa kehawatiran dari kalangan pengasuh lembaga pendidikan Islam, dalam hal ini pengelolah madrasah dan pimpinan pondok pesantren yang masih dihinggapai trauma masa lalu, sehingga menolak pembinaan madrasah dan pondok pesantren dialihkan dari kontrol dan tanggung jawab Menteri Agama"[308]. Ada kehawatiran terhadap pemikiran yang mendorong perubahan sistem dan kelembagaan pendidikan Islam kearah sistem dan kelembagaan yang bersifat sekuler, maka kepres dan inpres tersebut "ditafsirkan oleh sebagian pengasuh pondok pesantren dan madrasah dapat mengubah fungsi madrasah menjadi lembaga pendidikan yang sekuler, apabila pembinaannya diserahkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Maka berkenaan dengan sikap dan reaksi tersebut, pemerintah mengeluarkan SKB 3 Manteri, tentang upaya peningkatan mutu pendidikan madrasah sebagai konsekuensi dari usaha modernisasi tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[307] Azyumardi Azra, *Pembaruan Pendidikan Islam...*, hlm. 12-14.
[308] Marwan Sarijo, *Bunga Rampai Pendidikan Agama...*, hlm. 27.

Modernisasi pendidikan Islam, apabila dilihat dari perpektif perkembangan kebudayaan dan peradaban dunia, kelihatan merupakan suatu keniscayaan. Sebab sistem dan kelembagaan pendidikan Islam tradisional sulit untuk *surveve* tanpa modernisasi. Maka muncul istilah modernisasi selalu saja menjadi problem serta muncul kritik dari masyarakat muslim. Apabila diperhatikan ada tiga kelompok masyarakat yang selalu melakukan penilaian dan kritik terhadap upaya modernisasi sistem dan kelembagaan pendidikan Islam tersebut, yaitu: [1] *Kelompok pertama*, menganggap perlu mempertahankan pendidikan Islam sebagai lembaga "*tafaqqahu fiddien*[309]. Oleh karena itu, kelompok ini, berpendirian bahwa lembaga pendidikan Islam dapat diharapkan sebagai tempat menyiapkan kader-kader Islam yang mampu dan terampil sebagai praktisi keagamaan dalam masyarakat. Sebagian masyarakat dan orang tua "masih merasa terikat dengan pendidikan Islam atau merasa berkewajiban memberikan pelajaran agama bagi anak-anaknya"[310]. Selain itum sebgain orang tua merasa sangat perlu untuk mengirimkan atau memasukkan anak-anaknya kelembaga pendidikan Islam untuk belajar dan mendalami agama dan mengenai persoalan jaminan masa depan dan lapangan kerja tidak dipermasalahkan. Maka atas "dasar pemikiran dan pandangan tersebut, kelompok ini menghendaki bahwa apapun langkah yang diambil dalam pembaruan pendidikan Islam seperti pembaruan sistem pengajaran dan kurikulm, hendaknya tidak menggeser atau menghilangkan peran dan fungsi pokok pendidikan Islam sebagai lembaga *tafaqqahu fiddien*. Karena menurut pandangan kelompok ini, apabila isi kurikulum pendidikan Islam dalam hal ini madrasah sudah mengacu pada pendidikan sekuler, maka aspek "salafnya" akan hilang dan lembaga pendidikan Islam tidak mampu lagi mengantarkan anak-anak mereka kepada penguasaan ilmu-ilmu agama Islam"[311]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[309]Ibid, hlm. 161.

[310]Muslih Usa,(Edi), *Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hlm.12.

[311]Marwan Sarijo, *Bunga Rampai Pendidikan Agama...*, hlm. 161-162.

seperti yang diharapkan. [2] *Kelompok kedua*, "berpendapat bahwa pendidikan atau keberadaan madrasah telah menyebabkan terjadinya dualisme pendidikan dan dikotomi antara "pengetahuan umum" dan "pengetahuan agama". Kelompok ini juga berpendapat bahwa madrasah cenderung mencetak warga negara yang eksklusif. Keberadaan sistem pendidikan madrasah perlu dipertanyakan kembali"[312]. Pandangan dan penilaian kelompok ini terhadap pendidikan Islam tidak jauh berbeda dengan pandangan kaum penjajah kolonial Belanda yang penuh dengan prasangka dan diskriminatif. [3] *Kelompok ketiga*, berpendapat bahwa pendidikan Islam sebagai suatu lembaga alternatif bagi umat Islam, "dengan fungsinya sebagai lembaga *tafaqqahu fiddien* atau suatu bentuk pendidikan yang berkrakter Islam"[313]. Lembaga pendidikan Islam tetap diperlukan oleh masyarakat Indonesia, tetapi yang menjadi prihatin bagi kelompok ketiga ini adalah kenyataan yang dihadapi lembaga pendidikan Islam, yaitu : persoalan kekurangan sumber daya manusia baik kuantitas dan kualitas di bawah standar, sarana dan prasarana pendidikan, serta sumber belajar pada umumnya masih jauh dari memadai, jauh dari standar, terutama lembaga-lembaga pendidikan Islam swasta, walaupun tidak menutup kemungkinan ada beberapa lembaga pendidikan Islam swasta lebih baik dari lembaga pendidikan Islam negeri.

Dengan demikian pandangan, penilaian dan kritik terhadap pendidikan Islam dapat dipahami sebagai usaha modernisasi pendidikan Islam. Tetapi setiap usaha pengembangan pendidikan Islam selalu saja ada hambatan dan tidak pernah memenuhi keinginan dan harapan semua pihak. Setiap langkah pengembangan baik dilakukan penyelenggara pendidikan Islam maupun pemerintah selalu mengandung kekurangan atau kelemahan. Upaya pengembangan pendidikan Islam selalu dilakukan, pada tahun 1958/1959 Departemen Agama, telah mencoba untuk pertama

---

[312]Ibid, hlm. 162.
[313]Ibid, hlm. 165.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

kali melakukan terobosan dalam pembaruan sistem pendidikan Islam, dengan "memperkenalkan konsep Madrasah Wajib Belajar [MWB]. Konsep Madrasah Wajib Belajar, peserta didik tidak hanya diajarkan pengetahuan agama dan pengetahuan umum saja, tetapi juga keterampilan dan kemahiran. Disain kurikulum Madrasah Wajib Belajar diorientasikan pada tiga keselarasan perkembangan, berupa perkembangan otak atau akal, perkembangan hati atau perasaan, dan perkembangan keterampilan. Tetapi langkah ini cukup drastis, karena pada saat itu disain kurikulum madrasah sebagian besar masih terfokus pada pengajaran agama dan sistemnya belum mengacu pada standardisasi yang ditetapkan oleh Pemerintah, yang memungkinkan madrasah dapat diakui telah melaksanakan wajib belajar sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954"[314].

Tanaknya, cita-cita Madrasah Wajib Belajar belum dapat dilaksanakan, karena pada saat itu Departemen Agama lebih banyak memberikan perhatian pada sekolah-sekolah kedinasan seperti PGA, PHIN, IAIN dari pada secara khusus dan intensif mengembangkan Madrasah Wajib Belajar tersebut. Selain itu, pemikiran tentang pola pengembangan pendidikan Islam masih didominasi oleh pemikiran lama, yaitu pembaruan sistem pengajaran dan kurikulum hendaknya tidak menggeser atau menghilangkan fungsi pokok pendidikan Islam, sebagai lembaga *tafaqqahu fiddien.* Maka lembaga pendidikan Islam, dalam hal ini madrasah tetap mempertahankan model pendidikannya, karena ada rasa kehawatiran apabila melakukan perubahan tentu akan mengacu pada model pendidikan sekuler, sehingga aspek asli sebagai lembaga *tafaqqahu fiddien* dikhawatirkan akan hilang.

Dengan pertimbangan persoalan di atas, maka pemerintah mengeluarkan SKB tiga Menteri sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan Islam dalam arti madrasah, sebagai usaha pencapaian tujuan pendidikan nasional dalam

---

[314]Ibid, hlm. 166.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

mencerdaskan kehidupan bangsa, memberikan kesempatan yang sama kepada tiap-tiap warga negara Indonesia untuk memperoleh penghidupan layak dan memberikan kesempatan untuk mendapatkan pengajaran yang sama bagi tiap-tiap warga negara Indonesia. Tetapi alasan inipun dianggap kurang penting sebagai latar belakang diterbitkannya SKB tersebut dan tetap saja ada kekuatiran dari kalangan "pengasuh pesantren" dan "penyelenggara madrasah" terhadap pemikiran tersebut yang dapat mendorong perubahan sistem pendidikan Islam kearah sistem yang bersifat sekuler. Tetapi apabila dicermati secara posetif dari SKB tiga menteri tersebut, sebenarnya kebijaksanaan tersebut memberi peluang pada lembaga-lembaga pendidikan Islam agar dapat memiliki posisi yang sama dengan lembaga-lembaga pendidikan umum di bawah koordinasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Maka sebenarnya, ruh SKB 3 Menteri tersebut dapat menguntungkan pendidikan Islam, yaitu: *Pertama,* upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah dan mempersamakan kedudukan madrasah dengan sekolah-sekolah umum setingkat dengan sekolah-sekolah yang ada di bawah koordinasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kedua*, sebagai usaha untuk "menghilangkan dualisme pendidikan di Indonesia. Artinya, SKB tersebut bagaimanapun telah memudarkan dikotomi, walaupun disisi lain dualisme secara kelembagaan masih berjalan terus, karena penyelenggaraan madrasah tetap berada di bawah tanggung jawab Menteri Agama"[315]. *Ketiga*, SKB 3 Mentri tersebut, merupakan salah satu usaha untuk menciptakan sistem pendidikan nasional yang integral atau terpadu, sehingga para lulusan madrasah akan mendapatkan kesempatan sama seperti lulusan sekolah-sekolah lainnya untuk melanjutkan atau pindah ke sekolah-sekolah umum dari tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi. *Keempat,* dengan SKB 3 Menteri tersebut upaya untuk meruntuhkan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[315]Ibid, hlm. 27.

"temboh" sikap pemisahan antara pendidikan Islam dengan pendidikan umum selama ini, sehingga mutu pendidikan baik pendidikan umum dan Islam dianggap sama.

Tetapi ada sisi negatif yang perlu dicermati, yang berimplikasi pada posisi pendidikan Islam, yaitu : *Pertama,* "mutu pendidikan Islam dalam hal ini madrasah, selama ini memang benar-benar dianggap "tidak sederajat" dengan sekolah-sekolah umum lainnya, sehingga kiranya perlu ditingkatkan mutunya"[316]. *Kedua,* pada sisi kelembagaan masih terdapat pemisahan pengelolaan pendidikan sampai sekarang ini. Dengan semikian pada satu segi dapat dinilai bahwa SKB tersebut dapat menguntungkan penyelenggaraan pendidikan Islam, tetapi pada sesi lain jelas merupakan masalah bagi penyelenggaraan pendidikan Islam. Artinya, lembaga pendidikan madrasah perlu penyiapan dan merekrut sumber daya guru yang profesional dan harus memperbaharui sikap serta orientasi yang disesuaikan dengan maksud peningkatan mutu tersebut. Selain itu, persoalan manajemen dan organisasi lembaga pendidikan Islam harus disesuaikan dengan tuntutan tersebut. Tetapi pada kenyataannya, sampai saat ini kemajuan pendidikan Islam dalam hal ini madrasah seperti yang diharapkan SKB tersebut belum maksimal. Akibat lain dari persamaan ini, adalah "madrasah masih tetap berstatus sebagai sekolah agama namun kadar pelajaran agamanya menjadi 30 % dari keseluruhan mata pelajaran dan 70% lainnya diisi dengan pelajaran umum sesuai dengan standar sekolah umum"[317].

Hampir tidak ada perbedaan yang mencolok antara sekolah umum dan madrasah. Identitas madrasah sebagai sekolah agama hanya 30% dari keseluruhan mata pelajaran. Komposisi kurikulum 30% agama dan 70% umum untuk madrasah "dipandang kurang berimbang, sehingga akan menurunkan mutu madrasah baik *Tsanawiyah* maupun *'Aliyah*[318] sebagai sekolah agama. Kebijakan terhadap

---

[316]Machnun Husein, *Pendidikan Islam dalam Lintasan Sejarah,* hlm. 30.

[317]Muslih Usa, *Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita ...,* hlm. 2.

[318]Suroyo, "*Pendidikan Islam di Indonesia Merancang Masa Depan*", UNISIA, Majalah Ilmiah, UII, Nomor: 12 Tahun XIII Triwulan, ISSN: 0215-1412, hlm. 62.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

madrasah sangat berbeda dengan pesantren, karena pesantren memiliki komposisi kurikulum 90% pelajaran agama Islam. Maka muatan "persamaan" pada SKB tersebut, sebenarnya menimbulkan pertanyaan, manakah yang dapat dikategori sebagai lembaga pendidikan Islam? Apakah madrasah dengan komposisi kurikulum 30% pengajaran ilmu-ilmu agama Islam, ataukah lembaga "pendidikan pesantren" yang dianggap layak sebagai lembaga pendidikan Islam, karena komposisi kurikulumnya 90% didominasi oleh pengajaran ilmu-ilmu agama Islam. Walaupun disisi lain, juga muncul masalah, "karena terlalu menekankan pada ilmu-ilmu agama, maka dapat diperkirakan *output*-nya akan mengalami kesulitan dalam mewujudkan kesejahteraan bagai umat - sebagaimana dicita-citakan Islam"[319]. Arinya kemampuan *output* untuk berperan lebih banyak dalam mengisi lapangan kerja bidang padat modal, seperti pada pertambangan, telekomunikasi, listrik, transportasi dan lain-lain, akan sangat ketinggalan dan kurang mampu, karena output tidak dipersiapkan untuk itu.

Dari uraian di atas, menegaskan bahwa madrasah-madrasah yang dikategori dalam SKB tiga menteri adalah "sekolah umum" yang "berciri khas agama Islam". Hal ini, tertuang dalam PP Nomor 28 tahun 1990, disebutkan bahwa Madrasah *Ibtidaiyah* dan Madrasah *Tsanawiyah* adalah "sekolah umum" seperti SD dan SMP yang bercirikan Islam. Keputusan Mendikbud Nomor 0489 tahun 1992, juga disebutkan bahwa Madrasah Aliyah adalah sekolah setingkat Sekolah Menengah Umum yang berciri khas agama Islam. Mochtar Buchari, menyatakan kebijakan ini menimbulkan problem, karena madrasah-madrasah akan kehilangan sebagian besar kreatifitas pedagogisnya"[320]. Kemudian, implikasinya muncul Ide menyelenggarakan "Madrasah Aliyah Program Khusus" [MAPK], dengan memberi bobot lebih besar pada mata pelajaran agama, sebagai koreksi terhadap madrasah SKB tersebut. Munawir Sjazali

[319]Ibid, hlm. 3.

[320]Suroyo, *Pendidikan Islam di Indonesia Merancang* ..., hlm. 62.

[Menteri Agama Waktu itu], juga "menjelaskan bahwa penyelenggaraan MAPK merupakan koreksi terhadap Madrasah SKB. Oleh karenanya, MAPK akan menjadi titik fokus perhatian Departemen Agama, sedangkan Madrasah Aliyah jurusan umum akan menjadi sekolah umum. Maka setelah Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989, jenis-jenis pendidikan yang ada terdapat pendidikan keagamaan dan salah satu bentuk pendidikan keagamaan adalah MAPK atau Madrasah Aliyah Keagamaan. Artinya, pendidikan yang berfungsi mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan dan menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama Islam"[321].

Dengan perundang-undangan tersebut, kurikulum lembaga pendidikan Islam seperti Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasal Aliyah, selain MAPK atau madrasah keagamaan, pada dasarnya sama dengan kurikulum atau bahan kajian sekolah umum yang sederajat. Persoalan yang dihadapi lembaga pendidikan Islam adalah persoalan "integrasi", yaitu bagaimana mengintegrasi dan memasukan program pendidikan agama dan pendidikan umum dalam kurikulum dan dalam praktek pendidikan sehari-hari di sekolah. Integrasi merupakan proses pendidikan agama dan pendidikan umum sebagai dua kegiatan yang bersifat *konvergensi*. Artinya, sama-sama bermuara pada perkembangan diri siswa dan penanaman nilai-nilai ajaran Islam pada diri peserta didik. Steenbrink, menyatakan bahwa "konsep *konvergensi* sebagai usaha untuk memperluas pendidikan agama di sekolah"[322], artinya usaha memasukkan pelajaran agama pada kurikulum sekolah umum dan memasukkan pelajaran umum dalam kurikulum madrasah. Apabila konsep "integratif antara pendidikan agama dan pendidikan umum itu dapat dikembangkan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[321]Marwan Sarijo, *Bunga Rampai Pendidikan Agama...*, hlm. 169.
[322]Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah*, hlm. 95.

maka setiap jam kegiatan pendidikan agama akan memperkaya program pendidikan umum dan begitu juga sebaliknya"[323].

Lembaga-lembaga pendidikan Islam dapat memainkan peranannya dalam hal "inovasi sistem pendidikan formal untuk mengintegrasikan pendidikan agama ke dalam pendidikan umum atau sebaliknya dan dapat dituangkan dalam buku-buku teks pelajaran"[324]. Maka, apabila mengingkan pendidikan Islam mampu bersaing dengan jenis pendidikan lain, maka yang harus dilakukan adalah inovasi kurikulum, metodologi, manajemen dan organisasi serta sumber daya manusia, sehingga pendidikan Islam akan unggul dan konpetitif dalam persaingan. Namun hal yang perlu dievalusi bahwa SKB tiga Menteri tersebut sudah berusia kurang lebih 14 tahun sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989, tetapi kenyataannya kemajuan madrasah belum tampak, keluhan-keluhan para guru madrasah-madrasah masih sering didengar terutama dalam melaksanakan kurikulum dan perkembangan madrasah belum memperlihatkan kemajuan yang berarti.

2. Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional

Perkembangan Pendidikan Nasional Indonesia akhir ini, sebenarnya telah memberi peluang yang cukup besar terhadap perkembangan pendidikan Islam. Hal ini dapat dilihat dari dua segi yaitu filsafat pendidikan dan praktek pendidikan. Dalam filsafat pendidikan Nasional ada tiga tahap penting, yakni : *Pertama,* sebelum kemerdekaan pendidikan cenderung orientasi kepada nasionalisme dan klonialisme. *Kedua,* pasca kemerdekaan, pendidikan Nasional cenderung kepada humanisme kultural-sekular. *Ketiga,* pada masa era "Orde Baru", pendidikan ke arah "tinggal landas", sehingga warna pendidikan nasional cenderung kepada *humanisme teistik*"[325]. Maka dalam praktek pendidikan, "keuntungan pendidikan Islam adalah pada tujuan

---

[323]Suroyo, *Pendidikan Islam di Indonesia Merancang ...,* hlm. 62.

[324]Ibid, hlm. 61.

[325]HM. Chabib Thoha, "*Strategi Pendidikan Islam Menyongsong Abad XXI*", makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional Ilmu Pendidikan Islam, Cirebon, 31 Agustus s/d 1 September 1995, hlm. 3.

pendidikan Nasional, yaitu untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga diperlukan eksistensi pendidikan agama dalam pendidikan formal [di sekolah], informal [luar sekolah] dan eksistensi lembaga pendidikan keagamaan diakui sama jenis dngan pendidikan lainnya"[326]. Tetapi apabila dilihat dari segi kemampuan pendidikan Islam untuk berperan lebih banyak dalam mengisi lapangan bidang padat modal, maka pendidikan Islam masih sangat ketinggalan kerena pendidikan Islam belum didisain untuk mengisi lapangan tersebut.

Dari uraian di atas, Zarkowi Soejoti mengemukakan, bahwa pendidikan Islam paling tidak mempunyai tiga pengertian, yaitu: *Pertama,* lembaga pendidikan Islam itu pendiri dan penyelenggaraannya didorong oleh hasrat mengejawantahkan nilai-nilai ajaran Islam yang tercermin dalam nama lembaga pendidikan itu dan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. Dalam pengertian ini, Islam dilihat sebagai sumber nilai yang harus diwujudkan dalm kehidupan lembaga pendidikan yang bersangkutan. *Kedua,* lembaga pendidikan yang memberikan perhatian dan menyelenggarakan kajian tentang Islam yang tercermin dalam program kajian sebagai ilmu dan diperlakukan seperti ilmu-ilmu lain yang menjadi program kajian lembaga pendidikan Islam yang bersangkutan. *Ketiga,* mengandung kedua pengertian di atas, dalam ari lembaga tersebut memperlakukan Islam sebagai sumber nilai bagi sikap dan tingkah laku yang harus tercermin dalam penyelenggaraan maupun sebagai bidang kajian yang tercermin dalam program kajiannya[327].

Apabila ditinjau dari pengelolaan pendidikan, terdapat dua model yang selama ini dikenal sebagai lembaga pendidikan Islam. "*Pertama,* lembaga pendidikan Islam yang dikelolah pihak pemerintah atau dikelolah pihak swasta, tetapi aturan pelaksanaannya sepenuhnya menurut pemerintah. *Kedua,* lembaga pendidikan Islam yang diorganisir oleh masyarakat secara formal pelaksanaannya juga dirancang

[326]Ibid, hlm. 3.

[327]A. Malik Fadjar, *Reformasi Pendidikan Islam,* (Jakarta:Fajar Dunia, 1999), hlm. 31.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

sendiri, tetapi tidak lepas dari undang-undang atau peraturan pemerintah. Lembaga pendidikan Islam yang pertama menggunakan sistem pendidikan modern dan lembaga pendidikan Islam yang kedua lebih dikenal dengan sistem tradisional"[328]. Lembaga-lembaga pendidikan Islam yang dikelolah oleh pemerintah maupun swasta yang mengikuti aturan pemerintah, disebut dengan Madrasah, mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi, sedangkan lembaga pendidikan Islam yang dikelolah oleh masyarakat dan atau swadaya sendiri adalah Pondok Pesantren. Selain itu, perkembangan pendidikan Islam di Indonesia juga terdapat "dua arus utama, yaitu: *Pertama,* sistem dan kelembagaan pendidikan Islam yang sebenarnya merupakan pendidikan umum dengan penekanan seadanya pada aspek-aspek pengajaran Islam, dan yang termasuk ke dalam kategori ini adalah madrasah pasca UUSPN 1989, yang secara eksplisit menyatakan bahwa madrasah-madrasah adalah "sekolah umum" yang bercirikan keagamaan. *Kedua,* sistem dan kelembagaan pesantren yang dalam banyak hal telah dimodernisasi dan disesuaikan dengan tuntutan perkembangan"[329]. Pesantren yang telah dimodernisasi dan disesuaikan dengan tuntutan perkembangan, sebenarnya termasuk salah satu lembaga pendidikan Islam yang belum terakomodir dalam sistem pendidikan nasional. "Padahal lembaga Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan "tertua" di Indonesia yang telah berhasil mencerdaskan kehidupan bangsa jauh sebelum kebangkitan nasional"[330].

Lembaga pendidikan Pondok Pesantren mempunyai basis pada pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu tradisional Islam dan lebih berakar kuat dan mendalam. Oleh sebab itu lebih *acceptable* bagi banyak kaum muslimin. Sistem dan kelembagaan pesantren yang dalam banyak hal telah dimodernisasi dan disesuaikan dengan tuntutan perkembangan. Maka sejak tahun 1970-an, pesantren telah banyak

---

[328]Muslih Usa, *Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita* ..., hlm. 1.
[329]Azyumardi Azra, *Pembaruan Pendidikan Islam*..., hlm. 13.
[330]HM. Chabib Thoha, *Strategi Pendidikan Islam*..., hlm. 7.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

mengubah sistem dan kelembagaan pendidikannya. Perkembangan terakhir ini banyak lembaga pendidikan pesantren tidak hanya mengembangkan madrasah saja, tetapi juga mendirikan sekolah-sekolah umum dan universitas umum di lingkungan pesantren. "Dengan perkembangan pesantren seperti itu, timbul pertanyaan apa yang tersisa dari aspek kelembagaan pesantren itu, jawabannya adalah *boarding syistem-nya* dan B*oarding syistem* ala pesantren ini ternyata menemukan momentum popularitas baru. Artinya, beberapa sekolah seperti SMU Madania di Parung, Bogor, yang didirikan Yayasan Wakaf Paramadina pada tahun 1996, telah mengadopsi *boarding syistem* pesantren untuk mengembangkan "sekolah unggulan" Islam"[331]. Kemudian, beberapa perguruan tinggi Islam juga mengembangkan "program pesantren mahasiswa" sebagai program unggulan dengan mengadopsi *boarding syistem* ala pesantren walaupun tidak secara keseluruhan dan beberapa sekolah-sekolah umum mulai dari SD sampai SLTA juga mengadopsi *boarding syistem* ala pesantren dengan melaksanakan "program pesantren kilat" bagi siswa-siswanya pada masa liburan *Ramadlan*.

Sistem Pendidikan Nasional sebagai alat dan tujuan amat penting dalam perjuangan mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Sistem Pendidikan Nasional dilaksanakan secara semesta, menyeluruh, dan terpadu. Dengan demikian sistem pendidikan nasional yang dilakukan secara semesta, dalam arti terbuka bagai seluruh rakyat dan "setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan"[332], serta berlaku di seluruh wilayah negara. Sedangkan dilaksanakan secara menyeluruh, dalam arti mencakup semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan, dan dilaksanakan secara terpadu, dalam arti adanya saling keterkaitan antara pendidikan nasional dengan seluruh usaha pembangunan nasional[333]. Maka dengan

---

[331]Ibid, hlm. 13.

[332]Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, *Sistem Pendidikan Nasional*, Bab III, Pasal 5.

[333]Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, hlm. 84.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Sistem Pendidikan Nasional ini, posisi pendidikan keagamaan diakui sama dengan jenis pendidikan lainnya, yaitu "jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional.....Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peran yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan"[334]. Maka dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989, pendidikan Islam "terintegrasi" ke dalam sistem pendidikan nasional, sebagai usaha untuk menghilangkan dualisme sistem pendidikan yang selama ini berjalan. Masalah-masalah pendidikan terutama yang menyangkut kurikulum pendidikan, semuanya di bawah koordinasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Konsep "integrasi" pendidikan, sebenarnya pernah dikemukakan oleh Daoed Joesoef ketika menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebelum keluar UUSPN. Beliau menyatakan bahwa persoalan integrasi, "bukan sekedar satu sistem pendidikan nasional tetapi juga perlunya satu pengelolaan tunggal sistem tersebut"[335]. Sayangnya konsep tersebut belum menjadi wacana, mungkin menjadi "emberio" perkembangan pendidikan sekarang ini, dengan diundangkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan demikian, undang-undang SPN tersebut merupakan wadah formal terintegrasinya pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan Islam mendapatkan peluang serta kesempatan untuk terus berkembang[336] dan peluang untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Apabila peluang ini disia-siakan, masyarakat akan mempertanyakan seberapa jauh kontribusi posetif yang telah diberikan pendidikan Islam dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[334]Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, *Sistem Pendidikan Nasional*, Bab IV, pasal 11, ayat (1) dan (6).

[335]Anwar Jasin, *Pembaruan Kurikulum Sekolah Dasar*,(Jakarta: BP, 1987), hlm. 69.

[336]Peluang berpartispasi dapat dilihat pada pasal 1 ayat, pasal 4, pasal 10, pasal 11 ayat 1,pasal 39 ayat 2, dan pasal 47 ayat 2.

Posisi pendidikan Islam terhadap pendidikan umum tidak lagi mencerminkan dualisme seperti sebelum keluarnya UUSPN. Pengelolaan dan pembinaan pendidikan Islam mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi hampir dalam semua hal sudah terpadu. Misalnya, "Madrasah *Ibtidaiyah* dan *Tsanawiyah* disebutkan dalam peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1990, adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Kurikulumnya secara kualitatif sama dengan sekolah umum yang setingkat dan pengelolaannya tetap berada di bawah Departemen Agama"[337] dan hal ini hanya merupakan persoalan teknis. Seperti yang dikemukakan Mochtar Naim, bahwa "pengelolaan hanya soal teknis. Artinya, pengelolaan pendidikan agama [Madrasah] tetap dilakukan Menteri Agama karena pertimbangan praktis dan juga pertimbangan lain adalah segi psikologis dan sejarah. Kemudian dalam hal kurikulum yang bersifat nasional yang berlaku untuk seluruh satuan pendidikan yang ada di Indonesia, ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri lain dapat menetapkan kurikulum untuk satuan pendidikan di lingkungan masing-masing setelah mendapat pelimpahan wewenang dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian yang menyangkut soal akreditasi dan pengawasan mutu dan efesiensi pendidikan khususnya pendidikan tinggi, termasuk perguruan tinggi agama Islam yang pengelolaan dan pembinaan oleh Departemen Agama"[338], tetap di bawah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan Islam yang dikelolah Departemen Agama, seperti Madrasah *Ibtidaiyah* dan *Tsanawiyah* seperti disebutkan di atas, pada dasarnya termasuk "Sekolah Umum", sedangkan Madrasah Aliyah [keagamaan] dan Perguruan Tinggi Agama Islam baik negeri maupun swasta di dalam UUSPN masuk dalam jenis pendidikan keagamaan, dan dikategori pendidikan khusus. Dengan demikian, Madrasah Aliyah dan Perguruan Tinggi Agama Islam dari sudut UUSPN, adalah pendidikan spesialisasi untuk mempersiapkan calon ahli agama atau tenaga

[337]Marwan Sarijo, *Bunga Rampai Pendidikan Agama...*, hlm. 29.
[338]Ibid, hlm. 29.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ahli di bidang agama Islam. Madrasah Aliyah dan "Perguruan Tinggi Agama Islam" tidak dapat dikatakan sebagai jenis pendidikan "agama" yang dipertentangkan dengan pendidikan "umum"[339].

Persoalan yang dihadapi lembaga pendidikan Islam adalah menyangkut dengan "identitas" pendidikan Islam yaitu "munculnya persoalan berat - tapi mendesak untuk diselesaikan para pemikir dan praktisi pendidikan Islam yaitu menyangkut "identitas" atau "distingsi" Islam pada madrasah-madrasah pasca-UUSPN 1989". Perkembangan madrasah pasca UUSPN 1989 adalah sekolah-sekolah umum lalu dinamakan identitas dan distingsi Islamnya. Apa yang dilakukan madsarah sebagai lembaga pendidikan Islam juga dilakukan sekolah-sekolah umum. "Distingsi madrasah tidak memadai sama sekali jika hanya terletak pada guru-gurunya yang memulai setiap pelajaran dengan ucapan "basmalah" dan "salam"[340], atau adanya mushala atau fasilitas keagamaan lainnya di lingkungan madrasah itu. Sebab semua ini, juga sering ditemukan di sekolah-sekolah umum. Perkembangan terakhir memperlihatkan "kebanyakan lembaga-lembaga pendidikan umum yang beradasrkan Islam. Lembaga-lembaga ini merupakan kegiatan pendidikan Islam yang dise-lenggarakan melalui pengembangan suasana pendidikan yang bernafaskan Islam dilembaga-lembaga pendidikan yang bersifat umum"[341], misalnya SD sampai dengan perguruan tinggi Muhammadiyah, SMA al-Ma'arif, STM Piri dan sebagainya. Peranan jenis lembaga pendidikan umum ini, bersama-sama dengan madrasah mengadakan inovasi dalam sistem pendidikan formal yang meliputi metode pengajaran, inovasi dibidang kurikulum, alat-alat pengajaran, materi pengajaran dan juga usaha mengintegrasikan program pendidikan agama ke dalam pendidikan umum dan sebaliknya. Untuk itu, perlu dicari dan dirumuskan pada tingkat epistimologi dan juga

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[339]Ibid, hlm. 31.
[340]Ibid, hlm. 16.
[341]Suroyo, *Pendidikan Islam di Indonesia Merancang...*, hlm. 62.

aksiologis ilmu-ilmu yang diajarkan di madrasah atau lembaga-lembaga pendidikan Islam.

3. Pendidikan Islam pada Era Reformasi

Pada tahun 1998 terjadi transformasi budaya ke arah demokratis kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Bangsa Indonesia telah mengalami berbagai transformasi budaya yang seluruhnya ditunjang oleh sistem pendidikan, baik pendidikan kolonial, prakemerdekaan maupun pendidikan nasional yang dibangun sejak 1945[342] sampai sekarang ini. Oleh karena itu, krisis yang mendera dan menimpa masyarakat Indonesia dewasa ini di antaranya juga disebabkan oleh krisis pendidikan itu sendiri.

Apabila mencermati pelaksanaan pendidikan pada era Orde Baru, bagaimanapun memiliki andil yang telah menciptakan pendidikan yang dapat memberikan kepatuhan, keseragaman terhadap pola pikir siswa sehingga suasana kritis, inovatif tidak terjadi. "Kekebasan individual dipasung dan tujuan pendidikan menjadi sangat intelektualistis dan diatur dengan model EBTANAS, sehingga aspek-aspek pembentukan kepribadian meliputi aspek-aspek konatif, afektif, dan psikomotorik telah dibaikan. Pendidikan telah dimanipulasi untuk tujuan-tujuan intelektualisme yang sempit, dan telah mematikan inisiatif serta kemandirian berpikir manusia"[343]. Pada bidang pendidikan agama, Romo Y.B. Mangunwijaya, mengkritik pendidikan Orde Baru yang "menekankan *ortodoksi* dalam pelajaran agama yang diidentikkan dengan iman, dan bukan *ortopraktis,* artinya bagaimana mewujudkan iman dalam tindakan nyata operasional"[344]. Pendidikan Islam juga mengalami nasib yang sama, yaitu materi dan kurikulumnya lebih menekankan pada kemanpuan kognitif dengan penekanan pada *ortodoksi* dalam pelajaran agama Islam dan bukan

---

[342]H.A.R.Tilaar,*Pendidikan ,Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia,*(Bandung:RemajaqRosdakarya,1999),hlm.9-10.

[343]Ibid, hlm. 10.

[344]Romo Y.B. Mangunwijaya, *"Mengkritisi Manajemen Pendidikan Nasional Selama Orde Baru Yang Menekankan Ortodoksi dalam Pengajaran Agama"*, Kompas, 12 Februari 1999.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pada *ortopraktis*, artinya bagaimana mewujudkan iman dalam tindakan nyata operasional dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, pendidikan dan pendidikan Islam pada masa Orde Baru *output*-nya lebih diproyeksi pada penyiapan tenaga-tenaga siap pakai dan murah dengan kadar kualitas yang tidak memadai untuk berperan dalam persaingan global.

Mencermati kondisi sekarang ini dengan munculnya kekerasan, perkelahian pelajar, masyarakat menghakimi sendiri serta berbagai macam bentuk perilaku kekerasan menggambarkan bangsa ini sedang sakit. Apakah ada sesuatu yang "salah" dari reformasi? Apakah sistem pendidikan yang "salah" karena hanya "membentuk" manusia-manusia yang tidak "mampu", sehingga menjadi beban dan brutal ataukah merupakan ekses dari kebijakan dan paraktik pendidikan di masa "rezin Orde Baru yang otoriter yang telah melahirkan sistem pendidikan yang tidak mampu melakukakn pemberdayaan masyarakat secara efektif. Secara kuantitatif patut diakui bahwa rezim ini memang telah mampu menunjukkan prestasi yang cukup baik di bidang pendidikan. Kemajuan-kemajuan pendidikan secara kuantitatif dapat kita rasakan selama Orde Baru"[345], tetapi keberhasilan kuantitatif ini belum terlihat pemberdayaan masyarakat secara luas sebagai cermin dari keberhasilan suatu sistem pendidikan dan tidak pernah terjadi. "Mengapa demikian! Karena Orde Baru, setelah lima tahun pertama berkuasa secara sistematis telah menyiapkan skenario pemerintahan yang memiliki visi dan misi utama untuk melestarikan kekuasaan dengan berbagai cara dan metode. Akibatnya, sistem pendidikan kemudian dijadikan sebagai salah satu instrumen untuk menciptakan *safetynet* bagi pelestarian kekuasaan. Visi dan misi pelestarian kekuasaan itu, melahirkan kebijakan pendidikan yang bersifat *straight jacket*"[346].

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[345]Suyanto, "*Paradigma Baru Sistem Pendidikan Nasional Abad 21*",makalah disampaikan pada Seminar Nasional Mencari Paaradigma Baru Sistem Pendidikan Nasional Mnghadapi Melenium Ketiga,ISPI dan Primagama,Yogyakarta,9 November 1999, hlm.7.

[346]Ibid, hlm. 7.

Pendidikan belum dapat diharapkan untuk membangun dan memberdayakan masyarakat, karena pendidikan yang berjalan pada masa Orde Baru dan produknya sebatas pada sosialisasi nilai dengan pola hafalan dengan kebebasan dan kreativitas dipasung. Tilaar, menyatakan bahwa "sistem pendidikan nasional sangat erat kaitannya dengan kehidupan politik bangsa pada saat itu. Selama Orde Baru telah tercipta suatu kehidupan bangsa yang tidak sesuai dengan cita-cita UUD 1945. Pemerintah Orde Baru yang represif telah menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang tertekan, tidak kritis, bertindak dan berpikir dalam acuan suatu struktur kekuasaan yang hanya mengabdi kepada kepentingan sekelompok kecil rakyat Indonesia"[347].

Diakui atau tidak, produk pendidikan Orde Baru, masih berpengaruh sampai sekarang ini. Sementara kehidupan politik bangsa sudah mengalami perubahan memasuki "era reformasi". Paradigma yang digunakan pada era Orde Baru tidak dapat digunakan pada era rfoemasi, karena era reformasi menuntut kembali kedaulatan rakyat yang telah hilang. Tetapi, sementara ini dalam usaha merubah kehidupan masyarakat baik pada pola pikir, pandangan, dan tindakan masih menggunakan paradigma Orde Baru. Maka, pada era reformasi ini, seharusnya pendidikan nasional termasuk pendidikan Islam sudah harus dikembalikan kepada fungsinya untuk memberdayakan masyarakat dengan mengembalikan kedaulatan rakyat membangun dirinya sendiri. "Pendidikan nasional perlu direformasi untuk mewujudkan visi baru masyarakat Indonesia, yaitu suatu masyarakat madani Indonesia"[348], Begitu juga pendidikan Islam, karena pendidikan Islam mempunyai kedudukan sama dalam sistem pendidikan nasional[349], maka pendidikan Islam sudah

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[347]H.A.R. Tilaar, *Pendidikan ,Kebudayaan dan Masyarakat* ..., hlm. 4.
[348]Ibid, hlm. 4.
[349]Undang-Undang No. 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

harus diupayakan untuk direformasi, sebab posisi pendidikan juga tidak terlepas dari kehidupan politik bangsa yang sedang mengalami perubahan.

Tanpaknya, perlu menyusun langkah-langkah untuk melakukan reformasi pendidikan. Kita harus melepaskan diri dari paradigma Orde Baru sebab pola pikir kita, pandangan, cara bertindah dan berbuat sekarang ini masih menggunakan paradigma produk pendidikan Orde Baru. Maka untuk "menghapuskan ciri dan ekses dari proses dan hasil pendidikan selama Orde Baru, pemerintah harus menyusun berbagai kebijakan reformasi secara substansial dan kebijakan tersebut perlu memperhatikan berbagai persoalan yang sedang dan akan dihadapi oleh bangsa ini"[350]. Menjawab hal tersebut, pemerintah telah memiliki tujuh poin arah kebijakan program pendidikan nasional yang digariskan dalam GBHN 1999-2004, yaitu : *Pertama,* mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi. *Kedua,* meningkatkan kemampuan akademik dan profesional. *Ketiga,* melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk kurikulum. *Keempat,* memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah. *Kelima,* melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan, dan manajemen. *Keenam*, meningkatan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik masyarakat maupun pemerintah, dan *Ketujuh*, mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah"[351].

Apabila strategi serta arah kebijakan program pendidikan yang telah dicanakan dapat direalisasikan dengan baik, maka dapat diharapkan pendidikan kita secara "makro" cukup menjanjikan bagi penyediaan sumber daya manusia yang benar-benar memiliki keunggulan konpetitif di masa akan datang. Tujuh poin sasaran kebijakan

---

[350]Suyanto, "*Paradigma Baru Sistem Pendidikan Nasional Abad 21*"..., hlm. 8.
[351]Garis-Garis Besar Haluan Negara [GBHN], 1999-2000, hlm. 23-24.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

program pendidikan nasional tersebut, perlu dijabarkan secara operasional dengan menata kembali kondidisi pendidikan kita dengan ditempuh berbagai langkah baik pada bidang manajemen, perencanaan, sampai pada praksis pendidikan di tingkat mikro. Beberapa usulan langkah-langkah reformasi pendidikan tersebut mampu menyongsong "masyarakat madani". Langkah-langkah tersebut, yaitu : *Pertama*, merumuskan visi dan misi pendidikan nasional kita yaitu : "[1] Pendidikan hendaknya memiliki visi yang berorientasi pada demokrasi bangsa sehingga memungkinkan terjadinya proses pemberdayaan seluruh komponen masyarakat secara demokratis. [2] Pendidikan hendaknya memiliki misi agar tercapai partisipasi masyarakat secara menyeluruh sehingga secara mayoritas seluruh komponen bangsa yang ada dalam masyarakat menjadi terdidik". *Kedua*, isi dan substansi pendidikan dan pendidikan Islam, yaitu : [1] Pendidikan dasar hendaknya mengacu pada pengembangan potensi dan kreativitas siswa dalam totalitasnya. Dengan demikian, tolok ukur keberhasilan pendidikan dasar tidak semata-mata hanya mengacu pada NEM, tetapi persoalan-persoalan yang terkait dengan paradigma baru menegnai keberhasilan seseorang perlu mendapatkan perhatian secara *emplementatif*. [2] Pendidikan di jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi hendaknya membuka kemungkinan untuk terjadinya pengembangan individu secara *vertikal* dan *horizontal*. Pengembangan vertikal mengacu pada struktur keilmuan, sedangkan pengembangan horizontal mengacu pada keterkaitan dan relevansi antar bidang keilmuan. [3] Pendidikan tinggi hendaknya jangan semata-mata hanya berorientasi pada penyiapan tenaga kerja, tetapi lebih jauh dari itu harus memperkuat kemampuan dasar mahasiswa yang memungkinkan untuk berkembang lebih jauh, baik sebagai individu, anggota masyarakat, maupun sebagai warga negara dalam konteks kehidupan yang global. [4] Pendidikan dan pendidikan Islam perlu mengembangkan sistem pembelajaran yang egaliter dan demokratis agar tidak terjadi pengelompokan dalam kelas belajar atas dasar kemampuan akademik. [5] Pengembangan sekolah perlu menggunakan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pendekatan *community based education*. Dalam model in, sekolah dapat dikembangkan dengan memperhatikan budaya dan potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. [6] Untuk menjaga relevansi *outcame* pendidikan, perlu diimplemantasikan filsafat rekonstruksionisme dalam berbagai tingkat kebijakan dan praksis pendidikan. Dengan berorientasi pada filsafat ini, pendidikan dan pendidikan Islam akan mampu merekonstruksi berbagai bentuk penyakit sosial, mental dan moral yang ada dalam masyarakat, sehingga pada akhirnya akan dapat ditanamkan sikap-sikap toleransi etnis, rasial, agama, dan budaya dalam konteks kehidupan kosmopolis dan plural[352].

Ketiga, manajemen dan anggaran yaitu : [1] Perguruan tinggi perlu dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip otonomi dan accountability quality assurance. Dengan prinsip ini pada akhirnya perguruan tinggai harus mempertanggungjawabkan kinerja kepada masyarakat, orang tua, mahasiswa, maupun pemerintah. [2] Manajemen pendidikan sekolah dasar hendaknya berada dalam satu sistem agar terjadi efisienei administrasi dan efisiensi pembinaan akademik para guru. [3] Pendidikan tinggi hendaknya diselenggarakan dengan menggunakan prinsip-prinsip menajemen yang fleksibel dan dinamis agar memungkinkan setiap perguruan tinggi untuk berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing dan tuntutan eksternal yang dihadapinya. [4] Pengembangan akademik di perguruan tinggi perlu fleksibilitas yang tinggi agar tercipta kondisi persaingan akademik yang sehat. [5] Guru dan dosen harus diberdayakan secara sistematik dengan melihat aspek-aspek, antara lain : kesejahteraan, rekruitmen dan penempatan, pembinaan dan pengembangan karier, dan perlindungan profesi. [6] School based management perlu dikembangkan dalam kerangka desentralisasi atau devolusi pendidikan, agar lembaga-lembaga pendidikan dapat mempertahankan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[352]Suyanto, "*Paradigma Baru Sistem Pendidikan Nasional Abad 21*, ..., hlm. 8.

akuntabilitasnya terhadap stake holder pendidikan nasional. [7] Pendidikan hendaknya mendapatkan proporsi alokasi dana yang cukup memadai agar dapat mengembangkan program-program yang berorientasi pada peningkatan mutu, relevansi, efisiensi dan pemerataan. Untuk itu, perlu ada peningkatan anggaran secara signifikan sehingga mencapai 25% dari APBN yang sedang berjalan. Karena anggaran pendidikan di Indonesia sangat rendah sehingga tidak mempu untuk mendukung berbagai inovasi di bidang pendidikan[353].

Usulan-usulan reformasi pendidikan dan pendidikan Islam tersebut, apabila dapat dilaksanakan secara terencana, sistimatis, mendasar dan realisasi yang nyata, maka bangsa Indonesia siap untuk memasuki melienium ketiga, era global, menuju masyarakat madani. Sebab fondasi dan pilar-pilar pendidikan yang dibangun akan mampu berdiri kokoh menghadapi badai dan gelombang sebesar apa pun yang akan terjadi. Untuk mengantisipasi perubahan dan langkah-langkah yang diusulkan tersebut, menurut hemat peneliti, pendidikan Islam perlu dipersiapkan dengan melakukan terobosan pemikiran kembali suatu konsep pendidikan Islam yang baru yang dapat menjawab tantangan dan perubahan masyarakat. Pendidikan Islam perlu dikembalikan kepada fungsinya yaitu memberdayakan masyarakat. Pendidikan Islam perlu melakukan pembaruan dengan mewujudkan visi dan misi baru, karena apabila kita ingin melakukan perubahan pendidikan Islam menuju masyarakat madani harus mempunyai visi dan misi yang jelas, "yaitu visi dan misi yang sesuai dengan konstitusi ialah mewujudkan hak-hak asasi manusia dan mengembangkan tanggung jawab anggota masyarakat yang dicita-citakan"[354].

Sistem pendidiakn Islam "haruslah senantiasa mengorientasikan diri kepada menjawab kebutuhan dan tantangan yang muncul dalam masyarakat kita sebagai

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[353]Ibid, hlm. 11-13.

[354]H.A.R. Tilaar, *Pendidikan ,Kebudayaan dan Masyarakat* ..., hlm. 4.

konsekuensi logis dari suatu perubahan"[355] yang terjadi. Oleh karena itu, pendidikan Islam di Indonesia yang posisinya sebagai sub-sistem pendidikan nasional, juga ikut mengalami perubahan politik bangsa pada era reformasi ini dituntut untuk merumuskan kembali visi dan misi pendidikan Islam yang baru untuk mewujudkan perannya yaitu membangun manusia dan masyarakat Indonesia yang mempunyai identitas berdasarkan budaya Islam Indonesia menuju masyarakat madani yang dicita-citakan bangsa Indonesia.

Tetapi pesoalan mendasar yang dihadapi pendidikan Islam adalah dualisme sistem pendidikan, baik pada kelembagaan maupun pada proses pendidikannya. Dualisme ini muncul sebagai akibat dari usaha-usaha pembaruan pendidikan Islam, sebagai upaya mengejar ketinggalan dan kekurangan dari dunia Barat dalam segala aspek kehidupan, terutama aspek pendidikan. Maka dalam usaha pembaruan tersebut terdapat kecenderungan dualisme dalam sistem pendidikan Islam, yaitu :

Pertama, pola pembaruan pendidikan Islam yang berorientasi pada pola pendidikan modern Barat [Eropa]. Pendidikan Barat yang didatangkan ke negeri-negeri Muslim, disokong dan didukung sepenuhnya oleh semua pemegang pemrintah, adalah sistem yang dipinjam dari dunia Barat. Puncak dari sistem ini adalah universitas modern yang bersifat sekuler dan karena tidak mengindahkan agama dalam pendekatannya terhadap pengetahuan. Orang-orang yang didik melalui sistem pendidikan baru ini, yang dikenal sebagai pendidikan modern, pada umumnya tidak menyadari akan tradisi dan warisan klasik mereka sendiri[356]. Umat Islam berpendapat bahwa pada dasarnya kekuatan dan kesejahteraan hidup yang dialami bangsa-bangsa Barat adalah sebagai hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang dicapai. Untuk itu, apa yang dicapai oleh bangsa-bangsa Barat

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[355]Azyumardi Azra, *Pembaruan Pendidikan Islam Tradisi...*, hlm. 57.

[356]Syed Sajjad Husain dan Syed Ali Asraf, *Crisis Muslim Education, (Krisis Pendidikan Islam)*, terj., Rahmani Astuti, (Bandung: Risalah, 1986), hlm. 21-22.

sekarang, tidak lain merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang pernah berkembangan di dunia Islam, alasan ini bukan merupakan alasan apologi, tetapi karena umat Islam memang sudah lemah dan statis dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Maka untuk mengembalikan supermasi, kekuatan, dan kesejahteraan umat Islam, harus menguasai kembali kekuatan tersebut dengan meniru atau mengambil oper modernisasi yang dilakukan bangsa-bangsa Barat. Penguasaan pengetahuan modern yang dikembangkan oleh bangsa-bangsa Barat "harus dicapai melalui proses pendidikan, untuk itu harus meniru pola pendidikan yang dikembangkan oleh dunia Barat, sebagaimana dunia Barat pernah meniru dan mengembangkan sistem pendidikan dunia Islam"[357]. Usaha pembaruan pendidikan Islam adalah dengan jalan mendirikan sekolah-sekolah dengan pola Barat, baik sistem maupun isi pendidikannya.

Kedua, pola pembaruan pendidikan Islam yang berorientasi pada pola pendidikan "tardisional". Sistem ini membatasi diri pada pengetahuan klasik, belum menunjukkan minat yang sungguh-sungguh pada cabang-cabang pengetahuan baru untuk memperoleh pengetahuan yang penting dalam sistem pendidikan Barat. Sistem ini berguna untuk pengetahuan teologi klasik, tetapi para ahli teologi klasik yang dilahirkan dari sistem inipun tidak cukup mendapat bekal pengetahuan intelektual atau suatu metoda guna menjawab tantangan-tantangan dari peradaban teknologi modern yang tak mengenal Tuhan[358]. Pola ini membatsi dirinya pada pengetahuan klasik, belum menunjukkan minat yang sungguh-sungguh pada cabang-cabang pengetahuan baru yang telah muncul di dunia Barat atau pada metode-metode baru untuk memperoleh pengetahuan yang penting dalam sistem pendidikan Barat. Pola ini memang berguna untuk pengetahuan teologi klasik, tetapi para ahli teologi klasik yang dilahirkan dari pola ini tidak cukup mendapat bekal pengetahuan intekeltual atau suatu

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[357]Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam,* hlm. 37-38.

[358]Syed Sajjad Husain dan Syed Ali Ashraf, *Crisis Muslim Education,* ..., hlm. 21-22.

metode guna menjawab tantangan-tantangan dari peradaban teknologi modern. Pembaharuan ini lebih didasarkan pada pandangan bahwa, "sesunggunya Islam sendiri merupakan sumber bagi kemajuan dan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan modern"[359]. Islam, dianggap sudah penuh dengan ajaran-ajaran yang pada hakekatnya mengandung potensi untuk membawa kemajuan dan kesejahteraan serta kekuatan bagi umat manusia. Pandangan ini didasarkan pada pengalaman, bahwa umat Islam sendiri telah membuktikan dan mengalami kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan, pada masa-masa sebelumnya. Karena itu menurut pandangan umat Islam, bahwa "di antara sebab-sebab kelemahan umat Islam adalah mereka tidak lagi melaksanakan ajaran agama Islam secara semestinya. Ajaran-ajaran Islam yang telah menjadi sumber kemajuan dan kekuatan ditinggalkan, dan menerima ajaran-ajaran Islam yang sudah tidak murni lagi"[360].

Ketiga, persoalan yang dihadapi pendidikan Islam di Indonesia adalah bidang kajian, mutu pengelolaan, mutu prodak, peraingan lapangan kerja, dan persaingan dengan pendidikan umum. Pendidikan Islam disatu sisi telah berusaha memperbarui sistem dan pengelolaan untuk menyamakan dengan sistem yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga pendidikan umum, tetapi disisi lain tetap mempertahankan sistem yang dikembangkan pada "abad pertengahan". Pendidikan Islam membatasi diri pada pengetahuan klasik, belum menunjukkan minat terhadap cabang-cabang pengetahuan baru untuk memperoleh pengetahuan yang dikembangkan dalam sistem pendidikan modern sekarang ini. Sistem klasik berguna untuk pengetahuan teknologi klasik, tetapi kurang mampu untuk menjawab tantangan peradaban teknologi modern sekarang ini, sehingga mutu prodak pendidikan Islam selalu dipertanyakan untuk bersaing di era global sekarang ini. Untuk itu, pendidikan Islam harus berusaha

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[359]Zuhairin, dkk., *Sejarah Pendidikan Islam*, hlm. 121.
[360]Ibid, hlm. 121.

melakukan pembaruan dengan mencoba meninggalkan atau merevisi kajian-kajian klasik abad pertengahan, memperbaiki sistem kurikulum, manajemen, mutu proses, metodologi pengajaran, merubah orientasi kajian-kajian yang disesuaikan dengan pengetahuan dan teknologi modern, untuk mencapai mutu prodak pendidikan yang diinginkan dan mampu bersaing di era global.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB III
KONSEP PENDIDIKAN ISLAM

A. Konsep Pendidikan dalam Islam

Sebelum membahas konsep pendidikan dalam Islam, terlebih dahulu membahas "Apa itu pendidikan?" Berbicara tentang pendidikan sebenarnya sangat tergantung kepada pandangan terhadap "manusia". Apakah manusia dilihat dari hakikat, sifat-sifat atau karakteristiknya, dan tujuan hidup manusia. "Apakah manusia dilihat sebagai kesatuan badan dan jasmani; badan, jiwa dan roh, atau jasmani dan rohani? Apakah manusia pada hakekatnya dianggap memeiliki kemampuan bawaan (*innate*) yang menentukan perkembangannya dalam lingkungannya, atau lingkungannyalah yang menentukan (dominan) dalam perkembangan manusia? Bagimanakah kedudukan individu dalam masyarakat? Apakah tujuan hidup manusia? Apakah manusia dianggap hanya hidup sekali di dunia ini, ataukah hidup lagi di hari kemudian [akhirat]? Demikian beberapa pertanyaan filosofis"[1] yang perlu dijawab.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, tentu memerlukan jawaban untuk menentukan pandangan terhadap hakekat dan tujuan pendidikan. Dari sini sebagai pangkal perbedaan rumusan pendidikan atau timbulnya aliran-aliran pendidikan seperti ; pendidikan Islam, Kristen, Liberal, progresif atau pragmatis, komunis, demokratis, dan lain-lain, tetapi dalam keanekaragaman pandangan tentang pendidikan, "terdapat titik-titik persamaan tentang pengertian pendidikan, yaitu pendidikan dilihat sebagai suatu proses, karena dengan proses seseorang [dewasa] secara sengaja dapat mengarahkan pertumbuhan atau perkembangan seseorang [yang belum dewasa] sesuai dengan nilai-nilai[2] dan pandangan hidupnya. Dari pandangan ini, timbul pertanyaan "apakah yang dimaksud dengan pendidikan Islam itu?

---

[1]Anwar Jasin, "*Kerangka Dasar Pembaharuan Pendidikan Islam:Tinjauan Filosofis*", makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Jakarta, 30 Oktober 1985, hlm.2.

[2]Ibid, hlm. 2.

1. Pendidikan Islam

Diskursus pendidikan tentu tidak terlepas dari tuntutan rumusan atau definisi, tetapi biasanya secara umum definisi yang dikemukan para ahli tentu berbeda-beda satu sama lain, karena dipengaruhi oleh sudut pandang atau "dipengaruhi oleh pandangan dunia [*weltanschauung*] masing-masing. Namun pada dasarnya semua pandangan yang berbeda itu bertemu dalam semacam kesimpulan awal, bahwa pendidikan merupakan suatu proses penyiapan generasi muda untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara lebih efektif dan efisien"[3]. Berarti, pendidikan lebih ditekankan pada aktivitas yang sengaja dilakukan untuk mengembangkan individu secara penuh[4]. M.J. Langeveld, merumuskan pendidikan sebagai upaya manusia dewasa membimbing yang belum kepada kedewasaan"[5]. Ahmad D. Marimba, merumuskan pendidikan sebagai bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh sipendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani siterdidik menuju terbentuknya keperibadian yang utama[6].

Mengenai "kedewasaan" yang dimaksudkan Langeveld, bukan akhir dari suatu upaya pendidikan, tetapi merupakan terminal pendidikan antara orang dewasa dengan orang yang belum dewasa, karena pendidikan dalam pengertian bimbingan belum selesai seluruhnya. Ahmad D Marimba, menyatakan bahwa "kedewasaan bukan berarti sama dengan tujuan akhir pendidikan yaitu "kepribadian yang utama". Menurutnya, untuk mencapai kepribadian yang utama, "kedewasaan" memang perlu dicapai terlebih dahulu, karena untuk memiliki "kepribadian utama" diperlukan tenaga-tenaga kepribadian yang lebih berkembang sampai taraf kedewasaan"[7]. Dalam usaha untuk menuju "kepribadian utama", pendidikan masih tetap berlangsung terus, merupakan usaha pengembangan pribadi dalam semua aspeknya, baik dilakukan diri

---

[3]Azyumardi Azra,*Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*,Cet.I,(Jakarta:Logo Wacana Ilmu,1999), hlm.3.

[4]Ali Ashraf, *Horison Pendidikan Islam*, terj., Sori Seregar, Cet. III, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1996), hlm. 25.

[5]Kartini Kartono, *Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Pradaya Paramita, 1997), hlm.11.

[6]Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Cet. III, (Bandung: al-Maarif, 1979), hlm. 20.

[7]Ibid, hlm. 23.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

sendiri, lingkungan masyarakat, maupun orang lain yang mencakup "pembinaan aspek jasmani, akal, dan hati". Lodge, menyatakan "pendidikan pada dasarnya menyangkut seluruh pengalaman hidup. Maka pendidikan adalah kehidupan dan kehidupan adalah pendidikan"[8]. Apabila demikian, maka pendidikan "merupakan suatu proses panjang dalam upaya menghantarkan manusia untuk menjadi seorang yang kaya spiritual dan intelektual, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya disegala aspek dan menjalani kehidupan yang dicita-cita dan bertujuan pasti"[9]. Dengan demikian, pendidikan merupakan suatu proses yang dilakukan secara sadar dengan tujuan untuk membentuk kepribadian yang utuh meliputi aspek jasmani, rohani dan totalitas kepribadian manusia.

Beberapa pengertian pendidikan yang dikemukakan di atas, dinilai kurang luas cakupannya. Rumusan pengertian pendidikan dalam pengertian yang lebih luas adalah "meliputi perbuatan atau semua usaha generasi tua untuk mengalihkan (melimpahkan) pengetahuannya, pengalamannya, kecakapan serta keterampilannya kepada generasi muda, sebagai usaha untuk menyiapkan mereka agar dapat memenuhi fungsi hidupnya, baik jasmaniah maupun rohaniah"[10]. Dari defenisi ini, pendidikan diartikan sebagai usaha untuk menyiapkan generasi muda agar dapat memenuhi fungsi hidupnya. Sejalan dengan pandangan ini adalah Hasan Langgulung, bahwa "pendidikan pada umumnya dikatakan sebagai pranata yang menjalankan tiga fungsi sekaligus : *Pertama*, menyiapkan generasi muda untuk memegang peranan-peranan tertentu dalam masyarakat di masa datang. *Kedua*, mentransfer (memindahkan) pengetahuan sesuai peranan yang diharapkan, dan *Ketiga*, mentransfer nilai-nilai dalam rangka melahirkan keutuhan dan kesatuan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[8]Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hlm.25 & 32.

[9]Ahmad Syafii Maarif, "*Pendidikan Islam dan Proses Pemberdayaan Umat*", Jurnal Pendidikan Islam [JPI], No. 2 Th. 1 Oktober 1996, ISSN : 0853-7437, Fakultas *Tarbiyah* UII, Yogyakarta, hlm. 6.

[10]Zuhairini, dkk., *Filsafat Pendidikan Islam*, Cetakan II, (Jakarta: *Bumi Aksara*,1995), hlm. 92.

masyarakat sebagai prasyarat bagi kelangsungan hidup [*survive*] masyarakat dan per*adaban*"[11].

Pandangan yang dikemukakan Hasan Langgulung, pada butir kedua dan ketiga, lebih memberikan pengertian bahwa pendidikan bukan hanya *transfer of knouledge* tetapi juga sekaligus sebagai *transfer of value*"[12]. Senada dengan pandangan ini, adalah Ahmad D. Marimba, yang menyatakan bahawa "perkataan bimbingan dan pertanggungjawab tersiratlah pula adanya sistem-sistem ketentuan yang menjadi dasar bimbingan serta pertanggungjawab dan sistem-sistem ketentuan ini disebut "sistim nilai-nilai". Jadi pendidikan berarti pula bimbingan kearah pemilikan "nilai-nilai" itu dan bertanggungjawab atas pilihan dan keputusannya sesuai dengan "nilai-nilai" yang dimilikinya"[13] dan sistem nilai yang dimaksud adalah nilai kemasyarakatan, nilai kesusilaan, dan nilai keagamaan. Oleh karena itu baik - buruknya sikap dan perbuatan ditentukan berdasarkan "nilai-nilai" tersebut, dan berdasarkan sistem nilai tersebut dapat ditentukan batas "kepribadian yang utama" seseorang.

Uraian di atas, menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya "sekedar pengajaran", tetapi upaya "transformasi nilai", menuju pendewasaan, pembentukan, bimbingan kepribadian dengan segala aspek yang dicakupnya. Sedangkan pengajaran lebih berorientasi pada pembentukan tukang-tukang atau para spesialis yang terkurung dalam ruang spesialisanya yang sempit. Karena itu perhatian dan minatnya lebih bersifat teknis. Azyumardi Azra, memberi contoh dengan sistem pendidikan di Barat. Artinya pendidikan di Barat sekarang ini sering disebut-sebut mengalami krisis, itu tak lain karena proses yang terjadi dalam pendidikan tak lain daripada sekedar pengajaran. Pendidikan yang berlangsung dalam suatu schooling system tak lebih dari suatu proses transfer ilmu dan keahlian dalam kerangka tekno-

---

[11]Hasan Langgulung, *Beberapa Pemikiran Pendidikan Islam*, (Bandung: Al-Maarif, 1980), hlm. 92.

[12]M. Rusli Karim, *"Pendidikan Islam Sebagai Upaya Pembebasan Manusia"*, dalam: Muslih Usa (Editor), Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta, Cet.I, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hlm. 27.

[13]Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, hlm. 25.

struktur yang ada, akibatnya, pendidikan katakanlah pengajaran menjadi suatu komoditi belaka dengan berbagai implikasinya terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan[14].

Dari uraian tersebut, terlihat "perbedaan pendidikan dengan pengajaran terletak pada penekanan pendidikan terhadap pembentukan kesadaran dan kepribadian anak didik di samping transfer ilmu dan keahlian. Dengan proses semacam ini tentu suatu bangsa atau negara akan dapat mewariskan nilai-nilai keagamaan, kebudayaan, pemikiran dan keahlian kepada generasi mudanya, sehingga mereka betul-betul siap menyongsong kehidupan"[15]. Ki Hajar Dewantara [1967:42] tokoh pendidikan nasional Indonesia, menyatakan bahwa "pendidikan pada umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran [intelek], dan jasmani anak-anak, selaras dengan alam dan masyarakatnya"[16]. Dari sini tercermin bahwa tekanan utama proses pendidikan adalah pada "sistem nilai yang diwariskan", karena dengan sistem nilai tersebut, kita dapat menentukan batasan "kepribadian utama", sebagai sasaran pendidikan. Dengan demikian, "pendidikan dapat diartikan sebagai bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya "kepribadian yang utama"[17].

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pendidikan dipandang sebagai "salah satu aspek yang memiliki peran utama dalam membentuk generasi muda agar memiliki kepribadin utama, sedangkan pada pengertian tersebut juga terdapat unsur-unsur yang ada dalam proses pendidikan, yaitu adanya usah atau kegiatan bersifat membimbing dan dilakukan secara sadar, ada pembimbing, ada yang dididik, dan mempunyai dasar dan tujuan"[18]. Maka dari unsur-unsur tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa pendidikan merupakan

---

[14]Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi...*, hlm. 3.
[15]Ibid, hlm. 4.
[16]Ki. Hadjar Dewantara, *Masalah Kebudayaan; Kenang-kenangan Doktor Honoris Causa*, (Yogyakarta: 1967), hlm.42.
[17]Zuhairini, dkk., *Metodologi Pendidikan Agama*, Cet. Pertama, (Solo: Ramadhani ,1993), hlm. 9.
[18]Ibid, hlm. 9.

usaha untuk membimbing yang dilakukan secara sadar terhadap orang yang dibimbing [peserta didik] menuju terbentuknya "kepribadian utama" berdasarkan sistem nilai-nilai yang dipakai dalam pendidikan.

Berdasarkan rumusan-rumusan di atas, timbul pertanyaan "apakah yang dimaksud dengan pendidikan Islam itu?" Jawabannya bukanlah merupakan persoalan mudah, karena selama ini pandangan dan pengertian pendidikan Islam yang banyak diketahui adalah pengertian pendidikan secara umum, kemudian dihubungkan dengan Islam sebagai suatu sistem keagamaan yang menimbulkan pengertian-pengertian baru, yang secara implisit menjelaskan karakteristik-karakteristik yang dimilikinya yaitu nilai-nilai ajaran Islam. Ahmad Tafsir, manyatakan bahwa "kata "Islam" dalam "pendidikan Islam" menunjukkan warna pendidikan tertentu, yaitu pendidikan yang berwarna Islam, pendidikan yang Islami, yaitu pendidikan yang berdasarkan Islam"[19]. Dengan demikian, pembahasan pendidikan lebih menunjukkan pada corak atau warna pendidikan tertentu, yaitu pendidikan yang bercorak Islam atau pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam. Pandangan ini ada benarnya, karena selama ini defenisi pendidikan Islam menggunakan pengertian pendidikan secara umum, kemudian dihubungkan dengan nilai-nilai Islam.

Ahmad D. Marimba, menyatakan bahwa "pendidikan berarti pula bimbingan kerah pemilikan nilai-nilai"[20]. Maka dari prinsip nilai inilah, kemudian para ahli merumuskan pengertian pendidikan Islam sebagai upaya "bimbingan" manusia yang didasarkan pada sistem nilai Islam yang dianutnya. "Sistem nilai yang dipakai di dalam pendidikan itu pulalah, yang membuat kita dapat membedakan antara pendidikan kemasyarakatan, pendidikan kesusilaan, kegamaan, dan berdasarkan sistem nilai ini pulalah kita membedakan pendidikan Islam dari pendidikan-pendidikan lainnya"[21]. Berdasarkan "parameter sistem nilai-nilai" yang dipakai, kita dapat menjawab

[19]Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif* ..., hlm. 24.
[20]Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, hlm.25.
[21]Ibid, hlm. 25-26.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pertanyaan tersebut di atas. Untuk itu, perlu mencermati dan mengkaji kembali beberapa pengertian pendidikan yang sudah banyak dikemukakan oleh para ahli pendidikan Islam sebagai wacana, dalam rangka mencermati upaya "pembaruan pendidikan Islam" untuk menjawab permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dalam kehidupan masyarakat madani Indonesia.

Hasan Langgulung, merumuskan pendidikan Islam sebagai "suatu proses spritual, akhlak, intelektual, dan sosial yang berusaha membimbing manusia dan memberinya nilai-nilai, prinsip-prinsip dan teladan ideal dalam kehidupan yang bertujuan mempersiapkan kehidupan dunia dan akhirat"[22]. Dari pengertian ini, tercermin bahwa tekanan utama pendidikan pada upaya bimbingan manusia dengan memberikan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan teladan ideal dalam kehidupan, untuk mempersiapkan kehidupan manusia. Proses pendidikan lebih menekankan proses spritual, akhlak, intelektual, dan sosial, untuk mempersipakn hidup manusia di dunia dan akhirat. Maka secara umum, kemudian pendidikan Islam sering diartikan dengan pewarisan atau pembentukan (bimbingan) nilai-nilai keislaman [termasuk transfer ilmu dan keahlian] yang mengarah pada keseimbangan dan kesesrasian perkembangan hidup manusia baik pada aspek jasmani maupun aspek rohani untuk menuju terbentunya "insan kamil".

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pendidikan Islam diartikan sebagai suatu kegiatan yang mengarahkan, membimbing dengan sengaja perkembangan seseorang [temasuk transfer ilmu dan keahlian] sesuai atau sejalan dengan nilai-nilai Islam untuk mencapai kebahagian dunia dan akhirat. Ahmad Tafsir, menyatakan "pendidikan Islam bagi saya ialah bimbingan yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Bila disingkat, pendidikan Islam ialah bimbingan terhadap seseorang agar ia menjadi muslim semaksimal mungkin"[23]. Maka

---

[22]Hasan Langgulung, *Beberapa Pemikiran*, hlm. 62.
[23]Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif*, hlm. 32.

tekanan utama pengertian ini pada "usaha bimbingan" terhadap seseorang agar menjadi muslim yang maksimal dan tercermin pendidikan adanya usaha bimbingan dari seseorang [dewasa] kepada seseorang [anak] agar ia dapat berkembang secara maksimal berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam yang merupakan sasaran pendidikan.

Pengertian pendidikan lebih rinci, adalah yang dikemukakan M.Yusuf al-Qardhawi, bahwa "pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya; akal dan hatinya; rohani dan jasmaninya manusia untuk hidup baik dalam kedaan damai maupun perang, dan menyiapkan untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatannya, manis dan pahinya"[24]. Pendidikan Islam diartikan sebagai upaya pendidikan manusia seutuhyna menjadi "insan kamil". Pandangan ini lebih menitik beratkan pada pendidikan sebagai upaya pembentukan akal dan hati, rohani dan jasmani manusia, untuk hidup dan berperan di masyarakat dalam keadaan apapun, sebagai sasaran hasil pendidikan. Hasan Langgulung, menyatakan bahnwa pendidikan Islam sebagai suatu "proses penyiapan generasi-generasi muda untuk mengisi peran, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat"[25]. Artinya dalam pengertian ini tercermin unsur penyiapan generasi muda untuk mengisi perannya di masyarakat dengan pengetahuan dan nilai-nilai Islam untuk mewujudkan fungsi manusia yaitu berkarya di dunia dan mendapatkan hasilnya di akhirat, sebagai tujuan dan dasar pendidikan Islam. Pandangan Hasan Langgulung ini senada dengan Ahmad D. Marimba, bahwa "pendidikan Islam sebagai bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian yang utama menurut ukuran-ukuran Islam"[26]. Pendidikan Islam diartikan sebagai upaya bimbingan jasmani dan rohani menurut hukum-hukum Islam untuk mencapai terbentuknya "kepribadian utama" menurut Islam. Maka fokus utama dari pandangan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[24]Yusuf Al-Qardhawi, *Pendidikan Islam dan Madrasah Al-Banna*, Terj., H. Bustamai A. Gani dan Zainal Abidin Ahmad, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hlm. 157.
[25]Hasan Langgulung, *Beberapa Pemikiran*, hlm. 94.
[26]Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, hlm. 20.

ini adalah upaya "bimbingan jasmani" dan "rohani" berdasarkan ajaran Islam untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia atau "kepribadian utama". Artinya pendidikan Islam dapat diartikan sebagai upaya pembentukan individu berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam, agar dapat mencapai derajat manusia "unggul", berakhlak mulia dan mampu menunaikan fungsinya sebagai *khalifah fil-ardi* untuk mewujudkan kebahagian di dunia dan di akhirat. Kemudian, Abdurrahman An-Nahlawi, juga menyatakan bahwa, pendidikan Islam sebagai "upaya untuk mengantarkan manusia pada perilaku dan perbuatan manusia yang berpedoman pada syariat Allah"[27]. Pandangan ini lebih menitik beratkan pada membimbing atau mengatarkan manusia pada perilaku yang berpodoman pada ajaran Islam.

Syeh Sajjad Husain dan Syed Ali Ashraf, merumuskan pendidikan Islam sebagai "suatu pendidikan yang melatih perasaan murid-murid dengan cara begitu rupa sehingga dalam sikap hidup, tindakan, keputusan, dan pendekatan mereka terhadap segala jenis pengetahuan, dipengaruhi sekali oleh nilai spritual dan sangat sadar akan nilai etis Islam"[28]. Dari pandangan ini, tercermin upaya untuk melatih perasaan murid dalam membentuk sikap, tindakan, keputusan dan mempelajari jenis pengetahuan harus didasarkan pada nilai-nilai spritual dan nilai etis Islam. Pandangan ini senada dengan pandangan Zuhairini, dkk., yang menyatakan bahawa "pendidikan Islam adalah usaha yang diarahkan kepada pembentukan kepribadian anak yang sesuai dengan ajaran Islam atau suatu upaya dengan ajaran Islam, memikir, memutuskan dan berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam, serta bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam"[29]. Pandangan ini lebih menitik beratkan pada pembentukan kepribadian anak yang akan menjadikannya memikir, memutuskan, berbuat, bertanggungjawab sesuai dengan nilai-nilai Islam, sebagai sasaran akhir

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[27] Abdurrahman An-Nahlawi, *Ushulut Tarbiyah wa Asalabih fi Baiti wa Madrasati wal Mujtama'*, Dar al-Fikr al-Mu'asyr, Beirut-Libanon.,Terj.,Shihabuddin,1995,*Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat*,Gema Insani Press,Jakarta,hlm.26.

[28] Syed Sajjad Husain dan Syed Ali Ashraf, *Crisis Muslim Education (Krisis Pendidikan Islam)*, terj., Rahmani Astuti, (Bandung: Risalah,1986), hlm. 2.

[29] Zuhairini, dkk., *Filsafat Pendidikan Islam*, hlm. 152.

pendidikan. Syeh Sajjad Husain dan Syed Ali Ashraf, juga menyatakan bahwa pendidikan merupakan upaya membentuk sikap, tindakan, keputusan, dan pendekatan terhadap segala jenis pengetahuan didasarkan pada nilai spritual dan nilai etis Islam, sebagai sasaran pendidikan. Dengan demikian, kedua pandangan ini lebih menekankan adanya usaha yang diarahkan pada pembentukan kepribadian, memikir, bersikap, berbuat, memutuskan, bertanggungjawab, dan pendekatan terhadap jenis pengetahuan, berdasarkan nilai-nilai etis ajaran Islam sebagai hasil akhir dari pendidikan Islam.

Selain pandangan di atas, ada sebagian ahli memandang bahwa pendidikan sebagai usaha pembinaan dan pengembangan *"fitrah"* [فطرة] manusia, sebagai "potensi dasar" yang perlu dibinan dan dikembangkan untuk mencapai *insan kamil*. Para ahli yang melihat dari sudut pandangan ini, yaitu Syahminan Zaini, yang menyatakan bahwa, pendidikan Islam sebagai "usaha mengembangkan *"fitrah"* manusia dengan ajaran Islam, agar terwujud (tercapai) kehidupan manusia yang makmud dan bahagia"[30]. M. Arifin, menyatakan "hakikat pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa muslim yang bertaqwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan dan perkembangan *fitrah* (kemampuan dasar) anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya"[31]. Achmadi, juga mengemukakan pendangan yang sama, bahwa pendidikan Islam adalah "segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan *fitrah* serta sumber daya insani yang ada padanya menuju terbentuknya manusia seutuhnya [*insani kamil*] sesuai dengan norma Islam"[32].

Ketiga pandangan tersebut, ada sesuatu yang berbeda dengan pandangan pendidikan Islam yang dikemukakan sebelumnya. Dari ketiga pengertian tersebut

---

[30]Syahminan Zaini, *Prinsip-prinsip Dasar Konsep Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1986), hlm. 4.
[31]M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 32.
[32]Achmadi, *Islam sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta: Aditiya Media, 1992), hlm. 20.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

tercermin bahwa tekanan utama pendidikan Islam bukan hanya pada "pembentukan kepribadian-akhlak saja", tetapi usaha mengembangkan *"fitrah"* atau "potensi dasar" manusia dengan nilai-nilai Islam dalam rangka membentuk insan kamil. Dengan demikian, dari pandangan tersebut terkandung makna bahwa usaha mengembangkan *fitrah* manusia secara maksimal oleh orang dewasa muslim bertaqwa untuk mengarahkan dan membina *fitrah* manusia [belum dewasa] berdasarkan nilai-nilai Islam, menuju titik maksimal perkembangan *fitrah* dan pertumbuhannya agar menjadi insan kamil, sebagai sasaran akhir pendidikan Islam yaitu manusia yang berilmu, beriman, bertaqwa, berakhlak, bermoral, dan manusia yang mampu memfungsikan perannya sebagai *khalifah fil-ardi* untuk membangun dirinya, masyarakat dan lingkungannya.

Apabila mencermati pengertian-pengertian pendidikan Islam yang dikemukakan, orientasinya pada pembentukan iman yang kuat, ilmu yang luas, serta kemampuan beramal saleh yang benar dan diridahai Allah SWT, atau dengan perkataan lain bahwa pendidikan harus berorientasi pada tercapainya kemualiaan dan keridhaan dari Allah SWT"[33]. Untuk mencapai "kemulian manusia", diperlukan usaha pengembangan [pendidikan] terhadap seluruh potensi yang ada pada diri manusia. "Potensi yang dimaksud mencakup kawasan [domain] yang meliputi pengertian rasa, perasaan, hati, pengembangan akal atau daya pikir, serta kemampuan beramal atau kemampuan fisik yang seringkali disingkat dengan istilah pikir, *dzikir*, dan *fi'il*"[34]. Dengan demikian, tercermin bahwa pendidikan merupakan usaha mengembangan keseluruhan "potensi" manusia, agar terbentuknya "kepribadian utama" dan tercapainya kemuliaan yang diridhai Allah SWT. Senada dengan pandangan ini adalah yang dikemukakan Soekarno dan Ahmad Supardi, yang menyatakan bahwa "pendidikan Islam adalah "pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam atau tuntunan

[33]Jusuf Amir Faisal, *Reorientasi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 108.
[34]Ibid, hlm. 108.

agama Islam dalam usaha membina dan membantu pribadi-pribadi muslim yang taqwa kepada Allah SWT, cinta dan kasih kepada kedua orang tua dan sesama hidupnya, cinta kepada tanah airnya sebagai karunia yang diberikan oleh Allah. Memiliki kemampuan dan kesanggupan memfungsikan potensi-potensi yang ada dalam dirinya dan alam sekitarnya, hingga bermanfaat dan memberikan kemaslahatan bagi dirinya dan bagi masyarakat pada umumnya"[35].

Pengartian-pengertian yang dikemukan, dinilai lebih bersifat global, kurang problematis, kurang strategis dan kurang antipatif terhadap persoalan yang dihadapi umat manusia. Karena pengertian pendidikan Islam yang dikemukakan tekanan utamanya pada usaha membimbing ke arah pembentukan kepribadian muslim, yaitu manusia yang berilmu, beriman, bertaqwa dan beramal saleh, dan manusia yang berpikir, bersikap, bertindak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, manusia yang sehat jasmani dan rohani, manusia yang halus budinya, manusia yang mempunyai kecintaan terhadap orang tua, sesamanya, masyarakat, dan manusia yang mampu memfungsikan perannya sebagai *khalifah fil-ardi*, untuk membangun dirinya, masyarakat, dan bangsanya atau manusia yang mampu memfungsikan seluruh potensi yang ada padanya. Tanpaknya pengertian pendidikan tersebut, kurang menyentuh dataran aplikasi, karena pengertian-pengertian yang dikemukakan pada umumnya lebih bersifat teoritis-normatif, dan terkesang kurang strategis dalam memecahkan problem-problem yang dihadapi umat manusia.

Azyumardi Azra, menyatakan bahwa pengertian pendidikan Islam yang dikemukakan "lebih global sifatnya. Menurutnya pengertian pendidikan Islam secara lebih teknis dikemukakan oleh Endang Saifuddin Anshari"[36], yaitu pendidikan sebagai "proses bimbingan [pimpinan, tuntutan, usulan] oleh subyek didik terhadap perkembangan jiwa [pikiran, perasaan, kemauan, intuisi dan sebagainya], dan raga

[35]Soekarno dan Ahmad Supardi, *Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam*,(Bandung: Angkasa, 1990), hlm.7-8.
[36]Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi*... hlm. 6.

obyek didik dengan bahan-bahan materi tertentu, pada jangka waktu tertentu, dengan metode tertentu dan dengan alat perlengkapan yang ada ke arah tercapainya pribadi tertentu disertai evaluasi sesuai dengan ajaran Islam"[37]. Dari pengertian ini tercermin bahwa proses "bimbingan" adalah proses pimpinan, tuntutan, dan usulan dari pendidik terhadap perkembangan jiwa anak yang menyangkut pikiran, perasaan, kemauan, intuisi, dan semua potensi kejiawaan yang ada pada anak. Proses bimbingan dengan bahan-bahan atau materi pelajaran tertentu, jangka waktu tertentu, menggunakan metode tertentu, dan dibantu dengan alat, disertai evaluasi untuk mencapai pribadi tertentu yang sesuai dengan ajaran Islam, sebagai sasaran atau tujuan pendidikan Islam, sehingga pandangan ini dinilai lebih teknis dan tidak bersifat global.

Rumusan-rumusan pendidikan Islam yang dikemukakan walaupun dinilai sangat global sifatnya, kurang problematis, kurang strategis, dan kurang antipatif, tetapi ada hal posetif yang perlu dicermati, yaitu penekanan utama proses pendidikan pada usaha "bmbingan" bukan sekedar *"transper of knowledge"* ataupun *"transper of training"*, ... lebih merupakan suatu sistem yang ditata di atas pondasi keimanan dan kesalehan, yaitu suatu sistem yang terkait secara langsung dengan Tuhan[38]. Maka Azyumardi Azra, menyatakan bahwa penekanan pendidikan Islam pada "bimbingan", bukan pada "pengajaran" yang mengandung konotasi otoritatif pihak pelaksana pendidikan, katakanlah guru. Dengan bimbingan sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, anak didik mempunyai ruang gerak yang cukup luas untuk mengaktualisasikan segala potensi [*fitrah*] yang dimilikinya. Sedangkan, sang guru lebih berfungsi sebagai "fasilitator", dinamisator, mtivator atau sebagai petunjuk jalan ke arah penggalian potensi anak didik. Maka dalam posisi, berarti guru bukanlah segala-galanya yang cenderung menganggap anak didik bukan apa-apa, selain manusia yang masih kosong yang perlu diisi. Tetapi seorang guru harus mengormati dan memberdayakan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[37]Endang Saifuddin Anshari, *Pokok-pokok Pikiran Tentang Islam*, (Jakarta: Usaha Enterprise, 1976), hlm. 85.

[38]Rochan Achwan, *"Prinsip-prinsip Pendidikan Islam Versi Muris"*, dalam Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Vol.1, 1991, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm. 50.

anak didik sebagai individu yang memiliki potensi[39] untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Maka pendidikan menurut pandangan ini sebagai upaya memproses yang lebih bersifat memotivasi dan sebagai pemandu jalan ke arah penggalian potensi, sehingga peserta didik memiliki kebebasan dan kemerdekaan berpikir, berkreasi, berinisiatif dan demokrasi dalam proses pendidikan.

Uraian di atas, menegaskan bahwa pendidikan Islam sebagai suatu sistem yang membawa manusia kearah kebahagian dunia dan akhirat melalui ilmu dan amal. Maka dalam proses pendidikan, yang harus diperhatikan adalah "nilai-nilai Islam tentang manusia; hakekat dan sifat-sifatnya, misi dan tujuan hidupnya di dunia ini dan akhirat, hak dan kewajibannya sebagai individu dan anggota masyarakat"[40], artinya dalam pengertian tersebut, terkandung pandangan-pandangan yang berkenaan dengan manusia dan signifikansi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsepsi pendidikan model Islam, tidak hanya melihat proses pendidikan sebagai upaya "mencerdaskan" semata [intelek, kecerdasan], melainkan sejalan dengan konsep Islam tentang manusia dan hakekat eksistensinya sebagai *khalifah fil ardli*. Sebab "pendidikan Islam sebagai pranata sosial, juga sangat terkait dengan pandangan Islam tentang hakekat keberadaan (*eksistensi*) manusia[41] itu sendiri. Karena pendidikan Islam merupakan suatu upaya kependidikan yang mengarahkan dan membimbing potensi [*fitrah*] manusia sehingga dapat terjadi perubahan dalam kehidupan kepribadiannya sebagai makhluk individual maupun makhluk sosial yang dilandasai dengan nilai-nilai Islam. Ini berarti pendidikan merupakan usaha untuk membimbing yang dilakukan secara sadar terhadap peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang baik dan utama yang meliputi aspek jasmani, rohani atau totalitas kehidupan manusia sebagai *insan kamil*.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[39]Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi*... hlm. 6.
[40]Anwar Jasir, "*Kerangka Dasar Pembaharuan*"..., hlm. 2.
[41]M. Rusli Karim, "*Pendidikan Islam Sebagai Upaya*"..., hlm. 29-32.

2. Konsep Pendidikan dalam Islam

Guna mendapatkan gambaran tentang konsep pendidikan, setidaknya para paedagogik muslim menawarkan tiga istilah sebagai refrensi dalam mengkaji problematika sistem pendidikan Islam. Di dalam dunia pendidikan Islam, istilah pendidikan berkisar pada konsep-konsep yang dirumuskan melalui istilah-istilah tersebut. Maka konsep pendidikan dengan "seluruh totalitasnya dalam konteks Islam inheren dalam konotasi istilah "*tarbiyah*", "*ta'lim*" dan "*ta'dib*" yang harus dipahami secara bersama-sama"[42]. Ketiga istilah itu mengandung makna yang amat dalam menyangkut manusia dan masyarakat serta lingkungan yang dalam hubungannya dengan Tuhan saling berkaitan satu sama lain. Istilah-istilah itu pula sekaligus menjelaskan ruang lingkup pendidikan Islam; "informal", "formal" dan "nonformal"[43]. Istilah "*ta'lim* dan *tarbiyah* yang berasal dari kata dasar *'allama* dan *rabba* sebagaimana digunakan dalam al-Qur'an, sekalipun konotasi kata *tarbiyah* lebih luas karena mengandung arti memelihara, membesarkan, dan mendidik, serta sekaligus mengandung makna "mengajar" [*'allama*]"[44].

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kata-kata atau istilah-istilah yang pengertiannya terkait dengan pendidikan terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw. Kata *"rabba* [ربى] merupakan kata kerja dari *tarbiyah* [تربية], kata *'allama* [علم], merupakan kata kerja dari *ta'lim* [تعليم] dan kata *addaba* [أدب], merupakan kata kerja dari *ta'dib* [تأديب]"[45] Pada mulanya pendidikan digunakan "kata *" ta'dib*", karena kata *ta'dib* mengacu pada pengertian yang lebih tinggi, dan mengacu pada unsur-unsur pengetahuan [*'ilm*] pengajaran [*ta'lim*] dan pengasuhan yang baik [*tarbiyah*]. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, kata *ta'dib* sebagai istilah pendidikan hilang dari

---

[42]Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi*...hlm.4-5.

[42]Ibid, hlm. 5.

[42]Jusuf Amir Feisal, *Reformasi Pendidikan Islam*, hlm. 94., dan Abdurrahman an-Nahlawy, *Prinsip-prinsip dan Metode Pendidikan Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1989), hlm. 32.

[43]Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi*... hlm. 5.

[44]Jusuf Amir Feisal, *Reformasi Pendidikan Islam*, hlm. 94.

[45]Achmadi, *Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1992), hlm.13.

peredarannya, dan tidak dikenal lagi, sehingga para ahli didik Islam bertemu dengan istilah *at-tarbiyah* atau *tarbiyah*"[46]. Maka populerlah istilah *"tarbiyah"* yang digunakan untuk menunjuk pendidikan Islam, walaupun ada para ahli lain dalam hal ini Muhammad an-Naquib al-Attas, yang menyatakan istilah *tarbiyah* kurang tepat untuk memaksudkan pendidikan Islam.

Pandangan tentang istilah *tarbiyah* [تـربـيـة] , menurut Syed Muhammad an-Naquib al-Attas [selanjutnya ditulis an-Naquib], dalam bukunya "Konsep Pendidikan dalam Islam", menyatakan bahwa "bagi saya, istilah *tarbiyah* bukanlah istilah yang tepat dan bukan pula istilah yang benar untuk memaksudkan pendidikan dalam pengertian Islam, karena istilah yang dipergunakan mesti membawa gagasan yang benar tentang pendidikan dan segala yang terlibat dalam proses pendidikan"[47]. Lebih lanjut an-Naquib, menyatakan bahwa pendidikan berarti *ta'dib*, kontradiksi dengan yang umum diterima yaitu istilah *tarbiyah*. Menurutnya, *tarbiyah* secara komporatif adalah suatu istilah baru diterapkan untuk menunjuk "pendidikan", namun berdasarkan simantik istilah ini tampak tidak sesuai dan cukup untuk membawakan konsep pendidikan yang hanya khusus untuk manusia. Memang pada dasarnya *tarbiyah* mempunyai arti "mengasuh, merawat, memberi makan, memelihara, menyebabkan semakin tumbuh, menternakkan, menghasilkan hasil yang lebih matang, melakukan cara hidup teratur".

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kata *tarbiyah* penerapannya dalam bahasa Arab tidak terbatas hanya pada manusia saja, tetapi bidang-bidang simantiknya meluas pada jenis-jenis lain, meliputi mineral, tumbuh-tumbuhan, dan binatang; orang dapat menunjuk pada peternakan hewan, ayam, pemeliharaan ikan, pengembangan tanam-tanaman, masing-masing sebagai suatu bentuk *tarbiyah*. Padahal pendidikan adalah sesuatu yang khusus pada manusia, aktivitas-aktivitas yang terlibat, dan unsur-unsur kualitatif yang berkaitan

---

[46]Zuhairini, dkk., *Metodologi Pendidikan...*, hlm, 9.

[47]Muhammad al-Naquib al-Attas,1980, *The Concept of Education in Islam: A Frame-work for an Islamic Philosophy of Education, Muslim Youth Movement of Malaysia (ABIM),* (*Konsep Pendidikan dalam Islam: Suatu Rangka Pikir Pembinaan Filsafat Pendidikan Islam)*, terj. Haidar Bagir, (Bandung: Mizan, 1984), hlm. 35.

dalam pendidikan tidaklah sama dengan makna *tarbiyah*"[48] yang dikemukakan. Dengan demikian, menurutnya istilah *tarbiyah* bukanlah istilah yang tepat untuk pendidikan Islam. Maka an-Naquib, dalam bukunya "*Islam and Secularisme*", [1978], mengajukan istilah lain yaitu "*ta'dib* yang ada hubungannya dengan kata *adab* (susunan). An-Naquib, berpendapat bahwa mendidik adalah membentuk manusia untuk menempati tempatnya yang tepat dalam susunan masyarakat, serta berprilaku secara proporsional sesuai dengan susunan ilmu dan teknologi yang dikuasainya"[49].

Walaupun ada perbedaan pandangan, beberapa pedagogik muslim setidaknya menawarkan ketiga istilah tersebut sebagai refrensi dalam mengkaji problematika sistem pendidikan Islam, di antaranya Abdurrahman an-Nahlawy. Perbedaan pandangan tentang penggunaan istilah *tarbiyah* dan *ta'dib* tersebut, dalam pembahasan tidak diperdebatkan dan dibandingkan dengan pandangan ahli pendidikan Islam yang lain. Karena sesungguhnya ketiga istilah atau kata *tarbiyah*, *ta'lim* dan *ta'dib*, merupakan satu kesatuan yang saling terkait (*koherensi*) satu dengan lainnya. Artinya "apabila pendidikan dinisbahkan kepada *ta'dib* ia harus melalui pengajaran (*ta'lim*) sehingga dengannya diperoleh ilmu, dan dari ilmu yang telah dimiliki terwujudlah sikap dan tindakah laku yang sesuai dengan tujuan pendidikan, hal ini lazim dikenal sebagai kognitif, afektif, dan psikomotorik"[50], dan oleh karena itu istilah pendidikan dinisbatkan dengan *at-tarbiyah*. Maka dalam mengkaji dan membahas masalah konsep pendidikan dalam Islam, harus dikaitkan dengan ketiga istilah tersebut yaitu *tarbiyah, ta'lim*, dan *ta'dib,* karena ketiga istilah ini saling terkait menuju terbentuknya kepribadian yang baik dan utama, yang meliputi aspek jasmani, rohani, dan atau totalitas kepribadian manusia. Maka untuk lebih jelas sangat urgen untuk mengkaji masing-masing istilah tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[48]Muhammad an-Naquib al-Attas, *Dilema Kaum Muslimin,*, alih bahasa: Anwar Wahdi Hasi dan HM. Mochtar Zoerni, (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), hlm. 144-145.

[49]Jusuf Amir Feisal, *Reformasi Pendidikan Islam*, hlm.94.

[50]Achmadi, *Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan*, hlm. 16.

a. Konsep *Tarbiyah* [تربية]

Kata *tarbiyah* adalah "bentuk masdar dari kata "*rabba*"[ربى] yang dalam al-Qur'an diartikan sebagai mencipta, memelihara, memenuhi kebutuhan dan menyempurnakan. Allah *rabul'alamin* [رب العالمين] adalah pernyataan bahwa Allah telah melakukan *tarbiyah* bagi seluruh alam ini, demikian pula perlakuan orang tua kepada anaknya juga disebut *tarbiyah*. Dengan demikian, subjek *tarbiyah* dapat berupa alam semesta, manusia, atau yang lain"[51]. Istilah *tarbiyah*, berakar dari tiga kata dalam bahasa Arab yaitu, *Pertama*, berasal dari kata *raba - yarbu* [ربا - يربو] yang berarti "bertambah" dan "berkembang"[52] .*Kedua*, berasal dari kata *"rabiya-yarba* [ربى- يربى] yang berarti "tumbuh" dan "berkembang" menjadi besar. *Ketiga*, berasal dari kata *rabba - yarubbu* [رب - يرب] yang berarti memperbaiki, mengurusi kepentingan, mengatur, menjaga, memelihara, memperhatikan dan meluruskan"[53] . Pendapat lain yang mengatikan kata *rabba* [رب] yang berarti memiliki, memimpin, memperbaiki, menambah"[54].

Imam Baidhawi [W.675 H] dalam kitab tafsirnya, *Anwarut-Tanzil wa Asrarul-Ta'wil*, menyatakan bahwa pada dasarnya *ar-rab* [الرب] bermakna *at-tarbiyah* [التربية] makna lengkapnya adalah "penyampaian sesuatu" pada kesempurnaan secara bertahap, sedikit demi sedikit" atau "menyampaikan sesuatu hingga mencapai kesempurnaan"[55] ,secara berangsur-angsur. Ar-Raghib al-Ashfahani [W.502] dalam bukunya, Mufradatur-Ragib, menyatakan kata *ar-rabb,* [الرب] berarti *tarbiyah* , makna lengkapnya adalah "menumbuhkan" perilaku demi perilaku secara bertahap

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[51]Konsep Dasar *Ta'dib*, From: http://www.pii.4t.com.Konsep.htm.8/1/ 2001.

[52]Mahmud Yunus, *Kamus Arab - Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaan Penterjemah/Penafsiran al-Qur'an,1973),hlm. 137., dan Abdurrahman an-Nahlawi, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat*, terj., Shihabuddin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 21.

[53]Abdurrahman an-Nahlawi, *Pendidikan Islam di Rumah*..., hlm. 20., dan Najib Khalid al-'Amir, *Tarbiyah Rasulullah*, terj., Ibnu Muhammad dan Fakhruddin Marsyam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 21.

[54]Achmadi, *Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan*, hlm. 14.

[55]Ibid, hlm. 14., dan Abdurrahman an-Nahlawi, *Pendidikan Islam di Rumah* ..., hlm. 21.

hingga mencapai batas kesempurnaan"[56] ,atau "menjadikan" dan "mengembangkan" sesuatu melalui proses tahap demi tahap sampai batas kesempumaan"[57] . Muhammad 'Imarah, menyatakan" *at-tarbiyah* dalam istilah Arab adalah bermakna *an-numuwwu* (pertumbuhan), dan pertumbuhan itu ada kalanya berhenti pada sesuatu yang bersifat materi. Sedangkan *at-tarbiyah* dalam pemahaman pendidikan Islam adalah bermakna pertumbuhan yang seimbang antara potensi-potensi jasmani, akal dan rohani"[58]. Dengan demikian terdapat saling menyempumakan antara potensi-potensi yang berbeda-beda baik fisik material maupun *ma'nawiah* spritual dalam diri manusia, yang dilakukan secra tahap demi tahap sampai batas kesempurnaan atau mencapai tujuan pendidikan.

Abdurrahman al-Bani [1397], mengambil "konsep pendidikan" dari akar kata-kata tersebut. Maka berdasarkan ketiga kata ini, al-Bani menyimpulkan bahwa di dalam pendidikan (*tarbiyah*) itu tercakup empat unsur, yaitu: *Pertama,* "menjaga dan memelihara *fitrah* anak menjelang dewasa (*baligh*). *Kedua*, mengembangkan bakat dan potensi anak sesuai dengan kekhasan masing-masing. *Ketiga*, mengarahkan potensi dan bakat agar mencapai kebaikan dan kesempurnaan. *Keempat,* seluruh proses di atas dilakukan secara bertahap sesuai dengan konsep "sedikit demi sedikit"-nya al-Baidhawi atau "perilaku demi perilaku"-nya *ar-raghib*"[59]. Abul A'la Al-Maududi, menyatakan bahawa *tarbiyah*, berarti "pendidikan, pengasuhan dan sebagainya". Selain itu menurut Al-Maududi, kata ini mencakup arti seperti "kekuasaan, perlengakapan, pertanggung jawaban, perbaikan, penyempurnaan dan lain-lain. Kata ini juga merupakan predikat bagi suatu kebesaran, keagungan, kekuasaan dan kepemimpinan". Dengan demikian, istilah *tarbiyah*, yaitu pendidikan yang menitikberatkan pada masalah pembentukan, dan pengembangan pribadi serta

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[56]Abdurrahman an-Nahlawi, *Pendidikan Islam di Rumah* ..., hlm. 21.

[57]Achmadi, *Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan*, hlm. 14.

[58]Abdul Latif Muchtar, *"Tujuan Pendidikan Islam dan Tujuan Pendidikan Nasional"*, makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional, Pengembangan Pendidikan Islam Menyongsong Abad 21,IAIN Sunan Gunung Djati, Cirebon, 31 Agustus- 1 September 1995, hlm. 6.

[59]Abdurrahman an-Nahlawi, *Pendidikan Islam di Rumah* ..., hlm. 21.

pembentukan dan penggemblengan norma-norma etika atau akhlak yang dilakukan secara bertahap sampai pada kesempurnaan. Jadi pendidikan adalah pengembangan seluruh potensi anak didik yang dilakukan secara bertahap menurut ajaran Islam.

Abul A'la al-Maududi, menyatakan bahwa "kata "*rabb*" yang berasal dari kata *tarbiyah*, tidak hanya terbatas dalam pengertian "memelihara" dan "membimbing" saja, tetapi lebih luas yaitu, memelihara dan menjamin atau memenuhi kebutuhan yang dipelihara, membimbing dan mengawasi serta memperbaikinya dalam segala hal, pemimpin yang diakui kekuasaannya, berwibawa dan semua perintahnya diindahkan"[60]. Zakiah Daradjat, dkk., menyatakan "kata kerja *"rabba"* [mendidik] sudah digunakan pada zaman Nabi Muhammad Saw seperti terlihat dalam al-Qur'an dan Hadits. Dalam bentuk kata benda, kata *"rabba"* juga digunakan untuk "Tuhan", mungkin karena Tuhan juga bersifat mendidik, mengasuh, memelihara, malah mencipta"[61]. "Ayat-ayat Qur'an di antaranya yang menggunakan kata "*rabba*" yaitu pada surat al-Isra, ayat 24 [رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا...], artinya" : *Ya Tuhan, sayangilah keduanya [ibu bapaku] sebagaimana mereka telah "mengasuhku (mendidikku)" sejak kecil*"[62], dan surat Asy-Syu'araa' [26] ayat 18, kata "*rabba*" juga digunakan dalam susunan konteks ayatnya sebagai berikut:

[قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين] artinya: *"Fir'aun menjawab" , Bukankah kami telah "mendidikmu" sebagai anak di tengah keluarga dan kamu tinggal di tempat kami bertahun-tahun*"[63].

M. Quraish Shihab, menyatakan kata "*rabbika*" disebut dalam al-Qur'an sebanyak 224 kali. Kata "*rabbika*" tersebut dapat diterjemahkan dengan "Tuhanmu", sedangkan kata *"rabb"* yang berasal dari kata *tarbiyah* berarti pendidikan. Maka menurutnya, kata-kata yang bersumber dari akar kata ini memeliki arti yang berbeda-

---

[60]Abdul A'la al-Maududi, *Bagaimana Memahami al-Qur'an Keempat Istilah Al-Illahi, Ar-rab, al-Ibadah, al-Din*, terj., Abdul Said, (Surabaya: al-Ikhlas, 1995), hlm. 29.

[61]Zakiah Daradjat, dkk., *Ilmu Pendidikan Islam, Bumi Aksara*, Cetakan Kedua, (Jakarta:Bumi Aksara,1992), hlm. 25-26.

[62]Al-Qur'an, Surat al-Isra', Ayat 24.

[63]Al-Qur'an, Surat Asy-Syura, Ayat 18.

beda, namun pada akhirnya arti-arti itu mengacu kepada arti "pengembangan, peningkatan, ketinggian, kelebihan serta perbaikan". Tetapi apabila kata *rabb* itu berdiri sendiri, maka yang dimaksud adalah "Tuhan", kerena Dialah yang melakukan *tarbiyah* [pendidikan] yang pada hakikatnya adalah pengembangan, peningkatan serta perbaikan makhluk yang didik-Nya"[64]. Sedangkan, al-Razi dalam karyanya Tafsir *al-Kabir,* menyatakan "kata *tarbiyah* berarti "pertumbuhan" atau "pengembangan" (*tanmiyah*). Untuk itu, lafal *tarbiyah* dalam al-Qur'an juga dimaksudkan sebagai proses pendidikan"[65], namun makna pendidikan (*tarbiyah*) dalam al-Qur'an tidak hanya terbatas pada aspek kognitif berupa pengetahuan untuk selalu berbuat baik, tetapi pendidikan juga meliputi aspek afektif yang direalisasikan sebagai aspirasi atau sikap respek terhadap sesuatu perbuatan. Maka "terma *tarbiyah* dalam al-Qur'an tidak sekedar merupakan upaya pendidikan pada umumnya [seperti konsep pendidikan sekuler barat], tetapi terma *tarbiyah* menembus pada aspek "etika religius"[66].

Mencermati pengertian *tarbiyah* yang dikemukakan, istilah *tarbiyah* mempunyai arti yang sangat luas dan bervariasi dalam penggunaannya. Najib Khalid al-'Amir dalam bukunya *Tarbiyah Rasulullah*, menyebutkan lima sisi pengertian *tarbiyah* secara berkesinambungan dan satu sama lain berbeda sesuai dengan pembentukannya, yaitu :

> *Pertama, tarbiyah* adalah menyampaikan sesuatu untuk mencapai kesempurnaan. Sedangkan bentuk penyampaian satu dengan lain berbeda sesuai dengan cara pembentuknya. *Kedua, tarbiyah* adalah menentukan tujuan melalui persiapan sesuai batas kemampuan untuk mencapai kesempurnaan. *Ketiga,* tarbiyah adalah sesuatu yang dilakukan secara bertahap dan sedikit demi sedikit oleh seorang pendidik (murabbi). Pandai memotivasi serta memiliki kemampuan yang matang merupakan hal yang penting dalam keberhasilan tarbiyah. Selain itu, tahap perkembangan dalam tarbiyah harus disertai sikap mendahulukan yang umum daripada yang khusus, dan mendahulukan yang paling penting di antara yang penting. *Keempat*, *tarbiyah* dilakukan secara berkesinambungan, artinya tahapan-tahapannya sejalan dengan kehidupan, tidak berhenti pada batas tertentu dari buaian sampai liang lahat, atau

---

[64]M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Qur'an al-Karim, Tafsir atas Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu,* Cetakan Kedua, (Bandung: Pustaka Hidayah,1997), hlm. 82.

[65]Musthofa Rahman, *"Pendidikan Islam dalam Perspektif al-Qur'an"*, dalam: Ismail SM, dkk.,(edit.) Paradigma Pendidikan Islam, Cetakan I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 58.

[66]Ibid, hlm. 58-59.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pendidikan seumur hidup. *Kelima*, *tarbiyah* adalah tujuan terpenting dalam kehidupan, baik secara individual maupun keseluruhan. Kita telah memahami, sasaran tarbiyah adalah kemaslahatan umat. Maka asas yang paling hakiki dari sebuah tarbiyah adalah mencapai keridhaan Allah SWT[67].

Dari lima sisi pengertian *tarbiyah* yang dikemukakan Najib Khalid al-'Amir ini, dapat dikataka bahwa *tarbiyah* merupakan proses menyampaikan sesuatu untuk mencapai kesempurnaan, merumuskan tujuan pencapaian *tarbiyah* yang disesuaikan dengan batas kemampuan, proses *tarbiyah* dilakukan secara bertahap, proses *tarbiyah* dilakukan secara berkesinambungan, terus menerus, dan tujuan akhir dari *tarbiyah* adalah kemaslahatan umat manusia. Maka, dapat dikatakan bahwa *tarbiyah* lebih pada upaya memelihara, mengembangkan, mengarhkan, dan melaksanakan sesuai tujuan yang telah ditentukan. Abdurrahman al-Bani, menyatakan bahwa "*tarbiyah* mencakup empat unsur pokok, yaitu : *Pertama,* memelihara pertumbuhan *fitrah* manusia. *Kedua,* mengembangkan potensi dan kelengkapan manusia yang beraneka macam [terutama akal budinya]. *Ketiga,* mengarahkan *fitrah* dan potensi manusia menuju kesempurnaannya. *Keempat,* melaksanakan secara bertahap sesuai dengan irama perkembangan anak[68].

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah *tarbiyah* mengandung makna, pendidikan, pengajaran, memperbaiki, memperhatikan, mengurusi, memelihara, asuhan, mengatur, perintah, menjaga, menyampaikan, mengarahkan, yang merupakan kegiatan yang betul-betul memiliki tujuan, sasaran dan target yang akan dicapai. "Semua arti yang dikemukakan sejalan dengan lafal yang digunakan al-Qur'an untuk menunjukkan proses "pertumbuhan" dan "perkembangan" kekuatan fisik, akal, dan akhlak[69]. Oleh karena itu, istilah *tarbiyah* lebih menitikberatkan masalah pada pendidikan, pembentukan, dan pengembangan pribadi serta pembentukan dan penggemblengan kode etik, norma-norma etika atau akhlak. Maka istilah *tarbiyah*

---

[67]Najib Khalid al-'Amir, *Min Asaalibir-Rasul Saw. Fit-Tarbiyyah,. (Tarbiyah Rasulullah)*, terj.,. Ibnu Muhammad dan Fakhruddin Mursyam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm.22.

[68]Achmadi, *Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan*, hlm. 15.

[69]Musthofa Rahman, *Pendidikan Islam dalam Perspektif al-Qur'an*, hlm. 57.

dalam al-Qur'an bukan hanya sekedar merupakan upaya pendidikan, tetapi lebih menembus pada aspek "etika relegius" dan konsep etika relegis yang dimiliki oleh aspek pendidikan akan lebih tampak lagi pada istilah *ta'lim*.

b. Konsep *Ta'lim* [تعليم]

Kata *ta'lim* [تعليم] berasal dari kata *' allama*, proses pengajaran Allah kepada Adam digunakan kata *'allama*, sementara prosesnya disebut *ta'lim* dan istilah *ta'lim* sendiri diartikan sebagai pengajaran definisi-definisi dengan menggunakan seluruh indera yang dimiliki manusia yang untuk selanjutnya direkam dalam akal (*nalar, nadhor*)"[70]. Maka dengan kata *ta'lim*, pendidikan lebih menitik beratkan pada masalah pengajaran, penyampaian informasi, dan pengembangan ilmu, dan "kata pengajaran dalam bahasa Arab adalah *ta'lim* [تعليم] dengan kata kerjanya *'" allama*" [علم] yang berarti "mengajar". Maka pendidikan dan pengajaran dalam bahasa Arab disebut dengan *"tarbiyah wa ta'lim"* [تربية والتعليم] sedangkan "pendidikan Islam" disebut dengan *" tarbiyah Islamiyah* .[تربية الإسلامية] "Sebenarnya, kata *ta'lim* dengan kata kerjanya *'allama* sudah dipergunakan sejak zaman Nabi, baik dalam al-Qur'an, Hadis, atau pemakaian sehari-hari pada masa itu, sehingga kata *ta'lim* lebih banyak dipergunakan daripada kata *tarbiyah*. Kata *'allama* mengandung pengertian sekedar memberitahukan atau memberi pengetahuan, tidak mengandung arti pembinaan kepribadian, karena sedikit sekali kemungkinan membina kepribaian"[71].

Penggunaan kata *'"allama*, yang berarti "mengajar" lebih bersifat pemberian atau penyampaian pengertian, pengetahuan dan keterampilan. Qur'an sering menggunakan kata-kata *'allama*, misalnya surat al-Baqarah [2], ayat 31:

---

[70] *Konsep Dasar Ta'dib*, From: http://www.pii.4t.com/ Konsep. htm.8/1/2001, hlm.1.
[71] Zakiah Daradjat, dkk., *Ilmu Pendidikan Islam*, hlm. 1.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا..., artinya: "*Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya*"[72]. Ayat ini menunjukkan terjadinya proses pengajaran (*ta'lim*) kepada Adam, sekaligus menunjukkan kelebihannya karena ilmu yang dimiliknya tidak diberikan kepada para makhluk lainnya dan dengan demikian proses *ta'lim* hanya dapat terjadi pada makhluk yang berakal yaitu manusia. Pada surat ar-Rahman ayat 2 dan 4, dan surat an-Naml ayat 16, juga mengguankan kata *'allama*. Surat ar-Rahman ayat 2 dan 4, penggunaan kata *'allama* sebagai berikut: عَلَّمَ الْقُرْآنَ - عَلَّمَهُ الْبَيَانَ , artinya" :*Yang telah mengajarkan al-Qur'an* [2] *Dia pula yang mengajarkan kesadaran mumi*"[73] [*4*], *atau mengajarkan pandai berbicara*. Pada surat an-Naml, ayat 16: قَالَ يَاأَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ.... Artinya ...*Dan Ia berkata* [*Sulaiman*]; *Hai manusia, aku telah diajari bahasa burung*"...[74]. Selain itu, pada surat al-Alaq, ayat 4 dan 5: الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ, artinya" :*Yang mengajar dengan perantara kalam* .[4] *Dialah yang mengajar manusia segala yang tidak diketahui*" [5], pada surat al-Jumu'ah, ayat 2, sebagai berikut: ...وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, artinya ":*dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah*..."[75] .Ayat-ayat tersebut menggunakan kata' *allama* yang berarti "mengajar".

Berdasarkan ayat-ayat di atas, "lafal *ta'lim* [dari term *'allama*] condong pada aspek "pemberian informasi", karena pengetahuan yang dimiliki itu semata-mata akibat dari "pemberitahuan" [*lâ' ilm lanâ illâ mâ 'allam-ta-nâ*], sehingga dalam istilah *ta'lim*, menempatkan peserta didik sebagai yang pasif adanya"[76]. Al-Tabatabai,

---

[72]Surat al-Baqarah (2): 31.
[73]Surat ar-Rahman, ayat : 2 dan 4.
[74]Surat An-Naml, ayat: 16.
[75]al-Alaq [96]: 4 dan 5, dan Surat al-Jumu'ah [62]: 2., terj. Zaini Dahlan,Op.cit.,hlm.1002 dan 1115.
[76]Musthofa Rahman, Op.cit., hlm. 60.

menafsirkan bahwa "Allah mengajar baca tulis itu dengan perantara pena [*kalam, al-kalam*], dan pengajaran itu berupa hal-hal yang tidak diketahui"[77]. Dengan demikian, lafal *ta'lim* dalam al-Qur'an dipergunakan "untuk menunjukkan proses pengajaran (pendidikan), dalam arti *ta'lim* menunjukkan proses pemberian informasi kepada obyek didik sebagai makhluk berakal, sehingga proses *ta'lim* menjadi indikator kelebihan manusia, kerena kepemilikan akal pada dirinya"[78] sebagai potensi yang dapat didik.

Istilah *ta'lim* yang berasal dari kata *'allama* yang berarti mengajar, "memiliki dua pola atau bentuk jamak (plural)"[79]. Perbedaan bentuk jamak itu mengakibatkan sedikit perbedaan arti, meskipun tidak begitu signifikan untuk dibedakan. "*Pertama*, *ta'lim* dengan pola jamak *ta'alim* mempunyai sembilan arti, yakni : berita (*information*), nasehat (*advice*), perintah (*instruction*), petunjuk (*direction*), pengajaran (*teaching*), pelatihan (*training*), sekolah (*schooling*), pendidikan (*education*), dan bekerja sambil [dengan] belajar (*apprenticeship*]) *Kedua*, *ta'lim* dalam pola jamak *ta'limat* hanya berarti dua macam, yakni: petunjuk (*directives*), dan pengumuman (*announcement*)". Kata *ta'lim* menurut bahasa mempunyai asal kata dasar makna sebagai berikut: [1] "Berasal dari kata dasar *"'allama - ya lamu"* yang berati mengecap atau memberi tanda. [2] Berasal dari kata dasar *"'alima - ya lamu"* yang berarti mengerti atau memberi tanda"[80]. Dari makna ini, kemudian disimpulkan bahwa istilah *ta'lim* mempunyai pengertian usaha untuk menjadikan seseorang [anak] mengenal tanda-tanda yang membedakan sesuatu dari lainnya, dan mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang sesuatu. Dengan demikian, "kata *ta'lim* menunjukkan pada proses pemberian informasi kepada obyek didik sebagai makhluk berakal, karena indikator kelebihan manusia sebagai peserta didik adalah kepemilikan akal pada dirinya, sehingga kata *ta'lim*, memang lebih tepat diartikan dengan

[77]Musthofa Rahman, *Pendidikan Islam dalam Perspektif al-Qur'an*, hlm. 60.
[78]Ibid, hlm. 60.
[79]Ibid, hlm. 59.
[80]Tim Dosen IAIN Sunan Ampel Malang, *Dasar-dasar Kependidikan Islam*, (Surabaya: Karya Abditama, 1996), hlm. 15.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

"mempunyai konotasi khusus dan merujuk kepada "ilmu", dan konsep *ta'lim*, mempunyai pengertian sebagai "pengajaran ilmu" atau "menjadi seseorang berilmu"[81]. Maka dengan proses *ta'lim*, manusia dapat mengelola dan memakmurkan serta memanfaatkan hasil budi daya bumi untuk keperluan manusia itu sendiri menuju kebahagian dan kemakmuran hidupnya, yang merupakan sasaran pendidikan.

Konsep *ta'lim* yang mempunyai pengertian sebagai "pengajaran ilmu" atau "menjadi seseorang berilmu", mengharuskan kita untuk "tidak melupakan bahwa kata "*al-ilmu*" dan derivasinya yang menunjukkan kepada ketinggian *at-ta'lim,* namun apabila dibandingkan, tampaknya *at-tarbiyah* lebih penting daripada *at-ta'lim*, khusunya bila diyakini bahwa *at-tarbiyah* mengharuskan *at-ta'lim*, tetapi dapat ditemukan bahwa ada proses *ta'lim* tanpa *tarbiyah*[82]. Perhatikan ayat-ayat pertama al-Qur'an Surat al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 :

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ, خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ, اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ, عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

> Artinya :"Bacalah dengan [menyebut] nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Paling Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya"[83].

Ayat ini, dimulai dengan perintah membaca kepada Nabi Muhammad Saw. Perintah "*iqra'*" [اقْرَأْ] sesungguhnya beliau [Nabi] sendiri buta aksara, tetapi yang dibaca bukan hanya huruf, melainkan juga "rana" proses *at-ta'lim* [التعليم] dan *at-tarbiyah* .[التربية] Apabila yang dibaca hanyalah pada batas "menambah informasi" dan "menambah penalaran akal" semata, maka itu adalah proses *at-ta'lim*, dan apabila yang dibaca itu menjadi nasihat dalam "pembinaan sikap" dan "nilai-nilai baik", maka itu adalah *at-tarbiyah*. Kemudian kata "*bismi Rabbika*" [بِاسْمِ رَبِّكَ] artinya

---

[81]Ibid, hlm. 16.

[82]Abdul Latief Muchtar,"*Tujuan Pendidikan Islam dan Tujuan Pendidikan Nasional*", makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional, Pengembangan Pendidikan Islam Menyongsong Abad 21,IAIN Sunan Gunung Djati, Cirebon, 31 Agustus s/d 1 September 1995, hlm.5.

[83]Al-'Alaq [96] : 1 - 5.

petunjuk Allah kepada *at-tarbiyah*, dan kata "*Rabbika*" [رَبِّكَ] mengandung peringatan akan *al-Murabbi al-A'zham* terhadap hamba-hamba-Nya dengan sikap dan nilai-nilai baik, kemudian Allah mengulang perintah membaca dengan bantuan Tuhan Yang Maha Dermawan, tidak pilih kasih. Ayat ini mengandung faktor-faktor *at-tarbiyah* yang dapat menimbulkan sikap iman dan taqwa, dan Allah menghendaki memberikan *al-'ilmu* wa *at-ta'lim* secara proporsional"[84] kepada manusia sebagai peserta didik.

Konsep *ta'lim* sebagai proses menjadikan orang berilmu, tentu mengandung "usaha untuk mendorong dan menggerakkan daya jiwa atau akal seseorang untuk belajar (menuntut ilmu), agar sampai pada kesimpulan ide atau gagasan dan hakikat yang sebenarnya tentang sesuatu" secara maknawi. Apabila demikian, maka konsep dasar "*ta'lim* lebih menekankan kepada usaha untuk membelajarkan anak, daripada hanya sekedar menyampaikan atau menanamkan ilmu pengatahuaan"[85]. Dengan demikian pengertian *ta'lim* tidak hanya sekedar pada usaha menyampaikan atau menamkan ilmu semata-mata, tetapi lebih pada menekankan usaha membelajarkan manusia, sehingga "potensi akal manusia tidak terbatas untuk menerima informasi [ilmu pengetahuan] belaka, namun juga dimaksudkan untuk memberdayakan potensi akal. Kemudian yang perlu diperhatikan bahwa "hasil *ta'lim* masih pada batas-batas tertentu dalam usaha manusia mengoptimalisasikan kemampuan akalnya untuk mengisi dan mengolah kekayaan alam. Wujud pembatasan itu berupa larangan "melampaui batas kewajaran" dari segi kenusiaan. Optimalisasi hasil *ta'lim* harus tidak boleh bertentangan dengan tatanan moral kemanausian, karenanya *ta'lim* harus dihiasi dengan akhlak atau *adab*.

c. Konsep *Ta'dib* [تأديب]

Kata *ta'dib* [تأديب] adalah "bentuk masdar [kata benda] dari bentuk *fi'il madli* [kata kerja], *adab*a yang berarti mendidik. Bentuk ini memuta'addikan, artinya kata

---

[84]Abdul Latief Muchtar, "*Tujuan Pendidikan Islam* "..., hlm. 5.
[85]Tim Dosen IAIN Sunan Ampel Malang, *Dasar-dasar Kependidikan Islam*, hlm. 16.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

kerja yang memerlukan obyek [*maf'ul bih*] dan dalam kata ini objek yang dimaksud adalah manusia. Kata *adab* dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai sopan santun, tata krama, atau budi pekerti"[86]. Namun dalam pengertian sehari-hari kata peradaban diartikan sebagai hasil seluruh budi daya manusia, baik secara personal maupun secara komunal. Jadi kata *ta'dib* dapat diartikan sebagai proses pembentukan per*adab*an dan untuk lebih jelasnya perlu mengkaji pengertian istilah *ta'dib* tersebut.

Kata *addaba* [أَدَّبَ] dapat diartikan mendidik yang lebih tertuju pada penyempurnaan akhlak budi pekerti dan mashdar *addaba* - yakni *ta'dib*, diartikan sebagai "pendidikan"[87]. Mahmud Yunus, menyatakan bahwa "kata *ta'dib* [تَأْدِيب] secara bahasa merupakan bentuk masdar dari kata" *addaba*", yang berarti memberi *adab*, mendidik"[88]. Lafal *ta'dib* setidaknya memiliki empat macam arti, yaitu: [1] pendidikan (*education*), [2] ketertiban (*discipline*), [3] hukuman (*punishment, chastisement*), dan [4] hukuman demi ketertiban (*disciplinary punishment*)"[89]. Maka lafal *ta'dib* lebih mengarah kepada perbaikan tingkah laku atau pembentukan akhlak. Sedangkan lafal *ta'dib* yang berarti pendidikan, "memandang proses pendidikan merupakan usaha untuk "membentuk keteraturan susunan ilmu" yang berguna bagi dirinya sebagai muslim yang harus melaksanakan kewajiban serta fungsionalisasi atas niat atau "sistem sikap" yang direalisasikan dalam kemampuan berbuat yang teratur (sistematik), terarah [*fa akim wajhaka liddini hanifa*], dan efektif"[90]. Meskipun istilah *ta'dib* begitu tinggi nilainya, tetapi istilah ini tidak sekalipun disebutkan dalam al-Qur'an[91]. Mungkin saja Qur'an tidak menyebutkannya, karena nilai-nilai yang terkandung dalam istilah *ta'dib* sudah inheren di dalam istilah yang menunjukkan arti pendidikan yaitu *tarbiyah* dan *ta'lim*. Dengan demikian lafal *ta'dib* sudah termasuk di dalam *tarbiyah* dan *ta'lim* yang menunjukkan arti pendidikan.

---

[86] *Konsep Dasar Ta'dib*, From: http://www.pii.4t.com/ Konsep.htm.8/ 1/ 2001,hlm.1.
[87] Muhammad an-Naquib al-Attas, *Konsep Pendidikan dalam Islam*..., hlm. 60.
[88] Mahmud Yunus, *Kamus Arab - Indonesia*, hlm. 37.
[89] Musthofa Rahman, *Pendidikan Islam dalam Perspektif al-Qur'an*,, hlm. 60.
[90] Jusuf Amir Feisal, *Reformasi Pendidikan Islam*, hlm. 108.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

An-Naquib, dalam bukunya "Konsep Pendidikan Islam" dengan gigih mempertahankan penggunaan istilah *ta'dib* untuk konsep pendidikan Islam, bukan *tarbiyah*, dengan alasan bahwa dalam istilah *ta'dib*, yang berasal dari kata kerja *addaba*, mencakup wawasan ilmu dan amal yang merupakan esensi pendidikan Islam"[92]. An-Naquib, menyatakan bahwa "konsep kunci utama yang merupakan inti pendidikan dan proses pendidikan terkandung dalam istilah "*adab*" [ادب] dianggap mewakili makna pendidikan Islam. Bagi an-Naquib, istilah yang tepat untuk merumuskan proses pendidikan ialah *ta'dib*, sedangkan persoalan asasi tentang *ta'dib* adalah konsep *adab* yang mendasari tujuan ilmu atau pendidikan. *Adab* adalah "disiplin" jasmani, pemikiran, jiwa dan ruhani; disiplin yang menegaskan pengenalan dan pengakuan terhadap kedudukan yang tepat dalam hubungannya dengan kemampuan, potensi jasmaniah, intelektual dan ruhaniah; pengenalan dan pengakuan akan kenyataan bahwa ilmu dan wujud ditata secara hirarki sesuai dengan berbagai tingkat [*maratib*] dan darajatnya [darajat]. Selanjutnya an-Naquib, juga menyatakan bahwa dalam *adab* mencerminkan kondisi keadilan ['*adl*] dan kearifan [*hikmah*]. Keadilan merupakan pencerminan dari kearifan [hikmah], yang diartikan sebagai "ilmu" yang diberikan Tuhan dan memungkinkan penerima menemukan atau menghasilkan tempat yang tepat dan layak dalam kondisi tertentu, berada dalam tempat yang tepat itulah yang disebut dengan "keadilan". "*Adab*" adalah metoda atau cara untuk mengetahui, karena dengan metoda tersebut kita dapat memenuhi kondisi dan berada pada tempat yang tepat. Dengan demikian *adab* juga merupakan pencerminan kearifan, dan *adab* juga dikenal sebagai ilmu tentang tujuan mencari pengetahuan, karena tujuan mencari pengatahuan dalam Islam ialah "menanamkan kebaikan dalam diri manusia sebagai manusia dan sebagai diri individual. Tujuan akhir pendidikan Islam adalah menghasilkan atau mencetak manusia yang "baik" dan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[91]Musthofa Rahman, *Pendidikan Islam dalam Perspektif al-Qur'an*, hlm. 61.

[92]Muhammad an-Naquib al-Attas, *Konsep Pendidikan dalam Islam...*, hlm. 60.

"bukan". Konsep manusia yang "baik" berarti tepat sebagai manusia *adab*, dan manusia yang *adab* yakni meliputi kehidupan material dan spritual manusia itu sendiri[93].

Konsep *adab* pada awal dikenal sebagai konsep "perbaikan" atau "penghalusan kebudayaan" yang terkait dengan bidang sastera dan etika sosial dan banayak dipengaruhi oleh inovasi-inodvasi pada jenis sastera. Tetapi dalam artinya yang asli dan dasar, *adab* berarti "undangan" kepada suatu perjamuan, yang dapat membawa kenikmatan ruhani, karena dalam perjamuan berkumpul orang-orang yang bermutu, berpendidikan tinggi dan bertingkah laku sesuai dengan keadaan, baik dalam berbicara, bertindak, maupun etiket. *Adab* melibatkan tindakan untuk mendisiplinkan pikiran dan jiwa untuk mencapai kualitas dan sifat yang baik oleh pikiran dan berbuat, bertindak yang betul untuk menjaga aspek kehormatan. Tampaknya an-Naquib, menyatakan penekanan pada *adab* mencakup "amal" dalam pendidikan dan proses pendidikan untuk menjamin bahwa "ilmu" [*'ilm*] dipergunakan secara baik dalam masyarakat. Maka kombinasi antara "ilmu" dengan "amal" dan "*adab*", dianggap sebagai kombinasi yang harmonis, karena ketiganya sebagai pendidikan. Pendidikan dalam kenyataannya adalah *ta'dib* karena *adab* sebagaimana didefinisikan sudah mencakup "ilmu" dan "amal" sekaligus"[94].

Kata *ta'dib* ditinjau dari segi bahasa, menurut Mahmud Yunus merupakan bentuk masdar dari kata "*addaba*" yang berarti memberi *adab* dan mendidik[95]. Istilah *ta'dib* yang diterjemahkan "pelatihan" atau "pembiasaan" mempunyai makna dasar sebagai berikut : [1 [*Ta'dib* berasal dari kata dasar *aduba - ya'dubu,* berarti melatih, mendisiplinkan diri untuk berperilaku yang baik dan sopan santun. [2] *Ta'dib* berasal dari kata dasar *adaba - ya dibu* yang berarti mengadakan pesta atau perjamuan yang berarti berbuat dan berperilaku sopan, dan [3] Kata *addaba* sebagai bentuk kata kerja

[93]Ibid, hlm. 53-54.
[94]Ibid, hlm. 54-60.
[95]Mahmud Ynus, *Kamus Arab - Indonesia*, hlm. 37.

ta'dib yang mengandung pengertian mendidik, memelihara, memperbaiki, mendisiplin, dan memberi tindakan"[96]. Maka secara umum *ta'dib* diartikan dengan mendidik, melatih, pembiasaan, memperbaiki, membentuk disiplin, memberi tindakan, untuk berperilaku baik dan memeliki sopan santun, sedangkan pada kehidupan sehari-hari, orang sering mengartikan kata *adab* dengan sopan santun yang tentu mencerminkan kepribadian.

Istilah "*addaba*" dalam kaitannya dengan konsep pendidikan Islam digunakan istilah *ta'dib*, yang oleh an-Naquib dengan gigih mempertahankan istilah *ta'dib* untuk konsep pendidikan Islam, sehingga "istilah *ta'dib* merupakan istilah yang dianggap tepat untuk menunjuk arti pendidikan Islam. Pandangan ini tentu didasarkan pada arti pendidikan adalah meresapkan dan penanaman *adab* pada manusia"--inilah *ta'dib*, dan juga didasarkan pada "tujuan akhir pendidikan Islam ialah menghasilkan manusia yang "baik", karena unsur fundamental yang inheren dalam konsep Islam tentang pendidikan adalah penanaman *adab*. Penanaman *adab* yang dimaksud meliputi kehidupan spritual dan material manusia yang mengajarkan sifat kebaikan yang dicarinya[97]. Kata *adab*, yang berarti "mendidik" menurut Ibnu Manzhur, merupakan padanan dari kata atau lafal "*'allama*" [علم] dan oleh az-Zajjaj, dikatakan sebagai cara Tuhan mengajar Nabi-Nya. Maka masdar "*addaba*", yakni "*ta'dib*" diartikan sebagai pendidikan dan mempunyai arti sama dan kita dapat rekanan konseptualnya di dalam istilah "*ta'lim*" [تعليم] [98] .

An-Naquib, menyatakan "*adab*" adalah "pengetahuan", sebagai "pengenalan tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam penciptaan sedemikian rupa, sehingga hal itu membawa kepada pengenalan tentang tempat yang tepat dari Tuhan dalam tatanan wujud dan kepribadian". Agar pengetahuan dapat dijadikan

---

[96] *Al-Mu'jam al-Wasit-Kamus Arab*, Mathba Angkasa, Jakarta, tt, hlm.19., dan Tim Dosen IAIN Malang, *Dasar-dasar Kependidikan Islam*, .hlm.16.

[97] Muhammad an-Naquib al-Attas, *Dilema Kaum Muslimin*, hlm. 144., dan Muhammad an-Naquib al-Attas, *Konsep Pendidikan dalam Islam...*, hlm.54.

[98] Muhammad an-Naquib al-Attas, *Konsep Pendidikan dalam Islam...*, hlm.60.

pengetahuan, dimasukkan unsur dasar pengakuan di dalam pengenalan - dan "pendidikan" didefinisikan sebagai "pengenalan dan pengakuan tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam keteraturan penciptaan sedemikian rupa, sehingga hal ini membimbing kearah pengenalan dan pengakuan tempat-tempat Tuhan yang tepat dalam tatanan wujud dan keperibadian". Kemudian definisi pendidikan yang termasuk pula proses pendidikan di dalamnya, dinyatakan sebagai: "pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan ke dalam manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa, sehingga hal ini membimbing kerah pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud dan keperibadian"[99].

Maka persoalan asasi tentang *ta'dib* menurut An-Naquib, adalah konsep *adab* yang diartikan dengan ilmu pengetahuan, pengajaran, pendidikan, dan pengasuhan. Pengetahuan dan pendidikan hanya berkenaan dengan manusia dan juga masyarakat, maka pengenalan dan pengakuan yang tepat dari segala sesuatu merupakan hal paling utama yang diterapkan pada pengenalan dan pengakuan manusia itu sendiri yaitu kedudukannya dan kondisinya dalam kehidupannya yang berhubungan dengan dirinya sendiri, keluarga, kelompoknya, dan masyarakatnya, serta disiplin pribadinya di dalam mengaktualisasikan dirinya. Selanjunya an-Naquib, menyatakan bahwa pengakuan terhadap tatanan kemanusiaan perlu dipahami sebagai suatu keteraturan secara hirarki dan sah dalam derajat (darajat) keutamaan berdasarkan kriteria al-Qur'an tentang akal, ilmu, dan kebaikan [*ihsan* - إحسان] dan mesti bertindak sesuai pengetahuan dengan cara yang posetif, dipujikan dan terpuji. Maka dengan berpedoman pada konsep *adab* yang mendasari tujuan pencarian ilmu atau pendidikan yang berintikan pengenalan diri pribadi yang dipenuhi dalam pengakuan merupakan unsur fundamental dalam pengenalan yang benar, dan

[99]Ibid, hlm. 61-62.

pengakuan apa-apa yang dikenali inilah yang menjadikan "pendidikan" suatu pendidikan. Maka sangat perlu untuk mengacu pada tempat yang tepat dalam tatanan kemanusian serta tatanan pengetahuan dan wujud[100]. Berdasarkan pandangan di atas, kemudian an-Naquib mendefenisikan *adab* sebagai sasaran pendidikan dan makna pendidikan Islam yang termasuk proses pendidikan di dalamnya sebagai berikut : "*Adab* ialah pengetahuan yang mencegah manusia dari kesalahan-kesalahan penilaian. *Adab* berarti pengenalan dan pengakuan tentang hakikat bahwa pengetahuan dan wujud bersifat teratur secara hirarkis sesuai dengan berbagai-bagai tingkat dan derajat tingkatan mereka dan tentang tempat seseorang yang tepat dalam hubungan dengan hakikat itu serta dengan kapasitas dan potensi jasmaniah, intelektual, maupun ruhaniah seseorang[101]".

Dari pengertian di atas, dapat simpulkan bahwa an-Naquib memberi gambaran tentang penggunaan kata *adab* adalah, sebagai berikut : *Pertama*, *adab* merupakan disiplin jasmani, pemikiran dan ruhani, serta melibatkan tindakan untuk mendisiplinkan pikiran dan jiwa, untuk pencapaian kualitas dan sifat yang baik oleh pikiran dan penyelenggaraan tindakan yang benar atau tepat dan bukan yang salah. *Adab* membolehkan seseoran menerima ilmu dan bertindak menurut ilmu atau disiplin. *Kedua*, *adab* juga merupakan metoda untuk mengetahui, sehingga dapat memenuhi kondisi pada tempat yang tepat dan juga merupakan pencerminan dari kearifan dalam hubungan dengan masyarakat, karena *adab* adalah tatanan adil yang ada di dalamnya. Maka kata *adab* didefinisikan secara singkat adalah ungkapan [*masyhad* [مشهد] keadilan seperti dicerminkan oleh sifat kearifan. *Ketiga*, *adab* dalam pengertian dasar yang asli adalah "mengundang pada suatu perjamuan" sehingga *adab* bermakna perjamuan. Maka dengan analog dari "undangan perjamuan", berarti

[100] Ibid, hlm. 62-63.
[101] Ibid, hlm. 63.

memberikan makanan "akal fikiran" dan "jiwa". Hal ini tersirat dalam Hadis Nabi yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud ra:

إنّ هذا القرآن مأدبه الله في الإرض فتعلّموا من مأدبته. رواه ابن مسعود

artinya:" *Sesungguhnya al-Qur'an ini adalah jamuan*] *undangan*] *Allah di atas bumi, maka belajarlah dengan mendalam dari perjamuan-Nya itu*"[102]. *Keempat*, konsep *adab* mendasari tujuan pencarian ilmu atau pendidikan, sehingga *adab* merupakan tujuan pendidikan, maksudnya dalam setiap lapangan ilmu yang dicari, ia mesti memberi pedoman kepada manusia tentang perlakuan yang sesuai dan tepat. Perlakuan [perbuatan] tanpa ilmu merupakan kejahilan dan ilmu tanpa paraktek [*amal*] merupakan hal yang sia-sia. Keduanya tidak dapat dijadikan sebagai dasar, karena tidak mempunyai kaitan dengan *ta'dib*[103]. Tujuan mencari pengetahuan dalam Islam adalah menanamkan kebaikan dalam diri manusia, meliputi kehidupan material dan spritual manuasia, karena "manusia yang baik" adalah manusia yang "*saleh, taqwa*, dan insan kamil sebagai parameter dari manusia yang baik"[104], atau manusia yang memeliki sifat *shiddiq, amanah, tabligh*, dan *fathanah*, sebagai insan kamil atau perilaku lain yang mencerminkan manusia yang baik. *Kelima*, penekanan *adab* mencakup amal dalam pendidikan dan proses pendidikan adalah untuk menjamin bahwa ilmu [*'ilm*] dipergunakan secara baik di dalam masyarakat.

Pendidikan dalam kenyataannya adalah *ta'dib,* karena *adab* sebagaimana didefinisikan sudah mencakup *ilmu* dan *amal*, maka *ilmu*, *adab*, dan *amal* merupakan konsep yang utuh. Pendidikan, tepat sekali apa yang dimaksudkan Nabi Saw, dengan mengisyaratkan identitas antara *adab* dan *'ilm*, adalah أدبني ربي فأحسن تأديبي artinya" :*Tuhanku telah "mendidikku", dan dengan demikian "menjadikan pendidikanku yang terbaik*"[105]. Dengan dasar ini, an-Naquib, menyatakan istilah yang tepat

---

[102]Muhammad an-Naquib al-Attas, *Dilema Kaum Muslimin*..., hlm. 143.

[103]*Ilmu dan Pendidikan Adab*, Majalah Risalah Penggerak Generasi Baru, Edisi Internet, From: http://www.abim.org.my/majalah/risalah/98bil1/risalah4.html, Januari 1998, hlm. 3.

[104]A. Malik Pajar, *Reorientasi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Fajar Dunia, 1999), hlm. 79.

[105]Muhammad an-Naquib al-Attas, *Konsep Pendidikan dalam*..,hlm. 60.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

digunakan untuk mengartikan pendidikan adalah *ta'dib*, dan istilah *tarbiyah* dianggap kurang tepat untuk dimaksudkan pendidikan Islam. Dengan demikian istilah *ta'dib* merupakan istilah yang tepat yang digunakan untuk merumuskan pendidikan Islam dari pada *tarbiyah,* karena istilah *tarbiyah* merupakan istilah yang relatif baru, dan dirumuskan oleh orang-orang yang mengadopsi pemikiran modernis[106]. Untuk itu menurutnya, istilah *tarbiyah* untuk maksud pendidikan pada hakekatnya mencerminkan konsep Barat tentang pendidikan, karena *tarbiyah* merupakan terjemahan dari istilah *"education"*, mengingat secara semantik istilah *tarbiyah* tidak tepat dan tidak memadai untuk membawakan konsep pendidikan dalam pengertian Islam dengan alasan:

Pertama, istilah *tarbiyah* yang dipahami sekarang tidak ditemukan dalam leksikon-leksikon bahasa Arab besar. Ibnu Manzhur merekam bentuk *tarbiyah* bersamaan dengan bentuk lain dari akar "*raba*" dan "*rabba*" yang diriwayatkan al-Asma'i bahwa istilah-istilah tesebut memuat makna yang sama. Al-Jauhari mengatakan bahwa *tarbiyah* dan beberepa bentuk lain yang disebutkan al-Asma'i berarti : memberi makna memelihara, mengasuh yang berasal dari akar kata "*ghadza*" - atau "*ghadzw*"[غذو - غذا] Makna dari kata-kata ini mengacu kepada sesuatu yang tumbuh, seperti anak-anak, tanaman dan sebagainya. An-Naquib, menyatakan pada dasarnya *tarbiyah* yang berarti mengasuh, menanggung, memberi makan, mengembangkan, memelihara, membuat, menjadikan bertambah dalam pertumbuhan, membesarkan, memproduksi hasil-hasil yang sudah matang dan menjinakkan. Maka istilah *tarbiyah* dalam bahasa Arab, penerapannya tidak hanya terbatas pada manusia saja, tetapi medan semantiknya meluas sampai pada spesies

[106]Kata-kata Latin *educare* dan *education*, yang dalam bahasa Inggris berarti educate dan education, secara konseptual dikaitkan dengan kata-kata Latin educare, atau dalam bahasa Inggris "educe" - menghasilkan, mengembangkan dari kepribadian yang tersembunyi atau potensial, yang di dalamnya "proses menghasilkan dan mengembangkan" mengacu kepada segala sesuatu yang bersifat fisik dan meterial. Konsep pendidikan yang diturunkan dari konsep-konsep Latin yang dikembangkan dari istilah-istilah tersebut di atas meliputi spesies hewan dan tidak dibatasi pada "hewan berakal". Istilah *tarbiyah* untuk maksud pendidikan pada hakekatnya mencerminkan konsep Barat tenteng pendidikan. Mengingat istilah *tarbiyah* adalah suatu terjemahan yang jelas dari istilah "education" menurut arti Barat, karena makna-makna dasar yang dikandung olehnya mirip dengan yang dapat ditemui di dalam rekanan Latinnya. Meskipun para penganjur pengguna istilah *tarbiyah* terus membela istilah itu - yang mereka katakan dikembangkan dari al-Qur'an - pengembangannya didasarkan atas dugaan belaka (Ibid, hlm. 65).

lain yaitu material, tanaman, hewan, yang tidak terbatas hanya pada manusia, sehingga "istilah *tarbiyah* tidak tepat digunakan untuk pendidikan Islam yang hanya untuk manusia saja[107].

Kedua, istilah *tarbiyah* yang dikembangkan dari al-Qur'an berkenaan dengan istilah *raba* dan *rabba*, yang memiliki konteks hubungan dengan Tuhan. Misalnya kata *rabbayani* yang bermakna rahmah, dan mengandung ampunan atau kasih sayang. Istilah ini juga mempunyai makna pemeliharaan orang tua kepada anaknya berupa pemberian makanan, kasih sayang, pakaian, tempat berteduh serta perawatan. Maka pengertian utama istilah *ar-rabb* adalah *at-tarbiyah* yang bermakna, membawa sesuatu kepada keadaan kelengkapan secara berangsur, membawa kedaan secara berangsur sebagai tindakan rahman, dan karenanya secara analogis diartikan tindakan-tindakan *tarbiyah* tidak melibatkan pengetahuan. An-Naquib, menyatakan "ilmu" berbeda dengan "rahmah" atau kasih-sayang, hal ini tersirat dalam al-Qur'an, وسعت كل شيئ رحمة وعلماء , artinya": *Tuhan meliputi segala sesuatu dengan rahmah dan 'ilm* ."Dari ayat ini dapat dipahami bahwa "rahmah" bermakna pemberian wujud oleh Tuhan kepada ciptaan-Nya. Jika menterjemahkan *tarbiyah*, dengan membawa sesuatu kepada suatu keadaan kelengkapan secara berangsur, maka makna kelengkapan yang dimaksud yaitu mengacu pada kondisi-kondisi fisik dan meterial daripada kondisi "rasional" dan "intelektual", yang mengharuskan "penanaman pengetahuan" tidak inheren dalam istilah *tarbiyah*. Ketika Fir'aun berkata kepada Nabi Musa as.: *"Tidakkah telah kami besarkan kamu sebagai anak kecil di antara kami?"* ألم تربك فينا وليدا . Konteks ayat ini kemudian tidak diharapkan untuk menyimpulkan bahwa Fir'aun telah mendidik Nabi Musa as, meskipun ungkapan *nurabbika* telah melakukan *tarbiyah* kepada Nabi Musa as, tetapi yang dimaksud adalah *tarbiyah*

[107] Ibid, hlm. 65-67.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

secara sederhana, berarti hanya membesarkan, tanpa mesti mencakup "penanaman pengetahuan" dalam proses itu[108].

Ketiga, jika suatu makna yang berhubungan dengan pengetahuan dapat disusupkan ke dalam konsep *rabba*, maka makna tersebut mengacu pada pemilikan pengetahuan dan bukan pada penanamannya, dan tidak mengacu pada pengertian pendidikan yang diamksud. Oleh sebab itu Istilah *rabbani* [ربّي] yang dimaksud oleh an-Naquib, merupakan nama yang diberikan kepada orang-orang bijaksana yang terpelajar dalam bidang pengetahuan tentang *ar-rabb*. Sebagai contoh, Muhammad al-Hanafiyah, menyebut Ibnu Abbas sebagai "*rabbani*" umat, Ali bin Abi Thalib menggolongkan manusia ke dalam tiga tingkatan dengan "*alim rabbani* sebagai tingkat pertama. Untuk itu, Ibnu 'Ubaid, menyatakan istilah "*rabbani* pada hakekatnya bukan istilah bahasa Arab, melainkan istilah Ibrani, sedangkan an-Naquib, menyatakan di dalam al-Qur'an ditemukan tiga contoh yang menyebut "*rabbani*", yang mengacu kepada *rabbi-rabbi* Yahudi[109].

Mencermati pandangan an-Naquib, bahwa "proses pendidikan Islam lebih sesuai dengan istilah *ta'dib* jika dibandingkan dengan *ta'lim* dan *tarbiyah*, karena cakupan *tarbiyah* tidak hanya pada bersubjek manusia, tetapi lebih luas dari pada pendidikan hanya untuk manusia. Artinya, proses *tarbiyah* memiliki cakupan yang lebih luas yaitu mencakup "aspek-aspek penciptaan". *Ta'lim* memiliki cakupan yang lebih spesifik yang lebih banyak ditekankan hanya pada proses penalaran, artinya dapat saja *ta'lim* telah dialami seseorang yang pada akhirnya tidak memiliki ketunduhan hati kepada Allah"[110]. Dengan alasan-alasan ini, an-Naquib mengatakan bahwa istilah *tarbiyah* bukanlah istilah yang tepat untuk pendidikan Islam dan istilah yang tepat untuk pendidikan Islam adalah *ta'dib*. Sedangkan, para ahli yang lain melihat sebenarnya ketiga istilah tersebut merupakan satu kesatuan yang terkait dan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[108]Ibid, hlm. 69-72.
[109]Ibid, hlm. 72-74.
[110]*Konsep Dasar Ta'dib*, From: http://www.pii.4t.com/ Konsep.htm.8/1/ 2001,hlm. 2.

ketiga istilah tersebut dari segi maknanya saling terkait antara satu sama lain. Maka dapat dipahami, perbedaan penggunaan istilah sangat tergantung pada sudut pandangan yang mewarnai seseorang untuk membangun suatu konsep.

Selain istilah *ta'dib* ada juga istilah *"tahzib"* [تهذيب] yang menekankan aspek "perbaikan" dan "penghilangan sifat buruk" manusia. Hans Wehr, mempunyai sepuluh macam makna ,yaitu: "penghilangan yang jelek] *expurgation*], perbaikan [*emendation*], pembetulan [*correction atau rectification*], perbaikan [*revision*], pelatihan [*training*], perintah [*intruction*], pendidikan [*education*], penumbuhan [*ipbimging*], kebudayaan [*culture*], dan perbaikan [*refinement*]"[111]. Istilah *tahzib* juga menunjukkan pada upaya menjadikan manusia meningkatkan kualitas kebaikan seseorang supaya moral atau akhlaknya menjadi lebih bagus"[112] dan merupakan tujuan akahir pendidikan Islam. Maka istilah *tahzib* juga dimaksudkan sebagai upaya pendidikan. Dengan demikian, "dapat dikatakan bahwa keempat istilah tersebut mengarah atau dimaksudkan sebagai upaya mendidik yang memiliki titik tekan atau sudut pandang sendiri-sendiri"[113].

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Apabila dikaji, sebenarnya terma untuk pendidikan Islam yang digunakan dalam al-Qur'an hanya *at-tarbiyah* dan *at-ta'lim*. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa konsep pendidikan Islam tidak menyentuh aspek yang dimiliki istilah *ta'dib*, sebab esensi dari sistem pendidikan adalah perbaikan *adab* atau moral. Maka dari sini an-Naquib, memberikan arti bahwa pendidikan Islam dengan istilah *ta'dib*, karena esensi dari pendidikan adalah perbaikan moral dan tercermin dari misi Nabi Saw adalah penyempurnaan akhlak, dengan sabdanya sendiri: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق , artinya*: "Aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak"*. Bertolak dari arti tersebut, maka pendidikan Islam didefinisikan "sebagai upaya menanamkan *adab*

[111]Musthofa Rahman, *Pendidikan Islam dalam Perspektif al-Qur'an*, hlm. 63.
[112]Ibid, hlm. 63.
[113]Ibid, hlm. 63.

pada manusia"[114]. Sedangkan lafal *al-tahzib,* "lebih menekankan pada aspek "perbaikan" atau "penghilangan" sifat buruk pada manusia. Proses ini juga berkenaan dengan masalah moral, sehingga pendidikan akhlak diistilahkan dengan *tahzib al-akhlaq.* Maka nampaklah bahwa makna dari keempat istilah tersebut sesuai dengan misi dan tujuan pendidikan Islam, yaitu "mengandung pemeliharaan fisik, jiwa, pengembangan daya nalar dan perbaikan moral"[115] atau tingkah laku yang baik sehingga pendidikan Islam diharapkan dapat terbentuk manusia yang mulia sebagai insan kamil.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah *tarbiyah, ta'lim,* dan *ta'dib - tahzib* merupakan satu kesatuan [*koherensi*] yang saling terkait satu dengan lainnya. Misalnya , apabila pendidikan dinisbahkan kepada *ta'dib* ia harus melalui proses pengajaran [*ta'lim*] dan *tarbiyah*, sehingga dengan proses *ta'lim* ia memperoleh ilmu dan ilmu yang telah dimiliki terwujudlah dalam sikap atau tingkah laku yang sesuai dengan tujuan pendidikan yaitu "menghasilkan manusia yang baik, manusia yang sempurna [*insan kamil*]". Maka keterkaitan *tarbiyah, ta'lim* dan *ta'dib - tahzib* dapat digambarkan sebagai berikut :

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[114]Muhammad an-Naquib al-Attas, *Islam dan Sekularisme*, terj. Kasindo Djoyoswamo, (Jakarta: Pustaka, 1991), hlm.222.
[115]Musthofa Rahman, *Pendidikan Islam dalam Perspektif al-Qur'an*, hlm. 64.

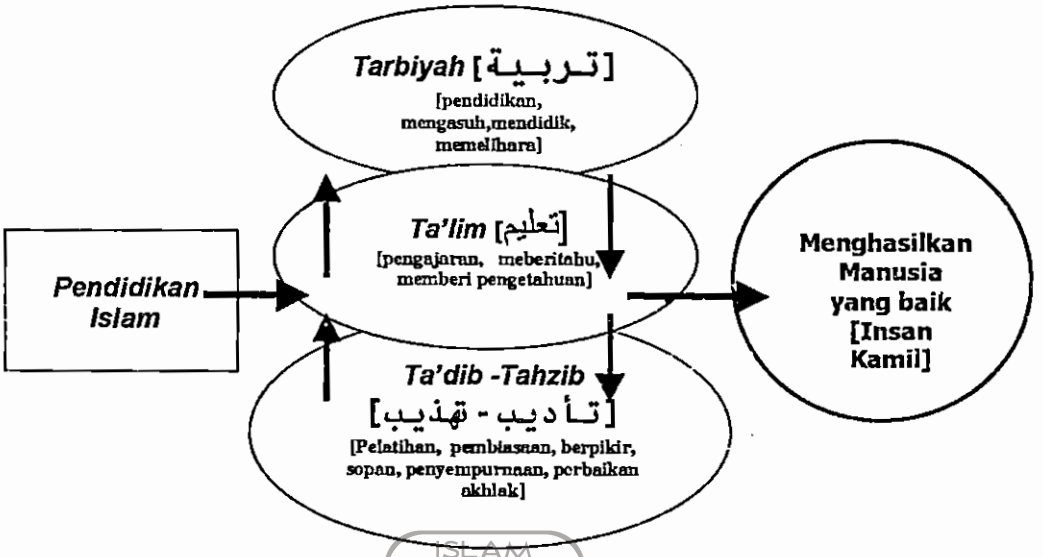

Gambar 1
Diagram Keterkaitan *Tarbiyah*, *Ta'lim* dan *Ta'dib-Tahzib*

Keempat istilah ini mengarah atau dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik dengan memiliki tekanan sendiri-sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling terkain atau *kohorensi* antara satu dan yang lain. *Tarbiyah* memiliki titik tekan pada pendidikan, mengasuh, mendidik, memelihara, dan memiliki, sehingga makna lengkap dari *tarbiyah* adalah menyampaikan sesuatu hingga mencapai kesempurnaan. *Ta'lim*, titik tekannya pada mengajar atau pengajaran yang lebih bersifat memberitahu atau memberi pengetahuan. Apabila kedua istilah *tarbiyah* dan *ta'lim* disatukan menjadi "*tarbiyah wa ta'lim* [تربية و تعليم] berarti pendidikan dan pengajaran, yaitu proses pendidikan dan pengajaran untuk memberi tahu atau memberi pengatahuan. Tetapi proses memberi tahu atau memberi pengatahuan ini belum mengandung arti pemberian kepribadian ,maka *ta'dib* yang memiliki titik tekan pada usaha pelatihan dan pembiasaan, yaitu melatih diri untuk berperilaku baik, sopan santun, atau berakhlak. Maka dalam proses *tarbiyah* dan *ta'lim* harus dihiasi dengan akhlak yang disebut dengan *ta'dib*, dan proses *ta'dib* sudah terdapat di dalamnya pendidikan yaitu *tarbiyah* dan *ta'lim*, karena proses *ta'dib* harus melalui proses pendidikan [*terbiyah*]

dan pengajaran [*ta'lim*]. Maka perpaduan inilah yang disebut dengan *tarbiyah* Islamiyah, karena dengan ilmu yang dimiliki terwujudlah dalam sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. Dengan demikian, *tarbiyah Islamiyah* [تربية إسلامية] adalah pendidikan dan pengajaran yang lebih tertuju pada pemelihaan fisik, jiwa, pengembangan daya nalar dan penyempurnaan atau perbaikan akhlak [*tahzib*] untuk mencapai manusia yang baik [*insan kamil*], sebagai tujuan akhir pendidikan.

Dengan demikian pendidikan menurut pandangan Islam adalah: "*Pertama*, pendidikan merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar dengan tujuan memelihara dan mengembangkan *fitrah* serta potensi [sumber daya insani] menuju terbentuknya manusia seutuhnya [insan kamil]. *Kedua,* pendidikan adalah proses kegiatan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan,seirama dengan perkembangan subyek didik"[116], tersirat dalam firman Allah, al-Insyiqaq [84],ayat 19: لتركبن طبقا عن طبق , artinya" :*Kamu manusia akan mengalami hidup tingkat demi tingkat*"[117]. *Ketiga*, pendidikan yang sebenar-benarnya [*al-Haq*] adalah Allah sebagai *rabbul 'alamin*, karena Dia tidak hanya mengatur, tetapi juga membimbing dan memlihara alam semesta termasuk manusia"[118]. Paradigma ini merupakan esensi ajaran Islam, yakni *Tauhid Rububiyyah*, untuk itu, "peran seorang pendidik harus sesuai dengan tujuan Allah SWT menciptakannya, artinya, pendidik harus mampu mengikuti syariat agama Allah"[119], karena "pendidikan merupakan salah satu tugas manusia sebagai *khalifatullah fil-ard* dan sekaligus sebagai 'ibadah kepada-Nya. Implikasin dalam pendidikan Islam, ialah : (1) pendidikan benar-benar bersifat normatif *ilahiyah* karena berlandaskan pada nilai-nilai *ilahiyah*, (2) pendidikan tidak sekedar berorientasi pada kekinian atau kedunian saja, tetapi juga pada ukhrawi, (3)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[116]Achmadi, *Pendidikan Islam sebagai Paradigma,* hlm. 16.
[117]Al-Insyiqaaq (84): 19.
[118]Achmadi, *Pendidikan Islam sebagai Paradigma,* Loc.cit.
[119]Abdurrahman an-Nahlawi, *Ushulut Tarbiyah,* terj..., hlm.21.

pendidikan bertanggungjawab penuh, tidak hanya sekedar bertanggungjawab pada manusia tetapi juga bertanggung jawab kepada Allah, (4) pendidikan harus bersifat optimis [merencanakan dan melakukan],karena hasil akhir pendidikan merupakan ketentuan Allah. Firman Allah : أليس عليك هدهم ولكن الله يهدي من يشاء artinya: "Bukankah kamu yang menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allahlah yang memberi petunjuk"[120], (5) tugas pokok pendidik, ialah merencanakan dan melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan Sunnah Allah[121]. Dengan demikian, manusia sebagai pendidik dapat tunduk kepada aturan (sunnah) Allah, dan manusia harus berilmu dan berakhlak, sedangkan manusia sebagai peserta didik harus menjadikan nilai-nilai moral sebagai pijakan pemanfaatan ilmunya.

B. Konsep Manusia dan Pendidikan Islam

Pendidikan adalah sesuatu yang secara bertahap ditanamkan ke dalam manusia[122], karena manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pendidikan dan pembentukan kehidupan. Sosok manusia ideal merupakan cita-cita pendidikan yang diharapkan menjadi aktor utama dalam pembentukan kebudayaan. Maka dengan sendirinya ketika berbicara tentang konsep pendidikan, mesti dihubungkan dengan hakekat manusia dan tidak dapat terlepas dari gambaran tentang sosok ideal manusia sebagai muara cita-cita pendidikan, yang tidak hanya berbicara aspek jasmaniah dan ruhaniah saja, tetapi aspek lain dari manusia itu sendiri. Oleh karena itu, pengertian seseorang atau suatu golongan tentang pendidikan sangat bergantung kepada pandangan tentang manusia; hakikat, sifat-sifat atau karakteristiknya dan tujuan hidup manusia itu sendiri, dengan kata lain perumusan pendidikan bergantung kepada pandangan hidupnya. "Apakah manusia dilihat sebagai kesatuan badan dan jiwa, ataukah jasmani dan ruhani? Apakah manusia dianggap memeiliki kemampuan

[120]Al-Baqarah (2), ayat 272.
[121]Achmadi, *Pendidikan Islam sebagai Paradigma*, hlm. 17.
[122]Muhammad an-Naquib al-Attas, *Kosep Pendidikan dalam...*, hlm. 36.

bawaan [*innate*] yang "menentukan perkembangannya dalam lingkungannya" [*"autoplastis"*], atau lingkungannyalah yang menentukan [domain] dalam perkembangan manusia [*"aloplastis"*]?. Bagimanakah kedudukan individu dalam masyarakat?, apakah tujuan hidup manusia?, apakah manusia dianggap hanya hidup sekali di dunia ini, ataukah hidup lagi di hari akhirat?, demikian beberapa pertanyaan filosofis[123].

Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebuat di atas, menentukan pandangan terhadap hakekat dan tujuan pendidikan. Dari sini pangkal perbedaan rumusan pendidikan atau timbulnya aliran-aliran pendidikan seperti ; pendidikan Islam, Kristen, Liberal, progresif atau pragmatis, komunis, demokratis, dan lain-lain. Keaneka ragaman pendangan tentang pendidikan merupakan suatu hal yang wajar. Tetapi "dalam keanekaragaman pandangan tentang pendidikan tersebut terdapat titik-titik persamaan tentang pengertian pendidikan, yaitu pendidikan dilihat sebagai suatu proses; dengan proses itu seseorang [dewasa] secara sengaja mengarahkan pertumbuhan atau perkembangan seseorang [yang belum dewasa][124]. Sedangkan proses adalah kegiatan mengarahkan perkembangan seseorang sesuai dengan nilai-nilai yang merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas. Kemudian dari pengertian tersebut, tergambar bahwa kegiatan atau proses pendidikan hanya berlaku pada manusia tidak pada hewan.

Pembicaraan tentang pendidikan dan tujuan pendidikan "memestikan kita berbincang tentang sifat-sifat asal [*nature*] menusia menurut pandangan Islam, sebab pada manusia itulah dicita-citakan sesuatu yang ditanamkan oleh pendidikan, dengan kata lain manusia macam mana yang ingin dibentuk dengan pendidikan itu"[125]. Maka gambaran tentang manusia ideal, "menentukan perumusan dan konseptualisasi tujuan pendidikan yang merupakan arah dan target dari keseluruhan proses

---

[123]W.A. Gerungan, *Psikologi Sosial*, Cet.Kesembilan, (Bandung: Eresco,1986), hlm. 55.
[124]Ibid, hlm. 55.
[125]Anwar Jasin, *Kerangka Dasar Pembaruan*..., hlm. 2.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pendidikan, dan tujuan pendidikan akan mengilhami rumusan teori pendidikan sebagai dasar pencapaian pendidikan". Kemudian proses "selanjutnya secara berturut-turut akan menjadi pedoman penyusunan sistem, strategi, metode, dan teknik dalam pelaksanaan program pembelajaran"[126]. Maka perbicaraan dan diskusi tentang manusia dan pendidikan tentu akan ditemukan oleh pemahaman makna dan hakekat pendidikan, sedangkan pemahaman akan menjaga konsistensi proses, sehingga pendidikan dan pemberdayaan masyarakat benar-benar berlangsung secara manusiawi. Maka dengan pandangan yang dikemukakan di atas, perbincangan selanjutnya di bawah ini akan dipusatkan pada konsep manusia, yaitu siapakah manusia itu?, kemampuan dasar [*fitrah*] manusia, dan manusia sebagai mahkluk paedagogik.

1. Siapakah Manusia itu?

Pertanyaan tentang manusia telah banyak memperoleh jawaban dari para ahli pikir yang terdahulu. "Filosof Yunani kuno Aristoteles [384 - 322 SM], memberikan jawaban dengan menitik beratkan pada kemampuan manusia berpikir dan berkodrat hidup bermasyarakat. Manusia dikatakan sebagai *animal rasional* [makhluk berpikir]"[127]. Sarjana-sarjana muslim mendefinisikan manusia *al-hayawanun Nathiq* [الحيوان الناطق] yang dalam hal ini istilah *nathiq* [ناطق] berarti rasional. Manusia memiliki suatu fakultas batin yang merumuskan makna-makna yaitu *dzu-nuthq* [ذونطق] [128]. Selain itu, ada pandangan tentang manusia dilihat dari sudut manusia memiliki keistimewaan menggunakan "simbol-simbol". Filsuf Inggris Ernst Cassirer [1874] menyatakan bahwa manusia adalah *animal symbolicum* [hewan yang bersimbol]. Sebagian para ahli yang melihat manusia, dengan menitikberatkan pada keharusan manusia bekerja mereprodusir bahan-bahan alami menjadi bahan-bahan ekonomi guna menenuhi kebutuhan hidup manusia sehari-hari, maka Karl Marx [1818 – 1883]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[126] *Konsep Dasar Ta'dib*, From: http://www.pii.4t.Com/Konsep.htm.,8/1/ 2001, hlm. 3.
[127] Ahmad Azhar Basyir, *Citra Manusia Muslim*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1985), hlm. 1.
[128] Muhammad an-Naquib al-Attas, *Konsep Pendidikan...*, hlm. 37.

mengatakan bahwa manusia adalah *homo faber* [makhluk pekerja][129], dan masih banyak lagi pandangan tentang manusia yang dikemukakan para ahli, yang masing-masing menitik beratkan pada salah satu segi dari ciri-ciri, karakteristik, dan sifat-sifat yang dimiliki manusia.

Bagaimana jawaban Islam atas pertanyaan tersebut, dalam Qur'an ditemukan penciptaan manusia, "bermula dari penciptaan jasad yang berasal dari sari pati tanah [Q. S. 7:148, 11:61, 21:8, 23:12, dan 55:14]. Unsur jasad mengandung makna bahwa manusia berasal dari alam dan sepenuhnya terikat dengan hukum-hukum alam atau *sunnatullah*. Di dalam jasad terdapat kehidupan [*al-hayat*] yang menggerakkan tubuh manusia berinteraksi dengan realitas alam", dan manusia mempunyai "kecenderungan [*instink*] dan pertumbuhan. Manusia ditiupkannya ruh Tuhan yang menjadi salah satu unsur kehadiran manusia", karena dengan "unsur ini manusia mampu mendayagunakan instrumen jasad dan hayatnya untuk menangkap dan memahami kebenaran [Q.S. 32:9, 15:29, 66:12, dan 58:22] yang kemudian akan memunculkan kesadaran akan hakekat diri dan kehidupannya". Ruh yang ditiupkan pada manusia merupakan sarana untuk membangun "kekuatan berpikir yang memungkinkan manusia menyusun pengetahuan dan berhubungan dengan kebenaran. Unsur-unsur inilah yang membentuk kepribadian manusia [*al-nafs*], yaitu pribadi yang mempunyai pandangan, pemikiran, dan sikap yang kemungkinan berbeda satu dengan yang lain".

Selain argumentasi yang dikemukakan di atas, salah satu ayat Qur'an yang dapat dikemukakan dan dijadikan sebagai jawaban atau argumentasi yang mendasar atas pertanyaan tersebut yang tersirat dalam firman Allah surat al-Mukminun (23), ayat 115, sebagai berikut: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون artinya" :*Apakah kamu sekalian mengira, bahwa Kami menciptakan kamu sia-sia tanpa hikmah dan tanggung jawab?, dan bahwa kamu semuanya tidak dikembalikan kepada kami*?"[130].

---

[129]Ahmad Azhar Basyir, *Citra Manusia Muslim*, hlm. 1.

[130]*Konsep Dasar Ta'dib*, From: http://www.pii.4t.com/Konsep.htm.,1/8/ 2001, hlm.4.

Ahmad Azhar Basyir, menyatakan bahwa dalam ayat ini diperoleh tiga unsur untuk memberikan pengertian tentang manusia, yaitu: (1) penegasan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah, (2) manusia diciptakan tidak sia-sia, (3) manusia akhirnya akan dikembalikan kepada Allah untuk mempertanggung-jawabkan perbuatan-perbuatannya selama hidup didunia. Maka dari surat ini dapat disimpulkan bahwa rumusan pengertian "manusia adalah makhluk fungsional yang bertanggungjawab"[131], artinya, masing-masing manusia bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya [Q.S.6:164] [*"setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya"*]. Sedangkan *Heterogenitas* manusia kemudian diaktualisasikan di dalam kehidupannya yang ditentukan oleh kemampuan untuk mengubah dan mendayagunakan diri, sebagaimana tersirat dalam Qur'an (8):53 sebagai berikut:

..., ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم artinya" :*yang demikian karena Allah sekali-kali tidak akan mengubah nasib suatu kaum*"[132]... Selain ayat ini, dalam surat ar-Ra'd (13), ayat 11, Allah berfirman: ...إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم..., artinya" :*Sesungguhnya, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka sendiri mengubah dirinya*"[133] .Interpretasi dari ayat-ayat ini, menunjukkan manusia memeliki kebebasan untuk mengubah dan mendayagunakan potensi dirinya, untuk itu manusia harus berusaha dengan sungguh-sungguh dalam aktualisasi diri dan selalu berada pada jalan kebenaran ia akan senantiasa mendapatkan bimbingan-Nya.

Maka untuk memenuhi kemampuan manusia mendayagunakan potensi dirinya, manusia dibelaki dengan kemampuan belajar dan mengetahui. Kemampuan belajar, ditegaskan dalam firman Allah, surat 'Alaq ayat 3 dan 5, yang artinya: "*Bacalah dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Dia mengajarkan kepada manusia*

---

[131] Al-Mukminin (23): 115., terj.Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Cet.Pertama, (Yogyakarta: UII Press, 1998), hlm. 610.

[132] Ahmad Azhar Basyir, *Citra Manusia Muslim*, hlm. 2.

[133] Ar-Rad, Ayat 11., terj. Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, hlm. 435.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

apa yang tidak diketahuinya"['Alaq : 3 dan 5][134]. Selain itu, Allah juga membekali manusia dengan kemampuan membaca dan potensi pengetahuan, seperti tersirat dalam firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 31, yaitu: "*Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama [benda-benda] seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman: 'Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu itu jika kamu memang orang-orang yang benar'. Mereka menjawab: 'Mahasuci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami...*" [135] Dari ayat tersebut tanpak bahwa, manusia telah dibekali dengan kemampuan pengetahuan dan untuk mengfunsikan kemampuan tersebut, manusia dibekali dengan berbagai sarana belajar seperti: penglihatan, pendengaran, dan hati. Al-Maududi, menyatakan bahwa "pendengaran merupakan pemeliharaan pengetahuan yang diperoleh dari orang lain, penglihatan merupakan pengembangan pengetahuan dengan hasil observasi dan penelitian yang berkaitan dengannya, dan hati merupakan sarana membersihkan ilmu pengetahuan"[136]. Hal ini ditegaskan dalam Qur'an surat an-Nahl (16), ayat 78, yaitu: ... وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ... artinya..." :*dan Dia jadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani"...*[137] .Maka, secara jasmaniah manusia telah dilengkapi dengan sarana "pendengaran, penglihatan, dan hati sabagai sarana untuk merenung, tafkur, berpikir jernih, serta meneliti alam semesta ini. Dengan akal dan hatinya, manusia mengolah alam untuk dijadikan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupannya"[138], dan inilah ciri manusia sebagai mahkluk fungsional. Sarana pendidikan lain yang dimiliki manusia adalah bahasa, berupa kemampuan untuk mengeluarkan gagasan, dan kemampuan untuk menulis. Manusia telah diberi kelengkapan kemampuan jasmaniah [fisiologis] dan kemampuan rohaniah [mental psikologis] yang dapat dikembangkan seoptimal

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[134]Al-'Alaq, Ayat 3 dan 5.
[135]Al-Baqarah (2), Ayat 31-32.
[136]Abdurrahman an-Nahlawi, *Ushulut Tarbiyah*, terj. hlm. 42
[137]Al-Qur'an, Surat an-Nahl (16), Ayat 78., Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, hlm. 477.
[138]Abdurrahman an-Nahlawi, *Ushulut Tarbiyah*, terj. hlm. 44.

mungkin. Manausia mempunyai kemampuan untuk "dididik secara ilmiah melalui kemampuan berpikir, observasi, diskusi, hingga meraih ilmu pengetahuan dan menghasilkan sesuatu. Melalui kemampuan berpikir dan belajar diharapkan manusia mampu mempelajari dan memahami[139] fenomena-fenomena [*sunnatullah*] yang ada.

Dari kajian di atas, apabila dilihat dari segi kemampuan dasar "paedagogis", manusia dipandang sebagai "homo educandum", makhluk yang harus dididik, atau juga disebut "animal educabil", makhluk sebangsa binatang yang dapat didik, maka jelas manusia itu sendiri tidak dapat terlepas dari potensi psikologis yang dimiliki secara individual berbeda dalam abiliti dan kapasitasnya dari kamampuan individual manusia lainnya[140], karena manusia sejak dilahirkan telah membawa potensi [*fitrah*] untuk dapat dididik dan dapat mendidik serta antara manusia yang satu dengan yang lain berbeda abilitinya. Jadi pengetahuan tentang asal kejadian manusia merupakan hal yang penting dalam merumuskan tujuan pendidikan, karena manusia adalah makhluk ciptaan Allah, ia tidak muncul dengan sendirinya atau berada oleh dirinya sendiri. Manusia diciptakan dari segumpal darah [al-'Alaq ayat 2], dan juga dibekali dengan "potensi bawaan". Manusia adalah makhluk utuh yang terdiri atas jasmani, akal, dan rohani sebagai potensi pokok. Oleh karena itu, asal kejadian manusia ini justru dijadikan pangkal tolak dalam menetapkan dan mengembangkan pandangan hidup baginya, sebab manusia merupakan salah satu makhluk ciptaan Tuhan, yang perkembangan dipengaruhi oleh pembawaan dan lingkungannya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Kamampuan Dasar [*fitrah*] Manusia

Dalam pandangan Islam kemampuan dasar atau pembawaan disebut *fitrah* yang dalam pengertian "etimologi mengandung arti "kejadian", dan *fitrah* berasal dari kata kerja *fatoro* yang berarti "menjadikan"[141]. Penyebutan kata *fitrah* terdapat dalam Qur'an terdapat pada surat ar-Rum ayat 30, yaitu:

---

[139]Ibid, hlm. 43-44.
[140]HM. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Cetakan Kelima, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 58.
[141]HM. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, hlm. 88.

...فطرة الله التي فطر الناس عليها... artinya :*Itulah fitrah Allah, yang Allah menciptakan manusia di atas fitrah itu*"[142],dan Hadis Nabi Saw.yaitu: كل مولود يولد على الفطرة , " *Tiap-tiap anak dilahirkan di atas fitrahnya*"[143]. Dengan demikian anak manusia dilahirkan dalam keadaan *fitrah* atau dengan membawa potensi tertentu. Timbul pertanyaan apakah *fitrah* itu? Manusia memiliki *fitrah* dan makhluk lainpun juga memiliki *fitrah* atau instink.

Fitrah berasal dari kata "fatoro [فطر] yang sepadan dengan kata *khalaqa* [خلق] artinya mencipta. Biasanya kata *fitrah* dan *khalaqa* yang digunakan dalam al-Qur'an menunjukkan pengertian "mencipta sesuatu" yang sebelumnya belum ada dan masih merupakan "pola dasar" yang perlu penyempurnaan. Penyempurnaan kadang-kadang secara langsung dilakukan oleh Allah sendiri, tetapi kadang-kadang pengembangan dan penyempurnaan diserahkan kepada manusia"[144]. Kata-kata yang biasanya digunakan dalam al-Qur'an untuk menunjukkan penyempurnaan pola dasar ciptaan Allah itu adalah *ja'ala* [جعل] yang bermakna "menjadikan", dan kata *ja'ala* , disebutkan dalam Qur'an, surat al-Insan (76), ayat 2:

إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا

artinya" :*Sungguh Kami menciptakan manusia dari setitik mani dari unsur yang beragam untuk pada kemudian hari Kami uji. Kami jadikan ia mendengar dan melihat*"[145].

Dari ayat-ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian "*fitrah*, yang berasal dari kata sepadan dengan *khalaqa*, berati kejadian asal. Apabila dikaitkan dengan kejadian manusia, maka pengertiannya ialah "kejadian asal" atau "pola dasar kejadian" manusia, dan apabila dikaitkan dengan sifat-sifat manusia, maka

---

[142]Ar-Rum (30): 30.
[143]HM. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, hlm. 88.
[144]Achmadi, *Pendidikan Islam sebagai Paradigma*, hlm. 28-29.
[145]Al-Insan [76]: 2., terj. Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, hlm, 1064.

pengertiannya adalah sifat asli yang secara kodrati ada pada manusia. Sedangkan pengertian "kejadian", yang berasal dari kata ja'ala, adalah kejadian lanjut atau kelengkapan manusia untuk mengembangkan *fitrah*nya"[146]. Dengan demikian, *fitrah* adalah pola dasar yang merupakan salah satu aspek potensial yang ada pada manusia. "*Fitrah*" mengandung kemampuan berpikir manusia di mana rasio atau intelegensia [kecerdasan] menjadi pusat perkembangannya. Di samping memiliki kapabilitas untuk berkembang seoptimal mungkin dan juga banyak bergantung pada dayaguna proses kependidikan. Sebab pada makhluk lainnya tidak didapati kapabilitas, karena makhluk binatang misalnya, tidak dapat dididik untuk berkembang seperti manusia". Dalam kehidupan binatang juga terdapat *fitrah* yang terbatas, yaitu gharizah [instink] dan perasaan [emosi] serta dorongan keinginan berkembang secara naluri yang sangat terbatas, sejalan dengan usianya.

Fitrah manusia masih merupakan "pola dasar" atau "sifat-sifat asli", yang belum dikembangkan. Pola dasar pada manusia, "mengandung potensi psikologis yang kompleks, karena di dalamnya terdapat aspek-aspek kemampuan dasar yang dapat dikembangkan secara dialektis interaksional [saling mengacu dan mempengaruhi] untuk terbentuknya kepribadian yang serba utuh dan sempurna melalui arahan kependidikan"[147]. *Fitrah* masih merupakan pola dasar atau sifat-sifat asli, dan *fitrah* itu memiliki arti bagi kehidupan manusia, apabila *fitrah* tersebut ditumbuh kembangkan secara wajar dan optimal. Pembentukan *fitrah* melalui proses pendidikan, yang dilakukan secara sadar oleh manusia [pendidik] dan harus berjalan di atas "pola dasar" dari *fitrah* yang telah dibentuk oleh Sang Penciptanya dalam setiap peribadi manusia, yaitu manusia memiliki nilai-nilai ilahiyah yang berasal dari ruh-Nya [Q.S.15:29, 38:72, dan 58:22], dan dengan nilai dasar dan potensi dasar tersebut manusia akan membetuk jati dirinya.

---

[146]Achmadi, *Pendidikan Islam sebagai Paradigma*, hlm. 30.
[147]HM. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, hlm. 158.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dalam kaitan dengan kemampuan dasar manusia tersebut, Abul A'la al-Maududi, menyatakan: "Manusia telah dibentuk oleh Allah dalam 2 [dua] aspek kehidupannya dan dalam 2 [dua] susunan kegiatan yang berbeda : *Pertama,* manusia berbeda di dalam susunan di mana dirinya secara menyeluruh diatur oleh hukum Tuhannya. Manusia sedikitpun tak dapat beringsut dan tak mampu menghindari sama sekali dari aturan Tuhannya. Juga manusia tak dapat mengubah dan melangkahinya. Dengan kata lain ia benar-benar terperangkap ke dalam genggaman hukum alam dan terikat untuk mematuhinya. *Kedua,* manusia telah dianugrahi "kemampuan akal" dan "kecerdasan", maka manusia dapat berpikir dan membuat pertimbangan dengan akalnya untuk "memilih" dan "menolak" serta mengambil ataupun membangunnya. Manusia juga dapat memeluk kepercayaan apa saja, mengikuti cara hidup apa saja, serta membentuk kehidupannya sesuai dengan ideologi yang ia pilih. Manusia dapat menciptakan kode tingkah lakunya sendiri atau menerima saja kode-kode yang dibuat oleh orang lain. Manusia telah diberi kemampuan "free will" [kebebasan berkehendak] dan dapat menetapkan arah perbuatannya sendiri"[148]

Manusia diciptakan tidak seperti makhluk-makhluk lainnya, karena manusia dilengkapi dengan potensi "kebebasan berpikir, berbuat" dan "memilih", dan juga sebagai makhluk berkembang, karena dipengaruhi pembawaan dan lingkungan. Manusia "mempunyai banyak kecenderungan, karena banyaknya potensi yang dibawahnya. Secara garis besarnya, kecenderungan tersebut dapat dibagi dua, yaitu kecenderungan menjadi "orang yang baik" dan kecenderungan menjadi "orang yang jahat"[149]. *Fitrah* manusia dilengkapi dengan kecenderungan fujur dan taqwa, seperti tertuang dalam Q.S.91:8, yaitu فألهمها فجورها وتقواها , artinya: "Allah mengilhamkan kepada jiwa dua pilihan: kejahatan dan kebaikan"[150]. Dengan demikian, pada diri manusia ada aspek pilihan, yaitu kebebasan berpikir, berbuat, dan memilih

[148]HM..Arifin, *Filsafat Pendidikan...* hlm.159.
[149]Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Cet.Kedua, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hlm.35.
[150]Asy-Syams, Ayat 8., terj. Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, hlm. 1107.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

sesuatu. Menurut al-Maududi, "aspek-aspek kemampuan demikian itu menjadikan manusia dilahirkan sebagai manusia yang "berserah diri" [muslim] yang berbeda-beda ketaatannya kepada Tuhan, tetapi di lain pihak manusia bebas untuk menjadi manusia berserah diri atau bukan berserah diri [muslim"[151] .Pandangan al-Maududi ini, diinterpretasi oleh HM. Arifin, bahwa Maududi, "ingin menunjukkan kepada kita bahwa meskipun telah diberi kemampuan potensial untuk berpikir, berkehendak bebas dan memilih, namun pada hakekatnya ia [manusia] dilahirkan sebagai seorang berserah diri [muslim], dalam arti bahwa segala gerak dan lakunya cenderung berserah diri kepada Khaliknya"[152], tetapi sebaliknya, karena manusia diberi kemampuan untuk bebas berkehendak dan memilih, maka manusia dapat memilih menjadi non-muslim atau memilih fujur, sebab manusia banyak bergantung pada faktor pengalaman dan lingkungan sekitarnya.

"Dengan demikian, dapat dikatakan sejak manusia lahir telah memiliki kemampuan dasar untuk berkembang, serta diberi kebebasan memilih dan berkehendak. Tetapi dalam proses perkembangan untuk pembentuk pribadi, manusia sangat bergantung pada pengalaman dan lingkungan sekitarnya, sebab manusia itu sendiri adalah makhluk yang perkembangannya selalu dipengaruhi oleh pembawaan dan lingkungan. Kemudian "potensi psikologi yang terdapat di dalam pribadi manusia bersifat alami atau manusiawi, karena mengandung kebijaksanaan dan keadilan Khaliknya. Sebab Allah menjadikan alam dan manusia, dalam proses bertumbuh dan berkembang sesuai dengan hukum alam ["*sunnatullah*"], sehingga manusia tumbuh dan berkembang juga mengikuti hukum alam [*sunnatullah*]. Tuhan "tidak sekaligus menjadikan manusia di atas bumi beriman kepada-Nya karena hal semacam ini bukan proses manusiawi atau alami. Misalnya, untuk menjadi manusia muslim harus melalui

[151]HM. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, hlm.159.
[152]Ibid, hlm. 159.

proses pengalaman kependidikan ber-keimanan Islami dan untuk menjadi manusia Nasrani, juga melalui proses pengalamn kependidikan Nasraniah, demikian pula untuk menjadi manusia Yahudi atau Majusi, bahkan menjadi manusia atheis-komunis sekalipun harus melalui pengaruh kependidikan yang seirama dengan ideologinya[153]. Jadi dengan modal potensi dasar saja, tentu manusia tidak berarti, maka untuk menjadikan manausia itu bernilai, beriman, berkepribadian, dan sebagainya harus melalui proses pendidikan, pengalaman, dan lingkungan sekitar yang ikut mempengaruhi perkembangan manusia.

Dari pandangan di atas, tergambar bahwa konsepsi Islam dalam pendidikan lebih bercorak pada paham emperisme, sebagaimana tersirat dalam sabda Nabi Muhammad, yaitu: , كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه artinya ": *Tiap orang dilahirkan membawa fitrah; Ayah dan Ibunyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi*"[154]. Jika istilah *fitrah* diambil dari Qur'an, maka konsep pendidikan lebih bercorak kepada paham nativisme, sebagaimana tersirat dalam Surat ar-Rum ayat 30:

فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون

Artinya :"*Tegakkan dirimu pada agama dengan tulus dan mantap, agama yang cocok dengan fitrah manusia yang digariskan Allah. Tak ada perubahan pada ketetapan-Nya. Itulah agama yang lurus*"[155].

Apabila diinterpretasikan lebih lanjut, maka istilah *fitrah* sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an dan Hadits di atas, dapat diambil beberapa pengertian secara terminolagi sebagai berikut: *Pertama*, *fitrah* yang disebutkan dalam ar-Rum ayat 30, mengandung implikasi pendidikan yang lebih berkonotasi pada paham nativisme, sebab penggunaan kata *fitrah* pada ayat tersebut mengandung makna "kejadian" yang di dalamnya berisi potensi dasar beragama yang benar dan lurus[حنيفا]. Maka

[153]Ibid, hlm. 160.
[154]Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam...*, hlm. 34.
[155]Ar-Rum (30), ayat 30.

pendidikan Islam dapat dikatakan berpaham nativisme, yaitu paham yang mengatakan bahwa perkembangan manusia dalam hidupnya secara mutlak ditentukan oleh potensi dasarnya. Menurut paham ini, proses pendidikan sebagai upaya untuk mempengaruhi jiwa anak didik tidak berdaya untuk merubahnya. Pengertian *fitrah* yang bercorak nativisme[156] di atas sangat berkaitan erat dengan faktor heriditas [keturunan] yang bersumber dari orang tua, termasuk keturunan beragama [*relegiositas*][157]. Senada dengan pendapat ini, pandangan yang dikemukakan Ali Fakry, salah seorang ahli pendidikan Mesir, menyatakan bahwa "para ulama telah sepakat bahwa kecenderungan nafsu itu berpindah dari orang tua secara turun temurun, oleh karena itu anak merupakan rahasia dari orang tuanya, dan manusia sejak awal perkembangannya berada di dalam garis keturunan keagamaan orang tuanya. Jika orang tuanya muslim maka otomatis anaknya menjadi muslim, dan jika mereka kafir maka anaknya akan menjadi kafir pula[158].

Kedua, apabila istilah *fitrah* itu diambil dari Hadits di atas, maka tersirat bahwa konsepsi pendidikan Islam bercorak "nativisme" dan "emperisme". Dari interpretasi Hadits tersebut, "menusia lahir telah membawa kemampuan-kemampuan dasar; dan kemampuan dasar itulah yang disebut "pembawaan". *Fitrah* yang disebut dalam hadits tersebut adalah potensi, dan potensi itu sendiri berupa "kemampuan", sehingga *fitrah* yang dimaksud di sini adalah pembawaan"[159], dan "pembawaan" dalam konsep pendidikan adalah dikategori nativisme. Sedangkan interpretasi "kedua orang tuanyalah" [فأبواه] dalam hadits tersebut, dikategori "lingkungan" dan masuk dalam kategori faktor emperisme sebagaimana dimaksud oleh ahli pendidikan. Maka kedua faktor tersebut, menurut hadits ini juga ikut menentukkan perkembangan

---

[156]Paham nativisme ini berasal dari pandangan filosofis ahli pikir Italia Lomrosso, dan ahli pikir Jerman Schopenheuer [HM. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, hlm. 96].

[157]Ibid, hlm. 96.

[158]Ibid, hlm. 90.

[159]Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam...*, hlm. 35.

manusia. Dengan demikian, *fitrah* manusia akan berkembang sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk yang mulia, dan pikiran, perasaan, dan kemampuannya untuk berbuat merupakan komponen dari *fitrah* itu seniri. Jadi konsepsi pendidikan Islam yang bercorak nativisme adalah "berdasarkan pada arti kata *fitrah* itu sendiri, karena *fitrah* diartikan dengan "kemampuan dasar" untuk berkembang dalam pola dasar keislaman [*fitrah* Islamiah]"[160].

Sedangkan konsep pendidikan Islam yang bercorak emperisme, adalah berdasarkan pada makna "kedua orang tuanyalah", sebagai faktor lingkungan [pendidik] yang membimbing dan mengarahkan *fitrah* tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa, manusia telah memiliki potensi bawaan [*fitrah*] yang tentu masih memerlukan bimbingan oleh lingkungannya. Interpretasikan lain, lebih mengartikan *fitrah* itu mengandung kecenderungan netral. Pandangan ini, didasarkan pada ayat Qur'an [16:78], yaitu : "Allah mengeluarkan manusia dari perut ibumu tidaklah kamu mengetahui sesuatu apapun, dan Ia menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan dan hati"[161]. Moh. Fadhil al-Djamaly, menyatakan bahwa "firman Allah di atas menjadi petunjuk bahwa kita harus melakukan usaha pendidikan sebagai aspek eksternal [mempengaruhi dari luar diri anak didik], dan dengan kemampuan yang ada dalam diri anak didik, menimbulkan dan mengembangkan keterbukaan diri terhadap pengaruh enksternal [dari luar] yang bersumber dari *fitrah*, maka pendidikan secara operasional adalah bersifat hidayat [menunjukkan]"[162], sebab *fitrah* manusia itu smdiri memiliki "kecenderungan" untuk berubah, dan kemungkinan untuk berkembang dan meningkat. Dengan demikian pengaruh perkembangan pada diri manusia, dapat "terjadi baik pada aspek jasmani, akal, maupun aspek rohani. Aspek jasmani dapat dan banyak dipengaruhi oleh "alam fisik" [selain oleh pembawaan], aspek akal dapat

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[160]HM. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, , hlm. 160-161.
[161]An-Nahl, Ayat 78.
[162]HM.Arifin, *Ilmu Pendidikan*.., hlm. 92.

dan banyak dipengaruhi oleh lingkungan budaya, dan aspek rohani dapat dan banyak dipengaruhi oleh kedua lingkungan itu". Menurut al-Syaibani [1979 : 136], dikutip Ahmad Tafsir, menyatakan pengaruh perkembangan itu "dimulai sejak bayi berupa "emberio", dan baru berakhir setelah kematian orang tersebut, sedangkan tingkat dan kadar pengaruhnya berbeda antara seseorang dan orang lain, sesuai dengan segi-segi pertumbuhan masing-masing, dan kadar pengaruh tersebut, juga berbeda menurut perbedaan umur dan perbedaan fase perkembangan masing-masing. Faktor pembawaan lebih dominan pengaruhnya tatkala orang masih bayi, lingkungan [alam dan budaya] lebih dominan pengaruhnya tatkala orang mulai dewasa"[163], dan seterusnya.. Maka atas dasar Hadits tersebut, kita dapat memperoleh petunjuk bahwa *fitrah* sebagai faktor "pembawaan" manusia, dapat dipengaruhi oleh lingkungan luar dirinya dan bahkan manusia tak akan dapat berkembang sama sekali tanpa adanya pengaruh lingkungan.

Ketiga, pandangan tentang *fitrah* "berbeda dengan teori "tabularasa" dari John Lock, yang menyatakan manusia lahir tanpa membawa apa-apa [kosong] atau seperti kertas putih yang tinggal diisi dengan segala bahan yang dikehendaki orang tua atau guru agar semakin "bersih", pandai, atau dewasa. Konsep ini "menganggap anak menerima secara pasif pengaruh lingkungannya, sehingga manusia lebih dominan ditentukan oleh faktor lingkungan. Sedangkan konsep *fitrah* mengandung potensi bawaan aktif [*innate potentials, innate tendencies*] yang telah diberikan Allah kepada setiap manusia"[164]. Bahkan sebelum manusia lahir kedunia, telah dibekali dengan kemampuan pengetahuan " وعلّم أدم الأسماء كلها, Allah mengajarkan kepada Adam segala nama benda-benda[165], dan potensi lain yaitu manusia telah mengadakan perjanjian dengan Allah, mengakui keesaan Tuhan, sesuai dengan firman Allah pada surat al-A'raf ayat 172, sebagai berikut:

---

[163]Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam...*, hlm. 35.
[164]Anwar Jasin, *Kerangka Dasar Pembaharuan*, hlm.3.
[165]Al-Baqarah [2]: 31., terj. Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, hlm. 9.

وإذ أخذ ربك من بني ءادم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا

Artinya: "Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan bani Adam dari sulbi mereka dan menyuruh agar mereka bersaksi atas diri sendiri. "Bukankah Aku Tuhanmu? Firman Allah. Menreka menjawab: "Ya kami bersaksi"..."[166].

Manusia lahir dengan membawa "potensi keimanan" [tauhid] terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta dilengkapi dengan potensi bawaan lain misalnya potensi fisik dan intelegensi atau kecerdasan akal dengan segala kemungkinan dan keterbatasannya. An-Naquib, menyatakan bahwa, ketika "Tuhan [*ar-rabb* - الرب] mempersaksikan untuk dirinya dan menegaskan "benar [بلى] "pada pertanyaan Allah "Bukankah Aku Tuhanmu .[ألست بربكم] ?"Dialog ini, menunjukkan bahwa sebelum manusia lahir, ia telah dilengkapi dengan kemampuan dan pengetahuan ruhani [*ma'rifah*] [معرفة] dan sanggup mengetahui dan mengakui dengan kenyataan yang ia katakan secara tegas] *qaul* –[قول] melalui daya intelektual"[167] .Potensi lain yang ada pada manusia, adalah manusia diberi kemampuan "al-bayan" [fasih perkataan], yaitu daya untuk melukiskan, menyampaikan pikiran, perasaannya atau kemampuan berkomunikasi dengan bahasa. Kemampuan al-bayan ini, tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rahman ayat 3 dan 4: علّمه البيان–خلق الإنسان artinya: *"Dialah yang mencipta manusia, Dia pula yang mengajari kesadaran nurani".*[168] Dari interpretasi tersebut, menunjukkan bahwa konsepsi *fitrah* dalam Qur'an dan Hadits, berbeda dengan konsepsi teori *tabularasa* dari John Lock tersebut. Dengan demikian, menurut konsepsi pendidikan Islam, manusia dilahirkan dibekali dengan "potensi bawaan", tidak kosong, dan potensi bawaan tersebut masih memerlukan faktor

[166]Al-A'raf [7], Ayat 172., terj. Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, hlm. 304.
[167]Muhammad an-Naquib al-Attas, *Konsep Pendidikan*...,hlm.54-55.
[168]Ar-Rahman (55): 3 dan 4., terj. Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, hlm. 960.

lingkungan, sehingga potensi tersebut dapat berkembang sesuai dengan lingkungannya.

Keempat, komponen psikologi dalam *fitrah*, apabil kita mencermati pandangan di atas, pendidikan Islam lebih menganut pada konsepsi bahwa manusia adalah makhluk yang perkembangannya dipengaruhi oleh "pembawaan" dan "lingkungannya". Sebab manusia mempunyai banyak kecenderungan yang disebabkan oleh banyaknya "potensi yang dibawanya", karena dengan "potensi bawaan tersebut, manusia dapat berkembang secara aktif dalam interaksi dengan lingkungannya dengan bantuan pengarahan yang sengaja dari pihak pendidik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa potensi bawaan manusia tersebut bersifat terbuka terhadap pengaruh esternal, termasuk pendidikan. Maka, jika memperhatikan *fitrah* manusia yang diangkat dari firman Allah dan Sabda Nabi tersebut, di dalamnya terkandung berbagai komponen psikologi yang satu sama lain salin terkait dan saling memyempurnakan bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Komponan-komponen potensial *fitrah* tersebut, antara lain berupa: (1) potensi keimanan [*at-tauhid*], (2) potensi jasmaniah, (3) potensi insting [naluri], yang menurut Hasan Langgulung, bahwa naluri adalah "sifat pembawaan manusia atau sifat-sifat Tuhan yang menjadi potensi manusia sejak lahir"[169], (4) potensi ruhaniah berupa bakat [*mawahib*], kecenderungan [*qabiliyyat*], yang dalam al-Qur'an disebut dengan kecenderungan fujur dan taqwa, (5) potensi kecerdasan [akal], (6) potensi komunikasi dengan bahasa [al-bayan], (7) potensi nafsu [*drives*], (8) potensi karakter [watak asli], dan (9) potensi intuisi [ilham]. Potensi-potensi tersebut di atas, dapat berinteraksi dan terbuka terhadap pengaruh lingkungan dan pendidikan. Maka, untuk lebih jelasnya, dikemukakan sebuah diagram tentang *fitrah* dengan komponen-komponennya, serta gambaran pengaruh lingkungan dan pendidikan, sebagai berikut

[169]Hasan Langgulung, *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan*, hlm. 22.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

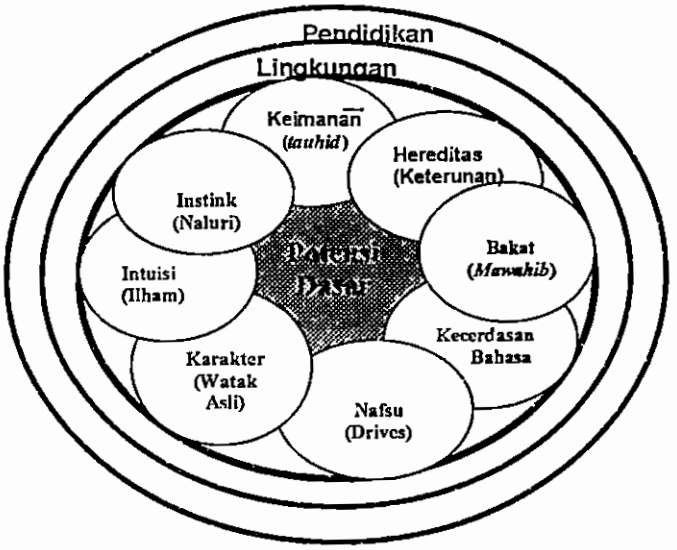

Gambar : 2 Diagram[170]
Komponen-komponen Dasar *Fitrah* Manusia

Diagram di atas menunjukkan aspek-aspek psikologi dalam *fitrah* yang saling mempengaruhi antara satu aspek terhadap aspek yang lain. Aspek-aspek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. *Fitrah* [potensi dasar]

Fitrah adalah "faktor kemampuan dasar perkembangan manusia yang dibawa sejak lahir yang berpusat pada "potensi dasar" untuk berkembang. Potensi dasar itu berkembang secara menyeluruh [integral] yang menggerakkan seluruh aspek-aspeknya yang secara mekanistik satu sama lain saling pengaruh mempengaruhi menuju ke arah tujuan tertentu. Aspek-aspek *fitrah* merupakan komponen dasar yang bersifat dinamis, responsif terhadap pengaruh lingkungan sekitar, termasuk pengaruh pendidikan"[171].

b. Potensi jasmani

Potensi jasmani banyak dipengaruhi oleh alam fisik. *Fitrah* atau potensi jasmaniah manusia memang berbeda dengan hewan, karena "pemenuhan kebutuhan jasmaniah tidak dapat dikomsumsikan sebagaimana hewan"[172], tetapi kebutuhan jasmaniah harus dikomsumsikan secara harmonis untuk

---

[170]Diagram ini merupakan modifikasi dari diagram yang dikemukakan: HM. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, hlm. 100., dan Muhaimin dan Abd. Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam Kajian Filosofik dan Kerangka Dasar Operasionalnya*, (Bandung, Trigenda Karya, 1993), hlm. 23.

[171]HM. Arifin, *Ilmu Pendidikan...*, hlm. 101., dan Muhaimin dan Abd. Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam...*, hlm. 23.

[172]Muhaimin dan Abd. Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam*, hlm. 29.

mengaktualisasikan *fitrah* manusia. Konsep ini tidak mengharuskan manusia untuk "mengabaikan" kebutuhan jasmaniah, tetapi kebutuhan jasmaniah diorganisir secara baik, karena *Fitrah* atau potensi kecenderungan jasmaniah tidak dapat diubah, hal ini disinyalir Allah dalam firmannya : " لا تبديل لخلق الله , *tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah tersebut*"[173]. Interpretasi dari firman itu, "menunjukkan bahwa kebutuhan jasmaniah manusia tidak boleh dibuang atau dibunuh, melainkan diarahkan pada hal-hal yang posetif[174].

c. Komponan-komponan potensial *fitrah*

Di dalam *fitrah* terkandung berbagai komponen psikologi yang satu sama lain saling mempengaruhi. Komponen-komponen potensial *fitrah* tersebut antara lain :

1. Kecenderungan beriman [at-tauhid], al-Syaibani, menyatakan bahwa "manusia itu berkecenderungan beriman kepada kekuasaan tertinggi dan paling unggul yang menguasai jagat raya ini. Kecenderungan ini dibawanya sejak lahir. Jadi, manusia ingin beragama. Keinginan itu meningkat mengikuti meningkatnya taraf pemikiran, akal manusia pada akhirnya akan mengakui bahwa Tuhan itu ada"[175]. Senada dengan pandangan yang dikemukakan Erich Fromm, yang dikutip Ahmad Tafsir, menyatakan bahwa "pengabdian kepada kekuatan yang transenden adalah suatu eksperesi kebutuhan akan kesempurnaan kehidupan. Oleh karena itu, tidak ada seorangpun yang tidak memiliki kebutuhan akan agama"[176]. Jadi kecenderungan keimanan merupakan kebutuhan asasi bagi manusia, karena agama diperlukan manusia.
2. Herditas atau keterunan, "merupakan faktor kemampuan dasar yang mengandung ciri-ciri psikologi dan fisiologis yang diturunkan atau diwariskan oleh orang tua baik dalam garis yang dekat maupun yang telah jauh".
3. Bakat [*Mawahib*] dan kecerdasan, "bakat suatu kemampuan pembawaan yang potensial mengacu kepada perkembangan kemampuan akademis [ilmiah] dan keahlian [profesional] dalam berbagai bidang kehidupan. Bakat berpangkal pada kemampuan kognisi [daya cipta], konasi [kehendak], dan emosi [rasa] yang disebut dalam psikologi filosofi dengan Tri Chotomie [tiga kekuatan rohaniah] manusia"[177].
4. Potensi komunikasi dengan bahasa [*al-bayan*], manusia diberi kemampuan al-bayan [fasih perkataan] yaitu suatu daya untuk melukiskan atau menyampaikan pikiran dan perasaannya atau kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa [ar-Rahman, ayat 3-4],
5. Nafsu [*Drives*], pada diri manusia juga terdapat kecenderungan "pertentangan atau keselarasan yang disebut derivat [penurunan] dari pribadi, yaitu

---

[173] Ar-Rum (30): 30.

[174] Muhaimin dan Abd. Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam...*, hlm. 30.

[175] Omar Mohammad al-Taumy al-Syaibani, *Filsafat Pendidikan Islam* terj.Hasan Langgulung,Jakarta:Bulan Bintang,1974),hl.123.

[176] Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan...*, hlm. 35.

[177] HM. Arifin, *Ilmu Pendidikan...*, hlm. 101.

dorongan kemauan atau kehendak yang biasa kita sebut "nafsu". Dalam diri manusia terkumpul berbagai macam sifat antara lain sifat kebuasan, sifat sataniah, sifat syahwaniah, dan sifat Ketuhanan"[178]. Dalam tasawuf dikenal adanya nafsu-nafsu "lawwamah [nafsu penimbang/pencela], yaitu nafsu yang mendorong ke arah perbuatan mencela dan merendahkan orang lain [*egosentros*]. Nafsu ammarah [polemos] nafsu penggerak, yang mendorong ke arah perbuatan merusak, membunuh atau memusuhi orang lain [destruktif]. Nafsu berahi [eros], nafsu yang mendorong ke arah perbuatan seksual untuk memuaskan tuntutan akan pemuasan hidup berkelamin. Nafsu mutmainnah [religios], nafsu ketenangan atau kesadaran yaitu nagsu yang mendorong ke arah ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa"[179]. Menurut al-Gozaly, nafsu "manusia terdiri dari nafsu malakiah yang cenderung kearah perbuatan mulia sebagai halnya para malaikat", karena manusia juga ditupkan ruh Tuhan ke dalam dirinya, sehingga kecenderunga pada kebaikan ada pada diri manusia, dan "nafsu bahimiah yang mendorong ke arah perbauatn rendah sebagaimana nafsu binatang"[180].

6. Karakter atau watak tabiat, merupakan kemampuan psikologi yang terbawa sejak manusia dilahirkan. Karakter sangat berkaitan erat dengan tingkah laku moral dan sosial serta etis seseorang. Karakter atau watak tabiat ini memang terbentuk oleh kekuatan dari dalam diri manusia, dan bukan terbentuk kerana pengaruh dari luar. Karakter juga erat hubungannya dengan kepribadian [personalitas] seseorang.
7. Intuisi [Ilham], merupakan kemampuan psikologis manusia untuk menerima ilham Tuhan. Kemampuan intuisi ini dapat menggerakkan hati nurani [*conscience*] manusia yang dapat membimbingnya ke arah perbuatan dalam situasi khusus di luar kesadaran dan kemampuan akal pikirannya, namun perbuatan itu mengandung makna yang bersifat konstruktif bagi kehidupan manusia. Bagi kalangan kaum sufi, intuisi ini lebih banyak dirasakan sebagai getaran hati nurani yang merupakan indikasi panggilan Tuhan untuk berbuat sesuatu yang amat khusus. Sedangkan filosuf Perancis, Bergsom, memandang bahwa intuisi sebagai elan vitale [kekuatan pokok] yang menggerakkan dan mendorong manusia untuk berpikir dan berbuat sesuatu.
8. Insting - Naluri [*gharizah],* merupakan suatu kemampuan untuk berbuat atau bertingkah laku dengan tanpa melalui proses belajar. Potensi insting ini merupakan pembawaan sejak lahir. Dalam psikologi pendidikan kemampuan instink ini termasuk kapabilitas, yaitu berupa kemampuan untuk berbuat sesuatu dengan tanpa melalui belajar[181].

d. *Fitrah* Manusia dalam Pengaruh Lingkungan dan Pendidikan

Manusia lahir dengan membawa *fitrah*, yang mencakup *fitrah* agama [Q.S.30:30], Ftrah intelek [Q.S. 7:179], *fitrah* soal [Q.S. 5:2], *fitrah* ekonomi [Q.S. 62:10], *fitrah* seni, kemaajuan, keadilan, kemerdekaan, persamaan, ingin tahun, ingin dihargai, ingin mengembangkan keturunan [kawin], dan sebagainya. *Fitrah* manusia mendapatkan tempat dan perhatian, serta pengaruh dari faktor

---

[178]Sukanto, *Nafsiologi, Suatu Pendekatan Alternatif atas Psikologi Integritas,* Cet. Pertaama, (Jakarta: Integritas Press, 1985, hlm.82-83

[179]HM. Arifin, *Ilmu Pendidikan...,* hlm. 102.

[180]Ibid, hlm. 102-103.

[181]Ibid, hlm 101-103.

oksigen atau faktor lingkungan untuk mengembangkan dan melestarikan potensi *fitrah* yang positif dan sebagai penangkal dari kelestarian "an-nasfu Ammarah bis suu"[182], sehingga manusia dapat hihup dengan searah atau sejalan dengan cita-cita dan tujuan Allah menciptakan manusia sebagai khalifah fil-ard. Manusia dilahirkan dengan "potensi bawaan" tertentu dan dengan potensi tersebut manusia dapat berkembang secara aktif dalam interaksi dengan lingkungannya dengan bantuan pengarahan yang sengaja dari pihak pendidik.

Faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap *fitrah* manusia, bahkan faktor tersebut dapat mempengaruhi kepribadian dan ikut menentukan perkembangan kehidupan manusia. Tetapi perlu diketahui bahwa pengaruh dari luar diri manusia, bukan satu-satunya faktor yang berpengaruh tanpa dukungan dari faktor-faktor lain. Karena potensi manusia yang dibawa sejak lahir, bukan hanya dapat berkembang dalam lingkungan saja, tetapi dapat berkembang secara terarah bila dilakukan dengan bantuan atau dukungan dari faktor-faktor lain yaitu orang lain atau pendidik. Dengan demikian, *fitrah* tidak hanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan saja, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain. "Penyataan tersebut menolak pandangan Skinner yang mengatakan lingkungan menentukan kehidupan manusia betapapun dia mengubah lingkngannya. Di sini terlihat bahwa manusia tidak lebih hanya mewarisi sejumlah regak refleks [gerakan-gerakan yang tidak disengaja]. Di samping itu, agama sebagai aspek lain dari tingkah laku manusia dapat dijelaskan dengan faktor-faktor lingkungan. Penyataan tersebut dibuktikan bahwa anak-anak orang Islam biasanya menjadi muslim, sedangkan anak-anak orang Kristen biasanya menjadi Kristen. Hal itu disebutkan oleh Skinner sebagai salah satu contoh untuk menjelaskan teorinya"[183]. Pada fase defensi, masa kanak-kanak memberikan kemungkinan orang tuanya untuk memberi pengaruh-pengaruh pada putra-putrinya. Tampaknya fakta ini menarik perhatian Skinner, tetapi sebenamya "lingkungan sekitar berperan sangat

[182]Muhaimin dan Abd. Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam*,..., hlm. 25-26.
[183]Ibid, hlm. 26.

rumit [*crucial*] dalam proses pembentukan kepribadian seseorang, karena adanya berbagai faktor kemungkinan yang bersumber dari dalam diri seseorang yang juga berpengaruh"[184]. Dengan demikian, *fitrah* atau potensi yang dibawa oleh manusia "tidak dapat berkembang tanpa adanya pengaruh posetif dari lingkungannya yang mungkin dapat dimodifikasi atau dapat diubah secara drastis bila lingkungan itu tidak memungkinkan untuk menjadikan *fitrah* itu lebih baik. Faktor-faktor eksternal yang bergabung dengan *fitrah* dan sifat dasarnya bergantung pada sejauhmana interaksi eksternal dengan *fitrah* itu berperan. Menurut pengamat teori behavioris, bahawa *fitrah* tidak mengharuskan manusia untuk berusaha keras terhadap lingkungannya. Sebagai contoh: Dua anak yang hidup dalam kondisi yang sama barangkali memberi respons terhadap setiap stimulus serupa dengan cara yang berbeda-beda"[185].

Fitrah merupakan "faktor kemampuan potensial yang alami dari anugerah Tuhannya. Maka bagaimanapun *fitrah* atau potensi dasar tersebut "memiliki ciri-ciri yang khas dalam perkembangannya menurut lingkungan sekitar di mana mereka hidup. Dengan ciri-ciri khas yang nampak dalam sikap dan perilaku manusia dari masing-masing lingkungannya itu tidak menghilangkan ciri khas dari "potensi dasarnya" yang terbawa sejak lahir yang disebut "pembawaan"[186], seperti tersirat dalam firman Allah surat al-Rum (30), ayat 30 yang dikemukakan di atas. *Fitrah* yang dimaksud dalam konteks ayat ini, yaitu potensi untuk menjadikan "baik" [taqwa] dan sekaligus potensi untuk menjadikan "buruk" [*fujur*] atau potensi untuk menjadikan muslim dan potensi untuk menjadikan musyrik. Kemudian dalam ayat tersebut di atas, Allah juga menyatakan لا تبديل لخلق الله yang bermakna, bahwa potensi itu tidak akan diubah; maksudnya, kecenderungan untuk menjadi "baik" dan sekaligus menjadi "buruk" itu tidak akan diubah oleh Tuhan"[187]. Oleh karena itu, apabila

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[184]HM. Arifin, *Ilmu Pendidikan...*, hlm. 93.
[185]Muhaimin dan Abd. Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam,....*, hlm. 27.
[186]HM. Arifin, *Filsafat Pendidikan...*, hlm. 162.
[187]Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam...*, hlm. 37.

dipertanyakan mengapa manusia itu menjadi baik dan menjadi buruk, "maka jawabannya dapat diberikan bahwa setiap diri manusia telah memiliki arah kecenderungan individual yang diperkuat oleh proses pendidikan atau diperlemah melalui pengalaman kependidikan dan pengaruh eksternal lainnya"[188], atau "*fitrah* itu sendiri bisa tertutup, disebabkan oleh tradisi dan tingkah laku yang menyimpang, atau pendidikan yang keliru"[189]. Maka terjadi penyimpangan *fitrah* bisa merupakan akibat dari faktor lingkungan [pendidikan] yang keliru.

Pendidikan didisain sebagai upaya untuk membimbing, perlu dilakukan secara sadar terhadap yang dibimbing menuju terbentuknya kepribadian utama berdasarkan nilai-nilai yang dipakai dalam pendidikan. Apabila program pendidikan yang didisain "sebagai usaha untuk menumbuhkan daya kreativitas anak, melestarikan nilai-nilai ilahi dan insani, serta membekali anak didik dengan kemampuan yang produktif"[190], maka dapat dikatakan bahwa "*fitrah* merupakan potensi dasar anak didik yang dapat menghantarkan pada tumbuhnya daya kreativitas dan produktivitas, serta komitmen terhadap nilai-nilai Ilahi dan insani. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pembekalan berbagai kemampuan dari lingkungan pendidikan di sekolah dan di luar sekolah yang terpola dengan program pendidikan"[191].

Tugas dan fungsi pendidikan adalah mengarahkan dengan sengaja segala potensi yang ada pada seseorang seoptimal mungkin sehingga ia berkembang menjadi seorang muslim yang baik atau "insan kami", karena seorang pendidik tidak diharuskan untuk mencetak anak didiknya menjadi sesuai dengan keinginannya, tetapi cukup dengan menumbuhkan dan mengembangkan potensi dasar serta kecenderungan-kecenderungannya terhadap sesuatu yang diminati dan sesuai dengan kemampuan dan bakat yang dimilikinya. Pendidikan harus dapat merangsang

---

[188]HM. Arifin, *Filsafat Pendidikan*..., hlm. 161.

[189]Ust. Husein al-Kaff, *Al-Qur'an dan Konsep Ketuhanan (1)*, From:http://aljawad.Tripod.com/ Artikel/ alqur'an1.htm.,8/1/2000.

[190]Noeng Muhadjir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial;Suatu Teori Pendidikan*, Yogyakarta:RakeSarasin, 1987),hlm.176.

[191]Muhaimin dan Abd. Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam*,..., hlm. 28.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

kecenderungan-kecenderungan anak didik untuk dapat mengembangkan segenap potensinya semaksimal mungkin, sehingga mampu mengaktualisasikan kemampuan pribadinya. Maka apabila anak yang "mempunyai sifat dasar yang dipandang sebagai pembawa jahat, upaya pendidikan diarahkan dan difokuskan untuk menghilangkan serta menggantikan atau setidak-tidaknya mengurangi elemen-elemen kejahatan tersebut. Bagi teori Lorenz yang membangun pembawaan agresi manusia sejak lahir, perhatian pendidikan diartikan untuk mencapai objek-objek pengganti dan prosedur-prosedur sublimasi yang akan membantu penghilangan sifat-sifat agresi ini"[192]. Seorang pendidikan tidak perlu sibu-sibuk menghilangkan dan menggantikan sifat fujur yang dibawa sejak lahir, melainkan betikhtiar untuk untuk menjauhkan "interaksi" yang dapat menyebabkan timbulnya kecenderungan fujur. Dalam mendekati *fitrah* juga demikian, yaitu pendidik muslim juga berikhtiar dalam mengembangkan dan menanamkan tingkah laku yang sebaik-baiknya, karena *fitrah* tidak dapat berkembang dengan sendirinya.

Maka dari "informasi kitab suci al-Qur'an dan sabda Nabi di atas, bila dianalisa secara situasional [menurut suasana kejadian tertentu] jelaslah menunjukkan bahwa faktor dasar dan faktor ajar selalu berdampingan dalam mendasari pertumbuhan atau perkembangan manusia. Oleh karena itu konsepsi Islam dalam pendidikan bisa dikatakan beraliran konvergensi ala William Stern; yang berarti konsep pendidikan Islam mempertemukan pengaruh dasar dengan pengaruh ajar, pengaruh pembawaan dan pendidikan menjadi suatu kekuatan terpadu yang berproses ke arah pembentukan kepribadian yang sempurna"[193]. Bagi aliran konvergensi, faktor dasar atau pembawaan saja tidak cukup dan tidak berarti apa-apa tanpa upaya dari luar, yaitu usaha pendidikan. Sebaliknya faktor ajar atau pendidikan saja tidak cukup dan akan sia-sia tanpa faktor dasar[194], karena kedua faktor tersebut menyatu dan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[192]Ibid, hlm. 28-29.
[193]HM. Arifin, *Filsafat Pendidikan*..., hlm. 162.
[194]Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: INIS),1994, hlm. 15.

berproses untuk membentuk kepribadian manusia yang sempurna. Kedua faktor tersebut sangat penting bagi perkembangan manusia. Pada Hadits Nabi, ada faktor *fitrah* yang mengadung potensi-potensi asli yang tersembunyi pada diri manusia, kemudian potensi-potensi tersebut harus dikembangkan oleh faabawahu [dimaknai dengan lingkungan dan pendidikan] untuk menjadikan potensi yang dimiliki menjadi aktual dan sempurna. Menurut Rasyid Ridha, bahwa "Islam sebagai agama *fitrah* disyariatkan menyempurnakan potensi manusia agar meningkat dalam ilmu dan hikmat serta mengenal Allah. Karena dengan *fitrah* dan ma'rifah manusia disiapkan untuk memperoleh kebahagian di akhirat"[195].

Implikasi *fitrah* manusia, apabila dikaitkan dengan aliran-aliran pendidikan yaitu aliran Nativisme, Emperisme, dan Konvergensi, dan berdasarkan penjelasan di atas bahwa aliran konvergensi lebih dekat dengan konsep pendidikan Islam, karena: "*Pertama,* Islam menegaskan bahwa manusia memiliki *fitrah* dan sumber insani, serta bakat-bakat bawaan atau keturunan, meskipun semua itu masih merupakan potensi yang mengandung berbagai kemungkinan. Maka Attoumy menjalskan, bahwa betapapun juga faktor keturunan tidaklah merupakan suatu yang kaku hingga tidak bisa dipengaruhi. Bahkan ia bisa dilenturkan dalam batas tertentu. Alat untuk melentur dan mengubahnya ialah lingkungan dengan segala anasirnya. Lingkungan sekitar yang dimaksud adalah aspek pendidikan yang penting. Sedangkan *fitrah* yang dimaksud dalam Hadits Nabi, tidaklah berarti kosong atau bersih seperti teori tabularas tetapi merupakan pola dasar yang dilengkapi dengan berbagai sumber daya insani yang potensial. *Kedua*, *fitrah* masih merupakan potensi, maka *fitrah* itu belum berarti apa-apa bagi kehidupan manusia sebelum dikembangkan, didayagunakan dan diaktualisasikan"[196] oleh lingkungan pendidikan. Maka pengelolaan "potensi-potensi" yang tersembunyi pada diri manusia merupakan salah satu tugas utama pendidikan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[195]Nappanganro, "*Refleksi Analisis Fitrah Manusia dan Nilai-nilai dalam Pengembangan Pendidikan Islam Memasuki Abad XXI*", makalah disampaikan dalam Orasi Ilmiah/Pengukuan Guru Besar, Di Kampus IAIN Alauddin Ujung Pandang,11 Nopember 1997,hl.7.

[196]Achmadi, *Pendidikan Islam sebagai Paradigma*, hlm. 53.

Islam, yaitu upaya "bimbingan untuk mengubah potensi-potensi itu menjadi pengetahuan, keterampilan dan sikap. Karena potensi-potensi yang tersembunyi pada diri manusia itu besar sekali faedah dan pengaruhnya dalam perkembangan serta kelanjutan hidup dan kehidupan ummat manusia[197]. Proses pendidikan Islam tidak hanya menekankan pada pengajaran di mana orientasinya hanya kepada intelektualisasi penalaran, tetapi lebih menekankan pada pendidikan di mana sasarannya adalah pembentukan kepribadian yang utuh dan bulat [insan kamil], maka pendidikan Islam pada hakikatnya adalah berpaham perfektionisme yaitu menghendaki kesempurnaan kehidupan yang tuntas, sesuai dengan firman Allah surat al-Baqarah ayat 208, yaitu: يأيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة..., artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara total*"[198].

Dari pandangan di atas, dapat dikatakan bahwa proses pendidikan Islam harus mencapai tujuan yang total, menyeluruh, meliputi dan menyentuh segenap aspek kemampuan dan kehidupan manusia, pendidikan yang bermakna luas yaitu membentuk manusia seutuhnya. Menurut Fuad Hasan, pendidikan "harus dapat merangsang anak didik untuk mengembangkan segenap ptensinya semaksimal mungkin. Sebagai individu, anak didik akhirnya mampu mengaktualisasikan pribadinya di satu pihak, sedangkan di lain pihak sebagai individu anak didik harus terdidik untuk siap memasuki kehidupan bersama atau siap memasyarakat". Maka Fuad Hasan, memandang "proses kependidikan harus diarahkan kepada 2 sasaran yaitu personalisasi dan sosialisasi anak didik. Dan proses tersebut tidak bebas dari nilai, terutama nilai agama [religius]. Oleh karena itu pendidikan harus lebih dari proses pengajaran yang hanya menitikberatkan pada penguasaan ilmu yang dapat menunjang prestasi manusia, ia harus mencakup usaha membentuk fungsi nurani

[197]Nappanganro, "*Refleksi Analisis Fitrah Manusia*..., hlm.7.
[198]Al-Baqara(2): 208, Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, hlm.57.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[*conscience*] sebagai pengatur akhlaknya"[199]. Maka semakin jelas bagi kita, bahwa manusia dalam proses pendidikan menurut pandangan Islam, "tidak lain adalah manusia yang memerlukan pengarahan, tuntunan dan bimbingan yang tepat melalui proses dan upaya pendidikan, sehingga terbentuklah dalam pribadinya suatu kemampuan untuk dapat mengaktualisasikan dirinya selaku sosok individual, dan sekaligus kemampuan untuk memfungsikan dirinya hanya kepada Khaliknya semata-mata"[200].

3. Manusia Sebagai Makhluk Paedagogik

Pendidikan menurut Islam didasarkan pada asumsi bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan *fitrah* yaitu dengan membawa "potensi bawaan" seperti potensi "keimanan", potensi untuk memikul amanah dan tanggung jawab, potensi kecerdasan, potensi fisik. Dengan potensi ini manusia mampu berkembang secara aktif dan interaktif dengan lingkungannya dengan bantuan orang lain [pendidik] secara sengaja agar menjadi manusia yang mampu menjadi khalifah dan mengabdi kepada Allah. Dengan demikian posisi pendidikan berupaya untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran pada manusia.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Apabila dilihat dari "segi sosial pesikologi, manusia dalam proses pendidikan juga dapat dipandang sebagai makhluk yang bertumbuh dan berkembang dalam proses komunikasi antara individualitasnya dengan orang lain atau lingkungan sekitarnya dan proses ini dapat membawanya ke arah pengembangan"[201]. Bila manusia sebagai makhluk bertumbuh dan berkembang, maka sangat urgen sekali untuk memperhatikan konsep dan pandangan Islam tentang manusia sebagai makhluk paedagogik yang dapat diproses kearah kebahagian dunia dan akhirat. Makhluk paedagogik ialah makhluk Allah yang dilahirkan dengan membawa potensi dapat dididik dan dapat mendidik. Makhluk Allah itu adalah manusia. Manusialah yang

---

[199]Fuad Hasan, [Menteri P&K],*Sambutan MENDIKBUD pada Rakernas Dep. Kerohanian DPP GOLKAR*,Jakarta,2 Maret 1987.

[200]HM. Arifin, *Filsafat Pendidikan...*, hlm. 164-165.

[201]Ibid., hlm. 58.

memiliki potensi dapat didik dan mendidik sehingga mampu menjadi khalifah di bumi, sebagai pendukung dan pengembang kebudayaan. Manusia dilengkapi Allah dengan *fitrah*, berupa bentuk wadah yang dapat diisi dengan berbagai kecakapan dan keterampilan yang dapat berkembang, sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk yang mulia. Sehingga pikiran, perasaan, dan kemampuannya untuk berbuat merupakan komponen dari *fitrah* itu[202]. Dalam Qur'an dikatakan bahwa manusia secara potensial adalah makhluk yang pantas diberi kewajiban dan tanggung jawab. Maka, upaya pendidikan lebih didasarkan pada asumsi bahwa manusia dijadikan sebagai khalifah di bumi untuk mengabdi kepada Allah, karena manusia dilahirkan dalam *fitrah* yaitu dengan membawa potensi berupa potensi keimanan [tauhid], potensi untuk memikul amanah dan tanggung jawab, potensi kecerdasan [akal] potensi al-bayan [kemampuan berkomunikasi dengan bahasa], potensi fisik, dan potensi-potensi yang lainnya. Dengan potensi-potensi tersebut, manusia mampu berkembang secara aktif dan interaktif dengan lingkungannya dengan bantuan dan pengarahan pendidikan secara sengaja agar menjadi insan kamil. Selain itu, dengan potensi bawaan yang dapat diproses melalui pendidikan, maka manusia dapat dibedakan dengan makhluk Allah yang lainnya.

Potensi bawaan [*fitrah*] manusia tersebut, "diterjemahkan dengan potensi yang dapat didik dan mendidik, dan sekaligus memiliki kemungkinan untuk berkembang dan meningkat sehingga kemampuannya dapat melampaui jauh dari kemampuan fisiknya yang tidak berkembang. Jadi apabila *fitrah* manusia itu tidak dikembangkan niscaya ia akan kurang bermakna dalam kehidupan. *Fitrah* manusia perlu dikembangkan, dan pengembangan itu senantiasa dilakukan dalam usaha dan kegiatan pendidikan. Apabila kita cermati Hadits Nabi yang menggunakan konsep faabawahu yang bermakna lingkungan dan pendidikan, serta "teori nativisme dan emperisme yang

[202]Zakiah Daradjad, dkk., *Ilmu Pendidikan*..., hlm. 16.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dipertemukan oleh Kerschenteiner dengan teori konvergensinya, telah ikut membuktikan bahwa manusia itu adalah makhluk yang dapat dididik dan dapat mendidik[203] atau makhluk paedagogis.

Maka dengan upaya pendidikan dan pengajaran, potensi manusia itu dapat dikembangkan, meskipun disatu sisi bahwa manusia dilahirkan dengan membawa potensi-potensi yang tersembunyi dan dapat berkembang sendiri, namun perkembangan itu tidak akan maju apabila tidak melalui proses lingkungan dan pendidikan. Maka kemungkinan upaya "pengembangan potensi itu mempunyai arti bahwa manusia mungkin dididik, dan sekaligus mungkin pula pada suatu saat manusia akan mendidik"[204]. Selain itu, jika kita cermati surat al-Alaq ayat 3-4, yang mengandung makna perintah membaca, manusia di ajari dengan kalam [pena], dan Tuhan mengajari manusia tentang sesuatu yang ia tidak ketahui, dan surat al-Baqarah ayat 31, yang mengandung makna bahwa Tuhan telah mengajarkan Adam nama-nama benda seluruhnya, menunjukkan bahwa manusia memiliki potensi untuk diajar. Jika manusia tanpa melalui belajar, niscaya ia tidak akan dapat mengetahui segala sesuatu yang ia butuhkan bagi kelangsungan hidupnya di dunia dan akhirat. Maka dengan upaya pengembangan potensi yang ada pada manusia mempunyai arti bahwa pada prinsipnya manusia adalah makhluk yang dapat dididik, dan sekaligus dapat mendidik. Selanjutnya, apabila manusia dilihat dari "segi kemampuan dasar paedagogik, maka manusia dipandang sebagai "homo edukandum" makhluk yang harus dididik", atau bisa disebut "animal educabil", makhluk sebangsa binatang yang bisa dididik"[205] dan mendidik. Jika manusia sebagai makhluk yang dapat dididik dan mendidik, maka jelas "manusia itu sendiri tidak terlepas dari potensi psikologis yang dimilikinya secara individual yang tentu berbeda dalam segi abiliti dan kapabilitasnya, dari kemampuan individu yang lain. Kemudian dengan perberdaan kemampuan untuk

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[203]Ibid, hlm. 17.
[204]Ibid, hlm 17.
[205]HM. Arifin, *Filsafat Pendidikan...*, hlm. 58.

dididik itulah, fungsi pendidikan pada hakekatnya adalah melakukan seleksi melalui proses kependidikan atas diri pribadi manusia"[206]. Proses seleksi tersebut menuju kepada dua arah, yaitu: "Pertama, menseleksi bakat dan kemampuan apa sajakah yang dimiliki manusia untuk selanjutnya dikembangkan melalui proses kependidikan. Kedua, menseleksi sampai di manakah kemampuan manusia dapat dikembangkan guna melaksanakan tugas hidupnya dalam hidup bermasyarakat"[207]. Dengan demikian, "proses kependidikan bagi manusia adalah usaha yang sistematis dan berencana untuk menseleksi kemampuan belajar manusia agar dapat berkembang sampai pada titik optimal kemampuannya yaitu kemampuan mengembangkan potensi kapabilitasnya semaksimal mungkin, melalui proses belajar-mengajar.

Maka *fitrah* manusia dengan segala potensinya "merupakan *conditional statement* [citra bersyarat]"[208], dan aktualisasi dari citra bersyarat ini menuntut upaya manusia sendiri. Sedangkan "pengejawantahan diri [*slf realisation*] manusia adalah hasil rentangan antara sumberdaya insani dan aktualisasi itu. Maka untuk mengisi rentangan itu Islam mengajarkan konsep yang menegaskan perlunya aktivitas dan inisiatif manusia yaitu konsep jihad dan ikhtiar"[209]. Konsep jihad [berusaha sungguh-sungguh] dan ikhtiar [usaha] manusia akhirnya kembali pada diri manusia itu sendiri, sebagaimana pada surat al-Ankabut [29] ayat 6, yaitu: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه ..., artinya: "Siapa pun yang berusaha sungguh-sungguh, usahanya itu haketnya untuk dirinya sendiri", dan pada ayat 69, yaitu: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ..., artinya: "Orang-orang yang telah berusaha sungguh-sungguh di jalan Kami pasti akan Kami tunjukkan jalan Kami"[210].

Dari makna ayat-ayat di atas, dapat dikatan bahwa faktor "berusaha" sungguh-sungguh dan "ikhtiarlah mengandung nilai paedagogis yang menentukan kedudukan

---

[206]Ibid, hlm. 58.
[207]Ibid, hlm. 58.
[208]Fuad Hasan, "*Bimbingan Konseling serta Citra Manusia dalam Islam*", makalah disampaikan pada Seminar Bimbingan dan Penyuluhan Islami, UII, Yogyakarta, 15-16 Mei 1985.
[209]Achmadi, *Pendidikan Islam sebagai Paradigma*, hlm. 50.
[210]Al-Ankabuut, ayat 6 dan 69., Terj. Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, hlm. 698 dan 710.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

atau martabat manusianya selaku hamba Allah yang secara individual dan sosial senantiasa membina hubungan dengan Allah dan hubungan dengan masyarakat"[211]. Dengan adanya konsep jihad dan ikhtiar tersebut, ada dua pandangan yang perlu diperhatikan dalam usaha pengembangan, yaitu: Pertama, manusia tidak dipandang sebagai makhluk reaktif, melainkan responsif, sehingga manusia menjadi makhluk yang responsible [bertanggung jawab]. Oleh karena itu pendidikan lebih bersifat memberikan atau menyediakan stimulus agar secara otomatis subyek didik dapat memberikan respons terhadapaynya. Kedua, pendidikan tidak dapat memaksa kehendanya kepada subyek didik. Dengan perkataan lain sikap demokratis lebih sesuai dengan *fitrah* manusia karena sikap ini akan menumbuhkan respons yang wajar pada subyek didik, karena hanya dalam iklim demokratiklah kreativitas seseorang akan tumbuh secara optimal"[212]. Dengan demikian, upaya pendidikan yang dilakukan dengan memperhatikan potensi-potensi yang dimiliki dan mengembangkannya secara demokratis, sehingga kemampuan dan kreativitas subjek didik dapat tumbuh secara optimal.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa manusia menurut pendidikan Islam adalah makhluk Allah yang dapat didik dan dapat mendidik, karena manusia telah dilengkapi oleh Tuhan dengan potensi-potensi bawaan untuk dikembangkan. Untuk itu upaya pendidikan dapat mengembangkan potensi yang dibawa manusia seoptimal mungkin, dengan menseleksi bakat dan kemampuan apa sajakah yang dimiliki untuk dikembangkan melalui proses pendidikan dan juga kemampuan-kemampuan lain yang dapat dikembangkan pendidikan. Proses pendidikan dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan "potensi bawaan" [*fitrah*] manusia, karena dengan sikap demokratis akan menimbulkan sikap yang wajar dari obyek didik dan kerativitas seseorang akan tumbuh secara optimal. Dengan demikian, pendidikan

[211]HM. Arifin, *Filsafat Pendidikan...*, hlm. 165.
[212]Achmadi, *Pendidikan Islam sebagai Paradigma*, hlm. 51.

Islam dapat membentuk manusia untuk menempati tempatnya secara proporsianal sesuai dengan susunan ilmu dan teknologi yang dikuasainya. Pendidikan Islam dapat mencapai tujuan yang total, menyeluruh serta dapat menyentuh segenap aspek kemampuan dan kehidupan manusia, pendidikan yang bermakna luas yaitu membentuk manusia seutuhnya untuk mencapai kebahagian dunia dan akhirat nanti. Pendidikan yang senantiasa membentuk dan mengkondisikan manusia untuk belajar dari "ayunan" sampai "liangiahat" [seumur hidup], sehingga terbentuk "manusia sebagai makhluk belajar sepanjang hayat melalui proses yang didasari dengan nilai-nilai Islami. Proses belajar yang Islami itu adalah berlangsung secara dialogis kepada tuntunan Tuhan dan kepada tuntunan perubahan sosialnya, sehingga berkecenderungan ke arah pola hidup harmonis [seimbang] antara kepentingan hidup duniawi dan ukhrawi, sejalan dengan tugas pokoknya sebagai "khalifah" di atas bumi".

C. Orientasi dan Tujuan Pendidikan Islam

Pendidikan Islam didasarkan pada asumsi bahwa manusia dilahirkan dengan membawa "potensi bawaan", karena dengan potensi tersebut manusia mampu berkembang secara aktif dan interaktif dengan lingkungannya dan dengan bantuan orang lain secara sengaja agar dapat menjadi manusia yang bertanggung jawab atas fungsinya sebagai khalifah fil-ard dan untuk mengabdi kepada Sang Penciptanya. Dengan demikian, upaya pendidikan diorientasikan kepada pengembangan potensi tersebut secara optimal, dan mengarahkan dengan sengaja perkembangan manusia sesuai dengan nilai-nilai Islam tentang manusia, hakekat dan sifat-sifatnya, misi, visi, tujuan hidupnya di dunia dan akhirat, hak dan kewajiban sebagai individu dan anggota masayarakat.

Pendidikan menurut al-Qur'an dan hadits sangat luas, meliputi pengembangan semua "potensi bawaan" manusia yang merupakan rahmat Allah. Potensi-potensi itu dapat dikembangkan menjadi kenyataan berupa keimanan, akhlak, serta kemampuan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

beramal dengan menguasai ilmu [dunia – akhirat], menguasai keterampilan atau keahlian tertentu sehingga mampu memikul amanat dan tanggung jawab sebagai khalifat fil-ard dan menjadi muslim yang bertaqwa. Namun pendidikan Islam, sebagaimana yang lazim dikenal di Indonesia ini, memiliki pengertian yang agak sempit, yaitu pendidikan Islam yang lebih banyak menyempit kepelajaran fiqh - ibadah, yang hanya bersifat rutinitas semata-mata. Tetapi, sebenamya "pendidikan Islam mempunyai cakupan yang sama luasnya dengan pendidikan umum, bahkan melebihinya, karena pendidikan Islam juga membina dan mengembangkan pendidikan agama di mana titik beratnya terletak pada internalisasi nilai Iman, Islam dan Ihsan dalam pribadi manusia muslim yang berilmu pengetahuan"[213].

Dari padangan di atas, dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan sistem untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupan, pendidikan dibutuhkan untuk menyiapkan anak manusia demi menunjang perannya di masa datang. Pendidikan merupakan sarana terbaik untuk membina suatu generasi baru pemuda-pemudi yang tidak akan kehilangan ikatan dengan tradisi, nilai, pandang hidup mereka, dan sekaligus tidak menjadi bodoh secara intelektual atau terbelakang dalam pendidikan mereka. Maka, upaya pendidikan yang dilakukan oleh suatu bangsa memiliki hubungan yang signifikan dengan rekayasa bangsa tersebut di masa mendatang, sehingga orientasi dan tujuan pendidikan diarahkan pada perkembangan tersebut. Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas, maka sangat perlu untuk mengkaji kembali orientasi dan tujuan pendidikan Islam.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1. Orientasi Pendidikan Islam

Tugas dan fungsi pendidikan, bisa berbeda dan berubaha-ubah menurut tuntatan hidupmanusia atau masyarakat. Ketika, "pada masa abad-abad permulaan berdirinya sistem pendidikan klasik, tugas pendidikan adalah mencerdaskan intelek

[213]HM. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*..., hlm. 113-114.

[daya pikir] manusia dengan melalui mata pelajaran menulis, membaca dan berhitung atau terkenal dengan "3 R's" [*writing, reading and arithmatic*][214]. Akan tetepi setelah perkembangan dan tuntutan hidup manusia semakin bertambah, maka tugas pendidikan juga semakin bertanbah dan meluas, maka pendekatan dan orientasi pendidikan tidak hanya terbatas pada "mencerdaskan otak" semata-mata, tetapi pada upaya mendidik akhlak atau moralitas, mendidik kecekatan atau keterampilan tangan untuk bekerja lebih trampil. Dengan demikian, perubahan pendidikan selalu diorientasikan pada kebutuhan manusia dan masyarakat baik pada konsep, materi atau kurikulum, proses, fungsi dan tujuan lembaga-lembaga pendidikan. Dan upaya perubahan tersebut juga selalu mengikuti irama perubahan per*adab*an masyarakat.

Apabila cermati pendidikan Islam, pendekatannya lebih banyak menonjolkan aspek nilai, baik nilai ketuhanan maupun nilai kemanusiaan, yang hendak ditanamkan dan ditumbuhkembangkan ke dalam diri peserta didik sehingga dapat melekat pada dirinya dan menjadi kepribadiannya, maka pendidikan Islam lebih "berorienasi"[215] pada pendidikan nilai [afektif]. Maka HM. Arifin, menyatakan bahwa pendidikan Islam dapat dibagi ke dalam tiga orientasi, yaitu : "(a) Orientasi pengembangan kepada Allah yang Maha Mengetahui yang menjadi sumbernya segala sumber ilmu pengetahuan. (b) Orientasi pengembangan kearah kehidupan sosial manusia, di mana muamalah "bainan naas" [pergaulan antara manusia] semakin komplek dan luas ruang lingkupnya akibat pengaruh kemajuan ilmu dan teknologi modern yang maju pesat. (c) Orientasi pengembangan kearah alam sekitarnya yang diciptakan Allah untuk kepentingan hidup umat manusia, mengandung berbagai macam kekayaan alam yang harus digali, dikelola dan dimanfaatkan oleh manusia sebagai kesejahteraan hidupnya di dunia untuk mencapai kebahagian hiudp di akhirat[216]. Berdasarkan orientasi tersebut di atas, maka rumusan tujuan utama pendidikan Islam, adalah "membina dan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[214]Ibid, hlm. 57.

[215]Orientasi (berorientasi) adalah peninjauan, melihat-lihat atau meninjau (supaya kenal atau tahu), (W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 689.

[216]HM. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, hlm. 112-113.

mendasari kehidupan anak didik dengan nilai-nilai agama dan sekaligus mengajarkan ilmu agama Islam, sehingga ia mampu mengamalkan syari'at Islam secara benar sesuai pengetahuan agama"[217]. Dari rumusan ini, tergambar bahwa orientasi pendidikan Islam pada upaya penanaman nilai-nilai agama dan pengetahuan agama Islam.

Maka pada wilayah operasionalisasi, rumusan tujuan yang berorientasi pada nilai agama harus tergambar dalam proses pendidikan, baik pada konsep, tujuan, kurikulum, dan proses sehingga terwujud dalam aspek praktis yang operasional. Tetapi pada kenyataannya, pendidikan Islam yang selama ini berlangsung "agaknya terasa kurang terkait atau kurang concern terhadap persoalan bagaimana mengubah pengetahuan agama yang bersifat kognitif menjadi "makna" dan "nilai" yang perlu diinternaslisasikan dalam diri peserta didik, untuk selanjutnya menjadi sumber motivasi bagi peserta didik untuk bergerak, berbuat dan berprilaku secara kongkret-agamis dalam kehidupan praktis sehari-hari[218]. Romo Y.B. Mangunwijaya, menyatakan bahawa pendidikan selama ini, "menekankan ortodoksi dalam pelajaran agama yang diidentikan dengan iman, dan bukan ortopraksis yaitu bagaimana mewujudkan "iman" tersebut dalam tindakan nyata operasional"[219]. Maka, dapat dikatakan bahwa penanaman nilai melalui pendidikan Islam selama ini tanpaknya belum menyentuh aspek praksis dari kehidupan manusia itu sendiri.

Fenomena empirik yang ada di hadapan dan sekeliling kita, tampaklah bahwa "pada saat ini terdapat banyak kasus kenakalan di kalangan pelajar. Isu perkelahian pelajar, tindakan kekerasan, premanisme, *white collar crime* [kejahatan kera putih], konsumsi minuman keras, etika berlalu lintas, perubahan pola konsumsi makanan, kriminalitas yang semakin hari semakin menjadi-jadi dan semakin rumit dan sebagainya, telah mewarnai media eloktronik, halaman surat kabar, majalah dan

[217]HM. Arifin, *Kapita Selekta...*, hlm. 4-5.
[218]Muhaimin, dkk., *Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, , Cetakan Pertama, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 168.
[219]Romo Y.B. Mangunwijaya, "*Ceramah Terakhir Romo Mangun*", Kompas, 12 Februari 1999.

sebagainya. Timbulnya kasus-kasus tersebut memang tidak semata-mata karena kegagalan pendidikan Islam di sekolah yang lebih menekankan aspek kognitif"[220], ataukah ada sesuatu yang salah dari orientasi, tujuan, kurikulum, dan proses pendidikan Islam, ataukah pendidikan Islam hanya menekankan aspek kognitif yang kurang operasional. Tetapi semuanya itu, dapat mendorong dan menggerakkan semua orang yang mengelola dan terlibat dalam dunia pendidikan untuk mencermati kembali dan mencari solusi lewat pengembangan pembelajaran pendidikan Islam yang lebih berorientasi pada pendidikan nilai (afektif) yang lebih aplikatif ke dunia praksis.

Pendidikan Islam masa kini "dihadapkan kepada tantangan yang jauh lebih berat dari tantangan yang dihadapi pada masa permulaan penyebaran Islam. Tantangan tersebut berupa tumbulnya aspirasi dan idealitas umat manusia yang serba multi-intrest yang berdimensi nilai ganda dengan tuntutan hidup yang multi kompleks pula. Jadi tugas pendidikan Islam dalam proses pencapaian tujuannya tidak lagi menghedapai problem kehidupan yang simplisistis, melainkan amat kompleks akibat rising demand manusia semakin kompleks pula"[221]. Kondisi pendidikan Islam di Indonesia sekarang ini dihadapkan pada tantangan kehidupan era globalisai dan perubaha budaya dan tatanan kehidupan menuju masyarakat madani. Maka orientasi pendidikan Islam harus diarahkan pada kebutuhan perubahan masyarakat tersebut. Untuk itu diperlukan suatu disain paradigma baru, sistem dan metode yang menarik di dalam menghadapi tuntutan-tuntutan perubahan tersebut.

Orientasi pendidikan Islam dalam zaman teknologi dan era globalisasi masa kini dan masa depan perlu diubah pula. Untuk itu, pendidikan Islam yang semula berorientasi kepada kehidupan ukhrawi menjadi duniawi-ukhrawi bersamaan. Dengan demikian, "orientasi ini menghendaki suatu rumusan tujuan pendidikan yang jelas

---

[220]Muhaimin, dkk., *Paradigma Pendidikan*...,hlm. 168.
[221]HM. Arifin, *Kapita Selekta*..., hlm. 5.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

karena itu program pembelajaran harus lebih diproyeksikan ke masa depan daripada masa kini atau masa lampau. Meskipun masa lampau dan kini tetap dijadikan khazanah kekayaan emperis yang amat berharga bagi batu loncatan ke masa depan, sehingga nostalgia ke masa keemasan dunia Islam masa lampau tidak perlu lagi meng-obsesi pemikiran kita[222].

Pada era globalisasi dan era milenium ketiga ini, pendidikan menghadapi berbagai kekuatan global yang hendak membentuk dunia masa kini dan masa depan, yaitu "(1) kemajuan iptek dalam bidang informasi serta inovasi-inovasi baru di dalam teknologi yang mempermuda kehidupan manusia, (2) masyarakat yang serba kompetetif dan (3) meningkatnya kesadaran terhadap hak-hak asasi manusia serta kewajiban manusia dalam kehidupan bersama, dan semakin meningkatnya kesadaran bersama dalam alam demokrasi[223]. Djamaluddin Ancok, juga menyatakan bahwa "salah satu pergeseran paradigma adalah paradigma di dalam melihat apakah kondisi kehidupan di masa depan relatif stabil dan bisa diramalkan [*predictability*]. Pada milenium kedua orang selalu berpikir bahwa segala sesuatu bersifat stabil dan bisa diprediksi. Tetapi, pada milenium ketiga semakin sulit untuk melihat adanya stabilitas tersebut. Apa yang terjadi di depan semakin sulit untuk diprediksi karena perubahan menjadi tidak terpolakan dan tidak lagi bersifat linier"[224]. Untuk itu, pendidikan Islam sekarang orientasinya tidak lagi bersifat linier tetapi lebih bersifat lateral dalam menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat dan tidak terpolakan. Djamaluddin Ancok, yang mengutip Hartanto [1997], Hartanto, Raka & Hendroyuwono [1998], menyatakan bahwa pendidikan [termasuk pendidikan Islam] harus mempersiapkan empat kapital yang diperlukan untuk memasuki milenium ketiga, yakni kapital intelektual, kapital sosial, kapital lembut, dan kapital spritual"[225]. Orientasi pendidikan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[222]Ibid, hlm. 5-6.

[223]Muhaimin, dkk., *Paradigma Pendidikan*...,hlm. 168.

[224]Djamaluddin Ancok, "*Membangun Kompotensi Manusia dalam Milenium Ke Tiga*, Psikologi, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi, Nomor : 6 Tahun III, 1998, UII, Yogyakarta, hlm. 5.

[225]Penjelasan empat kapital : (1) Kapital Intelektual, perangkat yang diperlukan untuk menemukan peluang dan mengelola ancaman dalam kehidupan. Banyak pakar yang menyatakan bahwa kapital intelektual sangat besar peranannya di dalam menambah nilai suatu kegiatan. Manusia harus memiliki sifat proaktif dan inovatif untuk mengelola perubahan lingkungan kehidupan

Islam dihadapkan pada tantangan tersebut, walaupun tantangan tersebut tidak muda untuk penyelesaiannya, tidak seperti membalik telapak tangan.

Untuk menghadapi perubahan tersebut, pendidikan Islam perlu diorientasikan pada perubahan tersebut dengan mendesain ulang sistem, kurikulum, fungsi, tujuan, oragnisasi lembaga-lembaga, dan proses, agar dapat meneuhi tuntatan perubahan yang semakin cepat. Pendidikan Islam di tuntut untuk menerapkan pendekatan dan orientasi baru yang relevan dengan tuntutan perubahan tersebut. "Lebih-lebih dalam menghadapi pergeseran nilai-nilai kultural yang tradisonal dari dunia kehidupan, ...maka pendidikan Islam dituntut untuk menerapkan pendekatan dan orientasi baru yang relevan dengan tuntutan zaman, karena pendidikan Islam membawakan prinsip dan nilai-nilai absolutisme yang bersifat mengarahkan trends perubahan sosio-kultural"[226]. Oleh karena itu, orientasi pada perubahan menghendaki suatu rumusan tujuan pendidikan yang jelas dan relevan dengan perubahan tersebut. Program pembelajaran lebih diproyeksikan ke masa depan dari pada masa kini dan masa lampu yang hanya merupakan nostalgia dan tidak perlu mengobsesi pemikiran kita dalam upaya mengembangkan pendidikan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Tujuan Pendidikan Islam

Setelah diketahui ciri-ciri manusia sempurna menurut Islam dan orientasi pendidikan Islam, perlu mengkaji rumusan tujuan pendidikan Islam, karena persoalan pendidikan adalah persolan yang menyangkut hidup dan kehidupan manusia yang senantiasa berproses dalam perkembangan kehidupannya. Perumusan tujuan pendidikan berorientasi pada dua pandangan yaitu, dasar kehidupan atau pandangan hidup [*philosophy of life*]. Ts. Eliot, menyatakan bahwa pendidikan yang amat penting itu adalah tujuannya, harus diambil dari pandangan hidup. Jika pandangan hidup

---

(ekonomi, sosial, politik, teknologi, hukum, dan lain-lain) yang sangat tinggi kecepatannya. (2) Kapital Sosial, intelek kapital baru akan tumbuh bila masing-masing orang berbagai wawasan. Untuk dapat berbagi wawasan orang harus membangun jaringan hubungan sosial dengan orang lain. (3) Kapital Lembut (*Soft Capital*), kapital yang diperlukan untuk menumbuhkan kapital sosial dan kapital intelektual. Sifat bisa dipercaya dan percaya pada orang lain (trust), bisa menahan emosi, pemaaf, penyabar, ikhlas, dan selalu ingin menyenangkan orang lain sengat diperlukan bagi upaya untuk membangun masyarakat yang ber*adab* dan berkinerja tinggi. (4) Kapital Spritual, bagi orang Islam ketiga kapital yang dibicarakan adalah bagian dari ekspresi kapital spritual. Semakin tinggi iman dan taqwa seseorang semakin tinggi pula ketiga kapital di atas (Ibid, hlm. 5).

[*philosophy of life*] Anda adalah Islam, maka tujuan pendidikan menurut Anda haruslah diambil dari ajaran Islam"[227], dan rumusan tujuan pendidikan yang berorientasi pada masa depan.

Muhammad Quthb, menyatakan bahwa tujuan pendidikan lebih penting dari sasaran pendidikan. Sasaran pendidikan pasti berubah dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, bahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Akan tetapi, tujuan pendidikan tidak berubah. Yang dimaksud ialah tujuan pendidikan yang umum, karena tujuan pendidikan khusus dapat berubah sesuai dengan kondisi tertentu. Namun, bagian yang mendasar dalam tujuan pendidikan yang khusus tidak pernah berubah[228]. Maka, tujuan pendidikan merupakan masalah senteral dalam pendidikan, sebab tanpa perumusan tujuan pendidikan yang baik, maka perbuatan mendidik bisa menjadi tidak jelas, tanpa arah dan bahkan tersesat atau salah langka. Oleh karenanya, masalah tujuan pendidikan menjadi inti dan sangat penting dalam menentukan isi dan arah pendidikan yang diberikan"[229]. Menurut Sikun Pribadi, yang dikutip Achmadi, menyatakan "tujuan pendidikan merupakan masalah inti dalam pendidikan, dan saripati dari seluruh renungan pedagogik"[230]. Tujuan pendidikan merupakan faktor yang menentukan dalam merencenakan dan menjalankan pendidikan, sehingga perlu dirumuskan tujuan pendidikan sebaik-baiknya sebelum kegiatan pendidikan dijalankan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Suatu rumusan tujuan pendidikan akan tepat apabila sesuai dengan fungsinya, oleh karena itu sebelum merumuskan tujuan perlu ditegaskan lebih dahulu apa fungsi pendidikan itu. Para ahli pendidikan Islam berpendapat bahwa fungsi tujuan pendidikan ada tiga, tetapi ketiga-tiganya bersifat normatif, yaitu: (1) Memberi arah bagi proses pendidikan, (2) Memberikan motivasi dalam aktivitas pendidikan karena

---

[226]HM. Arifin, *Kapita Selekta...*, hlm. 6.
[227]Ahmad Tafisr, *Ilmu Pendidikan...*, hlm. 46.
[228]Muhammad Quthb, *Sistem Pendidikan Islam*, Terj. Salman Harun, 1993, Cet.ke-III, (Bandung, Al-Ma'arif, , 1988),hlm. 17., dan Ahmad Tafsir, *ILmu Pendidikan...*, hlm. 48.
[229]Kartini Kartono, *Pengantar Ilmu Mendidik Teoritis*, (Bandung,: Mandar Maju, 1992), hlm. 214.
[230]Achmadi, *Pendidikan Islam sebagai Paradigma*, hlm. 59.

pada dasarnya tujuan merupakan nilai-nilai yang ingin dicapai dan diinternalisasikan pada subjek didik, (3) Tujuan pendidikan merupakan kriteria atau ukuran dalam evaluasi pendidikan[231]. Untuk memenuhi fungsi pertama dan kedua, tujuan pendidikan harus dirumuskan atas dasar nilai-nilai ideal yang diyakini mengangkat harkat dan martabat manusia, atau seperti yang dikatakan Ts. Eliot, bahwa tujuan pendidikan harus diambil dari "pandangan hidup" [*philosophy of life*], maka apabila kita Islam, maka tujuan pendidikan haruslah diambil dari ajaran Islam, yaitu nilai-nilai ideal yang menjadi kerangka pikir dan bertindak bagi seorang muslim dan sekaligus sebagai pandangannya yaitu nilai-nilai Ilahia yang bersifat transenden dan universal. Abdurrahman an-Nahlawi, menyatakan konsep pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai tersebut "bersifat ketuhanan", sehingga tujuan pendidikan Islam adalah merealisasikan penghambaan kepada Allah dalam kehidupan manusia, baik secara indiviual maupun sosial[232].

Dari pandangan di atas, tergambar bahwa tujuan pendidikan Islam berbeda dengan tujuan pendidikan lainnya, karena pendidikan Islam merupakan pertalian antara pendidikan, agama dan kebudayaan Islam, sehingga membuat pendidikan Islam memiliki ciri-ciri dan prinsip-prinsip yang berbeda dengan pendidikan pada umumnya. Omar Muhammad al-Toumy al-Syaibani, menyatakan tujuan pendidikan Islam memiliki empat ciri pokok yang paling menonjol, yaitu: (1) Sifatnya bercorak agama dan akhlak. (2) Sifat keseluruhannya yang mencakup segala aspek pribadi pelajar [subjek didik] dan semua aspek perkembangan dalam masyarakat. (3) Sifat keseimbangan, kejelasan, tidak adanya pertentangan antara unsur-unsur dan cara pelaksanaannya. (4) Sifat realistik dan dapat dilaksanakan, penekanan pada perubahan yang dikehendaki pada tingkah laku dan pada kehidupan, memperhitungkan perbedaan-perbedaan perseorangan di antara individu-individu,

[231]Ibid, hlm. 60.
[232]Abdurrahman an-Nahlawi, *Ushulut Tarbiyah*, terj. hlm. 116-117.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

masyarakat dan kebudayaan di mana-mana dan kesanggupannya untuk berubah dan berkembang bila diperlukan"[233].

Tujuan pendidikan Islam, memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda dengan tujuan pendidikan lainnya, yaitu lebih bercorak normatif [agama] dan akhlak, mencakup semua aspek pribadi subjek didik dan aspek perkembangan yang terjadi di masyarakat, mencakup aspek keseimbangan, kejelasan cara-cara pelaksanaan, dan mempertimbangkan aspek realitas untuk dapat dilaksanakan dengan penekanan pada perubahan yang dikehendaki pada tingkah laku dalam kehidupan dengan memperhitungkan perbedaan individu, masyarakat, kebudayaan, dinamika, serta kesanggupan untuk berubah dan berkembang. Selain ciri-ciri di atas, Omar Muhammad al-Toumy al-Syaibani, juga mengemukakan delapan prinsip terpenting yang menjadi dasar dan tujuan pendidikan Islam. Delapan prinsip umum terpenting dan menjadi dasar tujuan pendidikan Islam meliputi: *Partama*, prinsip menyeluruh [universal], *Kedua*, prinsip keseimbangan dan kesederhanaan, *Ketiga*, prinsip kejelasan, *Keempat*, prinsip tak ada pertentangan, *Kelima*, prinsip realisme dan dapat dilaksanakan, *Keenam*, prinsip perubahan yang diinginkan, *Ketujuh*, prinsip menjaga perbedaan-perbedaan perseorangan, Kedelapan, prinsip dinamisme dan menerima perubahan dan perkembangan dalam rangka motode-metode keseluruhan yang terdapat dalam agama[234]. Prinsip-prinsip tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Prinsip menyeluruh [universal]: Berdasarkan prinsip ini, pendidikan Islam bertujuan untuk membuka, mengembangkan, mendidik segala aspek pribadi manusia dengan segala kemampuannya. Bertujuan mengembangkan segala segi kehidupan dalam masyarakat, mengembangkan dan meningkatkan keadaan kebudayaan, sosial, ekonomi, politk dan berusaha turut serta menyelesaikan masalah masyarakat masakini serta siap untuk menghadapi tuntutan masa depan.
2. Prinsip keseimbangan dan kesederhanaan: Pendidikan Islam bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan antara aspek pertumbuhan pribadi, kehidupannya, dan kehidupan di masyarakat. Menciptakan keseimbangan kebutuhan individu dan

[233]Omar Mohammad al-Toumy al-Syaibany, *Falsafah Pendidikan Islam*, terj., hlm. 436-437.
[234]Ibid, hlm. 437-443.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

kelompok, keseimbangan tuntutan pemeliharaan kebudayaan masa silan dan kebutuhan masakini dan berusaha mengatasi masalahnya, serta tuntutan kebutuhan masa depan tanpa mengurangi aspek-aspek tersebut. Pendidikan dalam bentuk seimbang yaitu saling melengkapi, dan sederhana yaitu berjalan sesuai dengan semangat *fitrah* manusia.

3. Prinsip kejelasan: Pendidikan Islam bersifat kejelasan yaitu pada prinsip-prinsip, ajaran-ajaran, dan hukum-hkumnya. Pendidikan Islam memberi jawaban yang jelas dan tegas terhadap jiwa dan akal manusia pada segala hukum, masalah, tantangan dan krisis. Dengan ketegasan, dapat merumuska tujuan, kurikulum, serta metode-metode yang jelas dan tegas. Sebab dengan ketegasan tujuan dapat memberi makna dan kekuatan terhadap pengajaran sehingga mendorong bertolak ke arah yang jelas untuk mencapai tujuan dan menhindari timbulnya salah tafsiran dan interpretasi.
4. Prinsip tak ada pertentangan: Rumusan tujuan pendidikan Islam terpadu secara organik antara bagian-bagian, sebab menggunakan dasar-dasar dan bimbingan dari ajaran Islam yang mustahil ada pertentangan dan perselisihan dalam prinsip dan tujuan, sebab berasal dari Allah.
5. Prinsip realisme dan dapat dilaksanakan: Pendidikan Islam ditegakkan di atas prinsip realisme, tidak khayalan dan berlebih-lebihan. Berusaha mencapai tujuan melalui kaedah atau metode yang praktis dan realistis sesuai dengan *fitrah* manusia, sejalan dengan kondisi dan kemampuan yang dimiliki individu dan masyarakat. Jadi tujuan pendidikan Islam bukan merupakan prinsip ideal yang tidak dapat dilaksanakan pada kehidupan manusia, tetapi merupakan prinsip dan tujuan yang realistis dan dapat dilaksanakan pada siatu dan kondisi individu dan masyarakat.
6. Prinsip perubahan yang diinginkan: Sesuai dengan kesepakatan ahli pendidikan bahwa pendidikan adalah proses perubahan yang dikehnedaki pada individu dan masyarakat. Perubahan tingkah laku yang diinginkan dalam tujuan meliputi tingkah laku jasmani, akal, psikologi, dan sosial. Atau dengan kata lain perubahan yang diinginkan meliputi pengetahuan, konmsep, pikiran, kemahiran, nilai, adad-kebiasaan, dan sikap subjek didik. Oleh karena itu pendidikan yang baik haruslah mengadakan perubahan yang diingini pada segala aspek pribadi subjek didik dan tidak hanya terbatas pada pengembangan pengetahuan saja.
7. Prinsip menjaga perbedaan-perbedaan perseorangan: Dalam usaha merubah tingkah laku, akan berhadap dengan individu yang berbeda ciri-ciri, kebutuhan, kecerdasan, kemampuan, minat, sikap dan kematangan jasmani, akal, emosi, sosial, dan lain-lain. Begitu juga hal dengan masyarakat Islam di mana proses pendidikan itu berlaku akan dipengaruhi oleh faktor kebudayaan setempat, kemajuan per*adaba*n, ekonomi, politik, dan berbagai faktor yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Jadi upaya pendidikan harus memperhatian prinsip perbedaan tersebut, sehingga tujuan, kurikulum, metode, dan cara-cranya mengandung prinsip kemerdekaan, persamaan peluang, prinsip realisme, keterkaitan dengan kebutuhan individu dan masyarakat [*relevance*].
8. Prinsip dinamisme dan menerima perubahan dan perkembangan dalam rangka motode-metode keseluruhan yang terdapat dalam agama: Pendidikan Islam tidak kaku dalam tujuan, kurikulum dan metodenya, tetapi selalu mengikuti perubahan dan berkembang. Pendidikan Islam selalu memberi respons terhadap kebutuhan zaman dan tuntutan perkembangan perubahan sosial yang sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam[235].

[235]Ibid, hlm. 437-443.

Oleh karena itu, dalam merumuskan tujuan pendidikan Islam perlu memperhatikan ciri-ciri dan prinsip-prinsip yang cukup luas yang menyangkut nilai, prinsip universal, dinamis, efektif, efesien dan yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia baik individu maupun masyarakat, karena ciri-ciri dan prinsip-prinsip asasi tersebut di atas menjadi dasar untuk perumusan tujuan pendidikan Islam.

Pertanyaan yang muncul, bagaimanakah tujuan pendidikan menurut Islam. Untuk menjawab pertanyaan ini perlu mencermati beberapa rumusan tujuan pendidikan Islam yang dikemukan oleh ahli pendidikan, antara lain: Al-Attas [1979:1], menghendaki tujuan pendidikan Islam adalah "manusia yang baik". Al-Abrosy [1974:15], menghendaki tujuan akhir pendidikan Islam adalah "manusia yang berakhlak mulia". Munir Mursyi [1977:18], menyatakan bahwa tujuan akhir pendidikan menurut Islam manusia sempurna. Rumusan tujuan pendidikan tersebut di atas terlalu bersifat umum, sulit untuk dioperasikan dalam tindakan perencaan dan pelaksanaan pendidikan secara nyata. Sedangkan menurut Abdul Fattah Jalal [1988:119], tujuan umum pendidikan Islam ialah terwujudnya manusia sebagai hamba Allah. Menurut Quthb [1988:21], tujuan umum pendidikan adalah manuisa yang taqwa[236], tanpaknya para ahli pendidikan Islam belum sepakat secara bulat dalam merumuskan tujuan pendidikan Islam, karena sudut pandang yang dilihat berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, yaitu ada yang menyebut dengan manusia yang baik, manusia yang berakhlak mulia, manusia sempurna, dan terwujudnya manusia sebagai hamba Allah, dan terwujudnya manusia yang taqwa. Walaupun para ahli berbeda dalam menyebut tujuan pendidikan, tetapi rumusan tersebut menurut peneliti lebih bermuara pada konsepsi tujuan dasar keberadaan manusia sebagai khalifah di mukan bumi, maka pendidikan juga "memiliki tujuan yang sama dengan tujuan penciptaan manusia"[237], yaitu penghambaan, ketunduhan kepada Allah, dan fungsi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[236]Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan*..., hlm. 46-47.
[237]Abdurrahman an-Nahlawi, *Ushulut Tarbiyah*, terj,. hlm. 117.

kekhalifaannya di mukan bumi. Ahmad D. Marimba, menyatakan bahwa "tujuan pendidikan Islam adalah terbentuknya orang berkepribadian muslim, walaupun rumusan ini menurut Ahmad Tafsir, masih bersifat umum, tetapi oleh Ahmad D. Marimba menyebutnya sebagai tujuan akhir"[238] pendidikan Islam. Dengan rumusan tersebut, tujuan pendidikan menurut Islam "haruslah menjadikan seluruh manusia menjadi manusia yang menghambakan dirinya kepada Allah, yaitu beribadah kepada Allah"[239], pembentukan kepribadian, dan moralitas untuk kehidupan manusia dan dapat "merealisasikan penghambaan kepada Allah dalam kehidupan manusia, baik secara individual maupun secara sosial"[240].

Dari rumusan-rumusan tujuan tersebut, tergambar bahwa tujuan pendidikan Islam lebih berorientasi pada konsepsi tujuan manusia diciptakan, tujuan hidupnya, sifat-sifat dasar manusia, masyarakat, dan nilai-nilai idieal Islam. Oleh karena itu, Muhaimin, dkk., menyatakan "perumusan tujuan pendidikan haruslah berorientasi pada hakikat pendidikan yang memliputi beberapa aspek, yaitu: (1) Tujuan dan tugas hidup manusia, (2) Memperhatikan sifat-sifat dasar [nature] manusia. (3) Tuntutan masyarakat, (4) Dimensi-dimensi kehidupan ideal Islam[241]. Maka dari keempat tujuan pendidikan Islam ini, tanpaknya tujuan pendidikan lebih berorientasi pada "hakikat manusia" dan "pendidikan", apabila dijabarkan sebagai berikut: *Pertama*, tujuan dan tugas hidup manusia, manusia diciptakan dengan membawa tujuan dan tugas hidup tertentu [Q.S. 3:191], karena tujuan diciptakan manusia adalah hanya untuk Allah. Indikasi tugasnya berupa ibadah, dan tugas sebagai khalifah Allah di muka bumi [Q.S. 6:162]. *Kedua*, memperhatikan sifat-sifat dasar [*nature*] manusia, yaitu konsep manusia diciptakansebagai khalifah di bumi [Q.S. 2:30] penciptaan manusia yang dibekali dengan *fitrah* yang berkecenderungan pada al-hanief, cenderungan kepada kebenaran [Q.S. 30: 30], dan memilki kemampuan untuk beribadah [Q.S.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[238]Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, hlm. 48-49.
[239]Ahmad Tafisr, *Pendidikan Islam*..., hlm.47.
[240]Abdurrahman an-Nahlawi, *Ushulut Tarbiyah*, terj,, hlm. 117.
[241]Muhaimin, dkk., *Paradigma Pendidikan*...,hlm. 153-154.

51:56][242]. *Ketiga,* tuntutan masyarakat, berupa pelestarian nilai-nilai budaya yang telah melembaga di kehidupan masyarakat, maupun pemenuhan terhadap tuntutan kebutuhan hidup untuk mengantisipasi perkembangan dan tuntutan dunia modern. *Keempat*, dimensi-dimensi kehidupan ideal Islam, mengandung nilai yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup manusia didunia dan akhirat, mendorong manusia berusaha keras untuk mencapai tujuan tersebut dengan menjaga keserasian dan keseimbangan kedua tujuan tersebut[243]. Pandangan yang dikemukakan Muhaimin, dkk., diatas dapat dikatakan bahwa perumusan tujuan harus selalu berorientasi pada hakikat kemanusian, tugas-tugas kehidupan manusia, sesuai dengan sifat dasar manusia yaitu *fitrah* yang memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan, sesuai dengan nilai-nilai ideal ajaran Islam bagi kehidupan manusia, dan sesuai dengan tuntutan masyarakat dan budaya yang selalu mengalami perubahan. Dengan demikian, tujuan pendidikan Islam berorientasi pada ciri dan dimensi yang cukup luas, yaitu menyangkut sifat-sifat dasar manusia dan prinsip pendidikan bagi keseluruhan aspek kehidupan manusia baik individu maupun masyarakat.

Tujuan pendidikan Islam dapat berfungsi sebagai dasar, arah, titik tolak, serta kontrol dan evaluasi proses pendidikan. Berkenaan dengan fungsi tujuan pendidikan di atas, Achmadi, menyatakan bahwa dalam merumuskan tujuan pendidikan perlu memperhatikan: *Pertama*, tujuan sebagai arah dan sebagai sesuatu yang akan dicapai yaitu tujuan sebagai arah ialah merupakan arah perkembangan subjek didik, dan harus sesuai dengan tingkat perkembangan, kebutuhan, perasaan, perhatian, bahkan lingkungannya. Sedangkan tujuan sebagai sesuatu yang akan dicapai merupakan perubahan tingkah laku, sikap dan kepribadian yang diharapkan setelah subjek didik mengalami pendidikan. *Kedua,* tujuan sementara atau perantara dan tujuan akhir. Tujuan sementara atau perantara adalah bersifat mengarahkan ke tujuan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[242]Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan, Suatu Analisis Psikologi dan Pendidikan*, (Jakarta:Pustaka al-Husna,1989),hlm.34.

[243]Muhaimin, dkk., *Paradigma Pendidikan*..., hlm. 154.

berikutnya, sedangkan tujuan akhir dalam pendidikan biasanya mencakup filsafat pendidikan dan filsafat hidup suatu bangsa yang melaksanakan pendidikan. Maka dalam Islam tujuan akhir pendidikan Islam disesuaikan dengan konsep ilahi, karena lebih bersifat transenden bagi kehidupan manusia. *Ketiga*, tujuan relatif dan tujuan mutlak, tujuan relatif merupakan tujuan yang mudah berubah sesuai dengan tingkat perkembangan, kondisi dan situasi sesaat, serta tuntutan dan kebutuhan mendesak subjek didik, sedangkan tujuan mutlak adalah tujuan yang bersifat permanen yang telah dirumuskan berdasarkan nilai-nilai ideal yang mengandung kebenaran dan kebaikan universal, dan tujuan akhir juga termasuk tujuan mutlak[244].

Ahmad D. Marimba, mengemukakan empat fungsi tujuan pendidikan Islam, yaitu: "*Pertama*, tujuan berfungsi mengakhiri usaha, dan dalam usaha pendidikan perlu ada antisipasi kedepan kepada tujuan agar tidak terjadi penyimpangan, sehingga usaha yang dilakukan lebih terarah dan efisien. *Kedua*, tujuan berfungsi mengarahkan usaha, yaitu menjadi pedoman sebagai arah dan sasaran kegiatan. *Ketiga*, fungsi tujuan merupakan titik pangkal untuk mencapai tujuan lainnya baik merupakan tujuan baru, maupun tujuan kelanjutan dari tujuan-tujuan sebelumnya, sehingga tujuan dapat membatasi ruang gerak suatu usaha dan sekaligus mendinamisasikan suatu usaha. *Keempat*, tujuan berfungsi memberikan nilai [sifat] pada suatu usaha, sehingga ada tujuan yang lebih luhur, lebih mulia dari pada usaha lainnya. Selain itu, tujuan dapat bersifat paralel ataupun dalam satu garis lurus [linier], yaitu ada tujuan dekat, jauh, lebih jauh dan terjauh atau tujuan sementara [tujuan antara] dan tujuan akhir[245]. Dari rumusan-rumusan di atas, tergambar bahwa tujuan pendidikan Islam berfungsi untuk membantu dan memelihara arah, dan menjadi titik tolak, sebagai kontrol serta evaluasi terhadap suatu proses pendidikan. Mohammad Athiya al-Abrasyi dalam kajian tentang pendidikan Islam, yang dikutip Omar

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[244] Achmadi, *Pendidikan Islam sebagai Paradigma*, hlm.61-62.
[245] Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, hlm. 48-49.

Muhammad al-Toumy al-Syaibani, telah menyimpulan lima tujuan yang asasi bagi pendidikan Islam yaitu :

1. Untuk membantu pembentukan akhlak yang mulia. Kaum muslimin telah sepakat bahwa pendidikan akhlak adalah jiwa dari pendidikan Islam, dan untuk mencapai akhlak yang sempurna adalah tujuan pendidikan sebenarnya.
2. Persiapan untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Pendidikan Islam tidak hanya menaruh perhatian pada segi keagamaan saja atau keduniaan saja, tetapi menaruh perhatian pada keduanya sekaligus, dan memandang persiapan keduanya sebagai tujuan am [umum] yang asasi.
3. Persiapan untuk mencari rezeki dan pemeliharaan segi-segi kemanfaatan. Pendidikan Islam tidak hanya bersifat agama, akhlak dan spritual semata-mata, tetapi menitikberatkan pada kemanfaatan pada tujuan, kurikulum, dan aktivitasnya. Pendidikan Islam memasukan antara agama dan ilmu pengetahuan, spritual, akhlak dan kemanfaatannya.
4. Menumbuhkan semangat ilmiah [*scientific spirit*] pada pelajar dan memuaskan keinginan rasa ingin mengetahui [*curiosity*], dan memungkinkan mereka mengkaji ilmu untuk ilmu itu sendiri.
5. Menyiapkan pelajar dari segi professional, teknis, dan perusahaan supaya mereka dapat menguasai profesi tertentu, teknis tertentu atau keterampilan tertentu, agar mereka dapat mencari reziki dalam kehidupan, di samping memelihara kerohanian dan keagamaan[246].

Maka, pada dasarnya tujuan pendidikan Islam merupakan upaya untuk membangun manusia sempurna [insan kamil], dengan pembentukan kepribadian, akhlak, moralitas, semangat ilmiah dan ilmu pengetahuan, memiliki ethos kerja dan kemampuan berkarya secara profesional, sehingga mampu mewujudkan iman dalam tindakan nyata operasional, dan beramal shaleh sesuai dengan nilai-nilai keagamaan serta ilmu pengetahuan untuk mencapai kesuksesan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dengan demikian tujuan pendidikan Islam lebih berorientasi pada pembinaan dan pembentukan akhlak, menyiapkan subjek didik untuk hidup di dunia dan di akhirat, pengusaan ilmu, dan penyiapan subjek didik dengan keterampilan bekerja di masyarakat, sehingga melahirkan subjek didik yang memiliki ethos kerja yang tinggi.

Abuddin Nata, menyatakan tujuan pendidikan Islam memiliki ciri-ciri sebagai berikut: Mengarahkan manusia agar menjadi khalifah Tuhan di muka bumi dengan sebaik-baiknya. Mengarahkan manusia agar melaksanakan tugas di muka bumi dalam

[246]Omar Muhammad at-Toumy al-Syaibani, *Falsafah Pendidikan Islam*, terj., hlm. 416-417.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

rangka beribadah kepada Allah. Mengarahkan manusia agar berakhlak mulia. Membina dan mengembangkan potensi akal, jiwa dan jasmani dan Mengarahkan manusia agar dapat mencapai kebahagian hidup di dunia dan akhirat"[247]. Tanpaknya tujuan pendidikan yang dikemukakan ini, lebih berorientasi pada "tugas manusia sebagai *khalifah fil-ard*", yaitu: *Pertama*, mempersiapkan subjek didik untuk bertugas mengolah dan memakmurkan bumi sesuai dengan kehendak Tuhan. *Kedua*, tugas-tugas yang dilaksanakan dengan tujuan untuk "beribadah" kepada Allah. *Ketiga*, mebekali subjek didik dengan akhlak dan moral yang unggul, agar tidak menyalahgunakan fungsi sebagai khalifah dalam menjalankan tugas-tugasnya. *Keempat*, mengembangkan potensi jasmani, jiwa, dan akal, dan penguasaan ilmu pengetahuan untuk mendukung tugas pengabdiannya. *Kelima*, menyiapkan subjek didik untuk mencapai kesuksesan di dunia dan akhirat, sehingga melahirkan subjek didik yang sempurna [insan kamil].

Dengan demikian, tujuan pendidikan Islam yang dikemukakan di atas, lebih memberikan gambaran bahwa arah pendidikan Islam dalam rangka menjadikan manusia sebagai khalifah yang mampu menjalankan fungsi dan tugas kehidupan di permukaan bumi. Tujuan pendidikan Islam bukan hanya mengembangkan dan mengarahkan subjek didik untuk mengamalkan ajaran agama dan berakhlak mulia saja, tetapi lebih dari itu yaitu mengarahkan dan mengembangkan seluruh potensi subjek didik, meliputi aspek jasmaniah, ruhaniah, intelektual, kepribadian, dan aspek sosial sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan, kemajuan ilmu dan peradaban serta perkembangan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai ideal ajaran Islam bagi kehidupan manusia, dan untuk menjalankan fungsinya sebagai insan yang mengabdi dan bertaqwa kepada Allah. Kemudian dari pandangan yang dikemukakan, dapat dikatakan bahwa ciri umum tujuan pendidikan Islam, yaitu :

[247]Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 53-54.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

mengarahkan manusia agar menjalankan tugas dan fungsinya sebagai khalifah fil-ard, mewujudkan manusia yang beriman dan bertaqwa, mewujudkan manusia yang berakhlak dan berkepribadian unggul, mewujudkan manusia yang mampu menjalankan ibadah, mengarhkan manusia dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai sarana ibadah, mengarahkan potensi akal, jiwa dan jasmani sehingga memiliki ilmu dan keterampilan, mengarahkan manusia agar mengelola kehidupan secara profesional untuk kesejahteraan di dunia dan akhirat, mengembangkan keterampilan keahlian secara profesional, dan ethos kerja yang tinggi, mewujudkan kedewasaan dan kematangan dalam beriman dan bertaqwa, serta mewujudkan kemajuan masyarakat dan bangsa.

Zakiah Daradjad, dkk., menyatakan bahwa dengan tujuan pendidikan Islam, akan terlihat dengan jelas sesuatu yang diharapkan yaitu terwujud kepribadian seseorang yang membuatnya menjadi "insan kamil" dengan pola taqwa. "Insan kamil" dimaksud adalah menusia utuh rohani dan jasmani, dapat hidup dan berkembang secara wajar dan normal karena taqwanya kepada Allah SWT. Dengan demikian, pendidikan Islam diharapkan menghasilkan manusia yang berguna bagi dirinya dan masyarakat. Untuk mencapai maksud tersebut di atas, tujuan pendidikan dirumuskan menjadi empat, yaitu: Tujuan umum merupakan tujuan yang ingin dicapai dari semua kegiatan pendidikan. Tujuan ini meliputi seluruh aspek kemanusiaan meluputi sikap, tingkah laku, penampilan, kebiasaan dan pandangan. Maka pencapaian "insan kamil" dengan pola taqwa harus tergambar pada pribadi seseorang yang sudah dididik, walaupun kadarnya kadang-kadang rendah. Tujuan sementara, merupakan tujuan yang akan dicapai setelah subjek didik diberi sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dalam dalam suatu kurikulum pendidikan formal. Tujuan operasional, merupakan tujuan praktis yang akan dicapai dengan sejumlah kegiatan pendidikan tertentu. Tujuan akhir, merupakan tujuan yang akan dicapai sampai akhir kehidupan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

seseorang [Q.S.3:102], karena pendidikan Islam berlangsung selama hidup[248]. Maka dalam pelaksanaan pendidikan Islam, tujuan dirinci menjadi tujuan umum, tujuan sementara, tujuan operasional, dan tujuan akhir.

Dengan rumusan tersebut, menggambarkan bahwa dalam proses pendidikan Islam, tujuan yang ingin dicapai mesti disesuaikan dengan kebutuhan, target serta tingkat permasalah yang harus dipecarhkan, baik persoalan yang bersifat umum, khusus, maupun persoalan-persoalan yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang. "Dalam proses pendidikan "tujuan akhir" merupakan kristalisasi nilai-nilai yang ingin dicapai dan diwujudkan pada pribadi subjek didik. Oleh karena itu, tujuan akhir harus bersifat konprehensif yang mencakup semua aspek, serta terintegrasi dalam pola kepribadian ideal yang bulat dan utuh. Menurut Muhaimin dan Mujib, tujuan akhir mengandung nilai-nilai Islam dalam segala aspeknya, yaitu aspek normatif, aspek fungsional, dan aspek operasional"[249]. Maka dalam pencapaian tujuan pendidikan bukan merupakan hal yang mudah, dan sangat kompleks, karena menyangkut dengan internalisasi nilai-nilai Islami yaitu iman, Islam, dan taqwa, serta ilmu pengetahuan pada diri subjek didik. Oleh karena itu, usaha pencapaian tujuan merupakan hal yang kompleks, mengandung risiko, karena terkait dengan penanaman mental spritual, dan internalisasi nilai-nilai Islami yang mengandung iman, Islam, takwa serta ilmu pengatahuan menjadi sangat vital. Oleh karena itu, selain rumusan tujuan pendidikan yang dikemukakan di atas, secara teoritis tujuan pendidikan dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu : *Pertma,* tujuan normatif, yaitu tujuan yang ingin dicapai berdasarkan norma-norma yang mampu mengkristalisasikan nilai-nilai yang hendak diinternalisasikan, misalnya tujuan normatif yang bersifat dasar yang korektif, tujuan selektif bersifat memberikan kemampuan untuk membedakan hal-hal yang

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[248]Zakiah Daradjad, dkk., *Ilmu Pendidikan*..., hlm. 30-32.
[249]Muhaimin dan Abd. Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam*,..., hlm. 156.

benar dan salah, tujuan determinatif bersifat memberikan kemampuan untuk mengarahkan diri pada sasaran yang sejajar dengan proses kependidikan, tujuan integratif bersifat memberikan kemampuan untuk membedakan fungsi psikis [pikiran, perasaan, kemaauan, ingatan dan nafsu] ke arah tujuan akhir, dan tujuan aplikatif bersifat memberikan kemampuan penerapan segala pengetahuan yang telah diperoleh dalam proses pendidikan. *Kedua*, tujuan fungsional, yaitu tujuan yang sasarannya diarahkan pada kemampuan subjek didik untuk memfungsikan daya kognisi, afeksi, dan psikomotorik dari hasil proses pendidikan yang diperoleh.

> Tujuan fungsional meliputi: (1) Tujuan individual, yaitu sasarannya pada pemberian kemampuan individual untuk mengamalkan nilai-nilai yang telah diinternalisasikan ke dalam diri subjek didik berupa moral, intelektual dan skill. (2) Tujuan sosial, yaitu pemberian kemampuan mengamalkan nilai-nilai ke dalam kehidupan sosial, interpresonal, dan interaksional dengan orang lain dalam masyarakat. (3) Tujuan moral, yaitu pemberian kemampuan untuk berprilaku sesuai dengan tuntutan moral atas dorongan motivasi yang bersumber dari agama [*teogenetis*] dan dorongan biologis [*biogenetis*]. (4) Tujuan profesional, yaitu pemberian kemampuan untuk mengamalkan keahliannya sesuai komptensi. Ketiga, tujuan operasional, yaitu tujuan yang mempunyai sasaran teknis manajerial. Tujuan ini dibagi menjadi enam macam yaitu, tujuan umum, tujuan khusus, tujuan tak lengkap, tujuan insidental, tujuan sementara, dan tujuan intermedier yaitu tujuan yang berkaitan dengan penguasaan suatu pengetahuan dan keterampilan demi tercapainya tujuan sementara[250].

Dengan demikian, upaya pendidikan yang dilakukan tidak hanya terfokus pada tujuan yang bersifat teoritis, tetapi juga mengandung tujuan praktis yaitu pendidikan diarahkan pada upaya pemberian kemampuan praktis pada subjek didik, sehingga subjek didik mampu mengaplikasikan apa yang diperolehnya dalam kehidupan dengan penuh kewibawaan dan profesional mengingat kompotensi yang dimiliki telah memadai dan sebagai hasil nyata dari upaya pendidikan, walaupun pada kenyataannya manusia tidak mungkin menemukan kesempurnaan dalam berbagai hal, walaupun kenyataannya, usaha untuk mencapai tujuan pendidikan harus dilaksanakan semaksimal mungkin. Maka Athiyah al-Abrasyi menyatakan: "setiap

[250]Ibid, hlm. 156-158., dan HM. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*..., hlm. 127-129.

sesuatu mempunyai tujuan yang diusahakan untuk dicapai, seseorang bebas menjadikan pencapaian tujuan pada taraf yang paling tinggi"[251].

Dalam usaha untuk mencapai tujuan, muncul bermacam-macam formulasi tujuan yang dikemukakan para ahli. Abdurrahman Saleh Abdullah, juga mengemukana tujuan pendidikan Islam yang lebih sepesifik dalam bukunya *"Educational Theory, a Qur'anic Outlook"*, yang dikutip Muhaimin, menyatakan bahwa Tujuan pendidikan Islam dapat diklasifikasikan menjadi empat macam, yaitu:

1. Tujuan pendidikan jasmani [*ahdafal al-Jismiyah*], memerlukan jasmaniyah yang sehat serta kuat, mempersiapkan subjek didik sebagai pengemban tugas khalifah di bumi, melalui pelatihan keterampilan-keterampilan fisik.
2. Tujuan pendidikan rohani [*ahdaf ar-ruhaniyah*], meningkatkan jiwa kesetian hanya kepada Allah, dan melaksanakan moralitas Islami, dengan berdasarkan pada cita-cita ideal al-Qur'an [Q.S. 3:19], hatinya taqwa kepada Allah.
3. Tujuan pendidikan akal [*ahdaf al-'Aqliyah*], yaitu akalnya cerdas serta pandai. Jadi tujuan pendidikan akal merupakan pengarahan intelegensi untuk menemukan kebenaran, yaitu kebenaran ilmiah [ilmu yaqien], kebenaran empiris [*ainul yaqien*], kebenaran metaempiris atau kebenaran filosofis [*haqqul yaqien*].
4. Tujuan pendidikan sosial [*ahdaf al-ijtimaiyah*], yaitu pembentukan kepribadian yang utuh dari jasmani, ruh dan akal. Identitas individu tercermin sebagai *"an-nas"* yang hidup pada masyarakat yang plural [majemuk][252].

Perumusan tujuan merupakan faktor yang penting dalam pendidikan, karena itu bentuk dan corak serta arah pendidikan akan ditentukan oleh rumusan tujuan pendidikan yang operasional menuju perubahan. Omar Muhammad al-Taoumy al-Syaibani, merumuskan definisi aecara sederhana mengenai tujuan pendidikan adalah "perubahan yang diinginkan untuk dicapai melalui proses pendidikan, baik pada tingkah laku individu dan pada kehidupan pribadinya, atau pada kehidupan masyarakat dan pada alam sekitar, atau pada proses pendidikan sendiri dan proses pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai proporsi di antara profesi-profesi asasi dalam masyarakat"[253]. Berkaitan dengan tujuan pendidikan tersebut, Konferensi Internasional pertama tentang Pendidikan Islam di Makkah pada 1977, merumuskan tujuan pendidikan Islam, yaitu :

---

[251]Muhaimin dan Abd. Mujib, *Pemikiran Pendidikan...*, hlm. 159.

[252]Abdurrahman Saleh Abdullah, *Educational Theory; Qur'anic Outlook*, (Mekkah: Umm al-Qoru Universitas, 1982), hlm. 119-126., dan Muhaimin dan Abd. Mujib, *Pemikiran Pendidikan,....*,hlm. 159-160.

[253]Omar Muhammad al-Toumy al-Syaibani, *Falsafah Pendidikan Islam*, terj., hlm. 398-399.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

"Pendidikan Islam bertujuan mencapai pertumbuhan kepribadian manusia yang menyeluruh secara seimbang melalui latihan jiwa, intelek, diri manusia yang rasional; perasaan dan indera. Karena itu pendidikan harus mencakup pertumbuhan manusia dalam segala aspeknya: spritual, intelektual, imajinatif, fisik, ilmiyah, bahasa, baik secara individual maupun secara kolektif, dan mendorong semua aspek ini kerah kebaikan dan mencapai kesempurnaan. Tujuan terakhir pendidikan Muslim terletak pada perwujudan ketunduhan yang sempurna kepada Allah baik secara pribadi, komunitas maupun seluruh ummat manusia"[254].

Sehubungan dengan itu, Omar Mohammad al-Toumy al-Syaibany menginginkan perubahan-perubahan tujuan pendidikan pada tiga bidang asasi yaitu:

1. Tujuan-tujuan individual yang berkaitan dengan individu-individu, pelajaran [*learning*] dan dengan peribadi-peribadi mereka, dan apa yang berkaitan dengan individu-individu tersebut pada perubahan yang diinginkan pada tingkah laku, aktivitas dan pencapaiannya, dan pada pertumbuhan yang diinginkan pada pribadi mereka, dan pada persiapan yang dimestikan kepada mereka pada kehidupan dunia dan akhirat. .
2. Tujuan sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat sebagai keseluruhan, dengan tingkah laku masyarakat pada umumnya, dan dengan apa yang berkaitan dengan kehidupan ini tentang perubahan yang diingini, dan pertumbuhan, memperkaya pengalaman, dan kemajuan yang diinginkan.
3. Tujuan-tujuan profesional yang berkait dengan pendidikan dan pengajaran sebagai ilmu, sebagai seni, sebagai profesi, dan sebagai suatu aktivitas di antara aktivitas-aktivitas masyarakat[255].

Dari rumusan yang dikemukakan di atas, menggambarkan bahwa tujuan pendidikan Islam berorientasi pada tiga aspek utama yaitu : *Pertama,* tujuan individual merupakan tujuan yang berkaitan dengan subjek didik secara perorangan dalam proses pendidikan, karena setiap perorangan atau subjek didik dipandang memiliki potensi untuk dapat tumbuhkembangkan sesuai dengan perkembangan pribadinya. Tujuan individual "mencakup perubahan berupa pengetahuan, tingkah laku, jasmani dan rohani, serta kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki individu untuk hidup di dunia dan akhirat"[256]. Abdur Rosyid Ibnu Abdil Azis Salim dalam bukunya "*at-tarbiyah* al-Islamiyah wa Thuruqu Tadrisiha", berkesimpulan bahwa pendidikan Islam adalah "menciptakan individu untuk memiliki pola pikir yang ilmiah dan pribadi yang paripurna, yaitu pribadi yang dapat mengintegrasikan antara agama

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[254]Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi...*, hlm. 57.
[255]Omar Mohammad al-Toumy al-Syaibany, *Falsafah Pendidikan Islam*, terj., hlm. 399.
[256]Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan...*, Op.cit., hlm. 49.

dengan ilmu serta amal saleh, guna memperoleh ketinggian derajat dalam berbagai dimensi kehidupan"[257]. Senada dengan pandangan ini adalah pandangan yang dikemukakan Abdurrahman an-Nahlawi, bahwa "pendidikan Islam itu mencakup pemeliharaan seluruh aspek perkembangan, baik aspek material, spritual, intelektual, prilaku sosial, apresiasi, atau pengalaman dan yang penting Islam mengarahkan perkembangan tersebut kearah perwujudan tujuan pendidikan yang tinggi"[258]. Dari rumusan ini terlihat bahwa orientasi tujuan individual sebagai upaya proses pendidikan dan pengajaran bagi setiap pribadi dan diharapkan dapat terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, kesehatan dan kesejahteraan yang memadai, jasmani dan rohani yang sehat, memiliki perubahan sikap, pola pikir, intelektual serta mampu mengintegrasikan agama dan ilmu dalam amal saleh, guna mempersiapkan diri dalam kehidupan dan untuk memperoleh derajat dalam berbagai dimensi kehidupan baik dunia maupun akhirat.

Kedua, tujuan sosial berkaitan dengan perubahan tingkah dalam kehidupan masyarakat, "mencakup tingkah laku masyarakat, tingkah laku individu dalam masyarakat, perubahan kehidupan masyarakat, memperkaya pengalaman masyarakat"[259]. Orientasi tujuan sosial sangat berkaitan dengan kehidupan masyarakat, pengetahuan, perubahan kehidupan masyarakat, perubahan budaya, nilai-nilai ajaran agama dan budaya yang dimiliki masyarakat, sikap dan tingkah laku masyarakat yang hidup dalam masyarakat majemuk [plural]. Maka melalui tujuan sosial, pendidikan Islam diharapkan akan terwujud perasaan kemasyarakatan dalam suatu ikatan yang kuat dan kokoh. Melalui pendidikan akan menghasilkan perkembangan pengalaman kemasyarakatan dalam pola-pola interaksi kelompok, aturan-aturan kelompok, pola-pola perilaku kemasyarakatan serta norma-norma

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[257]Abdur Rasyid Ibnu Abdul Azis Salim, *At-tarbiyah al-Islamiyah wa Thuruq Tadrisha,* (Kuwait: Darul Buhuts al-Ilmiyah, 1975), hlm. 231-232., dan Muhaimin dan Abd. Mujib, *Pemikiran Pendidikan...*, hlm. 161.

[258]Abdurrahman an-Nahlawi, *Ushulut Tarbiyah,* terj,,...., hlm. 123.

[259]Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam...*, hlm.49.

kehidupan dalam masyarakat. Realisasi dari tujuan sosial ini memerlukan konsistensi individu dalam berpikir, beribadah dan memperhatikan syariat pada konsep Islam tentang alam semesta. Konsistensi untuk mewujudkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari akan menjadi "perilaku" dan "budaya" masyarakat muslim yang menjanjikan kedamaian, keadilan, kejujuran, keteguhan dan kemurnian. Dari konsep inilah yang membedakan masyarakat muslim dengan masyarakat lainnya. Dengan melalui pendidikan Islami, masyarakat akan memiliki otoritas dalam menjalankan syariat dan akidah Islam dengan berpedoman pada kebenaran dengan menumikan penghambaan kepada Allah, berusaha untuk "saling menasihati" dan "saling melarang dalam kemunkaran", sehingga terikat dalam satu ikatan tauhid yang mengembangkan "amar ma'rif nahi munkar". Dengan melalui penerapan konsep pendidikan Islam akan mempersiapkan masyarakat dalam pengembangan ikatan sosialnya sehingga masyarakat akan terbebas dari kebodohan dan praktik diskriminasi, kezaliman serta praktik kejahatan-kejahatan lainnya[260]. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terwujudnya pendidikan Islam bukan karena kesamaan bahasa, budaya, giografis dan nasionalisme, tetapi karena konsistensi pada agama yang satu, sedangkan tujuan sosial dalam pendidikan Islam, diharapkan sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat dengan membina, mengarahkan, menata dan mengembangkan segala potensi yang ada pada masyarakat untuk mencapai kehidupan yang harmonis, dinamis dan seimbang dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Maka dengan tujuan sosial, dapat mengarahkan manusia menjadi masyarakat yang memeiliki perhatian terhadap persoalan sosial yang ada di masyarakat, melestarikan dan merealisasikan segala ketentuan dalam kehidupan sosial berupa kerjasama, tanggungjawab, saling menjamin, saling menghargai, saling menghormati, saling membina, saling menasihati dan melarang perbuatan yang munkar, saling membantu dan saling tolong menolong untuk kemajuan bersama untuk mewujudkan suatu

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

masyarakat yang maju dan ber*adab*. Mampu memberdayakan kehidupan secara baik berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, kemasyarakatan, serta nilai-nilai ajaran Islam untuk mencapai kesuksesan di dunia dan akhirat.

Ketiga, tujuan profesional, yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran sebagai ilmu dan sebagai profesi. Tujuan profesional sangat berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran sebagai ilmu, sebagai seni, sebagai profesi, dan sebagai kegitan masyarakat[261]. Proses pendidikan berusaha untuk memperbaiki pribadi, memperbaiki masyarakat dan memperbaiki pengajaran dengan segala proses dan metodenya yang satu sama lain saling terkait dan melengkapi dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. Tujuan profesional diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu yang berkaitan dengan pengembangan dan peningkatan kemampuan penerapan ilmu pengetahuan, seni, suatu profesi dan aktivitas-aktivitas di masyarakat. Dengan proses pendidikan diharapkan terwujudnya manusia yang memiliki kemampuan dan keahlian tertentu dalam berbagai dimensi kehidupan di masyarakat. Dengan demikian tujuan profesional dalam rangka mewujudkan manusia yang memiliki abiliti dan keahlian dalam beramal dan berkaya sesuai dengan abiliti dan bidang kehidupan dalam rangka memenuhi tugas dan tuntutan kebutuhan hidupnya, sedangkan tujuan profesional dalam pendidikan Islam akan menentukan eksistensi manusia sebagai *khalifah fil-ard* yang berfungsi untuk mendayagunakan alam ini untuk kepentingan kehidupan manusia itu sendiri. Dengan demikian, tujuan pendidikan Islam tidak hanya diorientasi pada beribadah kepada Allah yang lebih bersifat ritual ajaran agama, pembinaan akhlak dan moral, orientasi pada ukhrowi, tetapi lebih dari itu, yaitu menjadikan manusia muslim yang mampu mengolah alam ini dengan segenap potensi yang dimilikinya. Menjadikan manusia muslim yang inopatif dan kreativ, manusia muslim yang memiliki etos kerja secara profesional, manusia

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[260]Abdurrahman an-Nahlawi, Op.cit., hlm. 127-129.
[261]Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam*..., hlm.49.

muslim yang mampu meningkatkan kemampuan penerapan ilmu pengetahuan untuk kemajuan dan keseimbangan kehidupan pribadi, sosial dan kepentingan masyarakat yang didasari oleh pengabdian dan ibadah kepada Allah Sang Pencipta dan Pemelihara.

Dari pandangan yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa perumusan tujuan pendidikan merupakan hal yang sangat penting, karena tujuan memberi arah bagi proses pendidikan dan menjadi ukuran dalam evaluasi proses pendidikan. Maka dari rumusan-rumusan tersebut di atas, dapat disimpulkan: *Pertama,* tujuan pendidikan Islam dirumuskan berdasarkan "nilai-nilai ideal" yang diyakini untuk mengangkat harkat dan martabat manusia, yaitu ajaran Islam. *Kedua*, ciri-ciri dan prinsip umum yang menjadi dasar perumusan tujuan pendidikan Islam meliputi aspek universal, keseimbangan, kesederhanaan, kejelasan, realisme, perubahan, dan dinamisme. *Ketiga*, perumusan tujuan pendidikan Islam berorientasi pada "hakikat pendidikan" yaitu meliputi aspek tujuan dan tugas hidup manusia, sifat-sifat dasar [*nature*] manusia, tuntutan masyarakat dan dimensi-dimensi kehidupan ideal Islam.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Berdasarkan nilai-nilai ideal, ciri-ciri, prinsip dan orientasi yang ditetapkan dalam merumuskan tujuan pendidikan Islam, muncul formulasi rumusan tujuan pendidikan Islam sebagai berikut: *Pertama,* rumusan tujuan dari sudut pandang teoritis meliputi; tujuan normatif, tujuan fungsional dan tujuan operasional. Tujuan fungsional, meliputi tujuan individual, tujuan sosial, tujuan moral dan tujuan profesional. Sedangkan untuk tujuan operasional, meliputi tujuan umum, tujuan khusus, tujuan insidentil, tujuan sementara dan tujuan intermedier. *Kedua*, rumusan tujuan pendidikan dari sudut "fungsi manusia", meliputi; tujuan pendidikan jasmani, tujuan pendidikan rohani, tujuan pendidikan akal dan tujuan pendidikan sosial. *Ketiga*, rumusan tujuan dilihat dari sudut individual dan masyarakat, meliputi; tujuan individual, tujuan sosial, tujuan profesional. *Keempat,* rumusan tujuan dari sudut penerapan

[praktis] pendidikan Islam, meliputi; tujuan umum, tujuan sementara, tujuan operasional, dan tujuan akhir. Kesemua rumusan tujuan tersebut, memberikan gambaran bagi usaha pencapaian tujuan pendidikan Islam yang dilakukan secara terarah, terorganisir, terukur untuk mencapai efektifitas dan efisiensi usaha mencapai tujuan pendidikan Islam.

Dari ketegori rumusan tujuan pendidikan Islam di atas, dapat dikatakan bahwa pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk dan mewujudkan manusia muslim yang utuh dan paripurna. Dengan demikian rumusan "tujuan pendidikan Islam berjangkauan sama luasnya dengan kebutuhan hidup manusia modern masa kini dan masa yang akan datang, di mana manusia tidak hanaya memerlukan iman atau agama melainkan juga ilmu pengatahuan dan teknologi sebagai alat dalam rangka memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan sekaligus sebagai sarana untuk mencapai kehidupan spritual yang menghantarkannya kepada kebahagian hidup diakhirat dan mendapatkan keridhaan Allah serta terhindar dari siksaan neraka"[262] . Al-Abrasyi merinci tujuan akhir pendidikan Islam menjadi, pembinaan akhlak, menyiapkan anak didik untuk hidup di dunia dan akhirat, penguasaan ilmu dan keterampilan bekerja dalam masyarakat. Asma Hasan Fahmi, merumuskan "tujuan akhir pendidikan Islam dapat dirinci meliputi: Tujuan keagamaan, tujuan pengembangan akal, akhlak, tujuan pengajaran kebudayaan, tujuan pembinaan kepribadian. Munir Mursi, menjabarkan tujuan pendidikan Islam meliputi : Bahagia di dunia dan akhirat, menghamba diri kepada Allah, memperkuat keislaman dan melayani kepentingan masyarakat Islam, dan akhlak mulia[263]. Dengan demikian usaha pendidikan Islam, bertujuan mewujudkan pribadi-pribadi muslim beriman, bertakwa dan berilmu pengetahuan yang sanggung

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[262]HM. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, Op.cit. hlm. 225., Selanjutnya, HM. Arifin, menjelasan tujuan dana sasaran dalam proses pendidikan. Tujuan mengandung kepada generalisasi atau umum. Sasaran mengandung konotasi kepada sesuatu yang bersifat operasional, real. Makna tujuan menunjuk kepada masa depan [*futuritas*] yang terletak pada suatu jarak tertentu yang tak akan dapat dicapai kecuali dengan usaha [ikhtiar] melalui proses tertentu pula. Maksud dapat diartikan "sesuatu yang ditetapkan sesecorang untuk dikerjakan atau dicapai. Istilah maksud, mengandung arti sama sebagaimana terkandung dalam istilah "tujuan" atau "goal" atau "sasaran" (HM. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*,. hlm. 223].

[263]Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam*..., hlm. 49.

mengembangkan dirinya menjadi hamba Allah yang taat. Pendidikan Islam mencakup pengembangan kepribadian muslim yang bersifat menyeluruh secara harmonis berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki dan mengacu kepada keimanan dan ilmu pengetahuan secara berkesinambungan sehingga terbentuklah manusia muslim yang paripurna yang berjiwa takwa dan berilmu pengetahuan. Manusia muslim yang paripurna adalah gambaran "manusia muslim yang sempurna" atau manusia taqwa, beriman, memiliki ilmu pengetahuan, dan manusia yang beribadah kepada Allah. Manusia muslim "sempurna", manusia yang memiliki ciri-ciri jasmani yang sehat dan kuat, cerdas dan pandai, taqwa kepada Allah, mampu menyelesaikan masalah secara cepat dan tepat, mampu menyelesaikan masalah secara ilmiah dan filosofis, memiliki dan mengembangkan sains, memiliki dan mengembangkan filsafat, berketerampilan, memiliki etos kerja yang tinggi dan kemampuan kerja secara profesional, dan mampu menunaikan tugas hidup serta mampu mempersiapkan diri dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Dari bermacam-macam formulasi rumusan tujuan pendidikan Islam yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan Islam dapat dikategori menjadi dua rumusan yaitu; "tujuan umum" dan "tujuan khusus". Tujuan umum bersifat generalisasi atau umum, bersifat tetap dan berlaku disegala tempat, waktu dan keadaan, dan tujuan khusus lebih bersifat operasional yang berkaitan dengan ijtihad para ahli pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan tempat tertentu. Tujuan khusus pendidikan Islam ditetapkan berdasarkan keadaan tempat dengan mempertimbangkan keadaan geografis, ekonomi, budaya, kemajemukan, politik, hukum, yang ada ditempat itu, sehingga tujuan khusus dapat dirumuskan berdasarkan ijtihad para ahli di tempat itu.

D. Pendidikan Islam dan Kebudayaan

Pendidikan Islam suatu upaya untuk melatih perasaan murid-murid dengan cara begitu rupa sehingga dalam sikap hidup, tindakan, keputusan, dan pendekatan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

mereka terhadap segala jenis pengetahuan, mereka dipengaruhi sekali oleh nilai spritual dan sangat sadar akan nilai etis[264], kepercayaan, pengetahuan, seni, akhlak dan moral, hukum dan adat istiadat. Pendidikan merupakan suatu sistem untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupan dan sekaligus sebagai upaya pewarisan nilai-nilai budaya bagi kehidupan manusia. Maka dapat dikatakan pendidikan merupakan produk budaya dan sebaliknya budaya merupakan produk pendidikan. Brameld, menegaskan bahwa "proses kunci memperoleh kebudayaan adalah belajar dan kemudian meneruskan serta mengubah apa yang dipelajari itu"[265].

Apabila kebudayaan difahami sebagai sesuatu yang diwariskan [belajar] atau dipelajari, kemudian meneruskan apa yang dipelajari serta mengubahnya menjadi sesuatu yang baru, dengan sendirinya upaya tersebut mengandung makna pendidikan. Kemudian pendidikan sendiri lazim diartikan sebagai seperangkat proses, maka tugas pendidikan di masyarakat mencakup empat hal, yaitu : (1) meneruskan kebudayaan, (2) membantu individu memilih peranan sosial dan mengajari untuk melakukan peran itu, (3) mengintegrasi aneka ragam identitas individu dan subkultural ke dalam lingkup kebudayaan yang lebih umum, (4) menjadi sumber inovasi sosial dan kebudayaan. Apabila dicermati empat tugas pendidikan di atas, mencerminkan kaitan serta jalinan hubungan fungsional antara pendidikan dan kebudayaan yang mengandung dua arah pokok, yaitu : Pertama, arah yang bersifat reflektif, pendidikan menggambarkan corak dan arus kebudayaan yang sedang berlangsung. Kedua, arah yang bersifat progresif, pendidikan berusaha memperbaharui dan mengembangkan kebudayaan agar mencapai kamajuan. Kedua arah ini, sejalan dengan tugas dan fungsi pendidikan adalah meneruskan atau mentransmisikan kebudayaan serta

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[264]Syed Sajjad Husain dan Syed Ali Ashraf, Op.cit., hlm. 2.
[265]Abdullah Fadjar, *Peradaban dan Pendidikan Islam*, Cet. Pertama, (Jakarta:Rajawali Pers,1991), hlm. 2.

mengubah dan mengembangkan kebudayaan[266] tersebut untuk mencapai kemajuan kehidupan manusia.

Maka apabila disimak berbagai usaha para pakar untuk mencermati hakikat kebudayaan, maka inti dari setiap kebudayaan adalah "manusia". Dengan kata lain kebudayaan adalah khas insani, manusia yang berbudaya dan membudaya. Demikian pula hakikat pendidikan, karena inti dari pendidikan adalah "manusia", yaitu manusia berpendidikan dan pendidikan untuk manusia. Maka usaha untuk mencari hakikat kebudayaan dan pendidikan juga tidak terlepas dari hekekat manusia itu sendiri. Barangkali di sinilah terletak afinitas antara pendidikan dan kebudayaan. Kedua-duanya merupakan khas insani[267], oleh sebab itu pendidikan dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan satu masa lain, sebagai titik total analisis mengenai kebudayaan yang dapat digunakan untuk mengerti hakikat pendidikan[268]. Dengan demikian, antara pendidikan dan kebudayaan terdapat jalinan hubungan fungsional yang sangat kuat, karena pendidikan meneruskan kebudayaan, memperbaharui dan mengembangkan kebudayaan dan produk pendidikan itu sendiri menggambarkan arus perkembangan kebudayaan umat manusia.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1. Pendidikan Islam dalam Kebudayaan

Dalam sejarah umat manusia, hampir tidak ada kelompok manusia yang tidak menggunakan pendidikan sebagai alat pembudayaan dan peningkatan kualitasnya. Oleh sebab itu, "secara alamiah kodrati manusia tidak bisa hidup tanpa proses pembelajaran dan pendidikan, karena untuk menjadi dirinya yang mandiri diperlukan suatu proses panjang yang pada awalnya berlangsung di luar kekuasaannya. Oleh karena itu, peranan proses pembelajaran dan pendidikan menjadi amat penting bagi

---

[266]Ibid, hlm. 2-3.

[267]H.A.R. Tilaar, *Pendidikan, Kebudayaan...*, hlm. 37-38.

[268]Tilaar, mengutip rumusan pelopor antropologi modern, Edward B. Tylor dalam bukunya *Primitive Culture* [1871], "Budaya atau per*adab*an adalah suatu kescluruhan yang kompleks dari pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat-istiadat, serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat [Edward B. Tylor [1871], dikutip: H.A.R. Tilaar, Pendidikan, Kebudayaan,..,Op.cit., hl.39]., dan lihat: Abdullah Fadjar, menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam rumusan kebudayaan tersebut, yaitu: Istilah *"complex whole* menunjukkan adanya tatanan [order] dari kebudayaan. Istilah "accuiring" menunjukkan proses dari kebudayaan. Istilah "moral" menunjukkan adanya tujuan [goals] dari kebudayaan [Abdullah Fadjar, *Peradaban dan Pendidikan Islam*, lm.2].

kehidupan manusia, agar ia dapat hidup dan berkembang secara layak"[269]. Jadi, pendidikan merupakan produk kebudayaan manusia dan pendidikan menjadi bagian dari kebudayaan. Pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang berlangsung sepanjang hayat.

Pendidikan merupakan upaya pewarisan nilai-nilai, norma-norma kebudayaan bagi kehidupan manusia. Dengan demikian, betapa besar peranan pendidikan dalam kebudayaan atau dengan kata lain pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan dan kedua-duanya tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Tilaar, menyatakan bahwa "afinitas pendidikan dan kebudayaan dapat dilihat dalam rumusan Ernest Cassirer mengenai manusia sebagai animal simbolikum, karena manusialah yang mengenal dan dan memanfaatkan simbol-simbol di dalam kelanjutan kehidupannya. Seorang antropolog Leslie White, menyatakan bahwa kebudayaan dilestarikan dan dikembangkan melalui simbol-simbol. Semua tingkah laku manusia terdiri dari dan tergantung pada simbol-simbol tersebut. Dengan demikian, tingkah laku manusia adalah tingkah laku yang mengandung simbolik, sebab simbol-simbol tersebut merupakan bentuk universal dari kemanusiaan. Dari kedua pandangan ini, dapat dikatakan bahwa kebudayaan dapat diturunkan kepada generasi penerus lewat proses belajar yaitu melalui proses melihat dan meniru tingkah laku orang lain. Namun perlu difahami bahwa kebudayaan itu sendiri bukanlah tingkah laku, tetapi tingkah laku yang dipelajari adalah cara-cara bertindak (the ways of behaving) manusia dalam "lingkungan kebudayaan" tertentu mengikuti pola-pola ideal atau pola-pola budaya. Ruth Benedict, menyatakan bahwa hal ini sebagai pola-pola kebudayaan (patterns of culture)[270]. Maka cara-cara bertindak dan pola-pola kebudayaan tersebut diwariskan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[269]Musa Asya'rie, *Filsafat Islam tentang Kebudayaan*, Cet.I, (Ygyakarta: SFI, 1999) hlm. 87.
[270]H.A.R. Tilaar, *Pendidikan, Kebudayaan*,..., hlm. 38.

kepada individu dan masyarakat melalui proses belajar, kemudian diperbaharui dan dikembangkan untuk mencapai kemajuan hidup manusia.

Nilai-nilai budaya yang diwariskan merupakan unsur luar yang masuk ke dalam diri manusia, sementara dalam diri manusia ada unsur yang menonjol keluar seperti perkembangan potensi yang dimiliki manusia. Maka tugas pendidikan adalah berusaha mewariskan nilai-nilai budaya tersebut, sesuai dengan potensi dan "lingkungan" pada individu dan masyarakat. Hasan Langgulung, menyatakan sulit dibayangkan bahwa seseorang tanpa lingkungan yang memberi corak kepada watak dan kepribadian, sebab "lingkungan" inilah yang berusaha mewariskan nilai-nilai budaya yang dimilikinya dengan tujuan memelihara kepribadian dan identitas budaya tersebut sepanjang zaman. Sebab budaya dan per*adab*an bisa juga mati, apabila nilai-nilai, norma-norma dan berbagai unsur lainnya yang dimiliki berhenti dan tidak berfungsi, artinya tidak atau belum sempat mewariskan nilai-nilai tersebut pada generasi penerus untuk diaplikasikan dalam kehidupan[271]. Dengan demikian, dapat dikatakan betapa besar peranan dan tugas pendidikan dalam perkembangan bahkan matinya suatu kebudayaan.

Apabila memperhatikan budaya dan peradaban Islam, terdapat "warisan Islam yang luar biasa daya dorongnya bagi peradaban ummat manusia yaitu al-Qur'an. Semangat memajukan per*adab*an digemakan oleh al-Qur'an, maka dapat dikatakan bahwa "visi kultural" menempati takaran yang besar. Apabila daya intelektual merupakan salah satu inti pencetur kebudayaan dan ilmu pengetahuan merupakan pusat kekuatan kebudayaan dari zaman ke zaman, maka keduanya menjadi muatan al-Qur'an yang amat berbobot[272]. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa "perdaban dan budaya Islam bermulan dari turunnya wahyu yang kemudian disosialisasikan kepada individu dan masyarakat pengikutnya sehingga menjadi nilai-nilai dan norma-

[271]Hasan Langgulung, *Pendidikan Islam Menghadapi Abad ke 21*, Cet.I, (Jakarta: Radar Offset, 1988), hlm,.61-62.
[272]Abdullah Fadjar, *Peradaban dan Pendidikan Islam*, hlm. 3.

norma yang dianut dan diterapkan dalam tradisi kehidupan. Maka dari tradisi inilah mulai terbentuknya suatu kelompok manusia yang disebut ummah Islam yang terikat dengan aqidah, syariat, dan akhlak Islam yang terkandung dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi sebagai prinsip pokok yang dianut dan senantiasa disosialisasikan serta dikembangkan dalam kehidupan umat manusia"[273]. Hal ini mencerminkan bahwa pendidikan Islam berfungsi untuk mewariskan ajaran-ajaran Islam dengan berbagai nilai-nilai kebudayaan dan per*adab*an ke dalam kehidupan individu dan masyarakat, yang senantiasa tumbuh dan berkembang sebagai nilai-nilai dan simbol-simbol tingkah laku dan menjadi panutan dan sebagai pola-pola kebudayaan dalam kehidupan.

Pendidikan sesungguhnya merupakan produk dari kebudayaan manusia sendiri dan pendidikan menjadi bagian dari kebudayaan. Oleh sebab itu, pendidikan berusaha untuk mentransmisikan corak dan arus kebudayaan yang berlangsung, berusaha memperbaharui dan mengembangkannya untuk kemajuan manusia. Maka dalam rencana dan "rancangan suatu pendidikan dalam kehidupan masyarakat sepenuhnya ditentukan oleh tingkat perkembangan dan kemajuan dari kebudayaan masyarakat itu sendiri. Dalam perkembangan suatu masyarakat, pendidikan semula menjadi bagian dari kebudayaan, telah berfungsi menjadi suatu pusat dari pengembangan kebudayaan[274], dan melalui kualitas proses pendidikan, tingkat kebudayaan suatu masyarakat dapat ditentukan kualitasnya. Maka "dalam strategi penerusan, pembaruan dan pengembangan kebudayaan Islam, pendidikan menjadi bagian fundamental, sehingga dalam merancang strategi kebudayaan Islam pada hakekatnya adalah merancang suatu pendidikan"[275].

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[273]Hasan Langgulung, *Pendidikan Islam Menghadapi Abad ke 21*, hlm. 62.
[274]Musa Asy'arie, *Filsafat Islam tentang Kebudayaan*, hlm. 87.
[275]Ibid, hlm. 88.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tugas pendidikan adalah: *Pertama*, mewariskan, meneruskan, menggambarkan corak dan arus kebudayaan yang sedang berkembang. *Kedua,* pendidikan berusaha untuk memperbarui, mengubah dan mengembangkan kebudayaan agar mencapai kemajuan baik individual maupun masyarakat. Kedudukan dan fungsi pendidikan adalah sebagai pusat pengembangan kebudayaan, pusat kajian, dan pengembangan ilmu-ilmu untuk mencapai kemajuan. Maka dalam hubungannya dengan pendidikan Islam, perlu dirumuskan kemudian adalah konsep ilmu-ilmu dalam Islam dan jika pendidikan Islam bercorak tauhid, maka konsep tauhid diimplementasikan dalam konsep ilmu-ilmu yang akan dikembangkan dalam penyelenggaraan pendidikan Islam.

2. Budaya Pendidikan Islam

Kebudayaan pendidikan merupakan gagasan, konsep, yang mendasari praksis pendidiakn dan kebudayaan pendidikan merupakan aspek dari keseluruhan kebudayaan. Oleh sebab itu, kebudayaan pendidikan tidak terlepas dari keseluruhan elemen-elemen kebudayaan khususnya filsafat, ilmu pengetahuan, adat-istiadat, dan cara-cara hidup lainnya. Di dalam sejarah pendidikan Indonesia, dapat ditelusuri praktek pendidikan yang telah muncul pada zaman hindu Budha dengan sistem asrama, dan terus berkembang pada zaman masuknya agama Islam di Nusantara dengan pendidikan pesantren. Kemudian pada zaman kolonial praksis pendidikan juga tidak luput dari pengaruh-pengaruh pemikiran serta praktek pendidikan Barat yang dibawa oleh kolonialisme Spanyol, Portogis dan Belanda[276]. Demikian pula pada zaman masuknya Islam ke Indonesia, praksis pendidikan juga tidak luput dari pengaruh-pengaruh pemikiran serta praktek pendidikan Islam seperti pendidikan di rumah-rumah guru ngaji, di surau-surau, langgar, mesjid dalam sistem khalaqah yang berkembang menjadi pesantren dan madrasah seperti sekarang ini.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[276]H.A.R. Tilaar, *Pendidikan, Kebudayaan,..,* hlm. 103.

Hasil penelitian Lombard di dalam bukunya "Nusa Jawa, Silang Budaya", menyatakan bahwa salah satu pengaruh yang sangat membekas di dalam praksis pendidikan di Indonesia adalah budaya pendidikan kolonial yang masih terus menerus mendominasi berbagai praktek pendidikan di Indonesia. Salah satu budaya yang menonjol adalah intelektualisme dan verbalisme. Menurutnya, bahwa praktek pendidikan tersebut di negeri bekas penjajah sendiri telah lama ditinggalkan, tetapi di Indonesia masih tetap dipertahankan dan berkembang subur. Implikasi dari budaya pendidikan tersebut meninggalkan bekas yang sangat dominan antara lain budaya pendidikan yang mendewakan ijazah formal"[277] dan untuk bekerja sebagai pegawai negeri. Tanpaknya wabah penyakit ijazah formal dan harus bekerja disektor formal [pengawai negeri] menjadi penyakit yang mematikan pada pendidikan kita. "Budaya intelektualisme membawa pendidikan kepada apa yang disebut Paulo Freire sebagai pendidikan sistem bank di mana tugas pendidikan adalah menyodorkan fakta ke dalam diri subjek didik dengan khasanah hafalan. Budaya pendidikan yang menekaknkan faktor intelektualisme menyebabkan metodologi pendidikan yang bersifat verbalisme, sehingga proses belajar-mengajar lebih bersifat monolog dan statis serta tidak ada ruang bagi pengembangan cara berpikir analisis dan kemampuan untuk mengeluarkan pendapat sendiri[278].

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Budaya pendidikan yang dipaparkan di atas, juga melanda dunia pendidikan Islam yaitu proses belajar-mengajar yang terjadi pada pendidikan Islam lebih menekankan intelektualisme, verbalisme dan mengandalkan kekuatan menghafal. Proses pendidikan Islam lebih ditekanpan pada pendidikan kognitif, bukan pada ortopraktis yaitu bagaimana mewujudkan nilai-nilai ajaran tersebut dalam tindakan nyata operasional. Pendidikan Islam lebih difokuskan untuk membekali kehidupan dunia akhirat, akhirnya pendidikan Islam cenderung sarat dengan muatan normatif

---

[277]H.A.R.Tilaar,*Pendidikan,Kebudayaan*,..., hlm. 105.
[278]Ibud, hlm. 106.

doktrinal, yang penguasaannya lebih mengandalkan kekuatan hafalan. Selain hal-hal tersebut, pendidikan Islam ditopang dengan paradigma dikotomi pendidikan umum dan pendidikan agama yang dikatakan merupakan warisan kolonial Belanda. Tanpaknya paradigma ini berpengaruh pada pendidikan Islam yang berkembang selama ini, pada umumnya bersifat dikotomi dunia dan akhirat atau pendidikan umum dan pendidikan agama. Pendidikan umum berorientasi pada ruang emperik dalam waktu kekinian, sedangkan pendidikan agama berorientasi pada ruang spritual yang ada di balik kehidupan dunia ini, dalam waktu besok yang sangat jauh yaitu kehidupan akhirat. Di dunia Islam pada umumnya pendidikan Islam diidentikkan dengan ruang akhirat yang fokusnya pada pendidikan agama untuk membekali kehidupan di akhirat, akibatnya dunia intelek Islam cenderung a historik, sarat dengan muatan normatif doktrinal, yang penguasaannya mengandalkan kekuatan menghafal[279].

Pendidikan Islam yang bercorak dikotomi, pada hakekatnya bertentangan dengan ajaran Islam yang fundamental visinya yaitu tauhid yang tidak mengenal adanya pemisahan antara pendidikan umum dan pendidikan agama, karena keduanya merupakan satu kesatuan yaitu penguasaan ilmu dunia untuk kepentingan akhirat. Dalam Qur'an Allah berfirman: "Dan carilah apa yang dianugrahkan Allah kepada engkau akan negeri akhirat, dan janganlah engkau melupakan bagaimana duniamu", ...[280]. Oleh karena itu, "visi tauhid dalam pendidikan Islam perlu diaktualisasikan lebih konkret dalam keterlibatannya yang intensif dengan dinamika perubahan, karena pendidikan pada dasarnya merupakan bagian dari dinamika perubahan kehidupan masyarakat. Pendidikan Islam harus "menjadi bagian dari usaha untuk menjadikan dirinya sebagai rahmatan lil'alamin, yang membawa kesejahteraan hidup manusia dan semua yang ada di alam ini. Visi tauhid sesungguhnya tidak berlawanan dengan perubahan, karena tauhid merupakan pandangan teologis yang dapat

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[279]Musa Asy'arie, *Filsafat Islam tentang Kebudayaan*, hlm. 87-88.
[280]Al-Qur'an, 28:77.

diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia; sosial politik, ekonomi, budaya dan agama yang pada dasarnya selalu memunculkan perubahan"[281]. Maka "dikotomi Pendidikan Islam sesugguhnya bertentangan secara fundamental dengan tauhid. Maka pendidikan Islam seharusnya melepaskan dari dikotomi dunia dan akhirat, ilmu agama dan non-agama, yang dapat mendangkalkan agama itu sendiri dan menjadi lahan subur bagi berseminya sekularisme dan materialisme dalam kehidupan agama, karena dikotomi itu sendiri adalah bagian dari sekularisme"[282].

Pendidikan Islam, masih menggunakan sistem pendidikan modern yang mengadopsi sistem pendidikan Barat dengan menambah beberapa mata pelajaran agama Islam dan sistem pendidikan yang berasal dari zaman klasik atau tradisonal yang tidak diperbarui secara mendasar, mempunyai arah yang berbeda dan justru bertolak belakang. Sistem pendidikan klasik merupakan pengaruh dari abad pertengahan, Fazlur Rahman, menyatakan bahwa dalam sistem pendidikan Islam, susunan ilmu-ilmu keagamaan dibuat sedemikian rupa hingga membuatnya tanpak mutlak; ilmu-ilmu tersebut tidak hanya mengisi tempat mereka sendiri saja, tetapi juga tempat semua bidang ilmu pengetahuan. Semua ilmu pengetahuan yang lain adalah tambahan-tambahan yang tak perlu, kalaulah tidak sama sekali dikutuk. Pernyataan dari ahli hukum al-Syathibi bahwa mencari ilmu apapun juga yang tidak langsung berhubungan dengan amal adalah terlarang, merupakan ciri khas pandangan ulama zaman pertengahan. Prinsip ini tidak hanya mengesampingkan filsafat, tetapi juga matematika, kecuali berhitung dasar. Sikap ini diambil untuk memberikan kedudukan yang mutlak kepada ilmu hukum - fiqh. Dengan secara organis menghubungkan semua bentuk ilmu pengetahuan dan menjadikan sebagai alat teologis-dogmatis, maka sumber-sumber intelektual menjadi kering dan pemikiran orisinal menjadi mati[283].

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[281] Musa Asy'arie, *Filsafat Islam tentang Kebudayaan*, hlm. 90.
[282] Ibid, hlm. 90-91.
[283] Fazlur Rahman, *Islam*, hlm. 271.

Budaya pendidikan dan pemikiran ulama pada zaman pertengahan masih berpengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan Islam sampai saat ini. Ahmad Syafii Maarif, menyatakan bahwa "pendidikan Islam yang berlangsung di negeri ini masih menganut sistem pendidikan warisan abad pertengahan bagian akhir. Ciri utama dari masa tersebut adalah adanya pemisahan secara jelas antara ilmu pengetahuan terklasifikasi, sehingga keberadaannya juga dibedakan dengan sekolah-sekolah umum"[284]. Sisten organisasi dan kurikulum madrasah diredusir secara sangat merugikan yang mengakibatkan timbulnya pandangan yang sempit dan menyebabkan pendidikan Islam menjadi lesu. Pendidikan Islam selalu menjadi ketinggalan dengan perkembangan kebudayaan, pembaruan pendidikan Islam selalu terlambat atau lebih sering "mengekor" pada lembaga-lembaga pendidikan umum yang mewarnasi keseluruhan sistem pendidikan, dan kadang-kadang apa yang ditiru telah ditinggalkan pendidikan umum. Hal lain, yaitu dalam upaya pembaruan, "lembaga-lembaga pendidikan Islam tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan lompatan-lompatan berarti bagi kemajuannya atau menurut istilah M. Rusli Karim, tidak mampu memenuhi logika persaingan"[285].

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

3. Kebudayaan dan Problematika Pendidikan Islam

Pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang berlangsung sepanjang hayat. Upaya pendidikan yang dilakukan oleh suatu bangsa memiliki hubungan yang signifikan dengan rekayasa bangsa tersebut di masa mendatang. Dengan demikian pendidikan selalu dihadapkan pada perubahan zaman, maka mau tak mau pendidikan harus didisain mengikuti irama perubahan tersebut, kalau tidak akan ketinggalan. Pendidikan senantiasa mengikuti perubahan, karena pendidikan pada dasarnya adalah bagian dari dinamika

---

[284] Ahmad Syafii Maarif, 1996, *Pendidikan Islam dan Proses Pemberdayaan Umat*, dalam Jurnal Pendidikan Islam (JPI Konsep dan Implementasi, No.2 Th. 1 Oktober 1996, ISSN: 0853-7437, Fakultas *Tarbiyah* UII, Yogyakarta, hlm.7.

[285] Muslih Usa (Ed.),1991, *Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta*,Tiara Wacana,Cet.I, Yogyakarta, hlm. 5.

perubahan kehidupan masyarakat. Perubahan pendidikan selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat baik pada konsep, materi atau kurikulum, proses, fungsi dan tujuan lembaga-lembaga pendidikan, mengikuti irama perubahan per*adab*an masyarakat, karena pendidikan dari masyarakat untuk masyarakat, dan siklusnya selalu demikian. Misalnya; pada masyarakat agraris pendidikan didisain agar relevan dengan kebutuhan dan mengikuti perkembangan masyarakat pada era tersebut, begitu juga perubahan per*adab*an masyarakat yang menjadi masyarakat industrial dan informasi pendidikan juga didisain mengikuti irama perkembangan masyarakat industri dan informasi, dan seterusnya, demikian siklus perkembangan perubahan pendidikan. Apabila tidak, maka pendidikan akan ketinggalan dari perubahan zaman yang begitu cepat.

Pada tingkat analisis kebudayaan, terdapat kesimpulan jujur mengenai pencapaian per*adab*an yang digerakkan oleh warisan Islan. Ketika tradisi Islam mulai diperkenalka, kaum muslimin dijanjikan bahwa mereka akan menjadi "komunitas paling mulia yang pernah muncul untuk umat manusia". Dorongan yang timbul akibat diterimanya ajaran-ajaran Qur'an oleh umat yang penuh ketaatan, ternyata berhasil luar biasa dalam membangun per*adab*annya. Peta keberhasil yang dicapai oleh per*adab*an Islam, dilukiskan oleh para pengamat menjangkau bidang-bidang yang begitu luas, seperti ilmu pengetahuan yang mencakup sains, teknologi, ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Per*adab*an Barat yang mendapat "label modern" sebenarnya mempunyai pertautan historis dengan per*adab*an Islam, atau dapat dikatakan bahwa per*adab*an modern Barat berutang budi pada per*adab*an Islam[286].

Persoalan yang dihadapi sekarang, adalah per*adab*an manusia berada di bawah hegemoni[287] bukan muslim. Jelas, bahwa konstelasi per*adab*an sudah berubah dan sudah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Per*adab*an Islam

---

[286] Abdullah Fadjar, Op.cit., hlm. 4-6.

[287] *Barbara Meyer*, mengartikan hegemoni sebagai pengandalian ekonomi dan politik secara langsung atau tidak langsung atau tidak dan yang lebih penting ialah pengenalan secara paksa tipe-tipe pengetahuan dan bentuk-bentuk pemikiran baru [Abdullah Fadjar,Ibid.,hl. 6].

tengah bergulat melawan hegemoni per*adab*an modern dan pergulatan itu terefleksikan dalam upaya pendidikan Islam[288]. Dengan demikian Pendidikan Islam sekarang ini dihadapkan pada tantangan kehidupan per*adab*an manusia modern, maka pendidikan Islam harus diarahkan pada kebutuhan masyarakat modern. Dalam menghadapi suatu perubahan, diperlukan suatu disain paradigma baru di dalam menghadapi tuntutan-tuntutan yang baru. Apabila tantangan baru tersebut dihadapi dengan menggunakan paradigma lama, maka segala usaha yang dijalankan akan menemui kegagalan. Untuk itu, pendidikan Islam perlu didisain untuk menjawab tantangan prubahan per*adab*an tersebut, baik pada sisi konsepnya, kurikulum, kualitas sumberdaya insaninya, lembaga-lembaga, organisasinya agar dapat relevan dengan perubahan masyarakat tersebut.

Alvin Tofler dalam bukunya The Third Wave [1980], bercerita tentang per*adab*an manusia, yaitu; (1) perdaban yang dibawa oleh penemuan pertanian, (2) per*adab*an yang diciptakan dan dikembangkan oleh revolusi industri, dan (3) per*adab*an baru yang tengah digerakan oleh revolusi komunikasi dan informasi. Perubahan tersebesar yang diakibatkan oleh gelombang ketiga adalah, terjadinya pergeseran yang mendasar dalam sikap dan tingkah laku masyarakat[289]. Kemudian salah satu ciri utama kehidupan di masa sekarang dan masa yang akan datang adalah cepatnya terjadi perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Banyak paradigma yang digunakan untuk menata kehidupan, baik kehidupan individual maupun kehidupan organisasi yang pada waktu yang lalu sudah mapan, kini menjadi ketinggalan zaman. Secara umum masyakarat modern adalah masyarakat yang proaktif, individual, dan kompetitif[290]. Masyarakat modern dewasa ini, ditandai dengan munculnya perdaban pasca industri [*postindustrial siciety*] seprti dikatakan Daniel Bell,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[288]Ibid. hlm. 6-7.

[289]M. Irsyad Sudiro, *Pendidikan Agama dalam Masyarakat Modern*, Seminar dan Lokakarya Nasional *Revitalisasi Pendidikan Agama Luar Sekolah Dalam Masyarakat Modern*, Cirebon,Tgl. 30-31 Agustus 1995, hlm. 2.

[290]Djamaluddin Ancok, 1998, *Membangun Kompotensi Manusia dalam Milenium ke Tiga*, Psikologi, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi, Nomor: 6 Tahun III, UII, Yogyakarta, hlm. 5.

atau masyarakat informasi [*information society*] sebagai tahapan ketiga dari perkembangan perdaban seperti dikatakan oleh Alvin Tofler, tak pelak lagi telah menjadikan kehidupan manusia secara teknologis memperoleh banyak kemudahan. Tetapi pada masyarakat modern menjumpai banyak paradoks dalam kehidupannya. Revolusi informasi, sebagaimana dikemukakan Donald Michael, juga terjadi ironi besar. Semakin banyak informasi dan pengetahuan mestinya makin besar kemampuan melakukan pengendalian umum, tetapi yang terjadi justru sebaliknya, artinya semakin banyak informasi telah menyebabkan semakin disadari bahwa segala sesuatunya tidak terkendali. Karena itu dengan ekstrim Ziauddin Sardar [1988], menyatakan bahwa abad informasi ternyata sama sekali bukan rahmat. Di masyarakat Barat, ia telah menimbulkan sejumlah besar persoalan, yang tidak ada pemecahannya kecuali cara pemecahan yang tumpul. Di lingkungan masyarakat kita sendiri misalnya, telah terjadi swastanisasi televisi, masyarakat mulai merasakan ekses negatifnya[291]. Toynbee, melihat perkembangan peradaban modern yang semakin kehilangan jangkar spritual dengan segala dampak destruktifnya pada berbagai dimensi kehidupan manusia. Manusia modern ibarat layang-layang putus tali, tidak mengenal secara pasti di mana tempat hinggap yang seharusnya. Teknologi yang tanpa kendali moral lebih merupakan ancaman. Dan ancaman terhadap kehidupan sekarang tulis Erich Fromm, bukanlah ancaraman terhadap satu kelas, satu bangsa, tetapi merupakan ancaman terhadap semua [292].

Semua persoalan fundamental yang dihadapi oleh masyarakat modern, "menjadi pemicu munculnya kesadaran epistemologis baru bahwa persoalan kemanusian tidak cukup diselesaikan dengan cara empirik rasional, tetapi perlu jawaban yang bersifat transendental". Melihat persoalam ini, maka ada peluang bagi

---

[291] A. Malik Fadjar, 1995, *Menyiasati Kebutuhan Masyarakat Modern Terhadap Pendidikan Agama Luar Sekolah*, Makalah Seminar dan Lokakarya "*Pengembangan Pendidikan Islam Menyongsong Abad 21*", IAIN,Cirebon,Tgl. 31 Agustus-1 September 1995,Cirebon,hl.3.

[292] Erich Fromm, dikutip: A. Syafii Maarif, 1997, *Pemikiran Tentang Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia, Dalam Pendidikan Islam di Indonesia antara Citra dan Fakta*, Editor: Muslih Usa, Tiara Wacana, Yogyakarta, hlm. 7.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pendidikan Islam yang memiliki kandungan spritual keagamaan untuk menjawab tantangan perubahan tersebut. Fritjop Capra, dalam buku The Turning Point, yang dikutip A.Malik Padjar, "mengajak untuk meninggalkan paradigma keilmuan yang terlalu materialistik dengan mengenyampingkan aspek spritual keagamaan. Demikianlah, pendidikan agama [Islam] pada akhimya dipandang sebagai alternatif paradigma yang dapat memberikan solusi secara mendasar terhadap persoalan kemanusian yang sedang dihadapi oleh masyarakat modern"[293]. Tetapi A. Syafii Maarif, menyatakan bahwa sistem pendidikan tinggi modern yang kini berkembang di seluruh dunia lebih merupakan pabrik doktor yang kemudian menjadi tukang-tukang tingkat tinggi, bukan melahirkan homo sapiens. Bangsa-bangsa Muslim pun terjebak dan terpasung dalam arus sekuler ini dalam penyelenggaraan pendidikan tingginya. Kita belum mampu menampilkan corak pendidikan alternatif terhadap arus besar high learning yang dominan dalam peradaban sekuler sekarang ini. Prinsip ekonomi yang menjadikan pasar sebagai agama baru masih sedang berada di atas angin, dan manusia modern sangat tunduk kepada agama baru ini[294].

Untuk itu, pendidikan Islam tidak bisa menghadapi perubahan tersebut dengan menggunakan paradigma pendidikan Islam lama, yaitu pendidikan yang menurut Vernon Smith, memiliki ciri : (1) ada suatu kumpulan pengetahuan dan keterampilan penting tertentu yang musti dipelajari anak-anak, (2) tempat terbaik bagi sebagian besar anak untuk mempelajari unsur-unsur ini adalah sekolah formal, dan (3) cara terbaik supaya anak-anak bisa belajar adalah mengelompokkan mereka dalam kelas-kelas yang ditetapkan berdasarkan usia mereka[295]. Kondisi ini, juga dialami pendidikan Islam di Indonesia sampai dekade ini. Madrasah, pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang lain masih menganut sistem lama, yaitu kurikulum ditetapkan merupakan paket yang harus diselesaikan, kurikulum dibuat tanpa atau

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[293]A. Malik Fadjar, Op.cit., hlm. 4.
[294]Ahmad Syafii Maarif, Op.cit., hlm. 7-8.
[295]Vernon Smith, dalam: Paulo Freire, 1999, *Menggungat Pendidikan Fundamental Konservatif Liberal Anarkis*, Terj., Omi Intan Naomi, Pustaka Pelajar, hlm. 165.

sedikit sekali memperhatikan relevansinya dengan kondisi sosial masyarakat bahkan sedikit sekali memperhatika dan mengantisipasi perubahan zaman, sistem pembelajaran berorientasi atau berpusat pada guru. Memang pendidikan tradisional telah menjadi sistem yang dominan di tingkat pendidikan dasar dan menengah sejak paruh kedua abak ke-19, dan mewakili puncak pencarian elektik atas satu sistem terbaik. Pendidikan tradisional bukan merupakan sesuatu yang salah atau kurang baik, tetapi merupakan model pendidikan yang berkembang dan sesuai dengan tuntutan zamannya, yang tentu memiliki kelebihan dan kelemahan dalam memberdayakan manusia, tetapi apabila diharapkan dengan tuntutan perubahan per*adab*an kurang relevan.

Dalam menghadapi per*adab*an modern, kita tidak bisa menggunakan paradigma pendidikan yang lama, tetapi harus menggunakan konsep pendidikan yang baru yaitu pendidikan Islam yang menyentuh setiap aspek kehidupan peserta didik, pendidikan merupakan proses belajar yang terus menerus, pendidikan dipengaruhi oleh kondisi-kondisi dan pengalaman, baik di dalam maupun di luar situasi sekolah, pendidikan dipersyarati oleh kemampuan dan minat peserta didik, juga tepat tidaknya situasi belajar dan efektif tidaknya cara mengajar[296]. Pendidikan pada masyarakat modern atau masyarakat yang tengah bergerak ke arah modern [*modernizing*], seperti masyarakat Indonesia, pada dasarnya berfungsi memberikan kaitan antara anak didik dengan lingkungan sosial kulturalnya yang terus berubah dengan cepat. Menurut Shipman [1972:33-35] yang dikutip Azyumardi Azra, menyatakan bahwa fungsi pokok pendidikan dalam per*adab*an masyarakat modern, yaitu: (1) sosialisasi, (2) pembelajaran [*schooling*], dan (3) pendidikan [*education*][297]. Ketiga fungsi tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut : Pertama, sebagai lembaga sosialisasi, pendidikan

[296]M. Dimyati Machmud, 1979, *Psikologi Pendidikan*, hlm. 3.
[297]Azyumardi Azra, *Pembaruan Pendidikan...*, Op.cit., hlm. 3.

adalah sarana bagi integrasi anak didik ke dalam nilai-nilai kelompok atau nasional yang dominan. Kedua, pembelajaran [*schooling*] mempersiapkan mereka untuk mencapai dan menduduki posisi sosial-ekonomi tertentu dan, karena itu, pembelajaran harus dapat membekalai peserta didik dengan kualifikasi-kualifikasi pekerjaan dan profesi yang akan membuat mereka mampu memainkan peran sosial-ekonomis dalam masyarakat. Ketiga, pendidikan merupakan "education" untuk menciptakan kelompok elit yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan besar bagi kelanjutan program pembangunan.

Dengan demikian perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik sosial maupun kultural, secara makro merupakan persoalan yang dihadapi pendidikan Islam yaitu bagaimana pendidikan Islam mampu menghadirkan wacana pendidikan Islam yang relevan dengan perubahan masyarakat yaitu pendidikan Islam yang mampu mentranspormasikan nilai-nilai ajaran Islam dan budaya secara sistematis untuk mencapai kemajuan individual dan masyarakat. Persoalan yang dihadapi dalam mengembangkan pendidikan Islam, yaitu : *pertama*, persoalan filosofis, dan *kedua*, adalah persoalan metodologis pendidikan Islam. Untuk itu, pendidikan Islam dituntut menghadirkan suatu wacana filosofis berupa pandangan, orientasi, tujuan pendidikan Islam, dan kurikulumnya serta metodologisnya yaitu menyangkut cara menyampaikan atau mengkomunikasikannya untuk mencapai kemajuan individual dan masyarakat, menuju masyarakat madani yang dicita-citakan pemerintah dan masyarakat Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB IV
KONSEP MASYARAKAT MADANI INDONESIA

A. Sejarah Perkembangan Masyarakat Madani

Terminologi masyarakat madani, pertama kali dipopulerkan oleh Muhammad an-Naquib al-Attas, yaitu *'Mujtama' madani*, yang secara etimologi mempunyai dua arti: *Pertama*, "masyarakat kota, kerena madani adalah derivat dari kata bahasa Arab, Madinah yang berarti kota. *Kedua*, masyarakat yang berperadaban, karena madani adalah juga merupakan derivat dari kata Arab tamaddun atau madaniah yang berarti peradaban. Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *civility* atau *civilization*, maka dari makna ini masyarakat madani dapat berarti sama dengan *civil society*, yaitu masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban.

Gagasan "masyarakat madani" merupakan terjemahan dari istilah *civil society*?, tetapi masih dipertanyakan, apakah sama istilah "masyarakat madani" dengan istilah *civil society*. Berbagai pemikiran yang dilontarkan akhir-akhir ini seputar *civil society*, yang di Indonesia telah diterjemahkan menjadi "masyarakat sipil" atau "masyarakat madani". Padahal kita tahu, sebenarnya istilah ini merupakan imbas dari perkembangan pemikiran yang terjadi di dunia Barat, khususnya di negara-negara industri maju di Eropa Barat dan Amerika, dalam perhatian mereka terhadap perkembangan ekonomi, politik, sosial-budaya[1], yang tentu sangat berbeda dengan sosial-budaya masayarakat dan bangsa Indonesia.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, pembahasan selanjutnya adalah menelususi sejarah perkembangan "masyarakat madani" atau *civil society*, dengan menulusuri pemikiran "masyarakat madani" dari perpektif Islam, pemaknaan masyarakat madani, karakteristik, konsep masyarakat madani Indonesia, dan perubahan menuju masyarakat madani Indonesia: tantangan, peluang, dan terebosan,

[1]M.Dawam Raharjo, *Demokrasi, Agama dan Masyarakat Madani*, Jurnal Ilmu-ilmu Sosial UNISIA, No.39/ XXII/ III/ 1999-ISSN:0215-1412,UII, 1999, Yogyakarta,hlm.25.

sehingga pada bab V pembahasan difokuskan pada disain dan strategi pendidikan Islam untuk masyarakat madani Indonesia.

1. Akar Sejarah "Masyarakat Sipil" atau *Civil Society*

Jika dilacak berdasarkan perkembangan *socia legal* dan *socio kultural*[2], konsepsi "masyarakat sipil" ini sebenarnya bermula dari tradisi pemikiran Barat. "Masyarakat madani" yang merupakan terjemahan dari istilah *civil society* dalam diskursus ilmu sosial dalam konsep dasarnya sebenarnya tidak ada kaitannya dengan "pemirintah militer" seperti yang banyak diperbincangkan di Indonesia. Konsep ini sebenarnya merupakan lawan dari konsep "masyarakat negara" atau masyarakat politik [*state society, political society*], dan konsep ini mula-mula dimunculkan di Eropa sebagai produk sejarah masyarakat Barat, karena *"civil society"* tidak lahir dari suasana vacum. Sebaliknya, civil society merupakan produk dari suatu masyarakat tertentu yaitu sosial budaya dan politik di Barat"[3].

Konsep ini pertama kali lahir dapat dilacak akar katanya sejak zaman Yunani kuno. Oleh karena itu, gagasan masyarakat madani dalam pengertian *civil society* sebenarnya bukanlah sebuah wacana baru. Ernest Gellner, yang dikutip Adi Suryadi Culla, menyatakan bahwa Gellner menelusuri akar gagasan ini ke masa lampau melalui sejarah peradaban barat [Eropa dan Amerika] dan yang menjadi perhatian adalah ketika konsep ini dipopulerkan secara gamblang oleh seorang pemikir Skotlandia, Adam Ferguson [1723-1816], dalam karya klasiknya *"an Essay on History of Civil Society* [1767] dan kemudian konsep *civil society* dikembangkan lebih lanjut oleh kalangan pemikir modern seperti John Locke, Rousseau, Hegel, Marx, dan Tocqueville, hingga upaya menghidupkan kembali di Eropa timur dan barat di zaman

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[2]Moh. Mahfud MD, *Supremasi Hukum dan Masyarakat Madani*,Makalah:Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Menengah, Badan Eksekutif mahasiswa IKIP,Yogyakarta,19 Mei 1999, hlm. 3.

[3]Bachtir Effendy, *Masa Depan Civil Society di Indonesia: Memeriksa Akar Sosio-Relegius*, dalam Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan, Tashwirul Afkar, Edisi No. 7 Tahun 2000 - ISSN: 1410-9166, 2000,Jakarta, hlm. 23.

kontemporer[4]. Selain Gellner, Jean L. Cohen dan Andrew Arato [1992], juga melacak akar munculnya *civil society* sejak zaman Yunani kuno. Mereka berdua mengungkapkan bahwa versi awal konsep ini sebenarnya berasal dari Aristoteles, ketika Aristoteles mengungkapkan istilah *politike koinonia* dalam bahasa Latin *societas civilis* yang berarti masyarakat politik/komunitas politik [*political society/community*], yang merujuk pada polis. Istilah *politike koinonia* dari Aristoteles ini dipergunakan untuk menggambambarkan suatu masyarakat politik dan etis di mana warga negara di dalamnya berkedudukan sama di depan hukum. Hukum sendiri dianggap sebagai etos, yaitu seperangkat norma dan nilai yang disepakati tidak hanya berkaitan dengan prosedur politik tetapi juga sebagai substansi dasar kebijakan [*virture*] dari berbagai bentuk interaksi di antara warga masyarakat[5]. Dalam istilah *politike koinonia* Aristoteles ini, belum mengenal perbedaan antara state [negara] dan society [masyarakat]. Dengan demikian, negara adalah masyarakat dan sebaliknya masyarakat adalah negera. Meskipun Aristoteles juga menyadari bahwa adanya dualitas *polis* [negara]-*oikos* [masyarakat]. Dalam pandangannya *oikos* lebih merujuk pada keluarga atau rumah tangga [*household*] dianggap sebagai background atau kategori risidual dari polis. Sementara *koinonia* yang tegak di atas *oikos* tidak hanya mencakup keluarga, tetapi juga bentuk-bentuk asosiasi secara umum seperti pengelompokan kekerabatan, pekerjaan, status, jabatan, yang dapat dianggap sebagai representasi sistem sosial atau sistem politik keseluruhan. *Oikos* tidak dianggap sebagai bagian sistem resmi atau lembaga polis, tetapi hanya merupakan wadah komunikasi dan interaksi masyarakat yang secara teoritis melalui pimpinan masing-masing dalam berhubungan dengan polis[6]. Meskipun demikian, Jean L. Cohen dan Andrew Arato melihat bahwa gambaran konsep politike kinonia dari

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[4]Adi Suryadi Culla, *Masyarakat Madani Pemikiran, Teori, dan Relevansinya dengan Cita-cita Ferormasi, (Jakarta:* RajaGrafindo, 1999), hlm. 30.

[5]Delian Noer, *Pemikiran Politik di Negara Barat*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm.47-48.

[6]Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat, Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*, (Jakarta: Darul Falah, 1999), hlm. 21.

pemikir Yunani klasik tersebut, sebenarnya sudah menunjukkan adanya dua entitas yang berbeda, yaitu : (1) *"community of society* yang bersifat homogen dalam arti kesatuan kolektif yang terorganisasi sebagai wadah negara [*polis*] dengan tujuan tunggal sebagai derivasi dari oikos di satu pihak, dan (2) "*society*" di lain pihak yang meliputi bentuk-bentuk interaksi yang bersifat pluralistik berupa kelompok atau asosiasi tidak resmi lainnya[7]. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, konsep Aristoteles tersebut mempengaruhi tradisi pemikiran Romawi kuno, meskipun tidak mengalami perubahan yang signifikan, tetapi pemikiran tersebut sempat dikembangkan secara kuat terutama oleh Cicero yang pertama kali memunculkan istilah societas civilis.

M. Dawaman Raharjo, menyatakan bahwa secara harfiah,*civil society* merupakan terjemahan dari istilah latin "*civilis societas*" sudah ada sejak Sebelum Masehi. Istilah mula-mula dimunculkan oleh Cicero [106-43 SM], seorang orator dan pujangga Roma, yang pengertiannya mengacu kepada gejala budaya perorangan dan masyarakat. Masyarakat sipil disebutnya sebagai sebuah masyarakat politik [*political society*] yang beradab dan memiliki kode hukum sebagai dasar pengaturan hidup. Adanya hukum yang mengatur pergaulan antara individu menandai keberadaban suatu jenis masyarakat tersendiri. Masyarakat seperti itu, di zaman dahulu adalah masyarakat yang tinggal di kota[8]. Cicero dalam filsafat politiknya memahami *civil society* identik dengan negara, maka kini dipahami sebagai kemandirian aktivitas warga masyarakat berhadapan dengan negara[9]. *Civil Society* menurut Cicero adalah suatu komunitas politik yang beradab seperti yang dicontohkan oleh masyarakat kota yang memiliki kode hukum sendiri. Maka dengan konsep civility [kewargaan] dan urbanity [budaya kota], maka kota difahami bukan hanya sekedar konsentrasi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[7]Adi Suryadi Culla, *Masyarakat Madani Pemikiran,....*, hlm. 48.

[8]M. Dawam Raharjo, *Sejarah Agama dan Masyarakat Madani,* dalam: Widodo Usman, dkk.,Membongkar Mitor Masyarakat Madani, Editor: (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset,2000), hlm. 18.

[9]Maskuri Abdillah, *Islam dan Masyarakat Madani*, Kompas, 27 Februari 1999, hlm. 4.

penduduk, melainkan juga sebagai pusat peradaban dan kebudayaan. Dengan demikian, masyarakat madani yang merupakan terjemahan dari *civil society* secara ideal merupakan sebuah komunitas masyarakat yang tidak hanya sekedar terwujudnya kemandirian masyarakat berhadapan dengan negara, melainkan juga terwujudnya nilai-nilai tertentu dalam kehidupan masyarakat, terutama keadilan, persamaan, kebebasan dan kemajemukan atau pluralisme. Maka menurut Cicero yang dikutip M. Dawam Raharjo, menyatakan bahwa dalam kehidupan suatu komunitas masyarakat [kehidupan kota] mendudukan hidupnya di bawah satu dan lain bentuk hukum sipil [*civil law*] sebagai dasar dan yang mengatur kehidupan bersama[10]. Pemikiran ini berlanjut pada abad pertengahan yang dikembangkan oleh Thomas Aquinas, di mana Aquinas terutama memahaminya dalam makna yang merujuk pada konsep negara-kota [*city-state*]. Berikutnya, konsep ini berkembang yang dipadukan dengan masalah kekuasaan [*sovereign*] untuk menggambarkan kerajaan, kota, dan bentuk korporasi lainnya, sebagai kesatuan yang terorganisasi, dan di antaranya melahirkan konsep Aquinas yang terkenal mengenai *societas civilis* res republica[11]. Kemudian setelah lahirnya pemikiran awal mengenai negara modern [*commonvealth*] yang diindetikan sebagai masyarakat madani atau *political society*, yang telah dimulai dari Thomas Hobbes [1588-1679] dengan karyanya Leviathan [1651]. Hobbes memahami *civil/political society* sebagai ide normatif mengenai kebebasan dan persamaan warga negara sebagai kesatuan politik. Tetapi dalam pandangannya, bukan masyarakat yang menciptakan negara, tetapi melalui kontrak sosial kehadiran masyarakat disatukan di bawah kekuasaan negara. Thomas Hobbes yang memunculkan teori "social contract" atau perjanjian masyarakat yang menyatakan sumber kekuasaan pemerintah adalah perjanjian masyarakat. Pemerintah mimiliki kekuasaan karena adanya perjanjian masyarakat yang menyerahkan kekuasaan kepada

[10]M. Dawam Raharjo, *Sejarah Agama dan Masyarakat Madani*, hlm. 18-19.
[11]Adi Suryadi Culla, *Masyarakat Madani Pemikiran,...*, hlm.48.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pemerintah untuk mengurus mereka dan karenanya pemerintah memiliki kekuasaan yang tidak terbatas dan tidak boleh dilawan [*absolutisme*]. Pemerintah dapat mempergunakan segala cara untuk menjamin ketenteram yang dikehendaki walaupun dengan kekerasan[12].

Konsep masyarakat madani atau dalam khasanah dunia Barat di kenal sebagai *civil society*. Pada zaman modern, istilah *civil society* diambil alih dan dihidupkan kembali oleh John Locke [1632-1704] dan JJ Rousseau [1712-1778] untuk mengungkapkan pemikirannya mengenai msyarakat dan politik. Locke umpanya, mendefinisikan masyarakat sipil sebagai masyarakat politik [*political society*]. Pengertian tentang gejala tersebut dihadapkan dengan pengertian tentang gejala "otoritas paternal" [*pathernal authority*] atau "keadaan alami" [*state of nature*] suatu kelompok manusia[13]. Locke, juga membuat perbedaan antara pemerintah [*government*] dan masyarakat [*society*], meskipun kedua unsur tersebut masih tetap dipersepsikan sebagai wujud [*body*] politik negara *(monarchi)* yang lahir dari kontrak sosial[14]. Dengan demikian konsep Locke mempunyai misi untuk menghidupkan peran masyarakat dalam menghadapi kekuasaan-kekuasaan mutlak para raja dan hak-hak istimewa para bangsawan.

Sedangkan, JJ Rousseau dengan teori *social contract* [1762] yang berbicara tentang otoritas rakyat dan perjanjian politik yang harus dilaksanakan antara manusia untuk ikut menentukan masa depannya, serta menghancurkan monopoli yang dilakukan oleh kaum elite yang berkuasa demi kepentingan manusia. Dalam perjanjian kemasyarakatan tersebut anggota masyarakat telah menerima suatu pola hubungan dan pergaulan bersama[15]. Maka apabila dicermati dalam konsep Locke dan Rousseau, sebenarnya belum dikenal perbedaan antara "masyarakat sipil" dan

---

[12]Ibid, hlm. 48-49., dan Moh. Mahfud MD, *Supremasi Hukum dan Masyarakat Madani*, hlm. 3-4., dan lihat: Deliar Noer, 1998, *Pemikiran Politik di Negara Barat*, ..., hlm. 105.

[13]M. Dawam Raharjo, *Sejarah Agama dan*..., hlm. 19.

[14]Adi Suryadi Culla, *Masyarakat Madani Pemikiran*,..., hlm. 49.

[15]M. Dawam Raharjo, *Demokrasi, Agama*.,..., hlm. 27., dan lihat: *Telaah Kritis Paradigma Masyarakat Madani Perspektif Islam*, From: http://www.angelfire.com/md/alihsas/madani.html.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

"negara". Karena negara, lebih khusus lagi, pemerintah adalah merupakan bagian dan salah satu bentuk masyarakat sipil. Maka keduanya beranggapan bahwa masyarakat sipil adalah pemerintahan sipil, yang membedakan diri dari masyarakat alami atau keadaan alami[16]. Senada dengan pemikiran John Locke dan JJ Rousseau adalah Montesquieu, yang memandang pemerintah dan masyarakat sebgai dua entitas yang berbeda, dengan mengacu pada adanya dua bentuk hukum, yaitu: (1) *civil law,* yang mengatur hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah, (2) *public/political law*, yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat. Maka melalui pemikiran Locke, Rousseau dan Montesquieu ini, pemikiran tentang konsep masyarakat madani atau civil society mulai menjadi wacana pemikiran politik modern. Maka pemikiran tentang negara dan eksistensi masyarakat mulai dipandang sebagai wacana yang penting. Pemikir dari Amerika, Thomas Paine [1737-1809] dalam karyanya *Common Sense* artinya Akal Sehat [1776], menyatakan bahwa eksistensi masyarakat yang dianggap sebagai kumpulan individu dianggap memiliki hak-hak alami yang tidak dapat dicabut siapapun termasuk oleh negara, sementara negara sendiri dianggap sebagai legetimasi masyarakat. Tetapi apa yang diistilahkan sebagai "masyarakat politik" [*civil society*] masih cenderung diidentikan dengan negara [*state*] an sich[17].

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pemikir-pemikir pencerahan dari Scotlandia seperti Fergusan, Hume dan Adam Smith, yang mulai mengidentikan konsep masyarakat madani dengan "masyarakat beradab" [*civilizen society*] tidak lagi berasosiasi sebagai body politik [*political society*] melainkan berorientasi pada "organisasi material" [*economic society*]. Kemudian konsep masyarakat madani juga dikembangkan oleh pemikir-pemikir dari Jerman. Melalui pemekir-pemikir seperti Kant, Fichte dan Hegel, konsep *civil society* mulai mendapatkan pemaknaan yang lebih jelas sebagai suatu kesatuan yang

---

[16]M. Dawam Raharjo, *Demokrasi, Agama*...., hlm. 27.

[17]Adi Suryadi Culla, *Masyarakat Madani Pemikiran*,...,. hlm. 49.

terpisah dari negara. Kant, memandang masyarakat madani sebagai tujuan [*telos*] umat manusia yang hidup berdasarkan hukum dan menolak manyatukan sebagai bagian dari kekuasaan lembaga absolut. Fichte, juga melihat adanya keterpisahan hubungan antara megara dan masyarakat di satu pihak dan hubungan antara individu berdasarkan universalitas di lain pihak[18]. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Kant dan Fichte, menempatkan masyarakat madani dengan negara dalam kedudukan yang berlawanan, yang kemudian dikembangkan oleh Hegel. Tetapi, berbeda Kant dan Fichte, melalui pemikiran Hegel, secara tegas memandang bahwa konsep masyarakat madani dan negara tidak hanya sebagai dua entitas yang berbeda, tetapi juga sebagai sintesa atau negasi dua entitas yang berlawanan. Tetapi Hegel, berusaha memadukan kedua entitas yang berbeda tersebut dalamsebua formulasi pemikiran politik baru [*sintesa*], di mana masyarakat madani diintegrasikan ke dalam negara sebagai domain yang harus menyesuaikan perilakunya dengan kepentingan negara[19].

Perbedaan antara masyarakat sipil dan negera timbul dari pandangan Hegel [1770-1831], melihat masyarakat sipil sebagai wilayah kehidupan orang-orang yang telah meninggalkan kesatuan keluarga dan masuk ke dalam kehidupan ekonomi yang kompetitif. Ini adalah arena, di mana kebutuhan-kebutuhan tertentu atau khusus dan berbagai kepentingan perorang bersaing, sehingga dalam berbagai kepentingan tersebut mengandung potensi konflik dalam dirinya. Maka pemikiran Hegel tentang masyarakat madani, tidak sebagaimana halnya pandangan dua pemikir Inggris dan Prancir yang terdahulu, bukanlah masyarakat politik. Yang dipandang sebagai masyarakat politik adalah negara. Maka oleh Hegel, masyarakat sipil dihadapkan

[18]Ibid, hlm. 50.
[19]Ibid, hlm. 50.

dengan negara. Dengan demikian, inti dari teori Hegel adalah menempatkan masyarakat sipil sebagai elemen politik di bawah supermasi negera [20]. Maka menurut M. Dawam Raharjo, agaknya dari teori Hegel inilah yang dikenal dengan munculnya dikotomi antara negara dan masyarakat [*state and society*]. Pengertian tentang masyarakat madani atau masyarakat sipil di atas, dibalik oleh Hegel dari pandangan Locke dan Rausseau, baginya masyarakat sipil itu bukan satu-satunya yang dibentuk dalam perjanjian kemasyarakatan [*social contract*]. Dengan perketaan lain, masyarakat sipil adalah satu bagian saja dari tatanan politik [*political order*] secara keseluruhan. Sedangkan bagian dari tatanan politik yang lain adalah negara [*state*]. Maka menurut Hegel masyarakat sipil adalah perkumpulan merdeka antara orang seorang yang membentuk apa yang disebutnya *burgerlische gesellschaft* atau masyarakat borjuis [*bourgeois society*][21]. Jika Locke, Rausseau dan Adam Simith, cenderung mengidealisasikan masyarakat sipil sebagai hasil perkembangan masyarakat pada tahap yang lebih maju yang memiliki kekuatan yang memancar dari dalam dirinya, berupa rasionalitas yang akan menuntun anggota masyarakat ke arah kebaikan umum. Tetapi Hegel mempunyai pandangan yang berbeda. Masyarakat sipil mengandung konflik di antara kepentingan-kepentingan individu yang berbeda bahkan bertentangan. Bagi Hegel, hanya melalui negara kepentingan-kepentingan umat manusia yang universal dapat terpelihara dan dicapai. Maka Hegel mengidealisasikan negara sebagai pemenuhan segala nilai kebaikan[22]. Maka dari pandangan Hegel ini, tercermin masyarakat madani atau masyarakat sipil tidak bisa dibiarkan tanpa kontrol. Masyarakat madani atau masyarakat sipil memerlukan pembatasan dan penyatuan dengan negara melalui kontrol dan hukum, administrasi dan politik, karena masyarakat madani atau masyarakat sipil mengandung konflik dalam dirinya. Maka "Hegel, mengungkapkan mengenai pentingnya intervensi negara ke dalam masyarakat

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[20]M. Dawamn Raharjo, *Sejarah, Agama...*, hlm. 20., dan lihat: Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, hlm.201.
[21]M. Dawam Raharjo, *Demokrasi, Agama...*, hlm. 27-28.
[22]Ibid, hlm. 29.

madani berdasarkan atas dua alasan, pertama, jika terjadi situasi ketidak adilan dan ketidaksederajatan dalam masyarakat sehingga perlu di atasi oleh negara yang mempunyai otoritas mengatur masyarakat. Kedua, jika terjadi sesuatu yang mengancam kepentingan universal masyarakat sehingga tindakan perlindungan atas kepentingan tersebut diperlukan[23].

Dari pemikiran Hegel tersebut, Jean L Coher dan Andrew Arato, mengemukakan bahwa berbagai pemikiran yang pernah lahir sebelumnya, memperoleh sintesa baru. *Pertama*, eksistensi masyarakat madani dan masyarakat politik secara jelas sudah dirumuskan sebagai entitas yang berbeda, meskipun yang terakhir oleh Hegel masyarakat madani diletakkan pada posisi superior. *Kedua*, dalam konsep Hegel mengenai sejarah mencakup pula keluarga sebagai salah satu entitas[24] yang disebutkan sebagai tahapan awal sejarah, mesyarakat sipil sebagai tahapan kedua dan negara sebagai momentum sejarah yang terakhir. *Ketika*, bagi Hegel apa yang disebut sebagai masyarakat sipil merupakan entitas yang merujuk pada masyarakat ekonomi [*economic society*], sementara negara dipandang sebagai masyarakat politik [*political society*][25]. Dengan demikian, Hegel menciptakan wilayah sosial baru, yang ditandai dengan berbagai persaingan eknomi dalam bentuk kerja, produksi, pertukaran barang dan jasa, serta perolahan harta. Mengingat *civil society* merupakan arena persaingan ekonomi, maka dengan sendirinya mengandung potensi perpecahan atau konflik. Maka pada akhirnya negara sebagai kekuatan politik tertinggi, yang mengurus bermacam kepentingan umum, harus mengontrol *civil society* agar tidak mengalami disintegrasi.

Apabila dicermati, perbedaan antara "masyarakat sipil" dan "negara" timbul dari pandangan Hagel, banyak menarik perhatian dan mendapatkan dukungan kuat, di

---

[23] Asrori S.Karim, *Civil Soeity dan Ummah,Sintesa Diskursif Rumah Demokrasi*,(Jakarta:Logos Wacana Ilmu,1999),hl.25-26.

[24] *Entitas*, satuan yang berwujud,ujud[Tim Penyusun Kamus,Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,Departemen Pendidikan dan Kebudyaaan, Edisi Kedua,Cetakan Ketujuh, (Jakarta: Balai Pustaka,1996), hlm. 266].

[25] Adi Suryadi Culla, *Masyarakat Madani Pemikiran,...* hlm.49.

antaranya Karl Marx [1818-1883] yang juga ditentang dan sekaligus diikuti. Karl Marx, sebagai pencetus ide sosialisme, juga mempunyai konsep perbedaan rakyat ini. Marx dan Hegel berpendapat bahwa negara adalah bagian dari suprastruktur, mencerminkan pembagian masyarakat ke dalam kelas-kelas dan dominasi struktur politik oleh kelas dominan. Negara tidak mewujudkan kehendak universal tapi kepentingan kelas borjuis. Dalam perspektif Marx, negara dianggap sebagai entitas yang terpisah dari masyarakat sipil dan menyamakan masyarakat sipil dengan masyarakat borjuis [*buergerliche gesselschaft*]. Bagi Marx, masyarakat borjuis mencerminkan sistem kepemilikan modern yang bermuatan nilai materialisme yang kasar, dimana setiap orang mementingkan diri sendiri [*egoism*] dan dimana setiap orang berjuang melawan yang lain, sebab dalam masyarakat borjuis kedudukan individu paling diutamakan. Marx, telah memberikan teori tradisional tentang dua kelompok masyarakat di dalam negara, yang dikenal dengan *base - sperstructure*. Teori kelas, sebagai salah satu pendekatan dalam Marxisme tradisional menempatkan perjuangan kelas sebagai hal sentral, faktor esensial dan menentukan dalam perubahan sosial. Pendekatan ini cenderung melihat masyarakat kapitalis dari perspektif ekonomi dan masyarakat kapitalis dibagi menjadi dua kelas utama, yaitu proletar dan borjuis. Maka dari perpektif ini, masyarakat terdiri dari dua unsur esensial yaitu dasar [*base*] dan *superstructur*. Adanya dua kelas ini mau tidak mau akan membawa kepada konflik yang tidak dapat dihindarkan ketika keduanya berusaha mendominasi yang lainnya[26].

Perbedaan yang tampak dengan Hegel yang berangkat dari paradigma idealistik, dalam perspektif Marxian, posisi masyarakat sipil dipandang terletak pada basis material atau ekonomi, ataupun yang disebut merealm *of needs and necessity* dari hubungan produk kapitalis. Kritik yang pedas dari Karl Marx, melihat bahwa *civil society* sebenarnya adalah bentukan sosial masyarakat borjuis di mana negara tetap

[26]Anthony Brewer, *Kajian Krisis Das Kapital Karl Marx*, (Jakarta: Teplok Press, 1999), hlm. 6. .

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

merupakan alat dari berbagai kepentingan borjuis. Dengan demikian, kata Karl Marx, *civil society* hanya merupakan fase transisi yang masih mengandung serangkaian kontradiksi hubungan ekonomi masyarakat kapitalis, yang pada akhirnya akan hancur dari dalam. Marx, menyatakan sangat ironi, bahwa negara yang diidealisasikan sebagai wadah nilai-nilai universal, moral, cita-cita kemasyarakatn, ternyata hanya melayani kepentingan diri sendiri secara serakah dan terpisah dari kepentingan umum, maka menurut Marx, keberadaan borjuis tersebut merupakan kendala bagi pembebasan manusia dari penindasan, karena itu ia harus melepaskan untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas[27].

Konsep masyarakat sipil mendapatkan pandangan yang posetif, sesungguhnya baru muncul sekitar abad ke 20, dari sejumlah tokoh, antara lain Antonia Gramsci dan John Keane. Gramsci, menganalisis *civil society* dengan menggunakan konsep hegemoni yang mengkritik diterminasi ekonomi Marx. Suatu kelas sosial, ujarnya, mempertahankan dominasinya bukan hanya dengan cara menguasai modus produksi. Tetapi juga dengan mengembangkan suatu bentuk kekuasaan yang hegemoni. Gramsci, melihat *civil society* tidak dalam dominasi ekonomi, namun dalam dominasi politik dan kultural. Dengan demikian, konsep kunci Gramsci adalah hegemoni[28], pembentukan hegemoni terletak pada wilayah *civil society*, bukan terletak di wilayah negara. Gramsci, berpendapat, untuk mempertahankan kekuasaan kelas sosial yang dominan, mau tidak mau mereka harus bernegosiasi dan membuat kompromi-kompromi dengan kelompok sosial lainnya di dalam arena *civil society*. Oleh karena itu, *civil society* dipandang sebagai arena hegemoni, maka tujuan utama untuk melakukan penguatan *civil society* adalah sebagai instrumen untuk melakukan counter terhadap negara, maka *civil society* merupakan sebuah arena untuk

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[27]Indiwan SW Wibowo, *Peran Militer dalam "Civil Society, Suara Merdeka*, From: http://www. suaramerdeka. com/ harian/ 0101/08/analisis1.htm., 8 Januari 2001, dan Ernest Gellner, *Membangun Masyarakat Sipil Prasyarat Menuju Kebebasan*, (Bandung: Mizan, 1990), hlm. 59.

[28]Hegemoni, diartikan sebagai suatu tatanan ide dan moral yang bisa menarik kesepakatan aktif dari kelas-kelas sosial yang didominasinya [Indiwan SW Wibowo, *Peran Militer dalam Civil Society...*, hlm. 3).

menciptakan hegemoni tandingan[29]. Sedangkan John Keanen, ahli ilmu sosial pada masa kini, terang-terang menolak determinisi ekonomi ala Karl Marx. Bagi John Keanen, *civil society* adalah arena sosial yang mengandung nuansa kebebasan, perserikatan, sukarela dan keragaman pemerintah. Bagi Keane yang beraliran liberal, menyatakan bahwa berbagai macam bentuk kekuasaan dalam *civil society* tidak bersumber dari satu hal seperti penguasaan sarana produk, tetapi dari berbagai macam faktor yang sangat beragam dan hetrogen. Sebagaimana Gramsci, John Keane juga melihat hubungan yang setara antara negara dan civil society mengandung distribusi kekuasaan keanekaragaman wilayah publik yang terdapat di dalam dan di antara negara dan *civil society*[30].

Kembali pada pandangan konsep Gramsci, pandangan berbeda dengan Hegel dan Marx. Bagi Gramsci, civil society bukanlah semata-mata mewadahi kepentingan individu, tetapi di dalamnya juga terdapat organisasi-organisasi yang berusaha melayani kepentingan orang banyak. Masyarakat sipil juga memiliki potensi untuk bisa mengatur dirinya sendiri sacara rasional dan mengandung unsur kebebasan. Untuk itu, Gramsci, berbeda dengan Marx yang lebih menekankan adanya saling keterkaitan antara masyarakat sipil dan negara. Memang, masyarakat sipil bisa menjadi benteng dari hegemoni kelas borjuis dan akhirnya menjadi pendukung negara. Tetapi negara juga memiliki fungsi etis, misalnya dalam mendidik masyarakat dan mengarahkan perkembangan ekonomi untuk kepentingan masyarakat. Dalam pandangannya, negara bisa memiliki berbagai unsur masyarakat sipil[31]. Gramsci, menuntut untuk terciptanya kemandirian masyarakat [*civil society*] dan negera lebih membatasi dalam melebarkan kekuasaanya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[29]Muhammad AS Hikam, *Diskursus Intelektual tentang Civil Soceity di Indonesia*, dalam Juran Ilmu-ilmu Sosial UNISIA, No. 39/XXII/III/1999 - ISSN: 0215 - 1412, UII, 1999, Yogyakarta, hlm. 19.

[30]Indiwan SW Wibowo, *Peran Militer dalam "Civil Society,...*, hlm.3.

[31]M.Dawam Rahardjo, *Sejarah Agama...*, hlm. 25.

2. Masyarakat Madani dalam Prespektif Islam

Dalam perspektif Islam, *civil society* lebih mengacu kepada penciptaan peradaban. Kata al-din, yang umumnya diterjemahkan sebagai agama, berkaitan dengan makna al-tamaddun, atau peradaban. Keduanya menyatu ke dalam pengertian *al-madinah* yang arti harfiyahnya adalah kota. Dengan demikian, makna civil society diterjemahkan sebagai "masyarakat madani", yang mengandung tiga hal, yakni agama, peradaban dan perkotaan. Dari konsep ini tercermin agama merupakan sumber, peradaban adalah prosesnya, dan masyarakat kota adalah hasilnya[32].

Secara etimologi, Madinah adalah derivat kata bahasa Arab yang mempunyai dua pengertian: *Pertama*, madinah berarti kota atau disebut dengan "masyarakat kota", karena kata madani adalah turunan dari kata bahasa Arab madinah, yang juga dalam bahasa Yunani disebut *polis* dan politica yang kemudian menjadi dasar kata *policy* dan *politic* dalam bahasa Inggris. *Kedua,* "masyarakat berperadaban", karena madinah adalah juga derivat dari kata tamaddun atau madaniyah yang berarti "peradaban" yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *civility* dan *civilization* dan kata sifat dari kata Madinah adalah Madani. *Civilized society* atau *civil society* dalam bahasa Arab dapat disebut *Mujtama' Madani*, masyarakat "berperadaban". Jadi masyarakat madani dapat berarti sama dengan *civil society*, karena masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban[33].

Ahmad Hatta, menyatakan bahwa secara terminolagi, masyarakat madani adalah komunitas muslim pertama di kota Madinah yang dipimpin langsung oleh Rasulullah Saw dan diikuti oleh keempat khalifaur-rasyidin. Masyarakat madani yang dibangun pada zaman Rasul tersebut identik dengan *civil society*, karena secara

---

[32] *Ibid.*, hlm. 30.

[33] Ahmad Hatta, *Peradaban yang Bagaimana? Rincian Misi Negara Tauhid Madinah*, From: http://www.Hidayatullah.com/2001/07/kajut3.shtml. 7 Juni 2001, hlm.1., dan Saiful Hamiwanto dan M.Ali Sais JSDm *Masyarakat Madani, Mimpi Lama, Judul Baru*, From: http://www.hidayatullah.com/sahid/9902/khusus.htm., 1999, hlm. 2.

sosio-kultural mengandung substansi keadaban atau *civility.* Model masyarakat ini sering dijadikan model sebuah masyarakat modern, sebagaimana yang diakui oleh seorang sosiolog Robert N Bellah dalam bukunya Beyond Belief [1976]. Bellah, dalam hasil penelitiannya terhadap agama-agama besar di dunia, mengakui bahwa masyarakat yang dipimpin Rasulullah itu merupakan masyarakat yang sangat modern untuk zaman dan tempatnya, karena masyarakat tersebut telah melakukan lompatan jauh ke depan dalam kecanggihan tata sosial dan pembangunan sistem politiknya. Pemdapat ini senada dengan Nurchalis Madjid, yang menyatakan bahwa istilah tersebut merujuk kepada masyarakat Islam yang pernah dibangun Nabi di negeri Madinah[34], yang oleh ahli sejarah disebut dengan negara Madinah.

Madinah merupakan negara yang didirikan untuk membangun peradaban baru. Para sejarawan ada yang mengatakan bahwa madani berarti Madinah yaitu kota tujuan hijrah Nabi Muhammad Saw yang dulunya bernama Yatsrib. Kemudian, perubahan nama dari Yatsrib menjadi Madinah dipahami oleh umat Islam sebagai sebuah manifesto konseptual mengenai upaya Nabi untuk mewujudkan sebuah masyarakat madani, dihadapkan dengan masyarakat badawi atau nomad. Nabi mengubah nama Yatsrib menjadi Madinah, pada hakekatnya merupakan sebuah pernyataan niat, sikap, proklamai atau deklarasi, bahwa di tempat baru itu, Nabi bersama para pendukungnya yang terdiri dari kaum Anshar dan Muhajirin hendak mendirikan dan membangun suatu masyarakat yang beradab[35], yaitu suatu masyarakat yang teratur atau berperaturan, sebagaimana mestinya sebuah masyarakat. Maka, Nurchalis Madjid, menyatakan secara konvensional perkataan Madinah memang diartikan dengan "kota", tetapi menurut ilmu kebahasaan perkataan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[34]Saiful Hamiwanto, M. Ali Said JSD, *Masyarakat Madani: Mimpi Lama,...,Op.cit,* From: http:// www.hidayatullah. com/ sahid/9902/khusus.htm.., dan Nurchalis Majid, *Masyarakat Madani dan Intervensi Demokrasi: Tantangan dan Kemungkinan,* dalam Ahmad Baso, 1999, *Civil Society versur Masyarakat Madani,* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hlm. 22.

[35]Komaruddin Hidayat,*Masyarakat Agama dan Agenda Penegakan Masyarakat Madani,* dalam: Taufik Abdullah,dkk., *Membangun Masyarakat Madani Menuju Indonesia Baru Milenium ke-3,* Pascasarjana UMM, (Yogyakarta: Aditya Media, 1999), hlm. 267., dan Nurchalis Madjid, , *Menuju Masyarakat Madani,* Jurnal Kebudayaan dan Peradaban ULUMUL QUR'AN, Nomor: 2/VII/1999, Jakarta, hlm.51., dan Maksum, *Paradigma "Civil Society" yang Profetik,* From: http://www. suarapembaharuan. com/ News/1999/06/ 250699/ OpEd/ Op01.html. 1999.

Madinah mengandung makna "peradaban". Dalam bahasa Arab, "peradaban" dinyatakan dalam kata-kata *"madaniyah"* atau *"tamaddun"*. Oleh karena itu masyarakat madani diasosiasikan dengan "masyarakat beradab" atau "berperadaban". Dengan demikian pengertian masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab *(civilized)* yang membangung kehidupan sosial yang sopan, yang ditegakkan atas dasar akarnya hak, atas dasar kewajiban dan kesadaran umum untuk patuh kepada peraturan atau hukum. Oleh karena itu, masyarakat dengan tipologi seperti inilah yang dibangun Nabi di Madinah[36].

Sebagian ahli sejarah menyatakan, bahwa sebenarnya Rasulullah Saw tidak pernah memproklamirkan negara Yatsrib atau negara Madinah, sebab bukan kedaulatan wilayah yang menjadi tujuan utama gerekan Nabi. Negara yang hendak dibangun Islam adalah negara yang memberi ruang pada kedaulatan aqidah [ideologi] dan fikrah [paradigma]. Negara baru yang terbentuk di Madinah itu barangkali lebih tepat disebut sebagai negara hijrah, karena negara ini didirikan atas dasar ideologi Islam yang dapat didirikan di mana saja, bukan hanya di kota Madinahm, karena dasarnya adalah ideologi, maka sifatnya menjadi universal, tidak tergantung dan terbatas pada wilayah geografis tertentu[37]. Dengan demikian, ada konsep baru yang ditawarkan Nabi, bahwa negara itu melampaui batas-batas wilayah geografis. Negara ini lebih cocok dengan nilai-nilai dasar kemanusian [*basic values of humanity*] sebab yang menjadi dasar utama kewarganegaraanya bukan nasionalisme, suku, ras, atau pertalian darah. Tetapi manusia dapat memilih konsep hidup tertentu atau aqidah tertentu, manusia secara bebas dan merdeka menentukan pilihan aqidahnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun oleh siapapun. Negara baru yang dibagun Nabi adalah negara ideologi yang didasarkan pada asas kemanusiaan yang terbuka[38].

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[36]Nurchalis Madjid, *Menuju Masyarakat Madani,...* hlm. 51., dan Nurchalis Madjid, *Islam dan Politik Suatu Tinjauan atas Prinsip-prinsip Hukum dan Keadilan*,Jurnal Pemikiran Islam, PARAMADINA, From: http://media.isnet.org/ Islam/ Paramadina/ Jurnal/ PolitikN. html. 2001.

[37]Hamim Thohari, *Sifat-sifat Dasar Madinah*, From:http://www.hidayatullah.com/ 2001/06/ kajut2.shtml. 7 Maret 2001.

[38]Ibid, hlm. 2-3

Sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 256, yang artinya : "Tidak ada paksaan untuk [memasuki] agama [Islam]; sesungguhnya telah jelas jalan yang benar darpada jalan yang sesat"[39]. Untuk itu, konsep negara yang ditawarkan Islam benar-benar baru dan orsinil, karena negara yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, tak lain karena konsep yang dianutnya menetapkan sebuah keyakinan. Dengan keyakinan ini orang boleh berbicara tentang persamaan dan kebersamaan hak dan kewajiban serta kesetaraan.

Apabila diskursus ini dimulai atau ditarik dari akar peristiwa gerakan hijrah yang disebut di atas sebagai negera hijrah, maka merupakan sebuah metamorfosis dari suatu "gerekan" menjadi "negara". Gerakan ini berasal dari tiga belas tahun sebelumnya, Nabi Saw melakukan penetrasi sosial yang sangat sistematis; di mana Islam menjadi jalan hidup individu, di mana Islam "memanusia", dan manusia kemudian "memasyarakat". Maka dengan melalui hijrah, masyarakat itu bergerak secara linear menuju negara. Melalui hijrah gerakan itu "menegara", dan Madinah adalah wilayahnya. Nabi melakukan penataan negara tersebut, dengan: *Pertama*, membangun infrastruktur negara dengan mesjid sebagai simbol dan perangkat utamanya. *Kedua,* menciptakan kohesi sosial melalui proses persaudaraan antara dua komunitas yang berbeda yaitu "Quraisy" dan "Yatsrib" yang menjadi dan dikenal dengan komunitas *"Muhajirin"* dan *"Anshar"* tetapi menyatu sebagai komunitas agama. *Ketiga,* membuat nota kesepakatan untuk hidup bersama dengan komunitas lain yang berbeda, sebagai sebuah masyarakat pluralistik yang mendiami wilayah yang sama, melalui Piagam Madinah. *Keempat,* merancang sistem negara melalui konsep *jihad fi sabilillah*[40]. Maka dengan dasar ini, negara dan masyarakat Madinah yang dibangun oleh Nabi Saw merupakan negara dan masyarakat yang kuat dan solid. Peristiwa hijrah telah menciptakan keberagaman penduduk Madinah. Penduduk Madinah tidak

---

[39]Al-Baqarah (2): 256.

[40]M. Anis Hatta, *Dari Gerakan ke Nagara, Sebuah Rekonstruksi Negara Madinah yang Dibangun dari Bahan Dasar Sebuah Negara,* Majalah Suara Hidayatullah, From: http://www.hidayatullah.com/2001/06/ kajut3.shtml., 7 Maret 2001.

terdiri dari atas suku Aus, Khazraj, dan Yahudi, tetapi Muhajirin Quraisy dan suku-suku Arab lain yang datang dan hidup bersama mereka di Madinah. Nabi menghadapi realitas pluralitas, karena struktur masyarakat Madinah yang baru dibangun terdapat beragam agama yaitu Islam, Yahudi, Kristen, Sabi'in dan Majusi, dan ada juga golongan yang tidak bertuhan [*atheis*] dan bertuhan banyak [*polytheists*]. Struktur masyarakat yang pluralistik ini dibangun oleh Nabi di atas fondasi ikatan iman dan akidah yang tentu lebih tinggi nilai ikatannya dari solidaritas kesukuan [*ashabiyah*] dan afiliasi lainnya. Selain itu, klasifikasi masyarakat pada saat itu didasarkan atas keimanan, dan mereka terbagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu: mu'minun, munafiqun, kuffar, mushrikun dan Yahudi[41], dengan kata lain bahwa masyarakat di Madinah pada saat itu merupakan bagian dari komunitas masyarakat yang majemuk atau plural.

Kemajemuk masyarakat Madinah, diawali dengan membanjirnya kaum Muhajirin dari Makkah ke Madinah mengakibatkan munculnya persoalan-persoalan ekonomi dan kemasyarakatan yang harus diantisipasi dengan baik. Maka dalam konteks itu, introduksi sistem persaudaraan menjadi kebutuhan mendesak yang harus diwujudkan. Untuk mengtasi persoalan tersebut, Nabi Muhammad Saw bersama semua unsur penduduk madinah secara konkret meletakan dasar-dasar masyarakat Madinah, mengatur kehidupan dan hubungan antar komunitas-komunitas yang merupakan komponen-komponen masyarakat yang majemuk di Madinah, dengan menggariskan ketentuan hidup bersama dalam suatu dokumen yang dikenal sebagai "Piagam Madinah" [*Mitsaq al-Madinah*], yang dianggap sebagai konstitusi tertulis pertama dalam sejarah kemanusian. Piagam ini tidak hanya sangat maju pada masanya, tetapi juga menjadi satu-satunya dokumen penting dalam perkembangan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[41]Akram Dhiyauddin Umari, *Masyarakat Madani, Tinjauan Historie Kehidupan Zaman Nabi*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm.77., dan A.Qodri A. Azizy, *Al-Qur'an dan Pluralisme Agama, dalam Jurnal Siudi Islam*,PROFETIKA, Vol 1, No.1 Januari 1999), hlm. 19.

kebiasaan konstitusional dan hukum dalam dunia Islam[42]. Selain itu, dalam dokumen Piagam itulah, dikatakan bahwa "umat manusia untuk pertama kalinya diperkenalkan, antara lain, kepada wawasan kebebasan, terutama dibidang agama dan ekonomi, serta tanggung jawab sosial dan politik, khususnya pertahanan secara bersama. Dalam Piagam tersebut juga menempatkan hak-hak individu yaitu kebebasan memeluk agama, persatuan dan kesatuan, persaudaraan [*al-ukhuwwah*] antar agama, perdamaian dan kedamaian, toleransi, keadilan [*al-'adalah*], tidak membeda-bedakan *[diskriminasi*] dan menghargai kemajemukan". Dengan kemajemukan, Nabi Muhammad Saw mempersatukan mereka beradasrkan tiga unsur, yaitu: "*Pertama*, mereka hidup dalam wilayah Madinah sebagai tempat untuk hidup bersama dan bekerja bersama. *Kedua*, mereka bersedia dipersatukan dalam satu ummah untuk mewujudkan kerukunan dan kemaslahatan secara bersama-sama. *Ketiga*, mereka menerima Muhammad Saw sebagai pemimpin tertinggi dan pemegang otoritas politik yang legal dalam kehidupan mereka dan otoritas ini dilengkapi dengan institusi peraturan yang disebut Piagam Madinah yang berlaku bagi individu-individu dan setiap kelompok"[43].

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dalam institusi "Piagam Madinah", secara umum masyarakat berada dalam satu ikatan yang disebut ummah, yaitu suatu masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok sosial yang disatukan dengan ikatan sosial dan kemanusiaan yang membuat mereka bersatu yang disebut ummah wahidah. Kedudukan dan hubungan mereka sebagai satu ummah dalam kehidupan sosial dan politik, sebab ikatan sosial yang mempersatukan mereka menjadi ummah bukan karena agama atau akidah melainkan karena unsur kemanusiaan. Oleh karena itu, perbedaan agama bukan merupakan penghambat dalam mencipatakan suasana persaudaraan dan damai

---

[42]Nurchalis Madjid, *Menuju Masyarakat Madani*, hlm. 51., dan Ahmad Hatta, *Paradigma Masyarakat Madani Sebuah Acuan Reformasi*, From: http://members.tripod.com/~abu-fatih/PMadinahatta.html., dan Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Edisi Kelima, (Jakarta:UI Press, 1995), hlm. 10.

[43]Masykuri Abdillah, *Gagasan dan Tradisi Bernegara Dalam Islam: Sebuag Perspektif Sejarah dan Demokrasi Modern*, dalam Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan & Kebudayaan, Tashwirul Afkar, (Edisi No.7) tahun 2000 - ISSN 1410-9166,

dalam masyarakat plural. Muhammad Abduh dalam Tafsirnya al-Manar, mengakui bahwa agama bukanlah satu-satunya faktor ikatan sosial dalam suatu ummah, melainkan ada faktor universal yang boleh mendukung wujudnya suatu ummah yaitu unsur kemanusiaan. Karena unsur kemanusiaan sangat dominan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk politik. Demikian juga Muhammad Imarah, dalam karyanya berjudul *Mafhum al-Ummat fi Hadarat al-Islam*, menyatakan bahwa ummah yang dibentuk oleh Nabi Muhammad Saw di Madinah adalah merupakan ummah yang bersifat agama dan politik atau masyarakat agama dan politik. Sebab Nabi Muhammad Saw dalam menghimpun penduduk Madinah dari berbagai golongan tanpa memaksa mereka untuk memeluk agama Islam[44]. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ummah yang dibentuk Nabi Muhammad Saw di kota Madinah bersifat terbuka, karena Nabi tidak membentuk masyarakat politik yang eksklusif bagi atau untuk kaum muslimin saja, tetapi Nabi menghimpun semua komunitas atau golongan penduduk Madinah, baik golongan yang menerima risalah tauhid beliau maupun yang tidak menerima. Perbedaan aqidah atau agama di antara mereka tidak menjadi alasan untuk tidak bersatu padu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, gagasan dan praktik membentuk satu ummah dari berbagai golongan dan unsur-unsur kelompok sosial pada masa itu adalah merupakan sesuatu yang baru, yang belum dilakukan oleh kelompok masyarakat yang lain, sehingga seorang penulis barat Thomas W. Arnold, menganggapnya sebagai awal dari kehidupan berbangsa dalam Islam, atau merupakan kesatuan politik dalam bentuk baru yang disatukan dalam institusi Piagam Madinah *[Mitsaq al-Madinah]*.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yogyakarta, hlm., 97., dan Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Qura'an*, Cet.I, (Jakarta:Rajawali Press dan LSIK, 1994), hlm. 68.

[44]Syamsul Bahri Andi Galigo, *Perpaduan Umat dan Piagam Madinah*, From: Http://alfatihah. virtualave. net/pustaka/writers/syamsulbahri/ perpaduanummatdan2.html., 24 Oktober 2001.

Institusi "Piagam Madinah" yang berjumlah 47 pasal itu[45], secara formal mengatur hubungan sosial antara komponen masyarakat, yaitu : *Pertama*, antara sesama muslim, bahwa sesama muslim adalah satu ummat walaupun mereka berbeda suku. *Kedua*, hubungan antara komunitas muslim dengan non muslim didasarkan pada prinsip bertetangga yang baik, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela mereka yang teraniaya, saling menasihati dan menghormati kebebasan beragama. Akan tetapi secara umum, sebagaimana dalam teks Piagam Madinah mengatur kehidupan sosial penduduk madinah secara lebih luas[46]. Dari Piagam Madinah ini, setidaknya ada dua nilai dasar yang tertuang sebagai dasar atau fundamental dalam mendirikan dan membangun negara Madinah, yaitu: *Pertama,* prinsip kesederajatan dan keadilan [*almusawwah wal-'adalah*]. *Kedua,* inklusivisme atau keterbukaan. Kedua prinsip ini, ditanamkan dalam bentuk beberapa nilai humanis-universal lainnya, seperti : konsistensi [*i'tidal*], seimbang [*tawazun*], moderat [*tawasut*] dan toleransi [*tasamuh*][47]. Kesemuanya menjadi landasan ideal sekaligus operasional dalam menjalin hubungan sosial-kemasyarakatan yang mencakup semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, maupun hukum, dan mengenai prinsip kesederajatan, keadilan dan inklusivisme dapat dijelaskan sebagai berikut :

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

a. Prinsip Kesederajatan dan Keadilan

Prinsip kesederajatan dan keadilan yang dibangun Nabi, mencakup semua aspekbaik politik, ekonomi, maupun hukum. *Pertama*, aspek politik, Nabi mengakomodasikan seluruh kepentingan. Semua rakyat mendapatkan hak yang sama dalam politik, walaupun penduduk Madinah sangat heterogen, baik dalam arti agama,

---

[45]Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945,* Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk, (Jakarta:UI-Press, 1995), hlm. 47-57.

[46]Saiful Hamiwanto dan M. Ali Said JSD, *Masyarakat Madani: Mimpi Lama,...Op.cit,*From: http://www. Hidayatullah. com/ Sahid/9902/khusus.htm..

[47]Ahmad Hatta, 2001, *Paradigma Masyarakat Madani Sebuah Acuan Reformasi*, From: http://www.isnet.org/ archive-milis/archive98/scp98/0339.html., 11 Mei 2001., dan dalam Saiful Hamiwanto dan M. Ali Said JSD, *Masyarakat Madani:..,Op.cit.*, From: http://www.hidayatullah.com/ sahid/9902/khusus.htm., dan Maksun FZ, 2001, *Membangun Masyarakat Madani yang Profetis*, From: http://www.suarapembaruan.com/News/1999/ 06/ 250699/OpEd/op01/op01.html.,11 Januari 2001., dan Bahtiar

ras, suku dan golongan-golongan. Mereka tidak dibedakan yaitu masing-masing memiliki untuk memeluk agama dan melaksanakan aktivitas dalam bidang sosial ekonomi. Misalnya, suku Quraish yang berpredikat *the best* dan Islam sebagai agama dominan, tetapi mereka tidak dianak-emaskan. Seluruh lapisan masyarakat duduk sama rendah berdiri sama tinggi dan ideologi sukuisme dan nepotisme tidak dikenal Nabi. *Kedua*, aspek ekonomi, Nabi mengaplikasikan ajaran *egaliterianisme*[48], yakni pemerataan saham-saham ekonomi kepada seluruh masyarakat. Seluruh lapisan masyarakat mempunyai hak yang sama untuk berusaha dan berbisnis [QS.17:26 dan QS. 59:7]. Misi *egaliterianisme* ini sangat tipikal dalam ajaran Islam. Sebab misi utama yang diemban oleh Nabi bukanlah misi teologis, dalam arti untuk membabat habis orang-orang yang tidak seideologi dengan Islam, melainkan untuk membebaskan masyarakat dari cengkeraman kaum kapitalis. Dari sini, Mansour Fakih mensinyalir bahwa perlawanan yang dilakukan Quraish bukanlah perlawanan agama (teologi), melainkan lebih dikenal perlawanan pada aspek ekonomi, karena prinsip *egaliterianisme* Islam berseberangan dengan konsep kapitalisme Makkah[49]. Nurchalis Madjid, menyatakan bahwa masyarakat madani warisan Nabi, antara lain bercirikan *egaliterianisme*, penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi, bukan prestise seperti keturunan, kesukuan, ras, keterbukaan, partisipasi seluruh anggota masyarakat, dan penentuan kepemimpinan melalui pemilihan bukan beradasrkan keturunan. Kondisi ini hanya berlangsung selama tigapuluh tahun masa *khulafaur rasyidin*, sesudah itu sistem sosial madani digantikan dengan sistem yang lebih banyak diilhami oleh semangat kesukuan atau tribalisme Arab pra Islam, dan kemudian dikukuhkan dengan sistem dinasti keturunan atau geneologis[50]. Dengan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Effendi, *Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan, Perbincangan Mengenai Islam, Masyarakat Madani, dan Etos Kewirausahaan*, (Yogyakarta: Galang Press, 2001), hlm. 181.

[48]*Egaliter*, bermakna kesetaraan. Egalitarian, paham yang mempercayai bahwa semua orang sederajat, sementara egalitarianisme diartikan sebagai doktrin atau pandangan yang menyatakan bahwa manusia itu ditakdirkan sama, sederajat, tidak ada perbedaan kelas dan kelompok [*Telaah Kritis Paradigma Masyarakat Madani...,Op.cit.*, From: http://www.angelfire. com/md/ alihsas/madania.html].

[49]Maksum FZ, *Membangun Masyarakat Madani...,Op.cit.*,From:http://www.suarapembaruan.com/News/ 1999/06/250699/ OpEd/op01.html. 11 Januari 2001, dan Nurchalis Madjid, *Menuju Masyarakat Madani*, hlm. 52-55.

[50]Nurchalis Madjid, *Menuju Masyarakat Madani*, hlm. 52.

demikian, masyarakat egaliterianisme, digambarkan sebagai masyarakat yang mengakui adanya kesetaraan dalam posisi di masyarakat dari sisi hak dan kewajiban. *Ketiga*, aspek Hukum, Nabi memahami aspek hukum sangat urgen dan signifikan kaitannya dengan stabilitas suatu bangsa, karena itulah Nabi tidak pernah membedakan "orang atas", "orang bawah" atau terhadap keluarga sendiri[51]. Nabi sangat tegas dalam menegakan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Madinah, artinya tidak ada seorangpun kebal hukum. Prinsip konsisten legal [hukum] harus ditegakkan tanpa pandang bulu, sehingga supermasi dan kepastian hukum benar-benar dirasakan semua anggota masyarakat.

b. Prinsip Inklusivisme

Prinsip *inklusivisme,* merupakan prinsip yang dipegang Nabi dalam membangun negara Madinah. Nurchalis Madjid, menyatakan bahwa inklusivisme atau keterbukaan adalah konsekuensi dari perikemanusiaan, merupakan suatu pandangan yang melihat secara posetif dan optimis, yaitu pandangan bahwa manusia pada dasarnya adalah baik [QS.7:172 dan QS.30:30], sebelum terbukti sebaliknya. Berdasarkan pandangan kemanusian yang optimis-posetif itu, harus memandang bahwa setiap orang mempunyai potensi untuk benar dan baik, setiap orang mempunyai potensi untuk menyatakan pendapat dan untuk didengar. Sedangkan pihak yang mendengar, kesediannya untuk mendengar itu sendiri memerlukan dasar moral yang amat penting, yaitu sikap rendah hati, berupa kesiapan mental untuk menyadari dan mengakui diri sendiri selalu berpotensi untuk membuat kekeliruan[52]. *Inklusivisme* merupakan sikap rendah hati untuk tidak merasa selalu benar, bersedia mendengar pendapat orang lain untuk diambil dan diikuti mana yang terbaik. Prinsip ini yang dipraktekan Nabi ketika membangun negara Madinah, karena Nabi sendiri selalu mendengarkan dan menerima kritik dari para sahabatnya dan kritikan itu tidak

[51]Ibid, hlm. 53.
[52]Ibid, hlm. 54.

dianggap sebagai ancaman atau sebagai rival, makar, anti kemapanan dan lain sebagainya, meskipun berbagai kritik itu tajam menerpa Nabi selaku pimpinannya.

Pada masa awal Nabi membangun Madinah, peran kelompok-kelompok masyarakat memiliki kemandirian cukup besar, dan pengambilan keputusan, sebagaimana tercermin dalam konstitusi Madinah atau Piagam Madinah. Tetapi seiring dengan semakin banyaknya wahyu yang turun, sistem negara Madinah masa Nabi kemudian berkembang menjadi sistem "teokrasi". Negara, dalam hal ini dimanifestasikan dalam figur Nabi yang memiliki kekuasaan amat besar, baik kekuasaan eksekutif, legeslatif maupun yudikatif. Segala sesuatu pada dasarnya dikembalikan kepada Nabi, dan ketaatan umat kepada Nabi pun semakin mutlak, sehingga tidak ada kemandirian lembaga masyarakat berhadapan dengan negara. Meskipun demikian, berbeda dengan umumnya penguasa dengan kekuasaan besar cenderung despotik, Nabi justru meletakan nilai-nilai dan norma-norma keadilan, persamaan, persaudaraan dan kemajemukan, yang menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, di samping mendukung keterlibatan masyarakat (sahabat) dalam pengambilan keputusan secara musyawarah. Sedangkan, pada masa al-Khulafa al-Rasyidin, sistem negara tidak lagi berbentuk teokrasi melainkan "nomokrasi". Prinsip ketuhanan diwujudkan dalam bentuk supermasi syari'ah, peran masyarakat menjadi lebih besar, menunjukkan adanya masyarakat madani. Pada masa itu muncul kelompok-kelompok dalam masyarakat yang sebagiannya memiliki aspirasi politik yang berbeda dengan pemerintah. Mereka melakukan kontrol terhadap pemerintah, dan rekruitmen kepemimpinanpun yang didasarkan pada kapasitas individual. Tetapi, setelah masa Khulafaur Rasyidin, situasi mulai berubah, peran masyarakat mengalami penyusutan, rekruitmen pimpinan tidak lagi berdasarkan pilihan rakyat [umat], melainkan atas dasar keturunan. Ada beberapa lembaga keulamaanlah yang merupakan satu-satunya lembaga masyarakat madani, masih

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

relatif independen. Pada masa kekhalifaan yakni dari masa al-Khulafa al-Rasyid sampai menjelang akhir Dinasti Ustmani akhir abad ke-19, memang memiliki struktur relegio-politik, lembaga legislatif, dipegang oleh ulama. Mereka memiliki kemandirian dalam berijtihad menetapkan hukum-hukum, meskipun pada prakteknya kadang-kadang juga tidak terlepas dari pengaruh negera atau pemerintah[53].

Dari pandangan ini, tercermin bahwa sebenarnya masyarakat Madani yang bernilai peradaban ini dapat dibangun setelah Nabi Muhammad Saw melakukan reformasi dan transformasi pada individu yang berdemensi aqidah, ibadah dan akhlak dan dalam praktiknya, iman dan moralitas yang menjadi landasan dasar bagi "Piagam Madinah". Prinsip-prinsip dan nilai-nilai tersebut, menjadi dasar bagi semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi dan hukum pada masa Nabi. Maka, dapat dikatakan bahwa masyarakat madani yang diidealkan itu pernah terwujud pada masa Nabi, sehingga Robert N Bellah, menyatakan bahwa masyarakat yang dibangun Nabi, disebut sebagai "masyarakat yang sangat modern untuk zaman dan tempat saat itu, tetapi setelah Nabi wafat sampai dengan akhir al-Khulafa al-Rasyidin, model masyarakat itu tidak bertahan lama. Sebab masyarakat di timur tengah dan umat manusia saat itu belum siap dengan prasarana sosial yang diperlukan untuk menopang suatu tatanan sosial yang modern seperti dirintis Nabi"[54]. Posisi "Piagam Madinah[55] adalah sebagai "kontrak sosial" antara Nabi Muhammad Saw dengan rakyat Madinah yang terdiri dari orang Quraisy, kaum Yastrib dan orang-orang yang mengakui berjuang bersama mereka. Posisi Rasul adalah sebagai pimpinan yang mereka akui bersama dan telah meletakkan Islam sebagai landasan bermasyarakat dan bernegara. Perjanjian atau piagam madinah itu, dapat disebut sebagai suatu

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[53]Msykuri Abdillah, *Islam dan Masyarakat Madani*, 27 Februari 1999.

[54]Nurchalis Madjid, *Menuju Masyarakat Madani*, hlm. 52.

[55]"*Piagam Madinah*" adalah konstitusi tertulis Madinah. Dalam teks Arab adalah Mitsaq al-Madinah (Perjanjian Madinah), yang oleh para ilmuwan politik, dianggap sebagai konstitusi pertama sebuah negara [Bahtiar Effendi, *Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan, Perbincangan Mengenai Islam, Masyarakat Madani, dan Etos Kewirausahaan*, (Yogyakarta: Galang Press, 2001), hlm. 181)., dan dalam sejarah Islam biasanya dikenal dengan "Perjanjian Hudaibiyah". Sedangkan yang menggunakan istilah "Piagam Madinah" di Indonesia adalah Nurchalis Madjid, disosialisasikan baik lewat tulisan-tulisan maupun diskusi dan seminar-seminar.

social contrac oleh para orientalis. Makam itulah sebabnya perjanjian tersebut dalam konteks teori politik disebut sebagai Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah, di dalamnya terdapat pasal-pasal yang menjadi hukum dasar sebuah negara kota dan kemudian disebut Madinah [*al-Madinah al-Munawarah*] atau [*al-Madinah al-Nabi*]. Maka, apabila akan mencari nilai-nilai yang tercermin dalam masyarakat Madinah saat itu, pastilah nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai Islami yang tertuang di dalam "Piagam Madinah" [56]. Sedangkan kontrak sosial yang dilakukan Nabi, dinilai identik dengan teori "social contract" Thomas Hobbes, berupa perjanjian masyarakat yang menyatakan sumber kekuasaan pemerintah adalah perjanjian masyarakat. Pemerintah mimiliki kekuasaan karena adanya perjanjian masyarakat untuk mengurus mereka. Teori social contract J.J Rousseau, tentang otoritas rakyat dan perjanjian politik, harus dilaksanakan untuk menentukan masa depan rakyat serta menghancurkan monopoli yang dilakukan oleh kaum elite yang berkuasa demi kepentingan rakyat, juga identik dengan teori Nabi Muhammad Saw, ketika membangun ekonomi dengan membebaskan masyarakat dari ceng keraman kaum kapitalis. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa masyarakat Madinah yang dibangun Nabi tersebut, sebenarnya identik dengan *civil society,* karena secara sosio-kultural mengandung substansi keadaban atau peradaban. Nabi menjadikan masyarakat Madinah pada saat itu sebagai *classless society* yaitu masyarakat yang tak terbagi dalam kelas-kelas dan hukum tidak membedakan antara orang kaya dan orang miskin, pimpinan maupun bawahan, semua sama di depan hukum.

Dari uraian di atas, setidaknya secara terminologi masyarakat madani yang berkembang dalam diskursus di Indonesia, berada dalam dua pandangan yakni "masyarakat Madinah" dan "masyarakat sipil" [*civil society*]. Keduanya tanpaknya berbeda tetapi sama, berbeda karena memang secara historis keduanya mewakili

[56]M. Dawam Rahardjo, *Masyarakat Madani:Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*,(Jakarta:LSAF,1999),hlm.148-149.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

budaya yang berbeda yakni masyarakat madinah yang mewakili historis peradaban Islam, sedangkan masyarakat sipil adalah hasil dari peradaban Barat seperti yang telah dipaparkan di atas. Perbedaan lainnya, ialah masyarakat Madinah menjadi tipe ideal, sangat sempurnanya, karena komunitas masyarakat yang dipimpin langsung oleh seorang Nabi, dan karena sakin idealnya protetipe "masyarakat madinah" yang dipimpin oleh Nabi, dunia Islam sampai sekarang ini masih meraba-raba "masyarakat madani" yang bagaimana dalam bentuk kekinian. Maka, apabila masyarakat madani diasosiasikan sebagai penguat peran masyarakat sipil, maka masyarakat madani hanya bertahan dalam masa empat khalifah khulafaurrashiddin, setelah itu masyarakat Islam kembali kepada masa monarkhi, di mana penguasaan negara [*state*] kembali menjadi besar, dan peran masyarakat menjadi kecil. Oleh sebab itu, ketiga prinsip-prinsip yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan sebagai elemen penting terbentuknya "masyarakat madani" adalah masyarakat yang memegang teguh ideologi yang benar, berakhlak mulia, secara politik-ekonomi-budaya bersifat mandiri serta memeliki pemerintahan sipil, memiliki prinsip kesederajatan dan keadilan, serta prinsip keterbukaan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Timbul pertanyaan, nilai substansi seperti apakah yang dapat mewakili kecenderungan "masyarakat madinah". Apabila dikaji secara umum, setidaknya nilai subtansi semangat Islam dalam pemberdayaan masyarakat mencakup tiga pilar utama, sebagai jawaban terhadap pertanyaan tersebut, yakni : Pertama, musyawarah [*syuro'*], kedua, keadilan [*adl*], dan ketiga, persaudaraan [*ukhuwah*]. Sedangkan "masyarakat sipil" [*civil society*], bermula dari semangat dan pergumulan pemikiran masyarakat barat untuk mengurangi peranan negara [*state*] terhadap perannya dalam kehidupan masyarakat. Seperti diketahui bahwa pada abad pertengahan, masyarakat barat dikuasai oleh dua kekuatan yang sangat dominan, yakni Gereja dan kerajaan-kerajaan, sehingga para sejarawan Barat menyebutnya sebagai "abad kegelapan" [*dark age*]. Muncul gerekan perlawanan baik dari gerakan-gerakan para ilmuwan yang

menghadirkan gerekan sekularisme dan humanisme, di mana mereka menyatakan lepas dari keyakinan gereja dan manusia dianggap sebagai pusat segalanya [*antrophosentris*][57].

3. Pemaknaan Masyarakat Madani

Istilah "masyarakat madani" yang disosialisasikan di Indonesia, sebagai terjemahan dari bahasa Inggris *civil society*. Sedangkang kata *civil society*, sebenarnya berasal dari bahasa Latin *civitas dei*, artinya kota Illahi dan society yang berati masyarakat, maka dari kata *civil* ini membentuk kata *civilization*, berarti peradaban. Dengan demikian, kata *civil society* diartikan sebagai komunitas masyarakat kota, yakni masyarakat yang telah berperadaban maju. Nurchalis Madjid, menyatakan konsepsi sepert ini, "pada awalnya merujuk pada dunia Islam yang ditujukan oleh masyarakat kota Arab. Nabi, membuat deklarasi dengan mengubah nama Yathrip menjadi Madinah, karena Nabi ingin menciptakan sebuah masyarakat yang beradab [*civil society*]. Dalam bahasa Arab sipil = madani, hukum sipil = kanun madani, sedangkan kanun berasal dari bahasa Yunani, mirip bahasa Arab kanon, oleh karena itu kata Madina juga mengandung pengertian *civil society*[58].

Dalam diskursus-diskursus jika istilah "masyarakat madani" disebut selalu diidentikan dengan *civil society*, sehingga timbul berbagai asosiasi bahwa yang dimaksud dengan *civil society* adalah masyarakat itu sendiri, *vis a vis* negara. Mungkin juga *civil soceity* bukan berhadapan atau diperhadapkan dengan negara, tetapi lebih sebagai mitra negara, dan dapat pula *civil society* diasosiasikan dengan *Non-Goverment* Organisasi atau *Private Voluntary Association*, dan ada juga memahami *civil society* sebagai identik dengan masyarakat modern, atau masyarakat yang berkembang di Barat. Oleh sebab itu, persepsi memang berbeda dengan teori atau

---

[57]Lukman Hakim, *Masyarakat Madani dan Problem Intervensi Pemerintah*, dalam: Widodo Usman, dkk.,[Editor], *Membongkar Mitos Masyarakat Madani*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 131-132.

[58]Nurchalis Madjid,*Konstitusi Madinah*,From:http://www.pgi.or.id/balitbang/bal_06/02_saa_xvii/10.html.,11September 2001.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

konsep, sebagaimana disebut pulah oleh Arif Budiman, bahwa "konsep tentang *civil society* itu mengandung masalah, dalam arti, pengertian dan intrepertasi mengenai konsep ini berubah dari waktu ke waktu". Konsep tersebut, tidak hanya berubah dalam dimensi waktu tetapi pengertian yang dimaksud oleh istilah itu berbeda pada berbagai pemikir kontemporer di masa lalu dan dewasa ini, maka itulah sebabnya, persepsi orang tentang *civil society* juga berbeda-beda. Demikian pula, penggunaan istilah tertentu bisa menimbulkan asosiasi dan persepsi yang berbeda, karena hal ini sangat tergantung pada informasi dan pengetahuan orang atau kelompok yang bersangkutan[59]. Untuk itu, penggunaan istilah masyarakat madani yang diterjemahkan dengan *civil society* sebenarnya perlu dipertanyaan, karena apakah jika disebut masyarakat madani, masyarakat kewargaan, masyarakat warga, atau masyarakat sipil, dan masyarakat berperadaban, apakah pengertian yang diamksud sama dengan *civil society*.

Maka dengan penggunaan istilah yang berbeda, menyebabkan timbulnya pengertian dan asosiasi yang berbeda pula. Hal ini juga disebabkan *civil society* itu sendiri dibentuk oleh dan berakar pada proses akumulasi pengetahuan dan perubahannya dari waktu ke waktu dalam sejarah. Tetapi pada kenyataannya, jika disebut istilah *civil society*, maka timbul berbagai asosiasi bahwa yang dimaksud dengan *civil society* adalah "masyarakat" itu sendiri. Adam B. Seligman, menyatakan bahwa gagasan *civil society* di zaman kontemporer ini telah menimbulkan arti yang berbeda pada orang yang berbeda. Pemikiran yang berbeda tersebut telah memberikan tekanan pada aspek-aspek yang berebeda terhadap konsep tersebut. Gambaran yang dihasilkan adalah ambiguitas besar dan tidak sedikit menimbulkan kebingungan ketika gagasan tentang *civil society* tersebut menjadi seperangkat

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[59]M. Dawam Rahardjo, *Masyarakat Madani Di Indonesia* ..., hlm. 14.

prinsip-prinsip dan praktek bagi pemikir-pemikir dalam tradisi pemikiran politik liberal maupun di antara pengkritiknya yang lebih konservatif[60].

Dari pandangan di atas, jelas bahwa di kalangan sarjana Barat yang hidup di dalam masyarakat, di mana konsep *civil society* ini tumbuh dan berkembang dalam sejarahnya, maka istilah *civil society* dapat dan masih menimbulkan interpretasi yang berbeda, karena konsep ini masih mengandung makna yang berbeda dan bahkan masih menimbulkan kebingungan serta kekaburan [*ambigu*]. Hal ini dapat terjadi, karena pada awal perkembangannya pengertian *civil society* dan negara [*state*] dianggap dan dipahami sama. Kemudian pada paruh kedua abad XVI *civil society* barulah dipahami sebagai entitas yang berbeda dengan negara. Maka dengan pemisahan *civil society* dan negara inilah, merupakan salah satu faktor pokok yang melahirkan perdebatan dan perbedaan pandangan hingga sekarang ini[61]. Dari perdebatan tersebut, terdapat empat sudut pandang yang berbeda dalam pemaknaan atas "masyarakat madani" atau *civil society*, yaitu :

Pertama, masyarakat madani atau *civil society* diidentikan dengan negara [*state*]. Masyarakat madani atau *civils society* dipahami sebagai sistem kenegaraan yang dikenal dengan konsep *political society* dan state. Pemikiran ini dikembangkan oleh Aristoteles, Cicero, Thomas Hebbes dan John Locke, sebagai pemikiran awal atau sumber klasik yang memahami *political society* disamakan dengan *civil society*. Demikian persepsi serupa juga muncul dari Henningsen yang memahami bahwa civil society merupakan *constitutive condition* dari *political society,* sehingga kedua istilah itu dapat dipertukarkan. Sementara Hegel, Karl Marx, Gellner, Cohen dan Arato, misalnya, memahami bahwa kedua istilah tersebut, yaitu political society [*state*] dan civil society dilihat sebagai dua hal yang berlainan dan bertentangan. Kedua istilah

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[60]Ibid, hlm. 15.

[61]Ibid, hlm. 16.

merupakan dua entitas yang berdiri sendiri atau dua domain sosial politik yang berbeda[62].

Kedua, masyarakat madani atau civil society dipandang sebagai masyarakat berbudaya [*civilized society*], sehingga civil society dipahami sebagai visi etis dalam kehidupan bermasyarakat untuk memelihara tanggungjawab sosial bercirikan solidaritas sosial, menghargai nilai-nilai sosial kemanusiaan, dan didasari pada sentimen moral serta sikap saling menghargai antara warga secara alamiah, termasuk dalam kehidupan politik. Masyarakat ini, dipahami sebagai lawan dari masyarakat liar [*savage society*] yang oleh Thomas Hobbes, diidentikan dengan gambaran masyarakat tahap "keadaan alami" [*state of nature*], di mana setiap manusia merupakan serigala bagi sesamanya [*homo bomini lupus*]. Dengan demikian, eksistensi civil society sebagai sebuah abstraksi sosial yang diperhadapkan secara kontradiktif dengan masyarakat alami [*natural society*][63]. Pemahaman ini dilatar belakangi oleh kondisi sosial politik Scotlandia pada abad 18, yang tengah menghadapi kemunculan kapitalisme dan pasar bebas, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan lunturnya tanggungjawab sosial dan menguatnya individualisme. Tokoh pemahaman model pemikiran ini adalah Adam Ferguson[64].

Ketiga, masyarakat madani atau civil society juga dipahami sebagai antitesa dari negara. Gellner, menyatakan bahwa masyarakat madani atau civil soceity merupakan sekelompok institusi atau lembaga yang cukup kuat mencegah tirani politik baik oleh negara maupun komunal atau komunitas, dengan ciri yang menonjol adalah adanya kebebasan individu di dalamnya. Gellner, juga menyatakan bahwa masyarakat madani tidak hanya menolak dominasi negara, tetapi juga kekuasaan negara harus dibatasi, karena eksistensi negara hanyalah necessary evil [keniscayaan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[62]Adi Suryadi Culla, *Masayarakat Madani...*, hlm. 4-5., dan Rismawan Imawan, 1997, *Rekrutmen Kepemimpinan di Daerah: Antara Keinginan dan Kebutuhan Masyarakat"*, Jurnal Ilmu Politik No.17, PT.Gramedia-AIPI, Jakarta, 1997.

[63]Adi Suryadi Culla, *Masayarakat Madani...*, hlm. 5.

[64]Ernest Gellner, Membangun Masyarakat Sipil..., hlm. 68-90., dan Nur Kholis, Skripsi: *Konsep Masyarakat Madani dalam al-Qur'an dan Relevansinya Bagi Sosial Politik Indonesia,* (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam UII, 2000), hlm. 38.

terburuk] belaka. Karena itu, masyarakat madani harus lebih kuat dan mampu mengontrol kekuasaan negara demi kepntingan masyarakat itu sendiri. Lebih lanjut, Gellner, menyatakan bahwa masyarakat madani atau *civil society* tidak hanya menolak dominasi negara atas dirinya, tetapi juga sebagai institusi yang bersifat non-state, sehingga dalam penampilannya tidak mendominasi individu-individu dalam dirinya. Maka disinilah posisi individu sebagai aktor sosial bebas yang di istilahkan Gellner sebagai manusia moduler [tidak dipengaruhi kultur], yang menurutnya tidak merupakan prasyarat bagi perwujudan masyarakat madani. Jadi masyarakat madani atau civil society tidak hanya menerapkan sifat otonomi terhadap negara, tetapi dalam konteks internal hubungan anggotanya, juga menghargai otonomi individual atau kebebasan individual[65]

Keempat, masyarakat madani atau *civil society*, juga dipahami sebagai entitas penyeimbang kekuatan negara yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan sendiri, tetapi juga sensitif terhadap kepentingan publik. Sejalan dengan pemikiran itu, adalah Muhammad AS. Hikam, menyatakan bahwa variabel utama masyarakat madani adalah otonomi [kemandirian], publik dan *civic,* sesuatu yang meniscayakan demokrasi bagi masyarakat seperti kebebasan dan keterbukaan untuk berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat serta kesempatan dalam mempertahankan kepentingan di depan umum[66]. Alfred Stepan, menyatakan masyarakat madani sebagai "arena tempat berbagai gerakan sosial, seperti himpunan ketetanggaan, kelompok wanita, kelompok keagamaan, dan kelompk intelektual, serta organisasi sipil dari semua kelas, seperti ahli hukum, wartawan, serikat buruh dan usahawan, berusaha menyatakan diri mereka dalam suatu himpunan, sehingga mereka dapat mengekspresikan diri mereka sendiri dan memajukkan pelbagai kepentingan mereka. Secara ideal masyarakat madani ini tidak hanya sekedar

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[65] Asrori S. Karni, *Civil Society dan Ummah, Sintesa Diskrsif Rumah Demokrasi*, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1999),hlm.24.
[66] *Telaah Kritis Paradigma Masyarakat*, From: http://www.angelfire.com/ md/alihsas/ madania.html., 11 Maret 2001.

terwujudnya kemandirian masyarakat berhadapan dengan negara, melainkan juga terwujudnya nilai-nilai tertentu dalam kehidupan masyarakat, terutama keadilan, persamaan, kebebasan dan kemajemukan [pluralisme][67].

Dengan demikian, konsep civil society sebagai asal usul atau telah diterjemahkan menjadi "masyarakat madani", masyarakat warga, masyarakat kewargaan, dan masyarakat sipil, dalam wacana publik, sehingga istilah "masyarakat madani" masih diperdebatkan, tetapi menurut AS. Hikam, penggunaan istilah Arab "madani" [dari kata "madinah"] untuk menterjemahkan *"civil"* dianggap tepat karena istilah "madani" mengandung arti gagasan masyarakat yang beradab sebagai lawan masyarakat yang tidak beradab atau berbudaya. Sedangkan istilah "masyarakat warga" atau "masyarakat kewargaan" lebih berkonotasi gagasan kewarganegaraan sebagai bagian integral *civil society*[68]. Dari pandangan ini, harus disadari bahwa yang dimaksud oleh istilah masyarakat warga, masyarakat kewargaan, masyarakat sipil dan "masyarakat madani" tak lain adalah *civil society*. Dari pandangan ini pula, tercermin bahwa istilah "masyarakat madani" sebenarnya merupakan istilah yang baru muncul. Dari mana istilah ini, istilah ini muncul dari hasil pemikiran Muhammad an-Naquib al-Attas dalam studinya akhir-akhir ini. An-Naquib, menyatakan bahwa dalam literatur Islam sebenarnya tidak mengenal istilah "masyarakat madani", melainkan mengenal istilah yang serupa yaitu al-madinah al-fadlilah atau "negara utama" [secara harfiah "kota utama"], yang berasal dari pemikiran al-Farabi pada abad pertengahan[69]. Akan tetapi dalam wacana "masyarakat madani", banyak para ahli yang menggunakan istilah civil society sebagai asal usul istilah masyarakat madani, karena istilah masyarakat madani juga mengandung gagasan masyarakat berperadaban. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelusuran dan studi mengenai wacana masyarakat madani ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[67]Masykuri Abdillah, *Islam dan Masyarakat Madani,....*, 27 Febnuari 1999.
[68]Muhammad AS. Hikam, *Wacana Intelektual Tentang Civil Socety...*, hlm. 41.
[69]M. Dawam Rahardjo, *Masyarakat Madani di Indonesia...*, hlm. 16.

Secara terminologi, masyarakat madani menurut An-Naquib al-Attas adalah Mujtama' madani atau masyarakat kota. Secara etimologi mempunyai dua arti yaitu: Pertama, "masyarakat kota", karena madani berasal dari kata bahasa Arab Madinah yang berati kota, dan Kedua, "masyarakat berperadaban", karena madani berasal dari kata Arab tamaddun atau madaniah yang berati peradaban, dengan demikian masyarakat madani adalah "masyarakat yang beradab". Istilah masyarakat madani, selain mengacu pada konsep *civil society* juga beradasarkan pada konsep negara "kota Madinah" yang dibangun Nabi Muhammad Saw pada tahun 622M. Selain itu, istilah "masyarakat madani" juga mengacu pada konsep tamaddun yaitu masyarakat berperadaban, yang diperkenalkan oleh Ibn Khaldun dan konsep al-Madinah al fadhilah atau Madinah sebagai Negara Utama[70] yang dikemukakan al-Farabi pada abad pertengahan. Gellner, dikutip Mahasin [1995:ix], menyatakan bahwa "masyarakat madani" sebagai terjemahan bahasa Inggris *civil society*. Tetapi sebenarnya kata *civil society* berasal dari bahasa Latin yaitu *civitas dei* yang berarti kota illahi dan *society* yang berati masyarakat. Kemudian dari kata *civil* ini membentuk kata *civilization* yang bermakna peradaban. Oleh sebab itu, kata *civil society* dapat diartikan sebagai komunitas "masyarakat kota" yakni masyarakat yang telah berperadaban maju. Konsep masyarakat seperti ini, menurut Nurchalis Madjid, sebenarnya lebih merujuk pada dunia Islam yang ditujukan oleh masyarakat kota Arab, karena lawan dari kata "masyarakat kota" adalah masyarakat nonmadani atau kaum pengembara, badawi, yang masih membawa cita kasar, berwawasan pengetahuan sempit, masyarakat tradisonal penuh mitos dan takhayul, banyak menggunakan kekerasan dan kekuatan, suka menindas, dan sifat-sifat negatif lainnya[71].

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[70]D. Rahardjo, *Relevansi Iptek Profetik dalam Pembangunan Masyarakat Madani*, (Academika, Vol.01,Th.xv, 1997), hlm. 17-24., dan Husaini Usman, *Menuju Masyarakat Madani Melalui Demokratisasi Pendidikan*, From: http://www.depdiknas. go.id/ Jurnal/ 28/ menuju_masyarakat_madani_melalui.htm.,11 September 2001.

[71]A. Mahasin, *Masyarakat Madani dan Lawan-lawannya: Sebuah Mukadimah*, dalam Genller, Membangun Masyarakat Sipil: Prasyarat Menuju Kebebasan, Terj. L Hasan, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. ix-x.

Maka dengan menggunakan konsep civil society sebagai asal usul istilah "masyarakat madani", seorang ahli sejarah peradaban Islam mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan istilah masyarakat madani. Nurchalis Madjid, sudah melakukan rekonstruksi masyarakat madani, yakni perkataan Arab "Madinah" artinya kota, secara etimologis berarti "tempat peradaban". Karena itu, pengertian Madinah mirip atau padanan perkataan Yunani "polis" [seperti dalam nama kota "Constantinopel], dan "Madinah" dalam arti adalah sama dengan "hadharah" dan "isaqarah", yang masing-masing sering diterjemahkan "peradaban" dan "kebudayaan", tetapi yang secara etimologis mempunyai arti "pola kehidupan menetap" sebagai lawan "badawah" yang berarti pola kehidupan mengembara, "nomad". Karena itu, perkataan "madinah", dalam peristilah modern, menunjuk kepada semangat dan pengertian *"civil society"*, istilah Inggris yang berarti "masyarakat sopan, beradab dan teratur" dalam bentuk negara yang baik[72]. Dengan demikian, konsep "masyarakat madani" adalah pola kehidupan sosial yang sopan, yang ditegakkan atas dasar kewajiban dan kedasaran umum untuk patuh pada peraturan atau hukum. Maka, variabel utama masyarakat madani seperti yang dikatakan AS. Hikam, adalah kemandirian [otonomi], kebebasan dan keterbukaan untuk berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat serta kesempatan yang sama dalam mempertahankan kepentingan di depan umum. Sementara Nurchalis Madjid, menyatakan bahwa "masyarakat madani" yang dibangun oleh Rasul di Madinah dengan azas yang tertuang dalam "Piagam Madinah", memiliki 6 ciri utama, yaitu egalitarianisme, penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi [bukan kesukuan, keturunan, ras dan sebagainya], keterbukaan [partisipasi seluruh anggota masyarakat aktif], penegakan hukum dan keadilan, toleransi dan pluralisme serta musyawarah[73]. Dari

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[72]Nurchalis Madjid, *Kedaulatan Rakyat: Prinsip Kemanusiaan dan Musyawarah dalam Masyarakat Madani*, dalam: *Widodo Usman*, dkk., (*Editor*), *Membongkar Mitos Masyarakat Madani*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2000), hlm. 79-80., dan Nurchalis Madjid, *Konstitusi Madinah*, From http://www.pgi.or.id/ balitbang/ bal_06/02_saa_ xvii/10.html., 11 September 2001.

[73]Nurchalis Madjid, *Menuju Masyarakat Madani*,..., hlm. 55.

sini, dapat difahami bahwa yang dimaksud dengan istilah masyarakat warga, masyarakat kewargaan, masyarakat sipil dan masyarakt madani itu tak lain adalah *civil society.*

Munawir [1997], menyatakan bahwa istilah madani sebenarnya berasal dari bahasa Arab, madaniy. Kata madaniy berakar dari kata kerja madana yang berarti mendiami, tinggal, atau membangun. Kemudian berubah istilah menjadi madaniy yang artinya beradab, orang kota, orang sipil, dan yang bersifat sipil atau perdata[74]. Dengan demikian, istilah madaniy dalam bahasa Arab mempunyai arti dan makna yang banyak. J.A. Hall [1998], menyatakan bahwa masyarakat madani identik dengan civil society, artinya suatu gagasan angan-angan, bayangan, cita-cita suatu komunitas yang dapat terejawantahkan ke dalam kehidupan sosial. Dalam masyarakat madani, pelaku sosial akan berpegang teguh pada peradaban dan kemanusiaan[75]. Hefner [1998], yang dikutip Husaini Usman, menyatakan bahwa masyarakat sipil atau civil society merupakan masyarakat modern yang bercirikan kebebasan dan demokratisasi dalam berinteraksi di masyarakat yang semakin plural dan heterogen[76], karena dalam kondisi seperti ini, masyarakat diharapkan mampu mengorganisasikan dirinya dan tumbuh kesadaran diri untuk mewujudkan peradaban. Masyarakat yang berperadaban, adalah masyarakat yang berpegang teguh pada peradaban dan kemanusiaan, masyarakat yang bercirikan kebebasan dan demokrasi dalam berinteraksi di dalam masyarakat yang plural.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat madani pada prinsipnya memiliki makna ganda yaitu : demokrasi, transparansi, toleransi, potensi, aspirasi, motivasi, partisipasi, konsistensi, komparasi, koordinasi, simplikasi, sinkronisasi, integrasi, emansipasi, dan hak asasi, namun yang paling dominan adalah

[74]A.W. Munawir, Al-Munawar: *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997),hlm. 1320.
[75]Husaini Usman, *Menuju Masyarakat Madani*...,hlm 4.
[76]Ibid, hlm. 4.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

masyarakat yang demokratis. Perbedaan yang tampak jelas adalah civil society tidak mengaitkan prinsip tatanan pada agama tertentu, sedangkan masyarakat madani [*al-madaniy*] jelas mengacu pada agama Islam. Maka konsep masyarakat madani menurut Islam adalah bangunan politik yang demokratis, menghormati dan menghargai publik seperti: kebebasan hak asasi, partisipasi, keadilan sosial, menjunjung tinggi etika dan moralitas, dan lain sebagainya. Dengan demikian masyarakat madani dapat difahami sebagai masyarakat yang berperadaban, beradab, masyarakat sipil, dan menghargai pluralistik. Sedangkan tuntutan masyarakat madani yang diharapkan kaum reformis adalah "masyarakat yang lebih terbuka, pluralistik, dan desentralistik dengan partisipasi politik yang lebih besar"[77], kemudian masyarakat yang "jujur, adil, mandiri, harmonis, memihak kepada yang lemah, menjamin kebebasan beragama, berbicara, berserikat dan berekspresi, menjamin hak kepemilikan dan menghormati hak-hak asasi manusia"[78]. Maka dengan mengetahui makna masyarakat madani sebagai masyarakat yang beradab, berperadaban, masyarakat sipil dan masyarakat yang tinggal di suatu kota atau masyarakat kota yang pluralistik, sehingga mendorong untuk mengkaji karakteristik atau ciri masyarakat madani.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Karakteristik atau Ciri Masyarakat Madani

Dari pandangan dan gambaran "masyarakat madani" dari para ahli tersebut di atas, timbul pertanyaan protetype apakah yang menjadi karakteristik atau ciri dari masyarakat tersebut. Maka dari pandangan tersebut, secara umum dapat disimpulan, bahwa karakteristik "masyarakat madani" adalah masyarakat kota, masyarakat yang berperadaban, masyarakat yang dapat menciptakan peradaban, masyarakat yang memiliki pola kehidupan yang benar yaitu pola kehidupan masyarakat yang menetap

---

[77]N.S. Nordholt, *Civil Society di Era Kegelisahan*, Basis, Np. (3-4, Maret 1999), hlm. 16.

[78]H. Farkan, *Piagam Madinah dan Idealisme Masyarakat Madani*, Bernas, (29 Maret 1999).

dan bukan masyarakat nomaden. Masyarakat yang terbuka, pluralistik, menjamin kebebasan beragama, jujur, adil, kemandirian, harmonis, menjamin kepemilikan dan menghormati hak-hak asasi manusia. Kemudian dalam masyarakat madani tersebut, pelaku sosial akan selalu berpegang teguh pada peradaban dan kemanusian, yang selalu bercirikan demokratisasi dalam berinteraksi di masyarakat yang plural dan heterogen.

Masyarakat madani yang hendak diwujudkan antara lain mempunyai karakteristik, sebagai berikut : *Pertama*, masyarakat beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki pemahaman mendalam akan agama serta hidup berdampingan dan saling menghargai perbedaan agama masing-masing. *Kedua,* masyarakat demokratis dan beradab yang menghargai adanya perbedaan pendapat. Memberi tempat dan penghargaan perbedaan pendapat serta mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu, kelompok dan golongan. *Ketiga,* masyarakat yang menghargai hak-hak asasi manusia, mulai dari hak untuk mengeluarkan pendapat, berkumpul, berserikat, hak atas kehidupan yang layak, hak memilih agama, hak atas pendidikan dan pengajaran, serta hak untuk memperoleh pelayanan dan perlindungan hukum yang adil. *Keempat,* masyarakat tertib dan sadar hukum yang direfleksikan dari adanya budaya malu apabila melanggar hukum. *Kelima*, masyarakat yang kreatif, mandiri dan percaya diri. Masyarakat yang memiliki orientasi kuat pada penguasaan ilmu pengatahuan dan teknologi. *Keenam*, masyarakat yang memiliki semangat kompetitif dalam suasana kooperatif, penuh persaudaraan dengan bangsa-bangsa lain dengan semangat kemanusiaan universal [pluralistik][79].

Selain karakteristik yang dikemukakan di atas, beberapa ciri masyarakat madani yang dikemukakan pada ahli antara lain: Antonio Rosmini dalam *"The Philosophy of Right, Rights in Civil Society"* [1996 : 28-50] yang dikutip Mufid,

[79]Hidayat Syarief, Paradigma Baru Pendidikan Membangun Masayarakat Madani,REPUBLIKA,(30 Oktober 1999), hlm.4.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

menyebutkan sepuluh ciri Masyarakat Madani sebagai berikut : Universalitas, Supermasi, Keabadian dan pemerataan kekuatan [*prevalence of force*] adalah empat ciri yang pertama. Ciri yang kelima, ditandai dengan "kebaikan dari dan untuk bersama". Ciri ini bisa terwujud jika setiap anggota masyarakat memiliki akses pemerataan dalam memanfaatkan kesempatan [*the tendency to equalize the share of utility*]. *Keenam*, jika masyarakat madani "ditujukan untuk meraih kebajikan umum" [*the common good*], tujuan akhir memang adalah kebajikan publik [*the public good*]. *Ketujuh,* sebagai perimbangan kebijakan umum, masyarakat madani juga memperhatikan kebijakan perorangan dengan cara memberikan alokasi kesempatan kepada setiap anggotanya meraih kebajikan itu. *Kedelapan*, masyarakat madani, memerlukan "piranti eksternal" untuk mewujudkan tujuannya. Piranti eksternal itu adalah masyarakat eksternal. *Kesembilan*, masyarakat madani bukanlah sebuah kekuatan yang berorientasi pada keuntungan [*seigniorial or profit*]. Masyarakat madani lebih merupakan kekuatan yang justru memberi manfaat [*a beneficial power*]. *Kesepuluh*, kendati masyarakat madani memberi kesempatan yang sama dan merata kepada setiap warganya, tidak berarti bahwa ia harus seragam, sama dan sebangun serta homogen. Masyarakat madani terdiri dari berbagai warga beraneka "warna" bakat dan potensi. Karena itulah masyarakat madani di sebut sebagai masyarakat multi-kuota [*a multi- qouta society*][80].

Sepuluh ciri yang dikemukakan tersebut, secara umum merupakan ciri yang sangat idial, sehingga mengesankan seolah-olah tak ada masyarakat seideal itu. Kalau ada, hanya masyarakat muslim yang langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad Saw yang relatif memenuhi syarat tersebut. Oleh karena itu, muncul kesan seolah-olah tak ada masyarakat seideal masyarakat madinah, telah diisyaratkan oleh Nabi Muhammad Saw dalam sabdanya, "tak ada satupun masyarakat di dunia ini yang

[80]Mufid, *Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani*, dalam buku: *Membangun Masyarakat Madani, Menuju Indonesia Baru Milenium Ke-3*, Tim Editor Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, (Yogyakarta: Aditya Media, 1999), hlm. 213.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

sebaik masyarakat atau sebaik-baik masa adalah masaku" [*ahsanul qurun qarni*]. Terlepas dari status sahih dan tidaknya sabda ini, ataupun siapa pun periwayatnya[81]. Diakui masyarakat Madinah yang dibangun Nabi Muhammad Saw sebagai masyarakat terbaik, karena masyarakat Madinah yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad Saw merupakan prototype masyarakat idial. Muhammad AS. Hikam, dengan mengacu kepada pengertian yang pernah ditanamkan oleh Alexis de Tocqueville, dalam memahami konsep "masyarakat madani" lebih cenderung menggunakan istilah aslinya *civil society*, yang dapat didefinisikan sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain : kesukarelaan [*voluntary*], keswasembadaan [*self generating*], dan keswadayaan [*self supporting*], kemandirian yang tinggi berhadapan dengan negara, dan keterkaitan dengan norma-norma hukum yang diikuti oleh warganya. Dari pandangan ini, setidaknya minimal ada tiga ciri utama dari masyarakat madani, yaitu: Pertama, adanya kemandirian yang cukup tinggi individu-individu dan kelompok-kelompok masyarakat terhadap negara. Kedua, adanya kebebasan menentukan wacana dan praksis politik di tingkat publik. Ketiga, kemampuan membatasi kekuasaan negara untuk tidak melakukan intervensi[82].

Apabila kembali kepada penggambaran nilai-nilai masyarakat madani yang dinyatakan oleh Nurchalis Madjid di atas, memiliki 6 ciri utama, yaitu : [1] Masyarakat *egaliter*, masyarakat *egaliter* atau masyarakat yang mengemban nilai egalitarianisme yaitu masyarakat yang mengakui adanya kesetaraan dalam posisi di masyarakat dari sisi hak dan kewajibannya tanpa memandang suku, keturunan, ras, agama dan sebagainya. Pandang Nurchalis Madjid ini, dibantah oleh sebagian ahli yang menyatakan bahwa "masyarakat Madinah" bukanlah masyarakat egaliter seperti yang di sebut Nurchalis. Pandangan ini didasarkan pada "Piagam Madinah", memang terlihat

[81]Sufyanto, *Masyarakat Tamaddun, Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurchalis Madjid*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), hlm. 99.

[82]Muhammad AS. Hikam, *Demokrasi dan Civil Soceity*, hlm. x-xvi.

betapa Islam memberikan jaminan kesamaan derajat warga negara ketika Islam secara adil mengatur pemenuhan hak-hak dan kewajiban warganya dan orang-orang yang terikat perjanjian dengan Rasulullah sebagai pemimpin saat itu. Hanya saja semua ini berlangsung dalam kerangka ketunduhan terhadap syariat Islam. Artinya, selama non muslim mematuhi aturan main yang diberikan Rasulullah maka posisi mereka tersebut tidak akan terzalimi. Jadi dalam masyarakat madinah, sangatlah jelas posisi masing-masing apakah dia muslim, ahlu dzimmah atau orang-orang yang terikat perjanjian, maka Islam telah mengatur mereka dengan aturan yang menjamin ketenangan masing-masing penduduk. [2] Penghargaan, bahwa dalam masyarakat madani adanya penghargaan kepada orang berdasarkan prestise, bukan kesukuan, keturunan, ras dan sebagainya. [3] Keterbukaan [partisipasi seluruh anggota masyarakat aktif], sebagai ciri masyarakat madani adalah kerendahan hati untuk tidak merasa selalu benar, kemudian kesedian untuk mendengarkan pendapat orang lain untuk diambil dan diikuti mana yang terbaik. Keterbukaan ini menurut Nurchalis Madjid akan memberi peluang adanya pengawasan sosial. Keterbukaan merupakan kosekuensi dari prikemanusian, suatu pandangan yang melihat sesama manusia pada dasarnya adalah baik. [4] Penegakan hukum dan keadilan, hukum ditegakkan pada siapapun dan kapanpun, walaupun terhadap keluarga sendiri, karena manusia sama di depan hukum. Prinsip hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, sehingga kepastian hukum benar-benar dirasakan oleh semua anggota masyarakat, hukum menjadi supermasi. Prinsip ini yang ditegakkan Nabi Muhammad Saw dan tertuang dalam Piagam Madinah yang berbunyi "Bahwa orang-orang yang beriman dan bertaqwa harus melawan orang yang melakukan kejahatan di antara mereka sendiri, atau orang suka melakukan perbuatan aniaya, kejahatan, permusuhan atau berbuat kerusakan di antara orang-orang beriman sendiri dan meraka harus bersama-sama melawannya walaupun terhadap anak sendiri. [5] Toleransi dan pluralisme, tak lain adalah wujud *civility* yaitu sikap kewajiban pribadi dan sosial yang bersedia melihat diri

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

sendiri tidak selalu benar, karena pluralisme dan toleransi merupakan wujud dari "ikatan keadaban" [*bond of civility*], dalam arti masing-masing pribadi dan kelompok dalam lingkungan yang lebih luas, memandang yang lain dengan penghargaan, betapapun perbedaan yang ada tanpa saling memaksakan kehendak, pendapat atau pandangan sendiri. [6] Musyawara dan demokrasi, merupakan unsur asasi pembentukan masyarakat madani. Nurchalis Madjid, menyatakan masyarakat madani merupakan masyarakat demokratis yang terbangun dengan menagakkan musyawarah, karena musyawarah merupakan interpretasi posetif berbagai individu dalam masyarakat yang saling memberikan hak untuk menyatakan pendapat, dan mengakui adanya kewajiban mendengar pendapat orang lain. Sedangkan pluralisme dan tolerasni dalam beragama, yang dimaksud oleh Nurchalis Madjid dan dikuatkan juga oleh Alwi Shihab adalah bahwa setiap pemeluk agama dituntut bukan hanya mengakui kebenaran dan hak agama lain tetapi juga terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapai kerukunan dalam kebhinekaan[83].

Dari uraian di atas, jelas konsep masyarakat madani atau civil soceity bukan berasal dari Islam tetapi muncul dari pandangan pemikir-pemikir Barat, kemudian akomudasi dalam wacana pemikiran Islam. Adapun Islam sendiri telah memiliki konsep yang jelas dan gamblang dalam asas dan perinciannya tentang masyarakat ideal yang wajib diwujudkan kaum muslimin. Masyarakat tersebut adalah masyarakat yang didalamnya merealisasikan nilai-nilai khas yang terpancar dari aqidah dan bukan terpancar dari egaliter, pluralisme, toleransi apalagi demokrasi. Dari aqidah yang dimiliki Islam, memancarkan apa yang disebut egaliter, pluralisme, toleransi, demokrasi. Oleh sebab itu, pemikiran Nurchalis Madjid, yang "berusaha membangun persepsi yang sama antara masyarakat madani dalam suatu bentuk "Ijtihad kontemporer" sebagai alternatif ideal masyarakat masa depan Indonesia dengan protetype masyarakat Rasul di Madinah, dikritik oleh pemikir-pemikir Islam lainnya di

[83]Nurchalis Madjid, 1999, *Menuju Masyarakat Madani*, hlm. 52-55.

Indonesia. Mereka menyatakan bahwa Nurchalis Madjid, telah melakukan suatu penganalogan yang sangat tidak adil dan tidak beralasan karena hanya melihat masyarakat madani dari segi kemajemukan semata tanpa mengaitkan dengan sistem khas yang telah mengatur tatanan masyarakat Madinah tersebut sedemikian rupa[84], sehingga, yang dipertanyakan apakah konsep Nurchalis Madjid itu lebih dekat kepada masyarakat Islam di Madinah atau jangan-jangan lebih mirip dengan masyarakat di Barat. Padahal negara dan masyarakat Madani yang dibangun Nabi Muhammad Saw adalah negara dan masyarakat yang "kuat" dan "solid" dengan nilai-nilai khas yang terpancar dari keyakinan aqidah Islamiyah. Negara yang dibangun di atas masyarakat yang bersatu tidak hanya karena kepentingan yang sama yang menjadi sebab terbentuknya mayoritas negara modern, tetapi terbentuk karena memiliki perpektif yang sama, perasaan yang sama dan misi yang sama dalam membangun suatu masyarakat. Maka atas dasar persamaan ini menjadikan seluruh perbedaan yang ada seperti perbedaan suku, warna, ekonomi dan sebagainya hanya menjadi keberagaman dan kekayaan bukan sebab perpecahan[85].

Terlepas dari perdebatan tersebut di atas, karakteristik dan ciri masyarakat madani yang dikemukakan adalah sangat ideal. Cleary and Watson dalam Antonio Rosmini [1986:vii], menyatakan bahwa masyarakat madani atau *civil soceity* adalah "organisasi manusia yang sempurna, sebagai konsekuensi perkembangan hidup dan kuantitasnya, dan manakala bakat-bakat almiah yang ia miliki saling bersinggungan dan bergesekan[86]. Banyak pemikir Muslim yang menyatakan, bahwa untuk membangun masyarakat madani diperlukan tingkat pendidikan yang memadai dan berkualitas, ekonomi yang memadai, suasana dan kesadaran politik, demokrasi, hukum yang kondusip serta mendukung, dan jaminan keamana sebagai prasyarat

---

[84]Ibid, hlm. 5.

[85]Ahmad Hatta, *Peradaban Yang Bagaimana? Rincian Misi Negara Tauhid Madinah*, dalam Majalah Suara Hidayatullah:Juli 2001,From: http://www.hidayatullah.com/2001/07/kajut3.shtml.,tgl.7 Juni 2001.

[86]Mufid, *Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani*, hlm. 212.

untuk membangun masyarakat madani. Maka masyarakat madani dengan karakteristik tersebut hanya dapat diwujudkan melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk itu pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun masyarakat tersebut.

C. Istilah Masyarakat Madani di Indonesia

Di Indonesia, istilah "masyarakat madani" pada umumnya disamakan dengan istilah "masyarakat sipil" [*civil society*] menjadi salah satu sorotan penting dalam banyak diskusi publik di belakangan ini, bahkan pada saat pemerintahan Presiden Habibie telah membentuk satu tim, dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 198 tahun 1998, tentang pembentukan tim nasional reformasi menuju masyarakat madani. Tim tersebut diberi tugas untuk membahas masalah-masalah pokok yang harus disiapkan untuk membangun masyarakat madani Indonesia, yaitu di antaranya : *Pertama,* menghimpun pemikiran tentang transformasi ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya serta perkiraan dampak globalisasi terhadap berbagai aspek kehidupan bangsa [pada tugas pertama]. *Kedua,* merumuskan rekomendasi serta pemikiran tentang upaya untuk mendorong transformasi bangsa menuju masyarakat madani.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pembahasan "masyarakat madani" memperlihatkan berbagai konsep yang satu sama lain tidak sama, bahkan di sana sini terjadi kontradiktif antara yang satu dengan yang lain baik dalam agenda politik maupun pandangan ideologi yang mendasarinya. Kepana demikian, karena istilah "masyarakat madani" atau "*civil society*" di Indonesia merupakan "sebuah istilah baru dan asing", sehingga ketika istilah ini muncul merupakan mendapatkan sambutan dan berkembang pemikiran untuk membentuk sebuah "masyarakat baru" Indonesia. Ada fenomea yang menarik, yaitu munculnya istilah masyarakat madani di era reformasi, justru dikehendaki totoh-

tokoh negara, pemerintahan, serta tokoh-tokoh militer sendiri[87], tetapi menjadi sesuatu yang diragukan, atau masyarakat memandang secara skeptis, sebab dalam pandangan masyarakat konsep "masyarakat madani" ini muncul dianggap "sebagai reaksi terhadap pemerintahan militeristik yang dibangun oleh rezim Orde Baru selama 32 tahun. Maka, ketika momentun "era reformasi" muncul sebagai penolakan atas politik Orde Baru, masyarakat dan bangsa Indonesia menginginkan adanya perubahan sistem politik dan pembangunan menuju ke arah terciptanya "masyarakat madani" atau *civil society.* Dari sini awal mulai diteriakan "masyarakat madani" dan dijadikan acuan serta agenda penting untuk membangun "Indonesia baru" yaitu terciptanya suatu sistem berkeadilan, demokratis, dan menghargai adanya perbedaan di masyarakat. Tetapi konsepsi yang ditawarkan dalam upaya pembangunan "masyarakat madani" atau *civil society* di Indonesia berbeda dengan konsep masyarakat sipil yang muncul pertama kali di Eropa. Di Indonesia, *Civil society* yang dimaksud adalah sebagai gagasan alternatif atas militerisme atau tandingan dari "militer", yang dalam masyarakat hadir dalam bentuk dwifungsi ABRI yang dianggap sebagai model politik Orde Baru. Maka dengan munculnya gagasan masyarakat madani atau *civil society* dianggap sebagai konsep alternatif dari gerakan oposisi kaum reformis terhadap rezim Orde Baru, yang diberi nama gerakan "masyarakat madani". Dari lontaran gagasan tersebut, tercermin bahwa "masyarakat madani" atau "*civil society*" dilawankan dengan masyarakat negara yang dimotori oleh militer, sehingga lontaran-lontaran pemikiran tersebut bertendensi pada keinginan untuk membersihkan pemerintahan dari dominasi militer[88].

Apabila ditelusuri, munculnya istilah masyarakat madani di Indonesia pada tahun 1995, bermula dari gagasan Datuk Anwar Ibrahim[89] dan menggulirkan istilah

---

[87]M. Dawam Rahardjo, *Masyarakat Madani Di Indonesia...*, hlm. 20.

[88]Moh. Mahfud MD, *Supermasi Hukum dan Masyarakat Madani*, hlm. 2-3., dan M. Dawam Rahardjo, *Demokrasi, Agama ...*, hlm. 25., dan Thoha Hamim, *Islam dan Masyarakat Madani (1), HAM, Pluralisme dan Toleransi Beragama*, JAWA POS, 11 Maret 1999, hlm. 4.

[89]Datuk Anwar Ibrahim, pada tahun 1995, ketika itu tengah menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Timbalan Perdana Menteri Malaysia yang datang ke Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

"masyarakat madani" sebagai terjemahan *"civil society"* ke Indonesia, dalam ceramahnya pada Simposium Nasional dalam rangka Forum Ilmiah pada acara Festival Istiqlal, 26 September 1995. Tetapi, sebenarnya istilah "masyarakat madani" pun sangat baru, yang merupakan hasil pemikiran Naquib al-Attas, kemudian mendapat legitimasi dari beberapa pakar di Indonesia termasuk Nurchalis Madjid yang telah melakukan rekonstruksi terhadap masyarakat madani dalam sejarah Islam pada artikelnya berjudul "Menuju Masyarakat Madani", seperti disebut di awal[90], dan masih banyak lagi dukungan dari pemikir-pemikir yang lain. Maka sejak itu, istilah masyarakat madani makin banyak disebut, sehingga muncul upaya untuk mewujudkan masyarakat madani yang menggoda dan memotivasi masyarakat dan bangsa Indonesia, walaupun sebenarnya disana-sini secara skeptis ada yang meragukan keberhasilan masyarakat dan bangsa untuk mewujudkan masyarakat madani. Tanpaknya pembahasan Anwar Ibrahim mengenai peradaban Islam dengan memakai istilah "masyarakat madani" mempunyai dampak tertentu dalam menggugah perhatian masyarakat, khusus masyarakat muslim Indonesia. Ini antara lain disebabkan karena perhatian kalangan muslim terhadap konsep masyarakat [*society*], di samping sebagai alternatif dari konsep tentang negara [*state*]. Tetapi, apabila memperhatikan diskursus di kalangan intelektual Indonesia, sebenarnya wacana masyarakat ini pernah digulirkan, antara lain oleh gerakan Muhammadiyah yang telah lama melontarkan gagasan mengenai "masyarakat utama", merupakan terjemahan dari kata khayru ummah. Amin RaisAmin Rais[91], membahas konsep "masyarakat

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[90]M. Dawam Rahardjo, *Masyarakat Madani di Indonesia, Sebuah Penjejakan Awal*, Jurnal Pemikiran Islam PARAMADINAH, Volume 1, Nomor 2-ISSN:1410-8410, 1999, Jakarta, hlm. 7., dan A. Mahasin, *Masyarakat Madani dan Lawan-Lawannya, Sebuah Mukaddimah*, dalam Genller, Membangun Masyarakat Sipil: Prasyarat Menuju Kebebasan, I. Hasan, (Bandung:Mizan, 1995), hlm. ix.

[91]Amin Rais, ketika itu masih berkedudukan sebagai Ketua I Organisasi Muhammadiyah dan Ahmad Azhar Basyir, sebagai Ketua Umum Organisasi Muhammadiyah. Amin Rais, membahas konsep "masyarakat utama" ini dengan menyebut konsep civil society, sedangkan Ahmad Azhar Basyir, juga menulis sebuah buku kecil tentang konsep masyarakat ini, walaupun ia tidak menulis dalam kerangka teori civil society atau masyarakat madani. Wacana itu tidak lepas dari kegagalan wacana "negara Islam" yang dilakukan partai-partai Islam sebelumnya. Kurang lebih wacana itu hendak menjelaskan bahwa Islam lebih merupakan konsep tentang masyarakat dari pada tentang negara. Sebenarnya wacana "masyarakat utama", sebagai agenda pemikiran mula-mula dicanangkan oleh gerakan Muhammadiyah dalam Muktamarnya yang ke-21 di Solo, tahun 1985 tanggal 21-22 Desember 1991. PP Muhammadiyah bersama dengan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam dan Kemuhammadiyaan, Universitas Muhammadiyah Malang, menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema "Masyarakat Utama" [M. Dawam Rahardjo, *Masyarakat Madani Di Indonesia*..., hlm. 11].

utama" dengan menyebut konsep civil society. Ahmad Azhar Basyir, juga menulis tentang konsep masyarakat, walaupun tidak menulis dalam kerangka teori civil society atau masyarakat madani. M. Dawan Rahardjo, menyatakan bahwa wacana ini muncul tidak terlepas dari kegagalan wacana "negara Islam" yang dilakukan partai-partai Islam sebelumnya. Menurutnya, kurang lebih wacana itu hendak menjelaskan bahwa Islam lebih merupakan konsep tentang masyarakat dari pada tentang negara[92].

Seorang pengamat politik berkebangsaan Australia Daniel Lev, menyatakan bahwa "masyarakat madani" atau *civil society,* "akar-akarnya sesungguhnya sudah ada dalam masyarakat Indonesia. Menurutnya, masyarakat Indonesia cukup sehat, solid dan bertanggungjawab, karena karakter tersebut cukup penting untuk dapat melahirkan sebuah masyarakat modern yang maju dan beradab. Senada dengan pandangan itu, AS. Hikam, menyatakan secara historis kelembagaan masyarakat madani sudah muncul di Indonesia ketika proses transformasi akibat modernisasi yang terjadi dan menghasilkan pembentukan sosial baru yang berbeda dengan masyarakat tradisional. Dengan demikian, "akar masyarakat madani atau civil society di Indonesia dapat ditelusuri secara historis semenjak terjadi perubahan sosial ekonomi pada masa kolonial, utamanya ketika kapitalisme merkantilis mulai diperkenalkan oleh Belanda". AS. Hikam, menunjuk beberapa elemen dasar yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia yang dapat diandalkan sebagai landasan masyarakat madani itu, yaitu ekonomi modern, kapitalisme dan demokratisasi[93]. Benedict Anderson, menyebutkan bahwa "orang Indonesia, terutama pemimpin-pemimpinya, mempunyai persepsi tertentu tentang masyarakat yang dibayangkan atau dicita-citakan [*imagined society*]"[94]. Hanya saja cita-cita kemasyarakatan Indonesia ini mencul dalam wacana yang beragam pula, paling tidak ada dua pandangan kemasyarakatan, sebagaimana muncul dalam polemik kebudayaan yang

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[92]Ibid, hlm. 11.

[93]Saiful Mamiwanto, M.Ali Said JSD, Masyarakat Madani, Mimpi Lama,..., hlm. 5.

[94]M. Dawam Rahardjo, *Masyarakat Madani Di Indonesia*..., hlm. 11.

berlangsung antara tahun 1935 hingga 1939. Pandangan pertama, mengacu kepada suatu masyarakat Indonesia modern, seperti diwakili oleh Sutan Takdir Alisyahbana. Pandangan kedua, ingin mencari konsep masyarakat Indonesia yang bertolak dari sejarah dan nilai-nilai Indonesia asli sebagai varisan dari nilai-nilai ketimuran. Tokoh-tokoh penganjurnya antara lain Sanusi Pane dan dokter Sutomo"[95]. Oleh karena itu, apabila "akar" masyarakat madani ditelusuri berdasarkan pandangan ini, sebenarnya emberio, akar atau elemen dasar "masyarakat madani" sudah ada dan telah muncul dalam wacana pemikiran masyarakat Indonesia, jauh sebelum istilah ini dipopulerkan.

Dengan demikian, sebenarnya di Indonesia telah lahir "masyarakat madani" atau telah memiliki tradisi "*civil society*" sejak zaman kolonial, bahkan sejak awal abad 20 ini, jika konsep masyarakat madani bertolak dari pengertian bahwa ciri utama masyarakat madani itu adalah organisasi-organisasi kemasyarakatan atau organisasi sosial, politik dan kebudayaan secara independen dan aktif mengimbangi peran negara. Pandangan ini, bersandar pada pandangan atau definisikan yang dikemukakan Gordon White dalam tulisannya *"Prospect for Civil Soceity in China: A Case Study of Xiaoshan City* [1993] yang mencirikan *civil society* sebagai "intermediate social associations" atau mengkonotasikan *civil society* sebagai *"mass organizations which arise in opposition to the state"*[96]. Senada dengan pandangan ini adalah Prof. Cho Hein dari Korea, yang telah mencandera adanya *civil Society* di Korea pra-modern dengan melihat kehadiran kaum literati Konfusian sebagai suatu kelas atau komunitas intelektual yang memiliki Bildungsbergertum atau *"culturel civizens"* [warga negara berbudaya] yang mempunyai kedudukan ekonomi dari negara. Tentang komunitas literati itu, Cho Hein, menyatakan bahwa: "Sebuah *civil soceity Konfusian* yang tinggi sopistikasinya pernah ada di zaman Chason. *Civil*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[95]Achdiat K. Mihardja, *Polemik Kebudayaan*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1997), *dan* M. Dawam Rahardjo, Masyarakat Madani Di Indonesia, hlm. 11.

[96]M. Dawam Rahardjo, *Masyarakat Madani Di Indonesia...*, hlm. 17., dan M. Dawam Rahardjo, *Gerakan Keagamaan dan Penguatan Civil Soceity, sebuah pengantar untuk : Asep Gunawan dan Dewi Nurjulianti, Gerakan Keagamaan dalam Penguatan Civil Society: Analisis Perbandingan Visi dan Misi LSM dan Ormas Berbasis Kegamaan*, Jakarta: LSAF dan TAF,1999),hlm. xvii.

society pada waktu itu cukup bebas dan merupakan komunitas literati yang egaliter, ditandai oleh komunitas yang kritis ai antara mereka sendiri dan adanya *check and balances* antara kaum literati negara yang resmi dan literati informal [*sarim*]. Cho Hein, menyebut komunitas literati itu sebagai *civil society* karena memiliki ciri-ciri *civil society* di masa modern yang bebas dan egaliter dan berinteraksi di antara mereka sendiri dan dengan kaum literati negara secara kritis. Kesimpulannya, kata Cho di bagian lain, bahwa komunitas *civil society Konfusian* yang berkembang di dinasti Choson itu memiliki otonomi yang cukup besar berhadapan dengan negara dan kaum literati mempengaruhi kebijaksanaan negara melalui jaringan komunikasi yang luas secara nasional[97].

Paradigma Cho Hein ini, tentunya bisa pula diselediki apakah "masyarakat madani" pernah ada di Indonesia. Untuk menjawab pernyataan ini, Emil Salim, sebagai Ketua Gerakan Masyarakat Madani, pernah mengatakan bahwa masyarakat madani itu terdapat pula di Indonesia. Emil Salim, menyatakan "wujud masyarakat madani sesungguhnya sudah tertanam dalam masyarakat paguyuban yang dominan di masa lalu, ketika kelompok masyarakat berkedudukan sama dan mengatur kehidupan bersama secara musyawarah. Perkembangan masyarakat patembayan memerlukan pembaharuan dalam pendekatan melalui, antara lain, pengembangan masyarakat madani dengan kedudukan sama bagi semua kelompok masyarakat dan kehidupan bersama diatur melalui lembaga-lembaga perwakilan"[98]. Dari pandangan ini, Emil Salim, menyebut dua istilah yang eksotik, suatu istilah yang belum lazim, tetapi pernah diusulkan Djojodiguno[99], yaitu paguyuban dan patembayan. Kedua kata ini merupakan terjemahan dari istilah Jerman, yaitu gemeinschatf dan geselschatf yang dikemukakan oleh Ferainand Tonies dan digunakan juga oleh Max Weber.

---

[97]M. Dawam Rahardjo, *Masyarakat Madani Di Indonesia*, hlm. 17-18.

[98]Emil Salim, *Prospek Ekonomi Politik*, Makalah, Disampaikan Pada Pertemuan Mempersiapkan Berdirinya "Partai Amanat Nasional" (PAN), Di Wisma Tempo, Mega Mendung Puncak.

[99]Prof. Djojodiguno, Guru Besar Sosiologi, Universitas Gajah Mada, dan Terakhir Masih Aktif Mengajar pada awal tahun 1960-an.

Menurut Weber, civil society adalah geselschatf, yang merupakan masyarakat terorganisasikan [*organized*] yang telah keluar dari poia hubungan tatap muka dalam masyarakat tradisional. Dengan demikian, Emil Salim, menyatakan masyarakat madani sudah tertanam dalam masyarakat paguyuban di masa lalu, dengan melihat beberapa cirinya, misalnya adanya "persamaan kedudukan" di antara kelompok-kelompok manusia dan dilaksanakannya "musyawarah". Tapi untuk mencapai tarap masyarakat patembayan, diperlukan pembaruan pengembangan masyarakat madani[100].

Dari apa yang diuraikan Emil Salim, menjadikan masyarakat madani sebagai acuan reformasi total, tanpaknya mengharuskan untuk mencari dan mengidentifikasikan ciri-ciri dan sifat-sifat masyarakat madani yang telah ada dalam masyarakat Indonesia, karena sebenarnya sudah sejak lama substansi masyarakat madani itu menjadi wacana intelektual di Indonesia. Tetapi hal ini baru disadari ketika berkenalan dengan konsep atau teori masyarakat madani dan *civil society.* Maka dengan perkenalan itu, akan disadari pula apa yang ada dalam masyarakat Indonesia dan membandingkan dengan masyarakat madani sebagai konsep ideal atau teori dengan realitas dan sejarah masyarakat Indonesia[101]. Perkenalan dengan istilah "masyarakat madani" atau civil society, mulai menjadi wacana dikalangan intelektual dan masyarakat Indonesia. Istilah "masyarakat madani" mulai dipopulerkan di Indonesia, dengan tujuan untuk mewujudkan kemandirian yang cukup tinggi baik individu-individu maupun kelompok-kelompok masyarakat terhadap negara. Dewasa ini, istilah masyarakat madani semakin banyak disebut, mula-mula terbatas di kalngan intelektual, misalnya Nurchalis Madjid, Emil Salim dan Amin Rais, kemudian pada perkembangannya istilah ini juga disebut-sebut dan diikuti oleh tokoh-tokoh

[100]M. Dawam Rahardjo, *Masyarakat Madani di Indonesia*,..., hlm. 18.
[101]Ibid, hlm. 19.

pemerintah dan politik[102]. Maka penyebutan istilah "masyarakat madani" atau *civil society* oleh tokoh-tokoh negara dan politik merupakan peristiwa penting, karena "masyarakat madani" dimaksudkan adalah sebagai pernyataan ide reformasi untuk "menyeimbangkan kekuasaan negera dengan kekuasaan masyarakat" yang berarti, sebagaimana dijelaskan oleh Emil Salim, memerlukan langkah-langkah untuk "memasang rambu-rambu pembatas kekuasaan negara disatu pihak dan memberdayakan masyarakat untuk menumbuhkan kekuasaanya di pihak lain". Pernyataan ini muncul, sebagai tendensi "masyarakat baru" adalah sebagai upaya untuk meminimalkan kekuasaan negara dan memperluas ruang publik, atau membangun kemandirian masyarakat berhadapan dengan negara. Maka istilah "masyarakat madani" sebenarnya merupakan wacana yang muncul dari gerakan masyarakat dan partai-partai politik dan bukan oleh birokrat, apalagi birokrat militer. Namun di Indonesia pada era reformasi, istilah ini justru muncul dan dikehendaki oleh totoh-tokoh negara dan pemerintahan sendiri dan lebih dari itu konsep masyarakat madani sudah dijadikan acuan[103] untuk mewujudkan suatu masyarakat Indonesia baru, yaitu terciptanya suatu sistem berkeadilan, demokratis, dan menghargai adanya perbedaan di masyarakat.

Ketika momentun "era reformasi" muncul sebagai penolakan atas politik Orde Baru, masyarakat Indonesia berkembang pemikiran untuk membentuk sebuah masyarakat baru Indonesia. Pemikiran tersebut muncul dalam berbagai diskusi-diskusi, seminar-seminar dan simposium yang digelar untuk membicarakan konsep "masyarakat madani". Sebuah simposium yang diselenggarakan ITB pada tanggal 6 Juni 1998[104], dengan tema "Pencerahan Menuju Indonesia Baru". Pada acara

---

[102]Tokoh Pemerintah dan Politik yang menyebut-nyebut istilah masyarakat madani, seperti mantan Presiden BJ. Habibie,mantan Ketua DPR/MPR,H.Harmoko dan tokoh-tokoh militer,seperti Jenderal Wiranto dan Jenderal Susilo Bambang Yudoyono dan lain-lain [Sufyanto, *,Masyarakat Tamaddun Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurchalis Madjid,* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar Offset, 2001), hlm 94].

[103]M. Dawam Rahardjo, *Masyarakat Madani Di Indonesia*, hlm. 19-20.

[104]Simposium yang diselenggarakan ITB pada tanggal 6 Juni 1998, dihadiri oleh tokoh pemikir yang ikut berbicara dalam forum itu, misalnya, Iskandar Alisahbana, Agung Gumelar, I Dewa Gede Raka, M. Amien Rais, Lockman Sutrisno, Susilo Bambang Yudoyono dan Satjipto Rahardjo [M. Dawam Rahardjo, *Masyarakat Madani Di Indonesia*, hlm. 20].

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

tersebut, istilah yang mula-mula dipakai dalam berbagai wacana adalah "masyarakat baru Indonesia" atau "masyarakat Indonesia yang Modern", tetapi istilah-istilah tersebut kurang mengandung substansi. Ada hal yang menarik pada simposium tersebut, yaitu tak seorang pun yang menyebut istilah "masyarakat madani" atau *civil society* yang menunjukkan betapa istilah itu belum mendapat perhatian atau mungkin belum dikenal di kalangan ilmuwan senior sekalipun[105]. Walaupun demikian, dari sekian pembicara dalam simposium tersebut menurut Dawam Rahardjo hanya dua orang memiliki rumusan yang tepat tentang "masyarakat baru Indonesia", yaitu Loekman Sutrisno dan Agung Gumelar. Loekman Sutrisnoi, mencoba merumuskan secara singkat masyarakat baru Indonesia, sebagai berikut : "Masyarakat Indonesia baru adalah masyarakat yang memiliki ciri-ciri, yaitu : *Pertama,* masyarakat yang berlandaskan sistem politik dan ekonomi yang demokratis. *Kedua,* masyarakat yang menjunjung tinggi hak sipil dari individu maupun kelompok dalam masyarakat"[106]. Sedangkan Agung Gumelar, dalam makalahnya berjudul "Masyarakat Baru Menuju Pencerahan Indonesia Baru", mencoba membuat rumusan yang lebih tuntas, yaitu :

> Masyarakat baru yang dikehendaki adalah masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera, masyarakat maju dalam arti siap menerima dengan cepat, segenap perubahan-perubahan serta mampu memanfaatkan dan beradaptasi dengan perkembangan Iptek; gambaran masyarakat maju seperti ini akan menjadikan masyarakat yang lebih dinamis". Masyarakat madani adalah masyarakat yang memiliki sikap mental yang berkepribadian, mampu mengambil keputusan tanpa dipengaruhi masyarakat lain, serta berani bertanggungjawab dan mampu bekerja sama. Dengan demikian, masyarakat yang madani adalah masyarakat yang berdaya saing dan memiliki posisi tawar menawar atau "bargaining position" yang kuat. Sedangkan, masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang memiliki kualitas hidup yang baik, diukur antara lain dari pemerataan dan keterjangkauan pendidikan, pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan hidup, baik yang primer maupun yang sekunder[107].

Apa yang dikemukakan di atas, "sebenarnya merupakan inti dari gambaran masyarakat masa depan, sebagaimana dirumuskan Haryono Suyono[108], bahwa

---

[105]Seminar ITB bertema *"Pencerahan Menuju Indonesia Baru"*, diterbitkan dalam Jurnal Studi Pembangunan, Vol.1,No.3, Juni 1998., dan M. Dawam Rahardjo, *Masyarakat Madani Di Indonesia*, hlm. 20.

[106]Loekman Sutrisno, *Pencerahan Menuju Indonesia Baru*, hlm. 36.

[107]Jurnal Studi Pembangunan, hlm. 21., dalam M. Dawam Rahardjo, *Masyarakat Madani Di Indonesia*, hlm 21.

[108]Haryono Suyono, pada saat itu sebagai Menteri Kependudukan, Kepala BKKBN.

masyarakat masa depan itu tersimpul dalam kata-kata "masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera". Agung Gumelar, lebih memperincinya dengan ciri-ciri masyarakat dalam konteks perubahan sosial dewasa ini[109] sedang mengalami perubahan menuju masyarakat yang terjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dan kestabilan masyarakat, keterbukaan, keberdayaan, keberadaban, keadilan dan demokrasi.

Gerakan Muhammadiyah, mengajukan istilah yang lebih konseptual dan mengandung substansi, yaitu "masyarakat utama". Istilah ini merupakan terjemahan dari istilah Qur'an, yaitu *"khayru ummah",* yang juga membutuhkan penjelasan dan penggalian yang tuntas dari al-Qur'an dan sejarah Nabi Mauhammad Saw. Oleh sebab itu, dalam mensubstansikan istilah-istilah seperti "masyarakat baru", "masyarakat modern", "masyarakat utama", "masyarakat madani" ataupun *"khayru ummah",* diperlukan bantuan dunia teori, dan ternyata teori *civil society* sangat membantu untuk memahami apa yang dimaksud dengan istilah-istilah tersebut[110], walaupun konsep *civil society* bukan konsep baru, tetapi bagi masyarakat Indonesia konsep ini baru disosialisasikan sekitar tahun 1998. Dengan demikian, istilah masyarakat madani adalah sebuah konsep yang perlu dilaborasi lebih lanjut. Banyak pakar yang menyatakan bahwa dalam rangka mempelajari dan mewujudkan konsep masyarakat madani yang menjadi tujuan reformasi, tanpaknya teori civil society sebagai teori sosial sangat membantu memahaminya untuk mewujudkan masyarakat madani. Pertanya, apa saja yang menjadi elemen penting terbentuknya masyarakat madani itu. Anwar Ibrahim, menyatakan bahwa "prinsip dan ide mendasar masyarakat madani, yaitu prinsip-prinsip moral, keadilan, keseksamaan, musyawarah dan demokrasi. Prinsip-prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individual dan kestabilan masyarakat[111].

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[109]M. Dawam Rahardjo, *Masyarakat Madani Di Indonesia,* hlm. 22.

[110]Ibid, hlm. 22.

[111]Anwar Ibrahim, 1 *Islam dan Pembentukan Masyarat Madani*, Makalah disampaiakn dalam Festival Istiqlal, 16 September 995,, di Jakarta., dan dalam Aswad Mahasin (eds.), Ruh Islam dalam Budaya Bangsa: Wacana Antara Agama dan Bangsa,YFI, 1999, Jakarta,hlm.22.

Ryaas Rasyid, menyatakan bahwa masyarakat madani di Indonesia baru berada dalam posisi pertumbuhan, bahkan masih berupa emberio. Masyarakat madani sedang tumbuh, menurutnya, karena masyarakat madani bangkit berdasarkan banyak faktor pendukung, yaitu: *Pertama,* adanya perbaikan di sektor ekonomi, yakni semakin tinggi pendapatan masyarakat menyebabkan mereka tidak tergantung kepada pemerintah, bahkan secara logika justru pemerintah yang tergantung kepada masyarakat karena harus membayar pajak untuk mendukung kegiatan pemerintah. *Kedua*, tumbuhnya intelektualitas. Artinya semakin intelek suatu masyarakat, maka secara umum semakin miliki komitmen untuk independen. *Ketiga,* terjadinya pergeseran budaya dari masyarakat yang berbudaya paternalistik menjadi budaya yang lebih modern dan lebih independen. Ryaas, menunjuk kehadiran LSM-LSM dan lembaga-lembaga profesi sebagai wujud emberio masyarakat madani[112]. Dari pandangan ini tercermin bahwa elemen dasar terbentunya masyarakat madani adalah: [1] Masyarakat yang memiliki moral dan berperadaban yang unggul, menghargai persamaan dan perbedaa [plural], keadilan, musyawarah, demokrasi. [2] Masyarakat yang tidak tergantung kepada pemerintah pada sektor ekonomi. [3] Tumbuhnya intelektualis yang memiliki komitmen idenpenden, dan [4] Bergesernya budanya paternalistik menjadi budaya yang lebih modern dan lebih independen.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dari pandangan di atas, tercermin "masyarakat madani" yang disosialisasikan di Indonesia, masih berakar dari kata *civil society* atau *al-muftama' al-madani*, adalah "konsep yang meliputi persoalan kultur dan persoalan kelembagaan atau struktur. Secara kultural, komponen inti dari civil society sesungghnya merupakan persoalan kualitas, nilai-nilai dan norma-norma. Dengan kata lain, *civil society* adalah menyangkut dengan persoalan etika atau bangunan etika. *The tradition of civil society is first and foremost an ethical edifice.* Secara kelembagaan [struktural], *civil society* berkenaan dengan persoalan institusi-institusi negara atau masyarakat yang menjadi

[112]Saiful Hamimanti dan M. Ali Said JSD, *Masyarakat Madani: Mimpi Lama*,..., hlm. 6.

sarana atau perangkat manusia dalam menciptakan masyarakat yang beradab. Dengan demikian, masyarakat madani atau *civil society* sesungguhnya merupakan konsep politik, budaya, pendidikan, ekonomi, filsafat, sistem sosial, agama, sejarah, dan sebagainya[113]. Sedangkan, M. Dawam Rahardjo dalam tulisannya yang berjudul "Gerakan Keagamaan dan Penguatan *Civil Society*", menggambarkan bahwa masyarakat madani adalah sebuah masyarakat ideal, di mana *civil society,* yang hingga kini masih sulit ditemukan terjemahannya yang tepat itu, adalah merupakan bagian saja dari masyarakat madani, karena masyarakat madani cakupannya lebih luas dari *civil soceity.* Konsep masyarakat madani juga mencakup polical society atau negara. Konsep *civil society* diartikan sebagai suatu "ruang publik" yang independen dari negara sebagaimana didefenisikan oleh Habermmas. Tapi ruang publik bebas ini merupakan bagian yang esensial dari masyarakat madani, bahkan merupakan ciri utamanya[114]. Artinya, kaitannya dengan fungsi negara dalam masyarakat madani, yaitu : *Pertama,* meniadakan ketidakadilan dan kesenjangan dalam masyarakat. *Kedua,* melindungi kepentingan penduduk yang universal. Kepentingan tersebut meliputi elemen sipil, politik dan sosial[115]. Nurchalis Madjid, menyatakan masyarakat madani bukanlah sebuah tatanan masyarakat tanpa militer, tetapi sebuah masyarakat yang menyelesaikan persoalan dengan keadaban *[civility]*[116], yaitu suatu "masyarakat yang kepentingan anggotanya tentang hak milik, hak kehidupan, kebebasan dan hak-hak lainnya terjamin[117].

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[113]Ahmad Baso, 1999, *Civil Society sebagai Kritik; Perdebatan Masyarakat Sipil dalam Islam Indonesia*, Makalah Dipresentasikan dalam Seminar Nasional Pra-Muktamar Nudengan, dengan Tema "NU dan Pembentukan Masyarakat Mutamaddin [Sipil]", Taanggal, 4-5 September, Hotel Sahid, Yogyakarta, hlm. 1-2., dan Teks berbahasa Inggris di atas dikutip Ahmad Baso dari Adam Seligman, *The Idea of Civil Society*, [New York; The Free Press, 1992], hlm. 205., dan Imam Syafi'ie, dkk., 2001, *Transformasi Budaya Masyarakat Menuju Terciptanya Masyarakat Sipil: Studi Tentang Kesadaran Pluralistis dalam Pemberdayaan Masyarakat Bidang Politik*, [Hasil Penelitian], Lembaga Penelitian UII, Yogyakarta, hlm. 2., dan Masykuri Abdillah, 1999, Islam dan Masyarakat Madani, Kompas, 27 Februari, hlm. 4.

[114]M. Dawam Rahardjo, *Gerakan Keagamaan dan Penguatan Civil Soceity,* sebuah pengantar untuk Asep Gunawan dan Dewi Nurjulianti, Gerakan Keagamaan dalam Penguatan Civil Society: Analisis Perbandingan Visi dan Misi LSM dan Ormas Berbasis Kegamaan, (Jakarta: LSAF dan TAF, 1999), hlm. xxiii-xxiv.

[115]Agus Suradika, Gerakan Muhammadiyah dan Poses Pemberdayaan Masyarakat Madani, (2001), hlm. 221, dan dalam Sufyanto, *Masyarakat Tamaddun: Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurchalis Madjid,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), hlm. 100.

[116]Sidarta Gautama dan Aries Budiono, *Moralitas Politik dan Pemerintah yang Bersih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm.97.

[117]Sufyanto, *Masyarakat Tamaddun,...*, hlm. 100.

Dengan demikian, akar masyarakat madani sudah ada di Indonesia, karena ciri-ciri masyarakat tersebut sudah ada dalam masyarakat Indonesia, yaitu dengan terbentuk masyarakat yang solid dan bertanggungjawab. Secara historis, kelembagaan masyarakat madani sudah muncul di Indonesia akbibat modernisasi yang ditandai dengan muncul pertumbuhan sosial baru yang berbeda dengan masyarakat tradisional, berupa perubahan sosial ekonomi pada masa kolonial. Selain itu, di masyarakat Indonesia sebenarnya telah lahir masyarakat madani atau telah memiliki tradisi civil society sejak zaman kolonial, dengan munculnya organisasi-organisasi kemasyarakatan atau organisasi sosial, politik, kebudayaan secara independen dan aktif mengimbangi peran negara. Dari pandangan ini, sebenarnya masyarakat Indonesia dan pemimpin-pemimpinnya telah mempunyai persepsi tentang "masyarakat madani" yang dibayangkan dan dicita-citakan yaitu terbentuknya masyarakat yang terjamin kepentingan dan hak milik, hak kehidupan, kebebasan dan hak-hak lainnya terjamin, masyarakat yang maju, masyarakat yang mandiri dan sejahtera, masyarakat yang siap menerima dengan cepat segenap perubahan-perubahan serta mampu memanfaatkan dan beradaptasi dengan perkembangan Iptek, sehingga menjadikan masyarakat yang lebih dinamis. Masyarakat yang memiliki sikap mental dan berkepribadian unggul, bertanggungjawab dan mampu bekerja sama, memiliki kualitas hidup yang baik, pemerataan dan keterjangkauan pendidikan, pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan hidup, baik yang primer maupun yang sekunder.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bentuk "masyarakat madani" di Indonesia yang dinginkan adalah masyarakat yang memiliki kemandirian aktivitas warga masyarakatnya, berkembang sesuai dengan potensi budaya adat istiadat dan agama. Masyarakat yang mewujudkan dan memberlakukan nilai-nilai taqwa,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

kejujuran, keadilan, prinsip kesetaraan [persamaan], penegakan hukum, jaminan kesejahteraan, kebebasan, kemajemukan [pluralisme] dan perlindungan terhadap kaum minoritas. Masyarakat madani di Indonesia, merupakan suatu masyarakat ideal yang dicita-citakan dan akan diwujudkan dengan kemandirian yaitu dengan prinsip-prinsp kesukarelaan, keswadayaan, keswasembadaan dan keterkaitan dengan norma atau nilai dalam masyarakatnya sangat plural. Kehidupan manusia Indonesia akan mengalami perubahan yang fundamental yang berbeda dengan kehidupan masayakat pada era Orde Baru, karena lahir masyarakat Indonesia yang menghargai prinsip-prinsip moral yang akan menjamin keseimbangan kebebasan dan kemandirian individual, keluarga, kestabilan masyarakat dan lembaga-lambaga sosial. Jika demikian, maka "secara filosofis masyarakat madani di Indonesia adalah sebuah masyarakat terbuka yang ditegakkan atas landasan nilai-nilai etik-moral"[118].

D. Perubahan Menuju Masyarakat Madani di Indonesia

Proses perubahan menuju masyarakat madani sangat terkait dengan kehidupan politik bangsa, budaya, pendidikan, berpikir kritis, hukum, keadilan, keterbukaan, kemajemukan atau pluralisme dan perlindungan terhadap kaum minoritas. Dalam masyarakat madani tercipta "keseimbangan antara kebebasan individu dan kestabilan masyarakat. Hadir pula dorongan, upaya dan inisiatif individu dalam bidang pemikiran, seni, ekonomi, teknologi, dan pelaksanaan pemerintahan yang mengikuti undang-undang dan hukum yang berlaku dengan baik"[119]. Selain itu, tercipta "kemandirian individu, keluarga, lembaga-lembaga sosial lainnya seperti media massa, betul-betul dihargai tanpa ada pengaruh langsung dari negara atau

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[118]Ahmad Syafii Maarif, *Universalisme Nilai-nilai Politik Islam Menuju Masyarakat Madani*, dalam Jurnal Studi Islam, PROFETIKA, Vol.1, No. 2 , ISSN-1411-0881, (Solo: Program Magister Studi Islam, UMS, Juli 1999), hlm. 173.

[119]Anwar Ibrahim, *Islam dan Pembentukan Masyarakat Madani*, Makalah Disampaikan dalam Ferstival Istiqlal, 16 September 1995, di Jakarta. dalam Sjafri Sairin, Sjafri Sairin, *Masyarakat Madani Dan Tantangan Budaya*, dalam buku: *Membangun Masyarakat Madani, Menuju Indonesia Baru Milenium Ke-3,* dalam: Taufik Abdullah, dkk., *Membangun Masyarakat Madani, Menuju Indonesia Baru Milenium Ke-3,* Tim Editor Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, (Yogyakarta: Aditya Media, 1999), hlm. 90.

pemerintah"[120] , dan "masyarakat yang dapat mengembangkan sumberdayanya tanpa harus dikontrol oleh negara secara ketat, dan keadilan sosial berjalan sebagaimana mestinya"[121].

Masyarakat Indonesia sedang berada dalam masa transformasi, era reformasi telah lahir dan masyarakat Indonesia ingin mewujudkan perubahan dalam semua aspek kehidupannya[122] menuju kehidupan masyarakat madani. Beriringan dengan itu, munculnya tuntutan untuk mewujudkan pemerintahan bersih, pada satu sisi dan cita-cita mewujudkan masyarakat madani [*civil society*], nampaknya tidak boleh ditawar-tawar lagi. Tetapi proses untuk menuju dan mewujudkan masyarakat madani tentu tidak mudah, karena diperlukan beberapa persyaratan untuk mengimplemtasikan konsep tersebut, tantangan yang dihadapi, serta peluang melakukan perubahan menuju masyarakat madani yang dicita-citakan.

1. Persyaratan Menuju Masyarakat Madani

Sebagai sebuah gagasan tentang sistem kehidupan masyarakat madani, tentu tidak mudah untuk dicapai begitu saja. Dibutuhkan beberapa persyaratan agar gagasan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik. Beberapa persyaratan yang diperlukan untuk mewujudkan masyarakat madani, yaitu : *Pertma,* pemahaman yang sama [*One Standard*], *Kedua,* adanya keyakinan [*Confidence*] dan saling percaya [*Social Trust*], *Ketiga,* satu kesatuan atau satu hati dan saling tergantung, *Keempat*, perlu adanya kesamaan pandangan tentang tujuan dan misi[123], menuju masyarakat madani. Persyaratan tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

---

[120]Chandra Muzaffar, "*Pembinaan Masyarakat Madani: Model Malaysia*", *dalam Institusi Strategi Pembangunan Malaysia (MINDS), Masyarakat Madani: Suatu Tinjauan Awal*, (Kuala Lumpur: Ras Grafika, 1998), hlm.29., dan "masyarakat yang dapat mengembangkan sumberdayanya tanpa harus dikontrol oleh negara secara ketat, dan keadilan sosial berjalan sebagaimana mestinya"[Ibid, 90].

[121]Ibid, 90.

[122]H.A.R. Tilaar, *Pendidikan, Kebudayaan, dan...*, hlm. 3.

[123]Sjafri Sairin, *Masyarakat Madani Dan Tantangan Budaya*, hlm. 91-92.

a. Pemahaman yang Sama [*One Standard*]

Pada tingkat awal diperlukan pemahaman bersama dikalangan masyarakat, tentang apa dan bagaimana karakteristik masyarakat madani. Paling tidak secara konsepsional prinsip-prinsip dasar masyarakat madani harus dipahami secara bersama, sehingga relatif semua masyarakat dapat memahami apa yang digariskan dalam prinsip-prinsip dasar masyarakat madani tersebut. Masyarakat harus memahami lebih dahulu bagaimana mekanisme sistem yang terdapat dalam masyarakat madani itu dalam dinamika kehidupan masyarakat. Dengan pemahaman konsep, relatif akan menjadi lebih mudah bagi masyarakat untuk melangkah untuk menuju masyarakat madani. Karena itu, sosialisasi tentang sistem masyarakat tersebut perlu dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai kesempatan yang ada.

b. Keyakinan [*Confidence*] dan Saling Percaya [*Social Trust*]

Perlu menumbuhkan dan mengkondisikan keyakinan di kalangan masyarakat bahwa masyarakat madani adalah bentuk masyarakat yang ideal, masyarakat pilihan yang terbaik dalam mewujudkan suatu sistem sosial yang dicita-citakan. Maka dengan keyakinan yang tumbuh di kalangan masyarakat, proses untuk menuju masyarakat madani dapat dilakukan. Seiring dengan itu harus perlu ditumbuhkembangkan rasa saling percaya di kalangan masyarakat. Penanaman rasa saling percaya sangat diperlukan, karena dalam sejarah Orde Baru telah menanamkan rasa curiga dalam kehidupan masyarakat pada awal kekuasaanya. Rasa kuatir akan adanya gangguan stabilitas dan pembangunan nasional, maka pada awal pemerintahan Orde Baru "semua orang perlu dicurigai". Maka untuk mewujudkan cita-cita bersama, yaitu membangun masyarakat madani, rasa curiga perlu dihilangkan dan perlu ditumbuhkembangkan rasa saling percaya antara komponen yang terdapat dalam masyarakat dengan baik. Rasa saling percaya antara lain, dapat ditumbuhkan dengan meningkatkan rasa keadilan dan kejujuran dalam berbagai aspek kehidupan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

c. Satu Hati dan Saling Tergantung

Apabila telah terbentuknya saling percaya di kalangan masyarakat, tahap berikutnya diperlukan juga kondisi kesepakatan, satu hati dan kebersamaan dalam menentukan arah kehidupan yang dicita-citakan. Untuk itu, refleksi dari kondisi kesepakatan, satu hati dan kebersamaan akan tergambar dengan semakin menguatnya rasa saling tergantung (*interdependency*) antara individu dengan kelompok dalam masyarakat. Dengan keadaan seperti itu, tingkat saling membutuhkan antara berbagai segmen masyarakat akan menjadi bagian terpenting dari moral kehidupan masyarakat dan akan menjamin keseimbangan antara kebebasan individual dan kestabilan masyarakat.

d. Kesamaan Pendangan tentang Tujuan dan Misi

Jika kondisi kesepakatan, satu hati dan kebersamaan sudah tertanan dalam kehidupan masyarakat, maka kesamaan pandangan baik mengenai tujuan dan misi menjadi lebih mudah untuk dapat diwujudkan, karena semua lapiran segmen masyarakat ingin mewujudkan cita-cita yang sama dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan perbedaan-perbedaan yang ada dalam kehidupan masyarakat tentu

tidak dapat dinafikan begitu saja, tetapi perbedaan itu bukan untuk diarahkan menjadi suatu yang bersifat *uniformity* [menyeragamkan] atau sameness [kesamaan], tetapi dalam wujud unity [kesatuan] dan *Onenees* [satu kesamaan][124]. Perbedaan tersebut, juga menjadi kekayaan pluralisme dalam kehidupan masyarakat yang dicita-citakan bersama.

Jika keempat persyaratan di atas dapat dipenuhi, maka relatif akan lebih mudah untuk merumuskan berbagai kebijakan dan strategi untuk mewujudkan masyarakat madani yang dicita-citakan. Maka, kunci utama dari keberhasil mewujudkan masyarakat madani yang dicita-citakan itu, secara kultural antara lain memang terletak pada prasyarat-prasyarat yang disebutkan di atas. Kemudian selain keempat persyaratan tersebut, yang harus diperhatikan adalah tantangan yang hadapi dewasa ini untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan tersebut.

2. Tantangan Menuju Masyarakat Madani

Untuk mewujudkan masyarakat madani dengan ciri-ciri serta persyaratan yang dikemukakan di Indonesia tentu bukan merupakan hal yang mudah. Diperlukan upaya, kerja keras dan daya tahan yang tinggi untuk mengatasi berbagai kendala dan tantangan yang hadir, baik kendala yang berhubungan dengan struktur sosial, maupun kendala yang berkaitan dengan keadaan masyarakat Indonesia yang pada saat ini sedang mengalami berbagai guncangan"[125] sepeti krisis moneter, tuntutan pemerintahan demokrasi, bersih serta berwibawa, terjadi konflik antara masyarakat dibeberapa daerah yang mengarah kepada disintegrasi bangsa. Secara umum ada dua kendala yang dihadapi dalam mewujudkan masyarakat madani, yaitu kendala yang bersifat struktural maupun kultural. Secara struktural, dominasi negara dan birokrasi kekuasaan masih sangat kuat, sehingga wilayah masyarakat madani terdesak. Sedangkan secara kultural, warga masyarakat masih terperangkap dalam

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[124]Ibid, hlm. 91-92.
[125]Ibid, hlm. 89-90.

mentalitas dan budaya paternalistik. Orientasi dan ketergantungan pada pemimpin dan penguasa masih tinggi, membuat kemandirian kurang berkembang[126].

Secara struktural, dominasi negara dan birokrasi kekuasaan masih sangat kuat, kondisi ini sebagai akibat dari budaya politik yang ditinggalkan Orde Baru, karena selama Orde Baru telah tercipta suatu kehidupan bangsa tidak sesuai dengan cita-cita UUD 1945. Pemerintahan Orde Baru yang represif telah menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang tertekan, tidak kritis, manusia yang bertindak dan berpikir dalam acuan suatu struktur kekuasaan yang hanya mengabdi kepada kepentingan sekelompok kecil rakyat Indonesia[127]. Masyarakat Indonesia selama 32 tahun telah terkooptasi dengan budaya politik pemerintah Orde Baru. Kehidupan "demokrasi telah dipasung sehingga tidak ada kebebasan berpendapat apalagi berbeda pendapat. Pikiran manusia diarahkan kepada hanya ada satu kebenaran yaitu untuk mempertahankan struktur kekuasaan yang ada"[128]. Politik sentralisasi kekuasaan pemerintah Orde Baru melalui korporatisme dan birokratisasi di hampir seluruh aspek kehidupan. Kebijakan pemerintah yang otoriter, menyebabkan oraganisasi-organisasi kemasyarakatan tidak memiliki kemandirian, tidak memiliki kekuatan kontrol terhadap jalannya pemerintahan"[129]. Partai-partai politikpun tidak berdaya melakukan kontrol terhadap pemerintah dan tawar-menawar dengan pemerintah dalam menyampaikan aspirasi rakyat. Hanya ada beberapa organisasi keagamaan yang agak memiliki kemandirian dan kekuatan dalam mempresentasikan diri sebagai unsur dari masyarakat madani, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Pengaruh politik tokoh dan organisasi sosial keagamaan ini bahkan lebih

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[126]Editoril, *Menuju Masyarakat Madani*, Jurnal Online, Badan Pekerja MPR RI Tahun 2000, Edisi No.:09, Tanggal 23 Mei 2000., Prom: http://mpr.wasantara.net.id/ bp_2000/ edisi9/editorial.htm., 31 Desember2001, hlm. 1.

[127]H.A.R. Tilaar, *Pendidikan, Kebudayaan*,..., hlm. 4.

[128]Ibid, hlm. 5.

[129]Masykuri Abdillah, *Islam dan Masyarakat Madani*, 27 Februari 1999.

besar daripada partai-partai politik yang ada, yang sejak semula memang telah terkooptasi oleh pemerintah Orde Baru"[130].

Ketika pemerintahan Orde Baru berakhir, muncul pemerintahan reformasi di bawah pimpinan Presiden Habibie, yang memiliki komitmen yang kuat untuk mendorong terwujudnya masyarakat madani di indonesia. Dengan komitmen tersebut, di tengah masyarakat terutama kaum cendekiawan dan akademis ada keinginan untuk mewujudkan suatu masyarakat di mana kedudukan negara dan masyarakat berada dalam status berimbang. Masyarakat Indonesia sedang berupaya untuk melakukan reformasi kehidupan secara total, berupaya meninggalkan pola-pola kehidupan masyarakat seperti pada masa Orde Baru, menuju masyarakat baru yaitu masyarakat madani. Namun untuk beralih dari satu struktur lama [Orde Baru] kepada struktur masyarakat baru [madani] ternyata tidak mudah, karena pola-pola kehidupan masyarakat Orde Baru tidak bisa begitu saja ditinggalkan. Sebab berbagai pola kehidupan masyarakat di masa Orde Baru telah begitu kuat melekat dan tidak bisa begitu saja dilepaskan dari baju kehidupan masyarakat[131]. Sedangkan untuk segera masuk ke wilayah kehidupan masyarakat madani juga tidak mudah, karena pola kehidupan masyarakat yang diimpikan itu masih perlu disosialisasikan kepada masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Secara kultural, tantangan sosial budaya yang cukup berat adalah pluralitas masyarakat Indonesia. Pluralitas tidak hanya berkitan dengan budaya saja, tetapi juga persoalan sosial, politik dan ekonomi masyarakat. Meskipun bangsa Indonesia telah merdeka lebih dari 53 tahun, pluralitas masyarakat itu kurang dimanfaatkan sebagai potensi yang didinamisasikan untuk memacu pembangunan. Kebijakan politik pembangunan selama ini justru berkesan menjadikan masyarakat Indonesia yang majemuk menjadi suatu masyarakat yang mengarah pada bentuk uniformitas

---

[130]Ibid, hlm. 4.

[131]Sjafri Sairin, *Masyarakat Madani Dan Tantangan Budaya*, hlm. 96.

[menyeragamkan]. Usaha uniformitas melahirkan tuntutan rasa kedaerahan yang menonjol. Kondisi ini dapat dilihat dari semakin ramainya perdebatan tentang pentingnya putra daerah untuk diangkat menjadi pejabat[132]. Untuk itu, usaha uniformitas yang dilakukan pemerintah telah membawa kontra produktif. Masyarakat kurang begitu percaya dengan pemimpin dari daerah lain yang akan dapat membawa kesejahteraan bagi diri dan daerah mereka. Rasa saling tidak percaya inilah telah menjadi kendala serius dalam mewujudkan masyarakat madani. Selain itu, juga terdapat kesan yang kuat bahwa solidaritas sosial makin menipis dalam kehidupan masyarakat akhir-akhir ini. Hal ini dapat dicermati dari berbagai praktek kehidupan masyarakat kita saat ini. Masyarakat seolah-olah tidak begitu perduli lagi dengan kehidupan orang lain. Masyarakat Indonesia dulu dipandang termasuk kategori masyarakat yang kuat solidaritasnya, sekarang menjadi masyarakat yang mementingkan diri sendiri. Egoisme menjadi semakin menonjol yang mewarnai berbagai bentuk kehidupan masyarakat. Egoisme yang semakin menebal itu telah menjadikan mentalitas masyarakat Indonesia tidak mudah untuk mengakui keunggulan masyarakat atau bangsa lain. Beriringan dengan gejala itu, terkesan pula rasa percaya diri pada masyarakat pun semakin menurun. Hal ini jelas berkaitan erat dengan sejarah Orde Baru yang menanamkan rasa curiga pada awal kekuasaannya. Rasa kuatir akan adanya gangguan pada stabilitas dan pembangunan nasional, maka pada awal pemerintahan Orde Baru "semua orang perlu dicurigai"[133]. Apabila demikian, maka dapat diduga bagaimana besarnya hambatan untuk menyamakan pandangan dalam usaha merintis jalan menuju masyarakat madani yang dicita-citakan. Sebab salah satu pilar yang penting bagi terwujudnya masyarakat madani adalah hadirnya solidaritas sosial dan rasa percaya sesama masyarakat dalam menuju kesamaan pandangan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[132] Ibid, hlm. 93.
[133] Ibid, hlm. 93-94.

Persoalan ekonomi, yaitu kue pertumbuhan ekonomi ternyata hanya dinikmati oleh Jawa, terutama Jakarta. Jika dipersempit lagi bahwa yang menikmati kue pertumbuhan adalah para penguasa dan sekelompok orang yang berada di dalam lingkungan kekuasaan. Tentang struktur kemiskinan juga menunjukkan adanya kepincangan, angka 89% penduduk tidak miskin sebenarnya mayoritas dari mereka berada disekitar batas garis kemiskinan, sedangkan peningkatan pertumbuhan ekonomi diikuti dengan melebarnya gap antara penduduk kaya dengan miskin, Jakarta dengan luar Jakarta, Jawa dengan luar Jawa[134]. Selain itu juga terjadi krisis ekonomi yang tengah dialami Indonesia saat ini, telah menimbulkan kegetiran yang berkepanjangan, lumpuhnya sejumlah besar aktivitas produksi membawa petaka terhadap lapisan pekerja, terutama disektor swasta menengah dan besar dan langkah pemutusan hubungan kerja [PHK] yang menyebabkan angka pengangguran semakin membengkak dan angka kemiskinan telah melonjak 3 kali lipat. "Himpitan kehidupan ekonomi akibat krisis moneter yang berkepanjangan, menyebabkan banyak orang mengalami kegalauan budaya dan hilangnya identitas atau krisis identitas diri. Kerusuhan dan penjerahan terjadi dimana-mana, yang beriringan dengan upaya keras untuk membongkar praktik KKN[135], belum juga terwujud atau menampakan hasil yang berarti sampai sekarang ini. Padahal semua penjarahan, kerusuhan dan main hakim sendiri itu bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat madani yang ingin diwujudkan. Oleh karena itu, jelas benar telah terjadi suatu perubahan yang menuju pada terbentuknya "masyarakat ambigu" -masyarakat yang tak jelas- yang disebut Victor Turner sebagai masyarakat yang anti struktur[136]. Masyarakat yang menjadi "ambigu, struktur yang mana sepatutnya dia ikuti, tidak jelas. Karena ambiguitas itu akhirnya membawa mereka pada pola-pola kehidupan yang bersifat antistruktur, yaitu "tidak

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[134]Agus Joko Purwanto, *Tantangan Perubahan*, From: http://psi.ut.ac.id/Jurnal/101resensi2.htm., 28 Desember 2001, hlm. 1.

[135]Sjafri Sairin, *Masyarakat Madani Dan Tantangan Budaya*, hlm. 96.

[136]Victor Turner, *The Ritual Process: Structure and Anti-Structure*, (Ithaca: Cornel University Press), dalam Sjafri Sairin, *Masyarakat Madani Dan Tantangan Budaya*, hlm. 96.

berada di sana tidak pula berada di sini". Victor Turne, menyatakan bahwa "masyarakat yang tidak berada di sini dan juga di sana" dapat disebut masyarakat yang berada dalam keadaan liminality. Masyarakat seperti ini memang tidak mempunyai rujukan budaya yang jelas dan sangat mudah dipengaruhi, diprovokasi"[137].

Persoalan politik dan keamanan, pada era reformasi ini timbul berbagai ekses negatif, karena luapan-luapan emosional dan ketidakberaturan, berupa kebebasan yang tidak terkontrol dan masyarakat bertindak semaunya. Perilaku ini tercermin dari praktek kehidupan masyarakat, berupa kerusuhan, perkelahian antar pelajar dan penjarahan. Maraknya tindakan-tindakan anarki dan kriminalitas di kalangan masyarakat yang diiringi dengan tindakan kekerasan. Seorang pelaku kejahatan [pencuri] kebetulan tertangkap langsung dibunuh atau dibakar hidup-hidup. Perilaku semacam ini menggambarkan masyarakat "main hakim sendiri", tanpa mengingat apa yang dilakukan itu tentu melanggar hak asasi manusia. Beriringan dengan itu, "timbul pula gejala disintegrasi bangsa akibat konflik sosial yang bernuansa primordial, lahirnya gerakan separatisme di beberapa daerah. Gerakan separatisme [versi pemerintah] yang bergerak di Aceh dan di Irian Jaya, menuntut referundum untuk merdeka dan mengkampanyekan anti Negara Kesatuan Republik Indonesia yang cukup intensif [138]. Secara politik, negara dan bangsa kita sedang berhadapan dengan ancaman disintegrasi melalui gerakan separatisme. Beriringan dengan itu pula, di daerah Maluku, Maluku Utara dan Poso telah terjadi tragedi kemanusian berupa pertikaian antar masyarakat yang berbau suku, agama, ras dan antargolongan [SARA]. Tragedi kemanusiaan ini telah memakan korban yang tidak sedikit di kedua pihak yang bertikai. Semua sarana dan fasilitas, ekonomi, pendidikan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[137]Ibid, hlm. 97.

[138]KH. Abdurrahman Wahid, (Prediden Republik Indonesia), *Pidato Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 7 Agustus 2000*, From: http://istana.ri.go.id/speech/ind/07 agustus00.htm., 4 Januari 2001,hl.4.

tata sosial dan budaya rusak, bahkan berantakan. Solidaritas, persaudaraan, persatuan, kerukunan antar umat beragama, hukum, serta hak azasi manusia terkoyak-koyak dan hancur berantakan. Untuk merehabilitasi, memebutuhkan waktu kurang lebih 25 tahun, karena tragedi ini, tercipta suasana saling tidak percaya, curiga, saling membunuh, membantai dan mengusir kelompok yang kalah. Tercipta pula identitas yang digunakan untuk mewakili masing-masing kelompok yang bertikai di Maluku, yaitu "Acang" [Hasan] dan "Obet" [Robet] atau kelompok "putih" dan kelompok "merah". Sebutan "Acang" yang berasal dari kata Hasan sebagai nama Islam dan Obet dari Robet yang menunjukkan nama Nasrani dan kelompok "putih" sebagi simbul yang mewakili Islam dan kelompok "merah" simbul yang mewakili Nasrani. Kemudian di daerah Kalimatan barat dan timur, juga terjadi pertikaian etnis yaitu antara penduduk asli dan pendatang yang dipicu oleh hal-hal kecil, sehingga secara sistimatik etnis Madura teruir atau keluar dari daerah tersebut. Tanpaknya usaha penyelesaian kearah tersebut sudah dilakukan, pemerintah telah menerapkan pendekatan "darurat sipil", tetapi belum menampakan hasil yang berarti, memerlukan waktu yang cukup lama, karena antara masyarakat yang bertikai masih terpendam rasa benci, curiga, dendam, dan rasa saling tidak percaya antara sesama mereka.

Dari tragedi kemanusiaan tersebut, ada tiga akibat langsuung yang dialami masyarakat secara keseluruhan. *Pertama*, terjadi kecenderungan *lost generation* sebagai akibat dari kelumpuhan sektor pendidikan formal dan nonformal. *Kedua*, kelumpuhan indfrastruktur ekonomi, khususnya ekonomi umat. *Ketiga*, keruntuhan basis kultural yang menyangga keinginan hidup bertetangga antar umat beragama secara damai yang mengakibatkan kehancuran konstruksi sosial[139] . Selain itu, robeknya kohesi dan integrasi sosial, akibat belum kokoh dan melembaganya kerukunan, toleransi dan harmoni masyarakat yang berlangsung selama ini. Disharmoni sosial yang melibatkan agama dan suku di Maluku, Maluku Utara, Poso

dan Kalimantan Barat tersebut, jelas mengandung potensi disintegrasi bangsa yang sangat serius. Dengan demikian secara politik, "negara dan bangsa kita kini sedang berhadapan dengan ancaman disintegrasi teritorial melalui gerakan separatisme dan ancaman disintegrasi melalui konflik antar pemeluk agama dan antar suku"[140]. Kondisi ini, menjadi hambatan untuk menyamakan pandangan dalam merintis jalan menuju masyarakat madani. Sebab pilar penting bagi terwujudnya "masyarakat madani" adalah pemerintahan yang bersih, demokrasi, ekonomi yang stabil, masyarakat yang damai, saling percaya dan terbuka, masyarakat yang mengedepankan hukum dan menegakkan hukum yang adil dan berwibawa, mengahargai hak azasi manusia, menghargai perbedaan dan solidaritas sosial yang kuat dan juga "diperlukan *law enforcement* untuk mensosialisasikan nilai-nilai itu dalam kehidupan masyarakat"[141], sehingga masyarakat madani yang dicita-citakan dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Maka sosialisasi nilai-nilai yang mendukung terwujudnya masyarakat madani perlu menjadi bagian penting dari sistem pendidikan, karena pendidikan adalah kunci kemajuan bangsa di tengah-tengah tajamnya kompetisi global di segala bidang untuk menuju masyarakat madani yang dicita-citakan bangsa ini.

Persolan pendidiakn dan budaya, "krisis masyarakat Indonesia dewasa ini, di antaranya juga disebabkan oleh krisis pendidikan. Transformasi budaya sejak Orde Baru ternyata telah mengorbankan kemerdekaan dan hak-hak asasi manusia, serta nilai-nilai yang tidak menguntungkan rakyat banyak, terjadi marginalisasi nilai-nilai manusia, karena manusia dipinggirkan untuk kepentingan pertumbuhan nasional dan ekonomi yang henya menguntungkan" sekelompok orang. Pendidikan telah dipisahkan dari budaya bangsa, pendidikan tidak lagi diarahkan untuk melahirkan

---

[139]Suara Merdeka, *Maluku Pascakonflik Horizontal*, 21 Nopember, Form: http://www. suaramerdeka.com/ harian/ 0111/21/analisis1.htm., 31 Desember 2001, hlm. 1.

[140]KH. Abdurrahman Wahid, *Pidato Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Tahunan ...*, hlm. 3-4.

[141]Sjafri Sairin, *Masyarakat Madani Dan Tantangan Budaya*, hlm. 99.

manusia-manusia yang berbudaya, mempunyai identitas atau jati diri, bukan lagi menghasilkan manusia beradab tetapi manusia "beringas", mudah tersinggung, toleransi yang tipis dan menganut budaya kekerasan"[142]. Konsep pendidikan di Indonesia telah menjadikan "kebebasan individu dipasung dan tujuan pendidikan menjadi sangat intelektualistis yang diatur dengan semacam lembaga EBTANAS. Aspek-aspek pembentukan kepribadian yang meliputi aspek-aspek konatif, afektif dan motorik telah diabaikan. Pendidikan telah dimanipulasi untuk tujuan-tujuan intelektualisme yang sempit dan mematikan inisiatif serta kemandirian berpikir manusia"[143].

Harus diakui bahwa pendidikan yang berjalan di Indonesia saat ini masih sebatas pada sosialisasi nilai, dengan pola hafalan, dengan kata lain pendidikan di Indonesia hanya sekedar mengantarkan peserta didik dan masyarakat pada batas menegetahui dan memahami sebuah konsep, sementara upaya internalisasi atas nilai belum bisa dilakukan secara baik[144]. Hal ini terbukti dengan munculnya fenomena kesenjangan antara pengetahuan dengan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, peserta didik mengetahui seperangkat nilai-nilai kejujura, adil, kreatif, tepat waktu, efesiensi, konfetitif dan sebagainya. Namun dalam prakteknya hal-hal tersebut belum dapat diterapkan, hanya simbol-simbol dan tampilan fisik saja yang dijalankan oleh peserta didik. Akibatnya, dapat kita menyaksikan gaya hidup dengan perilaku kurang jujur, kurang adil dan pola hidup konsumtif dan material tanpa dibarengi dengan perubahan sikap mental dan cara pandang yang signifikan.

Pelaksanaan birokrasi pendidikan di Indonesia terlalu *top down* yang kurang memberikan perimbangan *bottom up* dari masyarakat. Pelaksanaan birokrasi pendidikan terkesan diatur dengan aturan birokrasi yang sangat ketat, seperti fakultas,

---

[142]H.A.R. Tilaar, *Pendidikan, Kebudayaan*, .., hlm. 10.
[143]Ibid, hlm. 10.
[144]Hidayat Syarief, *Paradigma Baru Pendidikan Membangun Masyarakat Madani*,REPUBLIKA, (30 Oktober1999), Jakarta.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

jurusan, program studi dan kurikulum, bagi pendidikan swasta diatur dengan status disamakan, diakui dan terdaftar dan akreditasi yang ditentukan oleh pemerintah, sehingga kurang memeberikan kebebasan kepada masyarakat berinisatif mengembangkan pendidikan yang sesuai dengan tuntutan alam dan zaman. Selain itu, "kebijakan dasar pendidikan di Indonesia tanpaknya belum jelas, setidaknya belum mantap. Oleh karena itu, setiap ganti kebijakan atau tukar beleid setiap terjadi penggantian menteri atau pejabat negara, sudah merupakan hal yang biasa. Kurikulum dan sistem manajemen pendidikan yang usianya baru beberapa hari diganti"[145] dengan kurikulum dan sistem manajemen pendidikan yang baru. Kurikulum boleh-boleh saja terjadi perubahan, selama terdapat perbedaan yang mendasar antara satu atau lebih komponen antara kurikulum periode tertentu dengan periode lainnya. Di luar perbedaan tersebut yang terjadi adalah pengembangan. Tetapi biasanya perubahan yang dilakukan kurang memperhatikan perbedaan yang mendasar tersebut.

Selain itu, pelaksanaan pendidikan di Indonesia adalah pendidikan statusqo, yaitu pendidikan yang hanya berorientasi pada selembar ijazah. Kondisi ini didukung dengan para user atau pemakai lulusan tidak pernah menanyakan "kemampuan" atau "keterampilan" yang dimiliki seorang pencari kerja dengan menunjukan sertifikat keterampilan, tetapi yang ditanyakan adalah ijazah yang dimiliki dan kadang-kadang ijazah itupun tidak atau kurang sesuai dengan bidang kerjanya. Untuk itu, perlu merubah image, bahwa belajar bukan untuk mencari ijazah. Inilah problem mendasar dunia pendidikan di Indonesia dewasa ini. Untuk itu, perlu mencari model atau pendidikan alternatif, dengan merumuskan suatu visi dan kebijakan dasar pendidikan yang baru yaitu membangun manusia dan masyarakat madani Indonesia yang mempunyai identitas, berdasarkan budaya Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[145]Ki Supriyoko, *Lima Kebijakan Dasar Pendidikan*, Kedaulatan Rakyat, (7 Oktober 2000), Yogyakarta, hlm. 8.

3. Peluang Perubahan Menuju Masyarakat Madani

Pada era reformasi, masyarakat menuntut kembali kedaulatan rakyat yang telah hilang, karena "era reformasi menuntut perubahan total dalam kehidupan bangsa dan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita "masyarakat madani Indonesia". Reformasi menuntut perubahan dalam semua bidang kehidupan khususnya bidang politik, pemerintahan, ekonomi dan budaya. Perubahan dalam bidang politik terutama diarahkan kepada hidupnya kembali kehidupan demokrasi yang sehat sesuai dengan tuntutan konstitusi 1945[146]. Visi perubahan lebih ditekankan pada pendekatan kemanusiaan untuk menuju masyarakat madani atau *civil society* yang berkeadilan, berkeadaban dan mandiri di segala bidang dalam tatanan kehidupan yang harmonis. Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara [GBHN] tahun 1999-2004, tertuang visi yaitu "terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia"[147], kemudian dari visi tersebut, pemerintah menyusun lima agenda pokok, yaitu : (1) membangun sistem politik yang demokratis serta mempertahankan kesatuan dan persatuan, (2) mewujudkan supremasi hukum dan pemerintah yang bersih, (3) mempercepat pemulihan ekonomi serta membangun landasan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan, (4) meningkatkan pembangunan kesejahteraan rakyat dan ketahanan budaya, (5) meningkatkan pembangunan daerah[148]. Maka dengan lima agenda pokok yang dicanangkan pemerintah, peluang perubahan sangat terbukan untuk menuju terwujudnya "masyarakat madani" di Indonesia yang dicita-citakan.

Apabila mencermati kenyataan kehidupan bangsa dan negara Indonesia sekarang, tanpaknya memang tidak mudah untuk mewujudkan masyarakat madani

---

[146]H.A.R. Tilaar, *Pendidikan, Kebudayaan*, ..., hlm. 5.

[147]Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) Tahun 1999-2004, (Surabaya: Arkola, 1999), hlm. 14.

[148]KH. Abdurrahman Wahid, (Presiden Republik Indonesia), *Pidato Presiden Republik Indonesia Di Depan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, 7 Agustus 2000,* From : http:// istana.ri. go.id/ speech/ ind/07agustus00.htm.

itu, jika corak budaya bangsa Indonesia masih berlangsung dengan warna seperti yang dilukiskan pada tantangan di atas. Karena untuk mewujudkan "masyarakat madani" di Indonesia tidaklah semudah membalik telapak tangan, memerlukan proses panjang dan waktu serta menuntut komitmen masing-masing warga bangsa untuk mereformasi diri secara total menuju terwujudnya masyarakat madani. "Diperlukan kerja keras dan niat lurus untuk merubah budaya masyarakat agar menjadi lebih demokratis, terbuka luas, dan bebas dari tekanan, agar jalan menuju masyarakat madani lebih terbuka luas"[149]. Untuk itu, berbagai upaya perlu dilakukan untuk mewujudkan masyarakat madani, karena masyarakat madani tidak bisa tercipta dengan sendirinya, tetapi harus diperjuangkan. Cendekiawan muslim Nurchalis Madjid, menyatakan bahwa keharusan masyarakat untuk ikut mengambil peran dalam mewujudkan masyarakat berperadaban, masyarakat madani di Indonesia. Karena terbentuknya masyarakat madani adalah bagian mutlak dari wujud cita-cita kenegaraan, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berbagai upaya perubahan perlu dilakukan dalam mewujudkan "masyarakat madani", berkaitan dengan upaya perubahan tersebut, Jimly Asshiddiqie, menawarkan tiga agenda perubahan diperjuangkan di Indonesia. Agenda besar itu mencakup penataan kembali semua institusi umum, baik pada tingkat supra struktur kenegaraan maupun pada tingkat infra struktur kemasyarakatan dan kebutuhan untuk reorientasi sikap mental, cara berpikir dan metode kerja. Tiga agenda perubahan tersebut adalah : [1] Agenda reformasi institusional [*institusional reform*], yaitu terbentuknya institusi yang kuat dan fungsional, [2] reformasi instrumental [*instrumental reform*], upaya pembaruan dari mulai dari konstitusi sampai ke peraturan-peraturan pada tingkat terendah, [3] reformasi budaya [*cultural reform*], yang menyangkut orientasi pemikiran,

---

[148]Sjafri Sairin, *Masyarakat Madani Dan Tantangan Budaya*, hlm. 98.

pola-pola perilaku dan tradisi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat"[150]. Ketiga agenda besar ini, menurut Jimly, sekarang sedang berlangsung dengan sangat intensif, tetapi tingkat kecepatan antara satu bidang dengan bidang yang lain tidak sama, di samping itu tidak semua orang memiliki tingkat kesadaran dan pemahaman yang sama mengenai persoalan-persoalan yang harus dikembangkan dalam kerangka agenda reformasi menyeluruh. Maka dari agenda perubahan ini, berbagai upaya perlu dilakukan untuk mewujudkan masyarakat madani, baik yang bersifat berjangka pendek maupun yang "berjangka panjang :

Pertama, peluang perubahan jangka pendek, menyangkut dengan perubahan pada pemerintahan, politik, ekonomi dan hukum. Sesuai dengan tuntutan masyarakat pada era reformasi, terciptanya "pemerintahan bersih yang menjadi prasarat untuk tumbuh dan berkembangnya masyarakat madani yang sehat, karena tumbuh dan berkembangnya masyarakat madani jelas akan menuntut performance pemerintahan yang bersih, yang digambarkan sebagai sebuah pemerintahan yang efesien dan efektif, bersih dan profesional"[151], sehingga terwujud pemerintah yang berwibawa, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yaitu pemrintahan yang dapat dipercaya [*credible*] dapat diterima [*acceptable*], dan dapat memimpin [*capable*]. Sebab pemerintahan yang bersih [*clean government*], dipercaya, dapat diterima dan dapat memimpin merupakan ciri khas dari cita-cita demokrasi masyarakat madani. Pada bidang politik, adanya "upaya sadar dari pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tingkat kesepakatan maksimal dalam memberi makna sistem demokrasi. Dimensi demokrasi dari pemerintahan yaitu tercitanya tingkat keseimbangan relatif dan saling cek dalam hubungan kekuasaan eksekutif, legeslatif dan yudikatif"[152], sehingga terwujudnya keberdayaan lembaga legislatif dalam melakukan fungsi-fungsi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[150]Jimly Asshiddiqie, *Reformasi Menuju Indonesia Baru; Agenda Restrukturisasi Organisasi Negara, Pembaruan Hukum, dan Keberdayaan Masyarakat Madani*, From: http://www.theceli.com/dok/ dokumen/ jurnal/ jimly/j014.htm. 2002., hlm. 1.

[151]Riyadi Santoso, *Pemerintahan Yang Bersih dan Masyarakat Madani*, Jurnal Cides Sintesis,No.2,Th.5, 1999, hlm. 19.

[152]KH. Abdurrahman Wahid , *Pidato Presiden*, hlm. 6.

legislatif, pengawasan yang mencerminkan aspirasi rakyat yang diwakilinya. Sedangkan, "dimensi demokrasi dari masyarakat adalah tercipta kesepakatan nilai untuk kesetaraan di depan hukum dan pemerintah, kesetaraan dalam kompetisi dan kontestasi politik, kemandirian, dan kemampuan menyelesaikan berbagai konflik dengan cara-cara damai"[153], yang mencerminkan ciri-ciri masyarakat madani. Pada bidang ekonomi, menuntut pemerataan kehidupan ekonomi yang lebih merata dan bukan hanya untuk kepentingan sekelompok kecil anggota masyarakat. Ekonomi yang sulit, kelaparan, hanya terdapat pada sistem politik penindasan atau yang nondemokratis. Maka, perubahan politik dibutuhkan untuk melakukan perubahan ekonomi. Dalam bidang hukum, reformasi menuntut ketaatan kepada hukum untuk semua orang dan bukan hanya untuk kepentingan penguasa. Setiap orang sama di depan hukum dan dituntut kedisiplinan yang sama terhadap nilai-nilai hukum yang disepakati"[154]. Peraturan perundang-undangan dituntut merupakan pengontrol atau check terhadap kekuasaan. Undang-undang dan peraturan jangan hanya mencerminkan kepentingan penguasa dan teman-temannya atau "koncoisme" di sektor bisnis, tetapi untuk kepentingan semua lapisan masyarakat dan tidak membeda-bedakan. Dengan demikian, diharpkan terbentuknya lembaga penegak hukum yang mencerminkan berlakunya supermasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menuju suatu tatanan masyarakat madani atau civil society Indonesia. Dalam bidang jurnalistik, terciptanya kebebasan pers, yaitu berkembangnya media massa baik cetak maupun elektronik yang sanggup berfungsi mendidik dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta melakukan fungsi kontrol secara bertanggungjawab dan menerapkan etika jurnalistik secara konsekuen.

Kedua, peluang perubahan jangka panjang pada bidang kebudayaan dan pendidikan. Reformasi budaya, yang menyangkut orientasi pemikiran, pola-pola

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[153]Ibid, hlm. 6.

[154]H.A.R. Tilaar, *Pendidikan, Kebudayaan*, ..hlm.5.

perilaku, dan tradisi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat luas yang perlu dikembangkan dalam rangka mendukung proses pelembagaan dan mekanisme kehidupan kenegaraan yang diidealkan[155]. Reformasi budaya menuntut perkembangan kebhinnekaan budaya Indonesia, maka kebudayaan daerah merupakan dasar bagi perkembangan identitas bangsa Indonesia, oleh sebab itu harus dibina dan dikembangkan. Pengembangan budaya daerah akan memberikan sumbangan bagi perkembangan rasa kesatuan bangsa Indonesia yang menunjang ke arah identitas bangsa Indonesia yang kuat dan benar"[156], yang mencerminkan masyarakat plural sebagai ciri masyarakat madani. Untuk itu, pengembangan sistem pendidikan, tekanan pada aspek kearifan budaya dan nilai-nilai lokal sebagai pijakan berbangsa, jangan sampai tercerabut, karena identitas kebangsaan hanya bertahan jika sosialisasi nilai-nilai kebangsaan yang mengacu pada nilai-nilai kultural bangsa dilakukan melalui lembaga pendidikan.

Bidang pendidikan, penyiapan sumber daya manusia yang berwawasan dan berperilaku madani melalui pendidikan, karena konsep masyarakat madani merupakan bagian dari tujuan pendidikan nasional. "Pendidikan menjadi soko guru dalam mewujudkan masyarakat madani"[157]. Pendidikan harus benar-benar menyiapkan anggota masyarakat untuk mampu membangun masyarakat madani yang dicita-citakan, karena "salah satu cara untuk mewujudkan masyarakat madani adalah melalui jalur pendidikan, baik pendidikan di sekolah maupun di luar sekolah"[158]. Oleh karena itu, semua pihak mutlak setuju, bahwa pendidikan amat penting bagi ikhtiar membangun manusia berkualitas, yang ditandai dengan peningkatan kecerdasan,

---

[155]Jimly Assbiddiqie, *Reformasi Menuju Indonesia Baru;...*, hlm. 1.

[155]H.A.R. Tilaar, *Pendidikan, Kebudayaan, ...*, hlm.5.

[157]Husaini Usman, *Menuju Masyarakat Madani...*, hlm.1.

[157]Marzuki, *Membangun Masyarakat Madanai Melalui Pendidikan Islam Sebuah Refleksi Pendidikan Nasional*, Cakrawala Pendidikan, Edisi Khusus Mei 1999, Th.XVIII No.2, hlm. 50.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pengetahuan dan keterampilan, karena pendidikan sendiri merupakan wahana strategi bagi usaha untuk meningkat mutu kehidupan manusia, yang ditandai dengan membaiknya derajat kesejahteraan, menurunnya kemiskinan, dan terbentuknya berbagai pilihan dan kesempatan mengembangkan diri menuju masayarakat madani. Maka, secara umum pendidikan mempunyai peranan yang amat senteral dalam mendorong individu dan masyarakat, untuk mencapai kemajuan pada semua aspek kehidupan.

Sistem pendidikan yang dikembangkan harus mampu membangun kompotisi manusia untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih baik. Pendidikan harus disusun atas dasar kondisi lingkungan masyarakat, baik kondisi masa kini maupun antisipasi kondisi pada masa akan datang. Perubahan kondisi lingkungan ini merupakan tantangan dan peluang yang harus diproses secara tepat yang dapat memberikan nilai tambah, sehingga sistem pendidikan yang dikembangkan harus selalu disesuaikan dengan perubahan lingkungan, karena pendekatan masa lalu hanya cocok untuk situasi masa lalu. Pendekatan masa lalu sering tidak tepat jika diterapkan pada kondisi berbeda, bahkan sering kali pendekatan masa lalu menimbulkan problem yang dapat memundurkan dunia pendidikan. Dengan demikian, pembaruan pendidikan Islam diupayakan untuk memberdayakan potensi umat yang disesuai dengan karakteristik dan kebutuhan kehidupan masyarakat madani. Sistem pendidikan Islam harus dikembangkan berdasarkan karakteristik masyarakat madani yaitu demokratisasi, partisipasi sosial dan supermasi hukum dalam masyarakat madani. Oleh karena itu, pendidikan Islam yang selalu mengandalkan kekuasaan pendidik, ustaz, kyai, tanpa memperhatikan pluralisme subjek didik, sudah saatnya harus ditinggalkan dan diinovasi. Demokratisasi pendidikan harus diupayakan, karena akan "menghasilkan lulusan yang merdeka, berpkir kritis dan secara sosial sangat toleran dengan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pandangan dan praktik-praktik demokrasi"[159]. Dengan demikian, "demokratisasi pendidikan berguna untuk menyiapkan peserta didik agar terbiasa berbas berbicara dan mengeluarkan pendapat secara bertanggung jawab, turut bertanggung jawab, terbiasa mendengarkan dengan baik dan menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan keberanian moral yang tinggi, terbiasa bergaul dengan rakyat, ikut merasa memiliki, sama-sama merasakan suka dan duka dengan masyarakat dan mempelajari kehidupan masyarakat"[160]. Untuk itu, dalam proses pendidikan, demokrasi pendidikan dapat diarahkan pada pembaruan kultur, norma keberadaban, partispasi sosial dan hukum, "sebab hal ini merupakan inti dari proses pendidikan"[161], maka pelaksanaan demokratisasi pendidikan, harus mampu membawa peserta didik untuk menghargai kemampuan orang lain, kemampuan sosial-ekonomi, kebudayaan, agama orang lain dan "sejumlah kemajemukan lainnya"[162], serta menjunjung tinggi norma-norma hukum.

Dari pandangan di atas, manfaat yang diperoleh dengan terwujudnya masyarakat madani adalah terciptanya masyarakat Indonesia yang demokratis sebagai salah satu tuntutan reformasi di dalam negeri dan tekanan-tekanan politik dan ekonomi dari luar negeri. Di samping itu, melalui masyarakat madani akan mendorong munculnya inovasi-inovasi baru di bidang pendidikan"[163]. Maka dengan terwujudnya masyarakat madani, persoalan-persoalan besar bangsa Indonesia seperti: konflik-konflok suku, agama, ras, etnik, golongan, kesenjangan sosial, kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan pembagian "kue bangsa" antara pusat dan daerah, saling curiga serta ketidak harmonisan pergaulan antar warga dan lain-lain yang selama Orde Baru lebih banyak ditutup-tutupi, rekayasa dan dicarikan kambing hitamnya, diharpkan dapat diselesaikan secara arif, terbuka, tuntas dan melegakan semua

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[159]K. Suryadi, *Demokratisasi Pendidikan Demokrasi, Mimbar Pendidikan*,Jurnal Pendidikan,No.1 Th.XVIII,1999,hlm. 23.

[160]Husaini Usmani, *Menuju Masyarakat Madani...*, hlm. 6.

[161]Zamroni, *Pembeharuan Pendidikan dan Penelitian Multidisiplin*, makalah disampaikan ada Seminar Regional Pengembangan Budaya Penelitian Multidisiplin dan Antardisiplin, Yogyakarta, 19-20 Mei 1997,, hlm. 1.

[162]J. Veizey, 1976, *Pendidikan di Dunia Modern*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 115.

pihak, suatu prakondisi untuk dapat mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat. Maka, kekhawatiran akan terjadinya disintegrasi bangsa dapat dicegah"[164].

Untuk mewujudkan masyarakat madani dibutuhkan motivasi yang tinggi dan partisipasi nyata dari individu sebagai anggota masyarakat. Diperlukan proses dan waktu serta dituntut komitmen dan penuh kearifan dalam menyikapi konflik yang tak terelakan. Tuntutan terhadap aspek ini sama pentingnya dengan kebutuhan akan toleransi sebagai instrumen dasar lahirnya sebuah konsekuensi atau kompromi[165]. Tuntutan untuk mewujudkan masyarakat madani, tidak hanya dilakukan dengan seminar, diskusi, penataran, lokakarya, pelatihan dan hafalan saja. Tetapi perlu memuskan langkah-langkah yang sistematis dan kontinyuyang dapat merubah cara pandang, kebiasaan dan pola hidup masyarakat. Maka, tanpaknya "sektor pendidikan memiliki peran strategis dan fungsional dalam membangun masyarakat madani di Indonesia"[166]. Artinya pendidikan dalam hal ini pendidikan diupayakan untuk menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang bertaqwa, berkeadaban dan berbudaya, demokratis, berkeadilan, egalitaran[167], menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian, menghargai masyarakat yang mempunyai faham keagamaan yang berbeda-beda, penuh toleransi, rasa partisipasi sosil dan solidaritas sosial, menjunjung tinggi hukum, menegakkan hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, pertanyaannya kemudian apakah pendidikan sekarang ini dapat diharapkan untuk mengembangkan fungsi yang dikemukakan tersebut?

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[163]Suwardi, *Demokratisasi Pendidikan dalam Pengajaran Pragmatik Sastra Sebagai Wahana Penciptaan "Masyarakat Madani"*, Cakrawala Pendidikan, Edisi Khusus, Mei. Th. XVIII, No.2, 1999, hlm. 66.

[164]A. Dalima, *Reorientasi Pendidikan Sejarah Melalui Pendekatan Budaya Menuju Transformasi Masyarakat Madani dan Integrasi Bangsa*, dalam Jurnal, Cakrawala Pendidikan, Edisi Khusus, Mei 1999,. Thn. XVIII, No. 2. hlm, 78-79.

[165]K. Suryadi, *Demokratisasi Pendidikan Demokrasi*,..., hlm. 78.

[166]Hidayat Syarief, *Paradigma Baru Pendidikan Menuju Masyarakar Madani*,REPUBLIKA,Jakarta, 30 Oktober 1999,.

[167]*Egalitarian*, artinya suatu masyarakat yang mementingkan keadilan, memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk maju dan berkembang dan kemajuan tidak hanya untuk segelintir kelompok elit.

BAB V
PEMBARUAN PENDIDIKAN ISLAM UNTUK MASYARAKAT MADANI INDONESIA

Berbicara tentang pendidikan Islam untuk masyarakat madani Indonesia, tentu tidak terlepas dari karakteristiknya yaitu masyarakat yang demokrasi. Dengan demikian diperlukan suatu disain pendidikan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat tersebut. Secara definisi kata Tilaar, "sebenarnya tidak ada pendidikan secara khusus untuk masyarakat madani Indonesia, karena pendidikan itu sendiri adalah bagian integral dan kegiatan *resiprokal* dari masyarakat dan kebudayaan. Maka menurut Tilaar yang lebih tepat adalah pendidikan "dalam" masyarakat madani Indonesia, karena menurutnya pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang pokok dan wajar di dalam kehidupan manusia dan kebudayaan?"[1]

Kehidupan suatu masyarakat dan bangsa selalu menginginkan perubahan dan peningkatan kehidupan secara terus menerus [*continuai improvement*]. Implikasinya masyarakat membutuhkan pendidikan sebagai sarana untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup manusia sebagai *khalifah* di muka bumi. Dari pandangan ini, kemudian muncul pertanyaan bagaimanakah disain dan peran pendidikan Islam di dalam masyarakat madani?. Untuk menjawab pertanyaan ini, peneliti menggunakan pandangan yang dikemukakan Tilaar, bahwa "pendidikan dalam masyarakat madani Indonesia tidak lain ialah proses pendidikan yang mengakui akan hak-hak serta kewajiban perorangan di dalam masyarakat, karena suatu masyarakat yang demokratis, hak-hak dan kewajiban tersebut merupakan batu landasan dari masyarakat"[2] untuk menata kehidupan yang lebih baik. Peran pendidikan tiada lain adalah proses yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan dengan menanamkan nilai-nilai demokrasi, keimanan, akhlak, kemanusian, keadilan, hukum, egalitarian, toleransi, solidaritas, menegakan hak-hak

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[1]H.A.R. Tilaah, *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia, Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*,Cet. Pertama, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 167.

[2]Ibid., hlm. 167.

dan kewajiban perorangan dalam masyarakat untuk membangun dan memberdayakan manusia dan masyarakat berkualitas yang memiliki kemampuan inovasi, kreatif, konporatif, kompotetif dan menerima perubahan, sehingga pendidikan dapat mendatangkan kemaslahatan, kenikmatan, dan kebahagian dalam kehidupan manusia Indonesia. Dengan demikian, pembahasan dalam bab ini akan lebih difokuskan pada paradigma baru pendidikan Islam, strategi pembaruan pendidikan Islam dan aktualisasi pendidikan Islam dalam masyarakat madani Indonesia.

A. Pembaruan Paradigma Pendidikan Islam

Thomas S. Kuhn, dalam bukunya *The Structure of Scientific Revolutions,* yang pertama kali mempopulerkan makna paradigma di dalam pemgembangan ilmu pengetahuan dan praktek atau tingkah laku manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Konsep paradigma bermula dari kajian sejarah dan filsafat sains dan kemudian konsep serta pengertian paradigma juga telah digunakan oleh ahli-ahli ilmu tingkah laku [*behavioral sciences*][3]. Pengertian paradigma secara etimologi, berasal dari bahasa Inggris *paradigm* yang berarti *type of something, model, pattern* [bentuk sesuatu, model, pola] [Hornby, 1989:895]. Sedangkan secara terminologi berarti *a total view of problem; a total outlook, not just a problem in isolation* [Hills, 1982] dan kemudian secara sederhana paradigma diartikan sebagai cara pandang dan cara berpikir. Maka, maksud "paradigma" sebagai dasar sistem pendidikan adalah cara berpikir atau sketsa pandang menyeluruh yang mendasari rancang bangunan suatu sistem pendidikan[4].

Berdasarkan rumusan di atas, paling tidak telah memberikan rekonstruksi terhadap asas-asas yang mendasar atau arah pendidikan di dalam usaha meletakan dasar yang paling rasional untuk mengubah praksis pendidikan di dalam rangka membangun masyarakat madani Indonesia yang demokratis, religius, inovatif, konpetitif, taat hukum, menghargai pluralisme, hak-hak asasi manusia, dan

[3]H.A.R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 62.

[4]Ismail SM, dkk. [Editor], *Paradigma Pendidikan Islam*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2001), hml.viii.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

mengembangkan tanggungjawab masyarakat untuk menghadapi lingkungan global. Dengan demikian, tuntutan masyarakat terhadap kualitas pendidikan memang sangat terkait dengan perubahan cara berpikir dan cara pandang dalam hidup dan kehidupan masyarakat, karena proses pendidikan itu sendiri "dipandang sangat berkaitan dengan kepentingan manusia dan masyarakat untuk masa kini dan masa yang akan datang"[5].

Dari asumsi dan cara berpikir tersebut di atas, maka pelaksanaan pendidikan diakui sangat terkait dengan *"life is education and education is life"*[6], dalam arti pendidikan merupakan persoalan hidup dan kehidupan manusia serta seluruh proses hidup dan kehidupan manusia adalah proses pendidikan. Apabila bertolak dari pandangan ini, maka pendidikan Islam pada dasarnya hendak mengembangkan "pandangan hidup Islami" yang diharapkan tercermin dalam sikap dan keterampilan hidup orang Islam[7]. Maka, penggunaan nilai-nilai Islam dalam pendidikan adalah "sebagai sudut pandang secara menyeluruh [*total outlook*] mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gejala-gejala pendidikan dalam rangka menyusun teori pendidikan"[8] untuk membangun manusia terdidik dan berkualitas.

Kemudian, apa pandangan dan sikap hidup itu? Pandangan dan sikap hidup "dapat dipahami dari makna hidup itu sendiri yang disebut dalam bahasa arab dengan *al-hayah*. Sedangkan makna *al-hayah* [hidup] adalah *al-harakah* yaitu "bergerak atau gerakan atau kegiatan", dan *al-harakah* adalah *al-barkah* artinya "bergerak" atau "beraktivitas" yang dapat "mendatangkan berkah", dan *al-barkah* itu sendiri mengandung makna *al-ziyadah* yang berarti "nilai tambah dalam hidup". Sedangkan *al-ni'mah* yang bermakna "kenikmatan" atau "kenyamanan hidup", dan *al-sa'adah* adalah "kebahagian"[9]. Dengan demikian, pandangan dan sikap hidup manusia adalah

---

[5]Suyanto dan Djihad Hisyam, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III,* (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2000), hlm. 61.

[6]Rupert C. Lodge, 1947,*Philosophy of Education*,New York:Harper & Brothers, dalam Muhaimin,et.al, *Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm.39.

[7]Ibid, hlm. 39.

[8]Ismail SM, dkk., *Paradigma Pendidikan Islam*, hlm. viii.

[9]Ibid, hlm. 39.

menusia yang bergerak atau beraktivitas dalam proses pendidikan untuk dapat mendatangkan "berkah" bagi kehidupan manusia dan masyarakat.

Pandangan hidup tersebut dimanifestasikan dalam "sikap hidup" dan keterampilan hidup [beraktivitas] sehingga dapat mendatangkan "berkah" berupa kenikmatan dan kebahagian hidup yang merupakan nilai tamba bagi manusia. Kemudian apa sajakah aspek-aspek kehidupan itu? Dalam konteks inilah "para pemikir dan pengembang pendidikan Islam mempunyai visi yang berbeda-beda dan perbedaan pandangan tersebut tentu tidak dapat dilepaskan dari sistem politik dan latar belakang sosio-kultural yang mengitari mereka"[10], serta perubahan pola hidup dan kehidupan manusia itu sendiri dan dari sini secara historis-sosiologis setidaknya telah muncul beberapa paradigma pengembangan pendidikan Islam. Dengan demikian, dalam bahasan ini akan dikemukakan "paradigma dualisme pendidikan" yang selama ini telah mewarnai pemikiran dan pengembangan pendidikan Islam, kemudian dikemukakan paradigma "baru pendidikan Islam" yang akan mewarnai pemikiran dan pengembangan pendidikan Islam dewasa ini, terutama paradigma baru pendidikan Islam dalam masyarakat madani Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1. Paradigma Dualisme Pendidikan Islam

Paradigma dualisme pendidikan sebenarnya bukan merupakan persoalan baru, tetapi persoalan lama dan sudah terlalu sering diperbincangkan baik dalam forum-forum berskala nasional, maupun dalam diskusi-diskusi terbatas baik resmi maupun tidak resmi dan belum terselesaikan sampai saat ini. Selain itu, dualisme pendidikan Islam juga memiliki akar sejarah yang panjang, karena menyangkut dengan masalah agama, politik, psikologis dan sebagainya.

Apabila dicermati, akar sejarah munculnya pandangan dualisme pendidikan Islam, setidaknya bersumber dari: *Pertama,* pandangan *formisme*[11], artinya segala aspek kehidupan dipandang dengan sangat sederhana, yaitu segala sesuatu hanya dilihat dari dua sisi yang berlawanan dan kata kuncinya adalah "dikotomi" atau "diskrit".

---

[10]Ibid, hlm. 39.
[11]Ibid, hlm. 39.

Dari pandangan ini, kemudian "dikembangkan dalam melihat dan memandang aspek kehidupan dunia dan akhirat, kehidupan jasmani dan rohani, sehingga pendidikan Islam hanya diletakkan pada aspek kehidupan akhirat atau kehidupan rohani saja. Pendidikan keagamaan dihadapkan dengan pendidikan non-keagamaan, pendidikan keislaman dengan non-keislaman, pendidikan agama dengan pendidikan umum, demikian seterusnya. Pandangan ini, berimplikasi pada penyempitan pengembangan pendidikan Islam, yaitu "pendidikan Islam hanya berkisar pada aspek "kehidupan *ukhrawi*" yang dianggap terpisah dari "kehidupan duniawi", atau aspek "kehidupan rohani" yang terpisah dari "kehidupan jasmani"[12]. Dari sini, kemudian tercipta wacana bahwa pendidikan Islam hanya mengurusi persoalan ritual dan spritual *Ilahiyah*, sedangkan kehidupan ekonomi, politik, hukum, seni budaya, ilmu pengatahuan, teknologi dan sebagainya dianggap sebagai urusan duniawi, bukan bidang garap pendidikan Islam dan hanya menjadi bidang garap pendidikan umum dan bukan bidang garap pendidikan Islam. Dari sinipula, muncul istilah "pendidikan agama" dan "pendidikan umum" atau "ilmu agama" dan "ilmu umum" dan seterusnya.

Dari pemikiran di atas, jelas implikasinya pada pengembangan pendidikan Islam yang hanya dianggap berorientasi pada keakhiratan. Pendidikan Islam "hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan mengajak manusia kembali kepada kehidupan mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur"[13]. Sedangkan persoalan-persoalan keduniaan dianggap kurang penting, sehingga orientasi pendidikan Islam lebih banyak pada urusan *ukhrawiyah*, dan nyaris lepas dari urusan *duniyawiyah*[14]. Maka pelaksanaan pendidikan Islam lebih banyak "menekankan pendalaman ilmu-ilmu keagamaan [*al-'ulmu al-diniyah*] yang dianggap sebgai jalan pintas untuk menuju kebahagian akhirat, sementara sains [ilmu pengetahuan] dianggap terpisah dari agama"[15]. Urusan-urusan keduniaan "termasuk

---

[12]Ibid, hlm. 40.

[13]A. Malik Padjar, *Reformasi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Fajar Dunia, 1999), hlm. 28.

[14]Mastuhu, *Pemberdayaan Sistem Pendidikan Islam, Strategi Budaya Menuju Masyarakat Akademis*, Cet. Pertama, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 31-32.

[15]A. Malik Padjar, *Reformasi Pendidikan* ..., hlm. 41.

pendidikan, manusia diberikan otonomi untuk mengaturnya berdasarkan kemampuan akal budi yang diberikan kepada manusia dan konsep pendidikan menurut pandangan ini, secara *epistemologis* berada dalam kawasan bebas nilai dan tidak mempunyai konteks dengan Islam dan Islam hanya menempati kawasan *aksiologis*, nilai-nilai etis dalam pemanfaatan dan berada di luar struktur ilmu pendidikan"[16], sehingga paham dikotomis semakin kuat dan semakin subur dalam proses pendidikan Islam.

Apabila ingin mengembangkan pendidikan Islam menuju masyarakat madani Indonesia, persoalan pertama yang harus dituntaskan adalah persoalan "dikotomis". Artinya harus berusaha mengintegrasikan kedua ilmu tersebut baik secara filosofis, kurikulum, metedologi, pengelolaan, bahkan sampai pada tingkat departementalnya. Perubahan orientasi pendidikan Islam harus dilakukan yaitu "bukan hanya bagaimana membuat manusia sibuk mengurus dan memuliahkan Tuhan dengan melupakan kepekaan kemanusiaan tentang eksistensinya, tetapi bagaimana memuliahkan Tuhan dengan sibuk memuliahkan manusia dengan eksistensinya di dunia ini"[17]. Artinya bagaimana pendidikan Islam harus mempu mengembangkan potensi manusia seoptimal mungkin, sehingga menghasilkan manusia yang memahami eksistensinya dan dapat mengelola dan memanfaat dunia sesuai dengan kemampuannya. Dengan dasar ini, maka materi pendidikan Islam harus didisain untuk dapat mengakomodasi persoalan-persoalan yang menyangkut dengan kebutuhan manusia, yaitu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, teknologi, seni, serta budaya, sehingga mampu melahirkan manusia yang berkualitas, handal dalam penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan, unggul dalam moral yang didasarkan pada nilai-nilai *ilahiyah* sebagai prodak pendidikan Islam.

Kedua, bahwa akar munculnya dikotomis sistem pendidikan islam di Indonesia, sebenarnya berasal dari warisan penjajah kolonial Belanda. Artinya, pada zaman kolonial Belanda, memulai membedakan pendidikan "umum" disatu pihak dan

---

[16]Ibid, hlm. 28.

[17]Abdul Munir Mulkan,"*Pendidikan Kehilangan Akar Relegi*",From:http://aliansi.hypermart.net/1999/11/forum.htm.5/4/2002.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pendidikan "agama" dipihak lain dalam praktek pendidikannya. Tindakan membedakan serta mengkotak-kotakan pendidikan "umum" disatu pihak dan pendidikan "agama" dipihak lain, merupakan penyebab utama dari kerancuan dan kesenjangan pendidikan di Indonesia dengan segala akibatnya yang ditimbulkannya. Maka di antara akibat dan dampak negatif yang ditimbulkan dari sistem pendidikan dualistis itu adalah arti agama telah dipersempit yaitu sejauh berkaitan dengan aspek teologi Islam seperti yang diajarkan di sekolah-sekolah agama selama ini[18]. Islam bukanlah sistem kehidupan yang praksis dan baku, melainkan sebuah sistem nilai dan norma [perintah dan larangan] yang secara dinamis harus dipahami dan diterjemahkan berdasarkan setting sosial dan dimensi ruang dan waktu tertentu. Karena itu, secara praksis, dalam Islam tidak terdapat sistem ekonomi, politik, pendidikan dan lain sebagainya secara tersurat dan baku[19]. Sekolah-sekolah agama telah terkotak dalam kubu tersendiri dan menjadi eksklusif[20] dan penyempitan inipun terjadi pada bidang lain, yaitu terjadi pandangan atau adanya perubahan dan "penyempitan terhadap pengertian ulama menjadi fuqaha, sebagai orang-orang yang hanaya mengerti soal-soal kegamaan belaka sehingga tidak dimasukkan ke dalam barisan kaum intelektual, juga merupakan implikasi dari pandangan dikotomis tersebut[21]. Akhirnya, dalam pelaksanaan pendidikan Islam, pendekatan yang dipergunakan lebih bersifat kegamaan, normatif, doktriner dan absolutis, sehingga peserta didik diarahkan untuk memiliki sikap *commitment* dan dedikasi yang tinggi terhadap agama yang dipelajari[22]. Sementara kajian-kajian keilmuan yang bersifat empiris, rasional, analitis-kritis, dianggap dapat menggoyahkan iman, sehingga pelaksanaan pendidikan Islam, didominasi oleh pendekatan keagamaan yang bersifat "normative" dan "doktriner" dengan harapan tidak menggoyahkan iman peserta didik.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[18]Marwan Saridjo, *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam,* (Jakarta: CV.Amissco, 1996), hlm. 21.

[19]Munawir Sadzali,1990, dikutip: A.Malik Fadjar, *Reformasi Pendidikan Islam,* hlm. 29.

[20]Marwan Saridjo, *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam,* hlm. 21.

[21]Muhaimin, et.al, *Paradigma Pendidkan Islam Upaya* Mengefektifkan..., hlm.39.

[22]Ibid, hlm. 41.

Azyumardi Azra, menyatakan bahwa pemahaman semacam ini "muncul ketika umat Islam Indonesia mengalami masa penjajahan yang sangat panjang, di mana umat Islam mengalami keterbelakangan dan disintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan terjadi pembenturan umat Islam dengan pendidikan dan kemajuan Barat yang memunculkan kaum intelektrual baru yang sering juga disebut "cendekiawan sekuler"[23]. Sebagian besar kaum intelektual tersebut adalah "hasil pendidikan Barat yang terlatih berpikir secara Barat, karena dalam proses pendidikannya, mereka mengalami cuci otak [*brain washing*] dari hal-hal yang berbau Islam, akibatnya mereka menjadi teraliansi [terasing] dari ajaran-ajaran Islam dan masyarakat Muslim sendiri. Bahkan terjadi gap antara kaum intelektual baru [*sekuler*] dengan intelektual lama [ulama]. Kaum intelektual baru hasil pendidikan Barat cenderung terpisah dari kaum intelektual lama [ulama] dan ulama dikonotasikan sebagai kaum sarungan yang hanya mengerti soal-soal keagamaan, tetapi buta dalam masalah-masalah keduniaan[24]. Impilakasi lain, yang berpengaruh sampai saat ini, yaitu terjadi penyempitan pengertian ulama yang hanya dianggap mengerti soal-soal keagamaan sehingga ulama tidak dimasukkan ke dalam barisan kaum intelektual. "Karena itulah kemudian muncul gagasan di kalangan ummat Islam Indonesia untuk menciptakan "ulama intelektual" dan "intelektual ulama", atau dengan kata lain agar ulama intelektual atau intelektual ulama dapat dijumpai pada diri seseorang"[25]. Akan tetapi pada kenyataannya, pelaksanaan pendidikan Islam lebih berorientasi pada persoalan keakhiratan yang sifatnya metafisik dan normatif, sedangkan masalah dunia dianggap kurang penting dan hanya sebagai pelengkap.

Tantangan bagi pengelolala pendidikan Islam, yaitu sistem pembagi-duaan pendidikan menjadi "sistem Islam" dan "sistem sekuler" sudah harus ditinggalkan dan ditiadakan dengan tuntas. Kedua sistem tersebut "harus dipadukan secara integral, serta sistem yang ditibulkannya harus diisi dengan semangat Islam dan berfungsi

---

[23]Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, cet.I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 159-160.

[24]Ibid, hlm. 160.

[25]Delian Noer, *Masalah Ulama Indonesia atau Intelektual Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm.8.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

sebagai sebuah bagian yang integral dari program ideologisnya"[26]. Maka, problem klasik tentang dikotomi dualisme "ilmu agama" dan "ilmu umum" harus segera dituntaskan baik pada tingkat filosofis-paradigmatik maupun sampai pada teknis departemental. Upaya pengembangan pendidikan Islam harus menuju pada integritas antara "ilmu agama" dan "ilmu umum", sehingga tidak melahirkan jurang pemisah antara ilmu agama dan ilmu bukan agama, sebab dalam pandangan seorang muslim, ilmu pengetahuan adalah satu yaitu yang bersumber dari Allah SWT[27]. Ajaran Islam sebenarnya "tidak pernah membedakan antara "ilmu-ilmu agama" dan "ilmu umum" [keduniaan] atau tidak berpandangan dikotomis mengenai ilmu pengetahuan"[28], ilmu pengetahuan berasal dari satu sumber yaitu Allah Swt. Dalam al-Qur'an, Allah menganjurkan ada keseimbangan antara kehidupan duniawi dan akhirat [*balance*] dan al-Qur'an juga "memberikan nilai yang sangat tinggi terhadap ilmu. Rasulullah sendiri diperintahkan untuk berdoa kepada Tuhan yaitu "Tuhanku, tingkatkanlah pengetahuanku" [Q.S.20:114]. Al-Qur'an dengan tegas menyatakan bahwa semakin banyak ilmu yang dimiliki seseorang, akan semakin bertambah pula iman dan komitmennya terhadap Islam[29]. Dari konsep Qur'an tersebut, tergambar bahwa sebenarnya pendidikan dalam Islam adalah berusaha memadukan antara unsur *profan* dan *immanen* dan di sini terkandung pengertian bahwa pendidikan Islam menghindari adanya dikotomi antara kedua aspek tersebut [*profan and immanen*]. Akan tetapi, pada realitas sejarah justru supermasi pendidikan Islam lebih diberikan pada ilmu-ilmu agama [*al-'ulum al-diniyah*] sebagai jalan tol untuk menuju Tuhan[30], sementara "ilmu-ilmu umum" menjadi kurang diminati dan bahkan sampai tingkat "diharamkan".

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[26]Ismail Raji al-Faruqi, *Islamisasi Pengetahuan*, Terj.Anas Mahyuddin, (Bandung: Pustaka-Perpustakaan Salman Institut Teknologi,1984), hlm. 21.

[27]Suroyo, *Antisipasi Pendidikan Islam dan Perubahan Sosial Menjangkau Tahun 2000*, dalam: Muslih Usa (Edit.), Pendidikan Islam di Indonesia antara Cita dan Fakta, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hlm. 45.

[28]Muhaimin, et.al., *Paradigma Pendidikan Islam...*, hlm.41.

[29]Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas* tentang Transformasi Intelektual, terj. Ahsin Mohammad, (Bandung: Pustaka, 1985), Op.cit., hlm. 160.

[30]Muhaimin, et.al., *Paradigma Pendidikan Islam...*, hlm.41.

Pada kondisi sekarang ini, pendidikan Islam berada pada posisi determinisme historik dan realisme. Artinya, pada sejarah awalnya pendidikan Islam pernah mencapai puncak kejayaannya, ketika itu dunia Islam mampu melahirkan tokoh-tokoh ilmu pengetahuan yang berkaliber dunia dan bersama dengan perkembangan ilmu tersebut berkembang dan maju dalam peradaban Islam. Tetapi sekarang ini, kondisi yang terjadi sebaliknya, artinya dalam realitas praktis sekarang ini pendidikan Islam "seakan-akan tidak berdaya", karena dihadapkan dengan realitas perkembangan masyarakat industri modern[31]. Maka dalam "posisi yang sangat tergantung dengan peradaban industri ini, pendidikan Islam belum mampu mengintegrasikan ilmu sebagaimana idealisasinya"[32]. Hal inipun, didukung dengan pandangan sebagian umat Islam yang kurang meminati ilmu-ilmu umum dan bahkan sampai pada tingkat "diharamkan". Maka dalam "kondisi ini, dikotomi masih sangat kuat dan pelaksanaan pendidikan Islam hanya mampu menyesuaikan diri dengan kecenderungan pendidikan yang lebih berorientasi pada materialistis"[33] dalam segala aspeknya dan kondisi inipun cukup diperparah dengan kuatnya kecenderungan *"sekulatistik"* pada sistem dunia pendidikan Islam dewasa ini.

Untuk mengkritisi persoalan ini, peneliti meminjam pandangan Fazlur Rahman, yang menawarkan salah satu pendekatannya yaitu "dengan menerima pendidikan sekuler modern sebagaimana telah berkembang secara umumnya di dunia Barat dan mencoba untuk "mengislamkannya, yakni mengisinya dengan konsep-konsep kunci tertentu dari Islam. Pendekatan yang ditawarkan ini, menurutnya memiliki dua tujuan, yaitu: [1] upaya membentuk watak pelajar dan mahasiswa dengan nilai Islam dalam kehidupan individu dan masyarakat, [2] para ahli yang berpendidikan modern untuk menamai bidang kajian masing-masing dengan nilai Islam pada perangkat-perangkat yang lebih tinggi menggunakan perspektif Islam untuk mengubah

---

[31]M. Rusli Karim, *"Pendidikan Islam di Indonesia dalam Transformasi Sosial Budaya"dalam Pendidikan Islam di Indonesia,* dalam : Musli Usa, ,[Editor] Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991),hlm.129.

[32]Imam Syafi'ie, *Manajemen Pendidikan Islam Memasuki Milenium III,* Jurnal Pendidikan Islam Ta'dib, (No.04) ISSN 1401-6973, Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah, Maret 2001, Palembang, hlm. 66.

[33]Ibid, hlm. 66.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

kandungan maupun orientasi kajian-kajian mereka"[34]. Ismail Raji al Faruqi, juga menyatakan pandangan yang sama, yaitu "sistem pendidikan Islam harus dipadukan dengan sistem sekuler. Perpaduan kedua sistem pendidikan tersebut, diharapkan akan lebih banyak dapat dilakukan daripada sekedar memakai cara-cara sistem Islam dan cara-cara otonomi sistem sekuler[35]. Maksudnya, pengetahuan Islam akan menjadi pengetahuan tentang sesuatu yang langsung berhubungan dengan kehidupan sehari-hari di dunia ini, sementara pengetahuan modern akan dapat dibawa dan dimasukkan ke dalam kerangkan sistem Islam.

Maka dari pandangan Fazlur Rahman dan Ismail Raji al Faruqi ini, pada dasarnya ada tiga pendekatan pembaruan pendidikan Islam yang perlu dicermati, yaitu, *Pertama*, mengislamkan pendidikan sekuler modern, artinya menerima pendidikan sekuler modern, istilah Fazlur Rahman "mengislamkannya". *Kedua*, menyederhanakan silabus-silabus tradisional, artinya mereformasi silabus-silabus pendidikan tradisional yang sarat dengan materi-materi tambahan yang tidak perlu. *Ketiga*, menggabungkan cabang-cabang ilmu pengetahuan lama dengan cabang-cabang ilmu pengetahuan baru[36]. Sejalan dengan pemikiran di atas, Fazlur Rahman, menyatakan sebenarnya upaya modernisasi pendidikan Islam adalah bagaimana "membuatnya mampu untuk produktivitas intelektual Islam yang kreatif dalam semua bidang usaha intelektual bersama-sama dengan keterkaiatan yang serius kepada Islam"[37]. Maka menurut Fazlur Rahman, esensi pendidikan Islam adalah apa yang disebut "intelektualisme Islam", artinya mempunyai makna pertumbuhan suatu pemikiran Islam yang asli dan memadai [artinya kembali pada Qur'an dan Hadis] yang dapat dan harus memberikan kriteria untuk menilai keberhasilan atau kegagalan sebuah sistem pendidikan Islam. Di sini diperlukan kemampuan dan metode yang

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[34]Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas*..., hlm. 155, 156.

[35]Ismail Raji al Faruqi, *Islamisasi Pengetahuan*, Terj., hlm. 25.

[36]Muhaimin, dkk., *Kontroversi Pemikiran Fazlur Rahman Studi Kritis Pembaharuan Pendidikan Islam*, (Cerebon: Dinamika, 1999), hlm.2-4.

[37]Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas*..., hlm. 160.

tepat dalam memahami al-Qur'an sebagai titik pusat intelektualisme Islam, sebab al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia[38].

Perpaduan kedua sistem tersebut harus dilakukan secara baik, terencana, sistimatis, sehingga dapat melahirkan sistem baru yang terpadu untuk dapat memperbarui sistem pendidikan Islam yang ada, artinya perpaduan tersebut merupakan suatu langkah strategi yang harus dilakukan. A.Syafi'i Ma'arif[39], menyatakan apabila konsep dualisme dikotomik berhasil ditumbangkan dan dalam jangka panjang sistem pendidikan Islam akan berubah secara keseluruhan, mulai dari tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi. Misalnya saja, IAIN akan lebur secara integratif dengan perguruan tinggi - perguruan tinggi negeri lainnya. Peleburan ini merupakan suatu langkah strategis, asalkan peleburan tersebut bukan dalam bentuk "satu atap" saja, tetapi lebur berdasarkan rumusan filosofis, metodologi keilmuan, proses dan sampai pada tingkat departemental. Dengan demikian tidak ada lagi pengkotakan-pengkotakan ilmu ke dalam "ilmu-ilmu umum" dan "ilmu-ilmu agama".

Dalam upaya peleburan tersebut, ada beberapa persoalan mendasar yang harus dan perlu diperhatikan dan mungkin akan terjadi, yaitu: *Pertama*, "kajian-kajian keislaman" atau "kajian-kajian keagamaan" menjadi kurang diminati dan hal ini mungkin akan menjadi persoalan pertama yang dihadapi. Artinya, calon mahasiswa atau peserta didik akan lebih memilih fakultas-fakultas umum dari pada fakultas keagamaan. Sebab fakultas-fakultas umum menurut sebagian calon mahasiswa lebih menjanjikan masa depan yang layak bagi mereka. Misalnya saja, dapat diperhatikan Universitas al-Azhar Kairo yang telah mengembangkan model peleburan ini, tetapi yang terjadi adalah kajian-kajian keislaman menjadi kajian yang kurang diminati. Fazlur Rahman, menyatakan "sebagian besara pelajar atau mahasiswa yang memasuki lapangan pendidikan agama adalah mereka yang gagal memasuki karier-karier yang

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[38]Ibid, hlm. 1.

[39]A.Syafi'i Ma'arif, "*Pemikiran Tentang Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*", dalam Musli Usa [Editor], Pendidikan Islam di Indonesia Antara Citra dan Fakta, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hlm.150.

lebih basah"[40]. Fenomena yang dikemukakan Fazlur Rahman ini, sekarang telah terjadi di Indonesia, artinya universitas-universitas dan institut-institut Islam menjadi pilihan kedua dan pada hampir seluruh IAIN dan institut-institut Islam lainnya [swasta], kata Azyumardi Azra, calon mahasiswa yang mendaftar mengalami penurunan yang cukup signifikan. Bahkan menurutnya, dapat dikatakan ada IAIN yang tidak melakukan seleksi[41], apalagi perguruan tinggi Islam swasta.

Kedua, pendidikan Islam akan "menghadapi pilihan yang tidak mudah antara "kebutuhan keagamaan" dan "kebutuhan duniawi". Artinya, di satu sisi pendidikan Islam dituntut dapat berfungsi meningkatkan pemahaman ilmu-ilmu agama dan kemampuan mengamalkan ajaran Islam. Sementara di sisi lain lembaga ini juga dituntut berfungsi menumbuhkan kemampuan peserta didik dalam memenuhi kebutuhan hidup yang tidak seluruhnya dapat dipecahkan dengan ilmu agama"[42]. Sedangkan, persoalan serius lain yang dihadapi adalah pandangan dan keyakinan umat Islam, bahwa "ajaran Islam telah selesai disusun tuntas dalam ilmu agama sebagai panduan penyelesaian seluruh persoalan kehidupan yang dihadapi manusia di dunia dan ilmu-ilmu umum [non-agama] dipandang bertentangan dengan ilmu agama dan akan membuat kesengsaraan umat Islam[43] bahkan menggoyahkan imam. Tetapi, pada sisi lain, kurang disadari bahwa pada kenyataan persoalan kehidupan duniawi selalu berkembang serta selalu mengalami perubahan dan ternyata seluruhnya tidak dapat dipecahkan dengan ilmu-ilmu agama.

Ketiga, usaha integrasi kedua sistem ilmu tersebut, dinilai hanya akan menambah persoalan bagi pendidikan Islam yang makin ruwet, karena belum tersusunnya konsep ilmu integral yang ilmiah dan mampu mengatasi dikotomi ilmu umum dan agama itu sendiri. Misalnya saja, upaya integrasi kurikulum pendidikan

---

[40]Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas...*, hlm. 166.

[41]*"Akibat Tak Diminati Lulusan Madrasah" IAIN Buka Program Umum Tanpa Persiapan Memadai*, From: http://www.kompas.com/kompas-cetak/ 0111/07/ DIKBUD/iain09.htm. Kompas, 7 November 2001.

[42]Abdul Munir Mulkhan, *"Dilema Madrasah di Antara Dua Dunia"*, From: http://www. Pesantren online. com/ artikel/detailartikel-php3?artikel=101, 4 April 2002.

[43]Ibid, 4 April 2002.

Islam tidak lebih dari upaya penggabungan dua sistem ilmu tanpa konsep atau semacam tambal sulam, akibatnya tujuan praktis untuk meningkatkan daya saing lulusan pendidikan Islam dengan pendidikan umum menjadi sulit dipenuhi atau sulit bersaing.

Keempat, kedua ilmu tersebut memiliki sistem kebenaran dan metodologi yang berbeda, sehingga upaya penggabungan justru dapat menumbuhkan sikap *ambivalen* peserta didik dan dapat mengganggu perkembangan jiwa anak. Penggabungan kedua ilmu tersebut dalam kurikulum pendidikan Islam dapat menyebabkan peserta didik keberatan beban dari seharusnya yang dapat dipikul, dan akibatnya kemampuan peserta didik dalam menguasai ilmu terkesan lamban, setengah-tengah, dan hasil belajarnya cenderung rendah[44], sehingga terkesan lulusan pendidikan Islam "belum siap" menghadapi tantangan pada era global dan perkembangan teknologi informasi yang sangat drastis.

Dari pandangan ini, tanpaknya pendidikan Islam menghadapi tantangan yang begitu kompleks baik tantangan internal maupun tantangan eksternal. Tantangan internal yang dihadapi menyangkut dengan sisi pendidikan Islam sebagai program pendidikan yaitu : persoalan dikotomi pendidikan, "orientasi pendidikan Islam yang kurang tepat, sempitnya pemahaman terhadap esensi ajaran Islam, perencanaan dan penyusunan materi, metodologi dan evaluasi yang kurang tepat, pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan Islam masih bersikap eksklusif dan belum mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan yang lainnya. Tantangan eksternal yang dihadapi berupa berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada munculnya *scientific critizism* terhadap pelajaran agama yang bersifat konservatif, tradisional, tekstual dan skripturalistik. Tantangan pada era globalisasi di bidang informasi, perubahan sosial ekonomi dan budaya dengan segala dampaknya, kemajemeukan masyarakat yang beragam yang masih belum siap untuk berbeda paham dan justru cenderung bersikap apologis, fanatik, absolutis, serta *truth claim*

[44]Ibid, 4 April 2002.

yang dibungkus dalam simpul-simpul interest, baik interest pribadi maupun yang bersifat politis ataupun sosiologis"[45]. Hal ini semua, merupakan tantangan yang dihadapi, tetapi sekaligus menjadi peluang perubahan bagi pendidikan Islam.

Mencermati kenyataan tersebut, maka mau tidak mau persoalan konsep dualisme dikotomik pendidikan harus segara ditumbangkan dan dituntaskan, baik pada tingkat filosofis-paradigmatik maupun teknis departemental. Apabila langkah ini dapat dilakukan secara terencana dan sistematis, maka dalam jangka panjang sistem pendidikan Islam akan mengalami perubahan secara keseluruhan, mulai dari tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi. Oleh karena itu, sudah waktunya "dikotomisasi "ilmu Islam" dan "ilmu umum" secara ideologis dan teologis harus dicairkan bukan dengan Islamisasi ilmu-ilmu umum, tetapi melalui peletakan semua ilmu dalam sebuah sistem kebenaran dan metodologi"[46], sehingga suatu ilmu dapat ditolak hanya jika ilmu tersebut temyata salah secara metodologi dan sebaliknya jika terbukti ilmu tersebut benar bukan karena hubungannya dengan teks al-Qur'an dan Sunnah Nabi, tetapi kebenaranya berdasarkan metodologi ilmu tersebut. Tetapi, perlu disadari bahwa persoalan integrasi tidak semudah itu, karena pada kenyataannya umat Islam selalu terperangkap dalam paradigma yang sangat subjektif yaitu memandang "hanya ada satu sistem ilmu yang benar yaitu ilmu Islam", karena kurang disadari bahwa sebenarnya "tingkat kebenaran ilmu hanya mungkin benar dan bukan mutlak benar seperti wahyu"[47].

Maka untuk melakukan integrasi ilmu, perlu melalui proses uji kebenaran ilmu dan metodologi yang selama ini disebut ilmu sekuler. "Sistem program kurikulum, tidak lagi memilih antara ilmu umum sekuler dengan ilmu agama, maka ilmu fisika, matematika, biolgi, kimia, sejarah, dan ilmu lainnya dapat dikatakan Islam, sepanjang didukung dengan bukti kebenarannya. Sedangkan ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tafsir, ilmu hadis dan ilmu lain yang selama ini disebut dengan "ilmu agama" harus diubah

[45]Muhaimin, et.al, *Paradigma Pendidikan Islam*, hlm. 92.
[46]Abdul Munir Mulkhan, *Dilema Madrasah di Antara Dua Dunia*, 4 April 2002.
[47]Ibid, 4 April 2002.

penamaanya dan hanya disebut dengan ilmu tanpa pemberian "embel-embel atau label ilmu agama". Dari pengembangan ini, keyakinan tauhid mungkin saja dapat tumbuh dan muncul melalui studi sejarah, fisika, matematika, kimia, dan biologi"[48]. Maka, apabila pandangan ini diterima, resikonya adalah "tidak mungkin lagi umat Islam melakukan klaim sepihak pada ilmu tertentu sebagai ilmu Islam, sistem pendidikan tertentu sebagai sistem pendidikan Islam dan sistem sosial tertentu sebagai sistem sosial Islam, sementara yang lain bukan Islam"[49]. Dengan cara perpaduan tersebut, justru Islam akan benar-benar ditempatkan sebagai akar semua ilmu, sistem pendidikan, dan sistem sosial. Dengan demikian, kedua sistem tersebut harus dipadukan secara integral dari rumusan filosofis, sistem metodologi, kurikulum, materi, dan manajemen. Kemudian sistem pendidikan yang ditibulkannya harus diisi dengan semangat Islam yang berfungsi sebagai sebuah bagian integral dari program ideologisnya, sehingga pendidikan Islam diharapkan dapat memproduksi intelektual muslim dan mujtahid-mujtahid yang memiliki wawasan intelektual yang unggul dan dapat bersaing dengan produk pendidikan lain. Apabila tidak, maka pendidikan Islam akan terus mengalami keterpurukan dalam bersaiang dengan pendidikan "sekuler" dan selalu dianggap sebagai sistem pendidikan yang berada pada posisi kelas dua, marginal, dan kurang diminati.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dari pandangan di atas, apabila proses integrasi itu yang dilakukan dengan menggunakan paradigma organisme[50], maka pendidikan Islam merupakan kesatuan atau sebagai sistem yang berusaha mengembangkan pandangan dan semangat hidup [*weltanschauung*] Islam, yang dimanifestasikan dalam sikap hidup dan keterampilan hidup yang Islami[51]. Dalam konteks pandangan itu, "*al-tarbiyah al-Islamiyah* [pendidikan Islami] berarti *al-tarbiyah fi al-Islam* [pendidikan dalam Islam] dan *al-tarbiyah 'inda al-muslimin* [pendidikan di kalangan orang-orang Islam]. Maka

---

[48]Ibid, 4 April 2002.

[49]Ibid, 4 April 2002

[50]Istilah "organisme" dapat berarti : benda hidup [*plants, are animals and bacteria organisme*], dan dapat berarti kesatuan yang terdiri dari atas bagian-bagian yang rumit [Salim, P. 1996], dalam Muhaimin, et.al., *Paradigma Pendidikan Islam*, hlm. 45.

[51]Muhaimin, et.al., *Paradigma Pendidikan Islam*, hlm. 45.

pengertian ini menggarisbawahi pentingnya kerangka pemikiran yang dibangun dari *fundamental doctrins* dan *fundamental values* yang terkandung dalam al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber pokok. Kemudian dapat menerima kontribusi pemikiran dari para ahli dengan mempertimbangkan konteks historisnya. Dari kerangka pemikiran ini, maka nilai-nilai Ilahi, agama dan wahyu didudukan sebagai sumber konsultasi, sementara aspek-aspek kehidupan lainnya didudukan sebagai nilai-nilai insani yang mempunyai relasi *horizontal-lateral* atau *lateral-sekuensial* yang harus berhubungan *vertikal-linier* dengan nilai-nilai Ilahi atau agama"[52].

Dengan melalui upaya semacam ini, maka "sistem pendidikan Islam diharapkan dapat mengintegrasikan nilai-nilai ilmu pengetahuan, nilai-nilai agama dan etik, sehingga mampu melahirkan manusia-manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan memiliki kematangan profesional, serta sekaligus hidup di dalam nilai-nilai agama"[53]. Sebab pendidikan Islam dalam prosesnya harus berusaha untuk membangun manusia berkualitas, yang ditandai dengan peningkatan kecerdasan, pengetahuan, keterampilan dan ketaqwaan sebagai *relasi vertikal* dengan nilai-nilai *Ilahiyah.* Dengan demikian, pendidikan Islam diharapkan sebagai wahana yang strategi bagi upaya peningkatan mutu kehidupan dengan terbentuknya berbagai pilihan dan kesempatan mengembangkan diri di masa depan, karena pendidikan memiliki peran senteral dalam proses mendorong individu dan masyarakat untuk mencapai kemajuan pada semua aspek kehidupan yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam.

Sebenarnya, paradigma pendidikan tersebut, sudah "mulai dirintis dan dikembangkan dalam sistem pendidikan Islam di Madrasah yang dideklarasikan sebagai sekolah "bercirikan khas Islam". Kebijakan pengembangan madrasah tersebut sebagai upaya untuk mengakomodasikan tiga kepentingan utama, yaitu pendidikan Islam dalam hal ini madrasah, yaitu : *Pertama,* sebagai wahana untuk membina ruh atau praktek hidup keislaman. *Kedua,* memperjelas dan memperkokoh keberadaan madrasah sederajat dengan sistem sekolah, sebagai wahana pembinaan warga

[52]Ibid, hlm. 46.
[53]Ibid, hlm. 46.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

negara yang cerdas, berpengetahuan, berketerampilan, serta produktif, dan *Ketiga*, mampu memproses tuntutan-tuntutan masa depan, dalam arti sanggup melahirkan manusia yang memiliki kesiapan memasuki era globalisasi, industrialisasi maupun era informasi[54]. Implikasi dari kepentingan dan kebijakan ini adalah perubahan kurikulum lebih didasarkan pada kebutuhan masyarakat pengguna jasa pendidikan Islam. Dari kerangka ini, muncul pula "gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan dan teknologi [iptek] yang telah memberi legitimasi teologis perubahan kurikulum pendidikan Islam [madrasah] dan mulai berkembang pula pemikiran dan gagasan integrasi ilmu agama dan iptek yang selama ini dikelompokan kedalam "ilmu umum" atau "ilmu sekuler", dan akhirnya mucul dan berkembang berbagai model pendidikan Islam [madrasah] terpadu yang mengintegrasikan "ilmu umum" dan "ilmu agama" ke dalam satuan kurikulum pendidikan Islam [madrasah][55].

Fenomena lain yang perlu dicermatai adalah paradigma pendidikan Islam yang dikembangkan pada sekolah-sekolah atau perguruan tinggi umum yang bukan bercirikan agama Islam. "Di sekolah-sekolah atau perguruan tinggi umum, diberikan seperangkat matapelajaran atau ilmu pengetahuan [matakuliah], salah satunya adalah matapelajaran atau mata kuliah "pendidikan agama" yang hanya diberikan 2 jam pelajaran perminggu atau 2 sks dan didudukannya sebagai mata kuliah dasar umum[56], sebagai upaya pembentukan kepribadian religius"[57]. Implikasinya, pengembangan pendidikan Islam tersebut sangat bergantung pada kemauan, kemampuan dan *political-will* dari para pembinanya dan pimpinan lembaga pendidikan tersebut, terutama dalam membangun hubungannya kerjasama dengan matakuliah lainnya. Relasi antara pendidikan agama dengan beberapa matapelajaran atau matakuliah lainnya dapat bersifat *hirizontal-lateral* [*independent*], *lateral-*

[54]Ibid, hlm. 46.

[55]Abdul Munir Mulkhan, *Dilema Madrasah di Antara Dua Dunia*, 4 April 2002.

[56]Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, mengeluarkan keputusan Nomor 232 Tahun 2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, pasal 10 ayat 1, mengkategorikan dan memasukan matakuliah "Pendidikan Agama" ke dalam kelompok "Matakuliah Pengembangan Kepribadaian" [MPK] dan merupakan kurikulum inti yang wajib. Pendidikan agama (Islam) menjadi kajian di perguruan tinggi umum sebagai upaya pembentukan kepribadian manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa atau kepribadian yang relegius [Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor : 232/U/2000, tentang *Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa*, Jakarta 20 Desember 2000].

[57]Muhaimin, et.al., *Paradigma Pendidikan Islam*, hlm. 44.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

sekuensial atau bahkan *vertikal linier*[58]. Pengembangan pendidikan agama sangat bergantung pada *political-will* pembinanya dan pimpinan lembaga pendidikan tersebut. Maka dapat dikatakan, bahwa fenomena pengembangan pendidikan Islam "di sekolah atau perguruan tinggi umum nampaknya sangat bervariasi, dalam arti ada yang cukup puas dengan pola *horizontal-lateral* [*independent*], ada yang mengembangkan pola relasi *lateral-sekuensial*, dan ada pula yang berobsesi untuk mengembangkan pola relasi *vertical-linier*[59]. Semuanya itu banyak ditentukan oleh kemauan, kemampuan, dan *political-will* dari para pembina pendidikan agama serta pimpinan dari lembaga pendidikan tersebut.

Hal lain, yaitu kebijakan tentang pembinaan pendidikan agama Islam secara terpadu di sekolah umum misalnya, antara lain menghendaki agar pembina [guru dan dosen] agama mampu memadukan antara kajian-kajian keagamaan [pelajaran agama] dengan kajian-kajian umum [pelajaran umum]. Akan tetapi "kebijakan ini akan sulit diimplementasikan pada sekolah atau perguruan tinggi umum yang cukup puas hanya dengan pola relasi *horizontal-lateral* [*independent*] dan barangkali kebijakan tersebut relatif mudah diimplementasikan pada lembaga pendidikan yang mengembangkan pola *lateral-sekuensial*"[60]. Hanya saja implikasi dari kebijkan tersebut adalah "para guru agama" dan "dosen agama" dituntut harus memahami ilmu-ilmu umum dan menguasai ilmu agamanya, sebaliknya "guru umum" juga dituntut untuk memahami ilmu-ilmu agama, sehingga mampu dan dapat menjelaskan hubungan antara keduanya. Namun demikian kadang-kadang dirasakan adanya kesulitan, terutama ketika berhadapan dengan dasar pemikiran dan kebenaran yang berbeda, sehingga dapat terjadi konflik antara keduanya. Misalnya, "contoh sederhana adalah menyangkut persoalan asal usul manusia. Sains yang diajarkan disekolah bertolak

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[58]Relasi yang bersifat *horizontal-lateral* (independent) mengandung arti bahwa beberapa mata pelajaran atau mata kuliah yang ada dan pendidikan agama mempunyai hubungan sederajat yang independent, dan tidak harus saling berkonsultasi. Relasi bersifat *lateral-sekuensial*, berarti di antara masing-masing mata pelajatan atau matakuliah tersebut mempunyai hubungan sederajat yang saling berkonsultasi. Sedangkan relasi *vertikal-linier* berarti memadukan pendidikan agama sebagai sumber nilai atau sumber konsultasi, sementara seperangkat matapelajaran atau matakuliah yang lain adalah termasuk pengembangan nilai-nilai insani yang mempunyai relasi vertikal-linier dengan agama [Muhaimin, el-at., *Paradigma Pendidikan Islam*, hlm.44].

[59]Ibid, hlm. 44.

[60]Ibid, hlm. 44-45.

dari dasar pemikiran bahwa manusia berasal dari "kera" [teori Darwin], sementara kajian-kajian pendidikan agama tidak berpandangan demikian. Para ahli psikologi *behavioristik* mengembangkan teori-teorinya berangkat dari hasil penelitian terhadap sejumlah hewan dan untuk kemudian diterapkan pada perilaku manusia, sementara pendidikan agama berangkat dari hasil pemahaman terhadap wahyu [kitab suci] dari Tuhan. Ilmu ekonomi bertolak dari pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang serakah [*kapitalisme*], sehingga bagaimana seseorang yang memiliki modal sedikit, tetapi mampu menghasilkan keuntungan yang lebih besar, yang berbeda dengan konsep dalam pendidikan agama, dan seterusnya[61].

Suasana tersebut kadang-kadang menimbulkan ketegangan, kebingunan, dan keraguan pada diri peserta didik, terutama jika masing-masing para guru ["guru umum" dan "guru agama"] saling memaksanakan kebenaran pandangannya. Memang, siapa saja akan mengakui bahwa kajian-kajian agama bertolak dari dasar keimanan dan bersumber dari Qur'an dan Hadis, sedangkan ilmu pengetahuan bertolak dari dasar keraguan, sehingga seakan-akan peserta didik diuji kemampuan analisis dan pandangannya. Jika seorang peserta didik pandangan agamanya mendominasi pikirannya, mungkin ada kecenderungan untuk bersikap pasif dan statis dalam menanggapai teori Darwin tersebut, tetapi bila seorang peserta didik ilmu pengatahuan mendominasi pemikirannya maka akan cenderung untuk bersikap *split of personality*[62].

Fenomena ini menuntut penyiapan sumber daya pengajar yang mampu mengakomudasi dan mengintegrasikan perbedaan pandangan tersebut dan mengharuskan kehadiran suatu lembaga pendidikan Islam atau lembaga pendidikan tinggi Islam untuk menjawab problem tersebut yaitu mampu mengintegrasikan kedua ilmu tersebut. Maka Universitas Islam yang direncanakan itu, haruslah merupakan suatu model lembaga pendidikan tinggi masa depan yang menyiapkan sumberdaya manusia yang akan mampu mengintegrasikan nilai-nilai ilmu pengetahuan, nilai-nilai

[61]Ibid, hlm .45.
[62]Ibid, hlm. 45.

agama dan etika, dengan pendekatan pola relasi *vertikal-linier* yaitu menjadikan pendidikan agama sebagai sumber nilai atau sumber konsultasi dan kemudian memadukan dengan pola *lateral-sekuensial*, yaitu masing-masing kajian [matapelajaran dan matakuliah] tersebut mempunyai relasi sederajat yang saling berkonsultasi. Sedangkan seperangkat kajian-kajian [matapelajaran atau matakuliah] yang lain adalah termasuk pengembangan nilai-nilai insani yang mempunyaui relasi *vertikal-linier* dengan agama.

Gagasan universitas Islam mulai disambut dengan IAIN akan lebur secara integratif dengan perguruan tinggi - perguruan tinggi negeri lainnya. Peleburan tersebut merupakan suatu langkah strategis, asalkan langkah-langkah peleburan terbut bukan dalam bentuk "satu atap" atau dalam "satu bangunan", tetapi lebur berdasarkan rumusan filosofis, metodologis, kurikulum, manajemen, sumber daya manusianya, dan bahkan sampai pada tingkat departemental. Langkah peleburan ini, dinilai sebagian ahli pendidikan sebagai usaha yang strategi untuk memperbaiki atau menyesuaikan visi dan misi pendidikan Islam sesuai dengan tuntutan masyarakat global. Tilaar, menyatakan dewasa ini sedang dipersiapkan transformasi IAIN menjadi Universitas Islam. Gagasan ini memang sesuai dengan tuntutan kehidupan global, namun dalam usaha untuk memperbaiki atau menyesuaikan visi dan misi IAIN sesuai dengan tuntutan masyarakat global, perlu manyadari akan bahaya yang dapat muncul dari perubahan paradigma tersebut. Kata Tilaar, gagasan tersebut harus segara direalisir, karena kita telah melihat bahaya yang dialami oleh dunia Barat yang memisahkan antara ilmu pengetahuan dan agama [paradigma *formism*]"[63], demikian pula "produk pendidikan Islam yang menerapkan paradigma *mechanism* yang belum mampu menjadikan pendidikan agama sebagai faktor integratif dalam pengembangan keilmuan, bahkan masing-masing berbicara dengan bahasanya sendiri [*relasi horizontal-lateral*] dan di antaranya juga tidak terjadi komunikasi dan interaksi yang produktif dan dinamis"[64].

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[63]H.A.R. Tilaar, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan dalam Persfektif Abad 21*,(Magelang:Tera Indonesia,1998,hlm.211.
[64]Muhaimin, et.al, *Paradigma Pendidikan Islam*, hlm. 47.

Brockman di dalam bukunya *The Trird Culture* melukiskan betapa antara para ahli tidak terjadi komunikasi yang produktif sehingga masing-masing berbicara dengan bahasanya sendiri. Maka, bukan merupakan suatu kemustahilan apabila penelitian, pemikiran, gagasan-gagasan dari para ahli yang terpisah-pisah tersebut [*horizontal-lateral/independent*] dapat berbahaya dalam eksistensi kehidupan manusia. Coba dilihat bahaya dari praktek *bio-teknologi* dengan adanya praktek kloning terhadap binatang yang dewasa ini mulai dilaksanakan terhadap manusia, meskipun pemerintah Amerika Serikat misalnya telah melarang teknologi kloning terhadap manusia[65]. Hal ini sebenarnya merupakan indikasi bahwa pengembangan ilmu pengetahuan terlepas dari nilai-nilai agama. Berkaitan hal tersebut, kata Tilaar, hendaknya universitas Islam yang didambakan dan direncanakan tersebut haruslah menjadikan agama Islam sebagai faktor integratif di dalam pengembangan fakultas-fakultas ilmu murni. Nilai agama hendaknya dijadikan sebagai faktor integratif dari fakultas-fakultas baru yang akan dilahirkan dan dikembangkan. Universitas Islam yang direncanakan itu haruslah merupakan suatu model lembaga pendidikan tinggi masa depan, karena lembaga tersebut akan mengintegrasikan nilai-nilai ilmu pengetahuan, nilai-nilai agama dan etika yang pada akhirnya merupakan karakteristik dari masyarakat madani pada era global abad 21"[66].

Muhaimin, menyatakan bahwa perlu menangkap dan memahami misi dan visi pengembangan Universitas Islam Negeri, setidak-tidaknya dapat dibidik dari tiga dimensi, yaitu : dimensi normatif-teologis, dimensi filosofis, dan dimensi historik-emperis[67]. Ketiga dimensi tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut: *Pertama*, dimensi "*normatif-teologis*, bahwa doktirn Islam pada dasarnya mengajarkan kepada umatnya untuk memasuki Islam secara *kaffah* atau menyeluruh [*udkhuluw fi al-silm kaaffah*]. Islam *kaffah* [Q.S.2:208] secara apriori menggarisbawahi terwadahinya berbagai aspek kehidupan dalam Islam". Pandangan tersebut "mengandung makna

---

[65]H.A.R. Tilaar, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan dalam...*, Op.cit., hlm. 211-212.

[66]Ibid., hlm. 211-212.

[67]Muhaimin, et.al,. *Paradigma Pendidikan Islam...*, hlm. 63.

bahwa setiap muslim dituntut untuk menjadi *actor* beragama yang *loyal, concern* dan *commitment* dalam menjaga dan memelihara ajaran dan nilai-nilai Islam dalam segala aspek kehidupannya, serta bersedia dan mampu berdedikasi sesuai dengan minat, bakat, kemampuan dan bidang keahliannya masing-masing dalam perspektif Islam untuk kepentingan kemanusiaan[68].

Bertolak dari *paradigma* bahwa "pendidikan Islam merupakan suatu upaya pengembangan pandangan hidup yang Islami, untuk dimanifestasikan dalam sikap hidup dan keterampilan hidupnya selaras dengan minat, bakat, kemampuan, dan bidang keahliannya masing-masing"[69]. Paradigma ini berimplikasi pada pendidikan Islam yang berorientasi pada peningkatan kualitas iman, taqwa, dan dapat diimplementasi dalam kehidupan sehari-hari yang ditandai dengan : [1] kemampuan membaca dan memahami nilai-nilai mendasar yang terakomudasi dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, [2] memposisikan diri sebagai pelaku [*actor*] ajaran Islam yang loyal, dan sebagai pemikir atau penalar dan pengkaji, [3] memiliki *commitment* yang tinggi terhadap nilai-nilai ajaran Islam, [4] siap mengabdi dengan dedikasi yang tinggi dalam rangka menegakkan nilai-nilai Islam yang *rahmatan lil'alamin*, [5] senantiasa membaca fenomena alam, fenomena fisik dan psikis, fenomena sosial, fenomena historis, [6] memposisikan diri sebagai pengamat, pengkaji, peneliti sehingga memiliki daya analisis yang tajam, kritis dan dinamis dalam memahami fenomena disekitarnya, [7] membangun kepekaan intelektual serta kepekaan informasi, [8] masing-masing orang memiliki bakat, kemampuan, dan minat tertentu, maka pengembangan potensi perlu disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian masing-masing sehingga terwujudlah kematangan profesionalisme[70].

Kedua, dimensi *filosofis*, jika paradigma pendidikan Islam adalah sebagai upaya pengembangan pandangan hidup Islami yang diwujudkan dalam sikap hidup dan dimanifestasikan dalam keterampilan hidup sehari-hari. Maka pengembangan ilmu

---

[68]Ibid, hlm. 63

[69]Ibid, hlm. 63.

[70]Ibid, hlm. 64.

pengetahuan dan teknologi akan bertolak dari suatu pandangan yang *theosentris*, di mana proses dan produk pencarian, penemuan iptek lewat studi, penelitian dan eksperimen, serta pemanfaatannya dalam kehidupan, merupakan realisasi dari misi *kekhalifahan* dan pengabdiannya kepada Allah[71]. Dalam "kehidupan yang Islami nampaknya perlunya menggarisbawahi bangunan *ontologi, epistemologi* dan *aksiologi* ilmu pengetahuan yang tidak hanya menyakini kebenaran sensual-indrawi, logik dan etik insani, tetapi juga mengakui dan meyakini kebenaran *transendental* [*Ilahiyah*]. Dengan demikian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bersifat *value-free*, tetapi *value-bound*[72] dalam arti berada dalam *frame of work* yang merupakan realisasi dari misi *kekhalifahan* dan pengabdian kepada Allah, untuk membangun dunia yang *rahmatan lil 'alamin.*

Ketiga, dimensi *historis-emperis*, dalam realitas sejarah perkembangan Islam Harus Nasution [1995] telah memetakkan ciri-ciri gerakan ilmiah atau etos keilmuan dari kalangan ulama pada zaman klasik [terutama abad 8-11 M], yaitu [a] melaksanakan ajaran al-Qur'an untuk banyak mempergunakan akal, [b] melaksanakan ajaran hadis untuk menuntut yang sampai ada di negeri Cina [bukan ilmu agama], [c] mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad dan mengembangkan ilmu pengetahuan [sains] dengan mempelajari dan menguasai ilmu pengetahuan dari filsafat Yunani yang terdapat di Timur Tengah pada zaman mereka sehingga timbullah ulama fiqh, tauhid [kalam], tafsir, hadis, ulama bidang sains seperti ilmu kedokteran, matematika, optika, kimia, fisika, geografi dan lain-lain, [d] ulama yang berdiri sendiri, malahan menolak tawaran pemerintah [sultan] untuk menjadi pegawai negeri[73].

Pada periode klasik perkembangan Islam menggambarkan bahwa pemikiran Islam begitu berkembang dengan pesatnya, sehingga melahirkan kemajuan dunia Islam, baik di bidang filsafat, kalam, fisika, psikologi, medis, farmasi, ekonomi, pertanian, politik, sains, teknologi, hingga teori perang, maupun ilmu-ilmu keagamaan.

---

[71]Ibid, hlm. 64-65.

[72]Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1990), hlm. 23.

[73]Muhaimin, et.al,. *Paradigma Pendidikan Islam...*, hlm. 63.

Maka dapat dikatakan bahwa pemikir-pemikir muslim pada awalnya merupakan ahli dalam semua bidang yang dalam pemikiran modern disebut dengan ilmu-ilmu murni, ilmu-ilmu sosial, dan sains terapan. Sedangkan "idealitas pendidikan Islam merupakan pelembagaan pembelajaran tentang keseluruhan dimensi kehidupan manusia"[74], sehingga tidak membedakan kepentingan *ukhrawiyah* dengan kepentingan *dunyawiyah*.

Menyimak pengalaman historis tersebut, tanpaknya wacana pengembangan pendidikan Islam dalam hal ini IAIN menuju Universitas Islam Negeri, sebagai usaha untuk menangkap nilai-nilai, sikap, cara berpikir, dan berperilaku ulama [ilmuwan] pada periode klasik, karena dianggap mampu menghadapi tantangan dan penggeseran paradigma akibat kemajuan iptek yang sangat pesat. Implikasinya, sistem pendidikan Islam yang dibangun dan dikembangkan lewat Universitas Islam Negeri tersebut diharapkan mampu menghasilkan "ulama intelektual" [ulama *ilahiyah*] dan "intelektual ulama" [intelektual *ilahiyah*] yang bersikap rasional dan profesional, berpandangan luas, berbudi pekerti luhur, yang pengetahuannya tidak terbatas hanya pada "ilmu keagamaan" saja, tetapi mencakup ilmu pengetahuan umum dan mampu berdiri sendiri.

Uraian di atas, sebagai upaya untuk memotret paradigma pengembangan pendidikan Islam di Indonesia, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya sudut pandang lain yang menggunakan alat dan paradigma yang berbeda dalam melihat pengembangan pendidikan Islam. Tetapi, paradigma pengembangan pendidikan Islam yang dikemukakan tersebut, sangat diperlukan untuk mempertajam pemahaman tentang keunikan realitas pendidikan Islam yang berkembang di Indonesia dan selain itu, juga sebagai dasar dalam upaya menyusun langkah-langkah strategis untuk memodernisasi sistem pendidikan Islam di Indonesia. Walaupun diakui bahwa upaya

---

[74]Abdul Munir Mulkan, "*Pembelajaran Islam Model Garden Learning*", makalah disampaikan pada Lokakarya Dosen MPK Agama, Metode Pendidikan Agama Yang Efektif, Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Agama Islam [LPPAI], Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 11 Agustus 2002,, hlm. 1.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

untuk melakukan pembaruan [*modernisasi*] bukanlah merupakan persoalan dan pekerjaan sederhana dan bahkan dapat menimbulkan kontroversi, karena keyakinan dan pemahaman yang berbeda dari masyarakat Islam.

2. Paradigma Baru Pendidikan Islam Untuk Masyarakat Madani Indonesia

Proses pendidikan yang berakar dari kebudayaan, berbeda dengan praksis pendidikan yang terjadi dewasa ini yang cenderung mengalienasikan proses pendidikan dari kebudayaan. Kita memerlukan suatu perubahan paradigma [*paradigma shift*] dari pendidikan untuk menghadapi proses globalisasi dan menata kembali kehidupan masyarakat Indonesia. Cita-cita era reformasi tidak lain ialah membangun suatu masyarakat madani Indonesia[75], oleh karena itu, arah perubahan paradigma baru pendidikan Islam diarahkan untuk terbentuknya masyarakat madani Indonesia tersebut.

Arah perubahan paradigma pendidikan dari paradigma lama ke paradigma baru, terdapat berbagai aspek mendasar dari upaya perubahan tersebut, yaitu, *Pertama,* paradigma lama terlihat upaya pendidikan lebih cenderung pada : sentralistik, kebijakan lebih bersifat *top down*, orientasi pengembangan pendidikan lebih bersifat parsial, karena pendidikan didisain untuk sektor pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik dan keamanan, serta teknologi perakitan. Peran pemerintah sangat dominan dalam kebijakan pendidikan, dan lemahnya peran institusi pendidikan dan institusi non-sekolah. *Kedua*, paradigma baru, orientasi pendidikan pada: disentralistik, kebijakan pendidikan bersifat *bottom up*, orientasi pengembangan pendidikan lebih bersifat *holistik*; artinya pendidikan ditekankan pada pengembangan kesadaran untuk bersatu dalam kemajemukan budaya, kemajemukan berpikir, menjunjung tinggi nilai moral, kemanusiaan dan agama, kesadaran kreatif, produktif, dan kesadaran hukum. Meningkatnya peran serta masyarakat secara kualitatif dan kuantitatif dalam upaya pengembangan pendidikan, pemberdayaan institusi masyarakat, seperti keluarga, LSM, pesantren, dunia usaha[76], lemabag-lembaga

[75]H.A.R. Tilaah, *Pendidikan, Kebudayaan,...*, hlm. 168.

[76]Fasli Jalal, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Adicita, 2001), hlm.5.

kerja, dan pelatihan, dalam upaya pengelolaan dan pengembangan pendidikan, yang diorientasikan kepada terbentuknya masyarakat nadani Indonesia.

Berdasarkan pandangan ini, pendidikan Islam sudah harus diupayakan untuk mengalihkan paradigma yang berorientasi ke masa lalu [abad pertengahan] ke paradigma yang berorientasi ke masa depan, yaitu mengalihkan dari paradigma pendidikan yang hanya mengawetkan kemajuan, ke paradigma pendidikan yang merintis kemajuan. Mengalihkan paradigma dari yang berwatak *feodal* ke paradigma pendidikan yang berjiwa demokratis[77]. Mengalihkan paradigma dari pendidikan sentralisasi ke paradigma pendidikan desentralisasi, sehingga menjadi pendidikan Islam yang kaya dalam keberagaman, dengan titik berat pada peran masyarakat dan peserta didik. Dalam proses pendidikan, perlu dilakukan "kesetaraan perlakuan sektor pendidikan dengan sektor lain, pendidikan berorientasi rekonstruksi sosial, pendidikan dalam rangka pemberdayaan umat dan bangsa, pemberdayaan infrastruktur sosial untuk kemajuan pendidikan Islam. Pembentukan kemandirian dan keberdayaan untuk mencapai keunggulan, penciptaan iklim yang kondusif untuk tumbuhnya toleransi dan konsensus dalam kemajemukan. Dari pandangan ini, berarti diperlukan perencanaan terpadu secara *horizontal* [antarsektor] dan vertikal [antar jenjang -- *bottom-up* dan *top-down planning*], pendidikan harus berorientasi pada peserta didik dan pendidikan harus bersifat multikultural serta pendidikan dengan perspektif global"[78].

Dengan rumusan paradigma pendidikan tersebut, paling tidak memberikan arah sesuai dengan arah pendidikan, yang secara makro dituntut menghantarkan masyarakat menuju masyarakat madani Indonesia yang demokratis, relegius, dan tangguh menghadapi lingkungan global. Maka dalam upaya pembaruan pendidikan Islam, perlu ada ikhtiar, yaitu strategi kebijakan perubahan diletakan untuk menangkap kesempatan perubahan tersebut. Maka mau tidak maun, pendidikan Islam harus meninggalkan paradigma lama menuju paradigma baru, berorientasi pada masa

---

[77]Winarno Surakhmad, *Profesionalisme Dunia Pendidikan*, From: http://www, Bpk penabur.or.id/ kps-jkt/berita/200006/ artikel2.htm, Jakarta, 27 Mei 2002.

[78]Fasli Jalal, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah* , hlm.5.

depan, merintis kemajuan, berjiwa demokratis, bersifat desentralistik, berorientasi pada peserta didik, bersifat multikultural dan berorientasi pada perspektif global, sehingga terbentuk pendidikan yang berkualitas dalam menghadapi tantangan prubahan global menuju terbentuknya masyarakat madani Indonesia. Sebab pada dataran konsep, pendidikan baik formal maupun non formal "pada dasarnya memiliki peran penting melegitimasi bahkan melanggengkan sistem dan struktur sosial yang ada dan sebaliknya pendidikan merupakan proses perubahn sosial. Tetapi, peran pendidikan terhadap sistem dan struktur sosial tersebut, sangat bergantung pada paradigma pendidikan yang mendasarinya"[79].

Berdasarkan pandangan di atas, maka peran pendidikan Islam mestinya bukan hanya "dipahami dalam konteks mikro [kepentingan anak didik yang dilayani melalui proses interaksi pendidikan], melainkan juga dalam konteks makro, yaitu kepentingan masyarakat yang dalam hal ini termasuk masyarakat bangsa, negara dan bahkan juga kemanusiaan pada umumnya"[80], sehingga pendidikan Islam integratif antara proses belajar di sekolah dengan belajar di masyarakat [*learning society*]. Brubacher dalam bukunya, *Modern Philosophies of Education* [1978], menyatakan hubungan pendidikan dengan masyarakat mencakup hubungan pendidikan dengan perubahan sosial, tatanan ekonomi, politik dan negara, karena pendidikan itu terjadi di masyarakat, dengan sumber daya masyarakat, dan untuk masyarakat, maka pendidikan dituntut untuk mampu memperhitungkan dan melakukan antisipasi terhadap perkembangan sosial, ekonomi, politik dan kenegaraan secara simultan. Sedangkan, secara mikro pendidikan senantiasa memperhitungkan individualitas atau karakteristik perbedaan antara individu peserta didik[81] dalam kerangka interaksi proses belajar.

Dengan demikian, kerangka acuan pemikiran daiam penataan dan pengembangan sistem pendidikan Islam menuju masyarakat madani Indonesia, harus

---

[79]Mansour Fakih, *Pendidikan Popular Membangun Kesadaran Kritis*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm.18.

[80]Fasli Jalal, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, hlm.16-17.

[81]Ibid, hlm. 16.

mampu mengakomodasikan berbagai pandangan secara selektif sehingga terdapat keterpaduan dalam konsep, yaitu :

Pertama, pendidikan harus membangun prinsip kesetaraan antara sektor pendidikan dengan sektor-sektor lain. Sistem pendidikan harus senantiasa bersama-sama dengan sistem lain untuk mewujudkan cita-cita masyarakat madani Indonesia. Pendidikan bukan merupakan sesuatu yang eksklusif dan terpisah dari masyarakat dan sistem sosialnya, tetapi pendidikan sebagai suatu sistem terbuka dan senantiasa berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungannya. *Kedua,* pendidikan merupakan wahana pemberdayaan masyarakat dengan mengutamakan penciptaan dan pemeliharaan sumber yang berpengaruh, seperti keluarga, sekolah, media massa, dan dunia usaha. *Ketiga,* prinsip pemberdayaan masyarakat dengan segenap institusi sosial yang ada di dalamnya, terutama institusi yang dilekatkan dengan fungsi mendidik generasi penerus bangsa. Seperti pesantren, keluarga, dan berbagai wadah organisasi pemuda, diberdayakan untuk dapat mengembangkan fungsi pendidikan dengan baik serta menjadi bagian yang terpadu dari pendidikan. *Keempat,* prinsip kemandirian dalam pendidikan dan prinsip pemerataan menurut warga negara secara individual maupun kolektif untuk memiliki kemampuan bersaing dan sekaligus kemampuan bekerja sama. *Kelima,* dalam kondisi masyarakat pluralistik diperlukan prinsip toleransi dan konsensus. Untuk itu, pendidikan sebagai wahana pemberdayaan masyarakat dengan mengutamakan penciptaan dan pemeliharaan sumber-sumber tersebut secara dinamik. *Keenam*, prinsip perencanaan pendidikan. Pendidikan selalu dituntut untuk cepat tanggap atas perubahan yang terjadi dan melakukan upaya yang tepat secara normatif sesuai dengan cita-cita masyarakat madani Indonesia. Maka, pendidikan selalu bersifat *progresif* tidak resisten terhadap perubahan, sehingga mampu mengendalikan dan mengantisipasi arah perubahan. *Ketujuh,* prinsip rekonstruksionis, bahwa kondisi masyarakat selalu menghendaki perubahan mendasar. Maka pendidikan harus mampu menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan oleh perubahan tersebut. Paham rekonstruksionis mengkritik pandangan pragmatis sebagai suatu pandangan yang cocok untuk kondisi yang relatif stabil. Pendekatan pemecahan masalah bersifat lebih berorientasi masa kini, sedangkan pendekatan *rekonstruksionis* lebih berorientasi masa depan dengan tetap berpijak pada kondisi sekarang. *Kedelapan,* prinsip pendidikan berorientasi pada peserta didik. Dalam memberikan pelayanan pendidikan, sifat-sifat peserta didik yang umum maupun yang spesifik harus menjadi pertimbangan. Layanan pendidikan untuk kelompok usia anak berbeda dengan remaja dan dewasa, termasuk perbedaan pelayanan bagi kelompok anak-anak berkelainan fisik dan mental termasuk pendekatan pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil tidak dapat disamakan dengan anak-anak di perkotaan. *Kesembilan,* prinsip pendidikan multikultural. Sistem pendidikan harus memahami bahwa masyarakat yang dilayaninya bersifat plural, sehingga pluralisme harus menjadi acuan dalam mengembangkan pendidikan dan pendidikan dapat mendayagunakan perbedaan tersebut sebagai sumber dinamika yang bersifat posetif dan konstruktif. *Kesepuluh,* pendidikan dengan prinsip global, artinya pendidikan harus berperan dan harus menyiapkan peserta didik dalam konstelasi masyarakat global[82].

Upaya membangun pendidikan Islam berwawasan global bukan persoalan mudah, karena pada waktu bersamaan pendidikan Islam harus memiliki kewajiban

[82]Ibid, hlm.16-17.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

untuk melestarikan, menamkan nilai-nilai ajaran Islam dan dipihak lain berusaha untuk menanamkan karaktek budaya nasional Indonesia dan budaya global. Tetapi, upaya untuk membangun pendidikan Islam yang berwawasan global dapat dilaksanakan dengan langkah-langkah yang terencana dan strategis. Misalnya saja, bangsa Jepang tetap merupakan satu contoh bangsa yang mengglobal dengan tanpa kehilangan karakternya sebagai suatu bangsa[83] yang maju dengan tetap kental dengan nilai-nilai tradisi dan nilai-nilai relegius. Dengan contoh bangsa Jepang, maka pembinaan dan pembentukan nilai-nilai Islam tetap relevan, bahkan tetap dibutuhkan dan harus dilakukan sebagai *"kapital spritual"* untuk masyarakat dan bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan global menuju masyarakat madani Indonesia. Dari pandangan ini, tergambar bahwa peran pendidikan sangatlah senteral dalam kehidupan masyarakat yang senantiasa mengalami penggeseran, sementara "sistem sosial, politik, dan ekonomi bangsa selalu menjadi penentu dalam penetapan dan pengembangan peran pendidikan"[84].

Dengan paradigma baru tersebut, pendidikan Islam harus dapat megembangkan kemampuan dan tingkah laku manusia yang dapat menjawab tantangan internal maupun tantangan global menuju masyarakat madani Indonesia. Pendidikan harus dikembangkan berdasarkan tuntutan acuan perubahan tersebut dan berdasarkan karakteristik masyarakat madani yang demokratis. Sedangkan untuk menghadapi kehidupan global, proses pendidikan Islam yang diperlukan adalah mampu mengembangkan kemampuan berkompetisi, kemampuan kerja sama, mengembangkan sikap inovatif, serta meningkatkan kualitas. Dengan acuan ini, secara pasti yang akan terjadi adalah penggeseran paradigma pendidikan, sehingga kebijakan dan strategi pengembangan pendidikan perlu diletakan untuk menangkap dan memanfaatkan semaksimal mungkin kesempatan tersebut, apabila tidak, maka

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[83]Meskipun saat sekarang ini "konsep *nationalstate* mulai diragukan, dan diganti dengan *nelfare state* bahkan *global state* yang tidak lagi mengenal tapal batas (*borderless*) karena kemajuan teknologi informasi, tetapi pembinaan karaktek nasional tetap relevan dan bahkan harus dilakukan"[Ibid, hlm. 18].

[84]Ibid, hlm. 6.

pendidikan Islam akan menjadi pendidikan yang "termarginalkan" dan tertinggal ditengah-tengah kehidupan masyarakat global.

Pergeseran drastis paradigma pendidikan sedang terjadi, dengan terjadinya aliran informasi dan pengetahuan yang begitu cepat dengan efisiensi penggunaan jasa teknologi informasi internet yang memungkinkan tembusnya batas-batas dimensi ruang, birokrasi, kemampuan dan waktu. Penggeseran paradigma tersebut juga didukung dengan adanya kemauan dan upaya untuk melakukan reformasi total diberbagai aspek kehidupan bangsa dan negara menuju masyarakat madani Indonesia, termasuk pendidikan. Oleh karena itu, pergeseran paradigma pendidikan tersebut juga diakui sebagai akibat konsekuensi logis dari perubahan masyarakat, yaitu berupa keinginan untuk merubah kehidupan masyarakat Indonesia yang demokratis, berkeadilan, menghargai hak asasi manusia, taat hukum, menghargai perbedaan dan terbuka menuju masyarakat madani Indonesia.

Selanjutnya, terjadi perubahan paradigma pendidikan juga sebagai akibat dari "percepatan aliran ilmu pengetahuan yang akan menantang sistem pendidikan konvensional yang antara lain sumber ilmu pengetahuan tidak lagi terpusat pada lembaga pendidikan formal [SD,SMP,SMU,PT] yang konvensional. Sumber ilmu pengetahuan akan tersebar dimana-mana dan setiap orang akan dengan mudah memperoleh pengetahuan tanpa kesulitan. Paradigma ini dikenal sebagai *distributed intelligence* [*distributed knowledge*]"[85]. Kondisi ini, akan berpengaruh pada fungsi tenaga pendidik [guru dan dosen] dan lembaga pendidikan "akhirnya beralih dari sebuah sumber ilmu pengetahuan menjadi "mediator" dari ilmu pengetahuan tersebut. Proses *long life learning* dalam dunia pendidikan informal yang sifatnya lebih *learning based* dari pada *teaching based* akan menjadi kunci perkembangan sumber daya manusia. Peranan *web, homepage, cd-rom* merupakan alat bantu yang akan sangat mempercepat proses *distributed knowledge* semakin berkembang. Hal ini, secara langsung akan menetang sistem kurikulum yang *rigid* dan sifatnya terpusat dan mapan

[85]Onno W. Purbo, *Tantangan Bagi Pendidikan Indonesia*, From: http:// www. detik. com/net/ onno/ jurnal/ 20004/ aplikasi/ pendidikan/p-19.shtml. 2000.

yang kini lebih banyak dianut dan lebih difokuskan pada pengajaran [*teaching*] dan kurang pada pendidikan [*learning-based*]"[86]. Ilmu pengetahuan akan terbentuk secara kolektif dari banyak pemikiran yang sifatnya konsensus bersama dan tidak terikat pada dimensi birokrasi atau struktural.

Pendidikan Islam harus mulai berbenah diri dengan menyusun strategi untuk dapat menyongsong dan menjawab tantangan perubahan tersebut, apabila tidak maka pendidikan Islam akan tertinggal dalam persaingan global. Maka dalam menyusun strategi untuk menjawab tantangan perubahan tersebut, paling tidak harus memperhatikan beberapa ciri, sebagai berikut:

a. Pendidikan Islam diupayakan lebih diorientasikan atau "lebih menekankan pada upaya proses pembelajaran [*learning*] daripada mengajar [*teaching*]".
b. Pendidikan Islam dapat "diorganisir dalam suatu struktur yang lebih bersifat fleksibel".
c. Pendidikan Islam dapat "memperlakukan peserta didik sebagai individu yang memiliki karakteristik khusus dan mandiri", dan
d. Pendidikan Islam, "merupakan proses yang berkesinambungan dan senantiasa berinteraksi dengan lingkungan"[87].

Keempat ciri ini, dapat disebut dengan paradigma pendidikan *sistematik-organik* yang "menuntut pendidikan bersifat *double tracks*, artinya pendidikan sebagai suatu proses yang tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dan dinamika masyarakat".

Dalam "pelaksanaan pendidikan senantiasa mengaitkan proses pendidikan dengan kebutuhan masyarakatnya pada umumnya dan dunia kerja pada khususnya. Karena keterkaitan ini memiliki arti, bahwa peserta didik tidak hanya ditentukan oleh apa yang mereka lakukan di lingkungan sekolah, melainkan peserta didik juga ditentukan oleh apa yang mereka kerjakan di dunia kerja dan di masyarakat pada umumnya"[88]. Dengan kata lain pendidikan yang bersifat *double tracks,* menekankan pengembangkan pengetahuan melalui kombinasi terpadu antara tuntutan kebutuhan masyarakat, dunia kerja, pelatihan, dan pendidikan formal persekolahan, sehingga

---

[86]Ibid, p-19.shtml. 2000.
[87]Zamroni, *Paradigma Pendidikan Masa Depan*, (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2000), hlm.9.
[88]Ibid, hlm. 9.

"sistem pendidikan akan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dan fleksibilitas yang tinggi untuk menyesuaikan dengan tuntutan masyarakat yang senantiasa berubah dengan cepat"[89].

Berdasarkan pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa "paradigma baru pendidikan Islam yang dimaksud di sini adalah pemikiran yang terus-menerus harus dikembangkan melalui pendidikan untuk merebut kembali kepemimpinan Iptek, sebagaimana zaman keemasan dulu. Pencarian paradigma baru dalam pendidikan Islam dimulai dari konsep manusia menurut Islam, pandangan Islam terhadap Iptek, dan setelah itu baru dirumuskan konsep atau sistem pendidikan Islam secara utuh"[90]. Pendidikan Islam harus dikembangkan berdasarkan paradigma yang berorientasi pada: [1] Paradigma baru pendidikan Islam harus didasarkan pada filsafat *teocentris* dan *antroposentris* sekaligus. Pendidikan Islam yang ingin dikembangkan adalah pendidikan yang menghilangkan atau tidak ada dikotomi antara ilmu dan agama, serta ilmu tidak bebas nilai tetapi bebas dinilai. Selain itu, mengajarkan agama dengan bahasa ilmu pengetahuan dan tidak hanya mengajarkan sisi tradisional, melainkan juga sisi rasional"[91]. [2] Pendidikan Islam mampu membangun keilmuan dan kemajuan kehidupan yang integratif antara nilai spritual, moral dan meterial bagi kehidupan manusia. [3] Pendidikan Islam mampu membangun kompotisi manusia dan mempersiapkan kehidupan yang lebih baik berupa manusia demokratis, kompetetif, inovatif berdasarkan nilai-nilai Islam. [4] Pendidikan Islam harus disusun atas dasar kondisi lingkungan masyarakat, baik kondisi masa kini maupun kondisi pada masa akan datang, karena perubahan kondisi lingkungan merupakan tantangan dan peluang yang harus diproses secara capat dan tepat. Pendidikan Islam yang dikembangkan selalu diorientasikan pada perubahan lingkungan, karena pendekatan masa lalu hanya

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[89]Ibid, hlm. 9.

[90]Mastuhu, *Pemberdayaan Sistem...*, hlm. 15.

[91]Ibid, hlm. 15.

cocok untuk situasi masa lalu dan sering tidak tepat jika diterapkan pada kondisi berbeda, bahkan sering kali menimbulkan problem yang dapat memundurkan dunia pendidikan. [5] Pembaruan pendidikan Islam diupayakan untuk memberdayakan potensi umat yang disesuai dengan kebutuhan kehidupan masyarakat madani. Sistem pendidikan Islam harus dikembangkan berdasarkan karakteristik masyarakat madani yang demokratisasi, memiliki kemampuan partisipasi sosial, mentaati dan menghargai supermasi hukum, menghargai hak asasi manusia, menghargai perbedaan [pluralisme], memiliki kemampuan kompotetif dan kemampuan inovatif. [6] Penyelenggaraan pendidikan Islam harus diubah berdasarkan pendidikan demokratis dan pendidikan yang bersifat sentralistik baik dalam manajemen maupun dalam penyusunan kurikulum harus disesuaikan dengan tuntutan pendidikan demokratis dan desentralistik. Pendidikan Islam harus mampu mengembangkan kemampuan untuk berpartisipasi di dalam dunia kerja, mengembangkan sikap dan kemampuan inovatif serta meningkatkan kualitas manusia. [7] Pendidikan Islam lebih menekankan dan diorientasikan pada proses pembelajaran, diorganisir dalam struktur yang lebih bersifat fleksibel, menghargai dan memperlakukan peserta didik sebagai individu yang memiliki potensi untuk berkembang, dan diupayakan sebagai proses berkesinambungan serta senantiasa berinteraksi dengan lingkungan. [8] Pendidikan Islam harus di arahkan pada dua dimensi, yaitu "*Pertama*, dimensi dialektika [*horizontal*] yaitu pendidikan hendaknya dapat mengembangkan pemahaman tentang kehidupan manusia dalam hubungannya dengan lingkungan sosialnya dan manusia harus mampu mengatasi tantangan dunia sekitarnya melalui pengembangan iptek, dan *Kedua,* dimensi ketunduhan vertikal, yaitu pendidikan selain sarana untuk memantapkan, memelihara sumberdaya alam dan lingkungannya, juga memahami hubungannya dengan Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Swt"[92]. [9] Pendidikan Islam lebih diorientasikan pada upaya "pendidikan sebagai proses pembebasan, pendidikan sebagai proses pencerdasan, pendidikan menjunjung tinggi hak-hak anak,

[92]Hujair AH. Sanaky, "*Studi Pemikiran Pendidikan Islam Modern*", Jurnal Pendidikan Islam, Konsep dan Implementasi, Volume V Th IV, ISSN: 0853 – 7437. FIAI UII, Yogyakarta, Agustus 1999, hlm. 11

pendidikan menghasilkan tindakan perdamaian, pendidikan sebagai proses pemberdayaan potensi manusia, pendidikan menjadikan anak berwawasan integratif, pendidikan sebagai wahana membangun watak persatuan, pendidikan menghasilkan manusia demokratik, pendidikan menghasilkan manusia perduli terhadap lingkungan", dan harus dibangun suatu pandangan bahwa "sekolah bukan satu-satunya instrumen pendidikan"[93], karena pada era informasi sekarang ini, informasi ilmu pengetahuan dapat diperoleh dari berbagai media ilektornik dan media massa, seperti : internet dengan peran *web, homepage, cd-rom,* diskusi di internet, dan televisi, radio, surat kabar, majalah yang merupakan alat bantu yang akan sangat mempercepat proses *distributed knowledge*.

Mencermati fenomena perubahan paradigma baru tersebut, maka paradigma lama pendidikan Islam yang telah terbangun sejak abad pertengahan [periode Islam], dengan mengkaji dan mempelajari teks-teks keagamaan dengan metode hafalan, bersifat mekanis, mengutamakan pengkayaan materi, sudah harus ditinggalkan untuk menuju paradigma baru pendidikan. Faisal Ismail, menyatakan bahwa pendidikan dan pengajaran dalam Islam bukanlah sekedar kegiatan untuk mewariskan harta kebudayaan dari generasi terdahulu kepada generasi penggantinya yang hanya memungkinkan bersifat reseptif, pasif, menerima begitu saja. Akan tetapi pendidikan Islam harus berusaha mengembangkan dan melatih peserta didik untuk lebih bersifat direktif, mendorong agar selalu berupaya maju, kreatif dan berjiwa membangun.

Pendidikan Islam harus berorientasi kepada pembangunan dan pembaruan, pengembangan kreativitas, intelektualitas, keterampilan, kecakapan penalaran yang dilandasai dengan "keluhuran moral" dan "kepribadian", sehingga pendidikan Islam akan mampu mempertahankan relevansinya di tengah-tengah laju pembangunan dan pembaruan paradigma sekarang ini, sehigga pendidikan Islam akan melahirkan manusia yang belajar terus [*long life education*], mandiri, disiplin, terbuka, inovatif,

---

[93]Djohar, "*Soal Reformasi Pendidikan Omong Kosong,Tanpa Mengubah UU No.2/89*", Kedaulatan Rakyat, 4 Mei 1999, Yogyakarta.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

mampu memecahkan dan menyelesaikan berbagai problem kehidupan[94], serta berdayaguna bagi kehidupan dirinya dan masyarakat. Paradigma baru pendidikan Islam harus diorientasikan kepada pembangunan, pembaruan, pengembangan kreativitas, intelektualisme, keterampilan, kecakapan, penalaran, inovatif, mandiri, disiplin dan taat hukum, terbuka dalam masyarakat plural, dan mampu menghadapi serta menyelesaikan persoalan pada era globalisasi dengan dilandasi keanggunan moral dan akhlak dalam usaha membangun manusia dan masyarakat yang berkualitas bagi kehidupan dalam masyarakat madani Indonesia.

B. Strategi Pembaruan Pendidikan Islam Menuju Masyarakat Madani Indonesia

Strategi pembaruan pendidikan merupakan perspektfi baru dalam dunia pendidikan yang mulai dirintis sebagai alternatif untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan yang belum diatasi secara tuntas. Jadi pembaruan pendidikan dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada dalam dunia pendidikan dan menyongsong arah perkembangan dunia pendidikan yang lebih memberikan harapan kemajuan kedepan[95]. Dengan demikian, strategi pembaruan pendidikan pada dasarnya memiliki tujuan agar pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Mastuhu, menyatakan bahwa strategi pendidikan Islam di Indonesia pada awalnya juga teralienasi dan konfrontasi dengan pemerintah kolonial. Begitu keras konforntasi, sampai-sampai perubahan-perubahan sistem pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial yang berkaitan dengan cara-cara belajar dengan duduk dikursi diharamkan. Tetapi kini, keadaanya telah berubah nyaris total. Strategi yang dipilih oleh pendidikan Islam Indonesia berjalan seiring dengan strategi yang ditempuh oleh pendidikan nasional. Sistem pendidikan Islam Indonesia tampak masih

---

[94]Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam Studi Kritis dan Refleksi Historis*,(Yogyakarta:Tiara Ilahi Press,1998),hl.97-98.

[95]Tim Dosen FIP-IKIP Malang, *Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan*,(Surabaya: Usaha Nasional, 1987), hlm.202.

menjadikan dirinya sebagai alternatif untuk dipilih. Padahal dalam sistem pendidikan nasional, nilai-nilai dasarnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi secara kualitatif bagaimana mengisinya agar sistem pendidikan nasional terisi oleh nilai-nilai yang semakin identik dengan ajaran Islam[96]. Lebih jauh ditegaskan Mastuhu, bahwa dengan semakin berkembangnya Iptek dan pemikiran modern dalam Islam serta semakin menguatnya metodologi belajar nasional, akan terjadi integrasi yang menyatu antara keduanya. Pendidikan Islam di Indonesia benar-benar harus mampu menempatkan dirinya sebagai *suplement* dan *komplement* bagi pendidikan nasional, sehingga sistem pendidikan nasional mampu mewujudkan bangsa yang modern, kreatif, inovatif dengan tetap berwajah iman dan taqwa[97].

Dalam proses perubahan pendidikan paling tidak pendidikan memiliki dua peran, yang harus diperhatikan yaitu "[1] pendidikan akan berpengaruh terhadap perubahan masyarakat, dan [2] pendidikan harus memberikan sumbangan optimal terhadap proses transformasi menuju terujudnya masyarakat madani"[98]. Proses perubahan sistem pendidikan harus dilakukan secara terencana dengan langkah-langkah yang strategis, yaitu "mengidentifikasi berbagai problem yang menghambat terlaksananya pendidikan dan merumuskan langkah-langkah pembaruan yang lebih bersifat strategis dan praktis sehingga dapat diimplementasikan di lapangan"[99] atau lebih bersifat operasional. Langkah-langkah tersebut harus dilakukan secara terencana, sistimatis, dan menyentuh semua aspek, mengantisifasi perubahan yang terjadi, mampu merekayasa terbentuknya sumberdaya manusia cerdas, yang memiliki kemampuan inovatif dan mampu meningkatkan kualitas manusia. Maka pendidikan betul-betul akan berpengaruh terhadap perubahan kehidupan masyarakat dan dapat memberikan sumbangan optimal terhadap proses transformasi ilmu pengatahuan dan pelatihan yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan manusia.

---

[96]Mastuhu, *Memberdayakan Sistem...*, hlm. 34.

[97]Ibid, hlm. 34.

[98]Kelompok Kerja Pengkajian dan Perumusan, *Rangkuman Filosofi, Kebijaksanaan dan Strategi Pendidikan Nasional*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1999, Jakarta,hlm.3.

[99]Zamroni, "*Reformasi Pendidikan: Dari Pondasi ke Aksi*", Jurnal Pendidikan Islam Konsep dan Implementasi, Vol.V Th. IV ISSN:0853-7437,Jurusan Tarbiyah FIAI UII,Yogyakarta, Agustus 1999, hlm.29.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Berdasarkan pandangan ini, maka paling tidak dalam pembahasan ini ada beberapa strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai ikhtiar dalam usaha perubahan pendidikan, yaitu [1] reorientasi kerangka dasar filosofis dan teoritis pendidikan, [2] misi dan visi pendidikan, [3] strategi Pendidikan, [4] tujuan pendidikan, [5] kurikulum, [6] metodologis, [7] manajemen dan sumber daya manusia. Maka langkah-langkah tersebut, dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. Reoriantasi Kerangka Dasar Filosofis dan Teoritis

Perumusan filosofi dan teoritis yang lengkap diperlukan untuk menyeimbangkan antara pendidikan di satu sisi dan dinamika perubahan masyarakat di sisi lainnya. Dengan demikian, kegiatan atau proses pendidikan berlaku bagi manusia dan didasarkan pada unsur-unsur esensial yang terdapat dalam pendidikan. An-Naquib al-Attas, menyatakan unsur-unsur esensial dalam sistem pendidikan Islam didasarkan atas beberapa konsep pokok tertentu, yaitu konsep agama [*din*], konsep manusia [*insan*], konsep ilmu [*'ilm* dan *ma'rifah*], konsep kebijakan [*hikmah*], konsep keadilan [*'adl*], konsep amal [*'amal* sebagai *adab*], konsep universitas [*kuliah-jami'ah*][100], konsep demokrasi dan konsep demokrasi menjadi konsep utama dan penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, konsep tersebut perlu secara berhati-hati diterjemahkan ke dalam proses pendidikan misalnya, "konsep kemanusiaan, kemerdekaan, persamaan dan hak berpartisifasi"[101] dalam hidup dan kehidupan manusia dan masyarakat. Maka usaha pembaruan pendidikan harus mempunyai konsep yang kuat tentang hal-hal tersebut.

Suatu proses pembaruan pendidikan hanya terarah dengan baik dan mantap apabila didasarkan pada kerangka dasar filsafat dan teori pendidikan yang mantap. Filsafat pendidikan yang mantap hanya dapat dikembangkan di atas dasar asumsi-asumsi dasar yang kokoh dan jelas tentang manusia yaitu : hakekat kejadiannya, potensi-potensi bawaannya, tujuan hidup dan misinya di dunia ini baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, hubungannya dengan lingkungan dan alam

[100]Muhammad al-Naquib al-Attas, *Konsep Pendidikan dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm.8

[101]Kelompok Kerja Pengkajian dan Perumusan, hlm.3.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

semesta, dan akhirnya hubungannya dengan Maha Pencipta. Sedangkan, teori pendidikan yang mantap hanya dapat dikembangkan atas dasar pertemuan antara pendekatan filosofis dan pendekatan empiris. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kerangka dasar pertama pembaruan pendidikan Islam adalah konsepsi filosofis dan teoritis pendidiakn yang didasarkan pada asumsi-asumsi dasar tentang manusia dan hubungannya dengan masyarakat, lingkungannya menurut ajaran Islam[102]. Dengan kerangka ini, dalam pembahasan reorientasi kerangka dasar filosofis dan teoritis pendidikan, perlu dicermati proses pendidikan Islam dan pandangan Islam terhadap manusia sebagai makhluk yang dididik dan mendidik, sebagai berikut :

Pertama, sesuai dengan maksud pendidikan Islam adalah kegiatan untuk mengarahkan dengan sengaja perkembangan seseorang sejalan dengan nilai-nilai Islami tentang manusia yaitu hakekat manusia dan potensi-potensi bawaannya, tujuan hidup dan misinya di dunia ini dan di akhirat nanti, hak dan kewajibannya sebagai individu dan anggota masyarakat, hubungannya dengan lingkungan dan alam semeseta, dan akhirnya hubungannya dengan Maha Pencipta. Konsep dasar ini, harus dilihat dan dicermati secara utuh dalam suatu pelaksanaan pendidikan secara integratif dan harmonis. Maka dalam usaha mengembangkan pembaruan pendidikan Islam perlu dirumuskan secara jelas implikasi ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis Rasulullah yang menyangkut hakekat kejadian manusia, fitrah atau potensi bawaan, misi dan tujuan hidup manusia bagi pendidikan, sehingga kita dapat memfungsikan tugas dan peran pendidikan dalam mengarahkan potensi manusia secara optimal dan wajar.

Tugas dan fungsi pendidikan adalah mengarahkan dengan sengaja segala potensi yang ada pada manusia seoptimal mungkin, sehingga dapat berkembang menjadi manusia muslim yang baik atau *insan kamil*. Artinya, segala potensi manusia yang dibawa dari lahir bukan hanya dapat dikembangkan dalam lingkungan (emperik) semata-mata, tetapi juga dapat dikembangkan secara terarah dengan bantuan orang lain atau pendidik. Memang diakui, dalam pandangan Islam bahwa yang pertama-

[102]Anwar Jasin, "*Kerangka Dasar Pembaharuan Pendidikan Islam: Tinjauan Filosofis*", makalah disampaiakn, pada Seminar Nasional, Jakarta, 10 Oktober 1985, hlm. 8.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

tama menjadi kewajiban dan tanggungjawab untuk melakukan pendidikan adalah orang tua untuk mengarahkan anak-anaknya [lihat cohtoh pada surat Luqman : 12-14]. Tugas pendidikan adalah mengarahkan segala potensi peserta didik seoptimal mungkin agar ia mampu memikul amanah dan tanggungjawabnya baik individual maupun sebagai anggota masyarakat, sesuai dan sejalan dengan profil manusia muslim yang baik [*insan kamil*], yaitu manusia yang bertqawa kepada Allah sebagai tujuan akhir pendidikan Islam. Dengan demikian, unsur-unsur esensial dari upaya pengembangan pendidikan Islam harus didasarkan atas asumsi-asumsi dasar yang kokoh tentang manusia.

Kedua, pembahasan tentang "hakekat manusia", "para filosofis pada umumnya mengidentifikasikan manusia dengan hewan yang memiliki kekhususan serta kelebihan tertentu, antara lain: manusia adalah hewan yang berakal, berbicara, berpikir, dan berbudaya". Batasan ini sudah barang tentu dipengaruhi oleh sudut pandangan tertentu dari para filosuf tersebut. Sedangkan para ahli pendidik, memberikan batasan sesuai dengan sudut pandang masing-masing, yaitu manusia adalah binatang mendidik dan dididik [*animal educandum*][103]. Para sarjana muslim, memberikan makna manusia adalah *al-hayawanun nathiq* dan ada pula yang memaknai manusia dari penggunaan simbol-simbol.

Konsep Islam tentang "hakekat wujud manusia", dalam al-Qur'an dijumpai istilah *basyar, insan, an-nas*, dan *bani Adam*. Al-Qur'an, "menggunakan kata pokok penciptaan manusia adalah *khalaqa* artinya menciptakan atau membentuk. Kata *khalaqa* menunjuk pada menciptakan sesuatu yang baru, tanpa ada contoh terlebih dahulu"[104]. Proses penciptaan manusia pertama [Adam] berasal dari tanah [QS. 6:2, 55:14, 23:12], yang disebut tahap jasad, kemudian tahap hayat [QS.32:6, 75:37], tahap ruh yaitu "angin, kerana itu *ar-ruh* disebut *an-nafas* yaitu *nafas* atau *nyawa*"[105] [QS.32:9, 38:72, 15:29, 66:12, 21:91, dan 58:22], tahap nafs [QS. 3: 185, 89:27-30],

---

[103] Achmadi, *Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1992), hlm. 27.

[104] Musa Asy'arie, *Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam,[LESFI], 1992), hlm. 61.

[105] Ibid, hlm. 70.

seringkali diterjemahkan dengan "jiwa" sesungguhnya berarti "pribadi" atau "keakuan"[106]. Kemudian berdasarkan *sunnatullah* terjadilah proses pertumbuhan dan perkembangan menusia selanjutnya. Achmadi, menyatakan bahwa "manusia adalah makhluk jasmani-rohani yang paling mulia, manusia adalah mahkluk yang suci sejak lahir, manusia adalah makhluk etik relijius, dan manusia adalah makhluk individual dan sosial"[107]. Pandangan lain, bahwa "manusia adalah makhluk ciptaan Allah, manusia adalah makhluk yang perkembangannya dipengaruhi oleh pembawaan dan lingkungan, manusia memiliki banyak potensi yang dibawanya sehingga mempunyai banyak kecenderungan dan dari kecenderungan itu dapat dibagi dua, yaitu kecenderungan menjadi baik [*taqwa*] dan kecenderungan menjadi jahat [*fujur*]. Jadi manusia adalah makhluk utuh yang terdiri atas jasmani, akal, dan rohani sebagai potensi pokok"[108].

Apabila dilihat dari konsep Islam, khususnya anak sebagai peserta didik adalah manusia dilahirkan dengan membawa *fitrah*. Dalam hadis Rasulullah, anak manusia dilahirkan dalam fitrah atau dengan potensi tertentu dan dalam al-Qur'an dikatakan "maka hadapkanlah wajahmu dengan lulus kepada agama menurut *fitrah*, Allah yang telah menciptakan *fitrah* itu pada manusia" [Q.S.30:30]. Bahkan sebelum manusia lahir, telah melakukan perjanjian dengan Allah yaitu mengekui keesaan Tuhan [tauhid] [Q.S.7: 172], dengan kata lain bahwa anak lahir dengan membawa "potensi keimanan" kepada Allah [tauhid]. Sedangkan potensi bawaan lain, misalnya potensi fisik [jasmani] dan potensi inteligensi atau kecerdasan akal [rohani] juga dilengkapi dengan segala kemungkinan dan keterbatasannya.

Dalam al-Qur;an dijumpai banyak ayat yang menggambarkan sifat-sifat hakiki manusia, yang mempunyai implikasi baik terhadap tujuan maupun cara pengarahan perkembangannya. Manusia pada hakekat dan menurut kejadiannya bersedia dan sanggung memikul amanah [Q.S.33:72], dan mampu memikul tanggungjawab atas

---

[106] Ibid, hlm. 78.

[107] Ahcmadi, *Islam Sebagai Paradigma* ..., hlm. 30-36.

[108] Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 34-35.

segala perbuatannya dan beratnya tanggungjawab itu sesuai dengan tingkat kemampuan daya pikul seseorang menurut kodrat atau fitrahnya [Q.S.2:286][109]. Di samping itu juga penting implikasinya bagi pendidikan adalah tanggungjawab bersifat pribadi [Q.S.35: 18] dan ada pula sifat-sifat lain yang diberikan Allah kepada manusia yaitu berupa kemampuan *al-bayan* [fasih perkataan], berupa kemampuan menyampaikan pikiran dan berkomunikasi dengan bahasa [Q.S.55:3-4]. Dari pandangan ini, dapatlah disimpulkan bahwa manusia dilahirkan dengan membawa "potensi bawaan" tertentu, dan dengan potensi itu manusia dapat berkembang secara aktif dalam interaksinya dengan lingkungan dengan bantuan dan pengarahan yang sengaja dari pihak pendidik. Jadi, hakekat manusia dalam kerangka memahami tujuan pendidikan Islam, adalah : (1) "Tujuan hidup manusia adalah beribadah dan menjadi khalifah yang sesuai dengan yang dikehendaki Allah, dan (2) Manusia adalah makhluk paedagogik dapat mendidik dan didik sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan jasmani dan rohaninya"[110].

Pendidikan menurut pandangan Islam didasarkan pada asumsi bahwa manusia itu dijadikan sebagai *khalifah* di bumi [QS.2:30] untuk mengabdi kepada Allah, yang dilengkapi dengan *fitrah* yaitu potensi bawaan berupa : potensi keimanan [tauhid], potensi untuk memikul amanah dan tanggung jawab, potensi kecerdasan [akal] [QS.2:31 dan 33], potensi komunikasi dengan bahasa [potensi *al-bayan*], potensi fisik. Maka dengan *fitrah* atau potensi bawaan tersebut manusia mampu dan dapat berkembang secara aktif dan interaktif dengan lingkungan atas bantuan pengarahan pendidik secara sengaja, agar menjadi manusia yang mampu mengembangkan potensinya dan melaksanakan tugas hidupnya sebagai *khalifah* serta untuk mengabdi kepada Sang Penciptanya, yang merupakan tujuan hidup dan misinya di dunia ini.

Dari pandangan di atas, dapat dikatakan bahwa sebenarnya pendidikan Islam merupakan pendidikan yang berwawasan semesta, berwawasan kehidupan yang utuh dan multi dimensional, yang meliputi wawasan tentang Tuhan, manusia, dan alam

---

[109]Anwar Jasin, *Kerangka Dasar Pembaharuan...*, hlm. 3.

[110]Hery Noer Aly, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 57-75.

secara integratif"[111]. Berkaitan dengan wawasan tersebut, pelaksanaan pendidikan Islam diarahkan pada dua dimensi, yaitu : *Pertama,* dimensi dialektikal [*horizontal*], artinya pendidikan hendaknya dapat mengembangkan pemahaman tentang kehidupan konkrit kehidupan manusia, dan kemudian manusia harus mampu mengatasi tantangan dan kendala dunia sekitarnya melelalui pengembangan ilmu pengatahuan dan teknologi. Ini berarti bahwa filsafat atau segala asumsi dasar pendidikan Islam harus memperhatikan kondisi lingkungan sosial kultural, sebab seseorang yang memiliki pengetahuan, sikap dan kebijaksanaan tertentu sebagai hasil pengaruh kondisi lingkungan sejak lahir[112]. Jadi pendidikan yang "berwawasan tentang manusia akan menumbuhkan kreatifitas, kebijaksanaan, kebersamaan, demokratis, egalitarian, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan sebaliknya menentang anarkisme dan kesewenangan-wenangan. Sedangkan, pendidikan yang berwawasan tentang alam akan melahirkan semangat dan sikap ilmiah, sehingga melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi"[113]. *Kedua,* dimensi ketunduhan vertikal[114], artinya pendidikan selain menjadi alat untuk memantapkan, mengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga menjembatani dalam memahami fenomena kehidupan abadi dengan Maha Pencipta. Pada dimensi ini, berarti pendidikan harus disertai dengan pendekatan hati, berupa "wawasan tentang ketuhanan [tauhid] yang akan menumbuhkan ideologi, idealisme, cita-cita dan perjuangan"[115]. Dari pandangan ini, menggambarkan bahwa sebenarnya pendidikan Islam mempunyai dasar filosofis yang lebih mendalam yang menyangkut dengan persoalan hidup yang multi demensional dan sampai pada dimensi transendental.

Pendidikan Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas *kekhalifahan* manusia atau lebih khusus lagi sebagai penyiapan kader-kader *khalifah* dalam rangka membangun dunia yang makmur, dinamis, harmonis dan lestari

---

[111]A. Malik Fadjar, *Reorientasi Pendidikan Islam*, hlm. 34.

[112]M. Irsyad Sudiro, "*Pendidikan Agama dalam Masyarakat Modern*", makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional *Revitalisasi Pendidikan Agama Luar Sekolah dalam Masyarakat Modern*, 30 s/d 31 Agustus 1995,, Cirebon, hlm. 2.

[113]A. Malik Fadjar, *Reorientasi Pendidikan Islam*, hlm. 34-35.

[114]M. Irsyad Sudiro, 1995, *Pendidikan Agama dalam Masyarakat*.....hlm. 2.

[115]A. Malik Fadjar, *Reorientasi Pendidikan Islam*, hlm. 35.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

sebagaimana diisyaratkan Allah, dan mengabdi kepada-Nya. Oleh karena itu, mestinya pendidikan Islam merupakan pendidikan yang paling ideal, sebab pendidikan Islam tidak hanya berwawasan dunia – pragmentaris - tetapi juga berwawasan kehidupan secara utuh dan mutlidimensional. Pendidikan Islam tidak hanya berorientasi untuk membuat dunia menjadi sejahtera, tetapi juga mengajarkan untuk menjadikan dunia sebagai ladang, dan sekaligus sebagai ujian untuk mendapatkan yang lebih baik di akhirat[116].

Selain itu pendidikan Islam juga "menyandang misi keseluruhan aspek kebutuhan hidup serta perubahan-perubahan yang terjadi. Implikasinya, pendidikan Islam senantiasa mengundang pemikiran dan kajian, baik secara konseptual maupun operasionalnya, sehingga diperoleh relevansi dan kemampuan untuk menjawab tantangan serta memecahkan masalah-masalah yang dihadapi umat manusia"[117]. Maka, pendidikan Islam diharapkan mampu menciptakan manusia yang menjadi pengendali kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sekaligus menjadi daya tangkal terhadap dampak-dampak negatif lingkungan yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi itu sendiri. Oleh karena itu, dalam pelasanaannya pendidikan Islam harus mampu mengintegrasikan pendidikan *qalbiyah* [*afektif*] yang selalu seiring dan berinteraksi dengan pendidikan *aqliyah* [*kognitif*] sehingga dapat melahirkan perilaku manusia yang religius, memiliki integritas dan kecerdasan. Maka dapat dikatakan bawa pendidikan Islam sebenarnya merupakan pendidikan yang mampu menyiapkan kader-kader *khalifah* dan secara fungsional keberadaannya menjadi peran utama terwujudnya tatanan dunia yang *rahmatan lil 'alamin*.

Dalam mengembangkan dan memberdayakan potensi manusia (*insan*), proses pendidikan pada hakekatnya mempunyai tiga peran yang "prosesnya berjalan secara simultan yaitu sebagai proses belajar, proses ekonomi dan proses sosial-budaya. Maka pendidikan sebagai proses belajar, harus mampu menghasilkan individu dan masyarakat religius yang secara personal memiliki integritas dan kecerdasan.

[116]Ibid, hlm. 37.
[117]Ibid, hlm. 35-36.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pendidikan sebagai proses ekonomi, merupakan suatu investasi, oleh sebab itu pada tingkat tertentu pendidikan harus memberikan keuntungan bagi segi sumberdaya manusia. Sedangkan, pendidikan sebagai proses sosial-budaya, pendidikan merupakan suatu bagian integral dari proses budaya sosial yang berlangsung terus menerus dan tanpa akhir[118]. Sebab pendidikan merupakan bagian integral dari proses budaya dan sosial yang berlangsung terus dan berkesinambungan. Dengan demikian, peran pendidikan diharapkan mampu menghasilkan manusia religius, memiliki integritas, kecerdasan, memberikan keuntungan bagi sumberdaya manusia.

Berdasarkan "refleksi terjadinya proses pergeseran peran pendidikan dan didukung dengan abstraksi terhadap acuan idiil [hukum] serta kajian emperis atas kondisi sekarang serta idealisasi masa depan, maka secara mendasar pendidikan Islam perlu memiliki karakteristik sebagai berikut : [1] Mampu mengembangkan kreativitas, kebudayaan, dan peradaban, [2] mendukung diseminasi nilai keunggulan, [3] mengembangkan nilai-nilai demokrasi, kemanusiaa, keadilan, dan keagamaan, [4] mengembangkan secara berkelanjutan kinirja kreatif dan produktif yang koheren dengan nilai-nilai moral"[119] dan nilai-nilai ajaran Islam, karena dalam pendidikan terdapat beberapa nilai di dalamnya, yaitu : nilai agama, kemanusiaan, demokrasi, kemerdekaan, kebebasan, nasionalisme, kebudayaan, kekeluargaan, disiplin, dan kebanggaan nasional.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Nilai-nilai tersebut akan menjadi acuan perilaku dan rujukan dalam penataan aspek legal, termasuk dalam penataan pendidikan. Tetapi perlu diketahui, bahwa "tata nilai itu sendiri sangat kompleks dan berjenjang, mulai dari nilai ideal, nilai instrumental, sampai dengan nilai operasional. *Pertama*, pada tingkat nilai ideal [*ideal core values*], acuan pendidikan adalah nilai pemberdayaan untuk kemandirian dan keunggulan"[120] manusia. Dalam Islam, pendidikan mengacu pada nilai-nilai ajaran Islam yang terakomodasi dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, sebagai nilai ideial [*ideal*

---

[118]Kelompok Kerja Pengkajian dan Perumusan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, hlm.3-4.

[119] Fasli Jalal, *Reorientasi Pendidikan*..., hlm. 7.

[120]Ibid, hlm. 7.

core values] pendidikan. Sedangkan, pendekatan yang "dikembangkan dalam mencapai tujuan pendidikan didasarkan atas pendekatan-pendekatan Qur'ani dan Hadis serta kemanusian [*humanity*], dan ilmu pengetahuan [*scientific*] yang juga dilakukan atas landasan nilai-nilai moral pada Qur'ani dan Hadis"[121]. *Kedua*, pada tingkat instrumental, ada sejumlah nilai penting yang perlu dikembangkan melalui pendidikan, yakni : otonomi, kecakapan, kesadaran demokrasi, kreativitas, daya saing, estetika, kearifan, moral, harkat, martabat, dan kebanggaan. *Ketiga*, pada tingkat operasional, pendidikan harus menanamkan pentingnya kerja keras, sportivitas, kesiapan bersaing dan sekaligus bekerjasama, dan disiplin diri[122]. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pendidikan Islam, nilai-nilai tersebut di atas baik nilai ideal, nilai instrumental, dan nilai operasional harus secara simultan dapat diakomodasikan, baik secara mikro maupun makro dan dapat tercermin disemua aspek sistem pendidikan mulai dari filosofis, proses, isi atau materi, organisasi, lemabaga, dan manajemen pendidikan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, *Pertama,* pengembangan pendidikan Islam harus didasarkan pada filosofis tentang asumsi-asumsi dasar manusia, hakekat penciptaannya, segala potensi [*fitrah*] bawaannya, tujuan hidup serta misinya sebagai *khalifah* baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, lingkungan sosial kulturalnya serta hubungannya dengan lingkungan dan Penciptanya. *Kedua,* pengembangan teoritis pendidikan Islam harus didasarkan pada dialektikal *horizontal* yaitu mampu mengembangkan pemahaman kehidupan konkrit manusia, kondisi lingkungan sosial kultural, ilmu pengatahuan dan teknologi yang didasarkan pada dimensi ketunduhan vertikal, yaitu pendidikan harus disertai dengan pendekatan hati [*qalbiyah*] berupa wawasan keimanan [tauhid]. Maka integrasi antara pendidikan *qalbiyah* dan *aqliyah* akan dapat membangun dan melahirkan kualitas

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[121]M.Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*..., hlm. 17.

[122]Fasli Jalal, *Reorientasi Pendidikan*..., hlm. 7.

perilaku manusia yang unggul [*insan kamil*], yaitu manusia yang memiliki ideologi, pengetahuan, idealisme, menghargai dan mentaati hukum, menghargai hak asasi manusia, menghargai perbedaan [pluralisme], memiliki etos kerja, memiliki cita-cita perjuangan, serta siap membangun dan menghadapi tantangan perubahan, sehingga dapat mewujudkan tatanan dunia yang *rahmatan lil alamin* menuju masyarakat madani Indonesia.

Oleh karena itu, apabila pendidikan Islam tidak memiliki kerangka dasar filosofis dan teoritis yang kuat, secara pasti dapat dikatakan pembaruan pendidikan Islam tidak memiliki fondasi yang kuat, tidak mempunyai arah yang pasti, terombang ambing tanpa arah, dan akan meniru-niru sistem atau filsafat dan teori pendidikan lain, yang kadang-kadang tidak sesuai dengan lingkungan dan budaya masyarakat tersebut. Maka langkah awal yang harus dilakukan adalah merumuskan kerangka dasar filosofis pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam, kemudian mengembangkan secara empiris prinsip-prinsip yang mendasari keterlaksanaanya dalam konteks lingkungan [sosial-kultural]. Karena filsafat pendidikan Islam ini baru berupa asumsi-asumsi dasar yang tidak dengan sendirnya dapat berkembang dan memberikan hasil, tetapi memerlukan usaha penyesuaian dengan lingkungan tertentu agar dapat berkembang dan memberikan hasil. Hal ini berarti bahwa filsafat atau segala asumsi dasar pendidikan Islam hanya dapat diterapkan secara berhasil jikalau kondisi-kondisi lingkungan sosial dan kultural diperhirtungkan dan diperhatikan secara sungguh-sungguh, karena peserta didik telah memiliki pengetahuan, sikap dan kemampuan tertentu sebagai hasil dari kondisi lingkungan sejak lahir.

Berdasarkan padangan di atas, menuntut pendekatan emperis dalam penerapan kerangka filosofis pendidikan Islam. Apabila melalui pendekatan filosofis menghasilkan keharusan aksiologi maka pendekatan empiris menghasilkan prinsip-prinsip keterlaksanaan penerapan keharusan *aksiologis* tersebut dalam kenyataan konteks lingkungan di mana proses pendidikan itu berlangsung, misalnya prinsip-prinsip belajar atau proses belajar-mengajar yang efektif. Maka pertemuan antara

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pendekatan filosofis yang sesuai dengan asumsi-asumsi dasar yang bersifat imperatif dengan pendekatan empiris tersebut akan menghasilkan tetori pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam[123]. Maka apabila ingin mengadakan pembaruan pendidikan Islam, langkah awal yang harus dilakukan adalah merumuskan kerangka dasar filosofis pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian mengembangkan secara empiris prinsip-prinsip yang mendasari keterlaksanaannya dalam kenyataan konteks lingkungan sosial dan kultural. Tanpa kerangka dasar filosofis dan teoritis yang kuat pembaruan pendidikan Islam di samping tidak punya pondasi yang kuat juga tidak mempunyai arah yang pasti, dan dapat terombang-ambing tanpa arah dalam kehidupan masyarakat madani Indonesia atau paling-paling akan meniru sistem dan filsafat serta teori pendidikan yang telah dikembangkan oleh dunia Barat. Berkenaan dengan hal ini, maka Roichan Anwar mengemukakan gagasan perlunya konstruksi ulang pendidikan Islam dengan menawarkan prosedur paradigma filosofis, yaitu : [1] Orientasi *filosofi-metafisik*, artinya perlu pengembangan realitas spritual dan experience melalui peninjauan ulang persepsi tentang dogtrin ideologik-ilahiyah yang dapat membatasi pengungkapan kegaiban alam. [2] Orientasi *filosofis-epestemologi*, yaitu pengungkapan pengetahuan melalui rethingking, sensation, experiencing, empirical verification dengan scientific nethod dalam mengkaji sunnatullah serta conseptual and logical analysis terhadap ayat-ayat ilahiyah. [3] Orientasi *filosofis-aksiologis*, artinya absolutisasi nilai-nilai ilahiyah dan relatifisasi nilai-nilai manusiawi sepanjang dalam konteks ketuhanan. [4] Orientasi *filosofis-logis*, artinya memahmai wahyu melalui pendekatan prinsip-prinsip logika yang ditawarkan wahyu. Di sini bagaimana kita harus mampu mendisain kaidah-kaidah logika untuk memahami ayat-ayat Allah [wahyu] berdasarkan logika wahyu itu sendiri. [5] Implikasi edukasi[124], artinya kurikulum dan metodologi pendidikan Islam harus mampu membangun

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[123]Anwar Jasin, *Kerangka Dasar Pmbaharuan....*, hlm. 9.

[124]Raichan Achwan 1998, *Konstruksi Filosofi Pendidikan Islam dalam Rekonstruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren Religisitas Iptek*, Penyt. Abdul Munir Mulkan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1998), hlm. 73-75.

keterkaitan kehidupan di dunia dan akhirat dalam makna yang tidak terbatasi oleh ruang dan waktu.

Oleh karena itu, sangat diperlukan pemahaman tentang konsep hakekat manusia, potensi-potensi bawaannya, tujuan hidupnya, hubungannya dengan lingkungan [dunia] dan akhirat dan Sang Pencipta Allah dalam realitas kehidupan manusia, sebagai upaya untuk membangun pemikiran filosofis pendidikan Islam yang akan berpengaruh terhadap operasional konsep dan proses pendidikan Islam. Kemudian, selanjunya yang harus dilakukan adalah "mengembangkan kerangka dasar sistemik"[125], yaitu karangka dasar filosofis dan teoritis pendidikan Islam harus ditempatkan dalam konteks supra sistem masyarakat, bangsa, dan negara serta kepentingan umat di mana pendidikan itu diterapkan. Maka apabila konsep pendidikan Islam tidak memiliki kaitan atau sama sekali "terlepas dari konteks masyarakat tersebut, maka pendidikan akan menjadi tidak relevan dengan kebutuhan umat, bangsa, dan negara Indonesia dalam dalam menghadapi tantangan dunia modern"[126] dan era globalisasi serta perubahan menuju masyarakat madani Indonesia.

Maka, "dengan menerapkan kerangka dasar fiosofis dan teoritis ke dalam kerangka dasar sistimik, konsep pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam, "tanpa diberi label Islam" akan mempunyai ruang gerak yang lebih luas dan luwes dalam penerapannya, di samping akan lebih relevan untuk kepentingan umat Islam dan kepentingan bangsa Indonesia[127] menuju masyarakat madani Indonesia". Maka, dalam pelaksanaan pendidikan Islam, harus menggunakan konsep pendidikan yang luas dan bukan hanya segi keimanan, ibadah, fiqh, muamalah, akhlak, tafsir, hadis dan amal saleh saja, tetapi juga penguasaan segala macam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, bahasa, komputer dan internet, keterampilan dan keahlian di segala

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[125]Anwar Jasin, *Kerangka Dasar Pembaruan...*, hlm. 10.

[126]Hujair AH. Sanaky, "*Reformasi Pendidikan Suatu Keharusan Untuk Memasuki Milenium III, Suatu Renungan untuk Pendidikan Islam*", Jurnal Pendidikan Islam, *TA'DIB*, Nomor : 04, Maret 2001, ISSN 1401-6973, Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah, Palembang, hlm. 49.

[127]Anwar Jasin, *Kerangka Dasar Pembaruan...*, hlm. 12.

bidang untuk dapat mendukung terlaksananya perilaku Islam dan amal saleh bagi peningkatan kualitas dan kesejahteraan umat Islam dan bangsa Indonesia.

Dengan menggunakan konsep pendidikan Islam yang luas, tentu tidak hanya akan dapat menjumpai pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam di madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan tinggi Islam saja, tetapi pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam juga akan dijumpai di lembaga-lembaga yang disebut sekolah umum seperti SD, SMP, SLTA, dan perguruan tinggi, karena di lembaga-lembaga pendidikan yang disebut pendidikan umum tersebut, ilmu dan keahlian yang wajib dituntut menurut perintah agama Islam itu dapat dicari dan diperoleh. Untuk itu, pendidikan Islam yang luas, haruslah benar-benar dipersiapkan dan diupayakan untuk menuju masyarakat madani dengan kerangka dasar filosofis dan teoritis yang kuat, merumuskan visi pendidikan Islam, untuk membangun dan meningkatkan mutu manusia dan masyarakat muslim yang dibutuhkan dalam kehdupan masyarakat madani Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Misi dan Visi Pendidikan Islam

Sebelum membahas misi dan visi pendidikan Islam, terlebih dahulu sedikit menjelaskan konsep tentang misi dan visi serta keterkaitannya dengan *core biliefs* dan *core values*. Menurut beberapa pengertian misi adalah "jalan pilihan [*the chosen track*] suatu organisasi untuk menyediakan produk/jasa bagi *customer*-nya. Perumusan misi merupakan suatu usaha untuk menyusun peta perjalanan mewujudkan visi, sedangkan visi merupakan "suatu pikiran yang melampaui realitas sekarang, sesuatu yang kita ciptakan yang belum pernah ada sebelumnya, suatu keadaan yang akan kita wujudkan yang belum pernah kita alami sebelumnya"[128].

Visi pendidikan merupakan suatu pandangan atau keyakinan bersama seluruh komponen pendidikan [sekolah] akan keadaan masa depan yang diinginkan. Keberadaan visi akan memberikan inspirasi dan mendorong seluruh warga sekolah untuk bekerja lebih giat untuk mencapai visi tersebut. Visi pendidikan [sekolah] harus

---

[128]Mulyadi, *Total Quality Manajemen, Prinsip Manajemen Komputer untuk Mengarungi Lingkungan Bisnis Global*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1998), hlm. 100.

dinyatakan dalam kalimat yang jelas, posetif, realistis, menantang, mengundang partisipasi, dan menunjukkan gambaran masa depan"[129]. Sedangkan, misi erat kaitannya dengan visi, apabila visi pernyataan tentang gambaran global masa depan, maka misi merupakan pernyataan formal tentang tujuan utama yang akan direalisir. Jadi kalau visi merupakan ide, cita-cita dan gambaran di masa depan yang tidak terlalu jauh, maka misi merupakan upaya untuk konkritisasi visi dalam ujud tujuan dasar yang akan diujudkan[130]. Visi dan misi pendidikan [suatu sekolah] juga "merupakan penjabaran atau spesipikasi visi dan misi pendidikan nasional yang disesuaikan dengan latar belakang dan kondisi lokal"[131], serta didasarkan pada nilai-nilai (values) yang dianut.

Dari pandangan ini, dapat dikatakan bahawa visi dan misi sekolah-sekolah Islam merupakan penjabaran atau spesipikasi dari visi dan misi pendidikan Islam itu sendiri, yaitu membentuk *"insan kamil"* yang berfungsi mewujudkan *rahmatan lil 'alamin.* Selain itu, visi dan misi tersebut juga perlu disesuaikan dengan latar belakang, kondisi lokal masing-masing, dan didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam serta nilai-nilai budaya. Dengan demikian, dalam merumuskan misi dan visi pendidikan harus didasarkan pada *core beliefs* dan *core values,* dan untuk mencapai visi dan misi tersebut harus dilaksanakan dengan penyusunan kebijakan dan strategi secara operasional. Hubungan antara misi, visi, *core beliefs, core values,* kebijakan, dan strategi dapat digambarkan, sebagai berikut :

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[129]Zamroni, *Reformasi Pendidikan Dari Pondasi...*,hlm.35-36.
[130]Ibid, hlm. 36.
[131]Ibid, hlm. 36.

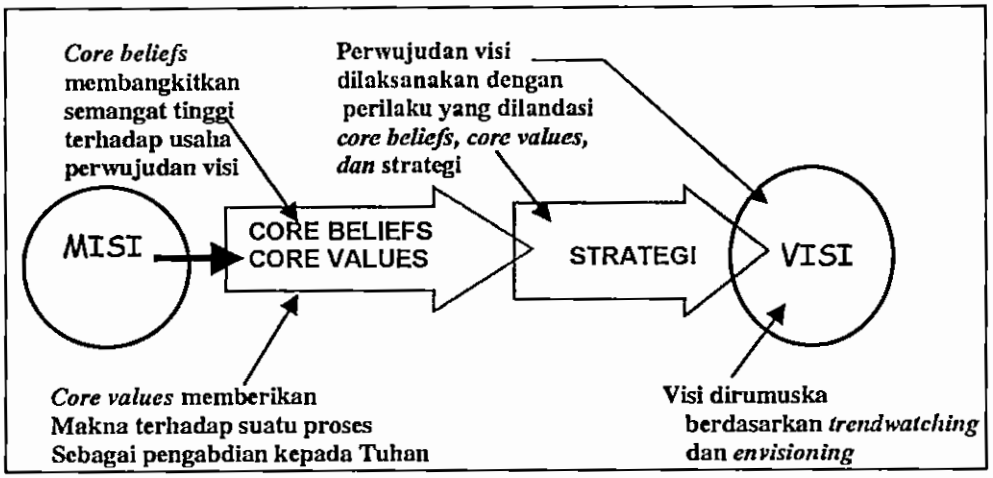

Gambar 1
Hubungan antara *misi, visi, core biliefs, core values*[132], dan *strategi*

Hubungan antara misi, visi, *core biliefs, core values*, dan strategis dari gambar di atas, dapat dijelaskam sebagai berikut : [a] Pertama kali organisasi [dalam hal ini lembaga pendidikan Islam] "perlu menetapkan misi, yang merupakan *the chosen track* untuk menyediakan produk atau jasa bagi *customer-nya*. Misi ditetapkan berdasarkan asumsi tentang lingkungan yang akan dimasuki oleh organisasi" [lembaga pendidikan Islam]. [b] Organisasi [lembaga pendidikan Islam] "perlu mengamati *trend* perubahan di masa akan datang. Hasil *trend watching* ini kemudian digunakan untuk melakukan *envisioning*, yang merupakan pengembangan visi dari suatu kondisi yang akan diwujudkan di masa yang akan datang. [c] Visi pada hakekatnya merupakan perubahan, dan seringkali perubahan dapat diibaratkan dengan *"swimming upstream"*, maka perwujudan visi menuntut organisasi atau lembaga melakukan *"long and rocky journey"* yang membutuhkan energi yang luar biasa besarnya. Energi yang diperlukan untuk mewujudkan visi tersebut perlu digali diri setiap anggota organisasi atau lembaga dengan menanamkan *core biliefs* tentang kebenaran visi dan perjalanan untuk mewujudkan visi. Maka untuk mewujudkan visi, hanya dapat dilakukan dengan cara : *pertama*, mengkomunikasikan visi tersebut secara jelas kepada seluruh anggora organisasi atau lembaga, dan *kedua*, mengkomunikasikan

[132]Mulyadi, *Total Quality Manajemen*,..., hlm.100.

tentang kebenaran visi organisasi dan perjalanan untuk mewujudkannya. Keberhasilan mengkomunikasikan visi akan mengubah visi organisasi atau lembaga menjadi *shared vision*. [d] Perjalanan untuk mewujudkan visi melalui *the chosen track* (misi) menuntut perilaku tertentu dari para anggota organisasi[133] atau lembaga. Kemudian perilaku yang diharapkan dari anggota organisasi atau lembaga diwujudkan melalui *core values* yang perlu dijunjung tinggi, karena *core values* merupakan nilai ideal yang perlu dijunjung tinggi oleh setiap anggota organisasi atau suatu lembaga. Tanpa *core values* yang ditetapkan sebagai perilaku yang diharapkan, perjalanan untuk mewujudkan visi akan dilakukan berdasarkan prinsip yang salah : "tujuan menghalal cara"[134]. *Core values* dijelaskan sebagai pemberian makna terhadap pekerjaan sebagai pengabdian kepada Tuhan, karena perilaku luhur sebagaimana diajarkan dalam agama diujudkan melalui pekerjaan untuk merealisasi visi lembaga atau organisasi. [e] Untuk mewujudkan visi harus dilaksanakan dengan "strategi", karena dengan strategi diharapkan dapat menyusun langkah-langkah yang terencana, sistematis, dan efisien untuk menjawab persoalan yang dihadapi suatu lembaga atau organisasi untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan ditetapkan.

Kondisi sekarang ini, tututan reformasi pendidikan menuju masyarakat madani tanpaknya mengharuskan perumusan misi dan visi pendidikan baik ditingkat makro maupun pada tingkat mikro. Berbagai langkah perlu ditempuh untuk melakukan perubahan baik di bidang manajemen, perencanaan, samapai pada praksis pendidikan di tingkat mikro. Atas dasar itu, Suyanto, mengusulkan langkah-langkah reformasi pendidikan untuk menyongsong era informasi dan globalisasi menuju masyarakat Indonesia baru dan masyarakat madani, adalah : [a] pendidikan nasional [termasuk pendidikan Islam] hendaknya memiliki visi yang berorientasi pada demokrasi bangsa sehingga memungkinkan terjadinya proses pembedayaan seluruh komponen masyarakat secara demokratis, [b] pendidikan nasional [termasuk pendidikan Islam]

---

[133]Ibid, hlm. 100-101.

[134]Ibid., hlm. 100.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

hendaknya memiliki misi agar tercapai partisipasi masyarakat secara menyeluruh sehingga secara mayoritas seluruh kompnen bangsa yang ada dalam masyarakat menjadi terdidik[135], [c] misi pendidikan nasional [termasuk pendidikan Islam] harus diorientasikan pada "perwujudan sistem dan iklim pendidikan nasional dan pendidikan Islam yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin dan bertanggungjawab, berketerampilan serta menguasai IPTEK dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia"[136].

Berdasarkan pandangan ini, maka lembaga-lembaga pendidikan Islam mau tidak mau dituntut untuk menyusun misi dan visi, baik pada tingkat makro maupun tingkat mikro serta kebijakan dan strategi pengelolaan pendidikannya. Maka apabila mencoba merumuskan misi pendidikan Islam, adalah bagaimana pendidikan Islam dapat : [a] memgembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui pendidikan dan pengajaran bermutu berdasarkan nilai-nilai Islam, [b] mendorong pembaruan pemikiran Islam menuju masyarakat madani, [c] mengintegrasikan "ilmu agama Islam" dengan "ilmu pengetahuan umum", [d] menghasilkan individu dan masyarakat yang relegius [iman dan taqwa], akhlak mulia, cerdas, berketerampilan, menguasai iptek, kreatif, inovatif, memiliki integritas pribadi, merdeka, demokrasi, bersikap adil, disiplin, memiliki sikap toleran yang tinggi, menghargai hak asasi manusia, taat hukum, dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia yang memiliki orientasi global.

Apabila dicermati, sebenarnya pendidikan Islam telah memiliki visi dan misi yang ideal, yaitu *"rahmatan lil'alaim".* Selain itu, sebenarnya konsep dasar filosofis pendidikan Islam lebih mendalam dan menyangkut persoalan hidup multi diemensional, yaitu pendidikan yang tidak terpisahkan dari tugas *kekhalifahan* manusia, atau lebih khusus lagi sebagai penyiapan kader-kader *khalifah* dalam rangka membangun kehidupan dunia yang makmur, dinamis, harmonis dan lestari

---

[135]Suyanto dan Dijah Hisyam, *Pendidikan di Indonesia ..*, hlm. 8.

[136]Soedijarto, *Memahami Arah Kebijakan GBHN 1999-2004 Tentang Pendidikan Sebagai Upaya Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan Membangun Peradaban Negara Bangsa Indonesia,* Makalah Seminar Nasional, Mencari Paradigma Baru Sistem Pendidikan Nasional Menghadapi Milenium Ketiga, IPSI dan PRIMAGAMA, Yogyakarta, 9 November 1999, hlm. 1-2.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

sebagaimana diisyaratkan oleh Allah dalam Qur'an. Hal ini berarti, bahwa "pendidikan Islam sebenarnya mengemban misi melahirkan manusia yang tidak hanya memanfaatkan pesediaan alam, tetapi juga manusia yang mau bersyukur kepada yang membuat manusia dan alam, memperlakukan dan memberdayakan manusia sebagai *khalifah*, memperlakukan alam tidak hanya sebagai obyek penderita semata, tetapi juga sebagai komponen integral dari dari sistem kehidupan"[137]. Maka mestinya, pendidikan Islam adalah pendidikan yang ideal, sebab misi dan visinya adalah "*rahmatan lil'alamin*" yaitu untuk membangun kehidupan dunia yang makmur, demokrasi, adil, damai, taat hukum, dinamis, dan harmonis.

Pada saat sekarang ini, tutuntan perumusan visi baru pendidikan menjadi suatu keharusan. Oleh karena itu, pendidikan Islam perlu menyusun visi baru baik pada tingkat makro maupun tingkat mikro. Misalnya, rumusan visi pendidikan Islam ditingkat makro yaitu "bagaimana pendidikan dapat menunjang transformasi menuju masyarakat madani Indonesia yang ditandai oleh suatu sistem kehidupan baru sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia pada era reformasi ini" atau "bagaimana pendidikan Islam membangun manusia dan masyarakat madani Indonesia, yang memiliki identitas berdasarkan nilai-nilai Islam dan budaya Indonesia". Sedangkan visi pendidikan Islam pada tingkat mikro, misalnya : "bagaimana pendidikan Islam menghasilkan individu relegius yang memiliki integritas pribadi merdeka, demokrasi, toleransi kemanusian yang tinggi serta memiliki orientasi global. Bagaimana menjadikan lembaga pendidikan Islam unggul dalam pembinaan moral dan pengembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu-ilmu Islam, sehingga terwujudnya pendidikan Islam yang "*rahmatan lil'alamin*", sehingga kehadiran pendidikan Islam diharapkan benar-benar dapat membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat yang

[137]A. Malik Padjar, *Reformasi Pendidikan Islam*, hlm. 37.

memiliki komitmen pada kesempurnaan, keunggulan risalah Islamiyah di bidang pendidikan dan penelitian.

Dalam upaya menyusun visi pendidikan Islam, Teunku Amiruddin, mengusulkan perlu mempertimbangkan lima visi dasar pendidikan manusia di abad 21, sebagaimana yang diajukan oleh UNESCO [*Unites Nation Education Scientific, and Cultural Organization*]. Lima visi dasar pendidikan tersebut, yaitu : [a] *learning haw to think* [belajar bagaimana berpikir], arti dalam proses memuat aspek-aspek pendidikan yang mengedepankan rasional, keberanian bersikap kritis, mandiri, dan hobi membaca. [b] *learning haw to do*, memuat aspek-aspek keterampilan dalam keseharian hidup termasuk kemampuan pribadi memecahkan setiap masalah. [c] *learning to be* [belajar menjadi diri sendiri], memuat aspek-aspek mendidik orang agar kemudian hari orang dapat tumbuh berkembang sebagai pribadi yang mandiri, memiliki harga diri, dan bukan sekedar memiliki *having* [materi], [d] *learning haw to learn* [belajar untuk belajar hidup], yang berarti menyadarkan bahwa pengalaman sendiri itu tak pernah mencukupi sebagai bekal hidup. Orang juga perlu mengembangkan sikap-sikap kreatif, daya pikir imajinatif – hal-hal yang barangkali tidak diperoleh dari bangku sekolah, [e] *learning haw to live together* [belajar hidup bersama], artinya masyarakat pendidikan memberikan ruang bagi pembentukan kesadaran bahwa manusia hidup dalam sebuah dunia yang global bersama banyak manusia dari berbagai belahan dunia dengan latar belakang budaya dan etnik yang berbeda[138]. Darisinilah pendidikan nilai, seperti tanggungjawab atas pelestarian lingkungan, kejujuran, keadilan, toleransi, perdamaian, penghormatan hak-hak asasi manusia menjadi hal yang perlu diperhatikan. Maka apabila konsep Islam dan UNESCO ini dipadukan, barangkali akan menjadi alternatif baru bagi pendidikan Islam. Artinya pendidikan Islam dapat dikembangkan dengan mengedepankan rasionalitas, sikap kritis, mandiri, mampu memecahkan masalah, mengembangkan sikap kreatif, memiliki daya pikir imajinatif, toleransi, perdamaian, menghargai hak asasi manusia serta siap bersaing dalam

[138]Teuku Amiruddin, 1997, *Reorientasi Manajemen Pendidikan Islam di Era Indonesia Baru*, (Yogyakarta:UII Press, 1997), hlm. xiv.

dunia global yang dilandasi dengan nilai-nilai Islam menuju masyarakat madani. Tetapi yang penting sekarang adalah bagaimana mengoperasionalkan gagasan-gagasan itu sedini mungkin, setidaknya dimulai dari tingkat pendidikan dasar.

Dalam usaha mewujudkan misi dan visi pendidikan harus dilandasi dengan *core beliefs, core values,* serta dilaksanakan dengan "kebijakan" dan "strategi", yaitu menetapkan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan berbagai potensi yang tersedia. *Core biliefs,* berupa keyakinan tentang kebenaran visi dan kebenaran jalan yang dipilih untuk mewujudkan visi pendidikan Islam dan *core beliefs* berfungai untuk membangkitkan semangat tinggi terhadap usaha perwujudan visi. Dengan demikian. *core biliefs* pendidikan Islam adalah bagaimana "upaya pengembangan pandangan hidup Islami untuk dimanifestasikan dalam sikap hidup dan keterampilan hidupnya selaras dengan minat, bakat, kemampuan dan bidang kehidupannya masing-masing. Paradigma ini berimplikasi pada pendidikan Islam yang berorientasi pada peningkatan iman dan taqwa"[139]. Nilai-nilai ajaran Islam yang digunakan sebagai *core biliefs* "mengandung makna bahwa setiap muslim dituntut untuk menjadi aktor beragama yang loyal, *concern* dan *commitment* dalam menjaga dan memelihara ajaran dan nilai-nilai Islam dalam segala aspek kehidupannya, serta bersedia dan mampu berdedikasi sesuai dengan minat, bakat, kemampuan dan bidang keahliannya masing-masing dalam perpektif Islam untuk kepentingan kemanusiaan"[140]. Maka *core biliefs* pendidikan Islam, adalah sebagai upaya menegakkan wahyu ilahi dan Sunnah Nabi, sebagai sumber kebenaran mutlak yang menjadi rahmat bagi alam semesta dan mendukung cita-cita luhur dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui upaya membentuk manusia Indonesia yang bertaqwa, berakhlak, berilmu pengetahuan dan teknologi, terampil, dan dapat dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan nilai-nilai Islam.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[139]Muhaimin, et.al., *Paradigma Pendidikan Islam...*, hlm. 63.

[140]Ibid, hlm. 63.

Core values, memberikan makna terhadap suatu proses sebagai pengabdian kepada Tuhan. Untuk itu, c*ore values* merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi, berupa nilai-nilai yang terkndung dalam al-Qur'an dan Hadis oleh lembaga pendidikan Islam dalam usaha atau perjalanan mewujudkan visi. Maka *core values,* akan memberikan batasan dalam pemilihan cara-cara yang ditempuh dalam usaha mewujudkan visi. Misalnya saja, nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan Islam berupa nilai pengabdian, keimanan, keikhlasan, kejujuran, qona'ah, kerjasama dan toleran [*ukhuwah*]. Sedangkan nilai-nilai pengembangan berupa nilai inovatif, disiplin, terbuka dan proaktif, efesien, efektif, dan nilai integratif.

Nilai-nilai tersebut dapat digunakan dalam mewujudkan visi pendidikan, karena pendidikan Islam "sebagai upaya pengembangan pandangan hidup Islami, yang diwujudkan dalam sikap hidup dan dimanifestasikan dalam keterampilan hidup sehari-hari. Maka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan bertolak dari suatu pandangan yang *theosentris*, di mana proses dan produk pencarian, penemuan iptek lewat studi, penelitian dan eksperimen, serta pemanfaatannya dalam kehidupan yang merupakan realisasi dari misi *kekhalifahan* serta pengambdiannya kepada Allah[141]. Dengan demikian *core values,* dapat membentuk perilaku yang diharapkan, memberikan batasan dan penilaian cara-cara yang ditempuh dalam upaya mewujudkan visi. Sedangkan untuk mewujudkan visi, harus dilaksanakan dengan kebijakan dan strategi atau langkah-langkah yang sistematis, sehingga mampu mengembangkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas.

3. Strategi Pendidikan Islam

Pembangunan pendidikan dan pendidikan Islam di Indonesia sekurang-kurangnya menggunakan empat strategi dasar, yakni *pertama*, pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, *kedua,* relevansi pendidikan, *ketiga*, peningkatan kualitas pendidikan, dan *keempat*, efisiensi pendidikan. Secara umum strategi itu dapat dibagi menjadi dua dimensi yakni peningkatan mutu dan pemerataan

[141]Ibid, hlm. 65.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pendidikan. Pembangunan peningkatan mutu diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas pendidikan. Sedangkan dimensi pemerataan pendidikan diharapkan dapat memberikan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan bagi semua usia sekolah[142].

Untuk menjamin kesempatan memperoleh pendidikan yang merata disemua kelompok strata dan wilayah tanah air sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangannya perlu menyusun strategi dan kebijakan pendidikan Islam, yaitu : [a] Menyelenggarakan pendidikan Islam yang relevan dan bermutu sesuai dengan kebutuhan masyarakat madani Indonesia dalam menghadapi tantangan global, [b] menyelenggarakan pendidikan Islam yang dapat dipertanggungjawabkan [*accountasle*] kepada masyarakat sebagai pemilik sumberdaya dan dana serta pengguna hasil pendidikan, [c] menyelenggarakan proses pendidikan Islam yang demokratis secara profesional sehingga tidak mengorbankan mutu pendidikan, [d] meningkatkan efisiensi internal dan eksternal pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, [e] memberi peluang yang luas dan meningkatkan kemampuan masyarakat, sehingga terjadi diversifikasi program pendidikan sesuai dengan sifat multikultural bangsa Indonesia, [f] secara bertahap mengurangi peran pemerintah [Departemen Agama] menuju ke peran fasilitator dalam implementasi sistem pendidikan Islam, [g] Merampingkan birokrasi pendidikan Islam sehingga lebih lentur [*fleksibel*] untuk melakukan penyesuaian terhadap dinamika perkembangan masyarakat dalam lingkungan global[143].

Apabila pembahasan ini berangkat dari rumusan misi dan visi pendidikan di atas, maka kebijakan pendidikan nasional termasuk pendidikan Islam harus diorientasikan pada upaya, untuk : [a] perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas, [b] peningkatan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga

---

[142]Nanat Fatah Natsir, *Strategi Pembangunan Pendidikan di Indonesia*, From:http://www. kopertis4. or.id/ media/ strategi. htm, diirint 5 April 2002, dan aktikel ini telah dimuat dalam Surat Kabar Pikiran Rakyat, 17 Januari 2002.

[143]Kelompok Kerja Pengkajian dan Perumusan, Rangkuman Filosofi, *Kebijaksanaan dan Strategi Pendidikan Nasional*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1999, Jakarta,hlm.3.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

mampu berfungsi secara optimal terutama dalam meningkatkan pendidikan watak dan budi pekerti, [c] perlu melakukan pembaruan kurikulum, berupa deversifikasi keurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, [d] memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat, [e] melakukan pembaruan dan pemantapan sistem pendidikan berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen, [f] memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, [g] mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu, dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa, sehingga generasi muda dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensinya[144].

Kemudian, apabila prinsip ini diterapkan di sekolah, maka strategi pengelolaan pendidikan di sekolah terdiri dari : [a] "*school policy*" [kebijakan sekolah] yang memuat visi, misi, tujuan dan target-target perioritas pengembangan sekolah untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang dikehendaki bersama, [b] *school annual planning* [rencana tahunan sekolah] yang memuat rincian program kerja tahunan sekolah dalam berbagai aspek kegiatan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, [c] *school planning review*, yaitu rencana jangka pendek sekolah yang memuat berbagai macam dan target pengembangan sekolah untuk jangka waktu tiga sampai lima tahun[145].

Strategi pendidikan merupakan target pencapaian, baik bersifat jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dalam merealisasikan terlaksanaya penyelenggaraan pendidikan menuju masyarakat madani Indonesia. Maka dalam menetapkan sasaran pencapaian strategi pendidikan harus memiliki nilai khusus [*specific*], dapat terukur dan terhitung [*measurable*], dapat tercapai [*achievable*],

---

[144]Soedijarto, *Memahami Arah Kebijakan GBHN 1999-2004* ..., hlm. 2-3.

[145]Udin S. Sa'ud, "*Manajemen Berbasis Sekolah, [Shool Based Management] Sebagai Strategi Implementasi Desentralisasi Pengelolaan Pendidikan Dalam Rangka Otonomi Daerah*", Jurnal Administrasi Pendidikan No.I, Tahun 2002, Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, hlm. 17.

realis dan wajar [*realistic*], dan berjangka waktu [*time frame*]. Maka berdasarkan *time frame* [berjangka waktu] tersebut, perlu disusun langkah-langkah atau strategi untuk mencapai visi pendidikan adalah, sebagai berikut :

Pertama, strategi jangka panjang. Upaya untuk membangun lembaga pendidikan Islam yang memadai secara akademik dan finansial melalui kebijakan restrukrisasi dan rekapitulasi yang berkesinambungan. Maka rumusan stategi jangka panjang pendidikan adalah : [a] "Menciptakan sistem perencanaan yang berbasis kepentingan lokal untuk mengakomodasikan aspirasi dan kemajuan masyarakat, berorientasi nasional untuk menjamin persamaan, dan berwawasan global agar mampu mempertimbangkan kecenderungan global dan regional. [b] Menerapkan sistem manajemen mutu secara menyeluruh berupa penataan kembali manajemen organisasi di semua tingkat kelembagaan dan proses pembelajaran. [c] Melakukan reviu kurikulum secara periodik serta meningkatkan pengembangan implementasi kurikulum secara kontinu dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif yang bertumpu pada pendidikan global [*global education*]. [d] Melakukan perekayasaan proses, yaitu berupa penerapan pendekatan dan metode serta isi pendidikan yang memberi kesempatan luas kepada peserta didik dan warga negara untuk mengembangkan potensi kemampuannya secara utuh. [e] Menjaga konsistensi dan kontiniutas internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam di antara tiga pusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat, sehingga terhindar dari benturan-benturan pada peserta didik dengan norma-norma sosial yang ada dimasyarakat.

Kedua, strategi jangka menengah. Upaya untuk memantapkan infra struktur melalui kebijakan rekapitulasi terhadap komponen penunjang dalam sistem pendidikan. Strategi pendidikan Islam jangka menengah menyangkut dengan: demokratisasi pendidikan, relevansi pendidikan, akuntabilitas pendidikan, profesionalisme, meningkatkan efisiensi pendidikan, mengakomodasi kemajemukan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dan desentralisai[146]. Maka untuk lebih jelasnya, strategi tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut : [a] Demokratisasi pendidikan Islam, yaitu mengoptimalkan pendayagunaan instutusi pendidikan Islam yang berwujud pusat kegiatan belajar, kelompok kerja sekolah, pesantren untuk mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar, pendidikan dasar yang berbasis di mesjid dan pusat latihan kerja. [b] Relevansi pendidikan Islam, dalam rangka meningkatkan relevansi pendidikan ada beberapa upaya yang dapat dilakukan, yaitu: *pertama,* menjamin pendidikan melalui program pendidikan yang bermutu dan lebih fungsional baik bagi individu maupun masyarakat, maka dianggap perlu untuk melibatkan para tokoh masyarakat di samping para ahli untuk merancang isi kurikulum dan jenis kegiatan-kegiatan pembelajaran pendidikan Islam, *kedua,* untuk menghadapai tantangan globalisasi yang menuntut kualifikasi tertentu setiap lulusan dari jenis dan jenjang pendidikan Islam tidak hanya dituntut menguasai kemampuan akademik saja, melainkan perlu juga diorientasikan pada kompotensi tambahan berupa, keterampilan kerja [*skill*], manajemen diri, keterampilan komunikasi, kemampuan komputer dan internet, kemampuan memobilisasi dan inovasi. Kompetensi tambahan ini harus masuk dalam kurikulum pendidikan Islam pada seluruh jenjang dan jenis pendidikan secara komprehensif dalam program kurikulum, ekstra kurikulum maupun *hidden curriculum*. [c] Akuntabilitas proses pendidikan Islam, yaitu proses pendidikan diharapkan benar-benar mampu menjamin pendidikan yang dapat menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Mutu tidak hanya menyangkut masalah isi saja, melainkan juga kesesuaian metodologi pembelajaran. Dengan demkian, akuntabilitas pendidikan dikembangkan dengan: *pertama*, pendidikan lebih ditekankan pada kegiatan belajar dari pada mengajar, pada setiap tingkat satuan pendidikan, *kedua*, menerapkan pengembangan kurikulum secara komprehensif yang dirancang

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[146]Kelompok Kerja Pengkajian dan Perumusan, hlm.34-38.

untuk memelihara integritas pengembangan kemampuan akademik, keterampilan teknis dalam proses pendidikan, *ketiga,* mengembangkan sistem penilaian menyeluruh terhadap peserta didik untuk menentukan keberhasilan pendidikan sesuai dengan tuntutan masyarakat, *keempat,* mengembangkan manajemen pendidikan yang berbasis pada masyarakat dan sekolah, sehingga program dan proses pendidikan yang berlangsung dapat diterima dan didukung oleh sekolah serta masyarakat[147]. [d] Profesionalisme pendidikan merupakan salah satu aspek penting untuk menentukan kualitas pendidikan Islam. Tuntutan personil atau sumberdaya pendidikan yang profesional merupakan tumpuan bagi keberhasilan suatu proses yang berkualitas. Maka pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kelangsungan dan keberhasilan proses pendidikan Islam, seperti para pengajar sebagai penanggungjawab utama perlu mendapatkan perhatian yang serius, karena keberhasilan proses pendidikan lebih banyak bertumpu pada manajemen pengajar. Dengan demikian, berbagai aspek yang perlu diperhatikan dan diperhitungkan di antaranya: *pertama,* rekruitmen tenaga pengajar diorientasikan pada kebutuhan serta kualitas, *kedua,* pelatihan tenaga pengajar sangat diperlukan untuk peningkatan kualitas pembelajaran dan pelatihan lebih diorientasikan pada hal-hal yang praktis sehingga mudah diterapkan di lapangan, *ketiga,* pemilihan, penunjukkan dan penempatan dapat dilihat sebagai satu rangkaian dari perjalanan pengembangan profesi pendidikan. Maka pemilihan dan penunjukan lebih mementingkan profesionalisme seseorang dan prosedur penempatan hendaknya disesuaikan dengan kemampuan serta pertimbangan efisiensi, *keempat,* perkembangan karier dan sistem promosi menjadi lebih penting apabila perhitungan angka kredit dilakukan secara objektif dan selalu berorientasi pada kemampuan profesional dan tidak hanya sekedar banyak kreditnya, *kelima,* perlu diperhatikan sistem insentif atau *reward* bagi para pengajar. Apabila seorang guru atau dosen yang berprestasi perlu diberikan penghargaan yang memadai sehingga dapat mendorongnya untuk terus maju. Selain

[147] Ibid, hlm. 36.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

itu, personil lain yang ikut menentukan mutu pendidikan dan memiliki posisi sangat strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan, seperti kepala sekolah, konselor sekolah, rektor, dekan, ketua jurusan, dan para pengelola administrasi pendidikan. [e] Mengakomodasi kemajemukan, perlu menyadari akan kondisi obyektif kemajemukan bangsa dan masyarakat Indonesia. Maka penegakan uniformitas perlu dihindari secara berangsur-angsur dan menuju kepada keperdulian secara sungguh-sungguh melalui upaya mengakomodasi kemajemukan kultural, etnis dan kebutuhan individu dan masyarakat. Maka perlu memberdayakan segala potensi daerah, meningkatkan otoritas dan kreativitas daerah, dan mengurangi kurikulum pendidikan Islam muatan nasional sampai batas toleransi tertentu. [f] Desentralisasi, sejalan dengan semangat reformasi, maka secara berangsur-angsur pergeseran peran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan dari pemerintah ke non pemerintah dalam berbagai jenis persoalan pendidikan. Manajemen pendidikan Islam, mulai dari penentuan kebijaksanaan, pembinaan lembaga, pengambilan keputusan, koordinasi, pengendalian kualitas sampai kepada pengawasan yang selama ini sepenuhnya dikendalikan oleh pusat [Departemen Agama RI] pada akhirnya akan bergeser ke daerah dan lembaga-lembaga pendidikan. Selama ini daerah dan lembaga-lembaga pendidikan menjadi obyek penyelenggaraan sistem pendidikan, maka kini dan masa depan akan menjadi obyek yang sangat menentukan gerak dan langkah pendidikan di daerahnya dan dilembaganya masing-masing. Perlu dikembangkan dan dilaksanakan manajemen yang berbasis pada sekolah dan masyarakat [*Community Seholl Based Management*], sehingga rasa memiliki dan bertanggung jawab sekolah dan masyarakat akan mulai terbangun. Pendidikan Islam perlu mengantisipasi penggeseran paradigma ini, karena selama ini masyarakat tidak merasa memiliki dan mempunyai keperdulian yang berarti terhadap pengelolaan pendidikan[148] Islam. Maka era reformasi sekarang ini, masyarakat mulai diharapkan meningkatkan partisipasinya, yang tidak hanya sebagai penyandang dana saja, tetapi juga terlibat dalam

[148]Ibid, hlm. 32-38.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pengambilan keputusan dan inisiatif yang konstruktif bagi pengembangan dan kelangsungan proses pendidikan.

Ketiga, strategi jangka pendek, yaitu perlu membangun perangkat infra struktur sistem pendidikan yang memihak kepada pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan restrukturisasi dalam sistem pendidikan Islam. Setidaknya yang diperlukan pendidikan Islam adalah menyusun "strategi untuk meningkatkan relevansi pendidikan, meningkatkan akuntabilitas proses pendidikan, meningkatkan profesionalisme pendidikan, dan mengurangi uniformitas"[149]. Untuk lebih jelanya, strategi tersebut setidaknya dapat: [a] Meningkatkan relevansi pendidikan, artinya perlu diwujudkan kesesuaian antara pengetahuan dan keterampilan teknik di dunia kerja [*link and match*]. Relevansi pendidikan Islam, harus diwujudkan dalam bentuk kemampuan adaptasi secara cepat dalam menghadapi tuntutan perubahan. Maka strategi yang diperlukan adalah pengetahuan dan keterampilan teknis yang diberikan di dunia pendidikan, perlu dilengkapi dengan keterampilan pengelolaan diri, keterampilan komunikasi, keterampilan interaksi dengan orang lain dan kemampuan memobilisasi, inovasi dan perubahan. Keterampilan-keterampilan tersebut perlu dibina sejak dini sesuai tingkat kemampuan peserta didik. Dengan demikian, perlu pengkajian kembali kurikulum pendidikan Islam dengan pendekatan komprehensif, yang dapat menampung pendidikan kemampuan keterampilan dan pendekatan integratif yang dapat mengintegrasikan kajian-kajian agama dengan kajian-kajian ilmu-ilmu lainnya. [b] Akuntabilitas proses pendidikan Islam, yaitu kualitas hasil pendidikan Islam harus dapat dipertanggungjawabkan kepada peserta didik, orang tua, masyarakat pemakai produk pendidikan dan pemerintah. Proses pendidikan Islam pada semua jalur, jenis dan jenjang harus dapat dipertanggungjawabkan untuk menjamin kualitas lulusan yang harapkan. Strategi untuk meningkatkan akuntabilitas proses pendidikan Islam, dengan meningkatkan pengembangan satuan acara

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[149]Ibid, hlm. 32-38.

pengajaran yang menterjemahkan kurikulum ke dalam rencana harian yang lebih operasional baik dalam konteks intra kurikulum, ekstra kurikulum, dan kurikulum tersembunyi [*hidden curriculum*], peningkatan kualitas guru pendidikan agama Islam melalui *inservis training* atau pelatihan-pelatihan. Agar proses pendidikan Islam dapat memenuhi tuntutan semua pihak, maka pihak-pihak yang berkepentingan dapat bersama-sama ikut mengambil keputusan kebijakan operasional dengan tetap berpegang pada kemandirian, profesionalisme, dan berwawasan global. [c] Strategi meningkatkan profesionalisme pendidikan Islam, diwujudkan dengan menerapkan standar kualifikasi tenaga kependidikan yang diperlukan dalam setiap program rekruitmen tenaga kependidikan, mengembangkan *re-training* untuk memberikan kemampuan peningkatan keahlian dan penambahan keahlian baru yang sejenis, meningkatkan kemampuan profesional pengelolaan pendidikan baik pada tingkat satuan pendidikan maupun manajemen dan mengembangkan orientasi pengembangan profesi dengan misi utama untuk memberikan layanan kepada peserta didik secara optimal. [d] Strategi meningkatkan efisiensi, yaitu meningkatkan kemampuan para pengelola pendidikan untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen efisiensi manajerial pendidikan[150].

Dengan demikian, dalam menyusun strategi pendidikan Islam perlu didasarkan pada: [1] prinsip relevan dengan kebutuhan masyarakat madani yang bermutu tinggi, profesionalisme, efisienasi dan efeiktivitas, sehingga pendidikan Islam dapat dipertanggungjawabkan kepada peserta didik, orang tua, pemakai lulusan dan pemerintah, [2] proses pendidikan Islam harus berifat demokratis dan profesional untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, mengurangi peran pemerintah dalam pengelolaan pendidikan serta bersifat fleksibel terhadap dinamika perkembangan masyarakat dalam lingkungan global, [3] strategi pendidikan Islam berupa langkah-

[150]Ibid, hlm.43-45.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

langkah yang disusun secara terencana dan sistimatis, diharapkan dapat menyentuh semua aspek kehidupan, mengantisipasi perubahan, mampu merekayasa terbentuknya sumberdaya manusia cerdas serta dapat meningkatkan kualitas manusia dengan memiliki kemampuan inovasi serta responsif terhadap perubahan. Dengan kerangka ini, maka pendidikan Islam betul-betul diharapkan dapat berpengaruh terhadap perubahan kehidupan masyarakat serta dapat memberikan sumbangan optimal terhadap proses transformasi ilmu pengetahuan yang dapat diimplementasikan atau dioperasionalkan dalam kehidupan masyarakat dan mewujudkan visi pendidikan Islam yang telah ditetapkan.

4. Reorientasi Tujuan Pendidikan Islam

Beberapa pengamat pendidikan Islam, menyatakan bahwa rumusan tujuan pendidikan Islam lebih pada upaya kebahagiaan di dunia dan akhirat, menghamba diri kepada Allah, memperkuat keislaman, melayani kepentingan masyarakat Islam, dan akhlak mulia. Tanpaknya dalam merumuskan tujuan pendidikan, "umat Islam atau sebagian para ahli pendidikan Islam mengalami kesulitan dalam membedakan syariat Islam sebagai ilmu yang disusun ulama sebagai tafsir atas wahyu serta syariat Islam sebagai ajaran Tuhan dalam wahyu yang termaktub dalam al-Qur'an. Islam lalu mengalami penyempitan menjadi hanya ilmu syariat dan ilmu-ilmu Islam lainnya"[151].

Kesulitan ini, juga mengakibatkan penyempitan pada rumusan tujuan dan orientasi pendidikan Islam yang lebih bersifat metafisik, sehingga tujuan praktis untuk meningkatkan daya saing lulusan pendidikan Islam menjadi sangat sulit. Sebab tekanan utamanya tujuan pendidikan Islam pada usaha membimbing ke arah pembentukan kepribadian muslim, yaitu manusia yang berilmu, beriman, bertaqwa dan beramal saleh, manusia yang berpikir, bersikap, bertindak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang lebih bersifat metafisik. Dengan kerangka ini, dapat dikatakan bahwa tujuan pendidikan Islam bukan seharusnya "bagaimana membuat manusia sibuk mengurus dan memuliakan Tuhan saja dan justru melupakan kepekaannya

[151]Ibid, 4 April 2002.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

terhadap kemanusiaan", tetapi tujuan pendidikan Islam adalah "bagaimana bertujuan memuliakan Tuhan dengan sibuk memuliakan manusia dan dunianya[152] serta memuliakan dan memberdayakan manusia dengan segala potensi yang dimilikinya.

Tujuan pendidikan Islam yang ada sekarang ini, dirasakan tidaklah benar-benar diarahkan kepada tujuan posetif. Tetapi tujuan pendidikan Islam hanya diorientasikan kepada kehidupan akhirat semata dan cenderung bersifat defensif, yaitu upaya menyelamatkan kaum muslimin dari pencemaran dan pengrusakan yang ditimbulkan oleh dampak gagasan Barat yang datang melalui berbagai disiplin ilmu, terutama gagasan-gagasan yang mengancam akan meledakan standar-standar moralitas tradisional Islam[153]. Implikasinya, rumusan tujuan pendidikan Islam dalam hal ini tujuan pendidikan agama Islam, lebih bersifat metafisik. Misalnya, "secara umum, pendidikan Islam bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara"[154]. Terlihat, bahwa rumusan lebih bersifat normatif dan tidak bersifat problematik.

Berdasarkan rumusan tujuan pendidikan Islam ini, kemudian ditarik beberapa dimensi yang hendak diupayakan untuk ditingkatkan dan dituju atau dicapai oleh kegiatan proses pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu: "[a] dimensi keimanan peserta didik terhadap ajaran agama Islam, [b] dimensi pemahaman atau penalaran (intelektual) serta keilmuan peserta didik terhadap ajaran agama Islam, [c] dimensi penghayatan atau pengalaman batin yang dirasakan peserta didik dalam menjalankan ajaran Islam, [d] dimensi pengalamannya, dalam arti bagaimana ajaran Islam yang telah diimani, dipahami dan dihayati atau diinternalisasi oleh peserta didik itu mampu menumbuhkan motivasi dalam dirinya untuk menggerakkan, mengamalkan, dan

---

[152]Abdul Munir Mulkan,"*Pendidikan Kehilangan Akar Relegi*",From:http://aliansi.hypermart.net/1999/11/forum.htm.,5/ April 2002.

[153]Muhaimin, dkk., *Kontroversi Pemikiran Fazlur Rahman*..., hlm. 1-2.

[154]Muhaimin, et.al, *Paradigma Pendidikan Islam*...,hlm. 78.

menaati ajaran agama dan nilai-nilainya dalam kehidupan pribadi[155], sebagai manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt serta dapat mengaktualisasikan dan merealisasikannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Rumusan tujuan pendidikan Islam tersebut, dinilai lebih bersifat global, kurang problematis, kurang strategis, kurang antipatif terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi umat manusia serta dianggap kurang menyentuh aspek aplikasi [psikomotorik]. Tujuan tersebut, dinilai lebih bersifat teoritis-normatif dan terkesan kurang strategis dalam memecahkan problem-problem yang dihadapi umat manusia, sementara problem yang dihadapi sangat kompleks, sedangkan tujuan praktis untuk meningkatkan daya saing lulusannya lebih sulit dipecahkan, karena pada saat yang sama pendidikan Islam harus memenuhi tujuan yang disusun pada dataran metafisik yang sangat teoritis normative, sementara pada sisi lain, pendidikan Islam harus juga dituntut mampu menjawab tututan perubahan zaman yang begitu cepat.

Dalam pelaksanaan pendidikan Islam, apabila dicermasti sebenarnya "seluruh model pendidikan Islam, baik itu pesantren, sekolah Islam dan pendidikan agama Islam di sekolah umum, tujuan utama membentuk pribadi Muslim yang bertaqwa, berakhlak mulia, cerdas, terampil[156], memiliki etos kerja yang tinggi untuk bekerja di masyarakat. Tujuan ini berlaku bagi semua tingkat dan jenjang pendidikan Islam, tetapi ironisnya, hingga kini "belum ada sistem evaluasi yang dapat dijadikan ukuran apakah ketakwaan, kepribadian Muslim, dan akhlak mulia telah dicapai. Evaluasi tujuan metafisik ini seperti model evaluasi lain, yaitu terfokus pada "kemampuan kognisi" peserta didik atas ilmu-ilmu agama tanpa teori yang dapat menjelaskan hubungan antara penguasaan ilmu agama dengan kepribadian Muslim, ketakwaan, dan akhlak mulia"[157].

Upaya rekonstruksi dan sistematisasi tujuan metafisik pendidikan Islam seperti madrasah, secara pragmatis merupakan tuntutan yang harus dipenuhi. Sekitar tahun

---

[155]Ibid, hlm. 78.

[156]Abdul Munir Mulkhan,*Dilema Madrasah di Antara Dua Dunia*,..., 4 April 2002.

[157]Ibid, 4 April 2002.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1950-an, sebenarnya sudah muncul gagasan dari persatuan guru agama di Yogyakarta dalam memenuhi tuntutan itu. Rencana gegasan tersebut, pada pendidikan tingkat dasar, tujuan pendidikan lebih difokuskan pada kemampuan peserta didik untuk mengamalkan berbagai praktek ibadah dan pada jenjang lebih tinggi, mulai dikembangkan. Sayangnya, gagasan ini tidak mendapar respons, sehingga tujuan pendidikan Islam di semua jenjang dan jenis, hingga kini tetap diletakkan pada tujuan metafisik[158] artinya tujuan pendidikan Islam orientasinya belum bersifat problematis, strategis, antipatif, dan aplikasi. Tetapi, persoalan utama yang dihadapi adalah kesulitan melakukan "rekonstruksi pragmatis tujuan pendidikan Islam adalah akibat kecenderungan ideologisasi dan teologisasi ilmu-ilmu Islam. Sebab Ilmu Islam diidentikan sebagai ilmu itu sendiri, sehingga kebenarannya diyakini bersifat "mutlak" yang berlaku universal. Akibatnya, ilmu selain ilmu Islam, yang sering disebut dengan ilmu umum atau sekuler, dipandang sesat dan bahkan sampai tingkat "haram" untuk dipelajari[159]. Tetapi di sisi lain, apabila berlaku jujur, sebenarnya pandangan dan sikap ini bertentangan dengan fakta dalam persoalan pelaksanaan pendidikan Islam, karena berbagai jenis, model, metodologi, dan proses pendidikan saat sekarang ini, dikelola dengan memanfaatkan jasa ilmu-ilmu sekuler yang dianggap sesat oleh sebagian umat Islam tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bertolak dari tujuan pendidikan Islam di atas serta perubahan yang akan terjadi dalam kehidupan kultural, sosial-politik, ekonomi, hukum dan pendidikan untuk menuju masyarakat madani Indonesia, "secara makro persoalan yang dihadapi pendidikan Islam adalah bagaiamana pendidikan Islam mampu menghadirkan suatu konstruski wacana keagamaan yang kontektual dengan perubahan masyarakat. Berikutnya, bagaimana konstruksi wacana keagamaan tersebut mampu ditransformasikan secara sistematik dalam masyarakat[160]. Untuk menjawab persoalan yang dikemukakan di

---

[158]Ibid, 4 Apri; 2002

[159]Ibid, 4 April 2002.

[160]A. Malik Fadjar, *Menyiasati Kebutuhan Masyarakat Modern Terhadap Pendidikan Agama Luar Sekolah*, Makalah, disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional "*Pengembangan Pendidikan Islam Menyongsong Abad 21*", Cirebon, 31 Agustus s/d 1 September1995, hlm. 5.

atas, mungkin lebih tepat menggunakan rumusam tujuan pendidikan Islam yang dikemukakan oleh Ali Ashraf, bahwa pendidikan Islam seharusnya bertujuan mencapai pertumbuhan yang seimbang dalam kepribadian manusia secara total melalui latihan intelek, rasional, perasaan dan kepekaan dalam menghadapi problem. Pendidiakn seharusnya memberikan jalan bagi pertumbuhan manusia dalam segala aspeknya secara spritual, intelektual, imajinatif, fisikal, ilmiah, linguistik, baik individu maupun kelompok dan memotivasi semua aspek tersebut ke arah kebaikan dan kesempurnaan[161].

Teuku Amiruddin, menyatakan pendidikan Islam bertujuan untuk : [a] mewujudkan cendekiawan muslim yang bertaqwa dan berakhlak mulia, cerdas, cakap, terampil, mandiri dan bertanggungjawab terhadap kemaslahan umat, [b] mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional untuk menyelesaikan tugas-tugas dan kewajibannya sehari-hari yaitu dengan jalan menerapkan dan mengembangkan ilmu dan keterampilan yang ada pada dirinya masing-masing di lingkungannya, [c] mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan kerjanya sehari-hari sehingga menemukan teknologi baru yang lebih bermanfaat bagi manusia[162]. Walaupun demikian, tentulah rumusan inipun masih dirasakan bersifat umum, sehingga perlu dijabarkan lagi secara rinci sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masing-masing lembaga pendidikan Islam, sekolah-sekolah Islam, dan daerah.

Dengan demikian, rumusan tujuan pendidikan Islam diharapkan lebih bersifat problematis, strategis, antipatif, menyentuh aspek aplikasi, serta dapat menyentuh kebutuhan masyarakat atau pengguna lulusan. Artinya, pendidikan Islam harus berupaya membangun manusia dan masyarakat secara utuh dan menyeluruh [*insan kamil*] dalam semua aspek kehidupan yang berbudaya dan berperadaban yang tecermin dalam kehidupan manusia bertaqwa dan beriman, berdemokrasi dan

[161] Ali Ashraf, *Horison Baru Pendidikan Islam*, Terj. Sori Siregar, (ttp.:Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 25.
[162] Teuku Amiruddin, *Reorientasi Manajemen Pendidikan....*, hlm. 83.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

merdeka, berpengetahuan, berketerampilan, beretos kerja dan professional, beramal shaleh, berkepribadian, bermoral anggun dan berakhlakul karimah, berkemampuan inovasi dan mengakses perubahan serta berkemampuan kopetitif dan komporatif dalam era global dan berpikir lokal dalam rangka memperoleh kesejahteraan, kebahagian dan keselamatan *duniawiyah* dan *ukhrawiyah.* Dari kerangka ini, dapat dikatakan bahwa tujuan yang dirumuskan meliputi aspek *ilahiyah* [*teosentris*], fisik dan intelektual, kebebasan, mental, akhlak, professional, karya [*amaliyah*] dalam rangka mewujudkan manusia yang berbudaya dan berperadaban, berkualitas, dinamis, kratif sebagai *"insan kamil"* dalam kehidupannya. Maka untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan disain materi dan kurikulum pendidikan Islam yang dikembangkan harus bersifat problematis, strategis, antipatif, aplikatif, untuk memecahkan problem-problem yang dihadapi umat manusia atau disain kurikulum lebih diorientasikan pada kompetensi tertentu yang ingin dicapai atau tujuan yang ingin dicapai, sehingga dengan kompetensi tersebut dapat diterapkan dalam kehidupannya dan dikembangkan secara terus menerus.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

5. Reorientasi Kurikulum Pendidikan Islam

Materi pendidikan dan pendidikan Islam tergambar dalam kurikulum yang disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikannya. Disain materi pendidikan harus memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, seni, serta sesuai dengan jenjang masing-masing satuan pendidikan. Dengan demikian, materi pendidikan yang terakomodasi dalam kurikulum menggambarkan standar kemampuan dasar yang wajib dimiliki peserta didik pada masing-masing jenjang pendidikan. Untuk itu dalam kurikulum terdapat kelompok mata pelajaran yang berorientasi pada pembentukan sikap dan nilai pribadi yang integral sebagai warga masyarakat dan warga negara. Kelompok mata pelajaran yang berorientasi pada kemampuan akademik serta kelompok mata pelajaran yang berorientasi pada keterampilan[163].

---

[163]Departemen Agama, *Susunan Persekolahan di Indonesia*,From:http/www.edforni.net/indonesian/ md3.shtml.

Pemerintah telah berupaya keras untuk menanggulangi berbagai permasalahan yang muncul dalam dunia pendidikan di Indonesia, termasuk kurikulum. Upaya yang dapat dirasakan yaitu adanya pemerataan kesempatan pendidikan di semua jenjang. Bahkan pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.2 Tahun 1989 beserta peraturan-peraturan pemerintah (PP) sebagai penunjang UU No. 27,28, 29, dan 30 Tahun 1990. Itu semua membuktikan bahwa sebenarnya pemerintah telah berusaha secara serius dalam menangani persoalan pendidikan. Meskipun demikian, sejauh ini, upaya tersebut belum dapat dirasakan hasilnya secara penuh jika dilihat dari kualitas kurikulum pendidikan yang dimiliki sampai saat ini[164]. Mangunwijaya [almarhum], "sangat prihatin terhadap dunia pendidikan di Indonesia, bahwa sistem pendidikan selama rezim Orde Baru telah ketinggalan satu setengah generasi, karena telah dirusak oleh pendidikan "sistem militer" yang otoriter. Pendidikan yang selama ini dijalankan hanya berupa "pelatihan", bukan mengembangkan peserta didik menjdi pribadi mandiri. Hasilnya, orang-orang menjadi tampil tetapi kepribadian nol"[165]. Semua orang akan mengakui bahwa sasaran akhir pendidikan, pada hakekatnya adalah membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, sikap, kepribadian, dan nilai-nilai [*values*] yang akan membuat mereka hidup mandiri dan fungsional di masyarakat.

Pendidikan merupakan sektor yang amat penting dan strategi bagi siapa saja, pemerintah, keluarga, dan individu dalam kapasitasnya masing-masing selalu memiliki perhatian terhadap dunia pendidikan. Keadaan semacam ini memiliki konsekuensi bahwa perencanaan pendidikan harus betul-betul dapat menyerap dan mengakomodasikan aspirasi pendidikan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang merupakan totalitas dari kelompok-kelompok individu maupun keluarga. Perencana pendidikan harus berpikir mengenai relevansi program pendidikan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri[166], bahkan tidak hanya berhenti

---

[164]Suyanto dan Djihad Hisyam, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan...*, hlm. 61.

[165]Y.Dwi Koratno, [Editor], *Menuju Paradigma Pendidikan "Belajar Untuk Belajar"*, From : http://jemberbisnis. com/ artikel/ARTIKEL/artike 116. htm. 2002.

[166]Suyanto dan Djihad Hisyam, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan...*, hlm. 60.

pada tahap itu, tetapi kesesuaian program pendidikan harus diorientasikan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang dan akan terjadi.

Untuk itu, persoalan yang dihadapi pendidikan tidak semudah itu, karena tanpaknya masyarakat Indonesia sebagai pemakai produk pendidikan, cukup dirisaukan dengan adanya penganggur bergelar sarjana yang jumlahnya dari tahun ke tahun semakin banyak dari produk pendidikan dengan kemampuan pas-pasan dan tidak mempu bersaing di dunia kerja. Masyarakat juga dirisaukan dengan perilaku negatif yang dilakukan oleh para pelajar dan remaja, seperti perkelahian antar pelajar, premanisme, pemerkosaan, penjamretan, perampokan, main hakim sendiri, pembakaran, kerusuhan dan lain-lain perilaku negatif yang muncul di masyarakat, sehingga "oleh pers Barat dianggap sebagai tindakan *barbaric*"[167]. Kasus lain, yang dapat diamati adalah tayangan siaran televisi-televisi yang selalu mengemas dan menampilan adegan-adegan kekerasan. Contoh sinetron, "selama ini sinetron di televisi-televisi selalu menampilkan dan mengemas adegan kekerasan. Namun selama ini juga tidak ada yang memprotes apalagi menegurnya karena tidak ada undang-undangn yang mangaturnya dan tidak ada hukum yang mengatakan bahwa meraka juga harus ikut mendidik masyarakat"[168]. Sebenarnya kemasan program tayangan mereka dalam upaya mendidik dan mencerdaskan masyarakat dan bangsa.

Dari fenomena ini, timbul pertanyaannya apakah ada sesuatu yang salah dari sistem pendidikan di Indonesia? Apakah metodologi pembelajarannya yang salah ataukah disain kurikulum pendidikannya tidak mampu menyentuh aspek realitas kehidupan manusia dan masyarakat? Tetapi dalam kasus ini, biasanya masyarakat selalu bertanya sejauh mana peran pendidikan agama [pendidikan Islam] dalam upaya mensosialisasikan dan menanamkan nilai-nilai ajaran agama, norma, etika, dan akhlak kepada peserta didiknya. Jawaban terhadap pertanyaan tersebut tidak semuanya benar, tetapi pada sisi lain tanpaknya perlu diakui bahwa pendidikan dan pendidikan Islam kita saat ini hanya sekedar menghantarkan peserta didik untuk

[167]Y.Dwi Koratno, *Menuju Paradigma Pendidikan...*, From:http:// jemberbisnis.com/ artikel/ARTIKEL/artikel16. htm.
[168]Djohar, *Reformasi Pendidikan*, ..., 4 Mei 1999.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

mengetahui dan memahami sebuah konsep [aspek kognitif] saja, sedangkan aplikasi dari konsep tersebut belum dapat dilakukan dengan baik. Hal ini terbukti dengan munculnya fenomena kesenjangan antara pengetahuan dengan praktek dalam kehidupan sehari-hari seperti contoh perilaku yang dikemukakan di atas. Contoh lain, misalnya peserta didik telah dikenalkan dan mengetahui seperangkat nilai-nilai, seperti akhlak, kejujuran, adil, disiplin, tepat waktu, dan sebagainya, namun dalam prakteknya hal-hal tersebut hanya merupakan simbol-simbol yang belum dapat dipraktekan, sehingga terjadi kesenjangan antara pengetahuan yang diperoleh dengan perilaku dalam kehidupan di masyarakat. Dari fenomena ini, tanpaknya kita harus banyak bekerja keras untuk membenahi aspek metodologi dan kurikulum, sebab materi yang diajarkan belum menyentuh aspek perilaku di masyarakat, dan disain kurikulum pendidikan kita tanpaknya belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat baik masa kini maupun masa akan datang.

Dalam pandangan dunia pendidikan, keberhasilan program pendidikan sangat tergantung pada perencanaan program kurikulum pendidikan tersebut, karena "kurikulum, pada dasarnya berfungsi untuk menyediakan program pendidikan [*blueprint*] yang relevan bagi pencapaian sasaran akhir pendidikan. Dengan kata lain, fungsi kurikulum adalah *"shaping the individual selver, i.e determining what men become"*[169]. Maka untuk mencapai itu, kurikulum berfungsi menyiapkan dan membentuk peserta didik agar dapat menjadi manusia yang memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan orientasi kurikulum dan sasaran akhir program pendidikan. Maka program kurikulum harus diorientasikan dan disesuaikan dengan kebutuhan masa kini dan masa yang akan datang, apabila kurikulum "tidak sesuai dengan kebutuhan masa kini dan masa akan datang tentu akan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap calon-calon penganggung pada masa yang akan datang"[170].

---

[169]Robert S Zais, 1976, *Curriculum : Principles and Fundations*, Mew York: Harper Z Publishers, hlm. 201, dalam Moh. Ansyar, *"Kurikulum dalam Menyongsong Otonomi Pendidikan di Era Globalisasi, Peluang, Tantangan, dan Arah"*, Jurnal Pendidikan Islam TA'DIB, No. 04, Maret 2002, ISSN 1401-6973,Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang, hlm. 100.

[170]Suyanto dan Djihad Hisyam, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan...*, hlm. 60.

Begitu banyak persoalan-persoalan pendidikan yang dihadapi dan tidak mungkin dapat dibicarakan dalam bahasan secara komprehensif. Maka, dalam bahasan ini hanya akan dibahas persoalan pendidikan yang muncul dari aspek kurikulum yang implikasinya dilihat dari perspektif skala makro. Kemudian, kurikulum dalam bahasan ini, bukan pemhasan kurikulum dalam arti sempit berupa daftar matapelajaran yang harus diajarkan kepada peserta didik, tetapi kurikulum yang diamksud dalam bahasan ini meliputi kurikulum dalam arti luas, yaitu kurikulum sebagai produk, sebagai program, sebagai kegiatan belajar, serta mencermati beberapa titik kelemahan serta koreksi terhadap kurikulum pendidikan Islam dan upaya perubahannya, sebagai berikut :

a. Kurikulum Pendidikan Islam dalam Arti Produk dan Beberapa Titik Lemahnya

Kurikulum pendidikan dalam arti produk masih mengandung banyak kerancuan, artinya sekolah-sekolah di tingkat Ibtidaiyah [SD], Sanawiyah [SLTP], dan Aliyah [SMU] memiliki kurikulum yang amat sarat dengan matapelajaran. Dampak yang diperoleh ialah daya serap peserta didik tidak optimal dan kelihatannya peserta didik cenderung belajar tentang banyak hal, tetapi sebenarnya dangkal dalam penguasaan pengetahuan dan kemampuan keterampilan yang layak. Misalnya, kurikulum 1975 dirasakan amat membengkak dan sangat gemuk. Kurikulum tersebut dikatakan terlalu berorientasi pada pada produk belajar, bukannya pada proses belajar, dan akhirnya kurikulum itu direvisi dengan munculnya kurikulum 1984 yang konon telah mementingkan proses belajar dan perampingan. Namun perampingan itupun tidak tuntas, sehingga muncul komentar bahwa kurikulum 1984 itu "ramping" tetapi "montok". Akibatnya sama yaitu mengandung rendahnya daya serap peserta didik[171], dan kemudian kurikulum inipun direvisi dengan munculnya kurikulum 1994, yang juga memiliki kelemahan yang sama.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[171]Ibid, hlm. 62.

Syamsuddin, menyatakan bahwa kurikulum madrasah 1994 sedikitnya memiliki enam kelemahan mendasar. Keenam kelemahan tersebut, yaitu mulai dari : [1] tidak jelasnya visi dan misi pendidikan Islam, [2] padat materi tetapi tidak sarat nilai, [3] tidak mudah dipahami baik oleh guru maupun siswa, [4] lebih dominan aspek kognisi dibandingkan afeksi dan psikomotorik, [5] kurang berorientasi pada kebutuhan peserta didik dan masa depan, dan [6] tidak memperhatikan aspek keagamaan. Kelemahan lain yaitu, kurikulum 1994 juga dikatakan terlalu rinci, sehingga menutup ruang bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya untuk melakukan pengembangan kurikulum secara kreatif, dinamik, dan demokratik[172], sesuai kebutuhan dan kemampuan pendidikan Islam.

Azyumardi Azra, menyatakan bahwa kurikulum 1994 tidak menjelaskan visi Madrasah Aliyah, sementara kurikulum 1994 berisi 80 persen pengetahuan umum dan 17 – 20 persen bidang agama, itu artinya Madrasah Aliyah menjadi "tanggung". Tetapi memenurutnya, sementara ekspektasi masyarakat terhadap Madrasah Aliyah sangat besar. Mereka berharap kalau anaknya masuk Madrasah Aliyah, lulus dengan bekal agama yang cukup, tetapi tidak ketinggalan di bidang umum. Lebih lanjut menurut Azyumardi Azra, ekspektasi seperti ini tidak terlalu tepat, karena fungsi Madrasah Aliyah harus jelas, apakah sebagai tempat *transfer of knowledge* sama dengan sekolah umum atau khusus agama. Bahkan menurutnya sejak kurikulum 1994 digunakan di Madrasah Aliyah [MA], minat lulusan Madrasah Aliyah masuk IAIN dan perguruan tinggi Islam lainnya cenderung menurun[173], karena kurikulum 1994 tidak secara tegas menjelaskan visi Madrasah Aliyah [MA]. Persoalan lain yang dianggap cukup serius dalam kurikulum pendidikan Islam adalah tumpang tindih baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal materi di kelas satu muncul lagi di kelas dua atau kelas tiga untuk matapelajaran yang sama. Untuk perguruan tinggi,

---

[172]Syamsuddin, [wawancara Kompas], "*Akibat Tak Diminati Lulusan Madrasah, IAIN Buka Program Umum Tanpa Persiapan Memadai*", Kompas Cyber Media, From: http://www. kompas. com/ kompas-cetak/0111/07/ DIKBUD/ iain09.htm. Jakarta, 7 November 2001.

[173]Azyumardi Azra, [wawancara Kompas], "*Akibat Tak Diminati Lulusan Madrasah, IAIN Buka Program Umum Tanpa Persiapan Memadai*", Kompas Cyber Media, From: http://www. kompas. com/ kompas-cetak/ 0111/07/ DIKBUD/ iain09.htm. Jakarta, 7 November 2001.

sebagai contoh materi "tauhid, akhlak, dan fiqh ibadah" yang telah diajrkan di tingkat Madrasah Aliyah (MA) muncul lagi di perguruan tinggi. Sedangkan secara horizontal muncul beberapa pokok bahasan yang sama pada beberapa mata pelajaran yang berbeda. Semua itu, menurut Suyanto, "tentu tidak menguntungkan jika dilihat dari proses belajar, karena peserta didik akan merasa jemu harus belajar persoalan yang sama dari tahun ke tahun"[174].

Masalah lain yang muncul dari "aspek keurikulum dalam arti proses belajar dan pengalaman belajar memiliki kaitan erat dengan perilaku guru dalam konteks belajar-mengajar"[175]. Sedangkan, kurikulum dalam arti produk hanya seperti *blueprint* bagi suatu program pendidikan. Bagaimanapun bagusnya *blueprint* yang telah dirancang harus didukung tenaga pengajar yang kompoten dalam bidangnya. Artinya blueprint tersebut akan tidak bermakna tanpa adanya pelaksana yang kompeten dalam bidangnya. Maka, diakui bahwa program suatu kurikulum masih memerlukan intervensi dan kreativitas guru yang akan mengoperasionalkannya di dalam proses belajar-mengajar.

Praktek pendidikan di Indonesia yang telah lama berjalan dengan model "satu arah" [*one way process*]. Semua informasi hanya berasal dari guru dan atau dosen, peserta didik kurang diberi kesempatan mengembangkan kreativitas dan imajinasinya, karena proses belajar didominasi oleh guru dan dosen. Guru dan bahkan dosen dibudayakan dan dimitoskan sebagai figur yang merupakan asal muasal dari semua bentuk ilmu yang diajarkan kepada peserta didik. Hal lain, yaitu sistem pengajaran kita lebih menentingkan aspek kognitif pada peta taksonomi pendidikan yang telah lama di teorikan oleh Bloom dan pada aspek inipun hanya disentuh pada tingkat yang rendah yaitu hanya sampai pada tingkat *knowledge* dan *comprehension*. Selebihnya, yaitu aspek *analysis, syintesis*, dan *evaluation* jarang disentuh[176]. Jadi terlihat sistem belajar

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[174]Suyanto & Djihad Hisyam, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan...*, hlm.62.

[175]Ibid, hlm. 62.

[176]Ibid, hlm. 63.

sangat mengabaikan aspek afektif dan psikomotorik peserta didik dan hanya mengakses aspek kognitif dan itupun hanya pada tingkat yang rendah yaitu "hafalan".

Menurut istilah Paulo Freire, model pengajaran kita sebagai implementasi kurikulum adalah analog dengan *banking concept*. Guru selalu melakukan deposito berbagai macam informasi ke bank peserta didik tanpa harus tahu untuk apa informasi itu bagi kehidupan mereka[177]. Akibat dari model pengajaran seperti ini, peserta didik memiliki pengetahuan, tetapi peserta didik kering dan tidak memiliki sikap, minat, motivasi, dan kreativitas untuk mengembangkan diri atas dasar pengetahuan yang dimiliki, serta peserta didik sendiri tidak memahami dan tidak tahun untuk apa pengetahuan tersebut. Keadaan semacam ini, menurut Suyanto, perlu segara dikoreksi mulai dari tingkat pendidikan di sekolah dasar. Proses pengajaran yang mementingkan kemampuan analisis dan sintesis, sikap, minat, motivasi, dan kreativitas yang tinggi terhadap pencapaian prestasi di kalangan peserta didik perlu segera direkayasa[178], sehingga mampu melahirkan manusia yang memiliki kemampuan kreatif, inovasi, mandiri, dan memiliki kebebasan dalam berpikir.

Apabila memperhatikan disain program kurikulum pendidikan Islam mulai dari tingkat SD atau *Ibtidaiyah* sampai dengan perguruan tinggi, dirasakan belum mampu menjawab persoalan-persoalan tantangan perubahan, karena kurikulum pendidikan Islam "lebih menitik beratkan pada aspek *korespondensi-tekstual*, yang lebih menekankan hafalan teks-teks keagamaan yang sudah ada"[179], dan inipun baru pada wilayah aspek kognitif tingkat rendah. Kurikulum pendidikan Islam lebih berorientasi pada aspek kognitif sehingga aspek psikomotorik sering terbaikan. Dalam kenyataan proses pendidikan Islam, seringkali dapat "menyaksikan paraktik pendidikan yang kurang menarik dari sisi materi dan metode penyampaian yang digunakan. Kondisi ini juga diperpara dengan terisolasinya atau kurang terintegrasinya materi pendidikan

---

[177]Ibid, hlm. 63.

[178]Ibid, hlm. 64.

[179]Amin Abdullah, *Problem Epistemologis-Metodologis Pendidikan Islam*, dalam Abd. Munir Mulkan, et.al., *Religiusitas Iptek*, (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 1998), hlm. 49.

Islam dengan materi pelajaran yang lain"[180]. Disain kurikulum pendidikan Islam sangat "didominasi oleh masalah-masalah yang bersifat normatif, ritual dan *eskatologis*, apalagi materi pendidikan Islam yang kemudian disampaikan dengan "semangat *ortodoksi* kegamaan" atau "menekankan ortodoksi dalam pelajaran agama yang diidentikan dengan iman, dan bukan ortopraksis yaitu bagaimana mewujudkan iman dalam tindakan nyata operasional". Maka dengan semangat *ortodoksi* kegamaan yang merupakan suatu cara dimana peserta didik dipaksa tunduk pada suatu "meta narasi" yang ada, tanpa diberi peluang untuk melakukan telaah secara kritis. Akibatnya, agama dipandang sebagai suatu yang "final", yang harus diterima secara taken *for granted*. Maka tidaklah mengherankan bila kemudian pendidikan Islam tidak fungsional dalam kehidupan sehari-hari, kecuali hanya sedikit aktivitas verbal dan formal untuk menghabiskan materi atau kurikulum yang telah diprogramkan dengan batas waktu yang telah ditentukan"[181].

Dari kenyataan ini, ada beberapa kelemahan kurikulum pendidikan Islam yang diamati oleh beberapa ahli pendidikan anatara lain : Towaf [1996], menyatakan, bahwa pendekatan kurikulum pendidikan Islam "masih cenderung normatif, dalam arti pendidikan Islam manyajikan norma-norma yang seringkali tanpa ilustrasi konteks sosial budaya sehinga peserta didik kurang menghayati nilai-nilai agama sebagai nilai yang hidup dalam keseharian. Kurikulum pendidikan agama Islam yang dirancang di sekolah sebenarnya lebih menawarkan minimum kompotensi atau minum informasi, tetapi pihak Guru Pendidikan Agama Islam [GPAI] seringkali terpaku padanya sehingga semangat untuk memperkaya kurikulum dengan pengalaman belajar yang bervariasi kurang tumbuh"[182].

Rasdianah, mengemukakan beberapa kelemahan dari pendidikan Islam di sekolah, baik dalam pemahaman materi pendidikan maupun dalam pelaksanaannya, yaitu : [1] dalam bidang teologi, ada kecenderungan mengarah pada paham fatalistik,

---

[180]A. Malik Fadjar, *Menyiasati Kebutuhan Masyarakat Modern...*, hlm. 5.

[181]Romo YB. Mangunwijaya, "*Kritik Menajemen pendidikan nasional selama Orde Baru*", Kompas,12 Februari 1999.

[182]Muhaimin, et.al, *Paradigma Pendidikan Islam...* hlm. 89.

[2] bidang akhlak berorientasi pada urusan sopan santun dan belum dipahami sebagai keseluruhan pribadi manusia beragama, [3] bidang ibadah diajarkan sebagai kegiatan rutin agama dan kurang ditekankan sebagai proses pembentukan kepribadian, [4] dalam bidang hukum [fiqih] cenderung dipelajari sebagai tata aturan yang tidak akan berubah sepanjang masa, dan kurang memahami dinamika dan jiwa hukum Islam, [5] agama Islam cenderung diajarkan sebagai dogma dan kurang mengembangkan rasionalitas serta kecintaan pada kemajuan ilmu pengetahuan, [6] orientasi mempelajari al-Qur'an masih cenderung pada kemampuan membaca teks, belum mengarah pada pemahaman arti dan penggalian makna[183], apalagi sampai pada tarap menganalisis dan mengoperasionalkan dalam kehidupan nyata.

Amin Abdullah misalnya, salah seorang pakar keislaman non-tarbiyah, juga telah menyoroti kurikulum dan kegiatan pendidikan Islam yang selama ini berlangsung di sekolah, antara lain sebagai berikut: [1] pendidikan Islam lebih banyak terkonsentrasi pada persoalan-persoalan teoritis keagamaan yang bersifat kognitif semata-mata serta amalan-amalan ibadah praktis, [2] pendidikan Islam kurang *concern* terhadap persoalan bagaimana mengubah pengetahuan agama yang kognitif menjadi "makna" dan "nilai" yang perlu diinternalisasikan dalam diri siswa lewat berbagai cara, media, dan forum, [3] pendidikan agama lebih menitikberatkan pada aspek korespondensi-tekstual, yang lebih menekankan aspek hafalan teks-teks keagamaan yang sudah ada, [4] sistem evaluasi, bentuk-bentuk soal ujian agama Islam menunjukkan prioritas utama pada aspek kognitif, dan jarang pertanyaan tersebut mempunyai bobot muatan "nilai" dan "makna" spiritual keagamaan yang fungsional dalam kehidupan sehari-hari"[184].

Komaruddin Hidayat, menyoroti orientasi kurikulum dan materi pendidikan Islam yang selama ini berjalan di sekolah dianggap kurang tepat. Untuk membuktikan kekurang tepatan kurikulum dan materi pendidikan Islam tersebut, Komaruddin Hidayat

---

[183]Andi Rosdijanah,"*Butir-Butir Pengarahan Dirjen Bimbaga Islam*", makalah disampaikan pada Acara Pelantikan Peningkatan Wawasan Ilmu Pengetahuan dan Kependidikan bagi Dosen Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum. Bandung, 11 September 1995, hlm.4-7.

[184]Amin Abdullah, 1998, *Problem Epistemologis-Metodologis*..., hlm. 49-65.

mengemukakan tiga indikator sebagai berikut : "[1] pendidikan Islam saat ini, orientasi kurikulumnya lebih pada belajar tentang agama, sehingga outputnya banyak orang yang mengetahui nilai-nilai ajaran Islam, tetapi perilakunya tidak relevan dengan nilai-nilai ajaran Islam yang diketahuinya, [2] tidak tertibnya penyusunan dan pemilihan materi-materi pendidikan Islam, sehingga sering ditemukan hal-hal prinsip yang mestinya dipelajari lebih awal tetapi terlewatkan. Kurikulum pendidikan Islam lebih berorientasi pada disiplin ilmu fiqh, sehingga dianggapnya seolah-olah sebagai agama itu sendiri, bahkan masyarakat menilai beragama yang benar adalah identik dengan bermazhab fiqh yang benar dan diakui oleh mayoritas, dan apabila berbeda sedikit dianggap dan dituduh sebagai aliran sesat dan menyimpang, [3] kurangnya penjelasan yang luas, mendalam, dan kurangnya penguasaan sematik dan generik atau istilah-istilah kunci dan pokok dalam ajaran Islam, yang menyebabkan penjelasan yang sangat jauh dan berbeda dan makna, spirit, dan konteksnya[185].

Orientasi semacam ini, kata Komaruddin Hidayat, menyebabkan terjadinya keterpisahan dan kesenjangan antara ajaran Islam dengan realitas perilaku pemeluknya. Oleh karena itu, Komaruddin Hidayat, memberikan dua solusi pendekatan dalam mempelajari Islam, yaitu [1] mempelajari Islam untuk kepentingan dalam mengetahui bagaimana cara beragama yang benar, [2] mempelajari Islam sebagai sebuah pengetahuan[186]. Dengan kata lain mempelajari ajaran Islam untuk membentuk perilaku [*actor*] beragama yang memiliki komitmen, loyal, penuh dedikasi, dan sekaligus mampu memposisikan diri sebagai pembelajar, peneliti, dan pengamat yang kritis untuk peningkatan dan pengembangan keilmuan Islam. Demikian beberapa koreksi terhadap kurikulum pendidikan Islam yang selama ini berjalan dan solusi pendekatan dalam mempelajari Islam.

---

[185]Kamaruddin Hidayat, "*Memetakan Kembali Struktur Keilmuan Islam*" (Kata Pengantar), dalam : Fuaduddin dan Cik Hasan Bisri (Ed), Dinamika Pemikiran Islam di Perguruan Tinggi: Wacana tentang Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Logos, 1999), hlm.xii-xiii.

[186]Muhaimin, et.al, *Paradigma Pendidikan Islam...*, hlm. 91.

b. Perubahan Kurikulum Pendidikan Islam

Mencermati beberapa kelemahan kurikulum pendidikan Islam di atas, maka dalam mendisain kurikulum pendidikan Islam harus diorientasikan pada : [1] kemampuan mengetahui cara beragama yang benar, [2] mempelajari Islam sebagai sebuah pengetahun, sehingga diharapkan dapat terbentuk perilaku manusia muslim yang memiliki komitmen, loyal serta dedikasi terhadap ajaran Islam dan sekaligus sebagai ilmuan, peneliti, pengamat yang kritis untuk pengembangan keilmuan Islam yang memiliki kemampuan inovasi serta siap menerima dan menghadapi tantangan perubahan dan sekarang ini kondisi pendidikan nasional termauk pendidikan Islam akan menghadapi tantangan perubahan.

Euforia reformasi telah menggiring keinginan publik untuk membongkar banyak hal dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia, termasuk bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, salah satu tuntutan yang mengemuka ialah agar pemerintah meninjau dan mereformasi ulang kurikulum 1994 yang sudah berjalan selama empat tahun saat reformasi digulirkan. Kepala Pusat Kurikulum Balitbang Depdikbud [sekarang Diknas], menyatakan kurikulum 1994 perlu dibedah total alias direformasi. Reformasi tidak hanya menyangkut susunan atau sistematikanya saja, tetapi lebih dari itu yaitu mencakup jumlah mata ajar, substansi materi, dan otonomisasi daerah. Rasionalisasi tuntutan itu di tengah upaya negara dan bangsa menyelamatkan diri dari kehancuran akibat krisis diberbagai bidang kehidupan[187].

Apabila dilihat dari kepentingan jangka panjang, tuntutan perubahan seperti itu sangat dapat dimengerti mengingat kurikulum yang berlaku di Indonesia dinilai berbagai kalangan [pakar, guru, peserta didik, dan orang tua] sarat dengan matapelajaran dan terlalu luas cakupan topik bahannya. Akibatnya, selain rentan terhadap krisis karena inefisien [memerlukan biaya tinggi], juga kurikulum itu telah menjadikan sebagian besar peserta didik tidak atau kurang memiliki *deeper insight* pada tiap matapelajaran. Bahkan berdasarkan beberapa laporan menunjukkan, bahwa

[187]Mutrofin,"*Krisis Ekonomi, Perubahan Kurikulum dan Proses Pemiskinan*, Jawa Pos, 2000.

kurikulum tersebut menyebabkan sebagaian besar peserta didik mengalami stres berat. Jika dikatikan dengan kepentingan jangka pendek, diperlukan ekstra kehati-hatian karena bersangkut-paut dengen keterlibatan banyak orang, apalagi sudah lazim terjadi, perubahan kurikulum dilakukan manakalah telah mencapai 10 tahun[188]. Apabila menggunakan prinsip determinasi tertentu, tuntutan perubahan pendidikan yang mencakup analisis perubahan masyarakat, analisis kebudayaan, konsepsi kekinian, era global, disentralisasi pendidikan, otonomi, maka rancangan kurikulum perlu dirubah mengikuti warna dan irama perubahan tersebut. Dengan demikian, suatu kurikulum dikatakan berubah apabila terdapat perbedaan mendasar antara satu atau lebih komponen antara kurikulum pada periode tertentu dengan periode lainnya atau perubahan maupun pengembangan kurikulum biasanya juga didorong oleh determinasi tertentu. Saylor dan Alexander [1986] misalnya, menyebut determinasi itu antara lain pengaruh historis, keinginan, eksperesi nilai-nilai dan kondisi siswa sebagai peserta didik. Sementara secara sosiologis, determinasi itu dapat mencakup analisis masyarakat, analisis kebudayaan dan konsepsi kekinian tentang fungsi-fungsi persekolahan[189].

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kurikulum yang dirancang secara nasional maupun daerah faktor masyarakat [konsumen pendidikan dan pengguna lulusan] sangatlah penting. Artinya, jika ada tuntutan perubahan maupun pengembangan, berarti ada sesuatu yang dirasa belum pas dan memerlukan perhatian serius agar dibenahi. Apabila menggunakan pandangan ini, maka pada kurikulum pendidikan Islam terdapat beberapa titik lemah yang secara psikologis, sosiologis, apalagi secara ekonomi tak dapat dipertanggungjawabkan, baik kurikulum yang berlaku di lingkungan pendidikan dasar [Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Sanawiyah], maupun kurikulum yang berlaku di lingkungan pendidikan menengah [Madrasah Aliyah] dan perguruan tinggi.

---

[188] Ibid, Jawa Pos.

[189] Ibid, Jawa Pos.

Maka dari sisi kurikulum, pendidikan Islam menghadapi persoalan serius yang harus diselesaikan. Tetapi, apabila memperhatikan kondisi perkembangan pendidikan di Indonesia, sebenarnya tantangan yang dihadapi pendidikan Islam juga sama dengan tantangan yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia pada umumnya, terutama dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia, dalam menghadapi tantangan "era kompotetif yang disebabkan oleh meningkatnya strandar dunia kerja. Jika kualitas pendidikan menurun, maka kualitas sumber daya manusiapun juga menurun dan lemah pula dalam hal keimanan dan ketaqwaan serta penguasaan iptek. Kemajuan teknologi informasi menyababkan banjirnya informasi yang tidak terakses dengan baik oleh para pendidikan dalam proses belajar, sehingga pada gilirannya berpengaruh pada hasil pendidikan itu sendiri. Selain itu, dunia pendidikan juga tertinggal dalam hal metodologi, sehingga terjadi kesenjangan antara kualitas pendidikan dengan kenyataan emperis perkembangan masyarakat"[190]. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tantangan yang dihadapi pendidiakan Islam dalam upaya perubahan kurikulum, yaitu perubahan yang akan terjadi pada era global, kemajuan teknologi informasi, lemahnya metodologi, sehingga akan terjadi kesenjangan antara kualitas pendidikan dengan kenyataan emperis perkembangan masyarakat. Maka diperlukan suatu disain program kurikulum dan metodologi yang dapat menjawab tantangan tersebut.

Dengan demikian, pendidikan Islam dituntut menghadirkan sutau wacana konstruksi pendidikan baik pada tataran filosofiknya, tujuan, materi, kurikulum, metodologis, cara penyampaian atau mengkomunikasikannya, dan sampai pada masalah yang berkaitan dengan aspek institusi serta teknik operasionalnya. Maka untuk menjawab hal tersebut, ada tiga hal penting yang menyangkut dengan orientasi pendidikan Islam, yaitu : [1] "pendidikan Islam harus didisain untuk integrasi dengan keseluruhan proses maupun institusi pendidikan lain, [2] pendidikan Islam harus mampu melakukan internalisasi nilai-nilai dan norma-norma keislaman yang fungsional

[190]Suwarman al-Muhtar, "*Arah Inovasi dalam Pembelajaran, sebagai Upaya Strategis bagi Pembinaan Manusia Indonesia Tahun 2020*", makalah disampaikan pada Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia III, Ujung Pandang,4-7 Maret 1996, hlm. 4.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

secara normal untuk mengembangkan keseluruhan sistem sosial budaya, [3] pembentukan wawasan ijtihadiyah secara aktif sehingga mampu menjawab tuntutan masa depan"[191], sebab perubahan masyarakat terus berlangsung mengikuti irama perubahan.

Dengan demikian, strategi pengembangan pendidikan Islam harus "didasarkan pada kurikulum yang secara integral memiliki cakupan disiplin ilmu dan keterampilan yang dapat membentuk kompotensi-kompotensi tertentu dalam suatu sistem yang utuh walaupun komponennya secara transparan berbentuk berbagai macam disiplim ilmu dan teknologi"[192]. Strategi pengembangan program kurikulum juga didasarkan pada kebutuhan masyarakat masa kini dan masa yang akan datang, bahkan tidak berhenti sampai disitu, artinya kesesuaian program kurikulum pendidikan Islam harus diorientasikan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang dan akan terjadi.

Dewasa ini masyarakat dan bangsa Indonesia menghadapi tantangan perkembangan ilmu pengetahuan yang menunjukkan percepatan sangat drastis dan akan menjadi indikator tantangan pembaruan dan pengembangan kurikulum pendidikan, termasuk pendidikan Islam. Misalnya saja, perkembangan teknologi informasi internet merupakan faktor pendukung utama percepatan yang memungkinkan tembusanya batas-batas dimensi ruang dan waktu serta akan berpengaruh pada paradigma pendidikan termasuk program kurikulum. Paradigma pendidikan lama dimana ilmu pengetahuan terpusat pada lembaga pendidikan formal konvensional, dengan program kurikulum yang muatan terlalu berat, berorientasi pada pada produk belajar dan bukannya pada proses belajar, sangat didominasi oleh masalah-masalah yang bersifat normatif, ritual dan *eskatologis*, akan mulai tergeser dengan paradigma pendidikan baru.

Sumber ilmu pengetahuan yang selama ini dianggap terpusat pada institusi pendidikan akan tergeser. Sumber ilmu pengetahuan akan tersebar dimana-mana

[191]A. Malik Fadjar, *Menyiasati Kebutuhan Masyarakat*..., hlm. 6.

[192]Jusuf Amir Feisal, *Reformasi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 51.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dan setiap orang akan dengan mudah memperoleh pengetahuan tanpa kesulitan melalui sarana "eloktronik internet" dan media informasi lainnya. Konsekuensi ekstrim yang akan terjadi dalam percepatan infomasi tersebut adalah "adanya paradigma *generation lap* [kebalikan dari *generation gap*] dimana siswa atau mahasiswa akan memiliki ilmu yang lebih tinggi daripada guru atau dosen. Guru atau dosen tidak lagi dapat memaksa pandangan dan kehendaknya karena mungkin para siswa atau mahasiswa memiliki pengetahuan yang lebih dari infromasi yang mereka peroleh. Proses interaksi elektronik, diskusi melalui berbagai *internet mailing list, newsgroup, IRC, webchat* merupakan kunci proses pembentukan *collective wisdom*"[193]. Yang menarik dari kondisi ini adalah dari sisi kurikulum, artinya "tidak akan pernah terjadi kurikulum baku, resmi yang *rigid* – kurikulum akan selalu berubah beradaptasi dengan berbagai perkembangan sesuai dengan "*collective wisdom*"[194] yang diperoleh siswa atau mahasiswa dari waktu ke waktu. Misalnya, kalau dulu santri hanya menerima materi dari sumber tunggal, yakni kiai. Tetapi, kini santri akan menerima materi dari banyak sumber. Kiai bukan lagi satu-satunya sumber belajar, karena santri dapat belajar dari siapa saja dengan bahasa yang mereka kuasai[195]. Santri dapat belajar dari perpustakaan, internet, *cd-rom,* media masa, dan media lain, yang akan menjadi pusat kegiatan belajar mandiri.

Perkembangan dan pengaruh "teknologi informasi dewasa ini sudah mampu meraih semua titik yang terpencil sekalipun. Masyarakat mulai belajar dan mendapatkan informasi dari berbagai sumber seperti radio, televisi, komputer internet, media masa, sehingga tanpaknya sekolah sudah tidak menjadi sumber informasi satu-satunya, bahkan bukan lagi sumber informasi yang mutakhir. Maka tanpa adanya kesadaran untuk berubah perkembangan kemajuan dunia akan menjadi ancaman untuk menjadikan sekolah sebagai lembaga usang dan mungkin makin lama makin

---

[193]Onno W. Purbo, 2000, *Tantangan Bagi Pendidikan Indonesia*, Form: http://www.detik.com/ onno/jurnal/ 200004/ aplikasi/ pendidikan/p-19.shtml.

[194]Ibid, p-19.shtml.

[195]Mastuhu, *Pemberdayaan sistem Pendidikan* ..., hlm. 34.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

tidak berguna[196]. Kondisi ini mengharuskan pendidikan untuk berubah, karena sifat kehidupan dewasa ini telah terjadi perubahan yang semakin cepat dan semakin beragam. Dalam dunia kerja telah terjadi berbagai perubahan yang dibutuhkan masyarakat dengan persyaratan ilmu, kemampuan, dan keterampilan lain, yang belum tercantum di dalam program kurikulum pendidikan. Implikasi dari perubahan tersebut adalah "para pengajar" [guru dan dosen] harus lebih menekankan peserta didik memiliki kemampuan dasar untuk bejalar mandiri dan bereksplorasi, dan bukan lagi kemampuan untuk menghafal materi pelajaran tertentu. Dengan demikian, pendidikan Islam mampu mendisain suatu kurikulum yang mampu menjawab tantangan perubahan paradigma baru pendidikan tersebut.

c. Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Orientasi Kurikulum

Sekarang ini pendidikan nasional mulai mengembangkan kurikulum yang "berbasis kompotensi". Hasil studi Bank Dunia [1999], disimpulkan salah satu komponen pendidikan yang ikut menentukan baik buruk sistem pendidikan adalah "kurikulum" yang diberlakukan. Badan moneter dunia ini juga mensyaratkan sistem pendidikan sebuah negara dapat baik jika: *Pertama,* kurikulum menenuhi sejumlah kompotensi untuk menjawab tuntutan dan tantangan arus globalisasi. *Kedua*, kurikulum yang dibuat bersifat lentur dan adaptif terhadap perubahan, dan *Ketiga,* kurikulum tersebut harus berkorelasi dengan pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat[197]. Berdaskan hasil studi Bank Dunia tersebut, akhir-akhir ini pemerintah sangat antusias menggodok bahkan telah melakukan uji-coba kurikulum baru yang berbasis "kompotensi dasar" untuk menggantikan kurikulum yang selama ini lebih menitikberatkan pada materi. "Dalam kurikulum baru ini terjadi pemangkasan jumlah jam pelajaran yang semula 242 hari per-tahun menjadi sekitar 200 hari per-tahun, dan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[196]Winarno Surakhmad, *Profesionalisme Dunia Pendidikan*, From: http://www. Bpk penabur.or.id/ kps-jkt/berita/ 200006/ artikel2.htm, Jakarta, 27 Mei 2002.

[197]Totok Ariyanto, "*Kurikulum Berbasis Kompetensi*",Suara Merdeka, Form: http://www,Suaramerdeka.com/harian/ 0202/04/ khaz.htm. 4 Februari 2002.

sistem pembelajaran dan evaluasinya lebih menekankan pada metode praktek atau dengan penalaran konstruktivisme[198].

Tanpa prasangka negatif terhadap upaya perubahan kurikulum, Totok Ariyanto[199], menyatakan paling tidak ada lima hal yang perlu dijadikan pertimbangan untuk mewujudkan kurikulum yang berkualitas yang diharapkan dapat memberikan konstribusi bagi perbaikan sistem pendidikan termasuk pendidikan Islam di Indonesia, adalah: *Pertama,* Perlu mengeliminasi segala persoalan yang muncul jika kurikulum berbasis kompotensi diberlakukan. Pakar kurikulum dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Prof Hamid Hasan, menyatakan bahwa untuk SD [Madrasah Ibtidaiyah], disain kurikulum lebih diorientasikan pada penekanan pendidikan watak dan karaktek anak, bukan pendidikan disiplin ilmu. Maka kurikulum harus dirancang selaras dengan kebutuhan dan taraf perkembangan peserta didik tersebut. *Kedua,* kurikulum tersebut harus mampu menghantarkan guru sebagai pengajar yang mandiri dan tidak tergantung pada kurikulum. Artinya kurikulum tersebut harus merupakan sebuah kurikulum pembelajaran yang dapat mendorong guru memiliki kreativitas dan fleksibilitas, serta siap menghadapi perubahan dari waktu ke waktu. *Ketiga*, upaya merekonstruksi kurikulum harus berangkat dari hasil observasi pembelajaran di kelas. Sebagai kurikulum formal, kurikulum tidak akan berarti jika tidak dapat diterjemahkan ke dalam kurikulum instruksional, operasional, dan eksperiensial, yang ketiganya hanya dapat ditemukan dalam pembelajaran di ruang-ruang kelas. *Keempat,* dalam kurikulum jangan hanya terjebak pada nafsu bongkar-pasang kebijakan, atau sekedar menambah, menyisipi, mengurangi, dan menghapus mata pelajaran. Tetapi perbaikan kurikulum didasarkan pada hasil upaya pengembangan atas konteks [termasuk filsafat pendidikan], konten [isi], dan populasi sasaran atau orientasi pendidikan. *Kelima*, sesuai dengan dinamika zaman, peserta didik tidak banyak dituntut cerdas dalam konteks inteligensi semata, melainkan juga cerdas dalam emosi dan spiritual [agama].

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[198] Ibid, 4 Februari 2002.

[199] Ibid., 4 Februari 2002.

Upaya pembaruan kurikulum pendidikan Islam tidak hanya diorientasikan pada aspek *korespondensi-tekstual* dengan menekankan aspek "hafalan" teks-teks atau buku-buku keagamaan yang sudah ada, tetapi lebih menitikberatkan pada kemampuan dasar untuk bejalar mandiri, bereksplorasi, kemampuan analisis, kemampuan mencari dan memecahkan problem dari teks-teks keagamaan, serta kemampuan memperbahrui teks-teks keagamaan untuk disesuaikan dengan tuntutan perubahan zaman, yaitu tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi dengan nilai-nilai Islam. Oleh karenanya, disain program kurikulum diharapkan dapat diorientasikan pada *learning competency*, yaitu peserta didik diharapkan dapat menguasai: *Pertama*, seperangkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan wawasan, serta penerapannya untuk memenuhi kualitas sesuai dengan kriteria atau tujuan pembelajaran. *Kedua*, penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan, keahlian berkarya, sikap dan perilaku berkarya, dan cara berkehidupan di masyarakat sesuai profesinya. *Ketiga*, didasarkan pada pengembangan kemampuan dan kepribadian yang optimal. Dengan demikian, disain program kurikulum pendidikan Islam diharapkan mampu menghantarkan peserta didik untuk dapat memiliki lima kompetensi dasar, yaitu kompetensi Islamiyah, *knowledge, skills, ability dan* kompetensi Sosial-kultural. Kelima kompetensi tersebut dapat digambarkan dan diskripsikan, sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

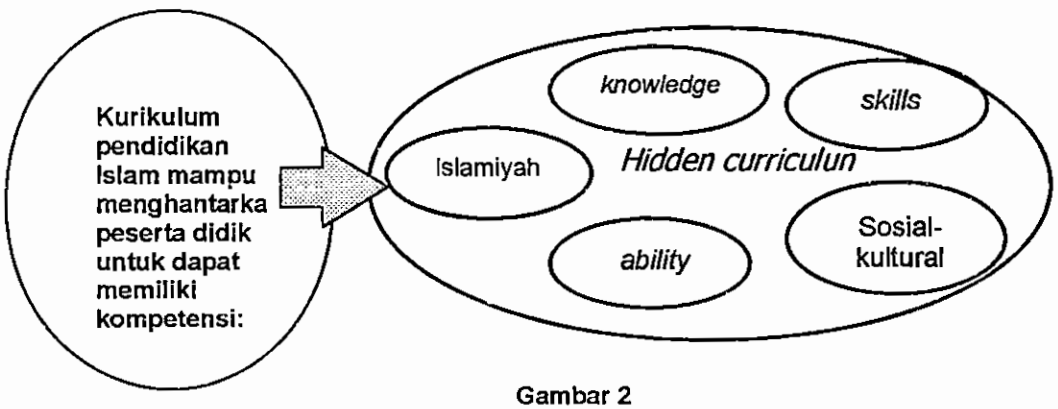

Gambar 2
Kurikulum Berbasis Kompetensi

Pertama, kompetensi Islamiyah, yaitu program kurikulum diorientasikan pada kemampuan peserta didik untuk memiliki seperangkat pemahaman dan pengetahuan

tentang ajaran Islam, sehingga peserta didik memiliki kompetensi tertentu, yaitu menguasai dan memahami ajaran Islam, ilmu-ilmu ke-Islaman dan mampu menerapkan nilai-nilai dan ajaran Islam tersebut dalam kehidupan sehari-hari yang tercermin pada perilaku beriman, berilmu, berkepribadian, berakhlakul karimah, dan berkarya. Kelompok materi pelajaran ada yang bersifat "normatif" [diantaranya: aqidah, akhlak, ibadah, Qur'an dan Hadis, dan sebagainya] dan materi pelajaran [diantaranya: tafsir Qur'an dan Hadis, ilmu fiqih, ilmu kalam, tasawuf dan lain-lain] yang diorientasikan pada kemampuan penguasaan ilmu-ilmu ke-Islaman, teori-teori ilmu pengetahuan, dengan mengambangkan kemampuan problem solving, analisis, sintesis dan evaluation, sehingga peserta didik mampu berpartisi dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan bidang keahliannya dan mampu menterjemahkan dan mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata [aplikatif] dan bukan dalam kehidupan konsep yang bersifat kognitif.

Kedua, kompetensi knowledge, yaitu program kurikulum diorientasikan pada kemampuan peserta didik memiliki seperangkat pengetahuan, wawasan dan sikap profesional, sehingga peserta didik memilki kompetensi tertentu, memenuhi kualitas sesuai dengan tujuan pembelajar, serta menjawab tantangan yang dihadapi dan mampu mengatasi persoalan hidup yang berkaitan dengan bidang keahliannya secara independent dan bertanggungjawab. Seseorang yang memiliki kualitas, sikap profesional, dan independent adalah manusia yang menguasai substansi bidang keahliannya [pengetahuan] atau memiliki kopetensi tertentu dalam bidangnya. Disain program kurikulum diharapkan mampu mengakomodasi kemampuan pengetahuan dan teknologi, kecakapan dan keahlian berkarya, seni dan budaya. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dalam mendisain kurikulum pendidikan Islam, dapat diorientasikan pada kemampuan penguasaan pengetahuan agama, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan jenjang masing-masing satuan pendidikan dan didasarkan nilai-nilai [values] *ilahiyah.* Dengan demikian, kelompok materi pelajaran diorientasikan pada kemampuan akademik [pengetahuan] atau

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

kemampuan dasar dan silabi merupakan penjabaran dari kurikulum harus diorientasikan kepada penguasaan konsep ilmu pengetahuan, teori-teori ilmu pengetahuan dengan mengambangkan kemampuan "*comprehension, analisis, sintesis* dan *evaluation*"[200], sehingga peserta didik menguasai seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab, mampu berpartisi dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan bidang keahliannya dalam kehidupan nyata dan bukan dalam kehidupan konsep, sehingga dapat dianggap mampu melaksanakan tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Dalam pandangan lain, Djamalunddin Ancok, menyebutnya atau mengistilahkan dengan *"Kapital Intelektual"*, artinya peserta didik dibekalkan dengan seperangkat pengetahuan dan wawasan yang diperlukan untuk menemukan peluang dan mengelola ancaman dalam kehidupan. Karena itu, kapital intelektual atau kompetensi pengetahuan, sangat besar pengaruhnya di dalam menambah nilai suatu kegiatan. Peserta didik harus memiliki sifat proaktif dan inovatif untuk mengolah perubahan lingkungan kehidupan pada bidang ekonomi, sosial, politik, teknologi, hukum[201], dan lain-lain yang sangat tinggi kecepatan perkembangannya dengan menggunakan kemampuan pengetahuan yang dmilikinya.

Ketiga, kompetensi *skills* [kemampuan berketerampilan atau kemahiran], yaitu kurikulum diorientasikan pada kemampuan menguasai keterampilan, keahlian berkarya, sikap dan perilaku berkarya. Peserta didik diharapkan memiliki seperangkat pengetahuan dan keterampilan, keahlian berkarya, sikap dan perilaku berkarya sesuai dengan profesinya, penuh tanggungjawab sebagai syarat untuk dianggap mampu melaksanakan tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Kurikulum pendidikan Islam, dapat diorientasikan pada peningkatan memprodok hasil belajar yang dapat diunjuk-kerjakan, baik dalam bentuk performansi verbal, sikap, maupun fisik, sehingga memungkinkan peserta didik memiliki spesialisasi [*skills*] tertentu serta kesiapan dan

---

[200]Suyanto dan Djihad Hisyam, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan ...,hlm.* 63.

[201]Djamaluddin Ancok, *Membangun Kompetensi Manusia dalam Milenium Ke Tiga,* Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi, No.6 Tahun III, 1998, UII, Yogyakarta, hlm. 5.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

adaptif terhadap dunia kerja, bahkan diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya variasi dan inovasi jenis pekerjaan dalam masyarakat. Sebab *trend* dunia kerja masa sekarang dan masa depan akan bertumpu pada spesialisasi [*skills*] tertentu yaitu tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus yang akan mampu bertahan dan bersaing pada era globalisasi menuju masyarakat madani. Oleh karenanya, "sangat dibutuhkan kurikulum dan kemampuan secara metodologis menerapkan keahliannya dalam kehidupan nyata dan selanjutnya kemampuan merancang dan meneropong perkembangan bidang keahliannya dari waktu ke waktu"[202]. Dengan demikian, sangat dibutuhkan disain kurikulum pendidikan Islam yang dapat mengakomodasi *trend* dunia kerja masa sekarang dan masa depan, sehingga kurikulum dan silabi lebih ditekankan dan diorientasikan pada kemampuan paraktek dan latihan bekerja, baik di laboratorium maupun di luar laboratorium.

Keempat, Kompetensi *ability*, yaitu disain program kurikulum diorientasikan pada peserta didik memiliki kemampuan kemampuan analisis, kemampuan memecahkan problem, kemampuan mengembangkan kepribadian yang optimal dan kemampuan cara berkehidupan di masyarakat sesuai dengan profesinya. Disain program kurikulum memungkinkan peserta didik memiliki kemampuan tertentu dalam menghadapi dan memecahkan persoalan-persoalan serta memiliki kemampuan analisis untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam kehidupan di masyarakat. Kurikulum diorientasikan pada pembentukan sikap dan nilai pribadi yang integral sebagai seorang warga nagara dan warga masyarakat. Dalam kerangka ini, maka tugas pendidikan adalah "mengembangkan kemampuan belajar [*learning ability*] untuk lebih lanjut mengembangkan kemampuan metodologi ilmiah". Dengan kata lain, tugas pendidikan Islam adalah mendisain kurikulum yang dapat "mengembangkan hati yang iman dan saleh serta pemikiran-pemikiran proaktif dan provokatif"[203]. Program kurikulum diorientasikan pada upaya membangun sikap "percaya diri dan percaya

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[202]Muhammad Isnaini , *Visi 2020, Profesionalitas dan Peranan Lembaga Pendidikan*, dalam Jurnal Pendidikan Islam,*TA'DIB*,Nomor: 04, ISSN 1401-6973, Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah, Maret 2001, Palembang, hlm.138.

[203] Mastuhu, *Pemberdayaan Sistem Pendidikan...*, hlm. 16.

pada orang lain [*trust*], dapat memahami emosi, pemaaf, penyabar, ikhlas dan selalu ingin menyenangkan orang lain sangat diperlukan bagi upaya untuk membangun masyarakat yang beradab dan berkinerja tinggi"[204]. Dengan demikian, kurikulum pendidikan Islam harus dapat diorientasikan pada kemampuan tertentu yaitu kemampuan analisis, kemampuan memecahkan problem, memiliki kepribadian yang optimal, kemampuan cara berkehidupan di masyarakat sesuai dengan profesinya, kemampuan memabangun pemikiran-pemikiran yang proaktif dan provokatif, kemampuan bahasa, kemampuan menjemput dan mengolah potensi untuk mencapai tujuan.

Kelima, kompetensi Sosial-kultural, yaitu disain program kuruikulum pendidikan Islam, memungkinkan peserta didik mampu kerjasama dan membangun jaringan hubungan sosial dengan orang lain. Mampu berinteraksi dalam pergaulan masyarakat yang pluralistik dan perbedaan agama, serta proaktif terhadap perbedaan pendapat dan pandangan serta berinteraki dalam pergaulan dunia global. Peserta mampu "menempatkan diri sebaik-baiknya dengan sistem budaya dan nilai masyarakat yang pluralistik dan global, tanpa membenturkan idealisme diri dengan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai relegius yang berlaku dalam masyarakat"[205]. Sebab dalam kehidupan masyarakat "banyak ragam nilai-nilai hidup yang bermunculan dan keragaman tersebut dapat menimbulkan persaiangan, bahkan pertentangan nilai hidup. Maka dalam pendidikan, masalahnya bagaimana mendisain kurikulum untuk bagaimana menyiapkan generasi kemajemukan nilai"[206] tersebut. Artinya, bagaimana seorang peserta didik dapat menghargai keberagaman nilai dan keyakinan yang muncul dari pandangan orang lain dengan tidak membenturkan nilai-nilai dan keyakinan [kapital spritual] yang telah diyakininya. Oleh karena itu, para pengajar harus lebih menggiatkan peserta didik untuk mampu menilai bukan sekedar mengenal nilai dalam

---

[204]Djamaluddin Ancok, *Membangun Kompetensi Manusia...*, hlm. 5.

[205]Totok Ariyanto, *Kurikulum Berbasis Konpetensi...*, 4 Februari 2002.

[206]Winarno Surakhmad, "*Profesionalisme Dunia Pendidikan*", From: http://www. Bpk penabur.or.id/ kps-jkt/berita/ 200006/ artikel2.htm, Jakarta, tgl. 27 Mei 2002.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

bentuk konsep, bahkan mampu mengembangkan dan bila perlu mampu mempertahankan prinsip kehidupan dan kultural. Dengan demikian, kiranya dalam perjalanan waktu peserta didik tetap eksis, bahkan mampu mendinamiskan kemampuan [kompetensi] dasar yang telah dimiliki sesuai dengan semangat dan tuntutan perkembangan zaman.

Selain kurikulum yang didasarkan pada kompetensi tersebut, perubahan kurikulum perlu diorientasikan pada situasi tententu. Orientasi perubahan dan pengembangan kurikulum pendidikan Islam harus diletakan untuk menjawab tantangan era globalisasi, denetralisasi dan otonomi daerah dalam masyarakat madani Indonesia. Sebab perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, juga tidak dapat dilepaskan dari problem yang dihadapi dunia pendidikan pada umumnya, bahkan persoalan yang dihadapi sistem pendidikan Islam jauh lebih besar dibandingkan dengan dileman yang melanda pendidikan yang tidak memasukan dimensi keagamaan dalam program pendidikannya. Untuk menjawab persoalan tersebut di atas, kurikulum pendidikan Islam perlu dipertegas. Artinya pada era reformasi menuju masyarakat madani ini, disain kurikulum pendidikan Islam harus diorientasikan untuk mengakomodasi persoalan-persoalan masa kini dan masa depan. Dengan demikian, persoalan yang dihadapi pendidikan Islam sekarang, adalah bagaimana mendisain kurikulum yang diorientasikan pada :

Pertama, tantangan kurikulum di era globalisas. Globalisasi, menurut Gidden memilki dua aspek penting, yaitu adanya realitas proses-proses transnasional dan meningkatnya menyarakat tentang realitas tersebut[207]. Manusia pada era global "sarat dengan nilai-nilai global, menusia menjadi individu-invidu global"[208]. Perkataan Aristoteles, *"we are citizens of the world"* [kita adalah warga dunia], akan benar-benar menjadi kenyataan. Manusia-manusia pada era global, menurut Susanto adalah manusia-manusia yang "bersifat egaliter, kritis, dan amat perduli terhadap hah-hak

[207]Gidden Anthony, 1994, *Beyond Left and Right:The Future of Radical Politic*,Polity Press,Cambridge,hlm.4.

[208]Susanto, *"Pimpinan Milenium ke-3 Menyesuaikan Fenomena Global"*, kolom Manager Suplemen HU Republika, Senin 13 September 1999.

asasi manusia dan selain itu mereka memiliki kebebasan dan opsi-opsi kehidupan yang lebih banyak. Dalam kehidupan global, manusia Indonesia akan menerima berbagai macam budaya asing dan orang Indonesia akan berkiblat pada budaya bukan Indonesia, sebagai akibat dari banyaknya diantara mereka berinteraksi dan menimba ilmu pengatahuan di negara-negara lain. Ini berarti bahwa akan ada bermacam gaya budaya global dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia yang bersifat multikultural. Pada budaya global akan menciptakan tujuh macam ketidakpastian dan ketegagangan yang dihadapi, yaitu : "[a] antara nilai-nilai lokal dan global, [b] antara budaya universal dan individual, [c] antara tradisi dan modernitas, [d] antara kebutuhan jangka panjang dan jangka pendek, [e] antara kebutuhan bersaing dan pemerataan, [f] antara kebutuhan akan perluasan iptek dan daya serap sumber daya manusia, dan [g] antara kebutuhan spritual dan material"[209]. Maka karakteristi budaya global di atas pasti dihadapi oleh manusia dan masyarakat Indonesia, sehingga apapun sikap kita baik senang maun tidak senang, mau dan tidak mau peradaban global akan mempengaruhi aktivitas manusia dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan karena ada kaitan erat antara perkembangan budaya global dan budaya masyarakat madani dengan model-model pendidikan yang diminati masyarakat dan dunia pendidikan Islam juga tidak dapat lepas dari pengaruh perkembangan budaya global tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pendidikan Islam, dalam era globalisasi yang "sarat dengan perkembangan ilmu dan teknologi", semakin dipertanyakan relevansinya, terutama jika dikaitkan dengan konstribusinya bagi pembentukan budaya modern yang tidak dapat dipisahkan dari ilmu dan teknologi. Dalam konteks ini, pendidikan mengalami degradasi fungsional, karena pendidikan semakin berorientasi materialistik dan pendidikan cenderung ditetapkan sebagai aset sosial yang memiliki fungsi khusus dalam menyiapkan tenaga-tenaga kerja yang akan menenuhi tuntutan dunia [lapangan] kerja

---

[209]Mastuhu, "*Mencari Paradigma Baru Pendidikan yang Lebih Baik – Islami – Menyongsong Milenium Ke III*", makalah Orasi Ilmiah disampaikan pada acara pembukaan Program Pasca Sarjana "Manajemen Pendidikan Islam"; IAIN Sultan Thaha Sifuddin, 26 Oktober 1999, Jambi, hlm.2-3.

yang bercorak industrialis[210]. Akurasi kurikulum dalam program pendidikan akan dapat dilihat dari seberapa jauh *output* pendidikan tersebut dapat berpartisipasi aktif dalam mengisi lapangan kerja yang disediakan. Kenapa, karena suatu program kurikulum dapat menggambarkan standar kemampuan dasar yang wajib dimiliki peserta didik pada masing-masing jenjang pendidikan. Maka orientasi kebijakan pendidikan Islam harus disesuaikan dengan arah perubahan yang sedang dan akan terjadi. Akan tetapi, tantangan yang dihadapi pendidikan Islam bukan hanya persoalan seberapa jauh outputnya dapat berpartisipasi dalam mengisi lapangan kerja, tetapi persoalan dunia global yang menantang kualitas pendidikan Islam. Antinya pendidikan Islam akan berhadapan dengan tantangan perubahan yang semakin cepat, ketidakpastian dan sulit diprediksi sesuatu perubahan yang sedang dan akan terjadi pada era globalisasi. Dengan dasar ini, maka disain kurikulum pendidikan Islam harus diorientasikan untuk mengantisifasi perubahan pada era global, kurikulum harus didasarkan pada masa depan yang akurat sehingga kurikulum pendidikan tidak lagi sekedar mempersiapkan manusia-manusia trampil, tetapi juga mempersiapkan manusia-manusia yang memiliki daya adaptasi tinggi. Jusuf Amir Feisal, menyatakan "dalam era globalisasi, peran pendidikan tidak terfokus pada penyiapan sumber daya manusia yang siap pakai, mengingat kecenderungan yang terjadi dalam dunia kerja sangat cepat berubah dalam era itu. Sebaliknya, pendidikan harus mempersiapkan sumber daya manusia yang adaptif, mampu menerima, serta mampu menyesuaikan dan mengembangkan arus perubahan yang terjadi dalam lingkungannya"[211]. Dengan demikian, tantangan globalisasi "menimbulkan persaingan kehidupan antar bangsa yang berdampak pada tuntutan peningkatan kualitas sumber daya manusia melelui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan benar-benar mampu menyediakan sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan zaman"[212].

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[210]Imam Syafi'ie, "*Manajemen Pendidikan Islam Memasuki Milenium III*", Jurnal Pendidikan Islam TA'DIB, No. 04, ISSN 1401 – 6973, Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah, Maret 2001, Palembang, hlm. 65.

[211]Jusuf Amir Feisal, *Reorientasi Pendidikan Islam*, hlm. 131.

[212]Nuril Huda, "*Desentralisasi Pendidikan: Pelaksanaan dan Permasalahannya*", Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Th.ke-5 No.017, Juni 1999,Jakarta, hlm. 9-10.

Mencermati pandangan ini, maka perencana dan disainer program kurikulum perlu mencermati kecenderungan masa depan yaitu perubahan yang sangat cepat dan penuh dengan ketidakpastian. Maka akan sangat riskan, apabila disain kurikulum didasarkan pada potret masyarakat yang statis, baik masyarakat sekarang, maupun di masa depan. Untuk mengantisipasi hal ini, maka pengambil keputusan dalam bidang pendidikan "bukan saja perlu memiliki visi masa depan yang tepat tetapi lebih penting lagi, memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk memprediksi secara akurat visi masa depan yang diinginkan"[213]. Dengan demikian, disain program kurikulum pendidikan Islam tidak hanya didasarkan pada potret masa kini saja, tetapi harus berorientasi masa depan [*future-oriented*]. Maka pengambil keputusan dan perancang kurikulum pendidikan Islam perlu juga mendisain kurikulum dengan menawarkan berbagai macam program pendidikan, latihan, dan keterampilan, yang memiliki fleksibilitas yang tinggi, diversifikasi keahlian, serta mudah disesuaikan [*adaptable*] dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan masyarakat. Faktor fleksibilitas dan adaptabilitas program kurikulum merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan relevansi kurikulum, yaitu yang dapat berlaku di masa sekarang dan dapat pula disesuaikan dengan masa depan[214]. Hal ini menunjukkan, bahwa disain kurikulum pendidikan Islam jangan diorientasikan pada masa lalu, tetapi diorientasikan pada masa depan, walaupun kadang-kadang masa depan itu sendiri belum dapat diprediksi secara pasti. Para perancang kurikulum harus mampu memprediksi bahwa pembentukan manusia masa depan adalah manusia yang mampu melakukan inovasi dalam menghadapi situasi baru yang belum pernah dialaminya. Maka disain kurikulum pendidikan Islam, harus mampu mempersipakan peserta didik dengan memiliki kemampuan intelektual [*knowlodge*], memiliki *skill* dan kemampuan profesional yang tinggi, memiliki kemampuan sosial dan personal dan kemampuan spritual yang kuat.

---

[213]Francis P Hunkins dan Ornstein Allan, 1988, *Curriculum Fundations Principles and Issues*: Englewood Chiffs, NJ: Prentice Hall, hlm. 327, dalam Moh. Ansyar, "*Kurikulum Dalam Menyongsong Otonomi Pendidikan di Era Globalisasi, Peluang, Tantangan, dan Arah*", Jurnal Pendidikan Islam, TA'DIB, No 04, ISSN 1401-6973, Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah, Maret 2002, Palembang, hlm. 101.

[214]Moh. Ansyar, "*Kurikulum Dalam Menyongsong otonomi Pendidikan di Era Globalisasi*, Peluang, Tantangan, dan Arah", Jurnal Pendidikan Islam TA'DIB, No.04, ISSN 1401-6973,Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah , Maret 2001, Palembang,hlm.103.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Perlu dilakukan diversifikasi program pendidikan dan latihan dengan berbagai macam alternatif, interdisipliner, baik dalam bidang pengejaran, pengembangan kemampuan kerja secara profesional, maupun keahlian dan keterampilan. Apabila selama ini sekolah-sekolah menganut dan menerapkan *uniformitas* kurikulum, maka untuk era globalisasi dan masyarakat madani perdidikan Islam perlu : [1] Menawarkan *"multi track"* kurikulum untuk mengadopsi pembedaan individual [*indiviual differences*] peserta didik. Ornstein dan Hunkins, menyatakan sekolah perlu menawarkan bentuk intelegensi lain selain intelegensi ranah kognitif, seperti intelegensi seni, intelegensi musik, intelegensi hubungan manusia, intelegensi ruang dan *kinesthetic*[215], serta intelegensi emosi. Mencermati pandangan ini, maka sudah saatnya kurikulum pendidikan Islam perlu diorientasikan pada pengembangan multi ranah, yaitu teknologi, intelegensi seni, intelegensi musik, intelegensi hubungan manusia [*hablun minan naas*], dan intelegensi yang lain yang selama ini belum terakomodasi dalam kurikulum pendidikan Islam. [2] Suatu sistem pendidikan dengan kurikulum "multibudaya", yakni kurikulum yang berorientasi pada pengembangan sikap, kepribadian yang dewasa, terbuka, dan toleran terhadap pluralisme kehidupan Indonesia. Termasuk mengakses beberapa isu sosial seperti pelanggaran hak asasi manusia, wawasan gender, problem lingkungan, etnik, hukum dan sebagainya, sehingga peserta didik akan menjadi warga negara yang baik, bukan warga negara yang fanatik dan brutal[216]. Selain itu, kurikulum multibudaya juga didukung dengan pelajaran bahasa asing pada jenjang pendidikan dasar yang terutama berfokus pada pemahaman lintas budaya [*intercultural literacy*]. Maka pembelajaran yang dilakukan merupakan bagian dari usaha membentuk pemahaman, penghargaan, dan sikap toleransi terhadap kebudayaan asing dengan tidak mengabaikan budaya sendiri[217]. [3] Menguasai keterampilan komputer, hampir semua sisi kehidupan umat manusia tak akan terlepas dari peran komputer dan internet. Untuk itu, kurikulum pendidikan Islam

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[215]Ornstein Allan and Francis P. Hunkins, 1988, *Curriculum Fundations Principles and Issues*: Englewood Chiffs, NJ: Prentice Hall, hlm. 327, dalam Moh. Ansyar, *"Kurikulum Dalam Menyongsong Otonomi Pendidikan"...*, hlm. 103.

[216]Y.Dwi Koratno, *Menuju Paradigma Pendidikan...*, 16 Mei 2002.

[217]Ibid, 16 Mei 2002.

perlu diorientasikan pada kemampuan peserta didik untuk menguasai keterampilan komputer, karena "manusia pada abad mendatang akan sangat tergantung pada pelayanan komputer. Hubungan komunikasi dengan internet, multi media, penggunaan komputer untuk perbankan dan dunia bisnis akan menguasai dunia. Karena itu tenaga kerja yang dibutuhkan dimasa datang adalah mereka yang mengerti dan menguasai keterampilan komputer, baik pada perangkat lunak maupun pada perangkar kerasnya"[218]. Pemakain komputer di rumah [*home computer*], peserta didik akan lebih banyak belajar dari media eloktronik internet dari pada guru atau buku. Apabila itu terjadi, maka tugas utama guru dan sekolah lebih difokuskan pada mengajar peserta didik mengakses sendiri informasi dan pengatahuan yang diperlukan dan menambah informasi dan pengetahuan baru [*to generate new knowledge*] serta memakainya [*to apply*] untuk memecahkan masalah ril masyarakat[219]. [4] Pada era masyarakat madani, kurikulum pendidikan Islam tidak hanya bertahan dalam satu rana kognitif dengan hanya didominasi oleh kawasan fiqh, tasawuf, tafsir, hadis, ritual, sakral, dan sebaginya. Tetapi perlu diorientasikan pada pengembangan "multi ranah", bukan hanya satu ranah kognitif saja, artinya kurikulum sekolah tidak hanya diorientasikan untuk memperoleh pengetahuan saja, tetapi lebih diorientasikan pada kemampuan mengolah, mengembangkan, dan memakai atau memanfaatkan pengetahuan yang diketahui. Maka sangat strategis apabila kurikulum pendidikan Islam diorientasikan untuk membekali peserta didik dengan sikap rasional, memiliki keterampilan memecahkan masalah, kemampuan menerima dan menambah informasi baru, kemampuan memanfaatkan pengetahuan untuk memcahkan problem yang baru, memiliki sikap profesional dan rasional dalam memecahkan masalah-masalah di masyarakat.

Kedua, tantangan kurikulum di era desentralisasi dan otonomi daerah. Selama ini sistem pendidikan nasional termasuk pendidikan Islam seluruhnya ditetapkan oleh pemerintah pusat secara sentralistik, baik yang menyangkut kurikulum, sistem

[218]Muhammad Isnaini, *Propesionalitas dan Peranan Lembaga Pendidikan*,..., hlm.138.

[219]Moh. Ansyar, *Manusia Pembentuk Kebudayaan* ..., hlm. 104.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pengelolaan, sistem evaluasi, sistem pembiayaan, maupun persoalan pengakuan untuk lembaga-lembaga pendidikan swasta berupa status [terdaftar, diakui, disamakan], akreditasi, dan sertifikasi pengakuannya lebih banyak ditentukan oleh pemerintah dan bukan ditentukan oleh masyarakat. Padahal, "penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan efisien harus mengacu pada kepentingan masyarakat yang kompleks dan terus berubah di masa-masa yang akan datang serta harus menyerap aspirasi anggota masyarakat"[220], termasuk perencanaan kurikulum harus mengakses mampun menyerap aspirasi masyarakat.

Kurikulum pendidikan yang digunakan selama ini menganut sistem sentralistik, mulai dari perencanaan matapelajaran, bahan pelajaran, sampai dengan sistem evaluasi ditentukan oleh pemerintah pusat secara sentralistik. Kebijakan sentralistik ini, jelas disatu sisi dimaksudkan sebagai upaya untuk standarisasi mutu pendidikan di Indonesia, sehingga dapat dicapai standar minimum bagi semua sekolah di Indonesia. Tetapi pada sisi lain, kebijakan pengelolaan sistem pendidikan sentralistik ini mengakibatkan kurangnya pengembangan potensi daerah untuk pembangunan daerah yang bersangkutan. Sebagi contoh, kurikulum 1994, misalnya, semua daerah dituntut untuk melaksanakan kurikulum nasional secara sama rata, tanpa melihat bahwa setiap daerah memiliki potensi dan kebutuhan yang berbeda antara satu daerah yang lainnya. Walaupun dalam kurikulum tersebut ada alokasi "muatan lokal", namun hal ini belum dapat mengakomodasi kepentingan daerah, karena alokasinya terlalu sedikit dan strategi penempatannya masih sentralistik[221].

Fenomena desentralisasi pendidikan muncul dalam dunia pendidikan pada era reformasi menuju masyarakat madani Indonesia. Inti konsep ini adalah menyerahkan kewenangan sepenuhnya kepada pemerintah daerah dan atau pelimpahan wewenang kepada sekolah serta masyarakat. Konsep desentralisasi merupakan pemenuhan tuntutan "demokratisasi" sebagai ciri masyarakat madani yang perlu dilaksanakan

---

[220]Nuril Huda, *Desentralisasi Pendidikan: Pelaksanaan* ..., hlm. 10.

[221]Udin S. Sa'ud, *Manajemen Berbasis Sekolah*..., hlm. 15.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dalam berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Maka muncul berbagai upaya yang dilakukan untuk mereformasi pendidikan. Prof. Djohar, menyatakan bahwa reformasi pendidikan, juga harus menyentuh kurikulum pendidikan nasional [termasuk pendidikan Islam]. Kurikulum yang ada saat ini, menurutnya bersifat seragam, sedangkan kondisi masing-masing daerah di Indonesia beragam. Karena itu sudah saatnya dikembangkan konsep diversitas, karena penyeragaman [*uniformitas*] yang ada ternyata mengakibatkan matinya kreativitas[222]. Kurikulum yang diatur pemerintah pusat secara nasional baik oleh Departemen Pendidikan Nasional maupun Departemen Agama sudah harus diubah. Kurikulum nasional bersifat sangat umum saja dan maksimal seperuh persen dari keseluruhan kurikulum, sedangkan yang lainnya harus diserahkan pada masing-masing daerah atau masing-masing sekolah dan perguruan tinggi untuk menentukan kurikulumnya berdasarkan potensi dan kemampuan daerahnya serta kompetensi yang ingin dicapai.

Berbicara tentang desentralisasi tentu sangat terkait erat dengan Undang-Undang Nomor 22/1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25/2000, tentang Otonomi Daerah yang ditetapkan secara eksplisit bahwa daerah diberi kewenangan yang lebih luas dalam merumuskan dan mengelola berbagai sektor pembangunan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan, kecuali yang menyangkut urusan pertahanan dan keamanan, politik luar negeri, agama, kebijakan monoter, dan sistem peradilan[223]. Kelima sektor ini tetap merupakan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan pelaksana dari kebijakan pemerintah pusat. Salah satu sektor penting pembangunan masyarakat yang didelegasikan kepada pemerintah daerah adalah pembangunan bidang pendidikan, sehingga pengelolaan dan kebijakan pendidikan merupakan bidang kewenangan yang secara penuh diserahkan kepada pemerintah daerah.

Dengan demikian, apabila mencermati "produk hukum tersebut mengisyaratkan bahwa telah terjadinya pergeseran kewenangan dalam pengelolaan

[222]Djoha, *Omong Kosong, Tanpa Mengubah UU N0.2/89,* 4 Mei 1999.

[223]Udin S. Sa'ud, *Manajemen Berbasis Sekolah...*, hlm. 15.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pendidikan dan melahirkan wacana *akontabilitas* pendidikan"[224]. Maka kebijakan "desentralisasi pengelolaan pendidikan menunjukkan adanya pelimpahan wewenang dalam pengelolaan pendidikan dari pemerintah pusat ke daerah otonomi, yang menempatkan kabupaten/kota sebagai sentra desentralisasi dan pergeseran kewenangan ini berkaitan erat dengan konsentrasi perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan"[225]. Artinya, adanya wewenang yang diberikan kepada hirarki lebih bawah dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan merupakan ciri penting adanya desentralisasi. Sedangkan "dalam rangka pengelolaan pendidikan di sekolah, ini berarti adanya pelimpahan wewenang kepada masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan [*stakeholders pendidikan*] untuk ikut serta bertanggungjawab dalam memajukan sekolah[226]. Maka, dengan "desentralisasi pendidikan diharapkan dapat menjawab tuntutan kebutuhan pendidikan masa depan sesuai dengan situasi dan kondisi, kebutuhan, dan nilai-nilai yang berkembang di daerah"[227], sehingga pendidikan akan menjadi baik, karena dari segi perencanaan, pembiayaan, pengawasan akan lebih efisien dan pendidikan akan memiliki lulusan sekolah yang lebih baik dibandingkan dengan sistem sentralisasi.

Dengan adanya kebijakan otonomi daerah, seharusnya lembaga-lembaga pendidikan dapat mengantisipasi beberapa kecenderungan masa depan, agar dapat bertindak proaktif dan bukan reaktif dalam penetapan kurikulum daerah. Tetapi apabila dicermati keseiapan dan kemampuan masing-masing daerah dalam menyambut pelaksanaan kebijakan desentralisasi pendidikan tentu tidak sama antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, sebab selama ini permasalahan relevansi pendidikan diarahkan pada kurangnya kepercayaan pemerintah pusat pada daerah untuk menata sistem pendidikannya, khususnya kurikulum yang sesuai dengan kondisi obyektiuf di daerahnya dan situasi ini memacu terciptanya

---

[224]Djam'an Satori, "*Program Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah (Schol-Based Management)*", Jurnal Administrasi Pendidikan, Nomor: I. Vol. I Tahun 2002, Jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, hlm.7.

[225]Ibid, hlm.7.

[226]Ibid, hlm.7.

[227]Nuril huda, *Desentralisasi Pendidikan*, hlm. 10.

pengangguran lulusan akibat tidak relevannya kurikulum dengan kondisi daerah. Maka kebijakan desentralisasi kurikulum menjadi alternatif yang harus dilakukan di Indonesia. Oleh karena itu, rintisan kurikulum muatan lokal yang selama ini memiliki perimbangan persentase lebih kecil daripada kurikulum nasional belum cukup mewadahi situasi dan kondisi serta kebutuhan daerah[228], sebab kebijakan kurikulum pendidikan yang seragam atas dasar pertimbangan untuk menjaga kesatuan nasional telah mengabaikan keberagaman kebutuhan pengembangan sumber daya manusia yang sesuai dengan ciri khas, karakteristik, potensi ekonomi dan sosial budaya daerah. Sebagi contoh, sistem penilaian dengan jadwal seragam ujian nasional yang disebut dengan EBTANAS telah mengubah pola pembelajaran di sekolah yang hanya mengejar nilai ujian, ketimbang pengembangan keterampilan dan pembetukan kepribadian yang mampu menciptakan pekerjaan secara mandiri[229].

Pendidikan Islam, mulai mengantisipasi beberapa kecenderungan dalam mendisain dan menetapkan kurikulum yang bersifat otonomi. Disain kurikulumnya harus bersifat responsif terhadap arahan nasional disatu pihak dan di pihak lain kurikulum pendidikannya harus mampu mengakomodasi tuntutan lokal. Maka disain kurukulum pendidikan Islam, selain materi pelajaran pendidikan agama Islam berupa tauhid, akhlak, tafsir Qur'an, hadits, dan fiqh ibadah, persolana demokratisasi, kesadaran hak asasi manusia, pluralisme, keberagaman agama, dan budaya daerah merupakan hal yang harus diakomodasi dalam kurikulum pendidikan Islam. Disain materi kurikulum harus diorientasikan pada kebutuhan dan persoalan-persoalan daerah. Misalnya saja, materi tafsir Qur'an, hadits, dan fiqh, merupakan materi yang disajikan dengan studi kasus dan problem solving terhadap persoalan riil sosial kemasyarakatan yang terjadi di daerah setempat. Studi kasus tidak mengambil contoh kasus yang terjadi pada periode klasik dan pertengahan Islam yang

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[228]Ibid, hlm.11-12.

[229]Ibrahim Musa, 2002, *Otonomi Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah*, From: http://202.159.18.43/ jp/ 22ibrahim.htm.

masyarakat dan budayanya sangat berbeda dengan daerah setempat. Dengan demikian, persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan, demokrasi, pluralisme, hak asasi manusia, hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di daerah, harus diakomodasi dalam kajian-kajian tafsir Qur;an dan fiqih dan dapat disosialisasikan. Oleh karena itu, wacana fiqih sosial dan tauhid sosial [tauhid sosial, merupakan wacana yang pernah dosialisasikan Amin Rais] bukan lagi merupakan wacana, tetapi merupakan kajian-kajian ke-Islaman yang aktual dan intensif untuk dapat menjawaban tantangan kehidupan pada era globalisasi. Selain itu, pendidikan Islam, tidak cukup hanya memberikan meteri pelajaran tentang nilai demokratis, musyawarah, hak asasi manusia, dan pluralisme. Tetapi menciptakan suasana proses belajar mengajar yang menghargai martabat peserta didik sebagai manusia dan menghargai perbedaan [pluralisme]. Menumbuhkan suasana demokratis dalam kelas dan lingkungan sekolah, termasuk dalam hubungan sekolah dengan masyarakat dan orang tua, serta menumbuhkan rasa menghargai perbedaan pendapat, pandangan, kayakinan, dan perbedaan agama yang diyakini masing-masing orang, sehingga tidak terjadi "membunu seseorang" atas nama Allah dengan alasan "jihad" dan perilaku lain yang selalu mengatasnamakan Tuhan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dengan demikian tuntutan terhadap perubahan kurikulum tersebut di atas merupakan hal yang logis, karena selama ini kurikulum sentralistik telah membuat peserta didik menjadi asing [*alienated*] di lingkungannya sendiri. Maka agar kurikulum relevan dengan tuntutan tersebut, disain kurikulum pendidikan Islam perlu mengakomodasi berbagai kebutuhan, keinginan, minat dan kemampuan peserta didik. Kurikulum pendidikan Islam harus menawarkan diversifikasi dan fleksibilitas program, sehingga kurikulumnya dapat mengakomodasi mobilitas peserta didik baik di tingkat nasional, internasional, maupun lokal dan masa depan. Dengan kebijakan desentralisasi, diharapkan dalam mendisain dan mengembangan kuruikulum pendidikan Islam harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) Perlu ada perimbangan prosentasi yang proporsional antara kurikulum nasional dan daerah,

artinya kurikulum muatan daerah lebih bayak dibanding dengan kurikulum muatan nasional. Kurikulum nasional bersifat sangat umum, dan lainnya merupakan kurikulum muatan daerah dan sekolah. Pemerintah pusat dalam hal ini Depdiknas dan Departemen Agama, hanya menetapkan program kurikulum inti dengan standar tingkat penguasaan yang dikehendaki secara nasional. (2) "Pengembangan kurikulum dan sistem evaluasi belajar harus didesentralisasikan ke tingkat sekolah. Ini berarti sekolah diberi otonomi yang lebih luas untuk menetapkan program-program kurikulum dan sistem evaluasi belajar siswa yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan masyarakat secara lebih fleksibel. Pemerintah pusat, dalam hal ini Depdiknas dan departemen Agama hanya menetapkan program kurikulum inti dengan standar penguasaan yang dikehendaki secara nasional, sedangkan pengembangannya diserahkan kepada masing-masing sekolah"[230]. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa disain program "kurikulum harus berbasis sekolah", artinya disain pengembangan dan penetapan program-program kurikulum disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan suatu sekolah atau suatu lembaga pendidikan tertentu. (3) Disain kurikulum diorientasikan ke masa depan, karena kurikulum yang relevan dan responsif terhadap skenario masa depan daerah harus dikembangkan. Karena selama ini warna kurikulum pendidikan Islam di Indonesia "sangat didominasi oleh warna-warna fiqih, tasawuf, ritual, sakral, dan sebagainya, dan ironisnya selalu diorientasikan pada masa lalu dan karena orientasi kurikulum ke masa lampau, sehingga pemikiran-pemikiran yang dikembangkan terpaku ke "dunia sana" atau dunia masa lampau, sedangkan "dunia kini" dianggap sebagai "dunia mainan" dan tempat menumpang minum"[231], sehingga kurang atau tidak ada upaya untuk memotret masa depan. Maka orientasi demikian, menurut Mastuhu, disebabkan oleh sumber teologi yang fatalistis dan tidak rasional. Meskipun demikian, hasilnya tidak seluruhnya negatif"[232]. Maka untuk mengakomodasi perubahan masa depan yang drastis,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[230]Udin S Sa'ud, *Manajemen Berbasis Sekolah*..., hlm. 19.
[231]Masthu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan*..., hlm. 32.
[232]Ibid, hlm. 32.

seharusnya muatan kurikulum pendidikan Islam seperti fikih, tasawuf, tafsir Qur'an, hadits, dan sebagainya, harus dapat diorientasikan untuk menjawab kebutuhan masyarakat pada tantangan perubahan tersebut, sehingga orientasi kurikulum pendidikan Islam tidak terpaku ke masa lampau.

Ketiga, arah perubahan kurikulum pendidikan Islam harus selalu mengikuti irama perubahan dan pendidikan yang selalu tumbuh serta berkembang dari perediksi skenario masa depan yang dicita-ciatakan. Maka pengambil keputusan pendidikan Islam perlu mengantisipasi dan merekayasa arah perubahan masa depan yang akan ditempuh, karena berdasarkan prediksi masa depan itulah, kurikulum dan pengajaran pendidikan dikembangkan agar relevan dan responsife terhadap skenario masa depan. Kauffaman, mengajukan enam komponen yang perlu dikembangkan kurikulum yang berorientasi pada masa depan, yaitu: [a] memiliki akses ke informasi, [b] mampu berpikir kritis, [c] mampu berkomonikasi efektif, [d] memahami lingkungan manusia, [e] memahami individu dan masyarakat, dan [f] meningkatkan kompetensi pengetahuan, pendidikan, bertanggungjawab, dan perduli pada kesejahteraan sosial[233].

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Mastuhu, menyatakan bahwa keadaan orientasi kurikulum pendidikan Islam di Indonesia tampaknya berubah. Sebab orientasinya telah berkembang, di mana urusan *dunyawiyah* memperoleh porsi seimbang dengan urusan *ukhrawiyah*. Iptek, pemikiran, keterbukaan, dan antisipasi ke depan semakin menguat dan hal ini karena disebabkan semakin berkembangnya teologi yang *vatalistis* dan rasional[234]. Mesekipun demikian, pada realitas pelaksanaan pendidikan Islam menurut Mastuhu, "masih terasa adanya dua orientasi yang berjalan secara beriringan: antara orientasi sistem pendidikan Islam dengan sistem pendidikan nasional belum terdapat integrasi yang tuntas. Secara filosofis akademis masih terasa adanya ganjalan dikotomi antara ilmu agama dan umum. Agama hanya dikaitkan dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan rohani, misalnya, sering terdengar sebutan tokoh agama disebut dengan

[233]Moh. Ansyar, *Kurikulum dalam Menyongsong Otonomi Pendidikan...*, hlm. 108.

[234]Mastuhu, *Pemberdayaan Sistem Pendidikan...*, hlm. 33.

"rohaniawan" dan dipisahkan secara tajam dengan "ilmuwan" atau "teknolog"[235]. Maka untuk menjawab "sebutan" tersebut: [1] pendidikan Islam perlu mengintegrasikan kajian keagamaan, pengetahuan, teknolgi, seni, dan budaya dalam suatu program kurikulum yang integral dari segi filosofis, teoritik, dan operasionalnya, [2] kurikulum pendidikan Islam mengakomodasi perkembangan iptek yang dipadukan dengan iman dan taqwa dan harus relevan, responsife serta mampu mengantisipasi skenario perubahan masa depan.

Kembali pada pandangan Kauffaman di atas, konsep tersebut menuntut tanggungjawab dan perioritas utama untuk dikembangkan di lembaga-lembaga pendidikan Islam, yaitu pendidikan Islam harus meningkatkan kopetensi pengetahuan dan keterampilan, bertanggungjawab *[responsibility]*, memiliki akses informasi dan perubahan, membentuk peserta didik memiliki kemampuan berpikir kritis dan analisis, memahami individu dan masyarakat serta lingkungan manusia, serta perduli pada kesejahteran sosial. Agar pendidikan mampu mengasilkan peserta didik dengan memiliki koptensi tersebut, kurikulum pendidikan Islam harus integratif antara proses belajar di sekolah dengan proses belajar di masyarakat. Sebab para ahli pendidikan sepakat bahwa "agar peserta didik memliki pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai-nilai, serta berbagai kompetensi personal dan sosial yang diperlukan sebagai produk suatu proses pendidikan, diperlukan kurikulum yang berorientasi pada pengalaman [*experience-oriented curriculum*]"[236]. Dengan demikian, pandangan ini mengharuskan disain kurikulum pendidikan Islam lebih diorientasikan kepada kemampuan apa yang akan dikerjakan peserta didik itu sendiri yang dipelajarinya, bukan apa yang dikerjakan dan dilakukan guru yang dipelajari peserta didik. Inilah alasan utama mengapa banyak ahli yang menekankan pentingnya pemberian pengalaman [*experience*] kepada peserta didik dalam proses belajar yang terintegrasi dengan proses belajar di masyarakat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat atau pemakai produk pendidikan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[235] Ibid, hlm. 33.

[236] Ibid, hlm. 108.

6. Reorientasi Metodologi Pendidikan Islam

Metodologi pendidikan diartikan sebagai prinsip-prinsip yang mendasari kegiatan mengarahkan perkembangan seseorang, khususnya proses belajar-mengajar. Atas dasar ini, maka metodologi pendidikan Islam harus didasarkan dan disesuaikan dengan : [a] Didasarkan pada "pandangan bahwa manusia dilahirkan dengan potensi bawaan tertentu dan dengan itu ia mampu berkembang secara aktif dalam lingkungannya. Hal ini mempunyai implikasi bahwa proses belajar mengajar harus didasarkan pada prinsip belajar siswa aktif [*student activie learning*]"[237], atau mengembangkan kemampuan belajar [*learning ability*] atau lebih menekankan pada proses pembelajaran [*learning*] dan bukan pada mengajar [*teaching*]. [b] Menotologi pembelajaran, didasarkan pada karakteristik masyarakat madani yaitu "manusia yang bebas dari ketakutan, bebas bereksperesi, dan bebas untuk menentukan arah kehidupannya"[238]. [c] Metodologi pembelajaran didasarkan pada *learning competency*, yaitu peserta didik akan memiliki seperangkat pengetahuan, keterampilan, sikap, wawasan dan penerapannya sesuai dengan criteria atau tujuan pembelajaran. Penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan, keahlian berkarya, sikap dan perilaku berkarya dan cara-cara berkehidupan di masyarakat sesuai profesinya. Proses belajar diorientasikan pada pengembangan kepribadian yang optimal dan didasarkan nilai-nilai *ilahiyah.*

Prinsip ini menuntut peserta didik diberi kesempatan untuk secara aktif merealisasikan segala potensi bawaan ke arah tujuan yang diinginkan, yaitu manusia muslim yang berkualitas, inovatif, kerja keras, sportivitas, kesiapan bersaing dan sekaligus bekerjasama serta memiliki disiplin diri. Sebab tugas pendidikan terutama membawa peserta didik untuk mengembangkan potensi sebaik-baiknya, maka proses pembelajaran yang dilaksanakan harus dapat : [a] "mengembangkan potensi peserta didik dan memanfaatkan kesempatan secara optimal untuk *self realization* atau *self*

[237]Anwar Jasin, *Kerang Dasar Pembaluruan*...,hlm. 5.
[238]H.A.R. Tilaar, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional*, hlm. 25.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

actualization, [b] mengembangkan metode rasional, emperis, *battom up* dan "menjadi", [c] materi ajaran [*nash*] harus diberikan secara doktrin, deduktif, *top down*, dan "memiliki"; dan [d] memberikan bekal atau landasan yang kuat dan siap dikembangkan ke perbagai keahlian"[239]. Dengan demikian pendidikan Islam akan mampu memproduk peserta didik yang memiliki pengetahuan dan keterampilan, bebas dari ketakutan, mandiri, bebas bereksperesi, inovatif, dan bebas untuk menentukan arah kehidupannya.

Harus diakui bahwa metodologi pendidikan Islam yang berjalan saat ini masih sebatas pada sosialisasi nilai dengan pendekatan "hafalan". Bahkan Mastuhu, menyatakan metodologi belajar yang berlaku saat ini masih bersifat "klasik", dalam arti, mewariskan sejumlah materi ajaran agama yang diyakini benar untuk disampaikan kepada anak didik tanpa memberikan kesempatan kepada peserta didik agar disikapi secara kritis"[240], mengoreksi, mengevaluasi dan mengomentari. Amin Abdullah, menyatakan bahwa "metodologi pendidikan Islam tidak kunjung berubah antara *pra* dan *post* era modernitas". Metodologi "pendidikan Islam lebih menitikberatkan pada aspek *korespondensi-tekstual*, yang lebih menekankan hafalan teks-teks keagamaan yang sudah ada[241]" [teks-teks yang dijadikan rujukan dan acuan mesti kembali ke masa lalu, seperti kasus fiqh, perang salib, ekspansi bangsa Arab, dan pemaksaan penyebaran agama-agama], sedangkan kemampuan analisis, kemampuan mencari dan memecahkan suatu problem dari teks-teks keagamaan tersebut kurang teraktualisasikan dalam proses belajar mengajar pendidikan Islam.

Dengan kata lain, "metodologi pendidikan Islam sampai kini masih bercorak menghafal, mekanis, dan lebih mengutamakan pengkayaan materi. Tentu saja, metodologi semacam itu cenderung memandang ilmu dari segi hasil akhirnya semata, bukan dari prosesnya"[242]. Muncul kritik bahwa metodologi yang lebih menekankan pada pengajaran menghafal jelas kurang bermanfaat, karena teknik menghafal

[239]Masthu, *Pemberdayakan Sistem Pendidikan...*, hlm. 17.
[240]Mastuhu, *Pemberdayaan Sistem Pendidikan Islam*, hlm. 35
[241]Amin Abdullah, *Problem Epistemologis-Metodologis Pendidikan Islam,...*, hlm. 49-65.
[242]Mastuhu, *Pemberdayaan Sistem Pendidikan ...*, hlm. 35.

mendikte peserta didik untuk menggunakan sistem *drill* dan hanya akan menjejali dan memaksakan materi pelajaran dalam waktu singkat yang mungkin tidak sesuai dengan minat dan bakatnya. Bahkan menurut Suryadi dan Tilaar, metode belajar seperti akan menyuap peserta didik dengan berbagai informasi yang tinggal ditelan saja. Peserta didik tidak memiliki kesempatan untuk mencari, mencerna dan memecahkan sendiri informasi sesuai dengan bakat dan minatnya[243], sehingga proses pembelajaran cenderung kaku, statis, monoton, tidak dialogtik dan bahkan membosankan.

Dari pandangan tersebut, dapat dikatakan bahwa metodologi pendidikan Islam saat ini hanya sekedar mengantarkan peserta didik mengetahui dan memahami sebuah konsep, sementara upaya internalisasi nilai belum dapat dilakukan secara baik. Hal terbukti dengan munculnya fenomena kesenjangan antara pengetahuan dengan praktek kehidupan sehari-hari. Misalnya saja, peserta didik mengetahui seperangkat nilai-nilai modernisasi, seperti kreatif, tepat waktu, disiplin, kompetitif, efesiensi, dan sebagainya. Namun dalam prakteknya hal-hal tersebut belum dapat diterapkan, hanya simbol-simbol dan tampilan fisik yang dapat dijalankan peserta didik[244]. Sebenarnya untuk internalisasi dan aktualisasikan nilai-nilai tersebut, mengharuskan pola keteladanan [*uswatun hasanah*] dalam mengajarkan setiap nilai kepada peserta dididik. Dengan kata lain, "seorang pendidik tidak hanya memberikan seperangkat konsep dan difinisi tentang suatu nilai atau ajaran, tetapi juga sekaligus menjadi teladan atas penerapan nilai dan ajaran yang dimaksud dan keterlibatan orang tua sebagai individu terdekat dengan peserta didik hendaknya dapat memberikan teladan atas penerapan suatu nilai"[245]. Dengan cara ini, diharapkan akan terjadi perubahan perilaku dan kultur sesuai dengan harapan, karena nilai yang diperoleh tidak hanya pada batas hafalan dan kognitif tetapi pada aspek afektif dan psikomotorik.

Jika hal ini dilaksanakan dengan baik, maka "masyarakat madani" yang menjadi cita-cita tidak hanya pada bahan hafalan dan pengetahuan peserta didik, tetapi ada perubahan sikap dan perilaku yang sesuai dengan konsep dimaksud, yaitu

---

[243] A.Suryadi dan H.A.R.Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan*,(Bandung: Remaja Rosdakarya,1993), hlm.196.
[244] Hidayat Syarif, *Paradigma Baru Pendidikan Munuju Masyarakat Madani*, REPUBLIKA, Jakarta, 30 Oktober 1999.
[245] Ibid, 30 Oktober 1999.

masyarakat yang relegius, demokratis, tertib dan sadar hukum, taat hukum, menghargai hak asasi manusia, keratif, mandiri dan percaya diri, dan memiliki semangat kompetitif dengan semangat persaudaraan universal (*pluralistik*). Inilah problem mendasar dunia pendidikan saat ini, sehingga mengharuskan melakukan perubahan mendasar pada metodologi pendidikan, yaitu proses perubahan dari idealistik ke praktis dari kognitif ke afektif dan psikomotorik. Harapannya, pendidikan harus mempersiapkan peserta didik menghadapi dan menghargai kehidupan nyata, bukan sekedar dunia gagasan yang dihafal dan dimengerti, artinya wawasan keislaman mampu ditransformasikan secara sistematik dalam kehidupan riel [nyata] masyarakat dan bukan dalam kehidupan konsep, karena kondisi sekarang ini pergeseran paradigma semakin cepat dan kecepatan perubahan sulit diperdiksi.

Penggeseran paradigma pendidikan saat ini juga akan berpengaruh terhadap metodologi pendidikan dan peserta didik akan mulai belajar melalui internet, *web, homepage, cd-rom*, yang merupakan alat bantu yang akan mempercepat proses *distributed knowledga*. Fungsi pendidik sebagai mediator dari ilmu pengetahuan dan pengajar [guru dan dosen] bukan satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi merupakan salah satu sumber dari sekian sumber pengetahuan yang ada. Peserta didik akan lebih banyak belajar dari media eloktronik dari pada guru atau buku. Maka, tugas utama pendidik [guru dan dosen] lebih terpokus pada mengajar peserta didik untuk mengakses sendiri informasi dan pengetahuan yang diperlukan untuk menambah pengetahuan. Proses pembelajaran lebih cenderung menggunakan *learning based* daripada *teaching-based* yang akan menjadi kunci pengembangan peserta didik. Metodologi lebih diorientasikan pada cara mengaktifkan peseta didik, cara untuk menemukan, cara memecahkan masalah menjadi penomena saat ini, sehingga metodologi pembelajaran semacam itu akan menjadi kunci pengembangan peserta didik yang berkualitas.

Untuk itu perlu ada kesadaran bahwa perubahan "metodologi belajar-mengajar pada akhirnya harus membawa peserta didik untuk belajar lebih lanjut dan berkemampuan memilih, serta lebih mengutamakan proses belajar dalam perspektif

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

"menjadi" di atas perspektif "memiliki". Metodologi belajar semacam itu tidak terelakkan lagi, kecuali mengenal hal-hal yang memang sudah di *nash* untuk dihafal"[246]. Mastuhu, menyatakan sudah tiba saatnya metodologi pengajaran sistem pendidikan Islam Indonesia melampaui dataran doktrin, *kemadzhaban*, *furu'iyah*, dan teks-teks keagamaan. Semua bahan pembelajaran disesuaikan dengan tingkat kematangan dan perkembangan berfikir peserta didik hendaknya diberikan secara lengkap[247], karena pada akhirnya mereka sendirilah yang akan mencarai, menemukan, mengolah dan memecahkan problem yang dihadapi dalam kehidupan di masyarakat. Misalnya, memalui model *hadap masalah* lewat ceramah singkat sejarah tokoh, kemudian peserta didik dibawa ke dalam sebuah dunia di mana mereka menjadi bagian di dalamnya[248], sehingga peserta didik akan menemukan, mengolah dan memecahkan sendiri masalah-masalah yang dipelajarinya dengan arahan dan bimbingan guru dan dosen.

Mastuhu, mengusulkan konsep pemikiran metodologi pendidikan Islam yang sifatnya lebih teknis, sebagai berikut: [a] Bagi studi pendidikan Islam tidak ada pemisahan istilah "pendidikan" dan "pengajaran". Keduanya merupakan satu kesatuan integral, hanya dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Pengajaran merupakan kiat atau strategi untuk mengaktualkan pendidikan. Sedangkan pendidikan merupakan suatu nilai yang terus berjalan tanpa henti, agar dapat diwujudkan. Pendidikan harus diprogramkan ke dalam target-target atau level-level tertentu, seperti diwujudkan dalam rencana-rencana pelajaran, cara-cara mengajar, praktikum, dan percobaan-percobaan. Inilah yang kemudian diistilahkan dengan "pengajaran" sebagai teknologi atau kiat merealisasikan pendidikan. Sedangkan pengajaran dapat dibuat terminal-terminal, paket-paket atau jenjang yang harus dilalui sesuai dengan kebutuhan dan taraf perkembangan peserta didik. Pengajaran selalu dilandasi dengan nilai-nilai kependidikan dan kependidikan selalu diwujudkan melalui kegiatan pengajaran. [b] Dalam melaksanakan metodologi pendidikan dan pengajaran Islam harus dipergunakan paradigma *holistik,* artinya memandang kehidupan sebagai suatu kesatuan, sesuatu yang konkrit dan dekat dengan kepentingan hidup sehari-hari

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[246]Mastuhu, *Pemberdayaan Sistem Pendidikan...*, hlm. 35
[247]Ibid, hlm. 35.
[248]Abdul Munir Mulkan, *Pembelajaran Islam Model Garden Learning...*, hlm. 4.

sampai dengan hal-hal anstrak dan *transendental.* Materi pengajaran pendidikan Islam harus selalu terintegrasi dengan disiplin-disiplin ilmu umum dan ilmu-ilmu umum harus disajikan dalam paradigma nilai ajaran Islam. [c] Perlu dipergunakan model penjelasan yang rasional, di samping pelatihan, dan keharusan melaksanakan ketentuan-ketentuan doktirin spritual dan norma peribadatan. Model penjelasan yang rasional, misalnya, digunakan dalam menjelaskan rukun iman. Selain itu, perlu mengembangkan pemikiran-pemikiran rasional, kreatif, inovatif, dan proaktif dalam mempelajari agama. [d] Perlu dugunakan teknik-teknik pembelajaran partisipatori. Artinya, peserta didik aktif melakukan eksplorasi, menemukan permasalahan, dan bertanggungjawab akan pemecahan masalah dengan ikut serta merasakan dan mengamalkannya. Metode partisipatori mengharuskan peserta didik sendirilah yang belajar mengidentifikasi masalah, mengkonsep cara-cara pemecahan, dan mengambil keputusan. Hal ini dapat dilakukan secara kolektif dalam suatu forum diskusi atau dengan cara berkonsultasi dengan para ahli. [e] Perlu digunakan pendekatan empirik untuk melengkapi model deduktif. Upaya untuk menghadirkan dan mengaktualkan iman dalam kehidupan, selain melalui pendekatan wahyu, manusia harus menerima-berhadapan dengan hukum alam [*sunnatullah*] ciptaan Tuhan. Tetapi, dapat melalui pendekatan antropologis, sosiologi, dan pengalaman emperik ke alam transendental[249]. [f] Metodologi pendidikan Islam lebih diorientasikan pada apa yang dikerjakan siswa itu sendiri yang dipelajarinya, bukan apa yang dilakukan oleh gurunya, sehingga pemberian pengalaman kepada peserta didik merupakan hal yang penting dalam proses belajar mengajar. Artinya, "perlua adanya interaksi aktif dan partisipatif antara siswa dengan materi, atau dengan situasi akademik [belajar] tertentu"[250]. Dengan cara ini, materi pelajaran dapat ditransformasikan dalam bentuk pengalaman peserta didik yang dilakukan melalui berbagai aktivitas belajar yang relevan dengan tujuan pembelajaran.

Abdul Munir Mulkan, menawarkan model *garden learning* di luar model pembelajaran yang selama ini lebih mengutamakan ranah kognisi melalui tatap muka di kelas. Untuk itu pendidikan Islam harus dipertegas, bahwa metodologi pembelajrannya bukan sekedar pemindahan ilmu dan nilai yang dikuasi guru atau dosen kepada peserta didik, artinya transfer nilai dan ilmu hanya mengandalkan guru

[249]Masruhu, *Pemberdayaan Sistem Pendidikan....* hlm. 74-75.
[250]Moh. Ansyar, *Kurikulum dalam Menyongsong Otonomi Pendidikan...*, hlm.109.

yang dapat membuat takwa di mana murid akan menerima ketakwaan dari guru. Model inilah yang dikritik keras oleh Paulo Freire sebagai model bankir (*the banking concept of education)* yang tercermin dalam etos guru-murid. Oleh karena itu, tujuan pendidikan Islam dengan alokasi waktu terbatas dan terlepas dari keseluruhan pembelajaran yang terlalu luas, abstrak, dan simbolik, dikembangkan kearah lebih pragmatis. Katakwaan, kepribadian muslim dan komitmen bagi kejayaan *Islam wal muslimin* diletakan sebagai paradigma. Ruang kelas dikembangkan sebagai media sosio-drama problematisasi iptek, kehidupan sosial, ekonomi dan politik dengan menempatkan peserta didik sebagai aktor dan guru sebagai sutradara[251]. Peserta didik akan melakukan dan merasakan sendiri apa yang dilakukan, sehingga menemukan hasil belajar yang akurat.

Lebih lanjut Munir Mulkan, menjelaskan bahwa dramatisasi di ruang kelas tersebut dapat dimulai dari situasi aktual peserta didik di dalam kehidupannya sehari-hari hingga masalah makro global dengan membuat ajaran Islam, aqidah, akhlak, ibadah dan muamalah sebagai solusi. Menurutnya, lebih ideal jika pembelajaran dapat dilakukan di lapangan dalam suatu bentuk ***garden learning*** di dalam sebuah ruang yang lebih luas yang disebut dengan ***learning society.*** Dari sini diharapkan dapat tumbuh suatu kemampuan yang dalam tradisi sufi disebut dengan *makrifat* dan atau keterbukaan hati dan pikiran yang disebut *kasyf*[252]. Misalnya, berbicara tentang teori kejujuran dan keadilan, peserta didik harus belajar melakukan dan menemukan indikator-indikator kejujuran dan keadilan dari perilaku sehari-hari masyarakat [*learning society*], kemudian dikembangkan menjadi sutua teori kejujuran berdarkan prinsip-prinsip bangunan teori. Jadi bukan dari suatu konsep atau teori yang ditransferkan kemudian dicari relevansinya emperiknya dalam perilaku keseharian dalam kehidupan. Begitu juga dalam persoalan fikih dan mu'amalah, peserta didik berusaha mempelajarai dan menemukan persoalan-persoalan yang muncul dalam sosial kehidupan masyarakat dan kemudian dikaji kaidah-kaidah yang sesuai dengan sosial,

[251]Abdul Munir Mulkan, *Pembelajaran Islam Model Garden Learning*..., hlm. 4.
[252]Ibid, hlm. 4.

politik, dan ekonomi masyarakat, atau mengembangkan metode pendidikan dengan pendekatan belajar ***"natural learning"***. Maksudnya, peserta didik diajak belajar secara "tematik" berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat dan lingkungan peserta didik. Misalnya, belajar tentang "kebersihan", peserta didik belajar dan berdikusi dari beberapa sudut pandang, seperti dari sudut agama dengan menggunakan pendekatan Qur'an tentang nilai-nilai kebersihan, sudut kesehatan, keindahan lingkungan, dan sebagainya. Jadi bukan hanya teori kebersihan yang diberikan sebagai pengetahuan [*cognitive*], tetapi peserta diajak untuk memperhatikan dan melatih kepekaan mereka terhadap kondisi terntu, merespons atau memberi reaksi terhadap suatu gejala secara nyata, menghargai dan menilai serta mengembangkan nilai-nilai menjadi sistem yang dianut dan nilai tersebut bukan dari teori yang dipelajari tetapi dari hasil kajian dan kenyataan dari fenomena-fenomena lingkungan masyarakat yang dipelajari. Tetapi memang diakui, bahwa "pembelajaran pada ranah kognisi tentu tetap penting, namun lebih baik jika dilakukan dengan pengembang *garden learning* melalui kegitan diluar kelas"[253] atau menggunakan pendekatan *natural learning*, sehingga *garden learning* dan *natural learning* merupakan model dan sarana atau media pengkayaan pengalaman ritual dan pengkayaan pengalaman bertuhan. Dari kerangkan ini, peserta didik diharapkan bergairah untuk membaca, mengkaji, mencari dan menemukan sendiri bahan ajar serta melatih diri secara kolektif tentang berbagai model ritual Islam dan sebagainya.

Dari pandangan ini, "pendidikan Islam bukan sekedar pengetahuan tentang Tuhan [iman] nilai dan prinsip perilaku [akhlak], transfer pengetahuan dan nilai, keterampilan ritual dan doktrin kehidupan sosial-politik [mu'amalah]. Wilayah pendidikan Islam bukan sekedar afeksi, kognisi, dan psikomotorik, tapi meliputi dimensi spritual-metafisik tentang peran manusia sebagai *khalifah* bagi kemakmuran hidup diniawi. "Metodologi pembelajaran pendidikan Islam tidak hanya mengakses persoalan teologi [tauhid], akhlak, dan ibadah saja, tetapi kemampuan mengolah"[254] dan menghadapi persoalan perubahan sosial, politik, ekonomi, hukum, pluralisme, hak asasi manusia, dan sebagainya, dalam artinya "suatu kemampuan melihat jauh ke

[253]Ibid, hlm. 10.
[254]Ibid, hlm. 5.

dapan yang dalam tradisi tasawuf dikenal sebagai *makrifat"* [255]. Dengan demikian, sasaran setiap proses belajar mengajar adalah asimilasi pembelajaran [*miximizing "student learning"*], dan bila perlu mengurangi porsi ceramah guru dan dosen [*minimizing "teacher teaching"*] dengan mengaktifkan peserta didik untuk mencari dan menemukan serta melakukan aktivitas belajar sendiri, sehingga konsep metodologi belajar yang terbangun adalah pembelajaran [*learning*] bukan pengajaran [*teaching*][256]. Inilah tantangan yang dihadapi guru dan dosen pendidikan Islam untuk mengemas dan mengimplementasikan materi-materi pelajaran dan materi-materi kuliah yang tertuang dalam kurikulum kepada peserta didik.

Dari kerangka pemikiran diatas, dapat dikatakan bahwa metode dan prinsip pembelajaran lebih terfokus pada *"outcomes" competency,* peningkatan relevansi dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja serta kompetensi yang dimiliki peserta didik harus dapat diaplikasikan dan dapat diamati dengan acuan standar, penggunaan penilaian dan evaluasi secara komprehensif, pengakuan terhadap kompetensi relatif yang bebas dari cara atau strategi penguasaannya dan fleksibilitas dalam mengakses perubahan, mengakses kesempatan dan pengembangan sikap serta perilaku berkarya sesuai profesinya sebagai *outcomes competency*. Sedangkan metode pembelajaran yang didasarkan pada *leaning competency* diharpakan dapat mengembangkan dan membangun tiga pilar keterampilan, yaitu: [1] *Leaming skills,* yaitu keterampilan mengembangkan dan mengola pengetahuan dan pengalaman serta kemampuan dalam menjalani belajar sepanjang hayat. [2] *Thinking skills,* yaitu keterampilan berpikir kritis, kreatif dan inovatif untuk menghasilkan keputusan dan pemecahan masalah secara optimal. [3] *Living skills,* yaitu keterampilan hidup yang mencakup kematangan emosi dan sosial yang bermuara pada daya juang, tanggungjawab dan kepekaan sosil yang tinggi[257]. Dari semua di atas, dapat dikatakan bahwa sebenarnya kompetensi standar yang diinginkan dalam proses

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[255]Ibid, hlm. 5.

[256]Moh. Ansyar, *Kurikulum dalam Menyongsong Otonomi Pendidikan...*, hlm.109.

[257]Sudjarwadi, *"Ubah Wajah UGM dengan Jiwa Kepemimpinan"*, Kedaulatan Rakyat, 5 Januari 2003, hlm.10.

pendidikan Islam adalah penguasaan nilai-nilai Islamiyah, penguasaan pengetahuan [*knowledge*], penguasaan keterampilan dan kemahiran berkarya [*skill*], memiliki *attitude* dan *ability* tertentu.

Akhirnya, dapat dikatakan bahwa metodologi pendidikan bukan merupakan satu-satunya faktor penentu keberhasilan belajar. Tetapi, proses belajar-mengajar pendidikan Islam tidak akan berhasil tanpa metodologi yang tepat dan benar. Metodologi pendidikan yang dipergunakan dalam proses pemdidikan Islam adalah pembelajaran [*student learning*] dengan menggunakan paradigma holistik, rasional, partisipatori, pendekatan emperik deduktif, sehingga menghasilkan peserta didik yang berkualitas, kreatif, inovatif yang mampu menterjemahkan dan menghadirkan agama dalam perilaku sosial dan indivual di tengah-tengah kehidupan masyarakat modern. Mampu mengembangkan dan mengamalkan ilmu serta keahliannya dengan bersumber pada ajaran Islam. Menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman perilaku keseharian, baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai ilmuan di tengah-tengah kehidupan masyarakat modern yang semakin mengglobal, kompleks, kompetitif dalam kehidupan masyarakat madani Indonesia. Selain itu, metodologi pendidikan Islam harus dapat mengembangkan potensi manusia demokratis yang bebas dari ketakutan, bebas bereksperesi, dan bebas untuk menentukan arah kehidupannya sesuai dengan ciri masyarakat madani Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

7. Reorientasi Manajemen dan Sumber Daya Pendidikan Islam

Manajemen pendidikan mengandung arti sebagai suatu proses kerja sama yang sistematik, sistemik, dan komprehensif dalam rangkan mewujudkan tujuan pendidikan. Manajemen pendidikan juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik tujuan jangka pendek, menengah, maupun tujuan jangka penjang[258]. Dengan demikian, manajemen merupakan komponen integral yang tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan, alasannya tanpa manajemen

---

[258]Gaffar, *Perencanaan Pendidikan Teori dan Metodologi*, (Jakarta: P2LPTK, 1989), dalam E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi, dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm.19-20.

tidak mungkin tujuan pendidikan dapat diwujudkan secara optimal, efektif, dan efisien. Konsep tersebut berlaku di sekolah yang memerlukan manajemen yang efektif dan efisien[259]. Maka dari kerangka inilah tumbuh kesadaran untuk melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kualitas manajemen pendidikan, baik yang dilakukan pemerintah maupun lembaga-lembaga pendidikan.

Pemerintah telah berusaha keras untuk menanggulangi berbagai permasalahan yang muncul dalam dunia pendidikan, baik pada aspek organisasi, manajemen maupun peningkatan mutu pendidikan Islam. Berbagai peraturan pemerintah dari tahun 1951 sampai dengan tahun 1989 sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, organisasi, dan manajemen pendidikan. Pemerintah telah berusaha secara serius dalam menangani persoalan pendidikan, tetapi upaya tersebut belum dapat dirasakan hasilnya apabila dilihat dari kualitas lulusan pendidikan Islam yang dimiliki sampai saat ini. Kemajuan madrasah dari sisi "manajemen" belum tampak, keluhan-keluhan para guru madrasah-madrasah masih sering kita dengar terutama dalam melaksanakan kurikulum dan perkembangan madrasah belum memperlihatkan kemajuan yang berarti.

Pada sisi lain, bahwa peraturan-peraturan pemerintah yang diundangkan dalam upaya pengembangan manajemen pendidikan dianggap sangat sentralistik. Artinya "hampir seluruhnya ditetapkan oleh pemerintah pusat secara sentralistik, baik yang menyangkut kurikulum, sistem pengelolaan, sistem evaluasi, sistem pembiayaan[260]. Selain itu dapat diperhatikan pula, bahwa sebenarnya pemerintah sendiri melaksanakan dua manajemen pendidikan di Indonesia, yaitu sistem pendidikan yang dikelola di bawah naungan dua departemen yang berbeda, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama. Sekolah-sekolah umum mulai dari TK, SD, SMP, SMU dan Perguruan Tinggi berada dalam pengelolaan Departemen Pendidikan Nasional. Sedangkan, sekolah-sekolah agama mulai *Raudhatul Athfal* [RA] setingkat TK, Madrasah *Ibtidaiyah* [MI] dan Madrasah *Diniyah*

[259]E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*,..., hlm.20.
[260]Udin S. Sa'ud, *Manajemen Berbasis Sekolah* ..., hlm. 15.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[MD] keduanya setingkat SD, Madrasah *Tsanawiyah* [MTs] setingkat SLTP, Madrasah *Aliyah* [MA] setingkat SMU dan Perguruan Tinggi Islam berada dan dikelola oleh Departemen Agama[261].

Dualisme ini berdampak pada kebijakan-kebijakan pemerintah yang selalu bersifat dualistis pula, baik yang menyangkut dengan struktur kurikulum, manajemen, dan tenaga kependidikan. Manajemen pengelolaan pendidikan Islam sepenuhnya merupakan tanggungjawab Departemen Agama, sehingga hal ini berdampak pada soal pendanaan pendidikan. Artinya anggaran belanja negara bidang pendidikan hanya dialokasikan kepada lembaga-lembaga pendidikan umum yang berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional, sedangkan pembiayaan pendidikan Islam tidak diambil dari anggaran negara bidang pendidikan, tetapi dari anggaran bidang agama, sehingga anggaran pembiayaan pemerintah untuk pendidikan Islam jauh lebih kecil dibandingkan untuk pendidikan umum.

Upaya lain adalah dengan diundangkannya UUSPN 1989 sebagai usaha untuk menggabungkan [integrasi] sistem pendidikan yang lebih dikenal dengan istilah pendidikan "satu atap". Akan tetapi upaya itu semua sampai saat ini belum pernah selesai dan terimplementasikan dengan baik. Dengan kata lain dalam manajemen pendidikan di Indonesia, pendidikan Islam belum mengalami transformasi posisi yang berarti dan diperlakukan secara sejajar oleh pemerintah dengan pendidikan umum di bawah Departemen Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dalam pengelolaan sistem pendidikan di Indonesia, "posisi pendidikan Islam masih dalam posisi *marginal*, diluar sistem pendidikan nasional dan masih tetap dianggap sebagai sistem pendidikan kelas dua"[262] dalam sistem pendidikan di Indonesia.

Inilah realitas yang dihadapi, sehingga menjadikan pendidikan Islam secara umum kurang diminati dan kurang begitu mendapat perhatian. Hal inipun didukung dengan materi kurikulum dan manajemen pendidikan Islam yang kurang memadai,

---

[261]Asep Saeful Mimbar dan Agus Sulthonie, "*Tantangan Madrasah Dewasa Ini*", Pikiran Rakyat, From: http//www.pikiran-rakyat.com/prcetak/072001/25/0801.htm. Artikel-Edisi 25 Juli 2001.

[262]Ibid, 25 Juli 2001.

kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Lulusannya-lulusannyapun kurang memiliki keterampilan untuk bersaing dalam dunia kerja. Melihat kenyataan ini, maka reformasi manajemen pendidikan Islam menjadi suatu keharusan. Sebab dengan langkah-langkah ikhtiar pembenahan dan peningkatakan profesionalisme manajemen penyelenggaraan pendidikan akan mampu menjawab berbagai tantangan dan dapat memberdayakan pendidikan Islam di masa depan. Maka mau tidak mau manajemen pendidikan Islam perlu dibongkar bahkan direformasikan dalam rangka menciptakan sistem pendidikan Islam yang berkualitas dan bermutu dalam kegidupan masyarakat madani Indonesia.

Seiring dengan gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa ternyata menjadi *magnitude* terhadap perubahan-perubahan paradigma dalam manajemen pendidikan nasional, termasuk pendidikan Islam. Perubahan paradigma manajemen pendidikan yang salama ini *centralized* dan *personalzed*, menjadi lebih *decentralized* dan distributif dengan memberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Perubahan paradigma [*the shift of paradigm*] tersebut merupakan langkah penting bagi upaya kita dalam membenahi kondisi pendidikan nasional[263] di Indonesia. Secara legal-formal, derivasi kebijakan disentralisasi pendidikan tersebut tertuang dalam UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang terkenal dengan otonomi daerah. Dalam undang-undang tersebut ditetapkan secara eksplisit bahwa daerah diberi kewenangan yang lebih luas dalam meremuskan dan mengelola berbagai sektor pembangunan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di daerah, kecuali yang menyangkut pertahanan dan keamanan, politik luar negeri, agama, kebijakan moneter, dan sistem peradilan[264]. Dengan demikian, otonomi daerah akan membawa perubahan strategis terhadap manajemen pembangunan pendidikan di Indonesia, termasuk manajemen pendidikan Islam.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[263]Shodiq Mudjahid, "*Peluang & Tantangan Profesionalisme Pendidikan Islam*", Pikiran Rakyat, From : http://www.pikiran-rakyat.com/ prcetak/ 032002/12/0801.htm. Artikel – Edisi 12 Maret 2002.

[264]Udin S. Sa'ud, *Manajemen Berbasis Sekolah*..., hlm. 15.

Sekarang ini sedang marak euforia reformasi pembangunan nasional yang lebih diorientasi kepada pengembangan potensi daerah secara optimum. Pemerintah telah menetapkan undang-undang tentang otonomi daerah, sehingga akan menuntut pengelolaan sistem pendidikan didesentralisasikan kepada daerah dan sekolah. Suyata, menyatakan sebenarnya "desentralisasi pendidikan telah menjadi fenomena luas di masyarakat penduduk dunia. Menurutnya, kecenderungan ini nampak dengan fenomena pendistribusian dana pemerintah bagi pembiayaan pendidikan di manapun siswa berada [*voucher plans*], perkembangan manajemen berbasis sekolah [*school-based management*], dan gerakan swastanisasi pendidikan"[265]. Maka dengan pemberian wewenang pengambilan keputusan, pemanfaatan pelayanan, peranan dan partisifasi aktif *stakeholders* pendidikan, merupakan alasan populer desentralisasi pada era reformasi menuju masyarakat madani Indonesia, sehingga desentraslisasi manajemen pendidikan merupakan fenomena yang berkembang dalam pengelolaan dunia pendidikan dewasa ini.

Memperhatikan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, dapat dikatakan bahwa akan muncul bentuk-bentuk desentralisasi pendidikan yang cukup bervariasi dan bergantung pada tekanan utamanya yang ingin dicapai. Brown yang dikutip Suyata, menyebutkan tiga desentralisasi pendidikan yaitu, administrasi, politik, dan ekonomik. Ketiga desentralisasi tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut: *Pertama,* desentralisasi pendidikan berdimensi administrasi merupakan penataan pendidikan melalui pemberian kewenangan kepada para profesional di sekolah mengambil keputusan-keputusan penting menyangkut kesejahteraan para siswa. *Kedua,* desentralisasi politik diartikan sebagai penataan kewenangan dengan memberi hak kepada orang tua siswa mengambil keputusan tentang pendidikan anak-anak mereka melalui forum yang tersedia. *Ketiga,* desentralisasi ekonomik, sebagai upaya penataan pendelegasian kewenangan, dengan itu orang tua berhak memilih

---

[265]Suyata, *Perbaikan Mutu Pendidikan Transformasi Sekolah dan Implikasi Kebijakan,* Pidato Dies, Disampaikan Pada Upacara Dies Natalis XXXIV IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan), 23 Mei 1998, , Yogyakarta, hlm. 20.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

sekolah yang mereka sukai[266]. Hal lain yang diajukan Brown adalah "kecenderungan desentralisasi pendidikan dengan mengembangkan manajemen berbasis sekolah berupa pemberian kewenangan dengan batas-batas tertentu. Birokrasi pendidikan memberikan "ketentuan kebijakan dan standarnya", sekolah mengambil bagian dalam merencanakan cara-cara mencapai tujuan kebijakan dan mempertanggung jawabkan[267]. Dalam kaitan ini, otonomi dan kemandirian manajemen pendidikan dan sekolah akan menjadi hal yang penting dalam sistem manajemen pendidikan.

Dengan kebijakan otonomi daerah, diharapkan upaya pembangunan dan pengembangan dibidang pendidikan seyogyanya dapat membawa perubahan pada manajemen pendidikan, kenapa demikian, karena manajemen pendidikan merupakan alternatif strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hasil penelitian Balitbang-dikbud pada tahun 1991, menunjukkan bahwa manajemen sekolah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Manajemen sekolah secara langsung akan mempengaruhi dan menentukan efektif tidaknya kurikulum, berbagai peralatan belajar, waktu mengajar, dan proses pembelajaran"[268]. Dengan dasar ini, maka upaya untuk meningkatan kualitas pendidikan Islam harus dimulai dengan pembenahan dan penataan manajemen pendidikan dan di samping peningkatkan kulitas guru, penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai serta pengembangan sumber belajar.

Menurut E. Mulyasa, dalam manajemen pendidikan dikenal dua mekanisme pengaturan, yaitu sistem *sentralisasi* dan *desentralisasi*. Dalam sistem sentralisasi, segala sesuatu yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan diatur secara ketat oleh pemerintah pusat. Sementara dalam sistem desentralisasi, wewenang pengaturan diserahkan kepada pemerintah daerah. Kedua sistem tersebut dalam prakteknya tidak berlaku secara ekstrem, tetapi merupakan bentuk kontinum; dengan pembagian tugas dan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

---

[266]Ibid, hlm. 20.
[267]Ibid, hlm. 20.
[268]E..Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah* ..., hlm.22.

[lokal]. Hal ini juga berlaku dalam manajemen pendidikan di Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam "Penjelasan UUSPN 1989 bahwa pendidikan nasional diatur secara terpusat [sentralisasi], namun penyelenggaraan satuan dan kegiatan pendidikan dilaksanakan secara tidak terpusat [desentralisasi]. Sistem pengaturan yang sentralistik ditujukan untuk menjamin integritas, kesatuan, dan persatuan bangsa[269].

Tilaar, menyatakan bahwa pendekatan sentralistik mempunyai posisi yang sangat strategis dalam mengembangkan kehidupan serta kohesi nasional karena peserta didiknya adalah kelompok umur yang secara pedagogik sangat peka terhadap pembentukan kepribadian. Dalam jenjang pendidikan inilah dapat diletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi ketahanan nasional, apresiasi kebudayaan nasional dan daerah, serta nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air sebagai negara kesatuan[270]. Maka dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, pendekatan sentralistik masih diperlukan, terutama untuk menentukan kurikulum pendidikan nasionl dan pemerataan standar pendidikan di seuruh wilayah tanah air. Kedua sistem tersebut masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan sehingga dalam pengelolaan pendidikan dapat memadukan kedua sistem tersebut. Tetapi sistem sentralisasi sudah menjadi tarauma dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia, karena pada kenyataannya dengan sistem sentralisasi pembangunan di bidang pendidikan hampir seluruhnya ditetapkan oleh pemerintah pusat secara sentralistik dan dianggap mematikan kreatifitas, inisiatif, dan mengakibatkan kurangnya pengembangan potensi daerah. Dengan dasar ini otonomi dan desentralisasi merupakan sistem yang disambut dengan baik, karena adanya pelimpihan wewenang kepada masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan [*stakeholders*] dalam pengelolaan serta ikut serta bertanggungjawab dalam memajukan pendidikan.

Desentralisasi mengandung arti sebagai pelimpahan kekuasaan oleh pemerintah pusat kepada aparat pengelolaan pendidikan yang ada di daerah, baik

---

[269]Ibid, hlm. 22.

[270]H.A.R. Tilaar, *Manajemen Pendidikan Nasional, Kajian Pendidikan Masa Depan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hlm.22.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pada tingkat propinsi maupun lokal, sebagai perpanjangan aparat pusat untuk meningkatkan efisiensi kerja dalam pengelolaan pendidikan di daerah. Implikasi dari desentralisasi manajemen pendidikan adalah kewenangan yang besar diberikan kepada kabupaten dan kota untuk mengolah pendidikan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerahnya[271]. Dengan demikian, "kebijakan desentralisasi ini menuntut para *stokeholder* pendidikan untuk melakukan pembaruan terutama pada aspek peningkatan manajemen pendidikan. Jika tanpa diiringi peningkatan profesionalisme manajemen maka dunia pendidikan hanya akan menjadi "korban" kebijakan para pengambil keputusan [*decision makers*], karena perubahan ditingkat negara [*state*] seringkali terlambat dalam merespon berbagai dinamika yang terjadi ditingkat masyarakat [*society*]. Sementara dalam masyarakat senantiasa terjadi berbagai dinamika yang berlangsung secara terus menerus, intensif, dan progresif, sehingga McClelland [1991] menyebutnya sebagai *inner dynamic*: yaitu sebuah dinamika internal yang bersifat otonom, responsif dan bergerak maju[272].

Upaya melakukan reformasi manajemen pendidikan tentu tidak dapat dilepaskan dari beberapa kendala yang ada, baik itu kendala pada masyarakat maupun kendalam organisasi itu sendiri. Kendala organisasi, banyak lembaga pendidikan di dalam pengelolaan lembaga masih menganut paradigma lama, yaitu terkotak-kotak antara unit kerja, dengan kepemimpinan yang menekankan pada hirarki, peraturan dan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan. Organisasi dengan paradigma lama ini sangat mengganggu kecepatan organisasi dalam beradaptasi pada perubahan lingkungan. Banyak sumber daya yang seharusnya dipakai bersama-sama menjadi tidak termanfaatkan secara optimal, efisien dan efektif[273]. Sedangkan kendala pada masyarakat, adalah kendala budaya sistem manajemen yang bertumpu kepada pemerintah [Departemen Agama], budaya menunggu petunjuk dari pemerintah, yang telah terbangun selama 32 tahun pada era Orde Baru, sehingga

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[271] E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah* ..., hlm, 23.

[272] Shodiq Mudjahid, *Peluang & Tantangan Profesionalisme Pendidikan Islam*, 12 Maret 2002

[273] Jamaluddin Ancok, *Peran Perguruan Tinggi dalam Menyiapkan Manusia di Milenium ke Tiga*, UII, 1998, Yogyakarta, hl. 19.

pengelola pendidikan kurang kreatif, manajemen pendidikan menjadi kaku, serta kurang berkembang. Selain itu, muncul pula kehawatiran bahwa dengan "desentralisasi dapat melemahkan tumbuhnya perasaan nasional yang sehat, dapat menimbulkan rasa kedaerahan yang berlebihan, serta akan menjurus kepada isolasi dan pertentangan[274].

Masalah yang muncul adalah model manajemen pendidikan Islam yang bagaimanakah yang dapat mendukung upaya pemberdayaan dan pemanfaatan potensi manusia dalam masyarakat madani Indonesia. Sebagai *option* dari upaya pemecahan masalah tersebut, mencoba mencermati beberapa model manajemen pendidikan yang ditawarkan sebagai dasar untuk melakukan perubahan manajemen pendidikan Islam, adalah sebagai berikut :

a. Disentralisasi pengelolaan Pendidikan Islam

Desentralisasi mengandung makna proses pendelegasian atau pelimpahan kekuasaan atau wewenang dari pimpinan ke tingkat bawahan dalam organisasi [Greemberg dan Baron, 1995:585][275]. Melalui, "desentralisasi, segala keputusan yang dibuat di dalam tubuh organisasi didelegasikan kepada bawahan"[276]. Menurut David Held [11995] yang dikutip Mifta Thoha, bahwa desentralisasi, demokrasi, atau otonomi merupakan isu yang amat populer akhir-akhir ini, walaupun isu tersebut telah lama dikemukakan berbarengan dengan keinginan mengganti sistem pemerintahan otoriter yang melanda Eropa Timur pada akhir tahun 1989 dan awal tahun 1990[277].

Sekarang ini, telah terjadi perubahan paradigma dalam manajemen pemerintahan termasuk di dalamnya manajemen pendidikan. Beberapa perubahan itu antara laian : [1] perubahan paradigma dari orientasi menajemen pemerintah yang sarwa negara [*state driven*] menjadi berorientasi ke pasar. Selama ini manajemen

---

[274]E. Mulyasa, 2002, *Manajemen Bernasis Sekolah, Konsep,...*, hlm. 23.

[275]J. Riwukaho, *Kendala-kendala dan Prospek Penyelengaraan Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, (4), 1996,, hlm. 23-25.

[276]T.D. Daniels and B.K. Spiker, *Perspectives on Organizational Communication*, (Madison, Wisconsin: Brown & Benchmark, 1994,) hlm.65., dalam H.Nuril Huda, *Desentralisasi Pendidikan: Pelaksanaan dan Permasalahannya*, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun ke-5 No. 017, Juni 1999,Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta,hlm.15.

[277]Miftah Thoha, "*Desentralisasi Pendidikan*", Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun ke-5 No. 017, Juni 1999, Jakarta, hlm. 1-2.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pemerintahan berorientasi untuk kepentingan dan ditentukan oleh negara. Sekarang ini kondisinya di balik, orientasi manajemen pemerintahan diarahkan pada pasar. Arpirasi masyarakat menjadi pertimbangan pertama dalam mengatasi persoalan yang timbul. [2] Perubahan paradigma dari orientasi manajemen pemerintah yang otoritarian menjadi beroritansi pada demokrasi. Kedaulatan rakyat menjadi pertimbangan pertama jika menginginkan tatanan pemerintahan yang demokratis. [3] Perubahan paradigma dari sentralisasi kekuasaan menjadi desentralisasi kewenangan. Selama ini, kekuasaan dan manajemen pemerintahan lebih cenderung dilakukan secara senteral. Maka pembuatan kebijaksanaan, implementasi dan evaluasi dilakukan secara terpusat. Sekarang terjadi kecenderungan dilakukannya desentralisasi kewenangan. Sistem pemerintahan tidak hanya berada pada satu pusat kekuasaan, melainkan dapat berada pada beberapa pusat kekuasaan. Masing-masing mempunyai keseimbangan kekuasaan dan kewenangan yang saling melakukan *corss check*. Sistem demokratis sebagai pengganti dari sistem otoriter dan sistem ini peranan dan kedaulatan rakyat menjadi penting untuk diterapkan, dan [4] Manajemen pemerintahan yang cenderung dipengaruhi oleh tata aturan global[278]. Kebijakan dan aturan pemerintahan harus mengakomodasi tata aturan global, karena aturan nasional saja kurang menguntungkan dalam percaturan nasional.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Berdasarkan perubahan paradigma yang dijelaskan di atas, maka pengelolaan pendidikan perlu disesuaikan dengan arah perubahan tersebut. Di bidang pendidikan harus dilakukan *repositioning* begaimana sebaiknya pendidikan dikelola. Perumusan dan implementasi kebijaksanaan pendidikan yang tersentralisasi dengen mengedepankan pendekatan yang berorientasi ke negara, otoritarium, dan kurang memperhatikan arus medernisasi global tidak perlu dianut dan diganti ke arah sebaliknya[279]. Maka, jika selama ini, sistem manajemen pendidikan Islam bertumpu pada pemerintah dalam hal ini Departemen Agama harus dirubah dengan pemberian kekuasaan yang lebih banyak kepada pengelola pendidikan, orang tua peserta didik,

[278]Ibid, hlm. 3.
[279]Ibid, hlm. 3.

dan masyarakat untuk ikut mengambil keputusan tentang pendidikan untuk menuju pada *community scholl based management*. Maka menjadi suatu keharusan, pendidikan Islam perlu merencanakan, melakukan pembenahan, dan peningkatan profesionalisme manajemen penyelenggaraan pendidikan Islam. Untuk itu diperlukan orientasi paradigma manajemen pendidikan yang baru dalam pengelolaan pendidikan Islam agar mampu menjawab berbagai tantangan di masa datang.

Desentralisasi pendidikan merupakan upaya untuk mendelegasikan sebagian atau seluruh wewenang di bidang pendidikan yang seharusnya dilakukan oleh unit pejabat pusat kepada unit atau pejabat di bawahnya, atau dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah dan masyarakat[280]. Salah satu wujud dari desentralisasi itu adalah terlaksanya proses otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian sudah tiba saatnya memikirkan dan melaksanakan upaya desentralisasi kewenangan di bidang pendidikan dan kewenangannya dapat dirinci, yaitu: [1] mulai dari kewenangan merumuskan dan membuat kebijaksanaan, [2] melaksanakan kebijaksanaan, dan [3] mengevaluasi atau mengawasi kebijaksanaan tersebut.

Desentralisasi pendidikan dapat mencakup seluruh aspek pendidikan maupun sejumlah aspek saja, antara lain tenaga kependidikan, kurikulum, keuangan, administrasi, dan logistik. Tetapi tidak seluruh kewenangan dapat didesentralisasikan, karena kewenangan perumusan atau pembuatan kebijakan mengenai kurikulum yang bersifat nasional, persyaratan pembukaan jurusan, persyaratan jenjang pendidikan, dan kegiatan strategi lainnya yang dipandang lebih efetif, efisien, dan tepat jika tidak didesentralisasikan barangkali masih dapat dilakukan dan diperlukan sentralisasi. Sedangkan kewenangan-kewenangan implementasi dan evaluasi diserahkan atau didesentralisasikan ke daerah atau masyarakat. Demikian juga kebijakan yang berdemensi daerah atau lokal serta pelaksanaan dan evaluasinya tidak perlu diintervensi pemerintah pusat, melainkan dapat diserahkan daerah dan masyarakat [didesentralisasi][281]. Dengan demikian, konsep desentralisasi pendidikan berusaha

[280]Mofta Thoha, "*Desentralisasi Pendidikan*", hlm. 5.
[281]Ibid, hlm. 6.

untuk mengurangi campur tangan atau intervensi pemerintah pusat dalam hal ini Depdiknas dan Departemen Agama terhadap persoalan-persoalan pendidikan yang dapat diputuskan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat dan kebijakasanaan pendidikan yang berdimensi lokal atau daerah adalah semua hal yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat daerah. Sedangkan masalah-masalah yang berkaitan dengan substansi manajemen pendidikan dan perundang-undangan antara lain, kurikulum [lokal], sumber daya manusia, dana, sarana, dan prasarana pendidikan, peraturan dan perundang-undangan, menjadi suatu keharusan untuk didesentralisasikan sesuai dengan tuntutan reformasi pendidikan menuju masyarakat madani Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, misi desentralisasi pendidikan adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, meningkatkan pemberdayaan potensi daerah, terciptanya infrastruktur kelembagaan yang dapat menopang terselenggaranya sistem pendidikan yang relevan dengan tuntutan zaman, dan terserapnya konsep globalisasi, humanisasi, dan demokratisasi dalam pendidikan. Dengan demikian, terdapat dua asumsi dalam implementasi sistem desentralisasi pendidikan. *Pertama*, mutu pendidikan akan dapat ditingkatkan melalui penataan sistem manajemen pendidikan secara menyeluruh. Artinya, berbagai sumber dan potensi yang mempengaruhi proses pendidikan perlu ditangani secara jelas, terkendali, dan terarah. *Kedua,* pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan pendidikan bagi setiap warganegara, dengan seharusnya melaksanakan program pendidikan di daerah[282]. Oleh karena itu, perlu ada pembagian wewenang kekuasaan antara pemerintah pusat dengan daerah atau masyarakat dalam menangani pendidikan. Sebab desentralisasi pendidikan akan "mendorong terciptanya kemandirian dan rasa percaya diri yang tinggi pemerintah daerah yang pada gilirannya akan berlomba meningkatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat di daerahnya. Persaingan sehat dan kerja sama antar daerah tentunya akan terus tumbuh dalam

[282]Nuril Huda, *Desentralisasi Pendidikan : Pelaksanaan dan Permasalahannya,* hlm. 23.

suasana keterbukaan komunikasi antar daerah yang dijiwai oleh semangat persatuan dan kesatuan dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang bercirikan keragaman kedaerahan"[283].

Dengan mekanisme penyelenggaraan pendidikan demikian, pelayanan pendidikan diharapkan lebih efisien dan efektif, karena daerah tidak tergantung atau menunggu kebijakan dari pemerintah pusat dalam hal ini Depdiknas dan Departemen Agama untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan di daerah. "Program desentralisasi bidang pendidikan, yang ditandai dengan adanya otonomi luas di tingkat sekolah, partisipasi masyarakat yang tinggi, dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Otonomi diberikan agar sekolah dapat leluasa mengelola sumber daya dengan mengalokasikannya sesuai dengan perioritas kebutuhan daerah dan lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Masyarakat dituntut partisipasinya agar mereka lebih memahami pendidikan, membantu, serta mengontrol pengelolaan pendidikan[284].

Ketentuan otonomi daerah yang dilandasi Undang-Undang nomor 22 dan nomor 25 tahun 1999 tersebut, telah membawa perubahan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk penyelenggaraan pendidikan. Bila sebelumnya manajemen pendidikan merupakan wewenang pemerintah pusat, maka dengan berlakunya undang-undang tersebut, kewenangam pendidikan dialihkan ke pemerintah daerah kota dan kabupaten sebagai senteral desentralisasi. Sehubungan dengan hal itu, Indra Djati Sidi, yang dikutip Mulyasa, mengemukakan empat isu kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional [termasuk pendidikan Islam] yang perlu direkonstruksi dalam rangka otonomi daerah, berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan, efisiensi pengelolaan pendidikan, serta relevansi pendidikan dan pemerataan pelayanan pendidikan sebagai berikut :

---

[283]Mahdiansyah, dkk., "*Desentralisasi Pengelolaan Pendidikan*, Hasil Penelitian", Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun ke-5 No. 017, Juni 1999, Jakarta, hlm. 42.

[284]Rumtini dan Jiyono, "*Manajemen Berbasiskan Sekolah: Konsep dan Kemungkinan Strategi Pelaksanaanya di Indonesia*", Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun ke-5 No. 017, Juni 1999, Jakarta, hlm. 81.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1) Upaya peningkatan mutu pendidikan dilakukan dengan menetapkan tujuan dan standar kompetensi pendidikan, yaitu melalui konsensus nasional antara pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat. Maka standar kompetensi yang berbeda antar sekolah atau antar daerah akan menghasilkan standar kompetensi nasional dalam tingkat standar minimal, normal [*mainstream*], dan unggulan.
2) Peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan mengarah pada pengelolaan pendidikan berbasis sekolah, dengan memberi kepercayaan yang lebih luas kepada sekolah untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia bagi tercapai tujuan pendidikan yang diharapkan.
3) Peningkatan relevansi pendidikan mengarah pada pendidikan berbasis masyarakat. Maka peningkatan peran serta orang tua dan masyarakat pada level kebijakan [pengambilan keputusan] dan level operasional melalui komite [dewan] sekolah.
4) Pemerataan pelayanan pendidikan mengarah pada pendidikan yang berkeadilan. Hal ini berkaitan dengan penerapan pembiayaan pendidikan yang adil dan transparan, upaya pemerataan mutu pendidikan dengan adanya standar kompetnsi minimal, serta pemerataan pelayanan pendidikan bagi peserta didik pada semua lapisan masyarakat[285].

Untuk itu, pelimpaham wewenang kepada masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan [*stakeholders* pendidikan] untuk ikut serta bertanggung jawab dalam memajukan sekolah. Maka apabila konsep otonomi ini dihubungkan dengan praktek manajemen berbasis sekolah, terkandung adanya pelimpahan wewenang untuk perumusan kebijakan dan penetapan keputusan kepada sekolah dan *stakeholder*-nya"[286]. Oleh karenanya gagasan desentralisasi mengarah kepada praktek otonomi pengelolaan pendidikan. Sedangkan "kepentingan utama format otonomi sekolah adalah tampilnya kemandirian sekolah untuk meningkatkan kinerjanya sendiri, dengan mengakomodasi berbagai potensi sumber daya sekolah, yang pada akhirnya ditunjukan untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam wujud hasil belajar peserta didik"[287].

Kebijakan desentralisasi ini menuntut stakeholder pendidikan untuk melakukan pembenahan dan pembaruan terutama pada aspek manajemen pendidikan. Desentralisasi pendidikan menunjukkan adanya pelimphanan wewenang pengelolaan pendidikan dari pemerintah pusat ke daerah otonomi. Maka melalui "otonomi

[285]Indra Djati, *Kebijakan Penyelenggaraan otonomi Daerah Bidang Pendidikan* [makalah], (Bandung, PPS UPI, 2000), dalam Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, ...*, hlm. 6.

[286]Djam'an Satori, *Program Peningkatan Mutu Pendidikan...*, hlm. 7

[287]Djam'an Satori, *Program Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah...*, hlm. 7

pengelolaan pendidikan diharapkan pemenuhan kebutuhan masyarakat, lebih cepat, tepat, efisien dan efektif"[288]. Semangat otonomi daerah menuntut profesionalisme manajemen pendidikan Islam. Lembaga-lembaga pendidikan Islam harus melakukan berbagai perubahan di bidang manajemen dan berusaha untuk membangun budaya profesionalisme. Maka agar pendidikan Islam tetap eksis, lembaga-lembaga pendidikan Islam tidak punya pilihan lain, kecuali mengembangkan manajemen profesional dan membuka diri terhadap *trend global* dunia pendidikan, tanpa harus kehilangan identitas sebagai lembaga pendidikan Islam. Lembaga-lambaga pendidikan Islam perlu berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. Walaupun "peningkatan kualitas bukanlah tugas yang ringan, karena tidak hanya berkaitan dengan permasalahan teknis, tetapi mencakup berbagai persoalan yang rumit dan kompleks, baik menyangkut perencanaan, pendanaan, maupun efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan sistem pendidikan. Peningkatan kualitas juga menuntut manajemen pendidikan yang lebih baik dan profesional, karena manajemen pendidikan merupakan strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, pengelolaan pendidikan Islam diorientasi pada relevansi dengan kebutuhan masyarakat masa kini dan masa yang akan datang, peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan, serta pemerataan pelayananan pendidikan bagi peserta didik untuk semua lapisan dalam masyarakat madani Indonesia.

Pengembangan pendidikan sangat bergantung atas kebijakan pemerintah daerah sebagai bagian dari kewenangan yang dilimpahkan. Maka melalui otonomi pendidikan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, lebih cepat, tepat, efisien dan efiktif, karena sekolah dapat leluasa mengelola sumber daya dan potensi sesuai dengan perioritas kebutuhan daerah. Akhirnya dengan pengembangan "model desentralisasi dan otonomi pengelolaan pendidikan akan bermuara pada "manajemen

[288]E. Mulyasa, *Manajemen Bernasis Sekolah*, ..., hlm. 6 dan 21.
[288]Ibid, hlm. 21.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

berbasis sekolah" [*school-based managament*] dan "pendidikan berbasis masyarakat" [*commmunity-based education*]"[289].

b Manajemen Berbasis Sekolah

Istilah manajemen berbasis sekolah merupakan terjemahan dari *"school-based management"*. Istilah ini pertama kali muncul di Amerika Serikat ketika masyarakat mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat setempat. Manajemen berbasis sekolah merupakan paradigma baru pendidikan, yang menberikan otonomi luas pada tingkat sekolah [pelibatan masyarakar] dalam kerangka kebijakan pendidikan. Otonomi diberikan agar sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan perioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat[290]. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan, dimaksudkan agar mereka lebih memahami, membantu, aktif, dan mengontrol pengelolaan pendidikan. Maka, dalam pelaksanaan sistem manajemen berbasis sekolah, sekolah dituntut untuk mandiri, mengalokasikan, menentukan perioritas program, mengendalikan program, dan mempertanggungjawabkan pemberdayaan sumber-sumber yang ada, baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pertanyaan yang muncul adalah apakah pendidikan Islam dapat menerapkan manajemen berbasis sekolah. Jawabannya adalah pendidikan Islam sebagai sub sistem pendidikan nasional, mau tidak mau harus menerapkan sitem ini. Pendidikan Islam perlu menerapkan manajemen berbasis sekolah, artinya pengelolaan pendidikan mengarah kepada pengelolaan manajemen berbasis sekolah. Maka, pemerintah dalam hal ini Departemen Agama memberi kepercayaan yang lebih luas kepada sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan Islam untuk mengelolah [manajemen] dan mengoptimalkan sumber daya pendidikan yang tersedia bagi tercapainya tujuan pendidikan Islam yang diharapkan.

---

[289]Mahdiansyah, dkk., *Desentralisasi Pengelolaan Pendidikan*, hlm.58.

[290]E. Mulyasa, *Manajemen Bernasis Sekolah*, ..., hlm. 24.

Manajemen merupakan komponen integral dan tidak mungkin dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Kenapa demikian, karena tanpa manajemen tidak mungkin tujuan, visi, dan misi pendidikan dapat diwujudkan secara optimal, efektif, dan efisien. Konsep ini juga berlaku disekolah dan pendidikan yang memerlukan manajemen yang efektif dan efisien. Maka "dalam krangka inilah tumbuh kesadaran akan pentingnya manajemen berbasis sekolah, yang akan memberikan kewenangan penuh kepada sekolah dan guru dalam mengatur pendidikan dan pengajaran, merencanakan, mengorganisasi, mengawasi, mempertanggung jawabkan, mengatur serta memimpin sumber daya insani yang membantu pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan sekolah[291]. Manajemen berbasis sekolah juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan minat pengelola, pemakai, dan masyarakat setempat.

Manajemen berbasis sekolah "merupakan gagasan yang menempatkan kewenangan pengelolaan sekolah dalam satu *entitas* system. Di dalamnya terkandung adanya desentralisasi kewenangan yang diberikan kepada sekolah untuk membuat keputusan"[292]. Oleh karenanya, manajemen berbasis sekolah *[School-Based Managemen*], "sebagai model pengelolaan sekolah dalam rangka desentralisasi sistem pengelolaan pendidikan"[293]. Suyata, menyatakan bahwa "manajemen berbasis sekolah" berupa pemberian kewenangan dengan "batas-batas tertentu", artinya birokrasi pendidikan memberikan "ketentuan kebijakan" dan "standarnya", kemudian sekolah mengambil bagian dalam merencanakan cara-cara mencapai tujuan kebijakan dan mempertanggung jawabkannya[294].

Penerapan manajemen berbasis sekolah juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan minat peserta didik, guru-guru, serta kebutuhan masyarakat setempat. Maka dalam pelaksanaan sistem tersebut, perlu dipahami fungsi-fungsi pokok

---

[291]Ibid, hlm. 20.

[292]Djam'an Satori, *Program Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah*..., hlm. 8.

[293]Udin S. Sa'ud, *Manajemen Berbasis Sekolah (School-Based Managemen)*..., hlm. 16.

[294]Suyata, "*Perbaikan Mutu Pendidikan Transformasi Sekolah dan Implikasi Kebijakan*", Pidato Dies, Disampaikan Pada Upacara Dies Natalis XXXIV IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan), 23 Mei 1998, Yogyakarta, hlm. 21.

manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan[295]. Keempat fungsi tersebut, dapat dideskripsikan sebagai berikut : *Pertama*, perencanaan program pendidikan Islam, setidaknya memiliki dua fungsi, yaitu: [1] perencanaan merupakan upaya sistimatis yang menggambarkan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan dengan mempertimbangkan sumber-sumber yang tersedia, [2] perencanaan merupakan langkah-langkah untuk mengarahkan dan menggunakan sumber-sumber yang terbatas secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. *Kedua*, pelaksanaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan rencana menjadi tindakan operasional dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien. *Ketiga*, pengawasan sebagai upaya untuk mengamati secara sistematis dan berkesinambungan; merekam, memberi penjelasan, petunjuk, pembinaan dan meluruskan berbagai hal. Pengawasan merupakan kunci keberhasilan dalam keseluruhan proses manajemen yang harus dilaksanakan secara komprehensif, terpadu, dan tidak terfokus pada hal-hal tertentu. *Keempat*, pembinaan merupakan rangkaian upaya pengendalian secara profesional semua unsur lembaga agar berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien[296]. Maka, apabila menginginkan pelaksanaan manajemen pendidikan Islam yang efektif dan efisien menuntut dilaksanakannya keempat fungsi pokok manajemen tersebut secara terpadu dan terintegrasi dalam sistem pengelolaan bidang-bidang kegiatan manajemen pendidikan Islam. Melalui manajemen sekolah yang efektif dan efisien tersebut, diharapkan dapat memberikan konstribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan Islam secara keseluruhan.

Bank Dunia [1999] telah mengkaji beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam penerapan manajemen berbasis sekolah. Faktor-faktor tersebut berkaitan dengan kewajiban sekolah, kebijakan dan perioritas pemerintah, peranan orang tua dan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[295]E. Mulyasa, *Manajemen Bernasis Sekolah*, ..., hlm. 20.
[296]Ibid., hlm. 21.

masyarakat, peranan profesionalisme dan manajerial, serta pengembangan profesi[297], dan faktor-faktor tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. Kewajiban Sekolah

Manajemen berbasis sekolah menawarkan keleluasan pengelolaan sekolah. Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah perlu disertai dengan seperangkat kewajiban yang harus dipenuhi oleh sekolah. Dengan demikian, "manajemen berbasis sekolah menawarkan keleluasan pengelolaan sekolah memiliki potensi yang besar atau memiliki keleluasaan dalam memilih kepala sekolah dan guru yang berkualitas serta menciptakan sistem pengelolaan pendidikan yang profesional"[298]. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah akan disertai seperangkat monitoring dan tuntutan pertanggungjawaban yang relatif tinggi, untuk menjamin bahwa sekolah selain memiliki otonomi juga mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan pemerintah dan memenuhi harapan masyarakat sekolah[299].

Maka untuk mendukung keberhasilan program ini, sekolah-sekolah Islam harus memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan barbagai sumber daya dan potensi yang tersedia di masyarakat dan lingkungan sekitar sekolah. Selain itu, "sekolah juga diberikan kewenangan untuk menggali dan mengelola sumber dana sesuai dengan perioritas kebutuhan sekolah"[300]. Sekolah-sekolah Islam, "dituntut mampu menampilkan pengelolaan sumber daya secara transparan, demokratis, tanpa monopoli, dan bertanggungjawab baik terhadap masyarakat maupun pemerintah, dalam rangka meningkatkan kapasitas pelayanan dengan sistem manajemen mutu terhadap peserta didik"[301]. Maka dengan adanya otonomi yang luas, sekolah-sekolah Islam atau pendidikan Islam dapat meningkatkan kinerja staf dengan menawarkan partisipasi aktif mereka dalam perencenaan dan

---

[297]Ibid., hlm. 20.

[298]Ibid., hlm. 27.

[299]Rumtini dan Jiyono, "Manajemen Berbasiskan Sekolah : Konsep dan Kemungkinan Strategi Pelaksanaanya di Indonesia", Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun ke-5 No. 017, Juni 1999, Jakarta, hlm. 83.

[300]Udin S. Sa'ud, *Manajemen Berbasis Sekolah* ..., hlm. 17.

[301]E. Mulyasa, *Manajemen Bernasis Sekolah*, ..., hlm. 27.

pengambilan kebijakan, serta tanggungwab bersama dalam pelaksanaan keputusan yang diambil dengan posisi dan tugas masing-masing mereka.

2. Kebijakan dan Perioritas Pemerintah

Pemerintah sebagai penanggungjawab pendidikan berhak merumuskan kebijakan-kebijakan yang menjadi perioritas nasional terutama yang berkaitan dengan program peningkatan melek aksara dan angka [*literacy and numeracy*], efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Dalam hal-hal tersebut, sekolah tidak diperbolehkan untuk berjalan sendiri dengan mengabaikan kebijakan dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah yang dipilih secara demokratis[302]. Agar perioritas pemerintah dilaksanakan oleh sekolah dan agar semua aktivitas sekolah ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik agar dapat belajar dengan baik, pemerintah perlu merumuskan seperangkat pedoman umum tentang pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Pedoman-pedoman tersebut, terutama, ditujukan untuk menjamin bahwa hasil pendidikan [*educational outcomes*] terevaluasi dengan baik, kebijakan-kebijakan pemerintah dilaksanakan secara efektif, sekolah dioperasikan dalam kerangka yang disetujui pemerintah, dan anggaran dibelanjakan sesuai dengan tujuan[303].

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

3. Partisipasi Masyarakat dan Orang Tua

Dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah, program-program sekolah didukung oleh adanya partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik yang tinggi. Artinya, "perenan masyarakat merupakan salah satu aspek terpenting dalam manajemen berbasis sekolah, dan sistem ini menyediakan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sekolah"[304]. Keterlibatan orang tua dan masyarakat, "tidak hanya mendukung sekolah melalui bantuan dana [keuangan], tetapi bersama-sama atau melalui "*school council*" [dewan sekolah]

---

[302]Rumtini dan Jiyono, *Manajemen Berbasiskan Sekolah* : ...,hlm.83., dan E.Mulyasa, *Manajemen Bernasis Sekolah*,hlm.27.

[303]Rumtini dan Jiyono, *Manajemen Berbasiskan Sekolah* : ..., hlm. 83.

[304]Ibid, hlm. 84.

merumuskan dan mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kualitas[305].

Orang tua dan masyarakat perlu dihimpun dalam satu badan sekolah yang dapat berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan di sekolah. Mungkin selama ini di sekolah-sekolah dikenal dengan BP3 sekolah, tetapi fungsi dan perannya belum maksimal atau fungsi tidak seperti "dewan sekolah" [*school council*]. Artinya, "partisipasi orang tua peserta didik baru terbatas pada pemberian bantuan finansial melalui BP3 yang diajukan sekolah untuk pembiayaan kegiatan sekolah yang dirancang oleh kepala sekolah dan para guru. Tetapi para orang tua peserta didik belum atau mungkin tidak dilibatkan secara langsung untuk bersama-sama dengan pihak sekolah merencanakan dan mengembangkan program-program kegiatan sekolah yang bermanfaat bagi peserta didiknya"[306]. Para orang tua dan masyarakat, selama ini belum dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan program-program pendidikan di sekolah, kecuali hanya "diundang rapat dengan acara penerimaan raport, mendengarkan penjelasan guru wali kelas tentang perkembangan studi peserta didik dan kadang-kadang dimintai bantuan biaya melalui BP3 tersebut.

Secara praktis, pelaksanaan manajemen berbasis sekolah memerlukan keterlibatan secara aktif berbagai kelompok masyarakat dan pihak orang tua peserta didik dalam perencanaan dan pengembangan programn-program pendidikan di sekolah dan pelaksanaanya[307]. Keterlibatan masyarakat dan orang tua bukan hanya pada bantuan finansial, tetapi lebih "menyediakan diri untuk membantu sekolah sebagai nara sumber atau organisator kegiatan sekolah"[308] dan terlibat dalam pemikiran-pemikiran untuk peningkatan kualitas sekolah keseluruhan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik dan pengelolaan sekolah secara umum".

---

[305]Udin S. Sa'ud, *Manajemen Berbasis Sekolah* ..., hlm. 18.
[306]Ibid, hlm. 20.
[307]Ibid, hlm. 20.
[308]Ibid., hlm. 18.

Masyarakat dan orang tua dapat memahami fungsinya untuk mengawasi dan membantu sekolah dalam pengelolaan termasuk dalam kegiatan belajar-mengajar. Tetapi ada hal yang perlu diantisifasi, yaitu dengan besarnya peranan masyarakat dalam pengelolaan sekolah tersebut, mungkin dapat menimbulkan rancunya kepentingan antara sekolah, orang tua, dan masyarakat.[309] Maka untuk mencegah agar tidak terjadi kerancuan kepentingan antara sekolah, orang tua dan masyarakat, maka sekolah atau pemerintah daerah perlu merumuskan batas-batas peranan atau pembagian tugas masing-masing unsur [sekolah, orang tua dan masyarakat] secara rinci, jelas, dan tegas, sehingga unsuru tersebut dapat melaksanakan fungsi dan tugas masing dalam pengelolaan sekolah.

4. Peranan Profesionalisme dan Manajerial

Manajemen berbasis sekolah menuntut perubahan-perubahan tingkah laku kepala sekolah, guru, dan administrasi dalam mengoperasikan sekolah[310]. Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, berpotensi meningkatkan gesekan peranan yang bersifat profesionalisme dan manajerial. Untuk memenuhi persyaratan pelaksanaan manajemen berbasisi sekolah, kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi harus mampu berfungsi secara profesionalisme dan manajerial[311] dalam pengelolaan sekolah. Artinya, kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi sebagai tenaga pelaksana inti program sekolah adalah orang-orang yang memiliki kemampuan dan integritas profesional, mereka harus memiliki pengetahuan yang dalam tentang peserta didik dan prinsip-prinsip pendidikan untuk menjamin bahwa segala keputusan penting yang dibuat oleh sekolah, didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan pendidikan[312].

Kepala sekolah khususnya, perlu mempelajari dengan teliti baik kebijakan dan perioritas pemerintah maupun perioritas yang dibuat oleh sekolah. Pemahaman terhadap kedua jenis perioritas tersebut sangat penting agar peningkatan efisiensi,

---

[309]E. Mulyasa, *Manajemen Bernasis Sekolah*, ..., hlm. 28.

[310]Ibid, hlm. 28.

[311]Rumtini dan Jiyono, *Manajemen Berbasiskan Sekolah* : ..., hlm. 84.

[312]E. Mulyasa, *Manajemen Bernasis Sekolah*, ..., hlm. 28.

mutu, pemerataan, serta supervisi dan monitoring yang direncanakan sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan kerangka kebijakan pemerintah dan tujuan sekolah[313]. Maka untuk kepentingan tersebut, kepala sekolah harus: [a] memiliki kemampuan berkolaborasi dengan guru dan masyarakat sekitar, [b] memiliki wawasan dan teori yang luas tentang pendidikan dan pembelajaran, [c] memiliki kemampuan dan keterampilan untuk dapat menganalisis situasi, [d] memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan yang berkaitan dengan efektivitas pendidikan di sekolah, dan [e] mampu memanfaatkan berbagai peluang, menjadikan tantangan sebagai peluang, serta mengkonseptualkan arah baru untuk perubahan[314]. Dengan demikian, pemahaman tentang sifat profesional dan manajerial bagi kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi sangat penting, agar peningkatan kualitas, mutu, efektivitas dan efisiensi, pemerataan, supervisi, serta monitoring yang direncanakan sekolah, dapat mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan rencana kerangka kebijakan pemerintah dan tujuan sekolah.

Berdasarkan pandangan di atas, untuk kondisi pendidikan Islam, dalam manajemen berbasis sekolah, pelaksanaan program-program sekolah harus didukung dengan kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional. Dengan demikian, kepala sekolah, guru dan tenaga administrasi yang berada dalam lingkup pendidikan Islam adalah mereka-mereka yang memiliki kemampuan dan integritas profesional. Maka untuk memilih atau menunjuk kepala sekolah, harus memiliki memenuhi persyaratan kemampuan profesional dan manajerial, sehingga ia mampu mengelola segala kegiatan sekolah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan sekolah. Dalam proses pengambilan keputusan, "kepala sekolah mampu mengimplementasikan proses *"bottom-up"* secara demokratis, sehingga semua pihak memiliki tanggungjawab terhadap keputusan yang diambil dan dapat melaksanakan keputusan tersebut"[315].

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[313]Rumtini dan Jiyono, *Manajemen Berbasiskan Sekolah* : ..., hlm. 84.

[314]E. Mulyasa, *Manajemen Bernasis Sekolah*, ..., hlm.28.

[315]Udin S. Sa'ud, *Manajemen Berbasis Sekolah* ..., hlm. 18.

Dengan demikian, dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, dibutuhkan sosok kepala sekolah [pimpinan sekolah] yang memiliki kemampuan manajerial dan integritas profesional yang tinggi serta bersifat demokratis dalam proses pengambilan keputusan di sekolah. Sedangkan guru-guru pendidikan agama Islam yang direkrut sekolah adalah guru-guru yang memiliki kompetensi profesional dalam bidangnya masing-masing, integritas profesional, memiliki jiwa pengabdian dan ikhlas sebagai aktivitas *ibadah* yang profesional, sehingga mereka akan mampu bekerja berdasarkan pola kinerja profesional yang disepakati bersama untuk mendukung keberhasilan belajar peserta didik.

5. Pengembangan Profesi

Dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, pemerintah harus menjamin bahwa semua unsur penting tenaga kependidikan [sumber manusia], termasuk tenaga kependidikan dalam lingkungan lembaga-lembaga pendidikan Islam, untuk menerima pengembangan profesi yang diperlukan untuk mengelola sekolah secara efektif. Kerena selama ini, dirasakan lembaga-lembaga pendidikan Islam kurang mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah dalam hal ini Depatemen Pendidikan nasional, terhadap upaya pengembangan dan peningkatan profesi tenaga kependidikannya.

Agar sekolah dapat mengambil manfaat yang ditawarkan manajemen berbasis sekolah, perlu dikembangkan pusat pengembangan profesi, yang berfungsi sebagai penyedian jasa pelatihan bagi tenaga kependidikan dan tenaga kependidikan Islam untuk manajemen berbasis sekolah. Selain itu, sebaiknya sekolah dan masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pelaksanaan manajemen berbasisi sekolah senidi mungkin[316].

c. Manajemen Pendidikan Tinggi Islam

Di dalam jenjang pendidikan yang selama ini di anut di Indonesia, adalah meliputi jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, sudah waktunya dipikirkan upaya-upaya desentralisasi. Desentralisasi jenjang pendidikan

[316]E. Mulyasa, *Manajemen Bernasis Sekolah*, hlm.29,dan Rumtini dan Jiyono, *Manajemen Berbasiskan Sekolah*:,hlm. 84-85.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dapat dipilih apakah semua jenjang pendidikan dapat ditangani oleh pemerintah daerah, atau hanya terbatas pada jenjang pendidikan dasar dan menengah[317]. Salah satu paradigma baru lembaga pendidikan tinggi adalah menekankan kemandirian lebih besar dalam pengelolaan atau otonomi. Dengan cara pandangan ini memberikan keluasan gerak dan kebijakan bagi civitas akademika perguruan tinggi dalam menetapkan program-program dan arah kebijakan pendidikan serta mengembangkan inovasi dalam penyelenggaraan pendidikan[318].

Pemberian otonomi pada perguruan tinggi merupakan upaya desentralisasi pendidikan. Tetapi dalam pelaksanaan otonomi terasa belum sempurna, karena masih banyak urusan dan kewenangan yang seharusnya dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan tinggi [pimpinannya], masih menggantungkan kebijaksanaan dari pusat[319]. Misalnya saja, pembukaan program baru yang seharusnya lebih diketahui urgensinya oleh perguruan tinggi, tetapi dalam kenyataannya masih menunggu kebijaksanaan dan keputusan dari Departemen Pendidikan Nasional atau Depertemen Agama. Sebenarnya kelayakan pembuakan suatu program studi merupakan pertimbangan dari perguruan tinggi masing-masing, bukan dari dari pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama, menentukan kebijaksanaan yang memuat rambu-rambu umum sebagai persyaratan membuka suatu program studi baru.

Dalam kaitan dengan kehidupan politik, yaitu kondisi masyarakat menuntut perubahan diberbagai sektor kehidupan, termasuk pendidikan untuk menuju Indonesia baru atau masyarakat madani Indonesia. Untuk itu, "perguruan tinggi dihadapkan dengan sebuah dilema, yaitu disatu sisi perguruan tinggi dituntut untuk melakukan fungsi dan tugasnya yang antara lain di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat"[320], yang apabila dilaksanakan akan menghasilkan lususan [manusia terdidik], ilmu pengetahuan baru [hasil penelitian] dan jasa pada masyarakat [hasil

---

[317]Miftah Thoha, *Desentralisasi Pendidikan*, hlm. 6.

[318]Hanah Fatah Natsir.2002,"*Strategi Pembangunan Pendidikan di Indonesia*", http://www.kopertis.or.id/media/strategi. htm.

[319]Miftah Thoha, *Desentralisasi Pendidikan*, hlm. 6.

[320]Imam Syafi'ie, *Manajemen Pendidikan Islam...*, hlm. 68.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pengabdian kepada masyarakat] dan apabila dicermati fungsi ini lebih bersifat otonomi dalam pengelolaan pendidikan. Tetapi disisi lain, pendidikan tinggi diatur dengan peraturan dan birokrasi yang membatasinya, sistem penilaian berupa status [disamakan, diakui, terdaftar], akreditasi, sertifikasi, serta pengakuan lebih ditentukan oleh pemerintah, sehingga kreativitas lembaga-lembaga pendidikan sangat terbatasi dalam mengembangkan pendidikan.

Sebenarnya masyarakat sebagai peyandang aliran sumberdaya yang memungkinkan terselenggaranya perguruan tinggi, berhak untuk memperoleh informasi dan menuntut kualitas kinerja perguruan tinggi. Sistem penilaian, "akreditasi, sertifikasi, pengakuan akan lebih banyak ditentukan oleh masyarakat profesional. Dengan kata lain masyarakat profesional yang akan menjadi penilai (*quality control*) dari lembaga pendidikan yang ada. Kontorl dilakukan dari kemampuan para alumni, sehingga setiap lembaga pendidikan/dosen/guru secara individual akan dinilai langsung oleh masyarakat profesional"[321]. Artinya penilaian terhadap *"quality assurance and accountability of the sechool programs"*[322] dilaksanakan oleh suatu lembaga independen dan bukan lembaga pemerintah [Depdiknas]. Lambaga akreditasi pendidikan seharusnya dibentuk oleh masyarakat sebagai lembaga swadaya masyarakat yang terdiri dari kumpulan para ahli di bidang pendidikan dan ilmu-ilmu lain yang relevan. Lembaga ini bekerja sebagai lembaga profesional di bidang akreditasi dan setiap tahun melakukan akreditasi untuk semua Perguruan Tinggi umum dan Perguruan Tinggi Agama baik negeri maupun swasta[323]. Lembaga akreditasi pendidikan dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat yang mandiri [independent] yang dapat menilai dan memverifikasi kinerja setiap perguruan tinggi yang diselenggarakan masyarakat. Badan akreditasi mandiri ini, sebagai cerminan pemberdayaan masyarakat di dalam monitoring dan evaluai pendidikan dan lembaga tersebut akan memperoleh kredibilitas yang tinggi dari masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[321]Onno W. Purbo, *Tantangan Bagi Pendidikan Indonesia*, 16 Mei 2002.

[322]Udin S. Sa'ud, *Manajemen Berbasis Sekolah...*, hlm. 17.

[323]Miftah Thoha, *Desentralisasi Pendidikan*, hlm. 7.

Kemudian dalam manajemen pendidikan tinggi, pendidikan Islam dalam menerapkan dan pengelolaan manajemen pendidikannya perlu memberanikan untuk mengadopsi sistem manajemen *ISO* 9000 [*The International Organization for Standardizatior*], sehingga, dapat "mengambil sertifikasi global dari lembaga internasional, jika lembaga pendidikan Islam menginginkan untuk kompetisi global"[324]. Untuk itu, lembaga-lembaga pendidikan Islam harus mulai melakukan *re-engineering* manajemen pendidikan tinggi, untuk mengakomodasi perkembangan. Manajemen pendidikan tinggi Islam mulai menghilangkan batas fisik kampus dalam operasional pendidikan tinggi, dengan mengadopsi mahasiswa *part-time*, mahasiswa profesional. Sebagai contoh di sini dapat dibayangkan kalau mahasiswa IAIN dan UII Yogyakarta tidak hanya berada di Yogyakarta, tetapi juga berada di Irian Jaya, di Maluku, di Aceh, di Padang atau mungkin juga kuliah-kuliah hanya melalui tempat kos di kota Yogyakarta sendiri. *Re-engineering* manajemen pendidikan tinggi untuk menghilangkan dimensi waktu dan membuat proses pendidikan menjadi lebih adaptif terhadap perubahan, adaptif terhadap perkembangan kemajuan bidang eloktronik komputer dan internet. Di sini waktu belajar siswa/mahasiswa menjadi lebih fleksibel, tidak harus seorang mahasiswa D.O. hanya karena tidak tepat waktu misalnya. Selain itu, *re-engineering* otoritas perguruan tinggi untuk melihat sebuah perguruan tinggi sebagai sebuah *corporate,* kemudian otoritas finansial dan *open management* distribusi yang dapat diaudit[325]. Maka, diperlukan keberanian untuk melakukan perubahan manajemen pendidikan tinggi Islam yang didukung sistem pendidikannya, kurikulum, sistem evaluasi, sumber daya, fasilitas, pendanaan yang memadai dan handal, sehingga mampu mengelola perguruan tinggi dengan baik.

Maka untuk dapat menyelenggarakan pengelolaan [manajemen] perguruan tinggi Islam yang baik, pengambil kebijakan manajerial di perguruan tinggi perlu memperhatikan **kualitas, otonomi, akuntabitas** [pertanggungjawaban], dan **evaluasi**

---

[324]Ibid, 16 Mei 2002.

[325]Lihat, Onno W. Purbo, *Tantangan Bagi Pendidikan Indonesia*, 16 Mei 2002.

dan **akreditasi**[326] yang dapat digunakan sebagai komponen acuan dasar atau paradigma penataan sistem pendidikan tinggi. Komponen tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

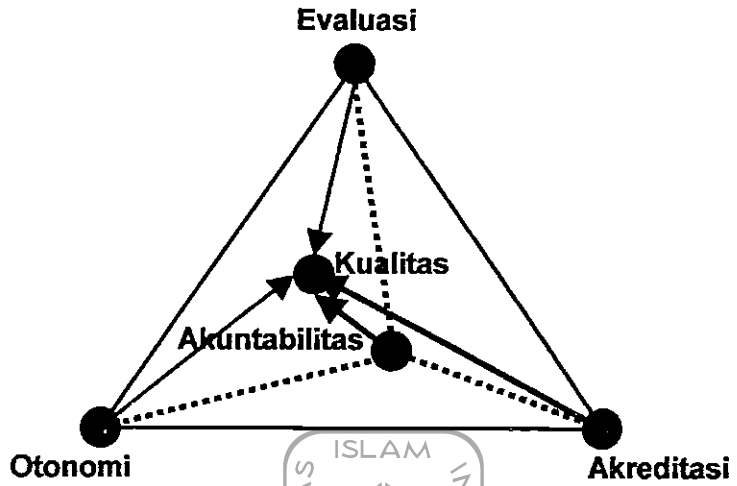

Gambar 3
Komponen Acua Dasar Penyelenggaraan Manajemen PT

Komponen acuan dasar atau paradigma penataan sistem perguruan tinggi, dapat dideskripsikan, sebagai berikut: [1] Kualitas, merupakan hasil dan kinerja perguruan tinggi, yang harus selalu mengacu pada kualitas dan pebaikan kualitas secara kontinu [*continu improvement*] atau berkelanjutan, karena perguruan tinggi sebagai wahana yang mengupayakan peningkatan kualitas hidup manusia. [2] Kualitas secara kontinu atau berkelanjutan, harus dilandasi dengan kreativitas, inovasi dan produktivitas sumber daya sivitas akademika perguruan tinggi yang dapat dirangsang dan berasas pada pola manajemen otonomi. [3] Otonomi perguruan tinggi harus senafas dengan akuntabilitas [pertanggungjawaban] mengenai penyelenggaraan pendidikan, kinerja dan hasil perguruan tinggi. [4] Masyarakat dapat memperoleh informasi yang handal dan syahih mengenai penyelenggaraan, kinerja dan hasil perguruan tinggi yang diaktualisasi melalui proses akreditas oleh Badan Akreditas Nasional yang independent. [5] Proses evaluasi secara kontinu, merupakan tindakan manajerial utama yang melandasi pengambil kebijakan, keputusan dan perencana di perguruan tinggi.

[326] "Paradigma Penataan Sistem Pendidikan Tinggi", From:http://www.dikti.org/. 12,6,2002.

Komponen paradigma manajemen perguruan tinggi tersebut di atas, sebenarnya secara tersirat dan tersurat disebut dalam UU No.2/1989 dan PP No.30/1990 dan komponen tersebut pada umumnya dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan tinggi yang baik. Maka paling tidak, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kesyahihan paradigma manajemen pendidikan tinggi dengan unsur otonomi, akuntabilitas, akreditas dan evaluasi yang ditujukan sebagai usaha peningkatan dan perbaikan kualitas secara kontinu [*continu improvement*] atau perbaikan berkelanjutan dapat digunakan sebagai titik totak penataan sistem pendidikan tinggi Islam.

Kemudian, pada era reformasi, globalisasi, desentralisasi, dan era masyarakat madani Indonesia diperlukan sumber daya pendidikan yang handal, berkualitas, dan profesional. Sumber daya manusia yang kurang profesional akan menghambat pelaksanaan sistem pendidikan, maka penempatan sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya menyebabkan pelaksanaan pendidikan tidak profesional. Banyak tenaga kependidikan yang latar belakang pendidikannya tidak relevan di dunia kerja yang ditekuninya, terutama di lingkungan Depdiknas dan Departemen Agama, baik di instansi vertikal maupun horisontal[327].

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

d. Sumber daya Pendidikan Islam

Problem sumber daya kependidikan secara umum merupakan maslaah pokok yang dihadapi pendidikan Islam adalah rendahnya kualitas tenaga kependidikan. Motivasi menjadi tenaga pendidi [guru] di kebanyakan sekolah-sekolah Islam selam ini dikarenakan faktor pengabdian dan keikhlasan, sedangkan apabila dicermati dari sisi kemampuan dan kecakapan disiplin ilmu dikatakan masih rendah. Hal ini telah menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan Islam, sehingga mengalami kesulitan untuk memiliki keunggulan kompetitif. Masalah pokok dalam pendidikan Islam

[327]Mifta Thoha, *Desentralisasi Pendidikan*, hlm. 12.

pada dasarnya adalah masalah yang terkait dengan faktor kualitas tenaga guru[328]. Fazlur Rahman, menyatakan Indonesia, seperti halnya negeri-negeri Muslim besar lainnya, juga menghadapi masalah pokok dalam modernisasi pendidikan Islam: yaitu masalah kelangkaan tenaga yang memadai untuk mengajar dan melakukan riset, dan beliau menyatakan bagaimana memproduksi tenaga seperti itu[329], yang menjadi tantang dan persolan bagi pendidikan tinggi Islam.

Dengan demikian, diperlukan sumber daya pendidikan yang mampu menjawab tantangan tersebut. Oleh karena itu, tuntutan sumber daya pendidikan yang berkualitas dan profesional menjadi suatu keharusan pada era masyarakat madani Indonesia dan dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah juga menuntut sumber daya [pimpinan, guru, dan tenaga administrasi] yang memiliki kemampuan profesional dan integritas dalam mengelola pendidikan. Artinya, pelaksanaan pelaksanaan program-program pendidikan Islam didukung dengan kepemimpinan yang demokratis dan profesional, guru-guru yang profesional dalam bidangnya masing-masing, setra tenaga administrasi profesional dalam pengelolaan administrasi pendidikan. Laporan Bank Dunia [1999], bahwa salah satu penyebab makin menurunnya mutu pendidikan [persekolahan] di Indonesia adalah "kurang profesionalnya" para kepala sekolah sebagai manajer pendidikan di tingkat lapangan.

Oleh karena itu, program peningkatan kemampuan sumber daya pendidikan berupa *training for trainers* atau kemampuan untuk belajar terus-menurut untuk meningkatkan kualitas bagi para pendidik [guru dan dosen] merupakan suatu fokus dan tuntutan yang perlu diperhatikan. Dengan kata lain, lembaga-lembaga pendidikan Islam harus melakukan investasi secara periodik bagi para guru dan dosennya jika ingin tetap memimpin di dunia pendidikan, karena apabila gagal dalam investasi guru

---

[328]Asep Saeful Mimbar dan Agus Sulthonie, *Tantangan Madrasah Dewasa Ini*, Pikiran Rakyat, Artikel Edisi 25 Juli 2001, Form: http://www.pikiran-rakyat.com/prcetak/072001/25/0801.htm. 2002.

[329]Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas*,... hlm. 151.

dan dosen akan berakibat patal dalam persaingan merebut mahasiswa terbaiknya. Pengakuan terhadap kemampuan guru dan dosen, bukan datang dari jalur struktural/jabatan dan bukan juga dari jenjang karir fungsional tradisional [seperti asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar] yang *rigid*, tetapi reward dan penghargaan yang lebih besar akan lebih banyak diperoleh dari pengakuan yang diberikan langsung oleh masyarakat, karena kemampuan akademik dan profesionalisme guru dan dosen[330] itu sendiri. Untuk itu semuanya akan dikembali kepada masyarakat profesional yang akan menilai kualitas seseorang. Menurut Imam Syafi'ie, kuatnya peranan birokrasi pada pendidikan tinggi seringkali membuat orang-orang yang bekerja di perguruan tinggi sebagai sumber ordinal birokrasi. Lebih lanjut, menurutnya peraturan yang berlaku di lembaga non-pendidikan diberlakukan pada perguruan tinggi, kewenangan untuk membimbing skripsi, tesis, dan disertasi diatur oleh pangkat dan bukan kemampuan intelektual seseorang[331].

Perguruan tinggi perlu diberi otonomi untuk mengatur dirinya sendiri. Lembaga-lembaga pendidikan Islam sebagai institusi ilmiah semestinya bersifat otonom, mempunyai kebebasan akademik dalam mengembangkan visi dan misinya dalam memlihara, melestarikan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, sehingga peserta didik sebagai produk menjadi handal dalam penguasaan ilmu pengetahuan pendidikan Islam. Idealnya pendidikan Islam dalam usaha menjawab tantang perubahan, harus dilengkapi dengan tenaga pengajar yang berkualitas, staf karyawan yang terampil, mempunyai program unggulan, relevan dan layak pasar, ditunjang dengan laboratorium dan perpustakaan yang memadai, serta ditopang dengan sistem manajemen mutu ISO 9000, dan bila perlu mengambil sertifikasi global dari lembaga internasional, sehingga pendidikan Islam tidak akan menjadi pendidikan yang *marginal* dalam persaingan pendidikan di Indonesia.

---

[330]Lihat, Onno W. Purbo, *Tantangan Bagi Pendidikan Indonesia*, 16 Mei 2002.

[331]Imam Syafi'ie, 2001, *Manajemen Pendidikan Islam...*, hlm. 68.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pendidikan Islam, harus mulai berbenah dan mengelola sistem pendidikannya secara profesional, sehingga "label lembaga pendidikan tradisional" dirubah ke lembaga pendidikan yang modern dan profesional dengan meningkatkan terus menerus mutu sumber daya pendidikannya, mutu kerja, mutu proses dan pengelolaan, mutu produkmnya dan mutu pelayanan [*service quality*] yang didasarkan pada kesadaran, terarah, dan terencana, serta prinsip manajemen yang dibangun berorientasi pada pelanggang baik eksternal maupun internal. Maka apabila langkah-langkah ini dilakukan secara terencana dan serius, pendidikan Islam akan menjadi pendidikan yang berkualitas dan diminati peserta didik dan memiliki daya jual.

C. Aktualisasi Pendidikan Islam dalam Masyakat Madani Indonesia

Pada uraian terdahulu, telah dijelaskan bahwa masyarakat madani merupakan suatu masyarakat yang sadar akan hak-hak warga masyarakat dan melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, masyarakat yang terbuka, toleran, menghargai hak asasi manusia dan yang paling menonjol dalam ciri masyarakat tersebut adalah demokratis. Wujud dari masyarakat demokrasi, setiap warganya mengetahui dan sadar akan hak-hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat dan warga negara yang bertanggungjawab. Dengan demikian, diperlukan cara-cara tertentu untuk dapat mewujudkan masyarakat tersebut dan salah satu cara untuk mewujudkan masyarakat madani di Indonesia adalah melakukan demokratisasi pendidikan, sebab pendidikan itu sendiri merupakan sarana untuk melakukan internalisasi nilai-nilai demokrasi kepada masyarakat.

Fungsi dan peran pendidikan sangat diharapkan bagi tewujudnya masyarakat madani Indonesia, karena pendidikan menyandang misi dari keseluruhan aspek kebutuhan hidup manusia serta perubahan-perubahan yang terjadi. Pendidikan senantiasa mengundang pemikiran dan kajian, baik secara konseptual maupun operasional, sehingga diperoleh relevansi dan kemampuan untuk menjawab

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

tantangan serta memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh umat manusia[332]. Maka untuk menjawab persoalan tersebut, perlu dirumuskan suatu perencanaan pendidikan dan pelatihan yang strategi, efektif dan efisien dalam rangka membangun sumber daya manusia muslim Indonesia yang cakap, trampil, inovatif serta memiliki semangat kompetitif dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu, dalam pembahasan ini lebih difokuskan pada: [1] upaya pendidikan Islam bagi pemberdayaan manusia [proses humanisasi] dan masyarakat unggul, [2] upaya demokratisasi pendidikan Islam, [3] model-model pendidikan Islam alternatif, dan [4] peran pendidikan Islam dalam masyarakat madani Indonesia. Peranan pendidikan Islam menuju masyarakat madani Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut :

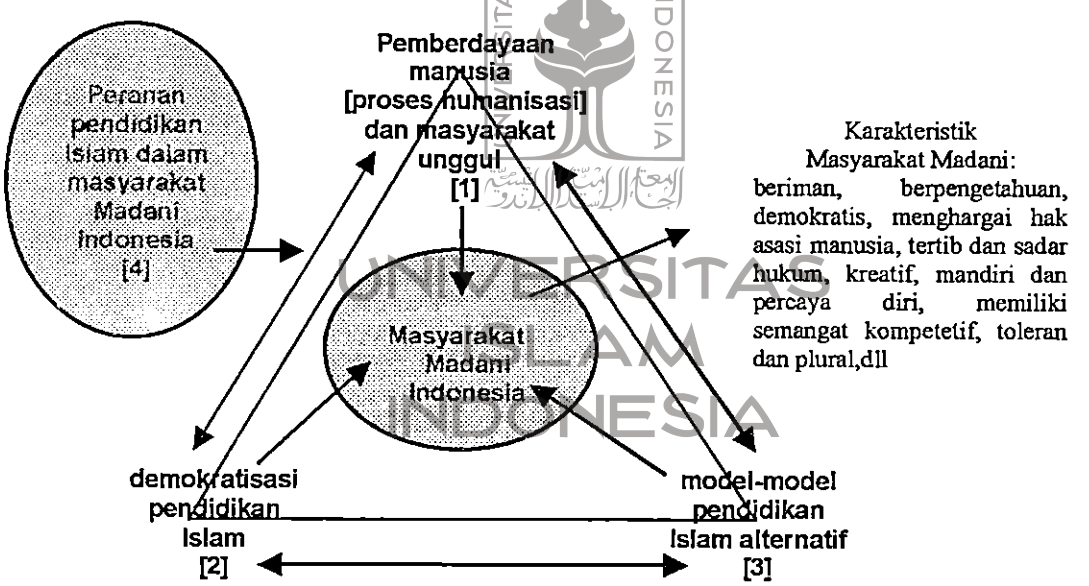

Gambar : 4
Peran Pendidikan Islam dalam Masyarakat Madani Indonesia

Pendidikan Islam menuju masyarakat madani, diperlukan proses permeberdayaan manusia [proses humanisasi] dan proses ini sangat terkait dengan

[332]A. Malik Fadjar, *Reorientasi Pendidikan Islam*, hlm. 25-26.

peranan pendidikan. Proses pendidikan harus dibangun atas dasar demokratisasi pendidikan, memberdayakan potensi manusia, berorientasi untuk mewujudkan manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kemahiran, professional, mewujudkan kebebasan, membangun kreatifitas dan inisiatif yang didasarkan pada nilai-nilai *ilahiyah.* Dengan demikian, peranan dan proses pendidikan dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Pendidikan Islam Bagi Pemberdayakan Manusia [Proses Humanisasi] dan Masyarakat Unggul Menuju Msyarakat Madani Indionesia

Pembicaraan tentang manusia, merupakan kunci yang paling strategis dalam upaya membangun menuju masyarakat mdani Indonesia. Maka, konsep dan proses pendidikan dalam hal ini pendidikan Islam, harus dapat melihat kedudukan manusia sebagai subjek didik yang memiliki potensi untuk diberdayakan dan dikembangkan. Artinya pendidikan merupakan proses humanisasi dengan menghargai segala potensi yang dimiliki manusia. Proses humanisasi dalam pendidikan, dimaksudkan sebagai upaya megembangkan manusia sebagai makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang dengan segala potensi [*fitrah*] yang ada padanya. Manusia dapat dibesarkan [potensi jasmania] dan diberdayakan [potensi rohaniah] agar dapat berdiri sendiri serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam proses humanisasi, berarti menusia bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologisnya saja, tetapi juga ia harus bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri dan terhadap kesejahteraan masyarakatnya[333]. Maka dalam konteks ini, "manusia harus belajar untuk bertanggungjawab, mengenal dan menghayati serta melaksanakan nilai-nilai moral [*knowing is doing*]., sebab tanpa tanggungjawab dan melaksanakan nilai-nilai moral tidak mungkin akan tercipta suatu masyarakat yang aman dan tenteram di mana kepribadian dapat berkembang"[334]. Dalam al-Qur'an,

[333]N.Drijarkara,1969, *Filsafat Manusia*, dalam H.A.R.Tilaar,*Pendidikan,Kebudayaan...*, hlm.171.
[334]H.A.R. Tilaah, *Pendidikan, Kebudayaan, dan...*, hlm. 171.

manusia dianggap sebagai makhluk yang memiliki potensi yang tidak terbatas, sebagai makhluk Allah yang paling sempurna [QS. 32: 7], memiliki potensi [*fitrah*] bawaan [QS.30:30] yang tidak terbatas, dapat diberdayakan, dapat dididik dan mendidik [melakukan proses mengajar] sehingga manusia menjadi makhluk terdidik dan unggul dalam kehidupnya.

Proses humanisasi "merupakan proses yang terbuka, di mana manusia diberdayakan dan dioptimalkan potensi [*fitrah*] bawaannya sehingga manusia dapat menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan, teknologi serta penerapannya dan penghayatan pada seni serta budaya, dan sebagainya"[335]. Ini berarti, peran dan fungsi pendidikan sangat senteral dalam upaya proses humanisasi tersebut. Pendidikan dalam hal ini pendidikan Islam, harus dapat meletakkan kedudukan manusia sebagai subjek dalam proses pembinaan dan pengembangan potensi [*fitrah*] bawaannya. Dengan demikian dalam proses humanisasi, sangat dibutuhkan konsep pendidikan yang betul-betul dapat memberi gambaran yang komprehensip sebagai solusi dalam upaya memanusiakan manusia [*humanisasi*] dengan menekankan keharmonisan hubungan baik sesama manusia, masyarakat, maupun dengan lingkungan yang didasarkan pada nilai-nilai normatif *ilahiyah*.

Pendidikan dalam konsep Islam sebenarnya telah menetapkan dasar dan bertujuan untuk membangun manusia sebagai *insan kamil,* yaitu manusia paripurna, integral, totalitas dalam membangun hidup dan kehidupannya. Pendidikan Islam, meletakan kedudukan manusia sangat senteral sebagai subjek didik dalam upaya pembinaan dan pengembangannnya. Proses pendidikan berusaha untuk "melatih *sensibilitas* manusia [peserta didik] sedemikian rupa, sehingga dalam perilaku mereka terhadap kehidupan, langkah-langkah dan keputusan, begitu pula pendekatan mereka terhadap semua ilmu pengetahuan diatur dan didasarkan pada nilai-nilai etika Islam. Mereka akan teriatih dan secara mental yang sangat disiplin, sehingga pengetahuan

[335]Ibid, hlm. 171.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

yang dimiliki bukan hanya untuk pemuasan rasa ingin tahu intelektuan atau untuk manfaat yang sifat duniawi, tetapi juga untuk tumbuh sebagai makhluk rasional, makhluk yang berbudi, bermoral dan spiritual dalam kehidupannya secara menyeluruh bagi kesejahteraan masyarakat dan umat manusia[336]. Proses pendidikan harus berupaya mengembangkan manusia agar memiliki pengetahuan, keterampilan, spritual, dan berpikir rasional, sehingga tumbuh perilaku manusia yang mencintai demokrasi, perdamaian, hidup selaras, stabil, berbudi dan berbudaya sebagai makhluk Tuhan dan makhluk sosial yang hidup bersama manusia lain dengan tujuan memakmurkan, mengontrol dan mengatur alam semesta berdasarkan otoritas Tuhan. Artinya proses pendidikan Islam akan menghasilkan manusia yang beramal *ilahiyah* dan berilmu *ilahiyah* sebagai manusia yang unggul [*insan kamil*]. Dengan dasar ini, pengembangan konsep dasar pendidikan Islam harus bersumber dari konsep *ilahiyah* [ketuhanan], konsep *insaniyah* [*humanisme*] dan konsep lingkungan yang integratif dan seimbang.

A. Malik Fadjar, menyatakan bahwa manusia sebagai makhluk pengemban atau pemegang amanah *khalifahan* mempunyai potensi yang luar biasa besarnya, sehingga dapat mendayagunakan alam dan sesama manusia dalam rangka membangun peradaba[337] berdasarkan nilai-nilai *ilahiyah*. Potensi [*fitrah*] bawaan manusia itu, menyangkut dengan potensi *ilahiyah* [ketuhanan] dan potensi kehidupan yang dilengkapi dengan hati nurani, akal pikirannya [cipta], rasa, karsa, serta dilengkapi dengan kemampuan kebebasan. Manusia juga memiliki kemampuan kebebasan untuk berbuat sesuatu sesuai dengan pilihan-pilihannya [*taqwa* dan *fujur*] yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, makhluk fungsional, makhluk bercirikan etika-religius, makhluk berbudaya, yang

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[336]Ali Ashraf, *Horison Baru Pendidikan Islam*, terj. hlm. 23.
[337]A. Malik Fadjar, *Reorientasi Pendidikan Islam*, hlm. 42.

kesemuanya itu merupakan nilai-nilai yang akan terkonstruksi dalam hidup dan kehidupan manusia itu sendiri.

Manusia sebagi makhluk Tuhan yang memiliki potensi [*fitrah*] bawaan ini bersifat integral-holistik. Dengan demikian pengembangan sistem pendidikan harus berorientasi kepada potensi [*fitrah*] tersebut, baik menyangkut dengan potensi *ukhrawi* dan *duniawi* sekaligus secara integral. Pengembangan sistem pendidikan Islam tidak hanya berorientasi kepada persoalah *ukhrawi* [*akhirat*] saja, tetapi harus terintegrasi dengan persoalan-persoalan *duniawi*, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, sosial kemasyarakatan, dan sebaginya. Apabila konsep pendidikan Islam dapat mengintegrasikan persoalan *ukhrawi* dengan *duniawi,* maka konsep pendidikan Islam akan tampil berbeda dengan konsep pendidikan lainnya, karena secara integratif dapat mengembangkan pendidikan *ukrawiyah* dan *duniawiyah* secara integral sekaligus. Pandangan ini, didasarkan pada konsep ajaran Islam, bahwa ajaran Islam "tidak menghendaki penghayatan agama yang mengarah pada pelarian diri dari kehidupan duniawi, tetapi bahkan sebaliknya, Islam mengajarkan *asketisme* duniawi, yaitu memakmurkan dan memajukan kehidupan dunia, tanpa tenggelam dalam kenikmatan semu"[338].

Uraian di atas, menegaskan bahwa dalam sistem pendidikan Islam "manusia dipahami sebagai *zat theomorfis*, maksudnya, manusia berorientasi untuk menjadi pribadi yang bergerak di antara dua titik ekstrem yaitu antara *taqwa* dan *fujur,* antara Allah dan setan dan manusia juga memiliki kehendak bebas. Artinya, manusia mampu membentuk nasibnya sendiri dan bertanggungjawab, sehingga manusia mampu menerima amanah khusus dari Allah"[339]. Qur'an memberikan gambaran, bahwa para malaikat bersujud kepadanya [Adam], karena ia memiliki potensi yang integral, sehingga manusia mampu menjadi *khalifah fil ardli.* Allah menciptakan dan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[338]Ibid, hlm. 45.

[339]Ali Syari'ati, *Tentang Sosiologi Islam,* Terj. Saifullah Mahyuddin, (Yogyakarta: Ananda, 1982), hlm.125.

melengkapi manusia dengan potensi atau daya-daya yang ada dalam dirinya, kemudian perkembangan selanjutnya terserah pada manusia sendiri[340] dan manusia dapat menentukan nasibnya sendiri. Tugas manusialah yang dapat memberdayakan potensi-potensi tersebut, karena daya-daya untuk mewujudkan kehendak itu telah ada dalam diri manusia sebelum ada perbuatan. Maka dari sini, posisi dan peran pendidikan dalam sistem pendidikan Islam adalah sangat senteral untuk memberdayakan dan mengaktualisasikan potensi *fitrah,* melalui pendidikan sehingga memperoleh ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan, seni dan budaya berdarkan nilai-nilai *ilahiyah*.

Dalam al-Qur'an, Allah telah memberikan postulat-postulat atau aksioma sebagai kunci dalam memahami, mengembangkan, dan memberyagunakan manusia, antara lain: [1] Allah telah memerintahkan manusia agar senantiasa berpikir dan menggunakan akal pikirannya dalam memcahkan persoalan-persoalan hidup yang dihadapi, seperti berpolitik, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Ini artinya, Allah telah menyediakan potensi [*fitrah*] pada manusia untuk diberdayakan, sehingga menjadi manusia yang fungsional. [2] Allah telah melakukan liberalisasi dalam bidang ilmu dan semua manusia [khususnya muslim] baik laki-laki maupun perempuan diwajibkan mencari ilmu kepada siapa saja dan di mana saja [Hadis]. [3] Dengan potensi akal, manusia diperintahkan untuk membuktikan kekuasaan Allah dengan cara mengkaji dan mengolah alam demi keperluan hidupnya dan dilarang berbuat semena-mena, kerusakan dan pertumpahan darah. Allah telah memberikan pertanyaan-pertanyaan penting dalam al-Qur'an tentang potensi-potensi besar yang ada di darat, laut dan angkasa. Al-Qur'an memberikan postulat-postulat atau aksioma sebagai kunci bagi manusia untuk memahami dan mendayagunakan alam. [4] Manusia diperintahkan untuk *fantasirun fil ardl* [mengembara di muka bumi] dalam rangka mencari ilmu pengetahuan. Ini artinya, setiap manusia, masyarakat, dan bangsa, oleh

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[340]Harun Nasution, *Teologi Islam, Aliran-aliran,Sejarah,Analisis Perbandingan*, (Jakarta: UI Press,1983),hlm.102.

Allah diberi keistimewaan masing-masing, ilmu pengetahuan dan perkembangan pemikiran umat manusia tidak berhenti. [5] Kecintaan terhadap informasi atau pengetahuan yang akhimya menumbuhkan kecintaan kepada kegiatan belajar[341]. Al-Qur'an pada ayat pertama kali turun adalah perintah *iqra'*, mengandung perintah untuk membaca dan belajar yang berorientasi pada upaya mengkaji tentang hakekat Tuhan [*ilahiyah*], mengkaji hakekat manusia [*insaniyah*], mengkaji penomena-penomena alam semesta [*sunatullah*], dan hubungan antara ketiganya serta fungsinya masing-masing secara terus menerus dalam rangka mewujudkan manusia dan masyarakat yang unggul dan terbaik dalam kehidupan.

Uraian di atas, menegaskan bahawa dengan potensi [*fitrah*] tersebut, manusia memiliki kecenderungan untuk dibina dan dikembangkan sesuai dengan potensinya, karakteristiknya dan hakekat kemanusian, sehingga dapat fungsional dalam kehidupan yang betul-betul eksis sebagai pemegang amanah *khalifah fil ardl*. Untuk itu, pendidikan yang berdasarkan konsep dasar pendidikan Islam, harus memandang manuasi sebagai makhluk pemegang amanah *khalifah fil ardl,* manusia dapat didik, dilatih dan diberdayakan untuk melahirkan manusia beriman, manusia yang sempuma, bermoral tinggi [anggung dalam moralnya], memiliki pengetahuan, berwawasan luas, sebagai manipestasi dari liberalisasi Allah terhadap kewajiban seorang muslim untuk menuntut ilmu. Hal ini diujudkan dengan perintah Allah untuk membaca [*iqra'*] dan *fantasirun fil ardl* dalam rangka eksplorasi ilmu pengetahuan. Selain itu, *m*anusia juga berkemampuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai spritual *ilahiyah* dengan nilai-nilai kultural *duniyawiyah* dalam konstruksi yang kokoh, seimbang, harmonis, dinamis dan kreatif dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, potret manusia semacam inilah yang dikehendaki dalam bangunan

[341]A. Malik Fadjar, *Reorientasi Pendidikan Islam*, hlm. 43-44.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pendidikan Islam berdasarkan konsep potensi [*fitrah*] yang bernilai *ilahiyah* yang aktual dalam hidup dan kehidupan manusia.

Pengembangan pendidikan Islam, harus tetap memperhatikan aspek potensi dasar manusia yang ideal dan fungsional tersebut, karena semua potensi yang dimiliki manusia akan menjadi sasaran pendidikan untuk dikembangkan melalui kondisi-kondisi yang diciptakan dengan memberikan rangsangan sesuai dengan kondisi yang diinginkan dan dikehndaki. Kondisi ini mungkin saja dapat mempengaruhi potensi, baik yang tercipta melalui proses alamiah maupun situasi yang diciptakan dalam proses pendidikan. Dengan pengembangan potensi tersebut, memungkinkan manusia tumbuh dan berkembang secara utuh, harmonis, integratif sesuai dengan nilai-nilai dan hakekat humanisasi. Maka, melalui proses pendidikan, dapat "menimbulkan pertumbuhan yang seimbang dari kepribadian total manusia melalui latihan spritual *ilahiyah*, intelek, rasional diri, perasaan dan kepekaan terhadap perkembangan manusia. Karena itu, proses pendidikan seharusnya menyediakan dan menciptakan jalan bagi pertumbuhan manusia dalam segala aspeknya, yaitu aspek spritual *ilahiyah*, intelektual, imaginatif, fisikal, ilmiah, linguistik"[342], baik secara individual maupun secara kolektif serta dapat memotivasi semua aspek tersebut untuk mencapai kebaikan dan kesempurnaan manusia [*insan kamil*].

Sejalan dengan pandangan di atas, maka pendidikan sesuai dengan fungsi dan perannya diharapkan mampu melahirkan manusia dan masyarakat yang memiliki kemampuan spritual, berilmu, bermoral, memiliki kemampuan profesional, kemampuan inovasi dalam membangun dan menata kehidupan dunia yang *rahmatan lil 'alamin*. Usman Abu Bakar, menyatakan bahwa *output* pendidikan Islam sekurang-kurangnya diharapkan mampu melahirkan manusia yang memiliki kemampuan spritual *ilahiyah* yang tinggi, ketinggian ilmu, memiliki komitmen terhadap profesionalisme, memiliki akhlak al-karimah, yaitu akhlak terhadap dirinya, akhlak

[342] Ali Ashraf, *Horison Baru Pendidikan*...., hlm. 2.

terhadap Allah Sang Pencipta-Nya dan akhlak terhadap makhluk-Nya yang mencerminkan "keanggunan moralitas" manusia dalam keluarga, masyarakat dan berbangsa yang merupakan ciri masyarakat madani[343]. Jadi manusia dan masyarakat yang unggul adalah manusia dan masyarakat yang "melakukan liberalisasi dalam bidang berpikir dan ilmu pengetahuan. Masyarakat dan bangsa yang tidak menganggap dirinya paling maju, bangsa yang terbuka untuk menerima ilmu dari mana saja, bangsa agresif dan mendunia. Bukan bangsa yang tertutup, arogan, dan mengaggap ilmu orang lain sebagai ilmu sekuler, ilmu kafir, dan sebagainnya"[344].

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa "manusia" dan "masyarakat" yang unggul dalam masyarakat madani Indonesia, yaitu: [1] Manusia dalam menjalankan hidupnya merupakan pengabdian kepada Allah semata [QS.51:56], karena Islam mengajarkan hidup dan seluruh aspeknya harus diniatkan sebagai pengabdian [ibdah] kepada Allah. [2] Cara terbaik untuk mendapatkan prestasi dalam hidup ini adalah dengan mempunyai ilmu dan memiliki etos kerja yang tinggi. Rasulullah saw, bersabda yang artinya : *"Barang siapa menghendaki kebahagian kehidupan dunia haruslah dengan ilmu dan barang siapa menghendaki kebahagian akhirat haruslah dengan ilmu dan barang siapa menghendaki kebahgian keduanya haruslah dengan ilmu pula"* [al-Hadis]. [3] Berorientasi ke masa depan, kerja keras, teliti, hati-hati, menghargai waktu, penuh rasa tanggungjawab dan berorientasi pada prestasi [*achievement oriented*] dan bukan *prestige* semata[345]. Jadi, manusia dan masyarakat yang unggul yang dikehendaki dalam kehidupan masyarakat madani adalah manusia yang : [a] memiliki ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, untuk peningkatan derajat dan martabatnya, [b] mempunyai cita-cita, visi dan misi, dalam kehidupan, [c] memiliki keunggulan kompetitif, komporatif, dan keunggulan inovatif, [d]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[343]Usman Abu Bakar, 1999, *Pendidikan Politik Islam sebuah Prospektus Menuju Masyarakat Madani*, Dinamika, Journal Of Islamic Studies, STAIN, Surakarta, hlm. 9-13.

[344]A. Malik Fadjar, *Reorientasi Pendidikan Islam*, , hlm. 24-25.

[345]Ibid, hlm. 45.

taat hukum, menghargai hak asasi manusia, dan menghargai perbedaan [pluralisme], [e] memiliki rasa tanggungjawab, karena "semua masalah dalam kehidupan harus dihadapi dengan penuh rasa tanggungjawab [*responsibility*] dan penuh perhitungan [*accountability*], [f] bersikap rasional, menghargai waktu, memperhatikan masa depan [membuat perencanaan hidup] dan perubahan, kreatif dan berkarya *execelence*"[346], sehingga tercipa "manusia madani" dalam arti manusia yang mengota, elite, dan berbudaya tinggi.

Secara umum dapat dikatakan, bahwa manusia dan masyarakat yang berkualitas adalah manusia yang memiliki ciri sebagai hamba Allah yang berimanan, berilmu pengetahuan dan keterampilan, yang dapat memberikan manfaat bagi sesama manusia. Ketiga cirri utama ini didapatkan pada manusia yang taqwa, sehingga manusia dan masyarakat berkualitas dapat pula diartikan sebagai manusia yang beriman, bertaqwa kepada Allah dengan memiliki sikap tawakkal, sabar, pemaaf, muhsin, dan selalu mau bersyukur. Manusia yang berusaha meningkatkan diri dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan, memiliki kemampuan inovasi, kemampuan melakukan perubahan serta mengajak orang untuk meningkat. Tuntutannya, peranan pendidikan dibutuhkan untuk mensosialisasikan nilai-nilai tersebut dalam rangka mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang unggul, sehingga keberadaannya secara fungsional menjadi pemeran utama bagi terwujudnya tatanan dunia yang *rahmatan lil 'alamin* dalam kehidupan masyarakat madani Indonesia yang demokratis.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Demokratisasi Pendidikan Islam Menuju Terbentuknya Masyarakat Madani Indonesia

Masyarakat madani pada prinsipnya memiliki makna ganda, yaitu : masyarakat yang beriman, berpengetahuan, demokrasi, toleransi, memiliki potensi, aspirasi,

[346]Ibid, hlm. 48.

motivasi, hak asas. Namun yang paling dominan adalah masyarakat yang demokrasi. Masyarakat madani juga merupkan masyarakat relegius[347] dengan bangunan politik yang demokratis, partisipatoris, menghormati dan menghargai publik, seperti kebebasan hak asas, partisipasi, keadilan sosial, menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moralitas, masyarakat beradab dan masyarakat yang menghargai dan berfaham pluralistik. Maka, pendidikan dalam hal ini pendidikan Islam harus mampu membangun masyarakat demokratis, beradab, relegius *ilahiyah,* masyarakat yang menghargai hak asas manusia, menghargai perbedaan paham, pluralistis, memiliki partisipasi sosial yang tinggi dengan menjunjun nilai-nilai etika dan moral, sehingga dapat terwujud masyarakat madani Indonesia yang relegius, demokratis.

Manfaat yang diperoleh dengan terwujudnya masyarakat madani adalah terciptanya masyarakat Indonesia yang demokratis sebagai salah satu tuntutan reformasi di dalam negeri dan tekanan-tekanan politik dan ekonomi dari luar negeri. Suwardi, menyatakan melalui masyarakat madani akan mendorong munculnya inovasi-inovasi baru di bidang pendidikan[348]. Daliman, manyatakan bahwa dengan terwujudnya masyarakat madani, persoalan-persoalan besar bangsa Indonesia seperti, konflik-konflik suku, agama, ras, etnik, golongan, kesenjangan sosial, kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan pembagian "kue bangsa" antara pusat dan daerah, saling curiga serta ketidakharmonisan pergaulan antar warga dan lain-lain yang selama Orde Baru lebih banyak ditutup-tutupi, direkayasa dan dicarikan kambing hitamnya; diharapkan dapat diselesaikan secara arif, terbuka, tuntas, dan melegakan semua pihak, suatu prakondisi untuk dapat mewujudkan kesejahteraan lahir batin bagi seluruh rakyat[349], sehingga apabila adanya kekhawatiran akan terjadinya disintegrasi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[347]Husaini Usman, *Menuju Masyarakat Madani Melalui Demokratisasi Pendidikan*, From: http://www. depdiknas. go.id/ Jurnal/ 28/menuju-masyarakat-madani-melalui.htm, tgl. 11 –9 – 2001.

[348]Suwardi, *"Demokratisasi Pendidikan dalam Pengajaran Paragmatik Sastra Sebagai Wahana Penciptaan Masyarakat Madani"*, Cakrawala Pendidikan, Edisi Khusus, Mei 1999, Th. XVIII, No., hlm. 66.

[349]A. Daliman, *Reorientasi Pendidikan Sejarah Melalui Pendekatan Budaya Menuju Transformasi Masyarakat Madani dan Integrasi Bangsa*, Cakrawala Pendidikan, Edisi Khusus Mei 1999, Th. XVII, No. 2, hlm. 78.

bangsa, dapat dicegah dengan membangun komitmen masyarakat terhadap nilai-nilai kehidupan tersebut.

Untuk mewujudkan masyarakat madani, dibutuhkan motivasi yang tinggi dan partisipasi nyata dari individu sebagai anggota masyarakat. Inti dari pandangan Suryadi [1999: 23] dan Daliman [1999:78], bahwa "untuk mewujudkan masyarakat madani diperlukan proses [upaya pendidikan], waktu, dan dituntut komitmen masing-masing warganya untuk mereformasi diri secara total[350] pada aspek budaya, perilaku, politik, hukum serta selalu konsisten dan penuh kearifan dalam penyikapi persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat, sehingga terwujud masyarakat madani Indonesia yang demokrasi dan ciri utama masyarakat madani adalah masyarakat demokratis. Secara ringkas dapat dikatakan, bahwa ciri utama masyarakat madani Indonesia adalah masyarakat "demokrasi yang akan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan [*humanisasi*], masyarakat yang mempunyai faham keagamaan yang berbeda-beda, masyarakat yang penuh toleransi, menegakkan hukum dan peraturan yang berlaku secara konsisten dan berbudaya tinggi"[351], masyarakat yang memiliki spritualisme *ilahiyah* yang tinggi, memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki komitmen kepada demokratis, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusia [*insaniyah*] dan hak asasi manusia, memiliki nilai-nilai moral dan akhlak yang anggun, masyarakat yang penuh toleransi, mengakui perbedaan pandangan dan keagamaan, masyarakat yang memiliki komitmen pada hukum dan peraturan yang belaku serta masyarakat yang berbudaya tinggi dan anggun. Dengan demikian, salah satu cara untuk mewujudkan masyarakat madani adalah melakukan demokratisasi[352] pendidikan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[350]Husaini Usman, *Menuju Masyarakat Madani Melalui Demokratisasi Pendidikan*,. 11-9-2002.

[351]Hartono, *Perubahan Orientasi Pendidikan Menuju Masyarakat Madani*, Cakrawala Pendidikan, Edisi Khusus Mei 1999, Th. XVIII, No.2, hlm. 55.

[352]Demokrasi, berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata *demos* [rakyat] dan *kratos* [pemerintah]. Jadi, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dengan kekuasaan di tangan rakyat. Dalam perkembangannya, demokrasi bermakna semakin spesifik lagi yaitu fungsi-fungsi kekuasaan politik merupakan sarana dan prasarana untuk memenuhi kepentingan rakyat. Dengan demikian konsep demokrasi memberi keyakinan bahwa unsur-unsur rakyat senantiasa menjadi faktor utama yang dilibatkan dalam pemerintahan. Maka dengan demokrasi, rakyat boleh berharap bahwa masa depannya ditentukan oleh dan untuk rakyat, sedangkan demokratisasi ialah proses memuju demokrasi [Husaini Usman, *Mnuju Masyarakat Madani*..., 11 – 9 – 2001].

sebab demokratisasi pendidikan merupakan tuntutan dari terbentuknya masyarakat madani Indonesia yang demokratis.

Teriakan demokrasi mendapat sambutan yang luar biasa di dalam hati sanubari rakyat, sebab selama 32 tahun masyarakat Indonesia terjebak dalam konsep demokrasi yang "semu". Maka dengan semangat demokrasi, rakyat boleh berharap bahwa masa depannya ditentukan oleh dan untuk rakyat, karena demokrasi lebih berpihak kepada rakyat. Begitu juga konsep demokratiasi pendidikan, sebab dengan demokratisasi pendidikan merupakan proses menuju terbentuknya demokrasi. Demokratisasi pendidikan "diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang merdeka, berpikir kritis, sangat toleran dengan pandangan dan praktik-praktik demokrasi"[353]. Peserta didik sebagai generasi penerus dan sebagai anggota masyarakat harus benar-benar disiapkan untuk membangun masyarakat madani yang dicita-citakan. Untuk mewujudkan "masyarakat dan generasi muda yang mampu membangun masyarakat madani dapat dipersiapkan melalui sarana pendidikan"[354]. Marzuki, menyatakan hal yang sama, bahwa "salah satu cara untuk mewujudkan masyarakat madani Indonesia adalah melalui jalur pendidikan, baik di sekolah maupun di luar sekolah"[355]. Dengan demikian, peserta didik sebagai anggota masyarakat madani di masa mendatang, perlu dibekali dan dilatih dengan cara-cara berdemokrasi melalui demokratisasi pendidikan.

Pendidikan Islam, sebagai sub sistem pendidikan nasional diharapkan dapat ikut serta melakukan demokratisasi pendidikan. Sebab dengn demokratisasi pendidikan, proses pendidikan Islam dapat "menyiapkan peserta didik agar terbiasa bebas berbicara dan mengeluarkan pendapat secara bertanggungjawab dan turut bertanggungjawab [*melu angrungkebi*], terbiasa mendengar dengan baik dan

---

[353]A. Suryadi dan H.A.R. Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 23.

[354]Hartono, *"Perubahan Orientasi Pendidikan Menuju Masyarakat Madani"*,, Cakrawala Pendidikan, Edisi Khusus Mei 1999, Th. XVIII No.2, hlm. 55

[355]Marzuki, *"Membangun Masyarakat Madani Melalui Pendidikan Islam Sebuah Refleksi Pendidikan Nasional"*, Cakrawala Pendidikan, Edisi Khusus Mei 1999, Th. XVIII No. 2, hlm.50.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

menghargai pendapat dan pandangan orang lain, menumbuhkan keberanian moral yang tinggi, terbiasa bergaul dengan rakyat, ikut merasa memiliki [*melu handarbeni*], sama-sama merasakan suka dan duka dengan masyarakatnya [*padhasarasa*], dan mempelajari kehidupan masyarakat"[356]. Maka Suwardi, menyatakan bahwa sistem pendidikan [termasuk sistem pendidikan Islam] yang selalu dan selama ini mengandalkan kekuasaan pendidikan, tanpa memperhatikan pluralisme subjek didik, sudah saatnya harus ditinggalkan, dirubah dan bahkan harus direformasi agar tercipta masyarakat madani[357]. Upaya dan langkah-langkah ke arah ini, hanya dapat ditempuh melalui demokratisasi pendidikan dan demokratisasi pendidikan tidak harus dimulai dari sistem pendidikan berskala nasional, akan tetapi lebih efektif apabila dimulai dari sistem pendidikan yang berskala lokal seperti pendidikan di kelas pada proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar di kelas, demokrasi pendidikan dapat diarahkan pada pembaruan kultur dan budaya untuk mengaktifkan peserta didik [*student activity* dan *student centred*], membiasakan peserta didik untuk bebas berbicara dan berpendapat secara bertanggungjawab serta membangun norma keberadaban, karena "hal ini merupakan inti dari proses pendidikan"[358].

Pendidikan Islam seperti madrasah, pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya, dalam proses belajar mengajarnya dapat melaksanakan demokratisasi pendidikan di kelas, sehingga mampu membawa peserta didik untuk dapat menghargai kemampuan dan kemajemukan teman dan guru atau menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Demokratisasi pendidikan "dalam proses belajar mengajar juga dapat ditempuh dengan mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan dunia sekarang yang sangat dibutuhkan oleh peserta didik dan masyarakat [pragmatisme], tanpa harus melupakan hari kemarin"[359]. Sebagai contoh, jika peserta

---

[356]Husaini Usman, *Mnuju Masyarakat Madani...*, 11 – 9 - 2001

[357]Suwardi, *Demokratisasi Pendidikan dalam Pengajaran Paragmatik Sastra Sebagai Wahana Penciptaan Masyarakat Madani*, hlm. 66.

[358]Zamroni, "*Pembaruan Pendidikan dan Penelitian Multidisiplin*", makalah disampaikan pada Seminar Regional Pengembangan Budaya Penelitian Multidisiplin dan Antardisiplin, Yogyakarta, 19-20 Mei 1997, hlm.1.

[359]Shannon, *Gagasan Baru dalam Pendidikan*, (Jakarta: Mutiara, 1978), hlm. 32.

didik kebanyakan berlatar belakang masyarakat petani, maka orang tua cenderung menuntut hasil nyata dari pendidikan anaknya agar mampu meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Jika peserta didik kebanyakan berasal dari latar belakang nelayan, maka orang tua cenderung menuntut hasil nyata dari pendidikan anaknya agar mampu meningkatkan produktivitas hasil perikanannya. Jika peserta didik berasal dari latar belakang masyarakat bisnis, juga menghendaki hasil nyata dari pendidikan anaknya agar mampu meningkatkan produktivitas usaha bisnisnya[360]. Jika peserta didik berasal dari latar belakang masyarakat era informasi dan era internet, maka cenderung menghendaki hasil nyata pendidikan anaknya agar memampu meningkatkan dan memanfaatkan teknologi informasi serta internet, dan seterusnya. Dengan demikian, proses demokratisasi pendidikan dan pendidikan Islam harus mampu mengakses, merespons dan mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan masyarakat, orang tua, peserta didik dan pasar sebagai pelanggang dan pengguna produk pendidikan.

Dari uraian dan contoh-contoh tersebut, menggambarkan bahwa dalam melakukan inovasi pendidikan yang berkonteks demokratisasi perlu diperhatikan masalah-masalah pragmatik. Maka mulai dari pemilihan materi ajar, penentuan tujuan, pemilihan metode, pemilihan evaluasi hasil belajar, output lulusan yang diharapkan, sampai pada kebutuhan yang diharapkan dunia kerja[361] harus ditekankan pada konteks pragmatis. Pandangan ini cukup berasalan, sebab proses pendidikan dan pengajaran yang kurang menekankan pada konteks pragmatis, kebutuhan masyarakat dan pasar, serta konteks perkembangan dan perubahan, maka proses pendidikan akan menjadi "menara gading" dan pada gilirannya akan menyebabkan peserta didik akan terlepas dari akar budaya masyarakatnya serta kurang mampu mengatisipasi dan menganalisis kebutuhan pasar serta perkembangan dan perubahan

[360]Husaini Usman, *Menuju Masyarakat Madani...*, 11-9-2001.
[361]Ibid, 11-9-2001.

yang terjadi. Hal ini juga dinyatakan Imam Barnadib, bahwa pendidikan memang sebagai upaya mengembangkan kemanusiaan dan pengalihan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Itulah sebabnya pengajaran pragmatik yaitu pengajaran yang menekankan pada aspek fungsi akan menjadi salah satu alternatif pencapaian pengajaran yang berwawasan kemanusiaan dan peradaban[362].

Proses belajar mengajar yang pragmatik akan tercipta suasana kondusif bagi demokratisasi pendidikan, maka dalam proses pengajaran pragmatik, peran "pendidik" tidak monopoli artinya guru dan dosen bukan satu-satunya sumber belajar dalam memberi informasi. Memang selama ini, terkondisi di dunia pendidikan di Indonesia, proses belajar mengajar lebih didominasi oleh guru dan dosen [pendidik], sehingga pesera didik [siswa dan mahasiswa] lebih bersifat pasif, artinya peserta didik hanya duduk mendengarkan dan mencacat penjelasan yang disampaikan pendidik [guru dan dosen] dan apabila ada pertanyaan dari peserta didik, kandungan pertanyaan kurang problematik dan analisis. Hal ini menunjukkan bahwa materi pelajaran atau materi kuliah yang disampaikan pendidik kurang problematik dan analisis. Oleh karena itu, model belajar semacam ini sudah harus ditinggalkan, dirubah dan diorientasikan pada "cara belajar siswa aktif". Maka apabila konsep ini dilaksanakan, tentu akan menuntut fungsi pendidik sebagai **"fasilitator, dinamisator, mediator** dan **motivator"**[363]. *Pertama,* pendidik sebagai *fasilitator*, yaitu pendidik harus mampu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencoba mencari dan menemukan sendiri makna informasi yang diterimanya. *Kedua,* pendidik sebagai *dinamisator*, yaitu pendidik harus berusaha dan mampu menciptakan suasana belajar yang kondusip, berupa iklim proses belajar mengajar yang tidak kaku, tetapi proses belajar-mengajar yang dialogtis, terbuka, bebas dan bertanggungjawab yang selalu berorientasi pada

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[362]Imam Barnadib, *Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Berwasan Kemanusiaan*, Makalah Seminar Temu Alumni IKIP Yogyakarta, 14 Mei 1997,, hlm.1.,dan dalam Husaini Usman, *Menuju Masyarakat Madani*,11-9-2001.

[363]Husaini Usman, *Menuju Masyarakat Madani...*, 11-9-2001.

proses. *Ketiga,* pendidik sebagai *mediator,* yaitu pendidik harus mampu meberikan rambu-rambu atau arahan dalam belajar, agar peserta didik bebas dan mampu belajar sendiri [*student learning*]. dan *Keempat,* pendidik sebagai *motivator*, yaitu pendidik harus selalu memberikan dorongan atau motivasi agar peserta didiknya bersemangat untuk belajar dalam menuntut ilmu pengetahuan.

Dalam proses pendidikan Islam seorang pendidik harus mampu memposisikan dirinya sebagai fasilitator, dinamisator, mediator, dan motivator, sehingga dapat memberdayakan peserta didik untuk mampu mencari dan menemukan sendiri informasi yang diterimanya. Pendidik berupaya menciptakan iklim belajar yang kondusip, sehingga peserta didik dapat belajar dalam suasana yang dialogtis, harmonis dan demokratis. Kemudian pendidik harus berusaha memberikan arahan dan bimbingan, memberikan rambu-rambu dalam belajar, dan memotivasi peserta didik dalam belajar, sehingga peserta didik bersemangat dalam menuntut ilmu pengetahuan dan bebas belajar sendiri [*student learning*]. Pendidik dalam proses, haruslah menjadi seorang "model" atau "*uswah*" dan sekaligus menjadi mentor bagi peserta didik di dalam mewujudkan nilai-nilai *ilahiyah,* nilai-nilai moral, nilai-nilai kebebasan dan demokrasi dalam proses belajar serta di dalam kehidupan di sekolah. Apabila pendidik tidak berprilaku sebagai *uswah* atau model dalam proses, tanpaknya sulit untuk mewujudkan nilai-nilai *ilahiyah*, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai demokrasi, pranata sosial, dan nilai-nilai kebudayaan dalam lingkungan sekolah dan masyarakat.

Pendidikan pragmatis yang bersifat profesionalisme, disatu sisi memang diakui memiliki kelemahan, karena proses pendidikan hanya semata-mata meyiapkan tenaga kerja yang sifatnya praktis atau siap pakai dan proses pendidikan hanya akan menciptakan bangsa "tukang", sarjana-sarjana tukang dan bukan sarjana-sarjana pemikir. Proses pendidikan tidak hanya menerapkan pendidikan pragmatik semata, melainkan juga berorientasi dan bersifat akademik, yang bertugas menyiapkan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pemikir-pemikir yang sifatnya teoritis. Tetapi, juga sebaliknya pendidikan tidak hanya berorientasi menyiapkan tenaga teoritis saja, karena dengan kemampuan teoritispun tidak cukup, melainkan harus ada tindakan nyata dari hasil pemikiran teoritis tersebut[364]. Diperlukan keseimbangan [*balance*] antara keterampilan operasional, kemampuan konseptual akademik, kemampuan kepribadian, kemampuan emosional yang memadai, sehingga tercipta sumber daya manusia Indonesia yang memilki kemampuan pengetahuan dan teknologi, kemampuan spritual *ilahiyah* yang tinggi, memiliki *skill* [keterampilan dan kemahiran], kepribadian dan moral yang tinggi dan anggun, dengan berwawasan global dan sekaligus bertindak lokal.

Freire, menyarankan upaya untuk mencapai demokratisasi pendidikan yang berwawasan adalah dengan menciptakan kebebasan intelektual antara pendidik dengan peserta didiknya dalam proses belajar mengajar di kelas. Proses belajar mengajar harus terbuka, penuh dialog dan bertanggungjawab antara pendidik dengan peserta didik dan interaksi antara peserta didik dan pendidik dalam bentuk egaliter dan kesetaraan [*equity*]. Maka dengan adanya kesetaraan [*equity*], kebebasan berinisatif, berbeda aspirasi dan pendapat serta keadilan dalam pendidikan akan terakomodasi[365] dengan baik, sebab pendidikan memang merupakan sarana terpenting untuk mencapai kemerdekaan. Dalam konteks ini, maka disain demokratisasi pendidikan harus terjadi ke segala arah dan bukan hanya bersifat satu arah yaitu dari pendidik ke peserta [*top down*] melainkan juga ada keseimbangannya yaitu dari peserta didik dengan pendidik [*bottom-up*] dan antarpeserta didik sendiri [*network*]. Maka apabila pendidik hanya bertahan pada posisi model komunikasi *top down,* tentu akan timbul kecenderungan pendidik merasa capek, sementara peserta didik tidak mengerti, pasif, bosan, mengantuk, dan lebih parah lagi peserta didik dihawatirkan tidak

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[364]Ibid, 11-9-2001.

[365]P.Fiere, *Pendidikan sebagai Praktek Pembebasan*, (Jakarta: Gramedia, 1984), hlm. 24.

mendapatkan informasi baru[366] dari proses tersebut. Proses seperti ini, menuntut posisi pendidik sebagai satu-satunya sumber belajar dan semua informasi tentu hanya berasal dari pendidik dengan otoritas yang sangat tinggi dan menganggap otak peserta didik bagaikan "botol kosong" yang siap diisi penuh dengan berbagai informasi dari pendidik. Sebaliknya, apabila proses belajar mengajar didisain dengan model komunikasi *network* dan *student centred,* berarti sumber belajar bukan hanya terletak pada pendidik saja, melainkan juga pada peserta didik dan interaksi dalam proses belajar mengajar menggunakan komunikasi dua arah dan atau kesemua arah sehinga akan terjadi proses belajar yang dialogtik dan demokratis.

Selama ini memang dirasakan bahwa proses pendidikan dan pendidikan Islam "terkesan menganut asas *subject matter oriented* yang membebani peserta didik dengan informasi-informasi kognitif dan motorik yang kadang-kadang kurang relevan dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan psikologi peserta didik. Pengelolaan pengajaran yang ada memberi kesan terlalu berorientasi pada iptek termasuk juga keterampilan motorik terlalu berorientasi pada hal-hal teknis[367]. Penggunaan asas ini, disatu sisi diakui dapat menghasilkan lulusan yang pandai, cerdas, dan terampil; tetapi kepandaian dan kecerdasan intelektual tersebut kurang diimbangi dengan kecerdasan emosional. Perhatian pada rana afektif atau juga rana-rana yang lain dirasakan kurang, padahal rana afektif dan rana yang lain sama penting peranannya dalam membentuk perilaku peserta didik. Dalam upaya mendukung pelaksanaan demokratisasi pendidikan, tibalah saatnya mengubah asas *subject matter oriented* ke *student oriented*[368]. Proses pendidikan Islam harus diorientasikan kepada pendidikan yang bersifat *student oriented* dengan lebih menekankan kepada pertumbuhan dan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[366]Husaini Usman, *Menuju Masyarakat Madani...*, 11-9-2001.

[367]G. Moeldjanto, *Dimensi Moral dalam Pendidikan Menuju Pembentukan Manusia Seutuhnya*, Widya Darma, No. 1 Tahun IX, 1998, hlm. 63.

[368]Husaini Usman, *Menuju Masyarakat Madani...*, 11-9-2001.

perkembangan potensi serta kebutuhan peserta didik secara utuh baik jasmani maupun rohani. Kecerdasan rohani [*otak*/intelektual] memang penting, tetapi kecerdasan emosional tidak kalah pentingnya dalam proses pendidikan.

Kondisi yang dikemukakan di atas, tentu akan merubahan budaya proses pendidikan selama ini. Sebab dalam suasana proses belajar mengajar yang demokratis tentu akan terjadi kesetaraan atau sederajat dalam kebersamaan [*egalitarian*] antara pendidik dengan peserta didik. Pengajaran tidak harus selalu *top down* namun selalu diimbangi dengan *bottom up* sehingga tidak ada lagi pemaksaan kehendak pendidik, tetapi yang akan terjadi adalah tawar-menawar kedua belah pihak dalam menentukan tujuan, materi, media, proses belajar mengajar dan evaluasi hasil belajarnya. Selama ini proses belajar pendidikan Islam yang digunakan dengan teknik menghafal dan mendikte sudah harus ditinggalkan, karena teknik tersebut lebih cenderung akan menyuap peserta didik dengan berbagai informasi yang tinggal ditelan saja, sedangkan kreativitas dan kebebasan peserta didik terpasung. Peserta didik tidak memiliki kesempatan dan kebebasan untuk mencari dan mencerna informasi sesuai dengan minat dan bakatnya. Dengan demikian, pada era demokratisasi pendidikan ini sudah saatnya proses pendidikan Islam harus mampu menciptakan proses belajar yang demokratis, dialogtis, kebebasan, menghargai minat, bakat dan tujuan belajar peserta didik. Bila hal ini diabaikan dan dilupakan, menurut Taroepratjeka, akibatnya peserta didik akan menjadi pembebek-pembebek dan bukan menjadi manusia yang lebih beradab dan berbudaya melalui proses pendidikan tersebut[369].

Demokratisasi pendidikan merupakan pendidikan hati nurani, artinya pendidikan yang lebih menghargai potensi manusia dikatakan lebih humanisasi, beradab dan sesuai dengan cita-cita masyarakat madani. Maka melalui demokratisasi

---

[369]Taroepratjeka, "*Pengembangan Pendidikan Tinggi dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua*", makalah Seminar Temu Alumni IKIP, Yogyakarta, 18 Mei 1996, hlm. 3.

pendidikan akan terjadi proses kesetaraan antara pendidikan dan peserta didik di dalam proses belajar mengajar. Dengan demikian, dalam proses pendidikan, perlu dikembangkan komunikasi struktural dan kultural antara pendidik dengan peserta didik, sehingga akan terjadi interaksi yang sehat, wajar, dan bertanggungjawab. Peserta didik boleh saja berpendapat, berperasaan, dan bertindak sesuai dengan langkahnya sendiri dan mungkin saja berbeda dengan pendidiknya asalkan ada argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, peserta didik bukan hanya memahami teori demokrasi tetapi juga dapat menjalani latihan-latihan seperti berdebat, menghargai pandangan dan harga diri orang lain, mematuhi aturan hukum yang diaplikasikan dalam setting diskusi. Peserta didik ditantang menguji pikirannya dan argumentasi-argumentasi yang rasional dan jika mungkin berdasarkan hasil penelitian dan refrensi yang kuat. Dalam suasana proses belajar mengajar yang demokratis, pendidik tidak harus merasa paling pandai di dalam kelasnya, tidak merasa paling benar di kelasnya, merasa telah menang mempersiapkan materi belajar satu malam dibandingkan dengan peserta didiknya. Tetapi yang akan terjadi adalah saling tukar informasi, silang pendapat dan pengalaman dengan peserta didiknya[370]. Kondisi semacam ini, hanya dimungkinkan akan dapat terjadi dalam proses demokratisasi pendidikan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dalam kerangka pemikiran di atas, dapat dikatakan bahwa pendidikan demokrasi merupakan suatu tuntutan dari terbentuknya masyarakat madani Indonesia. Tilaar, menyatakan bahwa tuntutan terbentunya masyarakat madani Indonesia, mengandung berbagai unsure, yaitu: [1] kebebasan intelektual, [2] kesempatan untuk bersaing, [3] mengembangkan kepatuhan spritual dan moral, [4] pendidikan yang mengakui hak untuk berbeda, dan [5] percaya kepada kemampuan manusia.[371]

---

[370]Husaini Usman, *Menuju Masyarakat Madani...*, 11-9-2001.

[371]H.A.R. Tilaar, *Pendidikan, Kebudayaan, dan...*, hlm. 172-174.

Kelima unsur tuntutan terbentuknya masyarakat madani tersebut dapat digambarkan dan dideskripsikan sebagai berikut:

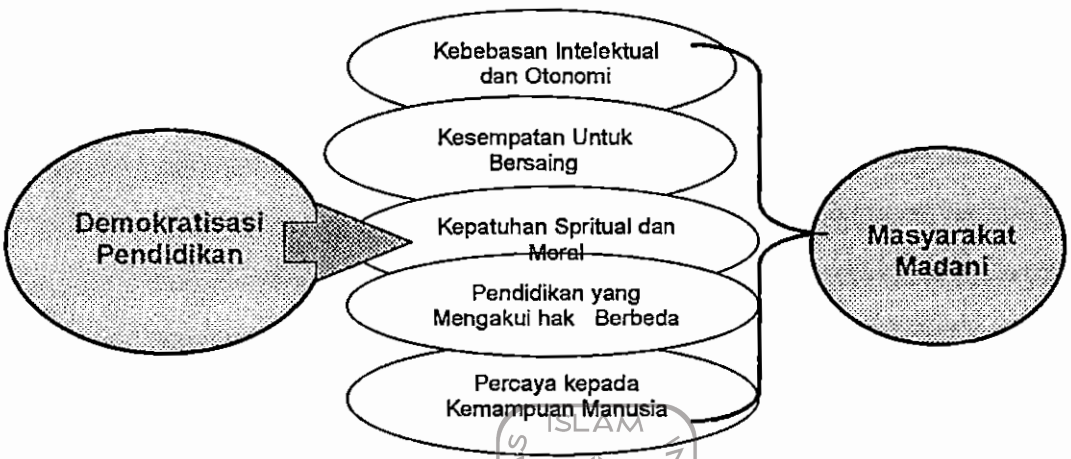

Gambar : 5
Tuntutan Terbentunya Masyarakat Madani Indonesia

Pertama, kebebasan intelektual dan otonomi pendidikan, kedua hal ini dapat dijelaskan, sebagai berikut:

[1] Kebebasan Intelektual, "diperlukan karena suatu masyarakat demokratis adalah masyarakat yang menghargai akan kemampuan intelektual para anggotanya, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun untuk kesejahteraan masyarakatnya. Kebebasan intelektual merupakan syarat utama di dalam kemampuannya untuk memformulasikan sistem nilai yang ingin diwujudkannya demi untuk kepentingan bersama[372]. Maka apabila kemampuan intelektual yang terus dipasung, akan melahirkan manusia-manusia tanpa inisiatif dan cenderung tunduk pada kekuasaan otoriter. Kebebasan intelektual di perguruan tinggi seringkali dihadapkan dengan sebuah dilema, yaitu pada satu sisi perguruan tinggi dituntut untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian

[372]Ibid, hlm. 172.

masyarakat, tetapi disisi lain perguruan tinggi dihadapkan dengan peraturan-peraturan dan birokrasi yang kadang-kadang menghambat pelaksanaan fungsi dan tugasnya. Maka sekarang ini, sudah tiba saatnya "lembaga-lembaga pendidikan Islam sebagai institusi ilmiah semestinya bersifat otonom, memiliki kebebasan akademik dalam mengemban visi dan misinya dalam memelihara, melestarikan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, sehingga peserta didik sebagai suatu produk menjadi handal dalam penguasaan ilmu pengetahuan pendidikan Islam"[373], dan mampu bersaing dengan produk pendidikan lainnya. Konsep kebebasan intelektual atau dapat dikatakan dengan kemerdekaan berpendapat, yang dalam konsep Islam tercermin dalam ajaran *ijtihad* dan bahkan sering kelihatan sudah liberal. Ajaran *ijtihad* itu sangat menonjol, lantaran terdapat dorongan [motivasi] jika *ijtihadiya* pendapatnya itu benar akan memperoleh dua kali nilai pahala, jika salah, masih tetap memperoleh satu pahala[374]. Dengan demikian, dalam proses belajar harus menganut prinsip ini, sehingga peserta didik dapat bebas berpendapat secara bertanggungjawab walaupun berbeda.

[2} Otonomi pendidikan, otonomi merupakan hak atau kewenangan yang diberikan oleh pihak yang berwenang atau pemerintah kepada masyarakat, himpunan ataupun badan resmi lain untuk menyelenggarakan fungsinya secara mandiri selama hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku secara umum dalam masyarakat[375]. Dasar hukumnya adalah peraturan Pemerintah No.61 tahun 1999 yang muncul bersamaan dengan ketentuan otonomi daerah sebenarnya mengandung hal-hal yang positif, karena otonomi dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang independen, bebas atau tidak terikat. Dengan dasar ini, maka lembaga-lembaga pendidikan diberi kebebasan untuk melaksanakan dan mengelola

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[373] Imam Syafi'ie, *Manajemen Pendidikan Islam Memasuki Milenium III*, hlm. 69.

[374] A. Qodri Abdullah Azizy, *Masyarakat Madani Antara Cita dan Fakta, Kajian Historis Normative*, dalam Ismail SM, Abdul Mukti [Editor], *Pendidikan Islam, Demokrasi dan Masyarakat Madani*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset,2000),hlm.106.

[375] "Strategi Pengembangan, Paradigma Penataan Sistem Pendidikan Tinggi",From:http://www.dkti.org/.12-6-2002.

pendidikannya, yang tentu tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku secara umum di masyarakat. Artinya, pengelolaan pendidikan sesuai dengan tujuan, misi dan visi pendidikannya dan kebutuhan masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah.

Otonomi pendidikan, dalam konteks perguruan tinggi otonomi dapat dikaitkan dengan "kebebasan akademik", artinya sebuah institusi perguaruan tinggi bebas mengelola pendidikannya sendiri sesuai dengan tujuan, misi dan visi pendidikan yang ingin dicapai. Maka bagi perguruan tinggi negeri, seperti IAIN dan STAIN yang selama ini masih bergantung pada pemerintah harus dapat melakukan perubahan manajemen secara mendasar, artinya dengan adanya otonomi maka PTN harus dapat menjalankan sistem pendidikannya secara mandiri dengan tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah. Sebab "otonomi pendidikan dianggap sebagai tuntutan perubahan zaman bahkan persiapan menuju era globalisasi, pasar bebas"[376] dan masyarakat madani Indonesia yang mau tidak mau harus di masuki. Intinya, otonomi pendidikan memiliki tujuan untuk mewujudkan sistem pendidikan yang lebih baik demi menghasilkan kualitas lulusan atau sumber daya manusia Indonesia yang handal di era masyarakat madani Indonesia. Maka dengan adanya otonomi pendidikan, dunia pendidikan dan khususnya perguruan tinggi dapat menyelenggarakan sistem pendidikannya secara bebas sesuai dengan tujuan, misi, visi dan kebutuhan, dan tututan kemajuan. Oleh karena itu, sistem pengajaran, kurikulum, metode dan ilmu yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak lagi sepenuhnya mengacu kepada ketentuan baku dan tunggal yang ditetapkan pemerintah tanpa memperhatikan kebutuhan pemakai lulusan. Dengan demikian diharapkan akan muncul kondisi dunia akademis yang sehat dengan kreativitas, daya kritis dan daya

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[376] Agus Pramanto, [JPI'98]/Redaksi AP, *"Diema Otonomi Pendidikan: Catatan Dari Seminar Otonomi Pendidikan Nasional 2001 SMFSUI"*, From:http://www.geocities.com/red_accesspoint/otonomi.htm, 16/2/2002.

kompetitif yang tinggi dari peserta didik sehingga dapat tercapai cita-cita untuk menghasilkan mutu pendidikan yang baik.

Selain itu, dengan otonomi pendidikan, perlu dibangun komunikasi antara pemerintah, penyelenggara pendidikan, peserta didik dan masyarakat. Posisi peserta didik [mahasiswa] harus ditempatkan sebagai "pelanggan" yang memiliki akses yang cukup dalam penyelenggaraan pendidikan dan dalam perumusan kebijakan-kebijakan pengelolaan pendidikan seperti kebijakan otonomi kampus, kebijakan perubahan kurikulum, beban studi [sistem sks], manajemen pendidikan [peraturan-peraturan pendidikan], biaya pendidikan dan lain-lain. Hal ini penting, karena peserta didiklah [mahasiswa] yang nantinya akan menerima hasil dari kebijakan-kebijakan tersebut. Kemudian masyarakat sebagai pemakai produk pendidikan harus memiliki akses yang cukup dalam penyelenggaraan. Masyarakat harus dilibatkan dalam perumusan kebijakan-kebijakan yang menyangkaut produk atau lulusan yang sesuai kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pasar, sehingga pengelolaan sistem pendidikan yang menyangkut tujuan, misi dan visi, materi dan kurikulum, metode pembelajaran serta hasil yang diinginkan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan pengguna lulusan. .

Kedua, kesempatan untuk bersaing di dalam perwujudan diri sendiri [*self realization*]. Artinya, setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Setiap peserta didik tanpa didiskriminasikan dengan pertimbangan-pertimbangan sosial, ekonomi, gender, asal-usul, agama, diberikan kesempatan yang sama untuk mewujudkan dirinya sendiri dan mengembangkan potensinya untuk melaksanakan sesuatu yang terbaik[377]. Setiap orang harus mengetahui akan kemampuan dirinya masing-masing dan kemampuan orang lain dan berusaha untuk mengembangkan hal-hal yang positif dalam rangka mengadaptasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berusaha meminimalkan atau

[377]H.A.R. Tilaar, *Pendidikan, Kebudayaan, dan...*, hlm. 173.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

menekan hal-hal yang negatif pada dirinya sendiri[378]. Setiap anggota masyarakat akan bersaing secara sehat dan bukan karena berdasarkan pertimbangan subjektif, melainkan pertimbangan objektif dan rasional.

Peranan pendidikan sangat senteral dalam upaya memberdayakan manusia, karena proses pendidiakn sebagai usaha untuk mensosialisasikan nilai-nilai kemanusiaan [*humanisasi*] dengan berusaha memberdayakan manusia memiliki kemampuan percaya dirinya sendiri, memahami kemampuannya diri sendiri, kemampuan orang lain, berusaha bersaiang secara sehat, memiliki sikap terbuka untuk menerima kritik dan berbeda pendapat. Dengan berorientasi kepada persaingan yang sehat, rasional dan keunggulan serta keteladanan [*uswahtun khasanah*] dalam kehidupan masyarakat akan terbentuk manusia dan masyarakat yang *khayra ummah* [sebaik-baik *ummah*] [QS.3: 110].

Ketiga, pendidikan yang mengembangkan kepatuhan spritualisme dan moral kepada kepentingan bersama dan bukan kepada kepentingan sendiri atau kelompok. Dalam kerangkan pemikiran ini, tentu dibutuhkan pendidikan yang berwawasan nilai-nilai [values] normatif *ilahiyah* dan nilai-nilai moral. Pendidikan harus berupaya memanusiakan manusia dengan menekankan keharmonisasi hubungan sesama manusia, masyarakat dan lingkungannya. Dalam pandangan Islam, manusia adalah sentral sasaran ajarannya dan proses pendidikan baik manusia hubungannya dengan Tuhannya, hubungan antara sesama manusia dan antara manusia dengan alam, tetapi yang paling kompleks adalah hubungan antara sesama manusia[379]. Dalam konteks ini, diperlukan pendidikan yang membangun manusia seutuhnya, yaitu manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etika-moral, memiliki kemampuan keterampilan profesional dalam upaya membangun tata kehidupan dunia untuk kepentingan umat manusia itu sendiri. Maka, kepatuhan moral perlu

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[378]Teuku Amiruddin, *Reorientasi Manajemen Pendidikan Islam...*, hlm. 85.

[379]A. Qodri Abdullah Azizy, *Masyarakat Madani Antar...*, hlm. 103.

dikembangkan, karena dengan kepatuhan itulah yang diperlukan dan dapat mengikat seseorang di dalam kelompoknya, sebab apabila kepatuhan moral itu hilang, masyarakat akan mengalami disintegrasi atau kecauan[380] dalam kehidupannya. Berkaitan dengan hal ini, Said Tuhuleley, menyatakan masalah moral atau akhlak pada masa yang akan datang, berdasarkan kecenderungan yang ada sekarang besar kemungkinan akan mengalami distorsi [gangguan], sehingga persoalan moralitas akan menjadi isu senteral pada abad 21[381]. Dengan demikian, pendidikan yang mengembangkan kepatuhan moral harus berusaha untuk membangun dan mempraktekkan disiplin moral dan akhlak, karena moral dan akhlak merupakan sesuatu yang *restrictive*, artinya bukan sekedar sesuatu yang deskriptif tentang mana yang baik dan mana buruk, tetapi sesuatu yang mengarahkan kelakuan dan pikiran seseorang untuk berbuat baik[382].

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka *spritualisme* dan moral-akhlak mengimplikasikan adanya keharusan dan disiplin, sebab menuntut menusia untuk melaksanakan apa yang baik [*taqwa*] dan menolak apa yang batil [*fujur*]. Dengan demikian, konsep pendidikan Islam harus dibangun dan bersumber dari konsep ketuhanan [*ilahiyah*] dan kemanusian dalam rangka membangun moralitas dan akhlak manusia yang anggung untuk dapat mewujudkan kehidupan manusia yang seimbang dan integratif antara nilai-nilai *ilahiyah*, kemanusiaan [*insaniyah*] dan nilai-nilai budaya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa manusia yang "menghargai spritualisme adalah menuasi yang membangun ilmu pengetahuan dan iman secara intergatif, manusia yang mengembangkan amal dan karya secara sungguh-sungguh serta manusia yang mengaplikasikan akhlak dan moral secara menyeluruh dalam prilaku hidup dan kehidupannya[383]. Maka tuntutan terhadap pendidikan untuk

---

[380]Ibid, hlm. 173.

[381]Said Tuhuleley, [Penyt.],*Permasalahan Abad XXI, Sebuah Agenda,* (Yogyakarta: SIPRES, 1993),hlm.xvii-xix

[382]H.A.R. Tilaar, *Pendidikan, Kebusayaan, dan ...*, hlm.77.

[383]Abd. Rahman Abdullah, *Aktualisasi Konsep Dasar Pendidikan Islam Rekonstruksi Pemikiran dalam Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam,* (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 231.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

mengembangkan kepatuhan spritualisme dan moral, berlaku untuk seluruh personil dari pranata sosial pendidikan. Hal ini berarti bahwa tuntutan spritualisme dan moral tidak hanya berlaku bagi peserta didik saja, tetapi lebih dari itu. Artinya moralitas harus melekat dalam kepemimpinan pendidikan, apakah sebagai guru, administrator, manajer pendidikan, harus bertindak sebagai model [*uswah*] dalam pranata sosial pendidikan. Oleh karena itu, upaya pengenalan nilai-nilai *ilahiyah,* akhlak dan "moral tidak harus terjadi secara indoktrinasi, tetapi melalui proses *inkuiri* dan penghayatan"[384]. Proses pemberian contoh [*uswah*] secara intensif mengenai nilai-nilai *ilahiyah* dan nilai-nilai akhlak dan moral, sebab peranan pendidik sangat senteral dalam upaya menanamkan dan memahakan nilai-nilai tersebut kepada peserta didik. Arief Rahman, seorang pengamat pendidikan yang dikutip Agus Pramanto, menyatakan bahwa proses pendidikan pada hakekatnya bukan saja *trasfer of knowledge* atau transfer pengetahuan saja, melainkan juga harus *transfer of values* atau transfer nilai[385]. Hal ini penting agar pendidikan tidak saja menghasilkan manusia-manusia yang pandai dan cerdas saja, tetapi manusia-manusia yang memiliki moral anggun dan *akhlakul karimah,* memiliki iman dan taqwa yang tercermin dalam prilaku kesehariannya, sehingga dapat membawa manusia pada kehidupan yang baik atau kebahagian *duniawiyah* dan *ukhrawiyah.*

Keempat, pendidikan yang mengakui hak untuk berbeda [*the right to be different*]. Dalam konteks ini, proses pendidikan kita yang otoriter, baik di dalam keluarga, lebih-lebih lagi di dalam pendidikan formal, tidak memberikan peluang bagi pengambilan alternatif yang lain. Proses belajar-mengajar yang menolong, sistem ujian yang tersentralisasi, menutup pintu bagi eksperimen[386]. Proses pendidikan di Indonesia kurang atau tidak memberi kesempatan untuk berbeda pendanpat apalagi berbeda pendapat dengan guru, ustadz, kiyai, karena hal ini anggap "tabuh", sehingga

---

[384]H.A.R. Tilaar, *Pendidikan, Kebusayaan, dan* ..., hlm.77.

[385]Agus Pramanto, *"Dilema Otonomi Pendidikan"*..., 16/2/2002.

[386]Ibid, hlm. 174.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

proses pendidikan selalu berjalan sepihak dan kaku. Tilaar, menyatakan bahwa sebenarnya "pengakuan terhadap hak untuk berbeda adalah respek terhadap kepribadian seseorang atau *"souvereignity"* dari seseorang[387]. Maka dalam proses belajar mengajar harus dapat mengakses perbedaan pendapat dan pandangan dari peserta didik, karena hal ini merupakan proses demokratisasi pendidikan.

Apabila diperhatikan, dalam proses belajar mengajar, peserta didik kurang memiliki keberanian untuk bertanya atau berpendapat. Hal ini disebabkan peserta didik takut atau segan berbeda pendepat dengan sang guru, ustdz, dan kiyai, karena pengakuan atas hak untuk berbeda kurang atau belum tercipta dalam proses belajar. Implikasinya, dapat diperhatikan dalam kehidupan masyarakat, keberanian mengambil inisiatif atau keberanian mengambil resiko atau keputusan yang telah diambil tidak pernah atau takut dicobakan. Hasilnya, menurut Tilaar, adalah manusia-manusia bisu tanpa pilahan atau takut mengadakan pilihan[388]. Karena berbada pendapat sering dianggap sebagai tindakan melawan, mengancam dan atau tindakan untuk memaksakan dan membenarkan pendapatnya. Sebenarnya, perbedaan pendapat dan pandangan itu sesuatu hal yang wajar, tetapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menyikapi perbedaan tersebut. Dalam pandangan Islam dikatakan bahwa "perbedaan" atau "berbeda pendapat" merupakan *rahmat*, asalakan perbedaan tersebut disikapi, dieliminer dan diorganisir dengan baik, artinya dalam al-Qur'an dikatakan bahwa *"serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan berdiskusi dengan cara yang baik"...* [QS. 16: 125]. Kemudian, untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu berupa kesepakatan bersama [musyawara] dan kemudian bertawakkal kepada Allah [QS.3: 109]. Pengakuan terhadap hak berbeda pendapat dan pandangan harus dibangun dan dikondisikan melalui proses

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[387] Ibid, hlm. 172.
[388] Ibid, hlm. 172.

pendidikan dengan cara peserta didik membiasakan diri mengutarakan pendapat walaupun berbeda dengan gurunya, kemudian guru harus dapat menyikapi perbedaan tersebut dengan cara yang baik. Apabila nilai-nilai ini dapat diterapkan dalam proses pendidikan, maka pendidikan dapat membangun suasana yang demokratis, dialogtis, dinamis, rahmonis, untuk mencapai tujuan pembelajaran dan akan berimplikasi dalam kehidupan di masyarakat.

Dalam pandangan Islam, kedudukan manusia itu sama, yang "membedakannya" adalah prestasi dalam bentuk "ketaqwaan" dan "amal shaleh". Atas dasar ini, pendidikan Islam harus dapat meletakkan kedudukan subjek didik itu sama dengan segala "potensi perbedaan yang dimilikinya" dan menjadi senteral dalam upaya pembinaan dan pengembangan pendidikan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Maka dalam proses pendidikan, harus mengakui hak untuk berbeda dengan cara membangun suasana belajar yang demokratis, dialogtis dan tanpa ada rasa segan, tertekan dan takut. Dalam sejarah kehidupan manusia, apabila kita mencermati dialog antara Nabi Ibrahim [sebagai bapak] dengan Nabi Ismail [anaknya], dalam al-Qur'an adalah "terjadi suatu proses pendidikan dialog" yang sangat baik dan demokratis, karena proses dialog itu terjadi atas dasar kelembutan, kasih sayang, keterbukaan, ketaqwaan, tanpa tekanan untuk mengeliminir keinginan mereka, walaupun terasa berat. Dalam al-Qur'an ditegaskan, *"duhai anakku sayang! Aku baru saja mendapatkan wahyu perintah dari Allah dalam mimpiku, supaya aku menyembelimu. Terangkanlah sayang, betapa pendapat dan pikiranmu? Dengan spontan tak berpikir panjang sang putra menjawab: "Wahai bapakku sayang ... laksanakanlah apa yang sudah menjadi perintah Tuhan itu, Insya Allah bapak akan mendapatkan diriku dalam penuh kesabaran"* [Q.S.37:**102]** Dari kasus ayat ini, sebenarnya terdapat "perbedaan kepentingan" orang tua dan anak dalam konteks iman dan taqwa. Tetapi, karena kepentingan mereka didasarkan pada iman dan taqwa, maka persoalan yang menjadi beban orang tua dapat didialogkan dengan baik

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dan keduanya mengambil suatu kesepakatan dengan dasar taqwa dan amal shaleh sebagai tujuannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kunci utama dari persoalan ini adalah bagaimana pendidikan Islam mampu menghidupkan, membangun kebiasaan belajar mengajar dengan menerapkan nilai-nilai demokratis, dialogtis, persaiangan sehat dan bermutu, mengakui hak untuk berbeda yang dapat memicu suasana dinamis peserta didik tanpa paksaan dan tanpa merugikan tujuan pembelajaran, peserta didik, orang tua dan masyarakat.

Kelima, percaya kepada kemampuan manusia untuk membina masyarakat yang lebih baik di masa depan[389]. Manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi untuk didik dan mendidik, maka kepercayaan terhadap kemampuan untuk membangun masa depan adalah hal yang wajar, karena Allah juga memberikan kepercayaan kepada manusia sebagai *khalifah fil ardli*. Untuk itu, pendidikan sebagai sarana yang dapat membangun rasa percaya kepada kemampuan manusia, diharapkan dapat membentuk sikap manusia yang kreatif, inovatif, dan komunikatif dengan lingkungannya. Dalam al-Qur'an dikatakan, Allah telah memberikan kepercayaan dan menghargai manusia dengan segala potensi yang dimilikinya sebagai *khalifah fil ardli*, artinya Allah mempercayai manusia sebagai makhluk Allah yang dapat memimpin dan mengatur dunia ini.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dari konteks ayat ini, seharusnya dalam proses pendidikan Islam harus juga mempercayai dan mengakomodasi kemampuan yang dimiliki peserta didik, sehingga dapat mempersiapkan mereka dengan baik untuk menjadi anggota masyarakat dengan memiliki kemampuan akademik, teknologi, keterampilan yang unggul, profesional serta memiliki akhlak dan moral yang anggun untuk dapat "menyelesaikan tugas-tugas dan kewajibannya dengan jalan menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan, seni yang dimiliki di lingkungannya[390] dengan

---

[389] Ibid, hlm.74.

[390] Teuku Amiruddin, *Reorientasi Manajemen Pendidikan...*, hlm. 83.

didasarkan pada nilai-nilai *ilahiyah,* akhlak dan moral yang anggun. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan yang dinamis adalah pendidikan yang percaya kepada kemampuan peserta didik dengan segala potensi yang dimilikinya untuk dibina dan dikembangkan. Harus membangun rasa kepercayaan kepada anggota masyarakat untuk membina suatu masyarakat yang lebih baik tanpa melupakan unsur-unsur dari pendidikan itu sendiri yang memberi kekuatan untuk menatap masa depan yang lebih maju dan sejahtera.

Dari pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa proses pendidikan Islam dan terutama proses di kelas, harus didasarkan pada proses demokrasi pendidikan dengan diorientasikan pada pembaruan kultur dan norma keberadaban yang didasarkan pada nilai-nilai *ilahiyah* serta nilai-nilai insaniyah. Apabila lembaga-lembaga pendidikan Islam yang memasung perkembangan intelektual, kemampuan bersaing, kepatuhan pada spritualisme dan moral, hak-hak untuk berbeda, serta percaya kepada kemampuan peserta didik, "akan bertentangan secara *diameteral* dengan tuntutan masyarakat madani"[391] yang dicita-citakan bangsa Indonesia. Maka, lembaga-lembaga pendidikan Islam sebagai pranata sosial, di dalam membangun masyarakat madani Indonesia haruslah didasarkan pada nilai-nilai *ilahiyah* dan nilai-nilai *insaniyah* yang integratif serta dijiwai oleh nilai-nilai demokrasi.

Lembaga-lembaga pendidikan Islam, harus membangum suasana kebebasan intelektual, bersaing yang sehat dan rasional, spritualisme dan moral, menghargai hak-hak untuk berbeda, dan percaya kepada kemampuan peserta didik sebagai wujud dari demokrasi pendidikan. Karena "demokrasi pendidikan adalah proses pendidikan dalam upaya mewujudkan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Sedangkan nilai-nilai demokrasi yang ingin dicapai bukan berada di luar aktivitas pendidikan, tetapi *inheren* di dalam proses pendidikan"[392]. Dengan demikian proses pendidikan

---

[391]Ibid, hlm. 174.

[392]H.A.R. Tilaar, *Pendidikan, Kebudayaan, dan...*, hlm. 174.

Islam, harus dikembangkan berdasarkan paradigma tersebut di atas, yaitu pendekatan komunikatif, dialogtif, kebebasan berpendapat dan bukan instruktif. Dalam proses ini, tentu akan memberi peluang yang banyak bagi peserta didik dan pengajar untuk membiasakan dirinya mengutarakan pendapat walaupun berbeda serta mengembangkan rasa keingintahuan dan berbuat [beramal] yang lebih banyak sebagai suatu prestasi dalam kehidupan ini.

3. Model-model Pendidikan Islam alternatif dalam Masyarakat Madani Indonesia

Berbagai bentuk dan jenis pendidikan Islam di Indonesia, seperti Pondok Pesantren, Madrasah, Sekolah Umum bercirikan Islam dan Perguruan Tinggi Islam. Selain itu, jenis pendidikan Islam luar sekolah, seperti Taman Pendidikan al-Qur'an [TPA], Pesantrenisasi dan sebagainya. Kesemuanya itu, sesungguhnya merupakan aset dan salah satu dari konfigurasi sistem pendidikan nasional Indonesia. Keberadaan lembaga-lembaga pendidikan tersebut, sebagai khasanah pendidikan dan diharapkan dapat membangun dan memberdayakan umat Islam di Indonesia secara optimal, tetapi pada kenyataan bahwa pendidikan Islam di Indonesia tidak memiliki kesempatan yang luas untuk bersaiang dalam membangun umat yang besar ini. Hal ini, memang terasa janggal dan mungkin lucu, karena dalam suatu komunitas masyarakat muslim yang besar kurang mendapatkan kesempatan. Mungkin ada benarnya, pepatah yang mengakatakan bahwa "ayam mati kelaparan di lumbung padi", artinya, pada kenyataannya pendidikan Islam tidak mendapat kesempatan yang luas dan seimbang dengan umatnya yang besar di bumi Indonesia ini. Tetapi, tanpaknya akhir-akhir ini terlihat pendidikan Islam mulai mengalami kemajuan. Hal ini terbukti dengan semakin bertambah jumlah [kuantitatif], kokohnya keberadaan lembaga pendidikan Islam dan beberapa jenis serta model pendidikan yang

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ditawarkan. Namun pada kenyataannya tantangan yang dihadapi pendidikan Islam tetap saja kompleks, sehingga menuntut langkah-langkah perubahan dan inovatif.

A.Mukti Ali, menyatakan bahwa kelemahan-kelemahan pendidikan Islam di Indonesia dewasa ini lebih disebabkan oleh faktor-faktor penguasaan sistem dan metode, bahasa sebagai alat, ketajaman interpretasi [*insinght*], kelembagaan [oraganisasi], manajemen, serta penguasaan ilmu dan teknologi. Berkaitan dengan hal ini, M.Arifin, juga menyatakan bahwa pendidikan Islam harus didesak untuk melakukan inovasi yang tidak hanya berkaitan dengan perangkat kurikulum dan manajemen, tetapi juga menyangkut dengan startegi dan taktik operasionalnya. Strtaegi dan taktik itu, menuntut perombakan model-model pendidikan sampai dengan institusi-institusinya, sehingga lebih efektif dan efisien, dalam arti pedagogis, sosiologis dan kultural dalam menunjukkan perannya[393]. A. Syafii Maarif, menggambarkan situasi pendidikan Islam di Indonesia sampai awal abad ini tidak banyak berbeda dengan perhitungan kasar yang dikemukakan di atas. Sistem madrasah dan pesantren yang berkembang di nusantara ini dengan segala kelebihannya, juga tidak disiapkan untuk membangun peradaban[394].

Mencermati kondisi tersebut di atas, maka penataan sistem dan model-model pendidikan Islam di Indonesia adalah sesuatu yang tidak terelakkan lagi. Sistem pengembangan pendidikan Islam hendaknya dipilih dari kegiatan pendidikan yang paling mendesak dan senteral yang akan menjadi model dasar untuk usaha pengembangan model-model pendidikan Islam selanjutnya, dengan tidak meninggalkan lembaga-lembaga pendidikan seperti keluarga, sekolah dan madrasah, masjid, pondok pesantren, dan pendidikan luar sekolah lainnya tetap dipertahankan keberadaannya. Yahya Muhaimin [mantan Menteri pendidikan Nasional], juga "menawarkan sebuah *mindmp* tentang basis-basis pendidikan, yaitu pendidikan

---

[393]M.Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1991), hlm. 3.

[394]A. Syafii Maarif, "*Keutuhan dan Kebersamaan dalam Pengelolaan Pendidikan Sebagai Wahana Pendidikan Muhammadiyah*", makalah disampaikan pada Rakernas Pendidikan Muhammadiyah, di Pondok Gede, Jakarta, 1996, hlm. 5.

berbasis keluarga [*family-based education*], pendidikan berbasis komunitas [*community-based education*], pendidikan berbasis sekolah [*school-based education*], dan pendidikan berbasis tempat kerja [*workplace-based education*]"[395]. Apabila dicermati, model-model pendidikan Islam sekarang ini sekurang-kurangnya berbasis pada empat jenis lembaga pendidikan Islam yang dapat mengambil peran dalam memberdayakan umat, yaitu pendidikan Islam berbais pondok pesantren, pendidikan Islam berbasis pada Mesjid, pendidikan Islam berbasis pada sekolah atau madrasah, dan pendidikan Islam berbasis pada pendidikan umum yang bernafaskan Islam.

Lembaga pendidikan yang berbasis pada pondok pesantren, sebagai model pendidikan Islam yang dapat mengembangkan atau memperluas sistem pendidikan nonformalnya pada pelayanan pendidikan yang meliputi berbagai jenis bidang misalnya, seperti pertanian, peternakan, kesehatan, kesenian, kepramukaan, iptek, dan pelbagain keterampilan, kemahiran dan sebagainya. Pondok pesantren, seharusnya memperluas pelayanan pendidikan kepada masyarakat secara wajar dan sistematis, sehingga apa yang disajikan kepada masyarakat akan tetap terasa bermuara pada pandangan dan sikap Islami, dan terasa bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Begitu juga mengenai aktivitas mesjid harus dijadikan basis pembinaan umat. Materi-materi kajian pendidikan Islam yang disampaikan lewat khotbah jum'ah dan ceramah-cemah harus dapat di sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi realitas umat yang dihadapi dan mengantisipasi kondisi perubahan masa depan. Pondok pesantren dan mesjid perlu menggalang kerjasama dengan para ulama dan para cendekiawan muslim yang di luar atau yang tergabung dalam perguruan tinggi yang ada di sekitarnya.

Adapun peran jenis pendidikan yang berbais pada madrasah dan pendidikan umum yang bernafaskan Islam, adalah dalam upaya menemukan pembaruan dalam

---

[395]Yahya Muhaimin [Menteri Pendidikan Nasional], *"Reformasi Pendidikan Nasional Munuju Indonesia"*, Majalah Dwiwutan BPK Penabur Jakarta, Midyawarta, No. 69/Thn.XII, From: http://www.bpk. Penabur. or.id/ KPS. Jkt/ widya/69/69.pdt,. Nopember 2000, hlm. 1.

sistem pendidikan formal yang meliputi metode pengajaran baik agama maupun umum yang efektif. inovasi dibidang kurikulum, alat-alat pelajaran, lingkungan yang mendidik, guru yang kreatif dan penuh dedikasi dan sebagainya sangat diperlukan[396]. Karel Steenbrink[397], menyatakan bahwa keberadaan pendidikan Islam di Indonesia cukup variatif. Tetapi Steenbrink, mengkategori pendidikan tersebut dalam tiga jenis, yaitu pendidikan Islam yang berbasis pada pondok pesentrean, madrasah dan sekolah. Ketiga jenis pendidikan ini diharapkan menjadi "modal" dalam upaya mengintegrasikan ilmu pengetahuan sebagai suatu paradigma didaktik-metodologis. Sebab, pengembangan keilmuan yang integral [*interdisipliner*] akan mampu manjawab kesan dikotimis dalam lembaga pendidikan Islam selama ini berkembang.

Pada sisi lain, muncul pula jenis pendidikan luar sekolah bagi anak-anak muslim dengan model pesantrenisasi dan TPA [Taman Pendidikan al-Qur'an]. Pendidikan pesantrenisasi sebagai jenis pendidikan Islam yang muncul sebagai kekuatan pendidikan Islam, walaupun dilaksanakan secara insidental pada setiap bulan Ramadlan, tetapi terencana dan terprogram oleh sekolah-sekolah. Artinya, pada liburan bulan Ramadlan peserta didik dikonsentasikan atau "dikemkan" pada suatu tempat untuk mendapatkan ceramah-ceramah agama Islam dan paraktek-praktek ibadah selama satu minggu atau lebih. Tetapi sayangnya pendidikan model ini belum ditintak lanjuti dan dievaluasi efiktitas dan efisiensi prosesnya baik dari kurikulum dan materi, metode, pengajar, waktu pelaksanaan dan organisasi. Kemudian, terdapat pula "Taman Pendidikan al-Qur'an" [TPA], sebagai kekuatan pendidikan Islam yang muncul dengan metode dan teknik baru yang dapat menghasilkan *output* yang mampu membaca al-Qur'an dalam waktu yang relatif singkat. Dapat kita saksikan produk TPA dengan bangga di wisuda oleh seorang Menteri bahkan tidak tanggung-tanggung oleh

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[396]Suroyo, *Perbagai Persoalan Pendidikan; Pendidikan Nasional dan Pendidikan Islam di Indonesia,* Jurnal Pendidikan Islam, Kajian tentang Konsepo Pendidikan Islam, Problem dan Prospeknya, Volem 1 Tahun 1991, Fakultas Tarbiyah IAIN, Yogyakarta, hlm. 77-78.

[397]Karel A. Steenbrink, Pesantren Madrasah..., hlm.

Presiden [zaman Presiden Soeharto]. Tetapi sampai saat ini belum terpikirkan tindak lanjut dari usaha pendidikan ini, karena selesai wisuda selesailah usaha pendidikan tersebut. Tetapi, harus diakui bahwa jenis pendidikan Qur'an ini, merupakan hasil inovasi dari model pengajaran al-Qur'an model lama. "Model pendidikan TPA yang ada sekarang merupakan hasil inovasi pendidikan dan perbaikan model pengajaran al-Qur'an tempo dulu itu. Maka dalam model TPA, seorang peserta didik tidak perlu berlama-lama belajar membaca al-Qur'an. Dalam waktu singkat ia telah dapat menguasainya, maka apabila dilihat dari segi didaktik metodik, TPA lebih efektif dan efisien dari pada model pengajaran al-Qur'an model lama"[398].

Perkembangan yang mencolok pada tahun 90-an adalah munculnya sekolah-sekolah elite Muslim yang dikenal sbagai "sekolah Islam". Sekolah-sekolah itu mulai menyatakan dirinya secara formal dan diakui oleh banyak kaum Muslim sebagai "sekolah unggulan" atau "sekolah Islam unggulan". Istilah lain yang sering digunakan untuk menyebut sekolah-sekolah tersebut adalah "SMU Model" atau "Sekolah Menengah Umum [Islam] Model". Dapat saja disebut, sekolah Islam al-Azhar yang berlokasi di komplek Masjid Agung al-Azhar di Kebayoran Baru Jakarta, dengan beberapa cabang seperti Cirebon, Surabaya, Sukabumi, Serang, Semarang dan sebagainya. Sekolah al-Izhar[399] di Pondok Labu, Jakarta, SMU Insan Cendekia[400] di Serpong dan SMU Madinah di Parung. Selain itu, masih muncul pula madrasah elite lain yang juga menjadi madrasah favorit, sebagai contoh adalah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) I Malang, Jawa Timur[401], Sekokolah Dasar (SD) Muhammadiyah Sapen,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[398]Hajar Dewantoro, "*Urgensi Inovasi Pendidikan dalam Pemberdayaan Umat*", dalam : Muslih Usa dan Aden Wijdan SZ [Penyunting], *Pendidikan Islam dalam Peradaban Industrialisasi*, (Yogyakarta: Aditiya Media, 1997), hlm. 90.

[399]Sekolah al-Izhar, milik yayasan Anakku, awalnya merupakan sebuah cabang dari sekolah al-Azhar di Kebayoran Baru, Jakarta. Karena konflik-konflik yang terjadi antara para pengurus kedua sekolah tersebut dan berakhir di pengadilan, dan "al-Azhar Pondok Labu" diperintahkan hakim untuk tidak menggunakan nama al-Azhar, dan pada tahun 1992, sekolah tersebut menggunakan nama baru yaitu "al-Izhar"[Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam,...* hlm. 74].

[400]SMU Insan Cendekia didirikan oleh kelompok ilmuwan dan intelektual Muslim yang kebanyakan bekerja pada Badan Pengkajian, Pengembangan dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang dahulunya dipimpin oleh BJ. Habibie. Karena itu sekolah ini memiliki ikatan emosional dengan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia) dan bahkan sekolah ini juga dikenal sebagai "sekolah Habibie" [Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernitas...*, hlm. 77].

[401]Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi...*, hlm.75-79.

Yogyakarta yang menjadi Sekolah Dasar bercirikan Islam yang menjadi faforit dan menjadi sekolah percontohan dan mungkin masih banykah sekolah-sekolah Islam dan Madrasah di daerah lain yang belum disebutkan dalam pembahasan ini.

Sekolah-sekolah tersebut dapat dikatakan sebagai "sekolah elite" Islam, karena sejumlah alasan yang mendasarinya. Alasan pertama bahwa sekolah-sekolah tersebut bersifat elite dari sudut akademis, dalam beberapa kasus hanya siswa-siswa terbaik yang dapat diterima sekolah-sekolah tersebut melalui seleksi yang kompetitif. Guru-guru yang mengajar di sekolah tersebut hanyalah mereka yang memenuhi persyaratan yang dapat diterima dan melalui seleksi secara kompetetif. Sekolah-sekolah tersebut dikelolah dengan manajemen yang baik dengan memiliki berbagai sarana pendidikan yang jauh lebih baik dan lebih lengkap, seperti perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, ruang komputer, masjid dan sarana olahraga. Semua itu membuat peserta didik di sekolah-sekolah tersebut jauh lebih baik secara akademis bila dibandingkan dengan sekolah-sekolah Islam lainnya dan bahkan dengan sekolah umum yang disekolah oleh pemerintah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dari perkembangan sekolah-sekolah ini, pemerintah dalam hal ini Departemen Agama dan para ahli pendidikan Islam mulai percaya bahwa kualitas pendidikan madrasah dapat ditingkatkan, artinya bahwa pendidikan berkualitas yang ditawarkan madrasah akan dapat "dibeli" oleh kalangan orang tua Muslim. Maka tanpaknya, kita harus berusaha melakukan koreksi secara cepat dan cermat tentang program-program pendidikan pendidikan Islam yang sedang dijalankan, sehingga perbedaan antara pendidikan Islam dengan pendidikan umum dalam konfigurasi pendidikan nasional dapat dipersempit, artinya, secara kualitas pendidikan Islam harus mendapat kesempatan yang luas dan seimbang dengan umatnya yang besar di bumi Indonesia ini. Apabila kita menginkan pendidikan Islam dapat bersaing dengan

pendidikan lain, tentu saja persoalan visi, misi, tujuan, fungsi, metode, materi dan kurikulum, orientasi, manajemen dan organisasi pendidikan Islam, harus dikoreksi, direvisi dan bahkan direformasi secara berani, sehingga pendidikan Islam akan menjadi pendidikan yang menarik minat peserta didik tanpa mengurangi prinsip-prinsip ajaran dari sumber pokok Islam yaitu Qur'an dan Hadis. Apabila persoalan tersebut dilakukan secara baik, terencana dan terprogram, pendidikan Islam akan menjadi lebih solid dalam memberdayakan umat Islam di Indonesia yang sedang menuju masyarakat madani Indonesia serta siap menghadapi tantangan globalisasi dan reformasi diberbagai bidang kehidupan berupa demokrasi pendidikan, membangun etos kerja, profesionalisme, memiliki kemampuan emosional dan moralitas agar dapat membangun masa depan yang lebih baik, lebih maju, damai, adil dan lebih sejahtera, sehingga terwujud masyarakat madani Indonesia yang *rahmatan lil'alamin*.

Dalam upaya mencari pola atau model alternatif pendidikan Islam, hendaknya pengembangan pendidikan Islam menitikberatkan atau berorientasi kepada visi dan misi, fleksibilitas, relevansi pendidikan di sekolah [formal] dan pendidikan di luar sekolah [non formal]. Artinya keluwesan sistem dan kerjasama antara bentuk lembaga pendidikan Islam itu, akan melahirkan model alternatif baru dewasa ini dan masa mendatang. Dalam upaya mencari "model alternatif pendidikan Islam" yang akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat madani Indonesia, paling tidak ada tiga pendekatan yang ditawarkan sebagai pola alternatif pendidikan Islam, yaitu pendekatan sistemik, suplemen dan pendekatan komplementer. [1] Pendekatan *sistemik*, yaitu perubahan harus dilakukan terhadap keseluruhan sistem pada lembaga pendidikan Islam formal yang ada, dalam arti terjadi perubahan total. [2] Pendekatan *suplementer*, yaitu dengan menambah sejumlah paket pendidikan yang bertujuan memperluas pemahaman dan penghayatan ajaran Islam secara lebih memadai. Langkah ini yang sering dilakukan dengan istilah yang populer adalah "tambal sulam". [3] Pendekatan *komplementer*, yaitu dengan upaya mengubah kurikulum dengan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

sedikit radikal untuk disesuaikan secara terpadu[402]. Artinya, untuk kondisi sekarang ini, perubahan kurikulum pendidikan Islam harus diorientasikan pada kompetensi yaitu kompetensi *knowledge* [pengetahuan], *skill* [keterampilan atau kemahiran], kompoetensi ability [memiliki kemampuan tertentu], komptensi sosial-kultural, dan kompetensi spritual *ilahiyah*.

Dalam menghadapi perubahan menuju masyarakat madani Indonesia, ada beberapa persoalan mendasar dari internal pendidikan Islam yang harus diselesaikan terlebih dahulu secara tuntas, yaitu : *Pertama*, harus mengikis habis wawasan sejarah pendidikan Islam yang tidak sesuai dengan gagasan yang dibawa al-Qur'an, berupa persolan dikotomik pendidikan Islam yang merupakan persoalan mendasar dari perkembangan pendidikan Islam selama. Pendidikan Islam harus dijauhkan dari dikotomik, menuju pada integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum, sehingga tidak melahirkan jurang pemisah antara ilmu agama dan ilmu bukan agama. Integrasi tersebut dengan sekaligus menciptakan perangkat lunah yaitu kerangka filosofis yang jelas dan baku. Ahmad Syafii Maarif, menyatakan bahwa pendidikan Islam harus dijauhkan dari buaian *hellenisme* yang diberi jubah Islam dan kita harus berada pada sumbu Islam, al-Qur'an, Hadis dan karir yang pernah diraih nabi Muhammad Saw. Maka kita tidak perlu berteriak, mari kita Islamkan ilmu modern", yang hanya akan mengulangi hal serupa, yaitu pendidikan Barat yang dijustifikasikan dengan ayat-ayat Qur'an. Berkaitan dengan hal tersebut, yang pertama kali harus dimiliki adalah kemandirian dalam segala aspek. Dengan kemandirian tersebut, akan melindungi proses pengembangan pendidikan Islam dari berbagai intervensi yang akan memperkosa proses pengembangan pendidikan Islam untuk tetap bersiteguh berdiri pada konsep yang murni dari al-Qur'an dan al-Hadis untuk memberdayakan bangsa yang mayoritas muslim ini[403]. *Kedua*, perlu pemikiran kembali tujuan dan fungsi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[402]Suroyo,"*Pendidikan Islam di Indonesia Merancang Masa Depan*",UNISIA,No.12 Th. XIII,1992,UII,Yogyakarta,hlm.64.

[403]Ahmad Syafii Maarif, "*Pendidikan Islam dan Proses Pemberdayaan Bangsa*, dalam: Muslih Usa (Penyun.), *Pendidikan Islam dalam Peradaban Industrialisasi*, (Yogyakarta: Aditya Media bekerja sama dengan Fakultas Tarbiyah UII, 1997), hlm. 67.

lembaga-lembaga pendidikan Islam. Artinya lembaga-lembaga pendidikan tidak hanya berorientasi atau memenuhi keinginan kepentingan akhirat saja dengan mengajarkan keterampilan beribadah saja. Hal itupun, masih dirasakan apabila pendidikan Islam "dipandang dari dimensi ritual masih jauh dalam memberikan pengayaan spritual, etika dan moral"[404] *ilahiyah*. Memang diakui, bahwa peserta didik secara verbal kognitif dapat memahami ajaran Islam dan terampil dalam melaksanakannya [psikomotorik], tetapi kurang menghayati [afektif] kedalaman maknanya. Oleh karena itu, lembaga-lembaga pendidikan Islam harus menjadikan pendidikannya tersebut sebagai tempat untuk mempelajari ilmu-ilmu agama [spritual *ilahiyah*], ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan atau kemahiran, seni dan budaya serta etika dan moral *ilahiyah*.

Selain persoalan tersebut, pendidikan Islam sekarang ini juga dihadapkan pada persoalan-persoalan yang cukup kompleks, yakni persoalan globalisasi, reformasi dan masyarakat madani Indonesia. Tantangan yang dihadapi sekarang adalah bagaimana upaya untuk membangun paradigma baru pendidikan Islam, visi, misi, dan tujuan, yang didukung dengan sistem kurikulum atau materi pendidikan, manajemen dan organisasi, metode pembelajaran untuk dapat mempersiapkan manusia yang berkualitas, bermoral tinggi dalam menghadapi perubahan masyarakat global yang begitu cepat, sehingga produk pendidikan Islam tidak hanya melayani dunia modern, tetapi mempunyai pasar baru atau mampu bersaing secara kompetetif dan proaktif dalam dunia masyarakat modern, global, informasi dan masyarakat madani Indonesia. Perubahan yang perlu dilakukan pendidikan Islam, yaitu: [1] Membangun sistem pendidikan Islam yang mampu mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas agar mampu mengantisipasi kemajuan iptek untuk menghadapi tantangan dunia global menuju masyarakat madani Indonesia yang dilandasi dengan nilai-nilai *ilahiyah,* kemanusia [*insaniyah*], dan masyarakat, serta budaya. [2] Menata manajemen pendidikan Islam dengan berorientasi pada manajemen berbasis sekolah agar mampu

[404] A. Malik Fadjar, *Reorientasi Pendidikan Islam*,, hlm. 52.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

menyerap aspirasi masyarakat, dapat mendayagunakan potensi masyarakat, dan daerah [otonomi daerah] dalam rangka penyelenggaraan pendidikan Islam yang berkualitas. [3] Meningkatkan demokratisasi penyelenggaraan pendidikan Islam secara berkelanjutan dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat agar dapat menggali serta mendayagunakan potensi masyarakat.

Dari uraian di atas, menegaskan bahwa lembaga-lembaga pendidikan Islam harus mendisain model-model pendidikan alternatif yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan sekarang ini. Muncul pertanyaan model-model pendidikan Islam yang bagaimana? Yang diharapkan dapat menghadapi dan menjawan tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat baik sosial maupun kultural menuju masyarakat madani Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan ini, meminjam prinsip hakekat pendidikan Islam yang digunakan Hasim Amir, yang mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang idealistik, yakni pendidikan yang *integralistik, humanistik, pragmatik* dan *berakar pada budaya kuat*[405]. Tawaran Hasim Amir ini, yang dikutip A. Malik Fadjar, dapat digunakan sebagai konsep pendidikan Islam dalam menghadapi perubahan masyarakat madani Indonesia, yaitu :

Pertama, pendidikan *integralistik,* merupakan model pendidikan yang diorientasikan pada komponen-komponen kehidupan yang meliputi: Pendidikan yang berorientasi pada *Rabbaniyah* [Ketuhanan], *insaniyah* [kemanusiaan] dan *alamiyah* [alam pada umumnya], sebagai suatu yang integralistik bagi perwujudan kehidupan yang baik dan untuk mewujudkan *rahmatan lil 'alamin,* serta pendidikan yang menggap manusia sebagai sebuah pribadi jasmani-rohani, intelektual, perasaan dan individual-sosial. Pendidikan integralistik diharapkan dapat menghasilkan manusia [peserta didik] yang memiliki integritas tinggi, yang dapat bersyukur dan menyatu dengan kehendak Tuhannya, menyatu dengan dirinya sendiri sehingga tidak memiliki

[405]A. Malik Fadjar, *Reorientasi Pendidikan Islam*, hlm. 37.

kepribadian belah atau kepribadian mendua, menyatu dengan masyarakat sehingga dapat menghilangkan disintegrasi sosial, dan dapat menyatu dengan alam sehingga tidak membuat kerusakan, tetapi menjaga, memlihara dan memberdayakan serta mengoptimalkan potensi alam sesuai kebutuhan manusia.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep pendidikan Islam adalah pendidikan yang bersumber dari konsep Ketuhanan [*Teosentris*], artinya pendidikan Islam harus berkembang dan dikembangkan berdasarkan teologi tersebut. Konsep kemanusiaan, artinya dengan konsep ini dapat dikembangnya antropologi dan sosiologi pendidikan Islam, dan konsep alam dapat dikembangkannya konsep pendidikan *kosmologi* dan ketiga konsep ini harus dikembangkan seimbang dan integratif.

Kedua, pendidikan yang *humanistik,* merupakan model pendidikan yang berorientasi dan memandang manusia sebagai manusia [humanisasi], yakni makhluk ciptaan Tuhan dengan *fitrah*nya. Maka manusia sebagai makhluk hidup, ia harus mampu melangsungkan, mempertahankan, dan mengembangkan hidupnya. Maka posisi pendidikan dapat membangun proses humanisasi, artinya menghargai hak-hak asasi manusia, seperti hak untuk berlaku dan diperlakukan dengan adil, hak untuk menyuarakan kebenaran, hak untuk berbuat kasih sayang, dan lain sebagainya.

Pendidikan humanistik, diharapkan dapat mengembalikan peran dan fungsi manusia yaitu mengembalikan manusia kepada fitrahnya sebagai sebaik-baik makhluk [*khairu ummah*]. Maka, manusia "yang manusiawi" yang dihasilkan oleh pendidikan yang humanistik diharapkan dapat mengembangkan dan membentuk manusia berpikir, berasa dan berkemauan dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan yang dapat mengganti sifat individualistik, egoistik, egosentrik dengan sifat kasih sayang kepada sesama manusia, sifat menghormati dan dihormati, sifat ingin memberi dan menerima, sifat saling menolong, sifat ingin mencari kesamaan, sifat menghargai hak-hak asasi manusia, sifat menghargai perbedaan dan sebagainya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ketiga, penddidikan *pragmatik* adalah pendidikan yang memandang manusia sebagai makhluk hidup yang selalu membutuhkan sesuatu untuk melangsungkan, mempertahankan dan mengembangkan hidupnya baik bersifat jasmani maupun rohani, seperti berpikir, merasa, aktualisasi diri, keadilan, dan kebutuhan spritual *ilahiyah*. Dengan demikian, model pendidikan dengan pendekatan pragmatik diharapkan dapat mencetak manusia pragmatik yang sadar akan kebutuhan-kebutuhan hidupnya, peka terhadap masalah-masalah sosial kemanausiaan dan dapat membedakan manusia dari kondisi dan siatuasi yang tidak manusiawi.

Keempat, pendidikan yang *berakar pada budaya,* yaitu pendidikan yang tidak meninggalkan akar-akar sejarah, baik sejarah kemanusiaan pada umumnya maupun sejarah kebudayaan suatu bangsa, kelompok etnis, atau suatu masyarakat tertentu. Maka dengan model pendidikan yang berakar pada budaya, diharapkan dapat membentuk manusia yang mempunyai kepribadian, harga diri, percaya pada diri sendiri, dan membangun peradaban berdasarkan budaya sendiri yang akan menjadi warisan monumental dari nenek moyangnya dan bukan budaya bangsa lain[406]. Tetapi dalam hal ini bukan berarti kita menjadi orang yang anti kemodernan, perubahan, reformasi dan menolak begitu saja arus transformasi budaya dari luar tanpa melakukan seleksi dan alasan yang kuat.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Selanjutnya, dari keempat model yang dikemukakan di atas, dapat ditarik lagi pada disain model pendidikan Islam yang lebih operasional, yaitu:

Pertama, mendisain model pendidikan umum Islami yang handal dan mampu bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Dengan demikian, visi, misi dan tujuan pendidikan, kurikulum dan materi pembelajaran, metode pembelajaran, manajmen pendidikan, organisasi dan sumber daya pendidikan [guru dan tenaga administrasi] harus disesukan dengan kebutuhan serta sesuai misi, visi dan tujuan pendidikan tersebut. Model pendidikan umum Islami, kurikulumnya bersifat integratif

---

[406]A. Malik Fadjat, *Reorientasi Pendidikan Islam*, hlm.37-39.

antara materi-materi pendidikan umum dan agama, sehingga mampu mempersiapkan intelektual Islam yang berfikir secara komprehensif. Atau meminjam istilah Fazlur Rahman, yaitu model pendidikan sekuler modern dan mengisinya dengan konsep-konsep Islam, untuk melahirkan intelektualisme muslim yang tangguh, walaupun Ahmad Syafii Maarif, menolah hal ini yaitu kita tidak perlu berteriak untuk mengislamkan ilmu modern.

Kedua, model pendidikan Islam yang tetap mengkhususkan pada disain "pendidikan keagamaan" seperti sekarang ini. Artinya, harus mendisain ulang model "pendidikan Islam" yang berkualitas dan bermutu, yaitu : [1] dengan merumuskan visi dan misi serta tujuan yang jelas, [2] kurikulum dan materi pembelajaran diorientasikan pada kebutuhan peserta didik dan kebutuhan masyarakat untuk dapat menjawab tantangan perubahan, [3] metode pembelajaran diorientasikan pada upaya pemecahan kasus [promlem solving] dan bukan dominasi ceramah, [4] manajemen pendidikan diorientasi pada manajemen berbasis sekolah, [5] organisasi dan sumber daya guru yang memiliki kompetensi dan profesional dalam bidangnya masing-masing. Maka pendidikan Islam akan mampu bersaing dengan mampu mempersiapkan dan melahirkan mujtahid-mujtahid yang tangguh, berkualitas dan berkaliber dunia dalam bidangnya sehingga mampu menjawab persoalan-persoalan aktual atau kontemporer sesuai dengan kebutuhan perubahan zaman. Disain model pendidikan seperti ini, harus secara "selektif menerima" pendidikan produk barat, berarti harus mendisain model pendidikan yang betul-betul sesuai dengan konsep dasar Islam dan sesuai dengan lingkungan sosial-budaya Indonesia. Kata Fazlur Rahman, apabila kita ingin membangun pendidikan Islam yang berkualitas, harus kembali kepada al-Qur'an dan Qur'an harus ditempatkan sebagai pusat intelektualisme Islam[407].

Ketiga, model pendidikan agama Islam tidak dilaksanakan di sekolah-sekolah formal tetapi dilaksanakan di luar sekolah. Artinya pendidikan agama dilaksanakan di

[407]Fazlur Rahman, *Islam and Modernity*..., hlm. 1.

rumah atau lingkungan keluarga, mesjid dan lingkungan masyarakat [tempat-tempat pengajian dan Masjid] dalam bentuk kursur-kursus, kajian-kajian keagamaan, keterampilan beribadah dan sebagainya. Pendidikan agama akan menjadi tanggungjawab orang tua dan masyarakat atau meminjam konsep Yahya Muhaimin yang dikemukakan terdahulu bahwa pendidikan berbasis keluarga [*family-based education*] dan pendidikan berbasis pada masyarakat [*community-based education*]. Pendidikan Islam, dapat ditanamkan dan disosialisasikan secara intensif melalui basis-basis tersebut, sehingga pendidikan agama sudah menjadi kebutuhan [*need*] dan based dalam pribadi peserta didik. Maka dalam proses belajar mengajar di sekolah pendidikan agama telah menjadi kebutuhan dan prilaku [*afektif* dan *psikomotorik*] yang aktual, bukan lagi berupa pengetahuan [*knwoledge*] yang dihafal [*kognitif*] dan diujikan secara kognitif pula.

Keempat, disain model pendidikan diarahkan pada dua dimensi, yakni: [1] dimensi dialektika [horisontal], pendidikan hendaknya dapat mengembangkan pemahaman tentang kehidupan manusia dalam hubungannya dengan alam atau lingkungan sosialnya. Manusia harus mampu mengatasi tantangan dan kendala dunia sekitarnya melalui pengembangan Iptek, dan [2] dimensi ketunduhan vertikal, pendidikan selain menjadi alat untuk memantapkan, memelihara sumber daya alami, juga menjembatani dalam memahamai fenomena dan misteri kehidupan yang abadi dengan Maha Pencipta[408]. Berati pendidikan harus disertai dengan pendekatan hati, artinya pendidikan harus membangun hubungan manusia dengan Tuhannya, sesama manusia, dan lingkungan.

Keempat model pendidikan Islam yang dikemukakan di atas merupakan tawaran desain dan model pendidikan Islam yang perlu diupayakan untuk membangun paradigma pendidikan Islam dalam menghadapi perkembangan

---

[408]M. Irsyad Sudiro, *Pendidikan Agama dalam Masyarakat Modern*, Seminar dan Lokakarya Nasional Revitalisasi Pendidikan Luar Sekolah dalam Masyarakat Modern, Cirebon, Tanggal, 30 Agustus – 1 September 1995, hlm. 2.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

perubahan zaman modern dan memasuki masyarakat madani Indonesia. Kecenderungan perkembangan semacam, dalam upaya mengantisipasi perubahan zaman dan merupakan hal yang wajar-wajar saja. Sebab kondisi masyarakat sekarang ini lebih bersifat praktis-pragmatis dalam hal aspirasi dan harapan terhadap pendidikan, sehingga pendidikan tidak statis atau hanya berjalan di tempat dalam menatap persoalan-persoalan yang dihadapi pada era masyarakat modern, post masyarakat modern dan masyarakat madani Indonesia. Dengan demikian, apapun model pendidikan Islam yang ditawarkan dalam masyarakat madani Indonesia, pada dasarnya harus berfungsi untuk memberikan kaitan antara peserta didik dengan nilai-nilai *ilahiyah*, pengetahuan dan keterampilan, nilai-nilai demokrasi, masyarakat dan lingkungan sosiokulturalnya yang terus berubah dengan cepat, sebab pada saat yang sama pendidikan secara sadar juga digunakan sebagai instrumen untuk perubahan dalam sistem politik, ekonomi secara keseluruhan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

4. Kontribusi dan Peran Pendidikan Islam dalam Masyarakat Madani Indonesia

Perubahan menuju masyarakat madani sangat membutuhkan individu dan masyarakat dengan kemampuan yang tinggi, unggul, berkualitas dan profesional. Maka untuk menjadi pelaku aktif dalam bidang tertentu dan kualitas kegiatan tertentu serta kualitas hasil yang dikehendaki dalam masyarakat madani, sangat dibutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan profesional dalam bidangnya dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap tata nilai dan sistem dalam mayarakat madani Indonesia. Maka peran pendidikan sangat diharapkan untuk dapat "mempersiapkan individu dan masyarakat yang memiliki kemampuan, motivasi dan berpartisipasi secara aktif dalam aktualisasi dan institusionalisasi masyarakat madani"[409]. Pendidikan sangat dibutuhkan dan diharapkan untuk mempersiapkan manusia yang

[409]Kelompok Kerja Pengakajian dan Perumusan Filosofi, Kebijakan dan Strategi Pendidikan Nsional, *Bab II : Masyarakat Madani Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tanggal, 15 Februari 1999, hlm, 11.

memiliki kemampuan tersebut agar dapat aktif dalam masyarakat madani Indonesia yang dicita-citakan tersebut.

Dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat madani Indonesia, kebijaksanaan dasar reformasi pendidikan meliputi aspek-aspek makro yaitu visi dan misi sampai dengan manajemen pendidikan. Sedangkan pada aspek mikro yakni kebijakan dasar mengenai proses pendidikan Islam, apa dan dengan apa cara bagaimana pembelajaran harus terjadi, karena upaya pendidikan Islam harus mampu melahirkan manusia yang unggul secara intelektual, anggun secara moral, memiliki kompeten dalam iptek, serta memiliki komitmen tinggi dalam berbagai peran sosial. Pada level makro dibutuhkan sistem pendidikan Islam yang demokratis dan berorientasi pada kemajemukan. Semua itu harus tercermin di antaranya dalam pemerataan dan aksesibilitas kesempatan pendidikan, disentralisasi kewenangan pendidikan yang disertai dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang mengatur manajemen mutu pendidikan. Pada level mikro, proses pendidikan harus terjadi dalam iklim demokratis, kesempatan melakukan diversifikasi secara profesional, dengan koridor mencerdaskan kehidupan bangsa[410].

Dalam menghadapi perubahan tersebut, diperlukan orang-orang yang cerdas, berpengetahuan luas dan orang-orang yang memiliki etos kerja yang tinggi. Dengan kata lain, perlu ditumbuh-kembangkan kesadaran epistemologis umat Islam dalam mewujudkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Karena selama ini, nilai-nilai ajaran Islam hanya berfungsi sebagai slogan dan justifikasi [pembenaran dan penolakan] terhadap penomena sosial yang berkembang. Demikian pula, proses pendidikan Islam terjebak dalam paradigma ini, sehingga penanaman nilai-nilai ajaran Islam tidak berfungsi sebagai motivatif, inovatif dan leberatif, melainkan hanya sebagai pembatas antara yang boleh dan tidak boleh dan mungkin dapat menghambat kreatifitas. Satu hal yang dapat dilihat adalah kelemahan umat Islam dalam

[410]Ibid, hlm. 12.

penyelenggaraan pendidikan Islam yang faktor utamanya terletak pada dataran *epistemologi*, yaitu bagaimana mencairkan nilai-nilai Islam dalam setting sosial kultural yang berkembang. Hal ini antara lain, disebabkan umat Islam masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia yang memilki pengetahuan dan keterampilan serta etos, yang memadai[411]. Untuk menghadapi era globalisasi dan era informasi untuk menuju masyarakat madani Indonesia, perlu ditumbuhkan-kembangkan kesadaran *epistemologis* umat Islam dalam mewujudkan ajaran Islam dalam kehidupan, artinya ajaran Islam dapat teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat muslim. Oleh karenanya, dalam rangka membangun sistem nilai Islam pada bidang pendidikan agar dapat menjadi sebuah sistem pendidikan yang dapat diandalkan dan unggul, paling tidak meningkatkan kualitas berpikir dengan cara meningkatkan kecerdasan dan memperluas wawasan, analisis serta meningkatkan kualitas kerja melalui peningkatan etos kerja[412].

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa sektor pendidikan memiliki peran strategis dan fungsional dalam menghadapai tuntutan perubahan menuju masyarakat Indonesia. Peran sektor pendidikan sangat diharapkan untuk mampu menghasilkan: *Pertama,* manusia-manusia Indonesia bertaqwa, berpengatahuan dan berketerampilan, berjiwa demokratis, berkeadilan, berkeadaban dan berbudaya, egalitaran, memiliki etos kerja, kompetetif dengan menghargai nilai-nilai kemanusian, penuh toleransi, memiliki rasa partisipasi sosial dan solidaritas sosial yang tinggi, menjunjung tinggi hukum, menegakkan hukum dan peraturan yang berlaku, serta berwawasan global tetapi berpikir dalam kerangka kebutuhan lokal. *Kedua,* sektor pendidikan dapat membangun demokrasi pendidikan agar dapat menyiapkan peserta didik yang memiliki kebebasan, agar terbiasa berbicara, berpendapat secara bertanggung jawab, terbiasa mendengarkan dan menghargai

[411]A. Malik Fadjar, *Reorientasi Pendidikan Islam*,, hlm. 42.
[412]Ibid, hlm. 42.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pendapat orang lain serta menumbuhkan keberanian moral yang tinggi. Artinya pendidikan diarahkan pada pembaruan kultur, norma keberadaban, partispasi sosial dan hukum. Demokratisasi pendidikan, diharapkan mampu membawa peserta didik untuk menghargai kemampuan orang lain, kebudayaan, agama orang lain dan sejumlah kemajemukan lainnya serta menjunjung tinggi norma-norma hukum. Proses demokratisasi pendidikan mesti disertai dan diperkuat dengan proses-proses profesionalisme. Dalam konteks ini, manajemen pendidikan makro dan manajemen lembaga-lembaga pendidikan hendaknya dilakukan secara profesional, mengajar dilakukan oleh guru yang profesional, disertifikasi sebagai profesional oleh badan profesional, diawasi dan dinilai oleh lembaga-lembaga yang kompotensi dan profesional[413].

Untuk menuju masyarakat madani Indonesia paling tidak peran pendidikan Islam dapat mempersiapkan atau memproses manusia yang akan memiliki kemampuan intelektual, keterampilan atau kemahiran, kemampuan sosial, kemampuan membangun masyarakat yang beradab, memiliki kemampuan kinerja tinggi serta memiliki kemampuan spritual *ilahiyah* yang tinggi. Konsep ini memang tidak muda untuk penyelesaiannya, karena tidak seperti membalik telapak tangan, tetapi perlu diupayakan. Untuk itu, pendidikan Islam perlu melakukan perubahan dengan mendesain ulang konsep filosofis yang jelas dan baku, visi dan misi, tujuan dan fungsi lembaga-lembaga pendidikannya, kurikulum dan materi, proses pendidikannya agar dapat memenuhi tuntatan perubahan dan kebutuhan masyarakat. Dalam upaya perubahan pendidikan Islam tidak lagi bersifat konsumtif dalam pengertian pemuasan secara langsung atas kebutuhan dan keinginan yang bersifat sementara atau "tambal sulam" konsep saja, tetapi harus merupakan suatu bentuk investasi "sumber daya manusia [*human investment*]"[414] yang berkualitas, dengan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[413]Yahya Muhaimin, "*Reformasi Pendidikan Nasional* "., hlm. 2.

[414]A. Malik Fadjar, *Menyiasati Kebutuhan Masyarakat Modern*..., hlm. 1.

tujuan utama, adalah : [1] Pendidikan Islam, harus dapat membantu peningkatkan kualitas iman yang aplikatif, pengetahuan dan keterampilan untuk dapat bekerja lebih produktif, [2] pendidikan islam sebagai proses pembebasan dan proses pencerdasan, [3] pendidikan Islam sebagai proses untuk menjunjung tinggi hak-hak anak, [4] pendidikan Islam sebagai proses pemberdayaan potensi manusia, [5] pendidikan Islam dapat menjadikan anak berwawasan integratif, [6] pendidikan Islam dapat menghasilkan manusia demokratik dan membangun watak persatuan, dan [7] pendidikan Islam dapat menghasilkan manusia cinta perdamaian dan peduli terhadap lingkungan[415]. Kemudian dalam kaitannya dengan upaya perubahan dan pemberdayaan menuju masyarakat madani Indonesia, ada beberapa hal penting, yang harus dilakukan, yaitu :

Pertama, pendidikan civics menjadi sangat penting dengan mempertimbangkan karakteristik bangsa Indonesia. Pendidikan civics tersebut harus mencakup pendidikan yang mampu menumbuhkan perspektif histories dan kesadaran nilai-nilai yang diyakini yang sangat dibutuhkan dalam masyarakat madani Indonesia. *Kedua,* pembentukan kepribadian yang unggul perlu dikembangkan juga kemampuan inteligensi yang berdimensi banyak [*multiple intelligence*], termasuk di dalamnya adalah intelegensi emosional, moral dan spritual, dan *Ketiga,* sangat perlu untuk melakukan pengembangan pendidikan massal [*mass education*]. Artinya diperlukan berbagai pendekatan dengan pemberdayaan dan pendayagunaan media komunikasi massa tradisional, cetak, dan eloktronika[416], seprti: TV, internet, web, *homepage, cd-room* dan lain-lain. Dengan demikian, pendidikan yang dipersiapkan dan dikembangkan untuk masyarakat madani adalah pendidikan yang dapat mengembangkan manusia Indonesia beriman, berakhlak dan berbudi pekerti luhur,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[415]Djohar, *Omong Kosong*, 4 Mei 1999.

[416]Kelompok Kerja Pengakajian dan Perumusan Filosofi, Kebijakan dan Strategi Pendidikan Nsional, hlm, 12.

berkepribadian mantap, mandiri [otonomi], mempunyai rasa tanggungjawab [*responsibility*] terhadap kemasyarakatan dan kebangsaan.

Uraian di atas, menegaskan bahwa pendidikan sebagai sarana terbaik untuk mengembangkan kepribadian unggul dengan kemampuan ilmu pengetahuan, keterampilan, keahlian bekerja, sikap berprilaku dalam bekerja, dan memiliki cara berkehidupan bermasyarakat. Berkaitan dengan dunia kerja [pengguna jasa], menuntut pendidikan Islam untuk dapat menyiapkan calon tenaga kerja yang lebih berkualitas, bukan saja pada aspek penampilan dan koginitif, tetapi menuntut kematangan kepribadian dan emosional. Kondisi ini mengharuskan peran dan kontribusi lembaga-lembaga pendidikan Islam dalam masyarakat madani Indonesia dengan mempresiapkan dan mampu menghasilkan *output* pendidikan yang unggul bukan saja pada *basic knowledge* tetapi keterampilan professional dan emosional. Lembaga-lembaga pendidikan Islam harus mampu melakukan pembenahan dan pembruan dengan :

Pertama, program lembaga-lembaga pendidikan Islam lebih diorientasikan kepada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan keterampilan dengan meningkatkan kemampuan untuk menggunakan berbagai teknologi elektorinik, karena selama ini orientasi pendidikikan Islam lebih diutamakan pada kajian-kajian keagamaan. Maka perlu dilakukan reorganisasi dan konsulidasi terhadap manajemen, kurikulum dan silabi, materi pembelajaran, sumber daya pendidikan [guru dan tenaga administrasi], dan fasilitas belajar mengajar.

Kedua, lembaga-lembaga pendidikan Islam harus mampu mengembangkan atau melakukan defersivikasi program-program bidang studi yang sesuai dengan kebutuhan tenaga di bidang-bidang tertentu atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pengguna jasa pendidikan. Pengembangan program studi diorientasikan pada keilmuan dan kebutuhan pasar dengan melakukan inovasi program-program unggulan seperti program internasional, *dual degree* baik program

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

intern maupun bekerjasama dengan universitas luar negeri [untuk perguruan tinggi] yang dapat menjawab tuntutan kebutuhan pasar dan persaingan global. Lembaga-lembaga pendidikan Islam, terutama "lembaga pendidikan tinggi perlu diusahakan agar menjadi *"learning organization and creative centre"*. Maka diperlukan upaya yang sungguh-sungguh agar produknya tetap berorientasi pada "pasar" yaitu pada kebutuhan masyarakat dan disisi lain dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi [*link and match*]"[417]. Lembaga-lembaga pendidikan Islam menjalin hubungan dan kerjasama internal dengan pihak-pihak yang terkait antar lembaga pendidikan dengan lembaga-lembaga keilmuan yang berorientasi pada *link and match* dan melakukan tukar menukar tenaga kependidikan dalam bidang tertentu.

Ketiga, pengembangan kurikulum dan silabi relevan dengan kompetensi yang ingin dicapai. Pengembangan kurikulum dan silabi diorientasikan pada keunggulan kompetensi mencakup spritual *ilahiyah, knowledge, skill, ability dan* cultural-sosial dan diarahkan pada kebutuhan pasar. Peningkatan kualitas proses belajar-mengajar dengan berbasis pada kompetensi merupakan suatu hal yang penting untuk mewujudkan peran pendidikan Islam dalam masyarakat madani Indonesia. Untuk mencapai kondisi ideal tersebut di atas, diperlukan perbaikan dan peningkatan kualitas kurikulum dan silabi, bahan pengajaran [materi], metode mengajar bahkan sampai pada fasilitas dan peralatan mengajar yang memadai. Perbaikan proses belajar-mengajar yang diorientasikan pada *student learning* atau *student centred* dengan mengembangkan metode *applied approach, problem solving, problem based learning, cases studies, computer based* dan *practical based*, sehingga dapat meluluskan output yang memiliki bobot keilmuan, keterampilan dan keislaman. Untuk mendukung meteri pemebelajaran diperlukan pengembangan perpustakaan dengan

[417]Teuku Amiruddin, *Reorientasi Manajemen Pendidikan...*, hlm. 87.

jumlah refrensi yang memadai sebagai pusat sumber belajar dan berbasis pada teknologi informasi dengan mengembangkan *electronic library syistem*.

Keempat, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, manajemen dan organisasi yang efektif, sumber dana yang memadai dan efisien dengan memanfaatkan sarana yang tersedia. Peningkatan kualitas sumber daya pendidikan Islam dengan meningkatkan profesionalisme dalam proses pendidikan, artinya pentingnya tenaga pengajara yang terlatih dan professional serta memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan peserta didiknya. Tenaga pendidikan yang dibutuhkan adalah "sumber daya manusia yang jelas kemampuannya dengan seleksi yang kompetetif dan bukan hanya sekedar mencari penghidupan dalam pelaksanaan tugasnya. Mereka bukan pula yang hanya beragama Islam, tetapi tahu isi Islam [*'alim*], sehingga proses pendidikan dapat berjalan dengan baik, karena ia tahun ayat-ayat tentang potensi [*fitrah*] menusia yang dapat dikembangkan, ayat-ayat tentang pengetahuan, tarbiyah, syariah, geografiyah, sosiologiyah, etos kerja dan sebagainya[418]. Dibutuhkan sumber daya pendidikan yang "mengelola lembaga pendidikan dengan bersikap lebih terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan diperlukan majemen dalam bidang pendidikan supaya lebih professional"[419]. Perlu dilakukan training atau pelatihan-pelatihan yang dapat peningkatan kualitas mereka dalam pengelolaan dan kemampuan manajerial [manajerial skill] pendidikan Islam.

Kredibilitas pendidikan Islam dapat ditingkatkan menjadi lembaga yang ideal, elite, unggul dan berkualitas dengan melakukan program-program pendidikan dan latihan yang memenuhi kebutuhan pemakai [*user*] dan dapat "dibeli" oleh orang tua dan masyarakat. Pendidikan Islam diharapkan dapat memperlihatkan filosofi, konsep, prinsip, sistem dan prosedur-prosedur bagi proses pengajaran yang lebih efektif

[418]Ahmad Syafii Maarif, *Pendidikan Islam dan Proses Pemberdayaan Bangsa*, hlm. 68.

[419]Teuku Amiruddin, *Reorientasi Manajemen Pendidikan...*, hlm.103.

dengan pola pembelajaran siswa aktif atau *student centerd* dengan mengakses kebutuhan pasar dan masyarakat guna tercapainya prestasi yang lebih baik. Proses pendidikan Islam harus mampu menampilkan kajian-kajian keislaman kontemporer dan kajian-kajian social-kultural kemasyarakatan dengan mengadaptasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diarahkan pada peningkatan kualitas perilaku kehidupan beragama, sehingga peran pendidikan Islam di Indonesia diharapkan mampu menjadi *center of Islamic studies* baik yang berskala nasional maupun internasional sehingga pendidikan Islam akan berperan dominan dalam menghadapi era globalisasi dan masyarakat madani Indonesia.

Dari semua itu, maka hasil yang diharapkan dari pendidikan Islam untuk membangun masyarakat madani Indonesia, adalah eksistensi pendidikan Islam diharapkan akan mampu berkomunikasi dan berkompetisi dengan berbagai lembaga pendidikan lainnya dalam membangun manusia Indonesia yang utuh [*insan kamil*]. Pendidikan Islam harus dikembangkan dengan menggunkan prinsip integral dan terpadu secara professional dengan berorientasi pada nilai-nilai *ilahiyah*, kemanusian [*insaniyah*] dan lingkungan atau kealaman [*alamiyah*]. Dengan demikian, proses pendidikan Islam diharapkan dapat; [1] mengembangkan manusia yang "bertaqwa" dan "berkualitas" dengan memiliki iman, akhlak dan moral yang anggun. Unuk itu, pronses pendidikan Islam tidak hanya menekankan *ortodoksi* [dominasi kognitif] dalam pengajaran, tetapi lebih menekankan proses pendidikan *ortopraktis* yaitu bagaimana mewujudkan iman *ilahiyah* dalam tindakan nyata operasional, [2] pendidikan Islam diharapkan mengembangkan manusia yang memliki sikap demokratis, taat hukum dan menghargai hak asasi manusia, menghargai perbedaan dan pluralisme, [3] pendidikan Islam diharapkan mengembangkan manusia memiliki kemampuan pengetahuan dan teknologi, kemampuan keterampilan atau kemahiran yang professional yang integral dan didasarkan pada nilai-nilai *ilahiyah* serta memiliki

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

kemampuan memecahkan masalah dan siap untuk komporatif dan kompetitif dalam era globalisasi dan informasi menuju masyarakat madani Indonesia.

Dalam rangka pembaruan pendidikan Islam menuju masyarakat madani Indonesia, paling tidak kurikulum dan proses pendidikan Islam diharapkan dapat mengembangkan "sikap demokratis, sikap toleransi, sikap saling pengertian serta membangun manusia dan masyarakat yang berwawasan global"[420]. Maka dalam upaya pembaruan pendidikan Islam menuju masyarakat madani Indonesia, diharapkan dapat:

Pertama, proses pendidikan Islam diharapkan dapat mengembangkan sikap demokratis. Sikap demokratis bukan hanya mengembangkan pembentukan individu yang mempunyai harga diri, berbudaya, dan memiliki indentitas sebagai Muslim dan bangsa Indonesia, tetapi perlu menumbuhkan sikap demokratis dalam bentuk perilaku sebagai budaya dan dalam suatu sistem yang dapat mengembangkan sikap tersebut. Sistem pendidikan diharapkan mampu mengembangkan sikap demokratis, maka lembaga-lembaga pendidikan Islam sudah harus mendisain kurikulum dan proses belajar yang menumbuhkan sikap kreatif, bebas dan sanggup mengemukakan pendapat, berbeda pendapat dan menghargai pendapat. Dengan demikian, para guru [pendidik] dan dosen yang *otokratis, killer* sudah harus meninggalkan sikap tersebut, karena hal tersebut tidak memungkinkan tumbuhnya sikap demokratis dari para peserta didik.

Kedua, pendidikan Islam dapat mengembangkan sikap toleransi dan saling pengertian dalam proses belajar. Sikap toleransi harus dapat diwujudkan oleh semua anggota dan semua lapisan masyarakat sehingga terbentuk suatu masyarakat yang *rahmatan lil 'alaimin,* yaitu masyarakat yang damai, aman, kompak tapi beragam dan kaya dengan ide-ide. Juwono Sudarsono[421], mengemukakan di samping sikap tolerasi

---

[420]H.A.R. Tilaar, *Pendidikan, Kebudayaan dan...*, hlm.179-181.

[421]Juwono Sudarsono, ICWA, diskusi mengenai:*The Development of Educatio and Civil Society*, 9 Maret 1999, Jakarta.

juga penting sikap kompromi perlu dikembangkan dalam proses pendidikan. Selain sikap toleransi, perlu didukung dengan "sikap saling pengertian" yang perlu dikembangkan dalam proses pendidikan, sehingga perbedaan pendapat dan pandangan justru menjadi suatu *"rahmah"* dan *"hikmah"* untuk membentuk suatu masyarakat yang memiliki wawasan dan horizon yang luas dan kaya. Untuk itu, proses pendidikan Islam diharapkan dapat mengakumodasi sikap tersebut dalam proses belajarnya, sehingga terbentuknya budaya sikap toleran dan saling menghargai sebagai manifestasi dari nilai-nilai ajaran Islam [nilai-nilai *ilahiyah*] yang apliktif dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terwujud *insaniyah* dan *almiyah* yang *rahmatan lil 'alamin*.

Ketiga, proses pendidikan Islam dapat mengembangkan manusia dan masyarakat yang berwawasan global. Masyarakat Indonesia sedang memasuki kehidupan baru dalam milenium ketiga yaitu masyarakat global yang ditandai dengan kemajuan teknologi, arus informasi dan pasar bebas. Pendidikan Islam dapat mempersiapkan kurikulum dan proses belajar yang dapat mengahasilkan *output* yang siap masuk era globalisasi. Dalam kehidupan globalisasi tersebut memberikan peluang dan kesempatan-kesempatan baru tetapi juga merupakan tantangan-tantangan yang semakin sulit dan kompleks, sehingga membutuhkan kualitas sumber daya manusia yang professional dan unggul. Dengan demikian, proses pendidikan Islam tidak hanya mengembangkan pengetahuan, keterampilan, teknologi, dan bahasa saja, tetapi juga harus menyiapkan peserta didik dengan "keterampilan memecahkan persoalan", sehingga peserta didik siap menghadapi dan memecahkan persoalan-persoalan yang mencul akibat dari gelombang globalisasi tersebut. Tilaar[422], mengutip pengamatan UNESCO terdapat beberapa bahaya yang *inheren* di dalam gelombang globalisasi yang perlu diantisipasi dalam proses pendidikan.

[422] H.A.R. Tilaar, *Pendidikan, Kebudayaan dan...*, hlm.181-182.

Tantangan-tangan tersebut ialah regionalisasi, polarisasi, marginalisasi dan fragmentasi. [1] Regionalisasi, melahirkan berbagai kerjasama regional dengan menuntut program dan langkah-langkah yang sesuai di dalam pendidikan. Hal ini memberi keuntungan tetapi juga kendala bagi anggota kerjasama regional yang tidak mempersiapkan diri sehingga akan menguntungkan anggota yang telah siap. [2] Polarisasi antara negara antar negara yang maju dan negara berkembang. Apabila negara berkembang tidak mempersiapkan diri makan akan menjadi mangsa dari kekuatan global yang lebih kuat. [3] Marginalisasi, gelombang globalisasi dapat menyebabkan sekelompuk manusia tercecer atau terbuang dari arus perubahan. [4] Fragmentasi, kekuatan-kekuatan globalisasi dari negara-negara kuat dapat menyebabkan fragmentalisasi masyarakat, artinya ada kelompok-kelompok yang diuntungkan dan kelompok-kelompok yang dikalahkan oleh kepentingan-kepentingan tertentu.

Dengan demikian, pendidikan Islam harus mempunyai visi yang jelas untuk dapat memberdayakan manusia dan masyarakat sehinggan rentan terhadap perubahan-perubahan global tersebut. Pendidikan Islam harus berusaha keras melakukan perubahan pada sistem pendidikanya yang menyangkut dengan aspek filosofis, tujuan, kurikulum dan materi, metodologi, dan manajemen, dengan mencermati secara dini persoalan-persoalan yang diakibatkan gelombang globalisasi agar dapat mempersiapkan manusia dan masyarakat Muslim Indonesia untuk lebih siap menghadapi tantangan-tantangan perubahan global tersebut, dengan tidak melupakan atau meninggal nilai-nilai ajaran *Ilahiyah* [Islam].

* * *

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB VI
P E N U T U P

A. Kesimpulan

Untuk membangun suatu masyarakat, diperlukan berbagai terobosan dalam penyusunan konsep, serta tindakan-tindakan, diperlukan paradigma-paradigma baru di dalam menghadapi tuntutan-tuntutan tersebut. Tantangan-tantangan baru tersebut dihadapi dengan menggunakan paradigma baru dan sektor pendidikan memiliki peran yang strategis dan fungsional dalam upaya membangun masyarakat. Dari uraian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembaruan pendidikan Islam menuju masyarakat madani Indonesia, sebagai berikut :

1. Orientasi pembaruan pendidikan pada masa awal dan masa penjajahan lebih pada upaya mencari model pendidikan Islam dengan mengadopsi sistem dan kelembagaan pendidikan modern kolonial Belanda dan pendidikan dari Timur Tengah. Masa kemerdekaan dan Orde Baru, pendidikan Islam lebih pada upaya mempertahankan eksistensinya dengan melakukan modernisasi pada sistem dan kelembagaan untuk menyamakan dengan pendidikan lain [umum] di Indonesia. Sedangkan, pada era reformasi, pendidikan Islam akan mengalami penggeseran paradigma, sehingga perubahan yang harus dilakukan pada aspek filosofis, visi, misi, tujuan, kurikulum, metodologi, manajemen serta strategi dan pendidikan Islam harus disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat madani Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Pendidikan Islam, perlu melakukan pembaruan pada aspek filosofis, visi, misi, tujuan, kurikulum, metodologi, dan manajemen pendidikan Islam untuk menuju masyarakat madani Indonesia, sebagai berikut:
   a. Landasan filosofis dan teori pendidikan Islam, harus dikembangkan dan dijabarkan atas dasar asumsi-asumsi yang kokoh dan jelas tentang konsep dasar ketuhanan [*ilahiyah*], konsep dasar manusia [*insaniyah*] dan konsep dasar alam semesta dan lingkungan, yang didasarkan pada al-Qur'an dan Hadis yang harus dilihat secara utuh, integratif dan interaktif. Dengan kata lain, kerangka dasar utama pengembangan pendidikan Islam adalah filsafat dan teori pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam, artinya pendidikan Islam tidak terlepas dari filsafat ketuhanan [*ilahiyah*] *"teosentris"* sebagai sumber nilai (*value*), motivasi dan pemikirannya. Relevan dengan kepentingan manusia dan

umat, artinya pendidikan Islam tidak terlepas dari filsafat manusia *"antroposentir"* yang dapat membangun kehidupannya, mengembangkan potensi manusia seutuhnya *"insan kamil"* yaitu manusia yang bertaqwa, berpengetahuan, berketerampilan, merdeka, berbudaya, kristis, toleran, taat hukum dan hak asasi. Relevan dengan lingkungan dan alam semesta, artinya pengembangan pendidikan Islam tidak terlepas dari persoalan lingkungan manusia dan alam semesta yang merupakan sumber kehidupan dan lingkungan yang selalu berubah mengikuti irama perubahan. Maka dalam penerapan dasar filsafat dan teori pendidikan, mempertimbangkan konteks dengan supra sistem, konteks dengan kepentingan dan kebutuhan manusia dan masyarakat, konteks dengan bangsa dan negara, konteks dengan sosial budaya, konteks dengan perubahan dalam menuju masyarakat madani Indonesia.

b. Merumuskan misi dan visi pendidikan Islam secara jelas dan tepat. Perumusan misi pendidikan menentukan arah, langkah-langkah dan peta perjalanan untuk mewujudkan visi dan harus dinyatakan dalam bentuk pernyataan formal tentang tujuan utama yang akan direalisir. Visi dirumuskan dalam bentuk pikiran yang melampaui realitas sekarang, artinya sesuatu yang ingin diciptakan, sesuatu yang akan diwujudkan harus dinyatakan dalam bentuk kalimat yang jelas, posetif, realis, menentang, mengundang partipasi dan secara jelas menunjukkan asumsi tentang gambaran masa depan yang ingin diwujudkan yang didasarkan pada nila-nilai [*values*] *ilahiyah.* Perumusan misi dan visi pendidikan Islam, tidak terpisahkan dari tugas manusia sebagai *khalifah fil ardi* dalam rangka membangun kehidupan dunia yang makmur, demokrasi, adil, dinamis, harmonis, lestasi, taat hukum, yang didasarkan pada nilai-nilai ilahiyah dalam masyarakat madani Indonesia. Visi yang dirumuskan bersifat makro dan mikro, pada tingkat makro, bagaimana pendidikan Islam dapat menunjang transformasi menuju masyarakat madani Indonesia yang memiliki identitas berdasarkan nilai-nilai Islam dan budaya Indonesia. Sedangkan pada tingkat mikro, bagimana pendidikan Islam menghasilkan manusia *religius ilahiyah* yang berbudaya dan berperadaban dengan memiliki pengetahuan dan teknologi, keterampilan, profesional, demokratis, memiliki integritas pribadi yang merdeka, memiliki kepribadian, moral dan akhlakul karimah, memiliki sikap toleransi kemanusia yang tinggi, taat hukum, menghargai hak sasi manusia serta memiliki orientasi global dan berpikir lokal dalam kehidupan masyarakat madani Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

c. Tujuan pendidikan Islam perlu dirumuskan secara jelas dan tepat karena akan menentukan arah, isi, memotivasi, pelaksanaan pendidikan dengan tolok ukur keberhasilannya. Tujuan dirumuskan berdasarkan prinsip menyeluruh, serasi, efisien dan efektivitas, dinamis, orientasinya harus jelas, bersifat problematik, strategis, antipatif dan menyentuh aspek aplikasi serta menyentuh kebutuhan masyarakat dan pengguna lulusan. Tujuan pendidikan Islam pada intinya adalah berupaya membangun dan mengembangkan manusia dan masyarakat secara utuh dan menyeluruh [*insan kamil*] dalam semua aspek kehidupan yang berbudaya dan berperadaban yang tecermin dalam kehidupan manusia bertaqwa dan beriman, berdemokrasi dan merdeka, berpengetahuan, berketerampilan, beretos kerja dan professional, beramal shaleh, berkepribadian, bermoral anggun dan berakhlakul karimah, berkemampuan inovasi dan mengakses perubahan serta berkemampuan kopetitif dan komporatif dalam era global dan berpikir lokal dalam rangka memperoleh kesejahteraan, kebahagian dan keselamatan *duniawiyah* dan *ukhrawiyah.* Dari kerangka ini, dapat dikatakan bahwa tujuan yang dirumuskan meliputi aspek *ilahiyah* (*teosentris*), jasmaniah, intelektual, kebebasan, mental, akhlak, professional, karya [*amaliyah*] dalam rangka mewujudkan manusia yang berbudaya dan berperadaban, cerdas, cakap, terampil, berkualitas, dinamis, kreatif, mandiri dan bertanggungjawab sebagai *"insan kamil"* dalam kehidupannya.

d. Kurikulum pendidikan Islam, perlu dikembangkan lebih bersifat problematik, strategis, antipatif dan aplikatif untuk memecahkan problem-problem yang dihadapi umat manusia. Kurikulum didasarkan pada kemampuan Islamiyah, pengetahuan, keterampilan dan sikap dengan diorientasikan dan disesuaikan dengan misi, visi dan tujuan, kebutuhan peserta didik masa kini dan masa akan datang, berkorelasi dengan pembangunan sosial, kesejahteraan masyarakat, berkorelasi dengan budaya, konteks global, konteks teknologi informasi, relevan dengan kebutuhan otonomi serta bersifat lentur dan adaptif terhadap perubahan untuk menjawab tuntutan dan tantangan arus globalisasi menuju masyarakat madani Indonesia. Intinya, disain program kurikulum pendidikan Islam diorientasikan pada *learning competency,* yaitu *competency Islamiyah, knowledge, skill, abilty,* sosial-kultural. *Learning competency* yang diharapkan adalah peserta didik memiliki kemampuan pengetahuan ke-Islaman, penguasaan pengetahuan dan keterampilan, keahlian berkarya, sikap dan perilaku berkarya, pengembangan kepribadian dan cara berkehidupan di

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

masyarakat sesuai dengan profesinya yang didasarkan pada nilai-nilai *ilahiyah* yang optimal.

e. Penggunaan metode dan pendekatan dalam proses belajar mengajar didasarkan pada *learning based* atau *student learning* dan bukan *teaching learning* serta *learning competency*, sehingga peserta didik diharapkan memiliki seperangkat tindakan dan perilaku Islami, cerdas, penuh tanggungjawab sebagai syarat untuk dapat dianggap mampu melaksanakan tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Intinya, metode belajar tidak lagi bersifat hafalan tetapi diorientasi pada cara mengaktifan peserta didik, cara untuk menemukan, cara memecahkan masalah dengan menggunakan paradigma holistik, rasional, partisipatori dengan pendekatan emperik deduktif yang akan menjadi kunci pengembangan perserta didik, sehingga dapat menghasilkan perserta didik yang beriman, berpengetahuan, berketerampilan, berkepribadian dan berakhlak, memiliki sikap demokrasi dan profesional dalam mewujudkan manusia dan masyarakat yang berkualitas, kreatif, inovatif dan mampu menterjemahkan serta meralisasikan nilai-nilai Islamiyah dalam perilaku sosial ditengah kehidupan masyarakat global menuju masyarakat madani.

f. Manajemen pendidikan Islam, perlu dilakukan perubahan manajemen yang "konvensional" ke manajemen modern. Melakukan perencanaan, pelaksanakan, pengawasan dan pembinaan secara sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Manajemen pendidikan Islam mulai diorientasikan pada menjamen berbasis sekolah [*school-based management*], desentralisasi, otonomi sekolah dengan melibatkan orang tua peserta didik, masyarakat dan pengguna lulusan secara aktif dalam pengelolaan pendidikan. Intinya, manajemen pendidikan harus dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan perencanaan dan langkah-langkah yang sistematis, meralisasikan rencana menjadi tindakan operasional, melaksanakan pengawasan, pengendalian secara professional, dilakukan secara terpadu, terintegrasi dalam sistem pengelolaan kegiatan manajemen dan budaya *kendali dan jamin mutu* mulai diterapkan secara konsekuen dalam praktek-praktek pengelolaan pendidikan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan Islam secara keseluruhan dalam menghadapi tuntutan era globalisasi menuju masyarakat madani Indonesia.

3. Paradigma pendidikan Islam, perubahan paradigma dari paradigma lama yang berorientasi kemasa lalu [abad pertengahan] ke paradigma yang berorientasi ke

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

masa depan, mengalihkan paradigma yang hanya mengawetkan kemajuan keparadigma yang merintis kemajuan, paradigma peodal keparadigma yang berjiwa demokratis, paradigma sentralistik keparadigma desentralistik. Oleh karenanya, proses pendidikan yang berorientasi *teacher sentret* ke *student sentret*, pendidikan yang selama ini difokuskan pada pengajaran [*teaching*] harus difokuskan pada pendidikan [*learning*]. Dengan perubahan paradigma, diharapkan dapat memberikan rekonstruksi terhadap asas-asas yang mendasar atau arah pendidikan di dalam usaha meletakan dasar yang paling rasional untuk mengubah praksis pendidikan di dalam rangka membangun masyarakat yang demokratis, relegius dan tangguh menghadapi tantangan internal maupun global menuju masyarakat madani Indonesia.

4. Pendidikan untuk masyarakat madani Indonesia adalah pendidikan yang memberdayakan manusia dan masyarakat yang unggul. Pendidikan harus meletakan kedudukan manusia sebagai subjek dalam proses pembinaan dan pengembangan potensi bawaannya untuk mewujudkan manusia yang berilmu *ilahiyah* dan beramal *ilahiyah* sebagai manusia yang unggul [*insan kamil*], yaitu manusia yang dalam menjalankan hidupnya sebagai pengabdian kepada Allah, memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan profesional, etos kerja, berorientasi ke masa depan, mempunyai cita-cita dan visi dalam hidupnya, memiliki keunggulan kompetitif, komporatif, inovatif, taat hukum, menghargai hak asasi manusia, menghargai perbedaan (pluralisme), memiliki rasa tanggungjawab, dan bersikap rasional dalam bertindak.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

5. Mengembangkan demokratisasi pendidikan, tegasnya dengan demokratisasi pendidikan diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang merdeka, berpikir kritis, toleran dengan pandangan orang lain. Dalam proses belajar mengajar harus bersifat terbuka, penuh dialog dan bertanggungjawab, proses belajar akan terjadi *egalitarian* antara pendidik dengan peserta didik, pengajaran tidak harus selalu *top down* namun diimbangi dengan *botton-up*, tidak lagi pemaksaan kehendak pendidik, yang harus dilakukan adalah tawar menawar kedua belah pihak dalam menentukan tujuan, materi, proses belajar mengajar, dan sistem evaluasi hasil belajar. Pengembangan pendidikan Islam yang demokrasi dalam masyarakat madani Indonesia mengandung kekebasan intelektual, kesempatan untuk bersaing, mengembangkan kepatuhan spritual dan moral, pendidikan yang mengakui hak untuk berbeda, dan percaya kepada kemampuan manusia.

6. Pendidikan Islam untuk masyarakat madani Indonesia, yaitu membangun sistem pendidikan yang mampu mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas yang dilandasai dengan nilai-nilai *ilahiyah,* kemanusian [*insaniyah*], masyarakat, lingkungan dan berbudaya. Mengembangkan manajemen pendidikan dengan berorientasi pada manajemen berbasis sekolah, menyerap aspirasi dan mendayagunakan potensi masyarakat, berorientasi pada otonomi dan meningkatkan demokratisasi penyenggaraan pendidikan Islam. Dalam kerangka ini, maka pendidikan Islam harus berupaya untuk: *Pertama*, mengembangkan ***konsep pendidikan integralistik***, yaitu pendidikan secara utuh yang berorientasi pada Ketuhanan [*Rabbaniyah*], kemanusiaan [*insaniyah*] dan alam pada umumnya [*alamiyah*] sebagai suatu yang integralistik bagi perwujudan kehidupan yang *rahmatan lil 'alamin*. *Kedua*, mengembangkan ***konsep pendidikan huhanistik***, yaitu pendidikan yang berorieintasi dan memandang manusia sebagai manusia [*humanisasi*] dengan menghargai hah-hak asasi manusia, hak untuk menyuarakan pendapat walaupun berbeda, mengembangkan potensi berpikir, berkemauan dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. *Ketiga,* mengembangkan ***konsep pendidikan pragmatis,*** yaitu memandang manusia sebagai makhluk yang selalu membutuhkan sesuatu untuk melangsungkan, mempertahankan dan mengembangkan hidupnya baik jasmani maupun rohani dan mewujudkan manusia yang sadar akan kebutuhan-kebutuhan hidupnya dan peka terhadap masalah-masalah kemanusiaan. *Keempat,* mengembangkan ***konsep pendidikan yang berakar pada budaya*** yang akan dapat mewujudkan manusia yang mempunyai kepribadiaan, harga diri, percaya pada kemampuan sendiri, membangun budaya berdasarkan budaya sendiri dan berdasarkan nilai-nilai *ilahiyah.* Secara umum, konsep pendidikan Islam yang ditawarkan untuk masyarakat madani Indonesia, adalah pendidikan berorientasi pada kompetensi nilai-nilai ilahiyah, knowledge, skill, ability, social-kultural dan harus berfungsi untuk memberikan kaitan secara oprasional antara peserta didik dengan masyarakatnya, lingkungan sosial-kulturalnya, dan selalu menerima dan ikut serta melakukan perubahan.

7. Strategi perubahan dan pengembangan pendidikan, tidak hanya bersifat "tambal sulam" yang didasarkan pada kebutuhan dan keinginan yang bersifat sementara, tetapi harus merupakan suatu upaya strategis, terencana dan menyeluruh yang dapat mewujudkan peningkatan kualitas iman yang aplikatif, pengetahuan dan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

keterampilan yang profesional, proses pembebasan, proses pencerdasan, menjadikan peserta didik berwawasan integrative, proses pemberdayaan potensi manusia, menjunjung tinggi hak-hak anak, menghasilkan manusia demokratis serta menghasilkan manusia cinta perdamaian dan perduli lingkungan. Strategi pendidikan Islam menuju masyarakat madani Indonesia, yaitu pendidikan yang diorientasikan kepada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan pengembangan keterampilan dengan peningkatan kualitas proses belajar mengajar yang berbasis kompetensi, teknologi informasi internet, cd-room dan lain-lain serta pengembangan perpustakaan yang berbasis teknologi informasi. Pendidikan Islam, perlu dilkakukan reorganisasi manajemen berbasis sekolah, pengembangan kurikulum dan silabi yang relevan dengan kompetensi yang ingin dicapai, materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, sumber daya pendidikan [guru, dosen dan tenaga administratif] yang berkualitas, fasilitas belajar yang memadai, sumber dana yang efektif dan efisien, serta lembaga-lembaga pendidikan Islam harus mengembangkan atau melakukan defersivikasi program studi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pengguna jasa pendidikan. Dalam kerangka ini pendidikan Islam harus berupaya untuk membangun pendidikan yang relevan dan bermutu sesuai dengan kebutuhan masyarakat madani Indonesia, menyelenggarakan pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, menyelenggarakan pendidikan yang demokratis dan professional, berusaha mengurangi peran pemerintah dalam implementasi pendidikan dan merampingkan birokrasi pendidikan sehingga lebih fleksibel dalam pelaksanaan pendidikan. Strategi pendidikan Islam yang dilakukan harus memiliki nilai khusus, dapat terukur dan terhitung, dapat tercapai, realis dan wajar, serta berjangka waktu tertentu.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Penutup

Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan pendidikan Islam terutama dalam upaya pembaruan pendidikan Islam di Indonesia menuju masyarakat madani Indonesia yang dicita-citakan bangsa ini. Konsep ini hanya merupakan pemikiran awal yang di sana sini masih terdapat kekurangan, tetapi apabila dikembangkan dengan baik akan memberikan makna bagi upaya pembaruan pendidikan Islam di Indonesia.

Konsep pendidikan Islam senantiasa terus berkembang dan menghendaki pembaruan yang disesuaikan dengan irama perkembangan dan kemajuan peradaban serta persoalan-persoalan yang dihadapi umat manusia dan persoalan yang dihapi dalam bidang pendidikan selalu berkembang mengikuti irama perubahan. Maka dalam pembahasan ini, ada hal-hal yang perlu dikaji ulang dan perlu dicarikan solusinya sehingga dapat dilaksanakan sebagai suatu program nyata pada masa yang akan datang, yaitu persolan filosofis, visi, misi, tujuan, kurikulum dan silabi, metodologi, manajemen, sumber daya manusia, dan operasionalisasi pendidikan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan tulisan ini menjadi salah satu khasanah bagi perkembangan pendidikan Islam di Indonesia.

* * *

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Abdurrahman Saleh, 1982, *Educational Theory; Qur'anic,* Mekkah: *Qutlook*, Umm al-Qoru Universitas, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, *Teori-teori Pokok Pendidikan Berdasarkan Qur'an,* 1990, Jakarta: Renika Cipta.

Abdillah, Masykuri, 1999, *Islam dan Masyarakat Madani,* Sabtu, 27 Februari 1999.

--------,2000, *Gagasan dan Tradisi Bernegara Dalam Islam: Sebuah Perspektif Sejarah dan Demokrasi Modern*, dalam Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan & Kebudayaan, Tashwirul Afkar, Edisi (No.7) tahun 2000-ISSN 1410-9166, Yogyakarta.

Abu Bakar, Usman, 1999, *Pendidikan Politik Islam sebuah Prospektus Menuju Masyarakat Madani*, Dinamika, Journal Of Islamic Studies, STAIN, Surakarta.

Abdullah, Abd. Rahman, 2002, Aktualisasi Konsep Dasar Pendidikan Islam Rekonstruksi Pemikiran dalam Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam, Yogyakarta, UII Press.

Abdullah, Amin, 1995, *Falsafah Kalam Di Era Postmodernisme*, Yogyakarta: Pustakan Pelajar.

--------,1998, *Problem Epistemologis-Metodologis Pendidikan Islam*, dalam Abd. Munir Mulkan, et.al., *Religiusitas Iptek*, Yogyakarta: Pusataka Pelajar.

Abdullah, Taufik, 1971, School and Politics The Kaum Muda Movement in West Sumatra, Ithaca: NY. Comell University.

--------,dkk, 1999, [tim editor], *Membangun Masyarakat Madani Menuju Indonesia Baru Milenium Ketiga,* Yogyakarta: Aditiya Media.

Aboebakar, 1957, *Sejarah Hidup KH. Wahid Hasyim dan Karangan Tafsir,* Jakarta.

Achmad, Amrullah, 1991, *Kerangka Dasar Masalah Paradigma Pendidikan Islam*, dalam Muslih Usa (Ed), Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta, Yogyakarta: Tiara Wacana.

Achmadi, 1992, *Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta: Aditya Media.

Achwan, Roehan, 1991, *Prinsip-prinsip Pendidikan Islam Versi Muris*, Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Vol.1, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

-------,1998, *Konstruksi Filosofi Pendidikan Islam dalam Rekonstruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren Religisitas Iptek,* Penyt. Abdul Munir Mulkan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Al-'Amir, Najib Khalid, 1990, *Min Asaalibir-Rasul Saw. Fit-Tarbiyyah,* Cet. I, Kuwait: *Maktabah al-Busyrah al-Islamiyah*, terj. Ibnu Muhammad dan Fakhruddin Mursyam, 2000, *Tarbiyah Rasulullah*, Jakarta: Gema Insani Press.

Ali, A. Mukti, 1971, *Beberapa Masalah Pendidikan di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Yayasan Nida.

--------,1987, *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini*, Jakarta: Rajawali.

--------,1994, *Universitas Islam Indonesia Harapan dan Pengembangannya.,* dalam: Supardi, dkk., [Penyunting], Setengah Abad UII, Sejarah Perkembangan Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta: UII Press.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Al-Attas, Muhammad an-Naquib, 1980, *The Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education, Muslim Youth Movement of Malaysia (ABIM),* Kuala Lumpur. Terj. Haidar Bagir, 1984, *Konsep Pendidikan dalam Islam: Suatu Rangka Pikir Pembinaan Filsafat Pendidikan Islam,* Bandung: Mizan.

--------, 1986, *Dilema Kaum Muslimin,* Alihbahasa: Anwar Wahdi Hasi dan HM. Mochtar Zoerni, Surabaya: Bina Ilmu.

--------,1994, *Konsep Pendidikan dalam Islam,* Bandung: Mizan.

Ali Fachry, dan Bahtiar Effendi, 1986, *Merambah Jalan Baru Islam*, Bandung: Mizan.

Al-Faruqi, Ismail Raji, 1984, *Islamisasi Pengetahuan*, Terj.Anas Mahyuddin, Bandung: Pustaka-Perpustakaan Salman Institut Teknologi.

Al-Fatta, Imam, 1991,*Modernisasi Pesantren dan Krisis Ulama*, Panjimas (No.677). Maret 1991.

Al-Kaff, Husein, 2000, *Al-Qur'an dan Konsep Ketuhanan (1),* From: http://aljawad. Tripod.com/ Artikel/ alqur'an1. htm.,8/1/2000.

"Akibat Tak Diminati Lulusan Madrasah" IAIN Buka Program Umum Tanpa Persiapan Memadai", Kompas, 7 November 2001, From: http://www. kompas. com/kompas-cetak/ 0111/07/ DIKBUD/iain09.htm.

Alimi, Anas Syahrul, dan M. Fadhilah Zaidie [Editor], 1999, *Reformasi dan Masa Depan Pendidikan Indonesia, Sebuah Rekonstruksi Pemikiran Prof.Dr.Djohar,MS*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Al-Maududi, Abdul A'la,1995, *Bagaimana Memahami al-Qur'an Keempat Istilah Al-Illahi, Ar-rab, al-Ibadah, al-Din,* Terjemahan Abdul Said, Surabaya: al-Iklas.

Al-Maula, Maulidin, 1999, *Ambivalensi Masyarakat Madani,* Jawa Pos, 17 Maret 1999.

Al-Muhtar, Suwarman, 1996, *"Arah Inovasi dalam Pembelajaran, sebagai Upaya Strategis bagi Pembinaan Manusia Indonesia Tahun 2020"*, makalah disampaikan pada Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia III, 4-7 Maret 1996, Ujung Pandang,

Al-Mu'jam al-Wasit-Kamus Arab, Mathba Angkasa, Jakarta, tt.

Aly, Hery Noer, 1999, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Al-Syaibany, Omar Mohammad al-Toumy,1979, *Falsafah Pendidikan Islam*, Terj., Hasan Langgulung, Cet. Pertama, Jakarta: Bulan Bintang.

Amiruddin,Teuku, 1997, *Reorientasi Manajemen Pendidikan Islam di Era Indonesia Baru,* Yogyakarta: UII Press.

An-Bahlawi, Abdurrahman, 1983, *Ushulut Tarbiyah Islamiyah wa Asalibiha fi Baiti wal Madrasati wal Mujtama',* Dar al-Fikr al-Mu'asyir, Beiru-Libanon, Cet. II, Terj., Shihabuddin, 1995, *Pendidikan Islam di Rumah Sekolah dan Masyarakat*, Jakarta: Gema Insani Press.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ancok, Djamaluddin, 1998, *Membangun Kompotensi Manusia dalam Milenium Ke Tiga*, Psikologi, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi, (Nomor : 6) Tahun III, UII, Yogyakarta.

--------,1998, *Peran Perguruan Tinggi dalam Menyiapkan Manusia di Milenium ke Tiga,* UII, Yogyakarta.

Anam, Chairrul, 1985,*Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, Solo: Penerbit Jatayu.

Anshari, Endang Saifuddin, 1976, *Pokok-pokok Pikiran tentang Islam,* Jakarta: Usaha Enterprise.

Anthony, Gidden, 1994, *Beyond Left and Right:The Future of Radical Politic*, Cambridge: Polity Press.

Ansyar, Moh., 2001, *Kurikulum dalam Menyongsong Otonomi Pendidikan di Era Globalisasi, Peluang, Tantangan, dan Arah,* dalam Jurnal Pendidikan Islam TA'DIB, Maret 2002, (No. 04), ISSN 1401-6973, Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang.

Al-Qardhawi,Yusuf, 1986, *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan al-Banna,* Terj., H.Bustami A.Gani dan Zainal Abidin Ahmad, Jakarta: Bulan Bintang.

Arifin, M.,1991, *Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum*, Jakarta: Bumi Aksara.

--------,1994, Ilmu Pendidikan Islam suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner, Jakarta: Bumi Aksara.

--------,1996, *Filsafat Pendidikan Islam*, Cetakan Kelima, Jakarta: Bumi Aksara.

Ariyanto, Totok 2002, "*Kurikulum Berbasis Kompetensi*", Harian Umum Suara Merdeka, 4 Februari 2002, Form: http://www.Suaramerdeka.com/ harian/0202/ 04/khaz. htm

Ashraf, Ali, 1996, *Horison Baru Pendidikan Islam,* Terj., Sori Siregar, Cet. Ketiga, Pustaka Pirdaus.

Asshiddiqie, Jimly, 2002, *Reformasi Menuju Indonesia Baru; Agenda Restrukturisasi Organisasi Negara, Pembaruan Hukum, dan Keberdayaan Masyarakat Madani*, From: http://www.theceli.com/dok/ dokumen/ jurnal/ jimly/j014.htm.

Asy'arie, Musa, 1992, *Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam,[LESFI].

--------,1999, *Filsafat Islam tentang Kebudayaan*, Cet.I, Yogyakarta: LESFI.

Azizy, A. Qodri A., 1999, *Al-Qur'an dan Pluralisme Agama*, Jurnal Studi Islam, PROFEKTIKA, Vol.1, (No. 1) Januari.

--------,2000, *Masyarakat Madani Antara Cita dan Fakta, Kajian Historis Normative,* dalam SM, Abdul Mukti [Editor], Pendidikan Islam, Demokrasi dan Masyarakat Madani, Yogyakarta: Ismail Pustaka Pelajar Offset.

Azra, Azyumardi, 1996, *Pembaruan Pendidikan Islam Sebuah Pengantar,* dalam Marwan Saridjo, Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam, Jakarta: CV. Amissco.

--------,1999, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Melenium Baru, Jakarta: Logo Macana Ilmu.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

--------,2001, [wawancara Kompas], *Akibat Tak Diminati Lulusan Madrasah, IAIN Buka Program Umum Tanpa Persiapan Memadai,* Jakarta: Kompas Cyber Media, 7 November 2001, From: http://www. kompas. com/ kompas-cetak/ 0111/07/ DIKBUD/ iain09.htm.

Barnadib, Imam, 1982, *Arti dan Metode Sejarah Pendidikan*, Yogyakarta: Penerbit IKIP.

--------,1997, *Filsafat Pendidikan Sistem & Metode,* Cet. Kesembilan,Yogyakarta: Penerbit Andi.

---------,1997, *"Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Berwasan Kemanusiaan"*, makalah disampaikan pada Seminar Temu Alumni IKIP Yogyakarta,14 Mei 1997.

Basyir, Ahmad Azhar 1985, *Citra Manusia Muslim*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.

Baso, Ahmad, 1999, *Civil Society Versus Masyarakat Madani: Arkeologi Pemikiran "Civil Society" dalam Islam Indonesia,* Bandung: Pustaka Hidayah.

-------, *Civil Society Sebagai Kritik; Perdebatan Masyarakat Sipil dalam Islam Indonesia,* makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Pra-Muktamar Nudengan, Tema "NU dan Pembentukan Masyarakat Mutamaddin (Sipil), tgl. 4-5 September, Hotel Sahid, Yogyakarta.

Bilgrami, Hamid Said, 1989, *The Concept of Islamic University (Konsep Universitas Islam)* ahli bahasa: Machnun Husein, Yogyakarta: Tiara Wacana.

Brewer, Anthony, 1999, *Kajian Krisis Das Kapital Karl Marx*, Jakarta: Teplok Press.

Buchari, Mochtar, 1994, *Pendidikan dalam Pembangunan,* Yogyakarta: Tiara Wacana.

Culla, Adi Suryadi, 1999, *Masyarakat Madani Pemikiran, Teori, dan Relevansinya dengan Cita-Cita Reformasi,* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Conference Book, 1978, London.

Dahlan, Zaini, 1998, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: UII Press.

Daradjat, Zakiah, dkk., 1992, *Ilmu Pendidikan Islam,* Cetakan Kedua, Jakarta: *Bumi Aksara*.

Dalima, A, 1999, *Reorientasi Pendidikan Sejarah Melalui Pendekatan Budaya Menuju Transformasi Masyarakat Madani dan Integrasi Bangsa,* Jurnal, Cakrawala Pendidikan, Edisi Khusus, Thn. XVIII, Mei 1999, (No. 2).

Daniels, T.D., and B.K. Spiker, 1994, *Perspectives on Organizational Communication*, Madison, Wisconsin: Brown & Benchmark.

Daulay, Haidir Putra, 1996, *Pendidikan Islam dalam Menghadapi Abad XXI: Tinjauan dari Sudut Inovasi Kurikulum Pendidikan, dan Lembaga Pendidikan*, Medan:tp.

Departemen Agama RI, 1997, *Data Statistik pada Ditbinbaga Departemen Agama Repulik Indonesia.*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

--------,1991/1992, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Sistem Pendidikan Nasional, Dirjend. Bimbaga Islam, Jakarta,1991/1992.
--------, *Masukan Departemen Agama, Susunan Persekolahan di Indonesia,* From:http/www.edform.net/indonesian/ md3.shtml.

Dewantara, Ki. Hadjar, 1967, *Masalah Kebudayaan; Kenang-kenangan Doktor Honoris Causa*, Yogyakarta: tp.

Dewantoro, M. Hajar, 1997, *"Urgensi Inovasi Pendidikan dalam Pemberdayaan Umat",* dalam: Muslih Usa dan Aden Wijdan SZ [Penyunting], Pendidikan Islam dalam Peradaban Industrialisasi, Yogyakarta: Aditiya Media.

Dhofier, Zamakhsyari, 1994, *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai,* Cet.Keenam, Jakarta: LP3ES.

Djaelani, A. Timur, 1980, *Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pembangunan Perguruan Agama*, Jakarta: CV. Dermaga.

Djati, Indra, 2000, *Kebijakan Penyelenggaraan otonomi Daerah Bidang Pendidikan*, [makalah], Bandung: PPS UPI.

Djohar, 1999, *Reformasi Pendidikan, Omong Kosong, Tanpa Mengubah UU No 2/89,* Surat Kabar Kedaulatan Rakyat, 4 Mei, Yogyakarta.

Djumhur, I., dan H. Danasaputra, 1979, *Sejarah Pendidikan*, Bandung: CV. Ilmu,

Editorial, 2001, *Menuju Masyarakat Madani*, Jurnal Online, Badan Pekerja MPR RI Tahun 2000, Edisi (No.09), Tanggal 23 Mei 2000., Prom: http://mpr.wasantara.net.id/ bp_2000/ edisi9/editorial.htm., 31 Desember.

Effendy, Bahtiar, 2000, *Masa Depan Civil Society di Indonesia: Memeriksa Akar Sosio-Relegius*, dalam Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan, Tashwirul Afkar, Edisi Tahun 2000 (No. 7 - ISSN: 1410-9166), Jakarta.
--------,2001, *Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaam, Perbincangan Mengenai Islam*, Msyarakat Madani, dan Etos Kewirausahaan, Yogyakarta: Galang Printika.

Fadjar, Abdullah,1991, *Peradaban dan Pendidikan Islam*, Cet. Pertama, Jakarta: Rajawali Pers.

Fadjar, A. Malik, 1995, *"Menyiasati Kebutuhan Masyarakat Modern Terhadap Pendidikan Agama Luar Sekolah",* makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya *"Pengembangan Pendidikan Islam Menyongsong Abad 21"*, IAIN, Tgl. 31 Agustus-1 September, Cirebon.
--------,1999, *Reformasi Pendidikan Islam,* Jakarta: Fajar Dunia.

Faisal, Jusuf Amir, 1995, *Reorientasi Pendidikan Islam*, Jakarta: Gema Insani.

Fakih, Mansour, 2002,*Pendidikan Popular Membangun Kesadaran Kritis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Farchan,Hamdan, 1999, *Piagam Madinah dan Idealisme Masyarakat Madani,* Bernas, 29 Maret 1999, Yogyakarta.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Freire, Paulo, 1999, *Menggungat Pendidikan Fundamental Konservatif Liberal Anarkis,* Terj., Omi Intan Naomi, Pustaka Pelajar.
--------,1984, *Pendidikan sebagai Praktek Pembebasan*, Jakarta: Gramedia.

FZ, Maksum, 2001, *Membangun Masyarakat Madani Yang Profetis,* From: http://www.suarapembaruan.com/News/1999/06/250699/OpEd/op01.html. 11 Januari.

Gaffar, 1989, *Perencanaan Pendidikan Teori dan Metodologi,* Jakarta: P2LPTK.

Galigo, Syamsul Bahri Andi, 2001, *Perpaduan Ummat dan Piagam Madinah,* alfatihah, From:http://alfatihah.virtualave.net/pustaka/writers/syamsulbahri/perpaduanummatdan1-2.html., 24 Oktober 2001.

Gautama, Sidarta, dan Aries Budiono, 1999, *Moralitas Politik dan Pemerintahan Yang Bersih,* Jakarta:Raja Grafindo Presada.

Gazalba, Sidi,1983, *Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*, Pustaka Antara, Jakarta.

Gellner, Emest, 1990, *Membangun Masyarakat Sipil: Prasyarat Menuju Kebebasan,* Terj. I. Hasan, Bandung: Mizan.

Gerungan, W.A.,1986, *Psikologi Sosial*, Cetakan Kesembilan, Bandung: Eresco.

Gunawan, Asep, dan Dewi Nurjulianti [Penyunting], 1999, *Gerakan Keagamaan Dalam Penguatan Civil Society Analisis Perbandingan Visi dan Misi LSM dan Ormas Berbasis Keagamaan,* Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat [LSAF] dengan The Asia Fundation [TAF].

Gobee, E., dan C.Adriaanse,1993, *Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda,* Jakarta: Seri Khusus INIS VII.

H. Gunawan, Ary,1 996, *Kebijakan-kebijakan Pendidikan*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta.

Hakim, Lukman, 2000, *"Masyarakat Madani dan Problem Intervensi Pemerintah"*, dalam: Widodo Usman, dkk., (Editor), *Membongkar "Mitos" Masyarakat Madani,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

Hamid,A. Shamad, 1984, *Islam dan Pembaruan Sebuah Kajian Tentang Aliran Modern dalam Islam dan Permasalahannya,* Surabaya: Bina Ilmu.

Hamid, Shamad, 1984, Islam dan Pembaruan Sebuah Kajian Tentang Aliran Modern dalam Islam dan Permasalahannya, Surabaya: Bina Ilmu.

Hamim, Thoha, 1999, *Islam dan Masyarakat Madani (1) Ham, Pluralisme, dan Toleransi Beragama,* Koran Harian "Jawa Pos", Kamis,11 Maret 1999.

Hamiwanto, Saiful, dan M. Ali Said JSD, 2001, *Masyarakat Madani: Mimpi Lama, Judul Baru?*, From: http://www.hidayatullah.com/sahid/9902/khusus.htm. 11 Mei.

Hamka, 1966, *Tenggelamnya Kapal van der Wijck,* Cet. ke-10, Jakarta: Nusantara.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Hamzah, Amir, 1965, *Pendidikan dan Pengajaran Muhammadiyah dalam Masa Pembangunan Semesta*, Malang: Ken Mutia
--------,1989, *Pembaruan Pendidikan dan Pengajaran Islam*, Jakarta: Mulia Ofset.

Hatta, Ahmad, 2001, *Paradigma Masyarakat MadaniSebuah Acuan Reformasi*, From: http:// www.isnet.org/archive-milis/archive98/sep98/0339.html. 11 Mei.
--------,2001, *Peradaban yang Bagaimana? Rincian Misi Negara Tauhid Madinah*, From: http://www. Hidayatullah.com/2001/07/kajut3.shtml. 7 Juni, hlm.l.

Hatta, M. Anis, 2001, "*Dari Gerakan ke Nagara, Sebuah Rekonstruksi Negara Madinah yang Dibangun dari Bahan Dasar Sebuah Negara",* Majalah Suara Hidayatullah, From: http://www.hidayatullah.com/2001/06/ kajut3.shtml.Tgl.7 Maret 2001,hlm.

Hartono, 1999, "*Perubahan Orientasi Pendidikan Menuju Masyarakat Madani*", Cakrawala Pendidikan, Edisi Khusus Mei Th. XVIII, (No.2).

Hasan, Fuad, 1985, "*Bimbingan Konseling serta Citra Manusia dalam Islam",* makalah disampaikan pada Seminar Bimbingan dan Penyuluhan Islami, UII, 15-16 Mei, Yogyakarta.
--------,1987, [Menteri P&K], *Sambutan MENDIKBUD pada Rakernas Dep. Kerohanian DPP GOLKAR,* 2 Maret, Jakarta.

Hasbullah, 1996, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan,* Cet.II, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Hasil-hasil Muktamar XXX Nahdlatul Ulama, Tanggal, 13-18 Sya'ban 1420 H - 21 - 26 Nopember 1999, Di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Lirboyo Kediri Jawa Timur, Sekretariat Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Jl. H. Agus Salim No.112, Jakarta, 1999.

Hidayat, Komaruddin 1999, "*Masyarakat Agama dan Agenda Penekanan Masyarakat Madani",* dalam: Taufik Abdullah, dkk., Membangun Masyarakat Madani Menuju Indonesia Baru Milenium ke-3, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, Yogyakarta: Aditiya Media.
--------,1999, "*Memetakan Kembali Struktur Keilmuan Islam"* (Kata Pengantar), dalam Fuaduddin dan Cik Hasan Bisri (Ed), Dinamika Pemikiran Islam di Perguruan Tinggi: Wacana tentang Pendidikan Agama Islam, Jakarta: Logos.

Hikam, Muhammad AS.,1996, *Demokrasi dan Civil Soceity*, Jakarta, LP3ES.
--------,1999, "*Wacana Intelektual Tentang Civil Society Di Indonesia",* Jurnal Pemikiran Islam, PARAMADINA, Vol.I, (Nomor 2), ISSN 1410-8410, Jakarta.
--------, 1999, "*Diskursus Intelektual Tentang Civil Society Di Indonesia",* Jurnal Ilmu-ilmu Sosial, UNISIA, (No.39/XXII/III/1999) -ISSN : 0215-1412, UII Yogyakarta.

HS, Mastuki, *Sejarah Asal-Usul Madrasah*, From: http://www.bagais.go.id/ index. htm.diprint.Tgl,19 Oktober 2002.

Huda,Nuril, 1999, "*Desentraiisasi Pendidikan: Pelaksanaan dan Permasalahannya",* Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Th.ke-5 (No. 017), Juni 1999,Jakarta.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Hunkins, Francis P. dan Ornstein Allan, 1988, *Curriculum Fundations Principles and Issues*: Englewood Chiffs, NJ: Prentice Hall.

Husain, Syed Sajjad, dan Syed Ali Ashraf, 1986, *Crisis Muslim Education* (*Krisis Pendidikan Islam)*, terj., Rahmani Astuti, Bandung: Risalah.

Husein, Machnun, 1983, *Pendidikan Islam dalam Lintasan Sejarah*, Cet. Pertama, Yogyakarta: Nur Cahaya.

Husein, Muhammad, *al-Tab tabi, al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an, juz 13*, Beirut: Muassasah al-A'lami li al-Matb-' t,tt..

Ibrahim, Anwar, 1995, *Islam dan Pembentukan Masyarat Madani*, Makalah disampaiakn dalam Festival Istiqlal, 16 September, Jakarta.

Idris, Zahra,1981, *Dasar-dasar Kependidikan*, Bandung: Angkasa.

Ilmu dan Pendidikan Adab, 1998, Majalah Risalah Penggerak Generasi Baru, Edisi Internet, From: http://www.abim.org.my/ majalah/risalah/98bil1/risalah4.html, Januari 1998.

Imawan, Rismawan, 1997, *Rekrutmen Kepemimpinan di Daerah: Antara Keinginan dan Kebutuhan Masyarakat"*, Jurnal Ilmu Politik (No.17), PT.Gramedia-AIPI, Jakarta.

Ismail, Faisal, 1998, *Paradigma Kebudayaan Islam Studi Kritis dan Refleksi Historis*, Yogyakarta: Tiara Ilahi Press.

Isnaini, Muhammad, 2001, *Visi 2020, Profesionalitas dan Peranan Lembaga Pendidikan*, dalam Jurnal Pendidikan Islam,*TA'DIB*, Maret 2001, (Nomor: 04), ISSN 1401-6973, Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah,Palembang.

Jalal, Fasli, 2001, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Adicita.

Jasin, Anwar, 1985, *Kerangka Dasar Pembaharuan Pendidikan Islam : Tinjauan Filosofis*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Jakarta: 10 Oktober 1985.

--------,1987, *Pembaruan Kurikulum Sekolah Dasar*, Jakarta: BP.

Karim, Asrori S., 1999, *Civil Society dan Ummah, Sintesa Diskursif Rumah Demokrasi,* Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Karim, M. Rusli, 1991, "Pendidikan Islam Sebagai Upaya Pembebasan Manusia", dalam" Muslih Usa, [Editor], Pendidikan Islam di Indonesia antara Citra dan Fakta, Cet. Pertama, Yogyakarta:Tiara Wacana.

--------,1991, *"Pendidikan Islam di Indonesia dalam Transformasi Sosial Budaya" dalam Pendidikan Islam di Indonesia",* dalam: Musli Usa, (edit.), Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta,Cet.I, Yogyakarta: Tiara Wacana.

Kartono, Kartini, 1992, *Pengantar Ilmu Mendidik Teoritis*, Bandung: Mandar Maju.

--------,1997, *Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional,* Jakarta: Pradaya Paramita.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kelompok Kerja Pengkajian dan Perumusan Filosofi, 1999, "*Kebijakan dan Strategi Pendidikan Nasional*", makalah disampaikan pada Komferensi Pendidikan Indonesia Mengatasi Krisis Menuju Perubahan, Depdikbud, 23-24 Februari 1999, Jakarta.

Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999, Tentang GBHN (Garis-garis Besara Haluan Negara), Tahun 1999-2004, Surabaya: Arkola.

Khalis, Nur, 2000, *Konsep Masyarakat Madani dalam al-Qur'an dan Relevansinya Bagi Sosial Politik Indonesia,* Skripsi, FIAI, UII, Yogyakarta.

Khumaedy, Agus, 1997, *Orientasi Pemikiran Islam Indonesia Era Orde Baru*, Jurnal Studi Islam dan Informasi PTAIS, MUKADDIMAH, (No. 3) Th.III Juli 1997, ISSN: 0853-6759, Kopertais Wil.III dan PTAIS DIY, Yogyakarta.

Konsep Dasar Ta'dib, From: http://www.pii.4t.com.Konsep.htm.8/1/ 2001.

Kontowijoyo, 1991, *Paradigma Islam,* Bandung: Mizan.

Koratno,Y. Dwi, 2002, [Editor], *Menuju Paradigma Pendidikan "Belajar Untuk Belajar",* From : http://jemberbisnis. com/ artikel/ARTIKEL/artike 116. htm.

Langgulung, Hasan, 1988, *Pendidikan Islam Menghadapi Abad ke 21*, Cetakan Pertama, Jakarta: Radar Offset.

--------,1980, *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam,* Bandung: al-Ma'arif.

--------,1989, *Manusia dan Pendidikan, Suatu Analisis Psikologi dan Pendidikan*, Jakarta: Pustaka al-Husna.

Lombard, Denys, 1996, *Nusa Jawa: Silang Budaya.,tp.*

Maarif, Ahmad Syafii, 1991, *Pemikiran Tentang Pembaharuan Pendidikan Islam Di Indonesia,* dalam Muslih Usa [editor], Pendidikan Islam Di Indonesia Antara Cita dan Fakta, Tiara Wacana, Yogyakarta.

--------,1996, *Pendidikan Islam dan Proses Pemberdayaan Umat*, Jurnal Pendidikan Islam [JPI], Konsep dan Implementasi, Th. 1 Oktober 1996, (No.2) ISSN: 0853-7437, Fakultas Tarbiyah UII, Yogyakarta.

--------,1996, *Keutuhan dan Kebersamaan dalam Pengelolaan Pendidikan Sebagai Wahana Pendidikan Muhammadiyah,* makalah disampaikan pada Rakemas Pendidikan Muhammadiyah, di Pondok Gede, Jakarta.

--------,1997, *Pendidikan Islam dan Proses Pemberdayaan Bangsa,* dalam buku : Muslih Usa [Penyun.], *Pendidikan Islam dalam Peradaban Industrialisasi,* Yogyakarta: Aditya Media bekerja sama dengan Fakultas Tarbiyah UII.

-------,1999, "*Universalisme Nilai-Nilai Politik Islam Menuju Masyarakat Madani",* Jurnal Studi Islam, Profetika, Juli 1999, (No. 2) ISSN-1411-0881, Vol.1, Program Magister Studi Islam, UMS, Solo.

Madjid, Nurchalis, 1996, "*Menuju Masyarakat Madani"*, Jurnal Kebudayaan dan Peradaban, ULUMUL QUR'AN, (Nomor: 2/VII/1996) - ISSN : 0215-9155, Jakarta.

-------,1999, *Masyarakat Madani dan Intervensi Demokrasi: Tantangan dan Kemungkinan,* dalam buku: Ahmad Baso, 1999, Civil Society versur Masyarakat Madani, Bandung: Pustaka Hidayah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

--------,2000, *Kedaulatan Rakyat: Prinsip Kemanusiaan dan Musyawarah dalam Masyarakat Madani,* dalam Widodo Usman, dkk., [Editor], *Membongkar "Mitos" Masyarakat Madani,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

--------,2001, *Islam dan Politik Suatu Tinjauan atas Prinsip-Prinsip Hukum dan Keadilan,* Jurnal Pemikiran Islam PARAMADINA, From: http://media.isnet.org/ islam/ Paramadina/ Jurnal/ PolitikN.html. 9 Maret.

--------,2001, *Konstitusi Madinah,* From: http://www.pgi.or.id/ balitbang/ bal_ 06/ 02_saa_xvii/ 10. html.,11 September.

Mahasin, A.,1995, *Masyarakat Madani dan Lawan-lawannya: Sebuah Mukadimah*, dalam Geniler, Membangun Masyarakat Sipil: Prasyarat Menuju Kebebasan, Terj. I. Hasan, Bandung: Mizan.

Mahasin, Aswad, 1999, *Ruh Islam dalam Budaya Bangsa: Wacana Antara Agama dan Bangsa*, Jakarta: YFI.

Mahdiansyah, dkk., 1999, "*Desentralisasi Pengelolaan Pendidikan"*, Jumal Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun ke-5 (No. 017), Juni 1999, Jakarta.

Maksum, 1999, *Paradigma "Civil Society" yang Profetik,* From: http://www.Suarapem baharuan.com/ News/1999/06/ 250699/ OpEd/ Op01.html.

Mangunwijaya, Romo YB., 1999, *Mengkritisi Manajemen Pendidikan Nasional Selama Orde Baru Yang Menekankan Ortodoksi dalam Pelajaran Agama,* Kompas, 12 Februari 1999.

Marimba, Ahmad D, 1979, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam,* Cet. III. Bandung: al-Maarif.

Marzuki, 1999, *Membangun Masyarakat Madanai Melalui Pendidikan Islam Sebuah Refleksi Pendidikan Nasional*, Cakrawala Pendidikan, Edisi Khusus Mei Th.XVIII No.2.

Mashuri A, Aziz, 1989, *Pokok Pikiran Pengembangan Pengkajian Kitab*, Majalah Tebuireng, No. 5 September.

Mastuhu, 1994, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta: Seri INIS XX.

--------,1999, *Pemberdayakan Sistem Pendidikan Islam,* Jakarta: Logos.

--------,1999, *Mencari Paradigma Baru Pendidikan yang Lebih Baik – Islami – Menyongsong Milenium Ke III,* Bahan Orasi Ilmiah disampaikan pada acara pembukaan Program Pasca Sarjana "Manajemen Pendidikan Islam"; IAIN Sultan Thaha Sifuddin, 26 Oktober, Jambi.

MD, Moh. Mahfud, 1999, "*Supermasi Hukum dan Masyarakat Madani",* makalah disampaikan pada Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Menengah, Badan Eksekutif Mahasiswa IKIP, Tgl., 19 Mei 1999, Wisma Wijaya Kaliurang, Yogyakarta.

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2000, Keputusan Nomor : 232/U/2000, tentang *Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa*, Jakarta 20 Desember 2000.

Mihardja, Achdiat K. 1997, *Polemik Kebudayaan*, Jakarta: Pustaka Jaya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Mimbar, Asep Saeful, dan Agus Sulthonie, 2001, *Tantangan Madrasah Dewasa Ini*, Pikiran Rakyat, Artikel-Edisi 25 Juli 2001, From: http//www.pikiran-rakyat.com/ prcetak/ 072001/25/0801.htm.

Moeldjanto, G.,1998, *Dimensi Moral dalam Pendidikan Menuju Pembentukan Manusia Seutuhnya,* Widya Darma, (No. 1) Tahun IX.

Muchtar, Abdul Latief, *1995,"Tujuan Pendidikan Islam dan Tujuan Pendidikan Nasional"*, makalah disampaikan Seminar dan Lokakarya Nasional, Pengembangan Pendidikan Islam Menyongsong Abad 21, IAIN Sunan Gunung Djati, Cirebon, 31 Agustus s/d 1 September.

Mudjahid, Shodiq, 2002, *Peluang & Tantangan Profesionalisme Pendidikan Islam*, Surat Kabar Pikiran Rakyat, Artikel – Edisi 12 Maret 2002, From : http://www.pikiran-rakyat.com/ prcetak/ 032002/12/0801.htm.

Mufid, 1999, *"Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani",* dalam: Taufik Abdullah, dkk, Membangun Masyarakat Madani, Menuju Indonesia Baru Milenium Ke-3, Editor: Tim Editor Programa Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang, Yogyakarta: Aditya Media.

Muhadjir, Noeng, 1987,Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial;Suatu Teori Pendidikan, Yogyakarta: Rake Sarasin.
-------,1990, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin.

Muhaimin, dkk., 1999, *Kontroversi Pemikiran Fazlur Rahman Studi Kritis Pembaharuan Pendidikan Islam,* Cetakan Pertama, Cirebon: Dinamika.
--------dan Abd. Mujib, 1993, *Pemikiran Pendidikan Islam Kajian Filosofik dan Kerangka Dasar Operasionalnya,* Bandung: Trigenda Karya.
-------,et.al.., 2001, *Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah,* Cetakan Pertama, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muhaimin,Yahya, [Menteri Pendidikan Nasional], 2000, *Reformasi Pendidikan Nasional Munuju Indonesia,* dalam Majalah Dwiwutan BPK Penabur Jakarta, Midyawarta, No. 69/Thn.XII, Nopember 2000, From: http://www.bpk. Penabur. or.id/ KPS. Jkt/ widya/69/69.pdt.

Mulkan, Abdul Munir, 2002, *Dilema Madrasah di Antara Dua Dunia*, From: http://www. Pesantren online. com/ artikel/detailartikel-php3?artikel=101, 4 April.
--------,2002, *Pendidikan Kehilangan Akar Relegi*, From:http:// aliansi. hypermart.net/1999/11/forum.htm.tgl. 5 April.
--------,2002, *Pembelajaran Islam Model Garden Learning*, makalah disampaikan pada Lokakarya Dosen MPK Agama, Metode Pendidikan Agama Yang Efektif, Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Agama Islam [LPPAI], Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 11 Agustus.

Mulyadi, 1998, *Total Quality Manajemen, Prinsip Manajemen Komputer untuk Mengarungi Lingkungan Bisnis Global,* Yogyakarta: Aditya Media.

Mulyasa, E., 2002, Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi, dan Implementasi, Bandung: Remaja Rosdakarya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Munawir, A.W., 1997, al-Munawar: *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresi.

Musa, Ibrahim, 2002, *Otonomi Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah,* From: http://202.159.18.43/jp/22ibrahim.htm.

Mutrofin, 2000,*Krisis Ekonomi, Perubahan Kurikulum dan Proses Pemiskinan*, Surat Kabar Jawa Pos.

Muzaffar, Chandra, 1998, *"Pembinaan Masyarakat Madani: Model Malaysia*", dalam Institusi Strategi Pembangunan Malaysia (MINDS), Masyarakat Madani: Suatu Tinjauan Awal, Kuala Lumpur: Ras Grafika.

Nappanganro, 1997, *"Refleksi Analisis Fitrah Manusia dan Nilai-nilai dalam Pengembangan Pendidikan Islam Memasuki Abad XXI",* makalah disampaikan dalam Orasi Ilmiah/Pengukuan Guru Besar, Di Kampus IAIN Alauddin Ujung Pandang, 11 Nopember 1997.

Nasution, Harun, 1975, *Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Cetakan Pertama, Jakarta: Bulan Bintang.

--------,1982, *Pembaharunan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.

--------,1983, *Teologi Islam, Aliran-aliran,Sejarah,Analisis Perbandingan*, Jakarta:UI Press.

Nata, Abuddin 1997, *Filsafat Pendidikan Islam I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Natsir, Hanat Fatah, 2002, *Strategi Pembangunan Pendidikan di Indonesia,* From:http: // www.kopertis4.or.id/media/strategi.htm, dicopy 5 April 2002, dan aktikel ini telah dimuat dalam Surat Kabar Pikiran Rakyat, 17 Januari 2002.

Natsir, M., 1973, *Kapita Selecta*, Jakarta: Bulan Bintang.

Noer, Deliar, 1974, Masalah Ulama Indonesia atau Intelektual Agama, Jakarta: Bulan Bintang.

--------,1995,*Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900 - 1942*, Cetakan ketujuh, Jakarta: LP3ES.

--------,1998, *Pemikiran Politik di Negara Barat*, Bandung: Mizan.

Pidarta, Made, 1997, *Landasan Kependidikan Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia,* Cet. pertama, Jakarta: Rineka Cipta.

Pulungan, Suyuthi,1994, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an,* Cet.I, Jakarta: Rajawali Press dan LSIK.

Purbo, Onno W., 2000, *Tantangan Bagi Pendidikan Indonesia*, From: http:// www. detik. com/net/ onno/ jurnal/ 20004/aplikasi/pendidikan/p-19.shtml.

Purwanto, Agus Joko, 2001, *Tantangan Perubahan,* From: http://psi.ut.ac.id/ Jurnal/ 101resensi2.htm., 28 Desember 2001.

Quthb, Muhammad, 1993, *Sistem Pendidikan Islam,* Terj. Salman Harun, Cet. III, Bandung: Al-Ma'arif.

Rafa'i, Moh., 1985, *Sejarah Islam*, Semarang: Wicaksana.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Rahardjo, M. Dawam, 1985, [Penyun], *Pesantren dan Pembaruan,* Jakarta: LP3ES.
--------,1997, *Relevansi Iptek Profetik dalam Pembangunan Masyarakat Madani*, Academika, Vol.01,Th.xv.
-------,1999, *Demokrasi, Agama dan Masyarakat Madani,* Jurnal Ilmu-ilmu Sosial, UNISIA, (No.39/XXII/III/1999) -ISSN : 0215-1412, UII Yogyakarta.
--------, 1999, *Masyarakat Madani di Indonesia Sebuah Penjejakan Awal,* Jurnal Pemikiran Islam, PARAMADINA, Volume I, (Nomor 2), 1999 - ISSN 1410-8410, PARAMADINA, Jakarta.
--------, 1999, *Gerakan Keagamaan dan Penguatan Civil Society,* sebuah kata pengantar untuk: Asep Gunawan dan Dewi Nurjulianti, *Gerakan Keagamaan Dalam Penguatan Civil Society Analisis Perbandingan Visi dan Misi LSM dan Ormas Berbasis Keagamaan*, Jakarta: LSAF dengan TAF.
-------,1999, *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial,* Jakarta: LSAF,
--------, 2000, *Sejarah Agama dan Masyaraat Madani,* dalam Widodo Usman, dkk., [Editor], *Membongkar "Mitos" Masyarakat Madani,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

Rahman, Fazlur, 1985, *Islam dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual,* Terj. Ahsin Mohammad, Bandung: Pustaka.
--------,1997, *Islam*, Terj., Ahsin Mohammad, Cet.III, Bandung: Pustaka.

Rahman, Musthofa, *Pendidikan Islam dalam Perspektif al-Qur'an, dalam buku: Paradigma Pendidikan Islam*, Editor: Ismail SM, dkk., 2001, Cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rais, M. Amin, 1995, *Kata Pengantar,* dalam: John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan Ensiklopedi Maslah-masalah*, terj. Machnun Husein, Cet.V, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Riwukaho, J., 1996, *Kendala-kendala dan Prospek Penyelengaraan Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II,* Jurnal Ilmu Pemerintahan.

Rosdijanah, Andi, 1995, "*Butir-Butir Pengarahan Dirjen Bimbaga Islam",* pada Acara Pelantihan Peningkatan Wawasan Ilmu Pengetahuan dan Kependidikan bagi Dosen Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum. Bandung, 11 September.

Rumtini dan Jiyono, 1999, "*Manajemen Berbasiskan Sekolah: Konsep dan Kemungkinan Strategi Pelaksanaanya di Indonesia",* Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan,Tahun ke-5 (No. 017), Juni 1999, Jakarta.

Sairin, Sjafri,1999, "*Masyarakat Madani Dan Tantangan Budaya"*, dalam: Taufik Abdullah, dkk., *Membangun Masyarakat Madani, Menuju Indonesia Baru Milenium Ke-3.*, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, Yogyakarta: Aditiya Media.

Salim, Abdur Rasyid Ibnu Abdul Azis, 1975, *At-tarbiyah al-Islamiyah wa Thuruq Tadrisha,* Kuwait: Darul Buhuts al-Ilmiyah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Salim, Emil, "*Prospek Ekonomi Politik",* makalah disampaikan pada Pertemuan Mempersiapkan Berdirinya "Partai Amanat Nasional" (PAN), Di Wisma Tempo, Mega Mendung Puncak, Bogor.

Sanaky, Hujair AH. 1999, *Studi Pemikiran Pendidikan Islam Modern*, Jurnal *Pendidikan Islam, Konsep dan Implementasi,* Volume V Th IV Agustus 1999, ISSN: 0853 – 7437, FIAI UII, Yogyakarta.

--------,2001, *Reformasi Pendidikan Suatu Keharusan Untuk Memasuki Milenium III, Suatu Renungan untuk Pendidikan Islam,* Jurnal Pendidikan Islam, *TA'DIB*, Nomo: 04, Maret ,ISSN 1401-6973, Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah, Palembang.

Santoso, Riyadi, 1999, *Pemerintahan Yang Bersih dan Masyarakat Madani*, Jurnal Cides Sintesis, (No. 2), th. 5.

Sarijo, Marwan, *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam,* CV.Amissco, Cet.Pertama, Jakarta.

Sa'ud, Udin S., 2002, "*Manajemen Berbasis Sekolah (School-Based Managemen) Sebagai Strategi Implementasi Desentralisasi Pengelolaan Pendidikan Dalam Rangka Otonomi Daerah*",Jurnal Administrasi Pendidikan, Jurusan

Satori, Djam'an, 2002, *Program Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah (Schol-Based Management),* dalam Jurnal Administrasi Pendidikan, Vol. I (Nomor I). Tahun 2002, Jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.

Schrieke, BJO, 1973, *Pergolakan Agama di Sumatera Barat,* terj. Soegarda Jakarta: Perbakawatja, Bharatara.

Shannon, 1978, *Gagasan Baru dalam Pendidikan*, Jakarta: Mutiara.

Shiddiqi, Nourouzzaman, 1996, *Jeram-jeram Peradaban Muslim,* Cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Shihabuddin,1989, *Prinsip-prinsip dan Metode Pendidikan Islam*, Bandung, Diponegoro.

Shihab, M. Quraish, 1997, *Tafsir al-Qur'an al-Karim, Tafsir atas Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu,* Cetakan Kedua, Bandung: Pustaka Hidayah.

Sjadzali, Munawir, 1995, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran,* Edisi Kelima, Jakarta: UI Press.

Sjalabi, Ahmad, 1973, *Sejarah Pendidikan Islam,* ahli bahasa, H.Muchtar Jahja dan M.Sanusi Latief, Cetakan Pertama, Jakarta: Bulan Bintang.

SM, Ismail – Abdul Mukti, [Editor], 2000, *Pendidikan Islam, Demokratisasi dan Masyarakat Madani,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

--------,2000, Signifikansi Peran Pesantren dalam Pengembangan Masyarakat Madani, dalam: Ismail SM dan Abdul Mukti [edi], Pendidikan Islam, Demokratisasi dan Masyarakat Madani, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

--------,dkk.[Edi] 2001, *Paradigma Pendidikan Islam*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo.

Steenbrink, Karel A., 1994, *Pesantren Madrasah Sekolah Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen*, Cet. Kedua, Jakarta: LP3ES,

Sudardja, Endang, 1984, *UUD RI '45 dalam Hubungan dengan Pendidikan Moral Pancasila*, Bandung: Ghalia Indonesia.

Sudiro, M. Irsyad, 1995, "*Pendidikan Agama dalam Mansyarakat Modern*", makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional *Revitalisasi Pendidikan Agama Luar Sekolah Dalam Masyarakat Modern*, Tgl. 30-31 Agustus , Cirebon.

Suhelmi, Ahmad, 1999, *Pemikiran Politik Barat, Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan,* Jakarta: Darul Falah.

Sukardja, Ahmad, 1995, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945, Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk*, Jakarta: UI-Press.

Sulaiman, Fathiyah Hasan, *Bahts fi 'L-Madzhab al-Tarbawy 'Inda 'L-Ghazaly,* Maktabah Nadhlah, Mesir, 1964., Terj., Ahmad Hakim dan M.Imam Aziz, 1986, *Konsep Pendidikan al-Ghazali*, Cet. I, Jakarta: P3M.

Supriyoko, Ki, 2000, *Lima Kebijakan Dasar Pendidikan*, Kedaulatan Rakyat, 7 Oktober, Yogyakarta.

Suradika, Agus, 2001, *Gerekan Muhammadiyah dan Proses Pemberdayaan Masyarakat Madani*.

Soedijarto, 1999, "*Memahami Arah Kebijakan GBHN 1999-2004 Tentang Pendidikan Sebagai Upaya Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan Membangun Peradaban Negara Bangsa Indonesia*", makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Mencari Paradigma Baru Sistem Pendidikan Nasional Menghadapi Milenium Ketiga, IPSI dan PRIMAGAMA, Yogyakarta, 9 November 1999.

Soekarno dan Ahmad Supardi,1990, *Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: Angkasa.

Soroyo, 1991, "*Antisipasi Pendidikan Islam dan Perubahan Sosial Menjangkau Tahun 2000*", dalam Muslih Usa, [Editor], *Pendidikan Islam di Indonesia antara Cita dan Fakta,* Yogyakarta: Tiara Wacana.

--------,1992, *Pendidikan Islam di Indonesia Merancang Masa Depan*, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial UNISIA, Nomor : 12. Tahun XIII Triwulam I, ISSN : 0215-1412, UII, Yogyakarta.

--------,1991, *Perbagai Persoalan Pendidikan; Pendidikan Nasional dan Pendidikan Islam di Indonesia,* Jurnal Pendidikan Islam, Kajian tentang Konsepo Pendidikan Islam, Problem dan Prospeknya, Volem 1 Tahun 1991, Fakultas Tarbiyah IAIN, Yogyakarta.

Suara Merdeka, 2001, *Maluku Pascakonflik Horizontal,* 21 Nopember, Form: http://www. suaramerdeka.com/ harian/ 0111/21/analisis1.htm., 31 Desember.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Sufyanto, 2001, *Masyarakat Tamaddun Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholish Madjid,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset dan LP2IF.

Sukanto,1985, *Nafsiologi, Suatu Pendekatan Alternatif atas Psikologi Integritas,* Press, Cet. Pertaama, Jakarta.

Supardi, dkk., 1994, *Setengah Abad UII Sejarah Perkembangan Universitas Islam Indonesia,* Yogyakarta: UII Press.

Surakhmad, Winarno, 2000, *Profesionalisme Dunia Pendidikan*, From: http://www. Bpk penabur.or.id/ kps-jkt/berita/200006/ artikel2.htm, Jakarta, tgl. 27 Mei 2002.

Susanto, 1999, *Pimpinan Milenium ke-3 Menyesuaikan Fenomena Global*, kolom Manager Suplemen HU Republika, Senin 13 September 1999.

Suwardi, 1999, *Demokratisasi Pendidikan dalam Pengajaran Pragmatik Sastra Sebagai Wahana Penciptaan "Masyarakat Madani"*, Cakrawala Pendidikan, Edisi Khusus, Mei. Th. XVIII, (No.2).

Suyata, 1998, *"Perbaikan Mutu Pendidikan Transformasi Sekolah dan Implikasi Kebijakan",* Pidato Dies, Disampaikan Pada Upacara Dies Natalis XXXIV IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan), 23 Mei 1998, Yogyakarta.

--------,2000, *"Menggunakan Secara Tepat dan Benar Analisis Konten dan Menghindari Kekeliruannya",* makalah disampaikan pada Pelatihan dan Pendidikan Teknik Analisis Penelitian Sosial Keagamaan, Magister Stusi Islam UII, Tgl. 4 Nopember 2000, Yogyakarta.

Suyanto, 1999, *"Paradigma Baru Sistem Pendidikan Nasional Abad 21",* makalah disampaikan pada Seminar Nasional Mencari Paradigma Baru Sistem Pendidikan Nasional Menghadapi Milenium Ketiga, ISPI dan Primagama, 9 November 1999, Yogyakarta.

-------- dan Djihad Hisyam, 2000, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.

Suryadi, K.,1999, *Demokratisasi Pendidikan Demokrasi, Mimbar Pendidikan*, Jurnal Pendidikan, (No.1) Th.XVIII.

Suryadi, A., dan H.A.R.Tilaar,1993, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Suryosubroto, B.,1983,*Beberapa Aspek Dasar-dasar Kependidikan*, Jakarta: PT. Bina Aksara.

Syafi'ie, Imam, 1999, *"Epistemologi Studi Keislaman Kajian Teologis dan Kependidikan",* makalah disampaikan dalam Studium General, Pembukaan Kuliah Umum, Institut Agama Islam Banten (IAIB), Tanggal, 7 September 1999, Serang.

--------,dkk., 2001, Transformasi Budaya Masyarakat Menuju Terciptanya Masyarakat Sipil, Studi Tentang Kesadaran Pluralitas dalam Pemberdayaan Masyarakat Bidang Politik, (Hasil Penelitian), Yogyakarta: Lembaga Penelitian UII.

--------,2001, *"Manajemen Pendidikan Islam Memasuki Milenium III"*, Jumal Pendidikan Islam *TA'DIB*, No. 04, Maret 2001, ISSN 1401 – 6973, Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Syamsuddin, 2001, [wawancara Kompas], *Akibat Tak Diminati Lulusan Madrasah, IAIN Buka Program Umum Tanpa Persiapan Memadai,* Kompas Cyber Media, 7 November 2001, Jakarta, From: http://www. kompas. com/ kompas-cetak/0111/07/ DIKBUD/ iain09.htm.

Syari'ati, Ali, 1982, *Tentang Sosiologi Islam,* Terj. Saifullah Mahyuddin, Yogyakarta: Ananda.

Syarief, Hidayat, 1999, *Paradigma Baru Pendidikan Membangun Masyarakat Madani*, Harian Surat Kabar RPUBLIKA, Tanggal, 30 Oktober 1999, Jakarta.

Syarif, M.M., *Muslim Thought,* Terj. Fuad M. Fachruddin, Diponegoro.tth.

Tafsir, Ahmad, 1999, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam,* Bandung: Remaja Rosdakarya.

--------, 1999, *Pendidikan Untuk Masa Depan*, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Luar Biasa Ilmu Pendidikan Islam Pada Institut Agama Islam Lathifah Mubarokiyah Pondok Pesantren Suryalaya, 5 September.

Taroepratjeka, 1996, *Pengembangan Pendidikan Tinggi dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua*, Makalah Seminar Temu Alumni IKIP, 18 Mei, Yogyakarta.

Tebba, Sudirman, 1985, *Dilema Pesantren, Belenggu Politik dan Pembaharuan Sosial, dalam Pergaulan Dunia Pesantren,* Jakarta: P3M.

Telah Kritis Paradigma Masyarakat Madani Prespektif Islam, From: http://www. angelfire. com/md/ alihsas/ madani.html.11 Maret.

Thaib, Dahlan dan Moh. Mahfud MD, 1984, *5 Windu UII Pertumbuhan dan Perkembangan Univesitas Islam Indonesia Yogyakarta 1945 - 1984,* Yogyakarta: Liberty Offset.

Thohari, Hamim, 2001, *Sifat-Sifat Dasar Madinah,* Majalah Suara Hidayatullah, From: http://www.hidayatullah.com/2001/06/kajut2.shtml., 7 Maret 2001.

Thoha, M. Chabib, 1995, "*Strategi Pendidikan Islam Menyongsong Abad XXI*", makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional Ilmu Pendidikan Islam, 31 Agustus s/d 1 September 1995, Cirebon.

Thoha, Miftah, 1999, "*Desentralisasi Pendidikan*", Jumal Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun ke-5 (No. 017), Juni 1999, Jakarta.

Tibim, Bassam, 1994, *Krisis Peradaban Islam Modem : Sebuah Kultur Praindustri dalam Era Ilmu pengetahuan dan Teknologi,* Terj. Yudian W. Asmin, Yogyakarta:Tiara Wacana.

Tilaar, H.A.R. 1994, *Manajemen Pendidikan Nasional, Kajian Pendidikan Masa Depan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

--------.1998, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Abad 21,* Cet. I, Magelang: Tera Indonesia.

--------,1999, *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia, Strategi Reformasi Pendidikan Nasional,* Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

--------,1999, *"Kajian Kritis Sistem Pendidikan Nasional"*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Mencari Paradigma Baru Pendidikan Nasional Memasuki Milenium III, ISPI dan Primagama, 9 November 1999, Yogyakarta.

--------,2000, *Paradigman Baru Pendidikan Nasional*, Cetakan Pertama, Jakarta:Rineka Cipta.

--------, *Kecenderungan-kecenderungan Transformasi Masyarakat Memasuki Abad ke-21*, From:http://www.bkppenabur.or.id/kps-jkt/berita/9906/artikel5.htm.

Tim Depag. RI, 1983, *Pedoman Pembinaan Pondok Pesantren*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam.

Tim Dosen IAIN Sunan Ampel Malang,1996, *Dasar-dasar Kependidikan Islam*, Surabaya: Karya Abditama.

Tim Dosen FIP-IKIP Malang,1987,*Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan*, Surabaya: Usaha Nasional.

Tim Penyusun Kamus, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudyaaan, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua,

Tuhuleley, Said, 1993, [Penyt.],*Permasalahan Abad XXI, Sebuah Agenda,* SIPRES, Yogyakarta.

Turner, Victor, 1977, *The Ritual Process: Structure and Anti-Structure*, Ithaca: Cornel University Press.

Umari, Akram Dhiyauddin, 1999, *Masyarakat Madani, Tinjauan Historie Kehidupan Zaman Nabi,* Jakarta: Gema Insani.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, *Sistem Pendidikan Nasional.*

Usa, Muslih, [Editor], 1991, *Pendidikan Islam di Indonesia antara Cita dan Fakta,* Cet.I, Yogyakarta: Tiara Wacana.

Usman, Husaini, 2001, *Menuju Masyarakat Madani Melalui Demokratisasi Pendidikan*, From: http://www.depdiknas. go.id/ Jurnal/ 28/ menuju_masyarakat_madani_ melalui.htm.tgl.11 September 2001.

Usman,Widodo, dkk., [Editor], 2000, *Membongkar "Mitos" Masyarakat Madani,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

Veizey, J., 1976, *Pendidikan di Dunia Modern*, Jakarta: Gunung Agung.

Wahid, Abdurrahman, 2001, [Prediden Republik Indonesia], *Pidato Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 7 Agustus 2000,* From: http://istana.ri.go.id/speech/ind/07 agustus00. htm, 4 Januari 2001.

Wibowo, Indiwan SW, 2001, *Peran Militer dalam "Civil Society"*, Harian Umum Suara Merdeka, From: http://www.suaramerdeka.com/harian/0101/08/analisis.htm. 26 Oktober 2001.

Wilardjo, L.,1998, *Paradigma Ekonomi*, Suara Pembaruan, 3 Juni 1998.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

W.J.S, Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka.

Yatim, Badri, 1999, *Sejarah Peradaban Islam, Dirasah Islamiyah II*, Cetakan Kesembilan Jakarta: RajaGrafindo.

Yunus, Mahmud, 1973, *Kamus Arab - Indonesia,* Jakarta: Yayasan Penyelenggaan Penterjemah/Penafsiran al-Qur'an.

--------,1979, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia,* Cetakan ke dua, Jakarta: Mutiara.

--------,1986, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung.

Zaini, Syahminan, 1986, *Prinsip-prinsip Dasar Konsep Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia.

Zamroni, 1997, *"Pembeharuan Pendidikan dan Penelitian Multidisiplin"*, makalah disampaikan pada Seminar Regional Pengembangan Budaya Penelitian Multidisiplin dan Antardisiplin, 19-20 Mei 1997, Yogyakarta.

--------,1999, *"Reformasi Pendidikan Dari Pondasi ke Aksi"*, Jurnal Pendidikan Islam, Konsep dan Implementasi, Jurusan Tarbiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam UII, Volume V TH IV Agustus 1999, ISSN:0853–7437, Yogyakarta.

--------,2000, *Paradigma Pendidikan Masa Depan*, Yogyakarta: Bigraf Publishing.

Zuchdi, Darmiyati, 1993, *Seri Metodologi Penelitian Panduan Penelitian Analisis Konten*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP.

Zuhairini,1992, *Sejarah Pendidikan Islam,* Cet. Ketiga, Jakarta: Bumi Aksara.

--------, dkk.,1995, *Filsafat Pendidikan Islam,* Cet. II, Jakarta: Bumi Aksara.

--------,1993, *Metodologi Pendidikan Agama*, Cet. Pertama, Solo:Ramadhani.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

LAMPIRAN

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

LAMPIRAN

Ayat-ayat Al-Qur'an	Terjemahan	Pada Hal.
1. Al-A'raaf (7): 148 وَٱتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنۢ بَعْدِهِۦ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُۥ خُوَارٌ ۚ أَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّهُۥ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ۘ ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُوا۟ ظَٰلِمِينَ	Seperginya Musa, kaummnya memujah anak sapi yang bersuara dan yang mereka bikin dari perhiasan mereka. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa sapi tak dapat diajak bicara dan tidak akan menunjukkan jalan kebaikan, Mereka mengambilnya sebagai sembahan, merekalah orang-orang yang zalim	207
2. Huud (11): 61 وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَٰلِحًا ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ ۖ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓا۟ إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّى قَرِيبٌ مُّجِيبٌ	Kepada Samud, Kami utus seudaranya Saleh. Ia berkata, "Hai kaumku sembahlah Allah, tidak ada tuhan yang layak disembah selain Dia. Dialah yang menciptakan kamu dari bumi dan Dialah yang menugaskan kamu memakmurkan bumi. Mintalah ampun dan bertobatlah kepada-Nya. Sungguh Tuhanku: Mahadekat lagi Maha Penerima doa".	207
3. Al-Anbiyaa (21): 8 وَمَا جَعَلْنَٰهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُوا۟ خَٰلِدِينَ	Kami tidak jadikan utusan-utusan itu jasmani yang tidak makan dan mereka pun tidak hidup kekal.	207
4. Al-Mu'minuun (23):12 وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن سُلَٰلَةٍ مِّن طِينٍ	Sesungguhnya telah ***Kami ciptakan manusia dari inti tanah.***	207 395
5. Ar-Rahman (55):14 خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ مِن صَلْصَٰلٍ كَٱلْفَخَّارِ	Ia ciptakan manusia dari tanah liat kering seperti tembikar.	207
6. As-Sajdah (32): 9 ثُمَّ سَوَّىٰهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِۦ ۖ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ وَٱلْأَفْـِٔدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ	Ia sempurnakan bentuknya dan ditiup ke dalamnya dari roh-Nya. Ia yang menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan dan hati, namun sedikit sekali nikmat Allah yang kamu syukuri.	207 395
7. Al-Hijr (15): 29 فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُوا۟ لَهُۥ سَٰجِدِينَ ﴿٢٩﴾	Ketika Aku menyempurnakan kejadiannya dan meniupkan roh dari Aku ke dalamnya, tundullah hormat kepadanya.	207 212 395

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ayat-ayat Al-Qur'an	Terjemahan	Pada Hal.
8. At-Tahrim (66): 12 وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ	Demikian juga perumpamaan Maryam anak perempuan Imran, yang telah menjaga kehormatannya lalu Kami tiupkan ke dalam rahimnya roh dari Kami, dan dia meyakini kebenaran kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitab-Nya. Dia seorang wanita yang sangat taat kepada Allah.	207 395
9. Al-Mujaadilah (58): 22 لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ	Tiada akan kau dapatkan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mencintai orang yang membangkang perintah Allah dan Rasulnya, meskipun mereka itu bapaknya atau anak-anaknya, atau saudaranya atau keluarganya dari pihak ayah. Pada hati orang-orang itu Allah menetapkan iman yang kokoh, lalu diperkuat dengan roh dari-Nya. Allah memasukkan mereka ke surga yang dihiasi oleh sungai-sungai yang mengalir. Meraka abadi di dalamnya. Allah rido terhadap mereka dan merekapun puas atas pahala Allah. Meraka itulah tentara Allah. Ketahuilah bahwa tentara Allahlah yang bakal menang.	207 212 395
10. Al-An'aam (6): 164. قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾	Katakanlah, "Apakah saya harus menyembah selain Allah sementara Allah adalah Tuhan segalanya? ***Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya.*** Dan setiap orang tidak dibebani dosa orang lain, kemudian kamu sekalian dikembalikan kepada Tuhanmu. Dan Tuhan akan memberitahukan tentang hal yang kamu perselisihkan.	208

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ayat-ayat Al-Qur'an	Terjemahan	Pada Hal.
11. Al-Baqarah (2): 31. وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنۢبِـُٔونِى بِأَسْمَآءِ هَٰٓؤُلَآءِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٣١﴾	***Allah mengajarkan kepada Adam segala nama benda, kemudian la menyodorkan kepada para malaikat. Firman-Nya, "Sesungguhnya kepada-Ku nama-nama itu kalau dugaanmu itu benar.***	209 232 397
12. Al-'Alaq (96): 2. خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾	***Dia telah menciptakan manusia dari gumpalan darah.***	210
13. Shaad (38): 72 فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُوا۟ لَهُۥ سَٰجِدِينَ ﴿٧٢﴾	Apabila telah Ku-sempurnakan kejadiannya dan Aku tiupkan dari roh-Ku ke dalamnya, hendaklah kamu sekalian tunduk sujud kepadanya.	212 397
14. An-Nahl (16): 78. وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنۢ بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْـًٔا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ وَٱلْأَفْـِٔدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾	Allah melahirkan kamu dari kandungan ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa, lalu ***Dia jadikan pendengaran, pengliharan, dan hati nurani, untuk kamu agar kamu mau bersyukur.***	217
15. Ar-Ruum (30):30. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾	Tegakkan dirimu pada agama dengan tulus dan mantap, ***agama yang cocok dengan fitrah manusia yang digariskan Allah.*** Tidak ada perubahan pada ketetapan-Nya. Itulah agama yang benar, namun kebanyakan orang tidak menyadari(QS.(30):30.)	223 301
16. Al-A'raaf (7): 179. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا ۖ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَآ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ كَٱلْأَنْعَٰمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْغَٰفِلُونَ ﴿١٧٩﴾	Kami sediakan Neraka Jahanam bagi kebanyakan jin dan manusia, ***mereka mempunyai hati tapi tidak digunakan untuk memahami, mempunyai mata tetapi tidak bisa meliat dengan jeli, mempunyai pendengaran*** tetapi tidak bisa ***mendengar dengan baik,*** mereka itu bagaikan ternak bahkan lebih sesat. Merekalah orang yang lalai (Q.S. (7): 179).	223

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA